



Republik Indonesia

LKPP **TAHUN 2017**

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

AUDITED



MEI 2018

LKPP TAHUN 2017

AUDITED

MEI 2018

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk melaksanakan amanat tersebut, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kami atas nama Pemerintah Republik Indonesia menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017.

LKPP Tahun 2017 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini terdiri dari 7 (tujuh) laporan, yaitu: (a) Laporan Realisasi APBN ; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP Tahun 2017 disampaikan terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk diperiksa. LKPP Tahun 2017 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*).

Sehubungan dengan penyajian LKPP Tahun 2017 dimaksud, berikut ini adalah ringkasan atas ketujuh laporan dalam LKPP Tahun 2017.

1. Laporan Realisasi APBN memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.666,37 triliun, atau 95,99 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.007,35 triliun, atau 94,10 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017, sehingga terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp340,97 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp366,62 triliun, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25,64 triliun.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama tahun 2017. Berdasarkan laporan tersebut, SAL awal tahun 2017 adalah sebesar Rp113,19 triliun. Setelah ditambah SiLPA tahun 2017 Rp25,64 triliun dan dikurangi penyesuaian SAL sebesar Rp0,48 triliun, maka saldo akhir SAL pada akhir tahun 2017 adalah Rp138,35 triliun.
3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah per 31 Desember 2017. Neraca tersebut menginformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp5.947,83 triliun dan Kewajiban sebesar Rp4.407,05 triliun. Dengan demikian, Ekuitas Pemerintah pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp1.540,78 triliun.
4. Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya, yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Operasional tersebut menginformasikan bahwa Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp1.806,52 triliun, dan Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp1.991,67 triliun. Di samping itu

terdapat surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp72,16 triliun. Berdasarkan data di atas, defisit LO adalah sebesar Rp112,98 triliun.

5. Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara untuk periode yang berakhir pada Tahun 2017. Laporan Arus Kas tersebut menginformasikan nilai saldo awal kas adalah sebesar Rp174,07 triliun serta terdapat kenaikan kas setelah koreksi pembukuan pada tahun berjalan sebesar Rp34,42 triliun, sehingga terdapat total Saldo Akhir Kas sebesar Rp208,50 triliun. Saldo Akhir Kas ini kemudian diperhitungkan dengan posisi Kas dan Setara Kas pada Neraca, yakni: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan, Kas pada BLU yang Telah Didepositokan, Kas BLU yang Belum Disahkan, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya, dan Kas Transito Kiriman Uang, sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp134,57 triliun.
6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas selama tahun 2017. Laporan Perubahan Ekuitas tersebut menginformasikan bahwa ekuitas awal tahun 2017 adalah sebesar Rp1.566,93 triliun, Defisit-LO sebesar Rp112,98 triliun, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp84,97 triliun. Di samping itu, juga diperhitungkan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,18 triliun, dan Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas sebesar Rp1,67 triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah sebesar Rp1.540,78 triliun.
7. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan maksud agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang memadai tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Pemerintah secara konsisten akan terus berupaya meningkatkan kualitas LKPP dan pengelolaan keuangan negara, dengan melakukan perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, khususnya yang masih mendapat opini audit “Wajar Dengan Pengecualian” atau “Tidak Memberikan Pendapat”.
2. Melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di kementerian negara/lembaga.
3. Melaksanakan pembinaan secara intensif terkait Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada seluruh instansi Pemerintah.
4. Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi.
5. Mengimplementasikan *single database* dalam penyusunan LKKL melalui Aplikasi E-Rekon-LK untuk meminimalkan terjadinya suspen (transaksi dalam konfirmasi).
6. Menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyusun *action plan* yang dilengkapi dengan *timeline* penyelesaian yang jelas, melakukan pembahasan dengan BPK, serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik.
7. Menerapkan dan menyusun statistik keuangan pemerintah (*Government Finance Statistics*), yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah, sehingga dapat menyajikan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antarnegara.

Pemerintah mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga kualitas LKPP di masa mendatang akan menjadi semakin baik. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 21 Mei 2018

a.n Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan




Sri Mulyani Indrawati 

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2017 (*AUDITED*)

Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017, Pemerintah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 (*Audited*). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

LKPP Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp1.666,37 triliun atau 95,99 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp2.007,35 triliun atau 94,10 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.265,35 triliun atau 92,57 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp741,99 triliun atau 96,82 persen dari APBN-P.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp340,97 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto adalah sebesar Rp366,62 triliun atau 92,29 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25,64 triliun. Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun):

Uraian	Realisasi Anggaran TA 2017 (<i>Audited</i>)			Realisasi TA 2016
	Anggaran	Realisasi	%	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.736,06	1.666,37	95,99	1.555,93
Belanja Negara:	2.133,29	2.007,35	94,10	1.864,27
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.366,95	1.265,35	92,57	1.154,01
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	766,33	741,99	96,82	710,25
Surplus (Defisit) Anggaran	(397,23)	(340,97)	85,84	(308,34)
Pembiayaan Neto	397,23	366,62	92,29	334,50
SiLPA (SiKPA)		25,64		26,16

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp113,19 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp25,64 triliun dan Penyesuaian SAL adalah sebesar minus Rp0,48 triliun, sehingga Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2017 adalah sebesar Rp138,35 triliun.

Ringkasan Laporan Perubahan SAL sampai dengan Tahun 2017 adalah sebagai berikut (Rp triliun).

No	Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
1	SAL awal	113,19	107,91
2	Penyesuaian SAL Awal	-	0,35
3	Penggunaan SAL	-	(19,01)
4	SiLPA/SiKPA	25,64	26,16
5	Penyesuaian SAL	(0,48)	(2,22)
6	SAL akhir	138,35	113,19

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017.

Jumlah Aset per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.947,83 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp336,81 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp2.604,04 triliun, Aset Tetap sebesar Rp2.034,80 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp47,81 triliun, dan Aset Lainnya sebesar Rp924,36 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.407,05 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp593,44 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp3.813,60 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.540,78 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun).

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Aset		
Aset Lancar	336,81	304,61
Investasi Jangka Panjang	2.604,04	2.411,82
Aset Tetap	2.034,80	1.921,79
Piutang Jangka Panjang	47,81	47,12
Aset Lainnya	924,36	771,52
Total Aset	5.947,83	5.456,88
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	593,44	387,44
Kewajiban Jangka Panjang	3.813,60	3.502,50
Total Kewajiban	4.407,05	3.889,94
Ekuitas	1.540,78	1.566,93
Total Kewajiban dan Ekuitas	5.947,83	5.456,88

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan mulai periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Dari Kegiatan Operasional Pemerintah, Pendapatan-LO adalah sebesar Rp1.806,52 triliun, Beban sebesar Rp1.991,67 triliun, sementara surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp72,16 triliun, sehingga Defisit-LO sebesar Rp112,98 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut (Rp triliun).

No	Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
1	Pendapatan-LO	1.806,52	1.664,65
2	Beban	(1.991,67)	(1.872,33)
3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	72,16	67,95
4	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-
5	Surplus/(Defisit) LO	(112,98)	(139,72)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017.

Saldo Kas per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp174,07 triliun. Selama TA 2017 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp132,51 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp268,12 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp426,28 triliun, kenaikan kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp9,37 triliun dan penurunan kas karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,58 triliun. Dengan demikian, saldo akhir kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 menjadi Rp208,50 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Kas Pemerintah Lainnya yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp210,82 miliar, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp105,73 miliar, Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yang Sudah Disahkan sebesar Rp2,84 triliun, Kas pada BLU yang telah Didepositokan sebesar minus Rp12,20 triliun, Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar minus Rp7,39 miliar, Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar minus Rp65,21 triliun, dan Kas Transito sebesar Rp0,33 triliun sehingga saldo akhir Kas dan Setara Kas adalah sebesar Rp134,57 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut (Rp triliun).

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Saldo Awal Kas	174,07	192,28
Penyesuaian Saldo Awal	-	(4,52)
Saldo Awal Kas setelah Penyesuaian	174,07	187,76
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(132,51)	(139)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(268,12)	(258,15)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	426,28	423,32
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	9,37	(18,99)
Penggunaan SAL	-	(19,01)
Penyesuaian Pembukuan	(0,58)	(1,84)
Kenaikan (Penurunan) Kas	34,42	(13,68)
Saldo Akhir Kas	208,50	174,07
Saldo Kas Pemerintah Lainnya		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,21	0,26
Kas di Bendahara Penerimaan	0,10	0,13
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	2,84	3,18
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(12,20)	(3,92)
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	(0,0073)	0,0063
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(65,21)	-
Kas Transito (Kiriman Uang)	0,33	-
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	134,57	173,73

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan perubahan-perubahan dalam bentuk ekuitas yang masuk ke dalam Neraca per 31 Desember 2017.

Ekuitas awal adalah sebesar Rp1.566,93 triliun, dikurangi defisit LO sebesar Rp112,98 triliun, ditambah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp84,97 triliun, ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0,18 triliun, dan ditambah Reklasifikasi kewajiban ke ekuitas sebesar Rp1,67 triliun, sehingga Ekuitas Akhir adalah Rp1.540,78 triliun.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut (Rp triliun).

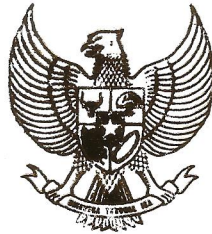
No.	Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	Ekuitas Awal	1.566,93	1.669,79
2	Penyesuaian Ekuitas Awal	-	(1,53)
3	Ekuitas Awal setelah Penyesuaian	1.566,93	1.668,26
4	Surplus/Defisit LO	(112,98)	(139,72)
5	Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	84,97	37,07
6	Transaksi Antar Entitas	0,18	(0,072)
7	Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas	1,67	1,39
8	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(26,14)	(101,32)
9	Ekuitas Akhir	1.540,78	1.566,93

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2017 (*Audited*) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua.

LKPP Tahun 2017' (*Audited*) merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Jakarta, 21 Mei 2018

a.n. Pemerintah Republik Indonesia,
Menteri Keuangan



Sri Mulyani Indrawati 

HALAMAN OPINI



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Neraca per tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan Pemerintah

untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Pusat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian Pertahanan

BPK menekankan pada Catatan B.3 angka 7 dan D.2.35 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan menerapkan dua mekanisme pelaksanaan anggaran secara khusus yang berbeda dengan Kementerian/Lembaga lainnya. *Pertama*, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2017 meliputi DIPA Petikan Satuan Kerja Pusat sebesar Rp73,98 triliun dan DIPA petikan satuan kerja Daerah sebesar Rp49,97 triliun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 2013 perlu diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Pelaksanaan mekanisme DIPA Pusat pada Kementerian Pertahanan berdampak pada kompleksitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kementerian Pertahanan. *Kedua*, Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2017 disajikan sebesar Rp9,41 triliun dan diantaranya sebesar Rp8,72 triliun merupakan saldo dana yang telah dinyatakan definitif sebagai pengeluaran belanja yang bersumber dari DIPA Petikan Satker Pusat dari kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran. Dana tersebut ditampung di rekening *escrow* atas nama pihak rekanan. Kondisi tersebut sebagai implikasi penerapan Peraturan Panglima (Perpang) TNI Nomor 33 Tahun 2017 sebagai pengganti Perpang TNI Nomor 23 Tahun 2012 terkait langkah-langkah akhir tahun yang perlu diselaraskan dengan PMK Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

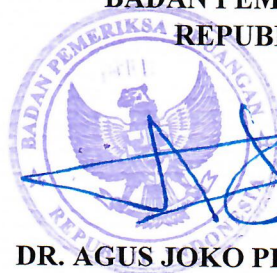
Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 64b/LHP/XV/05/2018 dan Nomor 64c/LHP/XV/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 21 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota



DR. AGUS JOKO PRAMONO, M.ACC., AK., CA. 
Register Negara Akuntan No. RNA 72

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN.....	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
I. LAPORAN REALISASI APBN	1
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	4
III. NERACA	5
IV. LAPORAN OPERASIONAL.....	8
V. LAPORAN ARUS KAS	10
VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	12
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
A. PENJELASAN UMUM	13
A.1. DASAR HUKUM	13
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO.....	13
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	46
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	51
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN.....	69
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN.....	69
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN.....	70
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	94
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	98
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	106
D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM.....	106
D.2 PENJELASAN PER POS NERACA.....	107
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	222
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL.....	222
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL.....	222
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	250
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	250
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	253
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	271
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	288
INDEKS SINGKATAN	294

DAFTAR TABEL

1	Perkembangan NPL dan CAR Bulanan Tahun 2017.....	23
2	Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 dan 2017.....	27
3	Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016 dan 2017.....	28
4	Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 dan 2017.....	28
5	Ringkasan APBNP Tahun 2016 dan APBNP Tahun 2017.....	32
6	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2017 dan 2016.....	34
7	Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2016.....	37
8	Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2016 dan 2017.....	37
9	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2017	38
10	Pagu dan Realisasi DAK Fisik Bertahap Per Regional Tahun 2017.....	43
11	Pagu dan Realisasi Dana Desa Per Regional Tahun 2017.....	44
12	Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB Tahun 2017.....	45
13	Realisasi Pembiayaan Anggaran Tahun 2017.....	45
14	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2017 dan TA 2016.....	76
15	Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2017 dan 2016.....	102
16	Piutang Perpajakan per Jenis Pajak.....	114
17	Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Jenis Pajak.....	114
18	Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPKBT Terbit s.d. 31 Desember 2017.....	115
19	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2017 dan 2016.....	199

DAFTAR GRAFIK

1	Struktur PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2017.....	15
2	Struktur PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017.....	15
3	Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2017.....	16
4	Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017	16
5	Tren Laju Inflasi per Bulan Tahun 2016 dan 2017.....	17
6	Rata-Rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Bulanan Tahun 2016 dan 2017.....	18
7	Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Bulanan Tahun 2017.....	20
8	Tren Cadangan Devisa Bulanan pada Tahun 2017 dan Tahun 2016.....	20
9	Tren Laju IHSG (<i>End of Period</i>) Bulanan Tahun 2016-2017.....	22
10	Realisasi Rata-rata <i>Lifting</i> Migas Bulanan Tahun 2017.....	23
11	Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Tahun 2016 dan 2017.....	24
12	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2013-2017.....	25
13	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia	26
14	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Indonesia tahun 2010-2017.....	26
15	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tahun 2010-2017.....	27
16	Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2017 dan 2016.....	35
17	Porsi Alokasi Belanja Pemerintah Pusat Pada APBNP 2016 dan APBNP 2017.....	38
18	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2017.....	39
19	Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNPB TA 2012 - 2017.....	69
20	Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2012- 2017.....	70
21	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2017.....	70
22	Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2017.....	76
23	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2017.....	77
24	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2017.....	77

25	Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017	83
26	Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2013 – 2017	106
27	Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d. Tahun 2017	222
28	Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2017 dan Tahun 2016	223
29	Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2017	224
30	Komposisi Beban Operasional Tahun 2017	232
31	Komposisi Beban Transfer Tahun 2017	239
32	Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas	252

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2017 (Audited)			TA 2016 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara	B.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1.1	1.472.709.861.675.000	1.343.529.843.798.510	91,23%	1.284.970.139.927.481
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	1.436.730.861.675.000	1.304.316.269.228.039	90,78%	1.249.499.479.450.431
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	35.979.000.000.000	39.213.574.570.471	108,99%	35.470.660.477.050
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	260.242.149.353.000	311.216.253.857.085	119,59%	261.976.344.626.007
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	95.643.149.163.000	111.132.042.413.912	116,19%	64.901.905.473.366
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	41.000.000.000.000	43.904.217.111.673	107,08%	37.133.172.874.077
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	85.057.560.000.000	108.834.561.775.552	127,95%	117.995.377.742.599
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	38.541.440.190.000	47.345.432.555.948	122,84%	41.945.888.535.965
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	3.108.138.887.000	11.629.815.002.490	374,17%	8.987.666.279.302
Jumlah Pendapatan Negara (A.I + A.II + A.III+A.IV)		1.736.060.149.915.000	1.666.375.912.658.085	95,99%	1.555.934.150.832.790
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	1.366.956.572.312.000	1.265.359.428.745.519	92,57%	1.154.018.222.035.109
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	343.655.516.071.000	312.728.756.432.452	91,00%	305.141.512.411.113
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	294.715.715.955.000	291.459.133.344.592	98,90%	259.646.886.544.136
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	226.143.729.411.000	208.656.670.235.846	92,27%	169.474.230.324.273
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	219.196.342.938.000	216.568.022.521.345	98,80%	182.761.270.344.927
5. Subsidi	B.2.2.1.5	168.876.783.743.000	166.401.103.129.178	98,53%	174.226.870.171.507
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	5.532.197.004.000	5.445.667.259.156	98,44%	7.129.917.667.130
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	58.962.009.059.000	55.297.216.841.355	93,78%	49.613.539.133.477
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	49.874.278.131.000	8.802.858.981.595	17,65%	6.023.995.438.546
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	B.2.2.2	766.339.327.708.000	741.992.381.461.367	96,82%	710.256.869.859.856
Transfer ke Daerah	B.2.2.2.1	706.339.327.708.000	682.225.803.933.964	96,59%	663.577.540.680.490
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1.1	678.596.035.118.000	654.482.511.343.964	96,45%	639.765.656.796.490
Dana Transfer Umum	B.2.2.2.1.1.1	493.959.535.082.000	486.814.511.890.637	98,55%	475.895.780.246.067
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1.1.1	95.377.220.334.000	88.232.197.142.637	92,51%	90.534.933.146.067
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.1.1.2	398.582.314.748.000	398.582.314.748.000	100,00%	385.360.847.100.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2017 (Audited)			TA 2016 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
Dana Transfer Khusus	B.2.2.2.1.1.2	184.636.500.036.000	167.667.999.453.327	90,81%	163.869.876.550.423
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.1.1.2.1	69.531.500.436.000	62.104.230.254.352	89,32%	75.207.496.115.489
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.1.1.2.2	115.104.999.600.000	105.563.769.198.975	91,71%	88.662.380.434.934
2. Dana Insentif Daerah	B.2.2.2.1.2	7.500.000.000.000	7.500.000.000.000	100,00%	5.000.000.000.000
3. Dana Keistimewaan DIY	B.2.2.2.1.3	800.000.000.000	800.000.000.000	100,00%	547.450.000.000
4. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.1.4	19.443.292.590.000	19.443.292.590.000	100,00%	18.264.433.884.000
Dana Desa	B.2.2.2.2	60.000.000.000.000	59.766.577.527.403	99,61%	46.679.329.179.366
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		2.133.295.900.020.000	2.007.351.810.206.886	94,10%	1.864.275.091.894.965
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(397.235.750.105.000)	(340.975.897.548.801)	85,84%	(308.340.941.062.175)
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	412.655.556.216.000	386.890.801.363.738	93,76%	344.922.873.464.953
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	-	-	-	19.011.062.000.000
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	4.047.359.878.000	4.816.530.007.277	119,00%	6.780.671.045.834
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	300.000.000.000	359.085.434.905	119,70%	551.711.141.227
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	467.314.304.000.000	441.826.322.911.086	94,55%	407.259.356.418.288
Penerimaan Surat Berharga Negara			726.270.982.344.698		660.799.262.147.460
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(284.444.659.433.612)		(253.539.905.729.172)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	1.733.027.719.000	648.291.571.852	37,41%	1.051.559.354.512
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		2.500.000.000.000	1.305.055.202.247	52,20%	1.334.733.611.736
Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri		(766.972.281.000)	(656.763.630.395)	85,63%	(283.174.257.224)
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(49.233.761.381.000)	(49.254.054.561.382)	100,04%	(84.079.812.494.908)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(1.005.374.000.000)	(1.005.374.000.000)	100,00%	(651.674.000.000)
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(10.500.000.000.000)	(10.500.000.000.000)	100,00%	(5.000.000.000.000)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(15.419.806.111.000)	(20.266.979.216.895)	131,43%	(10.419.533.613.393)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	57.500.276.256.000	51.726.855.339.157	89,96%	63.424.377.426.272
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	20.100.000.000.000	20.947.967.337.503	104,22%	35.324.945.886.041

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2017 <i>(Audited)</i>			TA 2016 <i>(Audited)</i>
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	37.400.276.256.000	30.778.888.001.654	82,30%	28.099.431.540.231
2. Penerusan Pinjaman	B.2.4.2.2	(7.716.097.267.000)	(6.868.916.465.167)	89,02%	(5.117.915.204.933)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(65.203.985.100.000)	(65.124.918.090.885)	99,88%	(68.725.995.834.732)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		397.235.750.105.000	366.623.822.146.843	92,29%	334.503.339.851.560
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA) (D - C)	B.2.5		25.647.924.598.042		26.162.398.789.385

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun Anggaran 2017	Tahun Anggaran 2016
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	C.1	113.193.835.264.285	107.913.549.522.565
B. Penyesuaian Awal Saldo Anggaran Lebih	C.2	-	354.737.335.464
Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian Awal		113.193.835.264.285	108.268.286.858.029
C. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	C.3	-	(19.011.062.000.000)
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL		113.193.835.264.285	89.257.224.858.029
D. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.4	25.647.924.598.042	26.162.398.789.385
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.I)		138.841.759.862.327	115.419.623.647.414
E. Penyesuaian SAL			
1. Penyesuaian Pembukuan	C.5	(526.298.971.307)	(1.842.191.811.527)
2. Penyesuaian Lain-lain	C.6	37.554.962.578	(383.596.571.602)
Total Penyesuaian SAL (A.II)		(488.744.008.729)	(2.225.788.383.129)
F. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I + A.II)	C.7	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285

NERACA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas:			
Rekening Kas BUN di BI	D.2.1	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.2	3.905.763.616.747	1.538.381.222.069
Rekening Kas di KPPN	D.2.3	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Kas dalam Transito	D.2.4	330.588.755.619	(11.620.016.100)
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.5	210.828.164.140	262.946.369.485
Kas di Bendahara Penerimaan	D.2.6	105.738.412.756	134.046.873.960
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.7	7.680.332.290.094	6.534.321.641.665
Kas pada BLU	D.2.8	28.772.719.623.601	28.520.592.254.174
Jumlah Kas dan Setara Kas		134.575.579.715.425	119.947.730.053.164
Uang Muka dari Rekening BUN	D.2.9	38.165.547.963	72.762.369.482
Investasi Jangka Pendek	D.2.10		
Investasi Jangka Pendek BLU		12.204.408.488.386	3.925.795.406.430
Bagian Lancar Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah Investasi Jangka Pendek		12.204.408.488.386	3.925.795.406.430
Belanja Dibayar Dimuka, Uang Muka Belanja	D.2.11	17.261.771.032.885	9.483.198.832.174
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	D.2.12	576.867.095.851	315.266.960.092
Piutang:			
Piutang Perpajakan	D.2.13	58.621.958.896.480	105.656.377.094.983
Piutang Bukan Pajak	D.2.14	158.620.573.008.549	157.317.644.684.473
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	D.2.15	9.689.533.832	11.333.345.828
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	D.2.16	134.439.614.178	144.168.549.546
Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	D.2.17	22.591.650.468.443	7.289.654.233.165
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.18	1.086.601.779.631	-
Piutang dari Kegiatan BLU	D.2.19	6.429.911.707.728	5.321.939.368.267
Piutang PFK	D.2.20	4.001.304	5.956.960
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	D.2.21	776.236.492.092	573.849.480.773
Jumlah Piutang (Bruto)		248.271.065.502.237	276.314.972.713.995
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	D.2.22	(160.417.250.319.840)	(185.756.595.265.767)
Jumlah Piutang (Bersih)		87.853.815.182.397	90.558.377.448.228
Persediaan	D.2.23	84.301.758.170.225	80.306.059.604.541
Persediaan yang Belum Diregister		-	2.582.489.071
Jumlah Aset Lancar		336.812.365.233.132	304.611.773.163.182
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	D.2.24	34.757.069.042.734	33.669.878.397.728
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.25	(823.745.637.784)	(662.475.190.133)
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)		33.933.323.404.950	33.007.403.207.595
Investasi Non Permanen Lainnya	D.2.26	4.132.872.181	151.813.406.601
Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	D.2.27	(4.132.872.181)	(4.281.153.081)
Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya (Bersih)		-	147.532.253.520
Jumlah Investasi Non Permanen		33.933.323.404.950	33.154.935.461.115
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	D.2.28	2.133.750.339.987.427	2.027.471.536.964.905
Investasi Permanen BLU	D.2.29	8.325.008.679	8.160.316.474
Investasi Permanen Lainnya	D.2.30	436.354.324.393.637	351.189.666.923.549
Jumlah Investasi Permanen		2.570.112.989.389.743	2.378.669.364.204.928
Jumlah Investasi Jangka Panjang		2.604.046.312.794.693	2.411.824.299.666.043

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Aset Tetap	D.2.31		
Tanah		1.037.757.720.329.050	1.014.770.924.509.309
Peralatan dan Mesin		519.896.090.337.204	429.336.179.594.261
Gedung dan Bangunan		275.152.781.045.431	248.289.310.177.760
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		681.081.175.258.573	606.677.449.768.757
Aset Tetap Lainnya		51.165.291.629.744	58.830.898.663.776
Konstruksi Dalam Pengerjaan		121.959.328.341.308	119.108.395.644.759
Jumlah Aset Tetap (Bruto)		2.687.012.386.941.310	2.477.013.158.358.622
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.32	(652.208.833.012.249)	(555.218.820.789.172)
Jumlah Aset Tetap		2.034.803.553.929.061	1.921.794.337.569.450
Piutang Jangka Panjang	D.2.33		
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran		104.817.554.622	117.736.454.668
Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		261.894.714.759	177.308.644.926
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman		47.184.454.676.040	60.964.713.477.332
Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah		775.312.000.000	1.842.224.000.000
Piutang Jangka Panjang Lainnya		2.580.014.152.770	2.918.866.799.984
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		50.906.493.098.191	66.020.849.376.910
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	D.2.34	(3.096.044.947.048)	(18.891.969.710.244)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		47.810.448.151.143	47.128.879.666.666
Aset Lainnya	D.2.35		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		140.933.161.376.717	133.986.958.084.243
Aset Tidak Berwujud		31.293.091.131.831	24.269.238.842.638
Dana yang Dibatasi Penggunaannya		259.379.354.966.485	214.185.677.265.195
Dana Penjaminan		3.327.794.435.749	593.487.374
Dana Kelolaan BLU		45.821.116.060.256	21.032.093.463.366
Aset KKKS		489.508.659.091.683	416.995.629.577.966
Aset Eks BPPN		2.574.749.283.103	2.543.920.246.320
Aset Lain-lain		167.431.643.860.809	128.875.351.921.271
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		15.591.513.780.723	14.102.926.289.993
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		1.155.861.083.987.356	955.992.389.178.366
Amortisasi Aset Tak Berwujud	D.2.36	(10.072.629.035.983)	(7.295.717.966.038)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	D.2.36	(221.423.780.525.753)	(177.174.396.032.052)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		924.364.674.425.620	771.522.275.180.276
JUMLAH ASET		5.947.837.354.533.649	5.456.881.565.245.617
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	D.2.37	4.505.640.401.487	5.301.758.765.389
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.38	44.438.234.758.803	36.134.167.737.437
Utang Biaya Pinjaman	D.2.39	57.638.432.861.401	52.125.297.935.737
Utang Subsidi	D.2.40	32.192.914.590.833	2.576.637.802.426
Utang Transfer	D.2.41	26.096.171.127.047	27.295.376.677.939
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.42	272.701.715.607.467	181.089.944.300.968
<i>Unamortized Discount</i>		(52.370.697.000)	(1.394.289.000)
<i>Unamortized Premium</i>		34.999.374.000	96.427.268.000
Utang SBN Jangka Pendek	D.2.43	124.497.290.000.000	48.740.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(1.654.961.103.000)	(780.030.144.000)
<i>Unamortized Premium</i>		-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	D.2.44	17.452.254.907.564	21.105.615.601.681
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.45	15.549.048.517.692	13.683.518.972.548
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.46	33.564.572.441	834.208.053

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Utang Jangka Pendek Lainnya	D.2.47	16.494.539.212	76.693.939.958
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		593.449.429.457.947	387.444.848.777.136
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	D.2.48	4.414.348.818.183	4.350.662.878.199
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	D.2.49	2.871.222.232.762.317	2.570.709.481.830.380
<i>Unamortized Discount</i>		(20.297.983.982.000)	(12.141.102.324.000)
<i>Unamortized Premium</i>		37.427.442.288.000	27.058.952.341.000
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.50	53.890.489.260.000	46.782.035.830.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.51	9.657.081.539.263	15.618.826.539.263
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.52	160.704.149.324.311	132.925.441.051.110
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.53	28.415.009.897.486	53.317.878.872.334
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		3.145.432.769.907.560	2.838.622.177.018.286
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	D.2.54	668.147.269.113.375	663.859.199.798.301
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.55	24.229.125.827	23.587.645.245
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		668.171.498.239.202	663.882.787.443.546
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		3.813.604.268.146.762	3.502.504.964.461.832
JUMLAH KEWAJIBAN		4.407.053.697.604.709	3.889.949.813.238.968
EKUITAS	D.2.56	1.540.783.656.928.940	1.566.931.752.006.649
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.947.837.354.533.649	5.456.881.565.245.617

LAPORAN OPERASIONAL

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2017 (Audited)	2016 (Audited)	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL	E.2.1				
PENDAPATAN OPERASIONAL	E.2.1.1				
PENDAPATAN PERPAJAKAN	E.2.1.1.1				
Pendapatan Pajak Penghasilan	E.2.1.1.1.1	662.417.200.380.162	662.897.745.520.696	(480.545.140.534)	(0,07%)
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	E.2.1.1.1.2	479.591.110.489.748	412.513.505.989.075	67.077.604.500.673	16,26%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	E.2.1.1.1.3	17.129.686.745.834	19.279.436.983.667	(2.149.750.237.833)	(11,15%)
Pendapatan Cukai	E.2.1.1.1.4	153.286.335.416.261	143.491.380.633.046	9.794.954.783.215	6,83%
Pendapatan Pajak Lainnya	E.2.1.1.1.5	11.065.264.993.893	14.438.834.522.693	(3.373.569.528.800)	(23,36%)
Pendapatan Bea Masuk	E.2.1.1.1.6	35.054.329.773.200	31.905.961.605.581	3.148.368.167.619	9,87%
Pendapatan Bea Keluar	E.2.1.1.1.7	4.544.847.292.042	3.010.424.441.356	1.534.422.850.686	50,97%
Pendapatan Pajak Lain-lain	E.2.1.1.1.8	33.846.372.448	(2.591.756.597)	36.438.129.045	(1405,92%)
Jumlah Pendapatan Perpajakan		1.363.122.621.463.588	1.287.534.697.939.517	75.587.923.524.071	5,87%
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	E.2.1.1.2				
Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1.2.1	135.324.531.870.897	89.704.805.367.625	45.619.726.503.272	50,86%
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	E.2.1.1.2.2	137.711.638.621.387	129.440.326.195.705	8.271.312.425.682	6,39%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.1.2.3	100.052.858.157.571	102.129.897.196.139	(2.077.039.038.568)	(2,03%)
Pendapatan Badan Layanan Umum	E.2.1.1.2.4	48.206.459.097.560	43.479.359.963.261	4.727.099.134.299	10,87%
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		421.295.487.747.415	364.754.388.722.730	56.541.099.024.685	15,50%
PENDAPATAN HIBAH					
Pendapatan Hibah	E.2.1.1.3	22.102.029.338.827	12.367.365.185.655	9.734.664.153.172	78,71%
Jumlah Pendapatan Hibah		22.102.029.338.827	12.367.365.185.655	9.734.664.153.172	78,71%
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		1.806.520.138.549.830	1.664.656.451.847.902	141.863.686.701.928	8,52%
BEBAN OPERASIONAL	E.2.1.2				
Beban Pegawai	E.2.1.2.1	313.570.939.079.330	309.722.353.734.438	3.848.585.344.892	1,24%
Beban Persediaan	E.2.1.2.2	26.506.371.268.281	26.135.101.551.288	371.269.716.993	1,42%
Beban Barang dan Jasa	E.2.1.2.3	143.272.384.828.489	138.649.541.418.029	4.622.843.410.460	3,33%
Beban Pemeliharaan	E.2.1.2.4	41.623.251.981.571	36.040.691.199.649	5.582.560.781.922	15,49%

URAIAN	Catatan	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		2017 (Audited)	2016 (Audited)	JUMLAH	%
Beban Perjalanan Dinas	E.2.1.2.5	34.884.409.891.254	34.422.142.054.918	462.267.836.336	1,34%
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	E.2.1.2.6	43.450.653.025.621	39.447.838.053.777	4.002.814.971.844	10,15%
Beban Bunga	E.2.1.2.7	217.040.353.670.203	189.923.429.054.649	27.116.924.615.554	14,28%
Beban Subsidi	E.2.1.2.8	167.834.411.964.126	163.883.662.035.641	3.950.749.928.485	2,41%
Beban Hibah	E.2.1.2.9	5.445.667.259.156	7.129.917.667.130	(1.684.250.407.974)	(23,62%)
Beban Bantuan Sosial	E.2.1.2.10	55.858.510.175.202	45.630.374.577.137	10.228.135.598.065	22,42%
Beban Transfer	E.2.1.2.11	735.149.293.850.265	686.802.250.757.309	48.347.043.092.956	7,04%
Beban Lain-lain	E.2.1.2.12	37.776.589.355.266	30.456.234.208.826	7.320.355.146.440	24,04%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.1.2.13	144.842.686.552.886	134.417.111.004.057	10.425.575.548.829	7,76%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.1.2.14	24.415.200.700.641	29.677.313.154.925	(5.262.112.454.284)	(17,73%)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		1.991.670.723.602.291	1.872.337.960.471.773	119.332.763.130.518	6,37%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(185.150.585.052.461)	(207.681.508.623.871)	22.530.923.571.410	(10,85%)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.2.2				
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	E.2.2.1				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.1	234.320.099.124	158.340.540.033	75.979.559.091	47,98%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.2.2.1.2	51.823.998.544.606	7.134.495.690.517	44.689.502.854.089	626,39%
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(51.589.678.445.482)	(6.976.155.150.484)	(44.613.523.294.998)	639,51%
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	E.2.2.2				
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.1	5.631.521.326	1.504.971.876	4.126.549.450	274,19%
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.2.2.2	126.428.843.569	34.690.847.305	91.737.996.264	264,44%
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		(120.797.322.243)	(33.185.875.429)	(87.611.446.814)	264,00%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E.2.2.3				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.1	192.808.566.996.268	143.538.220.475.826	49.270.346.520.442	34,33%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.2.3.2	68.930.322.334.684	68.572.358.599.020	357.963.735.664	0,52%
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		123.878.244.661.584	74.965.861.876.806	48.912.382.784.778	65,25%
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		72.167.768.893.859	67.956.520.850.893	4.211.248.042.966	6,20%
POS LUAR BIASA	E.2.3				
Pendapatan Luar Biasa	E.2.3.1	-	-		
Beban Luar Biasa	E.2.3.2	-	-		
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-		
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(112.982.816.158.602)	(139.724.987.772.978)	26.742.171.614.376	(19,14%)

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	F.2.1		
a. Pajak Penghasilan	F.2.1.1	646.793.472.957.381	666.212.388.011.659
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	F.2.1.2	480.724.607.483.756	412.213.453.510.472
c. Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.3	16.770.346.937.156	19.443.228.194.707
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	F.2.1.4	1.216.911.547	481.361.509
e. Cukai	F.2.1.5	153.288.149.392.121	143.525.035.262.959
f. Pajak Lainnya	F.2.1.6	6.738.475.546.078	8.104.893.109.125
g. Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.7	39.213.574.570.471	35.470.660.477.050
Total Penerimaan Perpajakan		1.343.529.843.798.510	1.284.970.139.927.481
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	F.2.2.1	111.132.042.413.912	64.901.905.473.366
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	F.2.2.2	43.904.217.111.673	37.133.172.874.077
c. PNBP Lainnya	F.2.2.3	108.635.073.191.043	117.853.947.375.104
d. Penerimaan Badan Layanan Umum	F.2.2.4	47.345.432.555.948	41.945.888.535.965
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		311.016.765.272.576	261.834.914.258.512
3. Penerimaan Hibah	F.2.3	11.629.815.002.490	8.987.666.279.302
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		1.666.176.424.073.576	1.555.792.720.465.295
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	F.2.4	312.728.756.432.452	305.141.512.411.113
2. Belanja Barang	F.2.5	291.459.133.344.592	259.646.886.544.136
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.6	216.568.022.521.345	182.761.270.344.927
4. Belanja Subsidi	F.2.7	166.401.103.129.178	174.226.870.171.507
5. Belanja Hibah	F.2.8	5.445.667.259.156	7.129.917.667.130
6. Belanja Bantuan Sosial	F.2.9	55.297.216.841.355	49.613.539.133.477
7. Belanja Lain-Lain	F.2.10	8.802.858.981.595	6.023.995.438.546
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.11	53.668.650.342.060	47.782.133.932.717
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.12	31.641.673.021.137	39.898.694.180.150
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.13	2.921.873.779.440	2.854.105.033.200
11. Dana Alokasi Umum	F.2.14	398.582.314.748.000	385.360.847.100.000
12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	F.2.15	62.104.230.254.352	75.207.496.115.489
13. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	F.2.16	27.743.292.590.000	23.811.883.884.000
14. Transfer Lainnya	F.2.17	105.563.769.198.975	88.662.380.434.934
15. Dana Desa	F.2.18	59.766.577.527.403	46.679.329.179.366
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		1.798.695.139.971.040	1.694.800.861.570.692
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(132.518.715.897.464)	(139.008.141.105.397)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.19	199.488.584.509	141.430.367.495
2. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.20	359.085.434.905	551.711.141.227
3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.21	-	1.401.910.000.000
4. Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.22	735.156.000.000	354.000.000.000
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		1.293.730.019.414	2.449.051.508.722
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Modal	F.2.23	208.656.670.235.846	169.474.230.324.273
2. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.24	10.500.000.000.000	5.000.000.000.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
3. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.25	5.600.000.000.000	4.295.659.000.000
4. Penyertaan Modal Negara	F.2.26	11.603.494.561.382	65.186.063.494.908
5. Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.27	33.055.934.000.000	16.651.674.000.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		269.416.098.797.228	260.607.626.819.181
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)		(268.122.368.777.814)	(258.158.575.310.459)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.28	727.576.037.546.945	681.145.057.759.196
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.29	51.726.855.339.157	63.424.377.426.272
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	F.2.30	4.081.374.007.277	6.426.614.583.893
4. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	F.2.31	-	56.461.941
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		783.384.266.893.379	750.996.106.231.302
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.32	285.101.423.064.007	253.823.079.986.396
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.33	65.124.918.090.885	68.725.995.834.732
3. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)	F.2.34	6.868.916.465.167	5.117.915.204.933
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		357.095.257.620.059	327.666.991.026.061
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)		426.289.009.273.320	423.329.115.205.241
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	F.2.35	(763.254.906.069)	(77.540.452.077)
2. Transito (Neto)	F.2.36	1.069.556.153.365	(28.137.726.635)
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	F.2.37	9.363.511.838.634	(18.940.432.916.227)
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	F.2.38	(298.353.410.242)	52.507.484.052
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		9.371.459.675.688	(18.993.603.610.887)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN		35.019.384.273.730	7.168.795.178.498
Penggunaan SAL		-	(19.011.062.000.000)
Koreksi Pembukuan		(589.976.797.589)	(1.842.191.811.530)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	F.1.2	34.429.407.476.141	(13.684.458.633.032)
SALDO AWAL KAS		174.076.715.164.142	192.284.513.472.831
Koreksi Saldo Awal		-	(4.523.339.675.749)
SALDO AWAL KAS setelah Koreksi	F.1.1	174.076.715.164.142	187.761.173.797.082
SALDO AKHIR KAS		208.506.122.640.283	174.076.715.164.050
Kas di Bendahara Pengeluaran		210.828.164.140	262.946.369.485
Kas di Bendahara Penerimaan		105.738.412.756	134.046.873.960
Kas Lainnya Dan Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan		2.845.838.264.767	3.183.362.352.006
Kas BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)		(12.204.408.488.386)	(3.925.795.406.430)
Kas BLU yang Belum Disahkan/Lainnya		(7.391.778.396)	6.325.360.244
Kas/Dana yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)		(65.211.736.255.835)	-
Kas Transito (Kiriman Uang)		330.588.756.091	-
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	F.1.3	134.575.579.715.420	173.737.600.713.315

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
EKUITAS AWAL	G.1	1.566.931.752.006.649	1.669.790.895.690.636
Penyesuaian Ekuitas Awal	G.1.1	-	(1.530.307.195.836)
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN		1.566.931.752.006.649	1.668.260.588.494.800
SURPLUS/(DEFISIT) LO	G.2	(112.982.816.158.602)	(139.724.987.772.978)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	G.3		
Penyesuaian Nilai Aset	G.3.1	11.292.013.385	-
Koreksi Kas	G.3.2	-	525.355.551.813
Koreksi Kas Dalam Transito	G.3.3	-	(5.814.671.707)
Penggunaan SAL	G.3.4	-	(19.011.062.000.000)
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga	G.3.5	-	284.602.526.705
Penyesuaian SiLPA	G.3.6	473.817.522.854	(1.560.393.916.008)
Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN	G.3.7	-	(87.937.257.364)
Koreksi Nilai Persediaan	G.3.8	5.823.271.175.506	(7.010.190.560.386)
Selisih Revaluasi Aset Tetap	G.3.9	-	1.177.063.117.956
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	G.3.10	76.515.960.269.354	8.492.525.680.556
Revaluasi Aset BUMN	G.3.11	(2.171.167.258.138)	74.621.739.602.006
Koreksi Lain-lain	G.3.12	4.317.975.497.496	(20.354.811.605.168)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS		84.971.149.220.457	37.071.076.468.403
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	184.315.553.360	(72.406.275.018)
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	G.5	1.679.256.307.076	1.397.481.091.442
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.6	(26.148.095.077.709)	(101.328.836.488.151)
EKUITAS AKHIR	G.7	1.540.783.656.928.940	1.566.931.752.006.649

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

A.2. KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN FISKAL/KEUANGAN

A.2.1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO GLOBAL DAN INDONESIA

Perekonomian Global Tahun 2017 diperkirakan tumbuh 3,8 persen

Pemulihan ekonomi global terus berlanjut terutama ditopang positifnya kinerja ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kawasan Eropa yang diikuti dengan naiknya harga komoditas. Berdasarkan *World Economic Outlook Update* bulan April 2018, Ekonomi global diperkirakan tumbuh 3,8 persen pada tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 3,2 persen. Dengan demikian, maka tahun 2017 menandai adanya momentum pembalikan arah pertumbuhan global, setelah sejak 2012 pertumbuhannya selalu berada di bawah 3,6 persen.

Pemulihan kondisi perekonomian dunia ini mendorong peningkatan permintaan global yang menyebabkan kenaikan aktivitas perdagangan internasional. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan *Purchasing Managers Index (PMI) Global* yang merefleksikan peningkatan permintaan ke depan, serta peningkatan *Baltic Dry Index* yang mengindikasikan kenaikan aktivitas transportasi perdagangan melalui laut selama 2016 – 2017.

Selanjutnya, seiring dengan kenaikan permintaan dan aktivitas perdagangan global, harga komoditas mulai membaik. Tercatat sepanjang tahun 2017 harga komoditas seperti minyak mentah (*Brent*) meningkat 23,2 persen, logam 24,9 persen, batu bara 38,9 persen, dan komoditas pangan 8,5 persen. Khusus pada komoditas minyak mentah dunia, kenaikan harga selain didorong oleh perbaikan permintaan, juga sebagai hasil dari kesepakatan negara OPEC dalam mengurangi produksi.

Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat masih berlanjut. Realisasi pertumbuhan perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2017 2,3 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 sebesar 1,5 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tersebut ditopang oleh

kenaikan belanja konsumsi, investasi dan net ekspor, namun demikian kontribusi tersebut diikuti dengan penurunan persediaan dan impor yang meningkat.

Dengan semakin solidnya indikator ekonomi AS, the FED telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali di tahun 2017 dengan total kenaikan 75 bps. The FED juga memberi sinyal bahwa di tahun 2018 akan kembali menaikkan suku bunganya. Tingkat pengangguran AS di 2017 sebesar 4,4 persen atau merupakan yang terendah sejak tahun 2000, dan inflasi di tahun 2017 mencapai 2,12 persen.

Sejalan dengan AS, ekonomi Eropa pulih cukup solid yang didukung oleh kinerja konsumsi, investasi dan ekspor. Perekonomian kawasan Eropa pada tahun 2017 tumbuh 2,3 persen (*yoy*). Meski mengalami perkembangan positif, Bank Sentral Eropa belum mengindikasikan langkah melakukan normalisasi kebijakan melalui kenaikan suku bunga. Saat ini ECB menempuh kebijakan pengurangan jumlah pembelian obligasi dari EUR60 miliar menjadi EUR30 miliar per bulan pada Januari 2017 hingga September 2018. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa stimulus kepada pasar mulai dikurangi dan pasar sudah mulai dapat tumbuh pasca krisis. Adapun langkah normalisasi kebijakan moneter melalui kenaikan bunga diperkirakan masih akan lama mengingat target inflasi di kawasan tersebut masih belum tercapai.

Sejalan dengan yang terjadi di AS dan Eropa, data ekonomi Jepang menunjukkan pertumbuhan yang positif di tahun 2017, meskipun pada Q4 2017 menunjukkan perlambatan. Pertumbuhan Ekonomi Jepang tahun 2017 sebesar 1,7 persen (*yoy*) lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi IMF (*World Economic Outlook update, January 2018*) sebesar 1,8 persen (*yoy*) dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya 0,9 persen (*yoy*). Indikasi bahwa ekonomi Jepang masih bergerak positif ditunjukkan oleh *Consumer Spending*, yang menyumbang 60 persen perekonomian Jepang, yang meningkat sebesar 0,5 persen dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan melebihi ekspektasi sebesar 0,4 persen.

Perekonomian Tiongkok juga tercatat membaik yang didorong oleh meningkatnya konsumsi dan ekspor di tengah kebijakan *rebalancing* yang ditempuh. Berdasarkan data *National Bureau of Statistics of China*, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 2017 6,9 persen (*yoy*) melebihi pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 6,7 persen (*yoy*). Perkembangan tersebut mendorong volume perdagangan dunia dan harga komoditas global, termasuk minyak, yang tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan India, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 6,7 persen (*yoy*) lebih lambat dari tahun sebelumnya sebesar 7,1 persen (*yoy*). Kebijakan demonetisasi (penarikan uang pecahan besar 500 dan 1000 rupee dari pasaran) yang diterapkan akhir 2016 menekan permintaan domestik sehingga konsumsi hanya tumbuh 7,3 persen pada triwulan pertama 2017. Capaian tersebut lebih rendah dari pertumbuhan konsumsi triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 11,3 persen. Kebijakan tersebut juga membuat investasi India mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -2,1 persen (*yoy*). Namun demikian, pemulihan ekonomi global memberikan peluang bagi India untuk lebih lanjut meningkatkan investasi dan ekspornya. Selain itu, kebijakan moneter yang mengakomodasi pertumbuhan ekonomi serta implementasi reformasi struktural diharapkan juga dapat mengembalikan pertumbuhan tinggi ekonomi India.

Ke depan, sejumlah risiko terhadap perekonomian global tetap perlu diwaspadai, antara lain bersumber dari normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju dan faktor geopolitik di semenanjung Korea dan Timur Tengah.

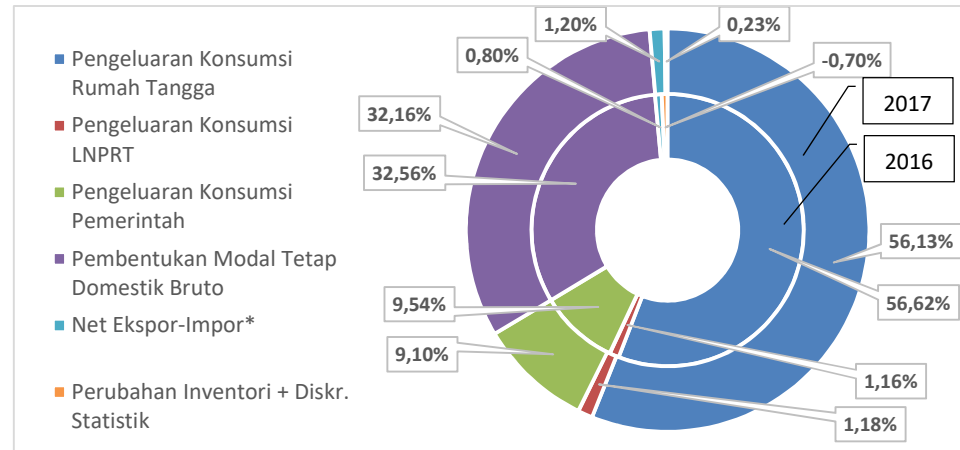
PEREKONOMIAN INDONESIA

*Produk Domestik
Bruto ADHB tahun
2017 mencapai
Rp13.588,8 triliun*

Pada tahun 2017 perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp13.588,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp51,89 juta atau US\$3.876,8. Struktur perekonomian Indonesia tahun 2017 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar

56,13 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,16 persen dan Ekspor Barang dan Jasa sebesar 20,37 persen. Komponen Pengeluaran-pengeluaran tersebut juga mendominasi struktur PDB pada tahun 2016.

Grafik 1. Struktur PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2017

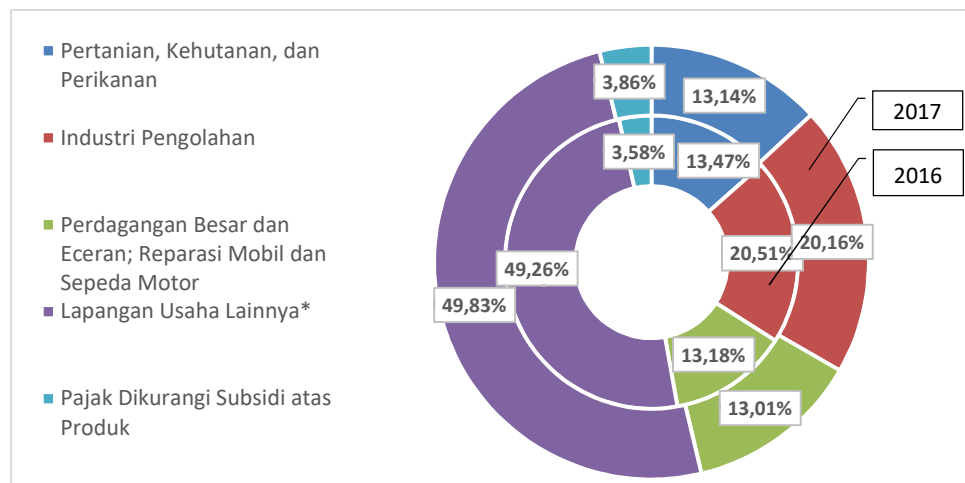


*Ekspor Barang dan Jasa sebesar 20,37 persen dikurangi Import sebesar 19,17 persen

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara dari sisi lapangan usaha PDB tahun 2017 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu Industri Pengolahan sebesar 20,16 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,14 persen; dan Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,01 persen. Tiga lapangan usaha tersebut juga mendominasi struktur PDB tahun 2016.

Grafik 2. Struktur PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2017



*Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang, Konstruksi; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan makan minum; Informasi dan komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya

Sumber : Badan Pusat Statistik

*Ekonomi Indonesia
pada Tahun 2017
tumbuh 5,07 persen*

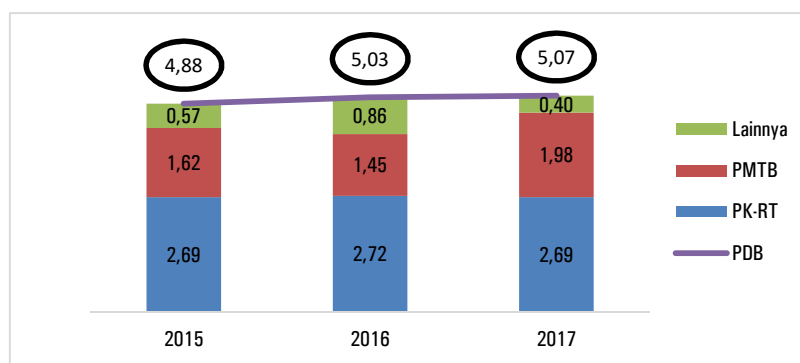
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara yang erat kaitannya dengan berbagai indikator pembangunan lainnya seperti kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran ganda yang tidak hanya menjadi target pencapaian ekonomi namun juga menjadi dasar arah kebijakan fiskal sehingga penyusunan APBN, baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan menjadi lebih kredibel. Oleh karena itu, penentuan besaran asumsi pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam pembangunan ekonomi mendatang.

Selama tahun 2017, ekonomi Indonesia tumbuh 5,07 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi selama 3 tahun terakhir. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat yang terjaga seiring dengan inflasi yang terkendali, pembangunan infrastruktur yang memberikan dampak *multiplier* pada aktivitas ekonomi dalam negeri, serta perbaikan kinerja perdagangan internasional.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 9,09 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,91 persen, dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,15 persen. Sementara itu komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), komponen pengeluaran konsumsi pemerintah-masing-masing tumbuh sebesar 4,95 persen, 2,14 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan, Komponen PK-RT merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017, yakni sebesar 2,69 persen, diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 1,98 persen.

Grafik 3. Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2017 (persen)

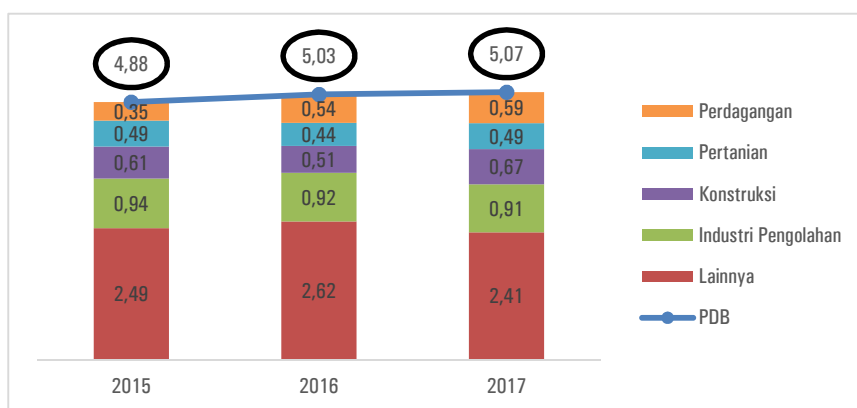


Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari sisi lapangan usaha, Informasi dan Komunikasi tumbuh paling tinggi mencapai 9,81 persen diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 8,66 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,49 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017, Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,91 persen, diikuti Konstruksi sebesar 0,67 persen, dan Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,59 persen.

Grafik 4. Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017 (persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tingkat Inflasi Tahun 2017 tercatat sebesar 3,61 persen (yoy)

Tingkat inflasi memainkan peran penting baik dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun dalam penyusunan postur APBN dan arah kebijakan fiskal. Dalam pencapaian sasaran pembangunan, tingkat inflasi akan berpengaruh pada daya beli dan konsumsi masyarakat serta tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi juga akan mempengaruhi garis batas angka kemiskinan. Dengan memperhatikan pentingnya tingkat inflasi tersebut, pemerintah menyusun program-program kerja yang mampu menjaga inflasi di tingkat yang rendah dan stabil.

Dalam lima tahun terakhir, fluktuasi perekonomian global telah memiliki pengaruh cukup besar terhadap tingkat inflasi domestik melalui perkembangan harga komoditas energi serta pergerakan nilai tukar. Meskipun begitu, tingkat inflasi tetap dapat dikendalikan pada level *single digit* selama kurun waktu tersebut. Rendahnya inflasi tersebut dipengaruhi oleh terjaganya keseimbangan sisi permintaan dan penawaran dan juga rendahnya inflasi komponen harga diatur Pemerintah.

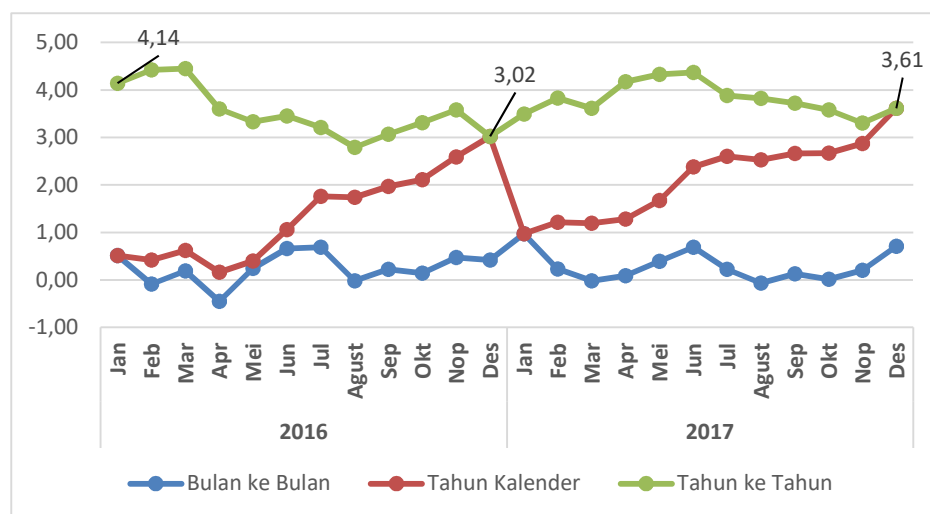
Selama tahun 2017 (Januari–Desember) telah terjadi inflasi sebesar 3,61 persen. Laju inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2016 (Januari–Desember) sebesar 3,02 persen, namun relatif masih terkendali dan di bawah target inflasi yang telah ditetapkan dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBNP tahun 2017 (4,3 persen).

Seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 1,26 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 4,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 5,14 persen; kelompok sandang sebesar 3,92 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,99 persen; kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 3,33 persen; dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 4,23 persen.

Sepanjang tahun 2017, inflasi secara dominan dipengaruhi oleh harga-harga yang diatur oleh pemerintah (*administered prices*). Hal ini ditunjukkan oleh beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi selama tahun 2017, antara lain: tarif listrik sebesar 0,81 persen, biaya perpanjangan STNK sebesar 0,24 persen, dan Bensin 0,18 persen. Berbeda dengan inflasi sepanjang tahun 2016, inflasi dipengaruhi oleh harga pangan bergejolak (*volatile food*) yang ditunjukkan oleh beberapa komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi selama tahun 2016 seperti Cabai Merah 0,35 persen, Bawang Merah 0,17 persen, Bawang Putih 0,11 persen.

Tren laju inflasi bulan ke bulan, tahun kalender, dan tahun ke tahun untuk Tahun 2016 dan 2017 sebagaimana pada grafik berikut.

Grafik 5. Tren Laju Inflasi per Bulan Tahun 2016 dan 2017 (dalam persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

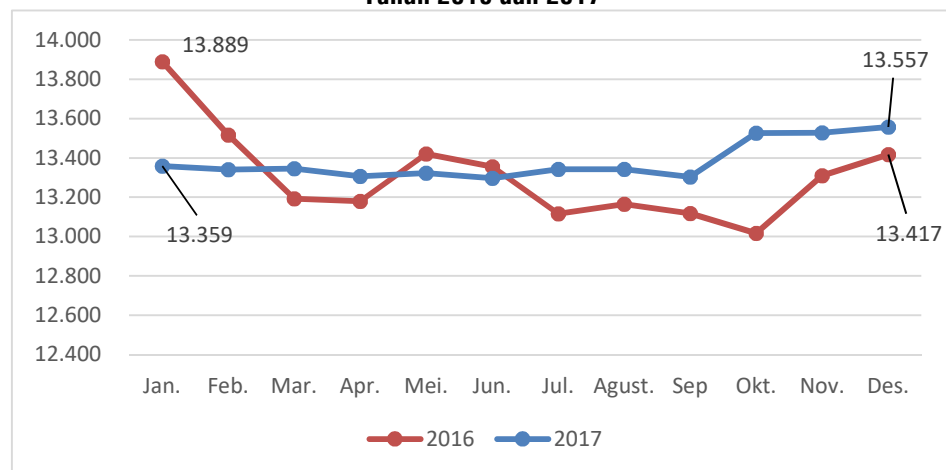
**Rata-rata Nilai Tukar
Rupiah tahun 2017
sebesar Rp13.384
per dolar AS**

Asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS memiliki peran penting dalam postur APBN, baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Asumsi nilai tukar dibutuhkan untuk menghitung pos-pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, seperti penerimaan pajak perdagangan internasional dan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan eksplorasi migas, serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri. Asumsi nilai tukar Rupiah ini dapat berbeda dengan nilai realisasinya, karena nilai tukar Rupiah banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, terutama oleh mekanisme pasar di mana banyak terdapat faktor yang berada di luar kendali Pemerintah seperti keseimbangan Neraca Pembayaran Indonesia baik dari sisi Transaksi Berjalan maupun Transaksi Modal Finansial.

Nilai tukar ditetapkan dalam keseimbangan yang terjadi di pasar valuta asing, sebagai hasil pertemuan antar permintaan dan penawaran. Permintaan akan valuta asing antara lain bersumber dari kebutuhan valuta asing oleh importir, arus modal keluar, dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban akan pinjaman dalam bentuk valuta asing (baik pemerintah, BUMN, swasta, maupun rumah tangga). Penawaran akan valuta asing antara lain bersumber dari pendapatan valuta asing yang diperoleh dari kegiatan ekspor, arus modal masuk (antara lain penanaman modal asing dan portofolio jangka pendek), dan pihak-pihak yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing.

Selama periode tahun 2017, rata-rata nilai tukar rupiah adalah Rp13.384 per dolar AS, lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi pada APBNP yang sebesar Rp13.400 per dolar AS. Walaupun pada bulan Maret dan Juni 2017 *The Fed* telah menaikkan *Fed Fund Rate* (FFR), dampak terhadap nilai tukar relatif minimal karena telah diantisipasi oleh pasar. Selanjutnya, dalam kurun waktu Januari – Desember 2017, Rupiah terkoreksi 0,47 persen secara *point to point* dari Rp13.485 per dolar AS pada tanggal 3 Januari 2017 menjadi Rp13.548 per dolar AS pada tanggal 30 Desember 2017. Sementara jika dibandingkan dengan akhir Desember 2016 sebesar Rp 13.436, Rupiah mengalami koreksi sebesar 0,83 persen. Pelemahan Rupiah yang terjadi pada akhir tahun 2017 juga dialami oleh hampir seluruh mata uang dunia sebagai dampak dari meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga, normalisasi kebijakan moneter serta reformasi pajak di AS.

**Grafik 6. Rata-rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Bulanan
Tahun 2016 dan 2017**



Sumber : Bank Indonesia (diolah), Kementerian Keuangan

**Surplus Neraca
Pembayaran tahun
2017 tercatat
sebesar 11,59 miliar
dolar AS**

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2017 mencatat surplus sebesar 11,59 miliar dolar AS yang ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio, sejalan dengan membaiknya persepsi investor terhadap prospek perekonomian domestik. Peningkatan investasi langsung tersebut sejalan dengan membaiknya indikator investasi sepanjang tahun 2017 yang tercermin dari kenaikan peringkat kredit Indonesia menjadi *investment grade* oleh lembaga

pemeringkat *Standard and Poor's*, kenaikan peringkat kredit Indonesia oleh *Fitch Ratings* menjadi BBB, serta peningkatan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia dari posisi 91 pada 2016 ke posisi 72 di tahun 2017.

Sementara itu, defisit transaksi berjalan tahun 2017 tercatat sebesar 17,29 miliar dolar AS atau 1,70 persen dari PDB, lebih rendah dibandingkan defisit transaksi berjalan tahun sebelumnya sebesar 1,82 persen dari PDB. Perbaikan defisit transaksi berjalan tersebut bersumber dari peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas di tengah meningkatnya impor migas, dan neraca pendapatan primer terutama untuk pembayaran repatriasi hasil investasi asing.

Periode tahun 2012-2016 merupakan tahun yang cukup berat bagi kinerja ekspor dan impor Indonesia di mana pertumbuhan kedua komponen tersebut terus mengalami penurunan. Tekanan pada kinerja ekspor dan impor selama periode tersebut terutama bersumber dari pelemahan permintaan oleh mitra dagang Indonesia dan penurunan harga komoditas di pasar global. Pada akhir tahun 2016, mulai terjadi perubahan arah pertumbuhan ekspor dan impor. Pertumbuhan kedua komponen tersebut mulai mencatat peningkatan. Tren perbaikan kedua faktor tersebut terus berlanjut, sehingga pertumbuhan ekspor dan impor tahun 2017 mengalami peningkatan.

Strategi pengembangan ekspor dilakukan tidak hanya dengan mempertahankan pasar utama yang telah ada saat ini, melainkan juga melalui pembukaan pasar baru bagi produk-produk non-tradisional dan diversifikasi komoditas ekspor unggulan. Peningkatan citra positif akan produk-produk nasional (*nation branding*) juga akan dilakukan guna mendukung peningkatan akses pasar baru baik secara bilateral maupun perjanjian dagang multilateral. Strategi pengendalian impor juga akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan prioritas seperti proyek infrastruktur, pangan dan bahan baku dengan tetap memperhatikan suplai dalam negeri.

Pada tahun 2017, nilai total ekspor sebesar 168,81 miliar dolar AS dan total impor sebesar 156,99 miliar dolar AS

Nilai total ekspor Indonesia secara kumulatif pada periode Januari–Desember 2017 tercatat sebesar 168,81 miliar dolar AS atau meningkat 16,27 persen (yoy) dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya yaitu senilai 145,19 miliar dolar AS. Peningkatan nilai total ekspor ini dipengaruhi oleh kenaikan ekspor migas menjadi 15,74 miliar dolar AS atau meningkat 20,06 persen dari senilai 13,11 miliar dolar AS di periode yang sama tahun sebelumnya dan ekspor nonmigas menjadi sejumlah 153,07 miliar dolar AS atau meningkat 15,89 persen dari senilai 132,08 miliar dolar AS di periode yang sama tahun sebelumnya.

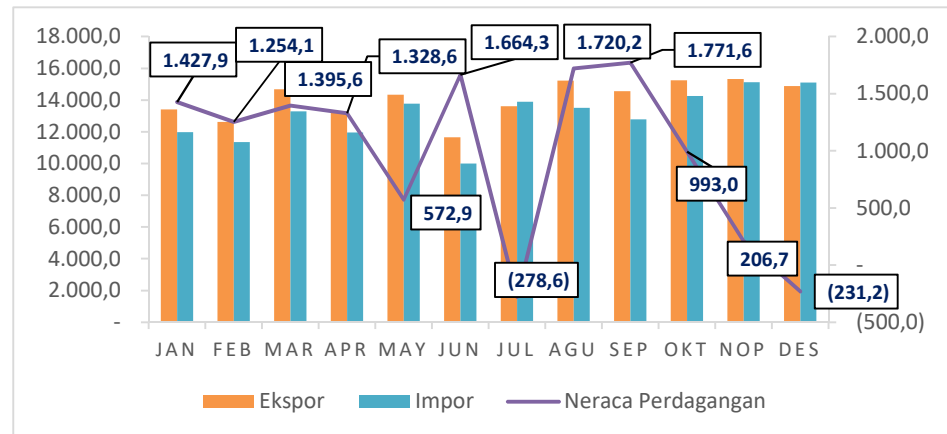
Sejalan dengan peningkatan nilai ekspor Indonesia, volume ekspor Indonesia secara kumulatif pada rentang Januari–Desember tahun 2017 mengalami peningkatan. Total volume ekspor Indonesia selama Januari–Desember 2017 tercatat sebesar 546,84 juta ton atau meningkat sebesar 6,23 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang tercatat sebesar 514,78 juta ton. Dari sisi ekspor nonmigas, total volume ekspor tercatat sebesar 504,24 juta ton atau meningkat sebesar 6,95 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang tercatat sebesar 471,46 juta ton. Sedangkan dari sisi migas, volume ekspor mengalami penurunan sebesar 1,66 persen dibandingkan periode tahun 2016.

Sejalan dengan peningkatan nilai ekspor, nilai impor Indonesia pada Januari –Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar 15,73 persen dari 135,65 miliar dolar AS pada periode Januari–Desember tahun 2016 menjadi 156,99 miliar dolar AS. Peningkatan terjadi pada impor migas dan nonmigas masing-masing 5,58 miliar dolar AS (29,76 persen) dan 15,76 miliar dolar AS (13,48 persen). Lebih lanjut, peningkatan impor migas disebabkan oleh naiknya impor hasil minyak sebesar 4,19 miliar dolar AS dan gas sebesar 1,06 juta dolar AS.

Lebih lanjut, kenaikan nilai impor secara kumulatif juga selaras dengan peningkatan volume impor Indonesia selama rentang waktu Januari–Desember 2017 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Volume impor Indonesia sampai dengan akhir Desember tahun 2017 tercatat sebesar 160,75 juta ton lebih tinggi 5,74 persen dibanding periode yang sama tahun 2016 yang tercatat sebesar 152,03 juta ton. Peningkatan volume pada sektor nonmigas sebesar 6,44 persen, sedangkan sektor migas mengalami kenaikan sebesar 4,23 persen.

Sejalan dengan nilai ekspor dan impor yang mengalami peningkatan, nilai neraca perdagangan Indonesia dalam kurun waktu Januari – Desember 2017 juga mencatat surplus sebesar 11,83 miliar dolar AS lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 9,53 miliar dolar AS. Surplus neraca perdagangan tersebut dipicu oleh surplus sektor nonmigas sebesar 20,40 miliar dolar AS, sedangkan sektor migas tercatat defisit sebesar 8,58 miliar dolar AS. Dari sisi volume perdagangan, neraca volume perdagangan Indonesia mengalami surplus 386,10 juta ton pada periode Januari – Desember tahun 2017. Hal tersebut didorong oleh surplusnya neraca sektor nonmigas 393,86 juta ton, namun neraca volume perdagangan sektor migas defisit 7,76 juta ton.

Grafik 7. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Bulanan Tahun 2017 (Juta USD)

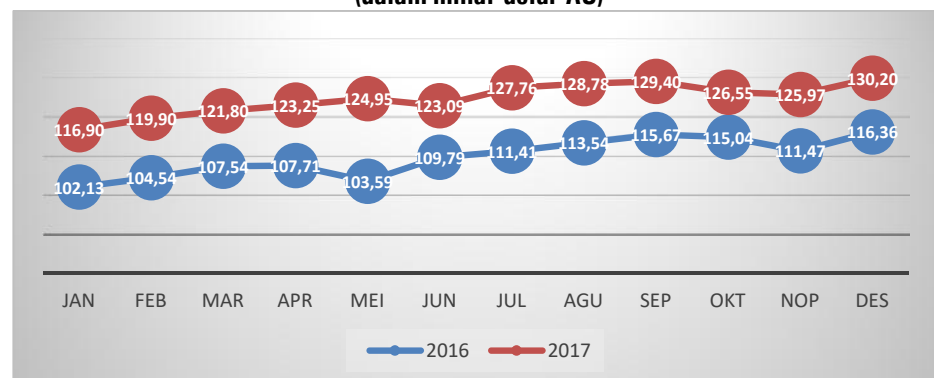


Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Cadangan Devisa tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 130,20 miliar dolar AS pada Desember

Posisi cadangan devisa di akhir bulan selama kurun waktu Januari – Desember 2017 mengalami tren peningkatan. Cadangan devisa pada akhir Desember 2017 berada pada posisi 130,20 miliar dolar AS. Nilai tersebut merupakan level tertinggi baru sepanjang sejarah bank sentral Indonesia. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa, antara lain berasal dari penerbitan *global bonds* pemerintah serta penerimaan pajak dan devisa ekspor migas bagian pemerintah. Penerimaan devisa tersebut melampaui kebutuhan devisa terutama untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas jatuh tempo. Nilai tersebut mampu untuk membiayai 8,6 bulan impor atau 8,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Posisi cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Grafik 8. Tren Cadangan Devisa Bulanan Tahun 2016-2017 (dalam miliar dolar AS)



Sumber: Bank Indonesia (diolah)

BI 7-day RR Rate selama tahun 2017 turun menjadi 4,25 persen

Selama kurun waktu Januari – Desember 2017, Bank Indonesia melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day RR Rate) sebanyak dua kali menjadi 4,25 persen dengan suku bunga *Deposit Facility* tetap sebesar 3,50 persen dan *Lending Facility* tetap sebesar 5,00 persen. Keputusan untuk menurunkan BI 7-day RR Rate dilakukan pada bulan Agustus 2017 sebesar 25 bps dan bulan September sebesar 25 bps. Langkah tersebut ditempuh Bank Indonesia setelah memperhitungkan risiko eksternal terutama yang terkait dengan rencana kebijakan *Fed Funds Rate* (FFR) dan normalisasi neraca bank sentral AS. Penurunan suku bunga acuan ini masih konsisten dengan realisasi dan perkiraan inflasi 2017 yang rendah serta prakiraan inflasi 2018 dan 2019 yang akan berada di bawah titik tengah kisaran sasaran yang ditetapkan dan defisit transaksi berjalan yang terkendali dalam batas yang aman. Kebijakan berupa penurunan suku bunga ini juga diharapkan dapat mendukung perbaikan intermediasi perbankan dan pemulihan ekonomi domestik yang sedang berlangsung.

Boks I

Peringkat *Ease of Doing Business* Indonesia

Berdasarkan laporan terakhir Bank Dunia yang berjudul *Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs*, Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari posisi 91 menjadi 72 dari 190 negara. Laporan tersebut menyajikan indikator kuantitatif mengenai peraturan yang mempermudah aktivitas bisnis dan perlindungan hak kepemilikan pada tiap-tiap negara yang dapat dibandingkan.

Kenaikan peringkat tersebut dapat dicapai berkat perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan Indonesia pada tujuh indikator yaitu: *starting business, getting electricity, registering property, getting credit, protecting minority investor, paying taxes, dan trading across borders*.

Pencapaian ini merupakan pengakuan dunia terhadap perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Peningkatan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, terhadap potensi perekonomian Indonesia, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah akan terus berupaya mendorong perkembangan iklim usaha melalui perbaikan regulasi baik di level pusat maupun daerah. Pemerintah juga akan terus menciptakan kebijakan fiskal yang produktif dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan.

Rata-rata suku bunga SPN 3 bulan mengalami penguatan menjadi 5,0 persen

Perubahan asumsi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama untuk pembayaran bunga utang. Kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan akan berdampak negatif terhadap postur APBN karena dapat menyebabkan peningkatan defisit atau pemotongan belanja. Selain itu, tingkat suku bunga SPN ini juga dijadikan suku bunga acuan untuk pembayaran bunga SUN dengan kupon bunga mengambang. Perbedaan antara asumsi dan realisasi tingkat suku bunga SPN 3 bulan banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, termasuk faktor yang berada di luar kendali Pemerintah. Tingkat likuiditas domestik dan global ditentukan oleh selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri, terutama oleh suku bunga acuan negara maju seperti AS.

Selama periode tahun 2017, Realisasi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 Bulan lebih baik dari target APBNP 2017. Hingga akhir Desember 2017 tingkat SPN 3 bulan sebesar 5,0 persen, atau di bawah target APBN-P 2017 yang sebesar 5,2 persen. Rata-rata suku bunga tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan rata-rata suku bunga pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 5,7 persen. Beberapa faktor risiko yang mempengaruhi kinerja suku bunga SPN 3 bulan di antaranya potensi berlanjutnya kebijakan kenaikan FFR serta pelanggaran kebijakan moneter di Kawasan Eropa dan Jepang. Sementara dari sisi domestik, tingkat suku bunga SPN 3

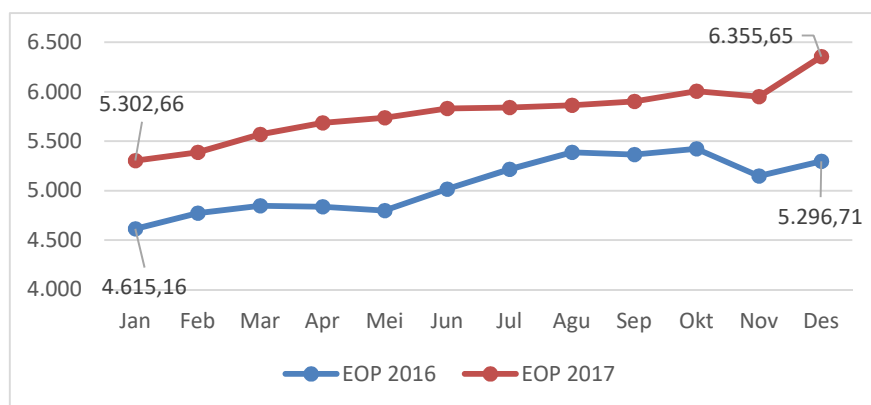
bulan masih akan dipengaruhi antara lain oleh implementasi berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi dan inflasi yang terkendali, sentimen positif terhadap kebijakan *front loading* dan peningkatan intensitas penerbitan SPN, serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat.

Sampai dengan akhir Desember 2017 IHSG mengalami penguatan 1.079 poin (16,99 persen) menjadi 6.355,65

IHSG ditutup menguat di atas level psikologis (6.000) pada akhir perdagangan tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017. Kinerja pasar saham domestik selama kurun waktu Januari – Desember 2017 meningkat 1.079 poin atau sebesar 16,99 persen dan berada di posisi 6.355,65 poin. Perkembangan kinerja IHSG yang positif tersebut didukung oleh fundamental ekonomi yang membaik yang tercermin dari inflasi yang terjaga, naiknya peringkat investasi oleh beberapa lembaga rating dunia, dan prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang positif.

Aksi jual investor asing pada triwulan IV membuat penguatan IHSG tertahan. Dana asing yang keluar dari pasar saham sepanjang tahun 2017 mencapai Rp39,9 triliun. Meskipun demikian, IHSG masih dapat bertahan di atas level 6.000 karena peranan investor domestik yang terus meningkat. Hingga akhir tahun 2017, porsi kepemilikan saham oleh investor Asing tercatat sebesar 35,7 persen.

Grafik 9. Tren Laju IHSG (End of Period) Bulanan Tahun 2016-2017



Sumber: Bursa Efek Indonesia dan Kementerian Keuangan (diolah)

Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun mengalami penurunan 165 bps

Sejalan dengan kondisi pasar saham, kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga mengalami penguatan. Pada rentang Januari – Desember tahun 2017, *yield* SBN 10 tahun tercatat turun sebesar 165 bps dari 7,97 persen pada akhir tahun 2016 menjadi 6,32 persen pada akhir bulan Desember 2017. Kinerja positif tersebut dipengaruhi oleh terjaganya kinerja ekonomi domestik seperti tercermin dari pergerakan Rupiah yang relatif stabil dan juga didorong oleh keyakinan investor akan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Faktor lain yang mempengaruhi adalah adanya kebijakan penurunan suku bunga kebijakan oleh Bank Indonesia pada bulan Agustus dan September 2017.

Sementara itu, Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pembiayaan Pengelolaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, porsi kepemilikan asing di akhir tahun 2017 meningkat menjadi 25,6 persen yang mencapai Rp 836,15 triliun pada tahun 2017 dibandingkan dengan Rp 665,81 triliun (kepemilikan asing 19,2 persen) pada tahun 2016. Kenaikan porsi kepemilikan asing tersebut disebabkan kenaikan peringkat utang Indonesia dari *Fitch Ratings* dan S&P. Di samping itu, Inflasi dan nilai tukar yang stabil juga meningkatkan persepsi positif investor asing pada perekonomian Indonesia.

Fungsi Intermediasi Perbankan

Stabilitas sistem keuangan sepanjang tahun 2017 masih tetap terjaga. Hal tersebut ditopang oleh ketahanan industri perbankan dan stabilitas pasar keuangan yang kuat. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* / CAR) berada jauh di atas ketentuan minimum 8,0 persen dan semakin meningkat di periode bulanan hingga pada bulan Desember 2017 tercatat sebesar 23,0 persen.

Sementara itu, rasio likuiditas (AL/DPK) tercatat pada level 21,5 persen, sedangkan rasio kredit

bermasalah (*Non Performing Loan /NPL*) tercatat sebesar 2,60 persen (*gross*). Dari sisi fungsi intermediasi, Pertumbuhan kredit tahun 2017 sebesar 8,2% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,9% (yoy). Selain itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada tahun 2017 sebesar 9,4% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 9,6% (yoy).

Tabel 1. Perkembangan NPL dan CAR Tahun 2017

	INDIKATOR											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
NPL Gross (%)	3,10	3,20	3,04	3,10	3,10	3,02	3,00	3,00	2,90	2,96	2,89	2,60
CAR (%)	23,21	23,18	22,88	22,79	22,86	22,74	23,23	23,34	23,25	23,42	23,37	23,0

Sumber : Bank Indonesia, Kementerian Keuangan-BKF

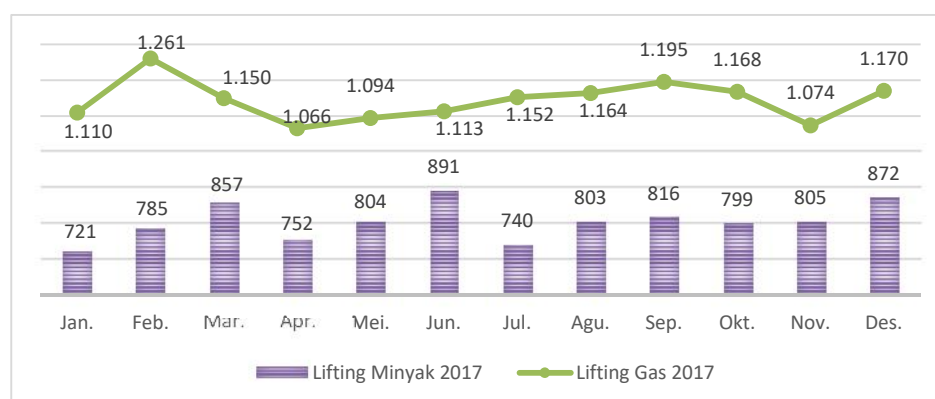
Rata-rata *lifting* minyak sebesar 804 ribu barel per hari dan *lifting* gas bumi 1.142 ribu barel setara minyak per hari

Lifting minyak dan gas bumi merupakan volume produksi minyak dan gas bumi dari lapangan migas nasional yang siap untuk dijual. Sejalan dengan asumsi ICP, *lifting* migas menjadi tolok ukur dalam perhitungan beberapa komponen dalam APBN, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas, penerimaan perpajakan di sektor migas, serta transfer daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah penghasil migas.

Rata-rata realisasi *lifting* minyak bumi selama periode Januari – Desember tahun 2017 mencapai 804 ribu barel per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan asumsi dalam APBNP sebesar 815 ribu barel per hari maupun realisasi pada periode yang sama tahun 2016 sebesar 820 ribu barel per hari.

Sementara itu, rata-rata realisasi *lifting* gas bumi Januari- Desember tahun 2017 mencapai 1.142 ribu barel setara minyak per hari. Nilai realisasi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi dalam APBNP sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari maupun realisasi pada periode yang sama tahun 2016 sebesar 1.180 ribu barel setara minyak per hari. Capaian *lifting* migas tahun 2017 yang mencapai 99 persen dari target APBNP 2017 tersebut merupakan hasil upaya pemerintah untuk menekan penurunan produksi alamiah serta mendorong percepatan penyelesaian proyek sehingga terdapat beberapa proyek yang mulai produksi (*on-stream*) pada tahun 2017.

Grafik 10. Realisasi Rata-rata *Lifting* Migas Bulanan Tahun 2017
(ribu barel per hari)



Sumber: SKK Migas (diolah), Kementerian Keuangan

Harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price /ICP*) merupakan salah satu variabel asumsi ekonomi makro yang digunakan untuk menyusun postur APBN. Keterkaitan ICP dengan

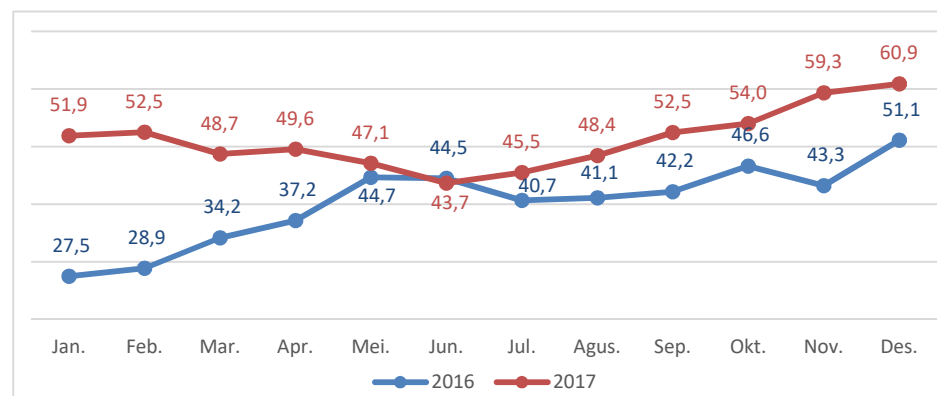
Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia tahun 2017 sebesar 51,2 dolar AS per barel

sisi penerimaan APBN tampak pada komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak, khususnya terkait penerimaan dari minyak bumi, serta penerimaan pajak antara lain melalui Pajak Penghasilan Minyak dan Gas (PPH Migas). Sementara dari sisi belanja negara, ICP berpengaruh pada belanja subsidi energi dan dana bagi hasil (DBH) ke daerah.

Rata-rata realisasi ICP tahun 2017 mencapai 51,2 dolar AS per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBNP sebesar 48 dolar AS per barel dan rata-rata ICP tahun 2016 yang tercatat sebesar 40,2 dolar AS per barel. Sejak awal tahun 2017, ICP menunjukkan tren peningkatan karena sentimen kesepakatan pemangkasan produksi pada semester pertama tahun 2017 oleh negara-negara OPEC dan 11 negara non-OPEC serta mulai pulihnya aktivitas perekonomian global. Meskipun begitu, pada triwulan kedua, harga minyak mentah sempat mengalami penurunan akibat peningkatan produksi minyak mentah Amerika Serikat. ICP kembali meningkat di pertengahan tahun seiring dengan keputusan perpanjangan pemangkasan produksi minyak mentah hingga akhir tahun 2018, faktor konflik geopolitik di Timur Tengah, serta gangguan produksi di beberapa negara produsen. Perkembangan ICP tersebut sejalan dengan pergerakan harga minyak mentah *Brent* yang tercatat sebesar 54,3 dolar AS per barel di tahun 2017.

Perkembangan harga minyak mentah dunia dapat berdampak pada kinerja ekonomi domestik. Peningkatan harga komoditas energi di pasar global mendorong peningkatan ICP dan harga energi domestik. Kenaikan harga energi domestik, antara lain seperti BBM dan tarif listrik juga dapat berpotensi mendorong kenaikan laju inflasi.

Grafik 11. Rata-rata Harga Minyak Mentah Indonesia Tahun 2016 dan 2017
(dolar AS per barel)



Sumber: Kementerian ESDM (diolah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,50 persen per Agustus 2017

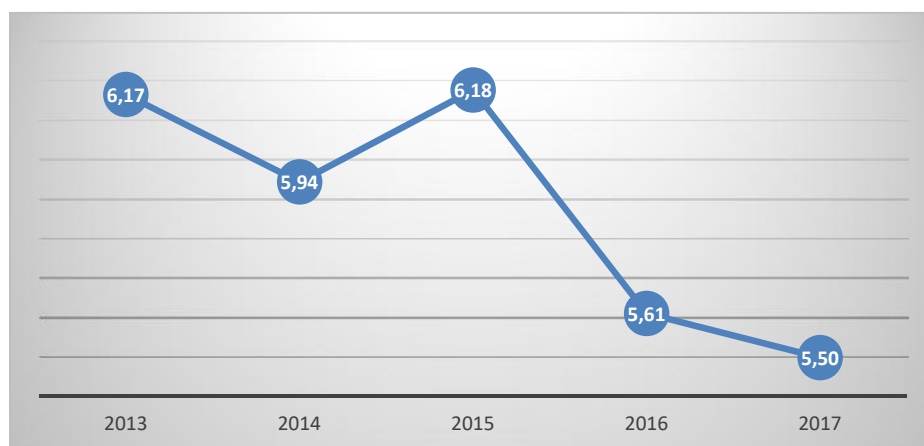
Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka (TPT) diharapkan turun dan berada pada kisaran 5,6 persen. Dalam jangka menengah dan panjang, sasaran yang akan dicapai adalah peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja yang merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dalam jangka pendek sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah penciptaan lapangan kerja dan keadilan bagi tenaga kerja, yang mampu meningkatkan taraf hidup penduduk 40 persen ekonomi terbawah. Untuk mendorong aktivitas ekonomi yang menghasilkan kesempatan kerja dan usaha yang lebih luas, arah kebijakan ketenagakerjaan Pemerintah pada tahun 2017 adalah memperluas industri manufaktur untuk mendukung perluasan lapangan kerja baru yang berkualitas, mendorong pengeluaran pemerintah dan penciptaan investasi yang padat karya, mendukung regulasi yang mendorong investasi, serta meningkatkan hubungan industrial yang harmonis. Selain itu, untuk mendorong pengembangan ekonomi produktif, Pemerintah akan meningkatkan akses permodalan dan layanan kredit mikro, memberikan pendampingan dan pengembangan kelompok usaha, dan mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 128,06 juta orang, naik 2,62 juta orang dibanding Agustus 2016 (setahun yang lalu). Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja,

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada Agustus 2017 tercatat sebesar 66,67 persen, meningkat 0,33 persen dibanding setahun yang lalu. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2016 sebesar 5,61 persen, turun menjadi 5,50 persen pada Agustus 2017. TPT Indonesia menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun sebagaimana pada grafik berikut ini.

Grafik 12. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia Tahun 2013-2017 (persen)



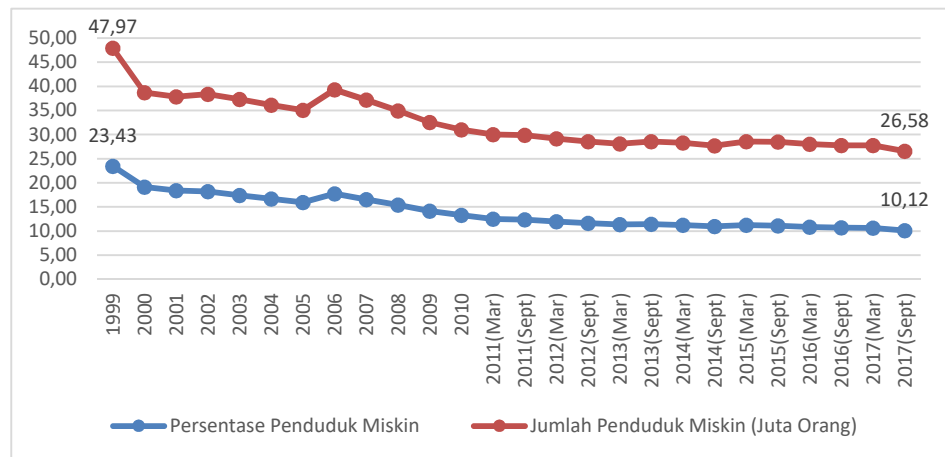
Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase Penduduk Miskin turun menjadi 10,12 persen dan Rasio Gini sebesar 0,391. (September 2017)

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2017, pada RKP tahun 2017, sasaran angka kemiskinan yang ingin dicapai pada tahun 2017 berada pada kisaran 10,5 persen. Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu agenda prioritas nasional adalah memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik. Perbaikan distribusi ini diharapkan mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik seperti mengurangi kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas guna mengurangi kemiskinan, Pemerintah juga akan terus mendorong peningkatan akses terhadap pelayanan dasar serta perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan.

Secara umum, pada periode 1999–September 2017 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada tahun 2006, September 2013, dan Maret 2015. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak.

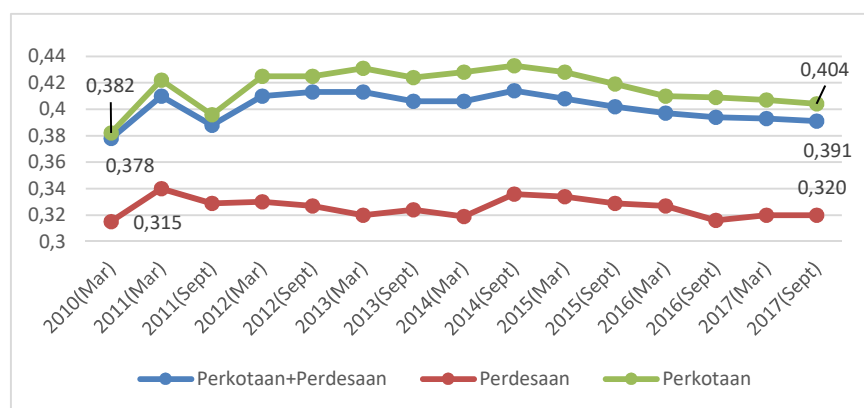
Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen) menurun jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta (10,64 persen). Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1,19 juta orang dibandingkan Maret 2017. Sementara jika dibandingkan dengan September tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 1,18 juta orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2017–September 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 401,28 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 786,95 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 7,72 persen menjadi 7,26 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,93 persen menjadi 13,47 persen.

Grafik 13. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1999-2017

Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Rasio Gini adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan penduduk. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai koefisien $< 0,4$ menunjukkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan rendah, Nilai koefisien $0,4-0,5$ menunjukkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan sedang, Nilai koefisien $> 0,5$ menunjukkan distribusi pendapatan tingkat ketimpangan tinggi.

Secara nasional, nilai Rasio Gini Indonesia selama periode 2010–September 2014 terus mengalami fluktuasi dan mulai September 2015 hingga September 2017 nilainya mulai menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode September 2015–September 2017 terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Pada September 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Rasio Gini adalah sebesar 0,391 (ketimpangan rendah). Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2017 yang sebesar 0,393. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Rasio Gini September 2016 yang sebesar 0,394 turun sebesar 0,003 poin.

Grafik 14. Perkembangan *Gini Ratio* Indonesia tahun 2010-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik

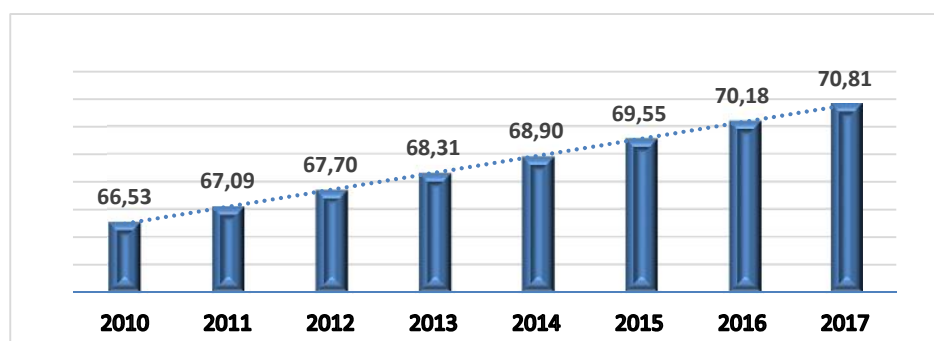
Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard*

IPM Indonesia saat ini berstatus “tinggi”, meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 70,81 pada tahun 2017

of living). Umur Panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani Pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar Hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka Panjang. Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2017. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 70,81 pada tahun 2017. Selama periode tersebut IPM Indonesia rata-rata tumbuh 0,90 persen per tahun. Selama periode 2010 hingga 2017, IPM Indonesia menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan Indonesia mengalami peningkatan dari “sedang” pada tahun 2010 hingga 2015 menjadi “tinggi” pada tahun 2016 dan 2017.

Grafik 15. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia Tahun 2010-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 2 Ikhtisar Realisasi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2016 dan 2017

Indikator	2017		2016
	APBNP	Realisasi	Realisasi
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,20	5,07	5,03
Inflasi (% , yoy)	4,3	3,6	3,0
Tingkat Bunga SPN 3 bulan (%)	5,2	5,0	5,7
Nilai tukar (Rp/US\$)	13.400	13.384	13.307
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	48,0	51,2	40,2
Lifting Minyak (ribu barel per hari)	815	804	829
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.150	1.142	1.180

Tabel 3 Ikhtisar Realisasi Indikator Ekonomi Makro Tahun 2016 dan 2017

Indikator	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2016
Ekspor (miliar dolar AS)	168,81	145,19
Impor (miliar dolar AS)	156,99	135,65
Cadangan Devisa (miliar dolar AS)	130,20	116,36
Neraca Pembayaran Indonesia (miliar dolar AS) (surplus)	11,59	12,09
BI 7-day RR Rate (BI Rate) (%)	4,25	5,00
Suku Bunga Surat Berharga Negara (SBN)-10 Tahun (%)	6,32	7,97
IHSG (<i>end of period</i>)	6.355,65	5.296,71

Tabel 4 Ikhtisar Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2016 dan 2017

Indikator	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2016
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	5,50	5,61
Persentase Penduduk Miskin (persen)	10,12	10,70
Rasio Gini	0,391	0,394
Indeks Pembangunan Manusia	70,81	70,18

Sumber : Badan Pusat Statistik

A.2.2. POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2017

Tema RKP tahun 2017 adalah "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah"

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang disusun secara terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tema RKP tahun 2017 adalah "Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah" yang dijabarkan ke dalam empat dimensi pembangunan, yaitu:

1. Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, secara umum ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter bangsa, serta memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Prioritas pembangunan manusia dan masyarakat terdiri dari revolusi mental, kesehatan, pendidikan, serta perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Prioritas pembangunan sektor unggulan tersebut meliputi kedaulatan pangan, maritim dan kelautan, kedaulatan energi, pembangunan pariwisata, serta percepatan pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan. Salah satu agenda prioritas nasional adalah memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah dapat tumbuh dengan jauh lebih baik sehingga mampu menciptakan kualitas hidup lebih baik. Melalui prioritas ini peningkatan kualitas hidup diupayakan melalui pemerataan antarkelompok pendapatan, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah.
4. Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan meliputi reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, stabilitas keamanan dan ketertiban, konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, reformasi birokrasi, dan tata kelola dan reformasi birokrasi.

Tema Kebijakan Fiskal Tahun 2017 berupa "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan"

Pada tahun 2017, Pemerintah tetap menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan fiskal, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Reformasi mencakup tiga strategi utama yaitu optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja dan menjaga kesinambungan pembiayaan anggaran yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkesinambungan dalam jangka panjang.

Optimalisasi pendapatan diarahkan pada perluasan basis pendapatan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas perekonomian, sehingga tidak mengganggu iklim investasi. Peningkatan kualitas belanja diarahkan pada pemanfaatan anggaran untuk belanja yang bersifat produktif dan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, program pendidikan serta kesehatan yang pada gilirannya dapat mendorong pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan. Selain itu, peningkatan kualitas belanja dari aspek pelaksanaan anggaran juga terus dioptimalkan melalui peningkatan kualitas penyerapan anggaran. Reformasi pada bidang pendapatan dan belanja tersebut, diikuti dengan upaya menjaga kesinambungan sumber-sumber pembiayaan.

Upaya-upaya untuk melanjutkan reformasi tersebut tetap dilakukan di tengah kondisi perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian, sehingga dibutuhkan suatu strategi pengelolaan kebijakan fiskal dan APBN yang sehat dan berkesinambungan. Untuk itu Pemerintah mengusung tema Kebijakan Fiskal Tahun 2017 berupa "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan". Sejalan dengan tema tersebut, kebijakan fiskal tahun 2017 diarahkan untuk mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan yang pada gilirannya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh

masyarakat Indonesia. Strategi kebijakan fiskal di tahun 2017 diarahkan untuk (1) meningkatkan kualitas stimulus fiskal; (2) memantapkan daya tahan fiskal; serta (3) menjaga kesinambungan fiskal.

Kebijakan strategis yang ditempuh guna mendukung pencapaian strategi tersebut dilakukan melalui sisi pendapatan negara, belanja negara maupun pembiayaan anggaran. Dari sisi pendapatan negara, implementasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang telah dimulai tahun 2016 dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Kebijakan pengampunan pajak tersebut ditempuh sebagai langkah untuk memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak di masa mendatang. Selain itu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif. Sementara itu, kebijakan penerimaan negara bukan pajak ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Selanjutnya dari sisi belanja, belanja pemerintah pusat tetap difokuskan pada upaya-upaya mendanai program prioritas nasional dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta pengurangan kesenjangan dan kemiskinan. Selanjutnya untuk mencapai fokus pembangunan tersebut, pemanfaatan belanja pemerintah pusat diarahkan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas yang antara lain difokuskan pada upaya: (1) peningkatan belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih; (2) meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja nonoperasional utamanya pada belanja barang untuk meningkatkan ruang fiskal; (3) meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial antara lain perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program-program bantuan langsung ke masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, beras untuk rakyat sejahtera, dan beasiswa Bidik Misi, dengan memperbaiki sistem penyaluran dan akurasi data penerima; (4) memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; (5) penyaluran subsidi dan program bantuan sosial non-tunai yang lebih tepat sasaran, antara lain melalui perbaikan basis data yang transparan dan penataan ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel, dan konversi beras sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap; (6) mendukung penegakan hukum serta stabilisasi pertahanan dan keamanan, melalui pemberantasan dan penegakan peredaran gelap narkoba, tindak terorisme, serta pengadaan alutsista.

Selanjutnya, Transfer ke Daerah dan Dana Desa, diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah dan desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan pelayanan publik antardaerah dan mendukung pencapaian prioritas nasional.

Di sisi pembiayaan, kebijakan diarahkan antara lain untuk (1) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas *manageable*; (2) Memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga keseimbangan makro; (3) Mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM; (4) Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah; (5) Mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional; (6) Mendukung upaya peningkatan ekspor antara lain melalui program *National Interest Account* (NIA); (7) Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas; serta (8) Mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pemerintah melakukan perubahan struktur pembiayaan anggaran tahun 2017

Dalam hal pembiayaan anggaran ini, Pemerintah melakukan perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran pada tahun 2017. Apabila sebelumnya struktur pembiayaan anggaran terdiri dari pembiayaan utang dan pembiayaan nonutang, maka struktur pembiayaan anggaran diubah menjadi terdiri dari pembiayaan utang, pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya. Hal ini dilakukan agar penyusunan pembiayaan anggaran lebih informatif, transparan, dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan.

Pemerintah melakukan perubahan APBN tahun 2017 sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi global dan domestik dan dinamika kebijakan fiskal

Efektivitas dan kinerja pelaksanaan APBN tahun 2017 sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian dan dinamika kebijakan fiskal yang mendasari besaran-besaran dalam APBN tahun 2017 antara lain:

1. Perkembangan perekonomian global dan domestik mempengaruhi capaian asumsi dasar ekonomi makro. Harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan akan mempengaruhi perkiraan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat bunga SPN 3 bulan.
2. Perbedaan asumsi dasar ekonomi makro tersebut berdampak langsung pada besaran-besaran dalam APBN tahun 2017. Pada sisi pendapatan, lebih tingginya harga minyak mentah Indonesia dan melemahnya nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat berdampak pada kenaikan pendapatan negara terutama PPh Migas dan PNBPD SDA Migas. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro tersebut juga mempengaruhi belanja negara terutama peningkatan kebutuhan anggaran untuk subsidi BBM (LPG tabung 3 kg), subsidi listrik, dana bagi hasil migas, dan dana alokasi umum.
3. Penyesuaian basis perhitungan pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan sebagai penyesuaian terhadap pencapaian penerimaan perpajakan tahun 2016. Penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2017 diperkirakan akan tumbuh 14,6 persen dari capaian 2016, namun lebih rendah dari target APBN tahun 2017. Koreksi ini diperlukan agar target pendapatan negara dalam APBN tahun 2017 lebih kredibel dan realistis.
4. Terdapat beberapa kebijakan yang memerlukan perubahan belanja negara, antara lain (1) kebijakan untuk menjaga stabilitas harga barang vital dan strategis, berupa belum terlaksananya kebijakan pendistribusian LPG tabung 3 kg yang lebih tepat sasaran, belum dilaksanakannya kebijakan subsidi yang tepat sasaran untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan miskin dengan daya 450 VA dan 900 VA; dan (2) kebutuhan anggaran belanja tambahan untuk belanja prioritas dan mendesak, terutama dukungan pembangunan infrastruktur, dana mitigasi dan antisipasi dampak bencana alam, penyelenggaraan Asian Games, persiapan pemilu 2019, pengembangan hortikultura, dan percepatan sertifikasi tanah.
5. Perkiraan terjadinya perbedaan realisasi pendapatan negara, serta perubahan besaran dan kebijakan belanja negara berpotensi melebarkan defisit APBN tahun 2017.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan untuk menjaga agar defisit APBN tahun 2017, Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan fiskal sebagai berikut:

Pendapatan Negara, kebijakan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak di sektor minyak dan gas bumi sejalan dengan tren kenaikan harga minyak dan gas bumi. Pada penerimaan perpajakan, dilakukan berbagai upaya perbaikan dan pengelolaan basis pajak pasca kebijakan *tax amnesty*, dan reformasi perpajakan.

Belanja Negara, memfokuskan pada upaya peningkatan efisiensi baik pada belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah dan dana desa. Pada Belanja Pemerintah Pusat dilakukan kebijakan efisiensi belanja kementerian/lembaga terutama pada belanja operasional dan belanja nonprioritas, dan *refocusing* anggaran prioritas (infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan). Pada transfer ke daerah dan dana desa, kebijakan yang diambil antara lain penyesuaian dana bagi hasil (DBH) sebagai akibat kenaikan pendapatan yang dibagihasilkan dan penyelesaian kurang bayar DBH tahun sebelumnya, penyesuaian dana alokasi umum sejalan dengan perubahan pendapatan dalam negeri neto, peningkatan dana alokasi khusus fisik, serta penyaluran dana desa sesuai perkembangan fisik proyek tahun 2017 dan capaian outputnya.

Pembiayaan Anggaran, kebijakan pembiayaan anggaran terutama untuk mendukung pembiayaan investasi, baik fisik maupun terhadap sumber daya manusia antara lain (1) pembangunan prasarana *Light Rapid Transit* (LRT) Palembang; (2) pembangunan infrastruktur melalui alokasi pembiayaan investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN); (3) kebijakan percepatan peningkatan kualitas SDM Indonesia dengan memperkuat kelembagaan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui skema *sovereign wealth fund* (SWF) di bidang pendidikan; (4) penajaman program pembiayaan perumahan khususnya sinkronisasi antara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB); dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) (5) realokasi PMN kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi alokasi belanja negara.

Dalam struktur APBNP tahun 2017, target pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp1.736.060,1 miliar, atau turun 2,8 persen dari target pendapatan negara pada APBNP tahun 2016. Dari total pendapatan negara tersebut, target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp1.472.709,9 miliar, turun 4,3 persen dari target penerimaan perpajakan dalam APBNP tahun 2016. Sementara itu, target PNBPN mencapai Rp260.242,1 miliar, atau naik 6,2 persen dari target PNBPN tahun 2016. Penerimaan perpajakan masih menjadi penopang pendapatan negara dengan target penerimaan yang mencapai 84,8 persen dari total pendapatan negara.

Pada sisi pengeluaran, besaran belanja negara untuk tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp2.133.295,9 miliar, naik 2,4 persen dari pagu belanja negara pada APBNP tahun 2016. Belanja negara di tahun 2017 tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.366.956,6 miliar, ditambah dengan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766.339,3 miliar.

Dengan target pendapatan dan besaran belanja negara tersebut, defisit dalam APBNP tahun 2017 direncanakan sebesar Rp397.235,7 miliar atau 2,92 persen terhadap PDB, lebih tinggi dari target defisit pada APBNP tahun 2016 yang sebesar Rp296.723,9 miliar atau 2,35 persen terhadap PDB. Defisit APBN tahun 2017 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan anggaran sebesar Rp397.235,7 miliar.

Tabel 5. Ringkasan APBNP Tahun 2016, APBN, APBNP, dan Realisasi Tahun 2017
(dalam miliar Rupiah)

URAIAN	APBNP 2016	APBN 2017	APBNP 2017	REALISASI 2017
A. Pendapatan Negara	1.786.225,0	1.750.283,4	1.736.060,1	1.666.375,9
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.784.249,9	1.748.910,7	1.732.952,0	1.654.746,1
1. Penerimaan Perpajakan	1.539.166,2	1.498.871,6	1.472.709,9	1.343.529,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	245.083,6	250.039,1	260.242,1	311.216,3
II. Penerimaan Hibah	1.975,2	1.372,7	3.108,1	11.629,8
B. Belanja Negara	2.082.948,9	2.080.451,2	2.133.295,9	2.007.351,8
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.306.696,0	1.315.526,1	1.366.956,6	1.265.359,4
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	776.252,9	764.925,1	766.339,3	741.992,4
C. Keseimbangan Primer	(105.505,6)	(108.973,2)	(178.039,4)	(124.407,9)
D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)	(296.723,9)	(330.167,8)	(397.235,7)	(340.975,9)
% Defisit Terhadap PDB	(2,35)	(2,41)	(2,92)	(2,51)
E. Pembiayaan Anggaran	296.723,9	330.167,8	397.235,7	366.623,8
I. Pembiayaan Utang	371.562,6	384.690,5	461.343,6	429.076,6
II. Pembiayaan Investasi	(93.984,8)	(47.488,9)	(59.733,8)	(59.754,1)
III. Pemberian Pinjaman	461,7	(6.409,7)	(3.668,7)	(2.052,4)
IV. Kewajiban Penjaminan	(651,7)	(924,1)	(1.005,4)	(1.005,4)
V. Pembiayaan Lainnya	19.336,1	300,0	300,0	359,1

**) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan*

Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi APBNP Tahun 2017

Di tengah perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, kinerja realisasi APBNP 2017 mampu mencatat capaian yang memuaskan, dengan realisasi defisit APBN terkendali pada level yang lebih rendah dari target di dalam APBNP tahun 2017, serta realisasi keseimbangan primer yang semakin membaik. Selain indikator tersebut, berbagai kebijakan di bidang perpajakan seperti program *tax amnesty* tidak hanya mampu memperbaiki realisasi capaian target penerimaan negara, namun juga mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sementara, dari sisi belanja negara, perbaikan penyerapan dan pola belanja kementerian/lembaga juga diikuti dengan pengelolaan anggaran dengan tata kelola yang semakin baik. Dari sisi pembiayaan anggaran, pengelolaan utang secara *prudent* dan kebijakan pembiayaan kreatif yang melibatkan peran swasta dan BUMN mampu menjaga kesinambungan fiskal di tengah keterbatasan fiskal tetapi tetap dapat menjadi instrumen dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur. Pemerintah berkomitmen akan terus melanjutkan momentum reformasi fiskal dengan tetap meningkatkan integritas dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara.

PENDAPATAN NEGARA

Optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menciptakan iklim investasi yang sehat, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mampu menciptakan daya saing dan nilai tambah perekonomian nasional.

Peranan pendapatan negara sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan nasional terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian bangsa, pendapatan negara terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari utang melalui instrumen-instrumen fiskal yang dimiliki, termasuk melalui perencanaan kebijakan fiskal tahunan. Dalam perencanaan kebijakan fiskal, target pendapatan negara setiap tahunnya terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif.

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pendapatan dalam negeri merupakan komponen utama yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan penerimaan hibah hanya mengambil porsi yang sangat kecil karena sangat tergantung pada komitmen dan jenis kegiatan yang ditargetkan oleh pemberi hibah. Di sisi pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan terus dioptimalkan sehingga secara bertahap dapat mengurangi peran penerimaan negara bukan pajak khususnya dari sumber daya alam minyak dan gas bumi, yang semakin menurun dan rentan terhadap gejolak harga dan permintaan dunia.

Secara umum, kebijakan pendapatan negara dalam APBN tahun 2017 adalah optimalisasi pendapatan dengan tetap menciptakan iklim investasi yang sehat, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mampu menciptakan daya saing dan nilai tambah perekonomian nasional.

Realisasi Pendapatan Negara sampai Tahun 2017 Rp1.666,38 triliun

Realisasi pendapatan negara tahun 2017 mencapai Rp1.666.375,9 miliar atau 95,99 persen dari target pendapatan negara pada APBNP tahun 2017 sebesar Rp1.736.060,1 miliar. Realisasi pendapatan negara terdiri dari realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.343.529,8 miliar atau 91,23 persen dari target APBNP tahun 2017 sebesar Rp1.472.709,9 miliar, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp311.216,3 miliar atau 119,59 persen dari target APBNP tahun 2017 sebesar Rp260.242,1 miliar, dan realisasi penerimaan hibah sebesar Rp11.629,8 miliar atau 374,17 persen dari target APBNP tahun 2017 sebesar Rp3.108,1 miliar.

Realisasi pendapatan negara tahun 2017 naik sebesar Rp110.441,8 miliar atau 7,10 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp1.555.934,2 miliar. Kenaikan tersebut disumbang oleh kenaikan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp58.559,7 miliar atau 4,56 persen, kenaikan PNBP yang mencapai 49.239,9 miliar atau 18,80 persen, dan kenaikan penerimaan hibah sebesar Rp2.642,1 miliar atau 29,40 persen dibanding periode sebelumnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan naiknya realisasi pendapatan negara antara lain terjaganya konsumsi domestik, harga komoditas dan harga minyak Indonesia yang mulai membaik serta meningkatnya permintaan ekspor dari negara tujuan utama ekspor Indonesia.

Tabel 6. Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2016
(dalam miliar rupiah)

Uraian	2017	2016	Kenaikan (%)
I. Penerimaan Perpajakan	1.343.529,8	1.284.970,1	4,56
1. Pajak Dalam Negeri	1.304.316,3	1.249.499,5	4,39
2. Pajak Perdagangan Internasional	39.213,6	35.470,7	10,55
II. PNB	311.216,3	261.976,3	18,80
1. Penerimaan SDA	111.132,0	64.901,9	71,23
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	43.904,2	37.133,2	18,23
3. PNB lainnya	108.834,6	117.995,4	-7,76
4. Pendapatan BLU	47.345,4	41.945,9	12,87
III. Penerimaan Hibah	11.629,8	8.987,7	29,40
Jumlah Pendapatan Negara	1.666.375,9	1.555.934,2	7,10

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan Perpajakan

Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan, penyempurnaan berbagai peraturan perpajakan termasuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan, peningkatan kapasitas organisasi, serta melanjutkan kebijakan pengampunan pajak sampai bulan Maret 2017.

Pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk merevisi beberapa undang-undang di bidang perpajakan meliputi: (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2) Pajak Penghasilan, (3) Pajak Pertambahan Nilai, dan (4) Bea Materai. Untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2017, Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perpajakan. Arah kebijakan umum perpajakan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan optimalisasi perpajakan dalam rangka peningkatan *tax ratio* dan pemenuhan kebutuhan pendanaan APBN;
2. Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, dan daya saing industri nasional;
3. Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri dalam negeri;
4. Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk pengendalian konsumsi barang tertentu dan *negative externality*;
5. Kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*);
6. Kebijakan perpajakan internasional yang diarahkan mendukung era transparansi informasi di bidang perpajakan dan penanggulangan penghindaran pajak; dan
7. Kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kompetensi SDM dalam rangka mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Sebagai upaya untuk mendukung arah kebijakan umum perpajakan dan implementasi dari arah kebijakan umum perpajakan tahun 2017, Pemerintah juga akan mengambil beberapa langkah-langkah kebijakan yang bersifat teknis, seperti peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, peningkatan efektivitas penyuluhan pajak, peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, dan peningkatan efektivitas pemeriksaan dan penagihan pajak. Kebijakan penerimaan pajak pada tahun 2017 juga akan difokuskan pada peningkatan *law enforcement* serta melanjutkan program pengampunan pajak yang telah berlangsung mulai semester II tahun 2016. Program *Tax Amnesty* telah berlangsung selama tiga periode, yaitu periode pertama pada bulan Juli-September 2016, periode kedua pada bulan Oktober-Desember 2016, dan periode ketiga pada bulan Januari-Maret 2017. Pada prinsipnya program pengampunan pajak ini bertujuan untuk (1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta (repatriasi), (2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, program pengampunan pajak diharapkan akan dapat meningkatkan rasio pajak terhadap PDB, terciptanya perluasan basis pajak dan peningkatan indikator ekonomi yang

ditandai dengan meningkatnya likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Kebijakan pengampunan pajak telah memberikan dampak positif baik terhadap peningkatan pendapatan negara maupun peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional melalui kewajiban pembayaran pajak. Selama periode pelaksanaan *Tax Amnesty*, total harta yang dilaporkan mencapai Rp4.884 triliun yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar Rp3.701 triliun, deklarasi harta luar negeri sebesar Rp1.037 triliun dan repatriasi aset sebesar Rp147 triliun.

Di bidang kepabeanan dan cukai, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan teknis antara lain penyempurnaan penggunaan IT, intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi, dan organisasi pemungutan, dan masalah pemberantasan penyelundupan.

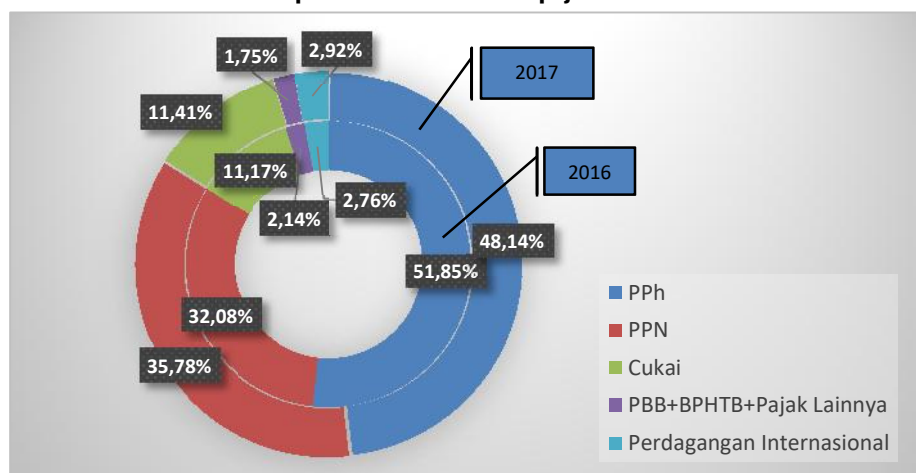
*Realisasi
Penerimaan
Perpajakan
sampai dengan
Akhir Tahun
2017 Rp
1.343,5 triliun*

Sampai dengan akhir tahun 2017, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.343.529,8 miliar atau naik 4,56 persen dibanding realisasi periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp1.284.970,1 miliar. Penerimaan perpajakan berasal dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak perdagangan internasional. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri tahun 2017 mencapai Rp1.304.316,3 miliar atau naik 4,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan penerimaan pajak internasional mencapai Rp39.213,6 miliar atau naik 10,55 persen dibanding realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan sampai akhir tahun 2017 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan terutama disebabkan naiknya PPh Migas yang cukup signifikan sebesar 39,38 persen seiring harga ICP yang mulai membaik, meningkatnya pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar 16,62 persen yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik dan kepatuhan pembayaran PPN oleh WP, pendapatan cukai yang mengalami peningkatan sebesar 6,80 persen karena adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Selain itu, penerimaan pajak perdagangan internasional juga mengalami peningkatan sebesar 10,55 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya ekspor impor sebagai dampak semakin membaiknya aktivitas perdagangan internasional.

Di sisi lain pajak penghasilan (PPh) Non Migas mengalami penurunan karena adanya penerimaan yang tidak berulang pada tahun lalu berupa uang tebusan dan PPh Final Revaluasi. Sementara itu, Pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan dari Rp19,4 triliun pada tahun 2016 menjadi hanya Rp16,8 triliun pada periode yang sama. Penurunan tersebut didominasi oleh penurunan penerimaan PBB migas tahun 2017 sebagai akibat perubahan besaran lifting migas dan besarnya penerimaan PBB Migas di 2016 yang tidak berulang berupa ketetapan tahun 2013-2015 yang terbit di 2016.

Grafik 16 Komposisi Penerimaan Perpajakan Tahun 2017 dan 2016



Sumber: Kementerian Keuangan

*Kebijakan PNB
Tahun 2017*

PNBP terus diupayakan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan dari PNB dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian nasional dan global, perkembangan harga komoditas utama terutama komoditas tambang, serta kemampuan daya beli masyarakat dan dunia usaha. Dalam upaya mencapai target PNB pada tahun 2017, Pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah antar lain sebagai berikut:

1. Pencapaian target produksi pertambangan minyak bumi dan gas, serta mineral dan batu bara seiring dengan perkembangan harga minyak mentah dan batu bara yang mulai meningkat,
2. Melakukan efisiensi kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan investasi,
3. Perbaikan kinerja BUMN guna mengoptimalkan penerimaan dividen dan pemenuhan penugasan proyek strategis pemerintah,
4. Optimalisasi PNB yang dikelola K/L dan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta pengelolaan, dan
5. Intensifikasi penagihan PNB atas kewajiban wajib bayar terhadap pemerintah.

*Realisasi PNB
Tahun 2017
sebesar
Rp311,2 triliun*

Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2017 mencapai Rp311.216,3 miliar atau 119,59 persen dari target APBNP Rp260.242,1 miliar. Realisasi tersebut naik 18,80 persen dibandingkan realisasi pada periode sama tahun 2016 sebesar Rp261.976,3 miliar. PNB terdiri dari Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Bagian Laba BUMN, PNB Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Realisasi penerimaan SDA sebesar Rp111.132,0 miliar atau 116,19 persen dari target APBNP, naik sebesar Rp46.230,1 miliar atau 71,23 persen dari penerimaan SDA tahun 2016. Kenaikan realisasi penerimaan SDA terutama dipengaruhi antara lain oleh membaiknya harga komoditas pertambangan, khususnya minyak mentah dan batu bara. Realisasi Pendapatan Bagian Laba BUMN sebesar Rp43.904,2 naik sebesar 18,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor positifnya pendapatan bagian Laba BUMN adalah perbaikan kinerja BUMN. Sementara itu realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp47.345,4 miliar, naik 12,87 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan BLU antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU serta adanya pergeseran beberapa satker PNB menjadi satker BLU. Sementara itu realisasi PNB Lainnya sebesar Rp108.834,6 atau 127,95 persen dari target APBNP.

*Realisasi
Penerimaan
Hibah Tahun
2017 Rp11,6
triliun*

Realisasi penerimaan hibah tahun 2017 mencapai Rp11.629,8 miliar atau naik 29,40 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan hibah pada periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp8.987,7 miliar. Penerimaan hibah bersumber dari penerimaan hibah dalam negeri sebesar Rp7.410,4 miliar dan penerimaan hibah luar negeri sebesar Rp4.219,4 miliar. Dilihat dari proporsi, penerimaan hibah dalam negeri lebih besar dibandingkan penerimaan hibah luar negeri. Sumber utama penerimaan hibah dalam negeri adalah dari pendapatan hibah dalam negeri langsung sebesar Rp7.410,4 miliar yang sebagian besar berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sementara itu, penerimaan hibah luar negeri merupakan penerimaan hibah yang terencana sebesar Rp530,1 miliar dari komitmen hibah dari negara-negara donor dan penerimaan hibah luar negeri langsung sebesar Rp3.689,3 miliar.

BELANJA NEGARA

Belanja Negara yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok dan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang direncanakan di dalam RKP. Secara umum, kebijakan belanja negara tahun 2017 diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja operasional dan belanja non-prioritas untuk mendukung peningkatan belanja produktif. Pemerintah terus mendorong agar kebijakan belanja negara dapat lebih berkualitas sehingga dapat memberikan dampak yang lebih optimal dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penurunan kesenjangan, serta penciptaan lapangan pekerjaan.

Realisasi Belanja Negara Tahun 2017 Rp2.007,4 triliun

Realisasi belanja negara tahun 2017 mencapai Rp2.007.351,8 miliar atau 94,10 persen dari pagu belanja APBNP tahun 2017 sebesar Rp2.133.295,9 miliar. Tingkat penyerapan anggaran belanja negara tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran belanja negara pada periode sama tahun 2016 sebesar 89,50 persen. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.265.359,4 miliar (92,57 persen dari pagu belanja) dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp741.992,4 miliar (96,82 persen dari pagu belanja).

Tabel 7 Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2016
(dalam miliar rupiah)

Uraian	2017	2016	Kenaikan/ Penurunan
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.265.359,4	1.154.018,2	9,65%
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	741.992,4	710.256,9	4,47%
1. Transfer ke Daerah	682.225,8	663.577,5	2,81%
2. Dana Desa	59.766,6	46.679,3	28,04%
Jumlah Belanja Negara	2.007.351,8	1.864.275,1	7,67%

Sumber: Kementerian Keuangan

Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat

Kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam tahun 2017 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, melalui upaya: (1) memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata; (2) mengurangi kemiskinan; (3) mengurangi pengangguran; dan (4) mengendalikan inflasi. Selain itu, Pemerintah juga senantiasa tetap berupaya mempertajam efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas belanja negara.

Tabel 8 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2016 dan 2017
(dalam miliar rupiah)

No.	Fungsi	APBNP 2016	2017	
			APBN	APBNP
1	Pelayanan Umum	500.406,2	360.385,7	362.640,5
2	Pertahanan	109.003,9	107.995,5	115.038,9
3	Ketertiban dan Keamanan	122.930,5	121.926,7	145.469,6
4	Ekonomi	182.027,9	306.445,9	327.079,7
5	Lingkungan Hidup	10.610,6	11.919,0	12.562,9
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	33.216,3	29.683,4	30.074,1
7	Kesehatan	66.069,8	61.724,5	58.728,2
8	Pariwisata dan Budaya	5.868,6	5.394,2	6.457,5
9	Agama	9.778,4	9.726,6	9.786,4
10	Pendidikan	143.048,9	143.093,9	143.997,6
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	123.734,9	157.230,7	155.121,3
Total		1.306.696,0	1.315.526,1	1.366.956,6

Sumber: Kementerian Keuangan

Pada APBNP 2017 fungsi pelayanan umum memperoleh alokasi belanja Pemerintah Pusat terbesar yaitu 26,52 persen

Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci menjadi 11 fungsi yang menggambarkan tugas Pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas: (1) fungsi pelayanan umum; (2) fungsi pertahanan; (3) fungsi ketertiban dan keamanan; (4) fungsi ekonomi; (5) fungsi perlindungan lingkungan hidup; (6) fungsi perumahan dan fasilitas umum; (7) fungsi kesehatan; (8) fungsi pariwisata; (9) fungsi agama; (10) fungsi pendidikan; dan (11) fungsi perlindungan sosial. Dalam APBNP tahun 2017, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang terbesar menurut fungsi adalah fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 26,52 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat, sedangkan sebesar 73,48 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Meningkatnya alokasi

fungsi pelayanan umum pada APBNP tahun 2017 antara lain disebabkan adanya tambahan anggaran untuk pengawasan tahapan pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019, serta persiapan pilkada serentak tahun 2018.

Secara umum realisasi belanja per fungsi sangat baik dengan penyerapan di atas 90 persen kecuali fungsi Pelayanan Umum, fungsi Lingkungan Hidup, dan fungsi Pariwisata dan Budaya yang masing-masing penyerapannya 84,70 persen, 84,49 persen, dan 89,36 persen.

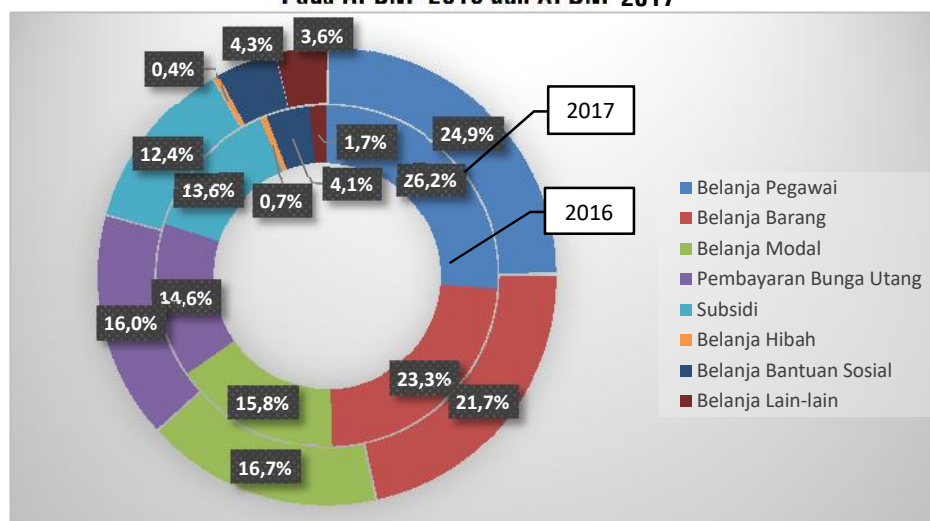
Tabel 9 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun 2017
(dalam miliar rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2017 (Audited)	%
1	Pelayanan Umum	362.640,5	307.147,2	84,70%
2	Pertahanan	115.038,9	117.506,6	102,15%
3	Ketertiban dan Keamanan	145.469,6	135.748,1	93,32%
4	Ekonomi	327.079,7	307.787,5	94,10%
5	Lingkungan Hidup	12.562,9	10.613,7	84,49%
6	Perumahan dan Fasilitas Umum	30.074,1	27.277,4	90,70%
7	Kesehatan	58.728,2	57.225,1	97,44%
8	Pariwisata dan Budaya	6.457,5	5.770,6	89,36%
9	Agama	9.786,4	8.870,4	90,64%
10	Pendidikan	143.997,6	138.507,3	96,19%
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	155.121,3	148.905,5	95,99%
	Total	1.366.956,6	1.265.359,4	92,57%

Sumber: Kementerian Keuangan

Apabila ditinjau klasifikasi ekonomi/jenis belanja, komposisi belanja pemerintah pusat pada APBNP tahun 2017 sedikit berbeda dengan APBNP tahun 2016. Belanja pegawai mendapatkan alokasi terbesar 24,9 persen sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 26,2 persen, demikian juga porsi belanja barang mengalami penurunan dari 23,3 persen menjadi 21,7 persen. Sementara porsi belanja modal mengalami peningkatan dari 15,8 persen menjadi 16,7 persen. Perbandingan komposisi alokasi belanja pemerintah pusat per jenis belanja tahun 2017 dengan tahun 2016 selengkapnya disajikan pada grafik berikut:

Grafik 17 Porsi Alokasi Belanja Pemerintah Pusat
Pada APBNP 2016 dan APBNP 2017



Sumber: Kementerian Keuangan

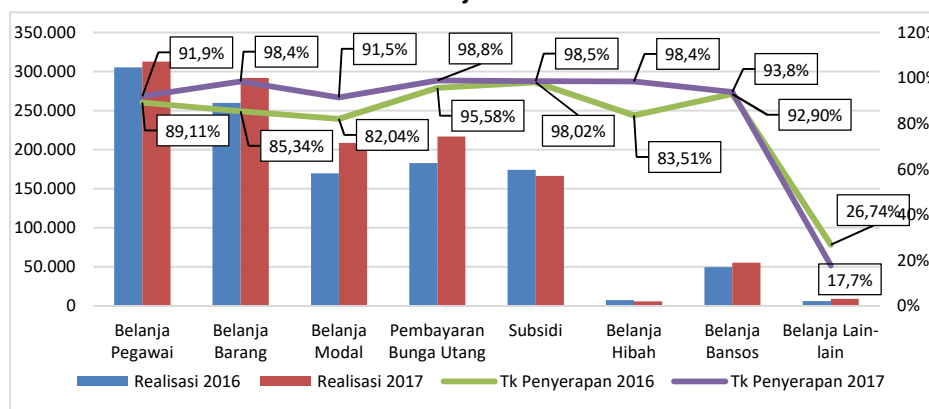
Tingkat penyerapan anggaran belanja Pemerintah Pusat mencapai 92,57 persen, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran belanja Pemerintah Pusat pada periode sama tahun 2016 sebesar 88,32 persen. Meningkatnya tingkat penyerapan anggaran belanja Pemerintah Pusat

tersebut antara lain disebabkan adanya percepatan proses lelang yang dapat dimulai pada tahun sebelumnya setelah Undang-Undang APBN Tahun 2017 ditetapkan, penyampaian DIPA yang dilakukan pada awal bulan Desember 2016, serta perbaikan tata kelola keuangan negara. Selain itu, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja APBN, pada awal TA 2017, pemerintah melalui surat Menteri Keuangan nomor S-153/MK.05/2017 tanggal 27 Februari 2017 hal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017 telah merumuskan 4 (empat) hal penting untuk menjamin pelaksanaan anggaran yang lebih baik dan terkendali, yaitu:

1. Melakukan reviu atas perencanaan kegiatan, penyerapan, dan pencapaian kinerja;
2. Memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan;
3. Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak; dan
4. Mengendalikan pengelolaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Kombinasi kebijakan pelaksanaan anggaran tersebut dipadukan dengan upaya simplifikasi pertanggungjawaban LPJ/SPJ terutama pada penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah, sehingga eksekusi belanjanya dapat memberikan dampak yang lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh para penerima manfaat. Kebijakan strategis pelaksanaan anggaran yang telah diupayakan pemerintah membuat pelaksanaan APBN semakin kredibel dan berdaya tahan dengan tetap fokus untuk menjaga kualitas belanja yang efektif dan efisien, likuiditas kas negara yang terjaga, dan semua tagihan dapat dibayarkan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran.

Grafik 18 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2017



Sumber: Kementerian Keuangan

Dilihat dari tren penyerapan anggaran sepanjang tahun 2017, semua jenis belanja mengalami peningkatan realisasi sejak awal tahun dan bergerak secara progresif dengan tren yang positif, sehingga pada akhir TA 2017 yakni di bulan Desember 2017 penumpukan pencairan belanja dapat ditekan secara signifikan. Hal ini lebih terlihat dari tren penyerapan anggaran pada belanja barang dan bantuan sosial tahun 2017 di mana penyerapan anggaran pada akhir tahun 2017 tidak sebesar tingkat penyerapan anggaran pada akhir tahun-tahun sebelumnya. Belanja barang tidak melonjak di Desember karena sejak awal tahun telah terealisasi cukup merata, sedangkan belanja bantuan sosial direalisasikan signifikan pada bulan Mei, Agustus, dan hampir 100% terealisasi di November 2017, sehingga tidak ada lonjakan signifikan di Desember 2017.

Lebih baiknya kinerja penyerapan anggaran di tahun 2017 diharapkan dapat menghasilkan output yang manfaatnya dapat lebih dirasakan secara langsung oleh masyarakat, di antaranya (1) bidang infrastruktur berupa pembangunan jalan dan jembatan, penyelesaian pembangunan bandara, pembangunan rel kereta api, (2) bidang pendidikan berupa penyaluran Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan beasiswa Bidik Misi, serta (3) bidang kesehatan dan perlindungan sosial terwujud melalui penyaluran Kartu Indonesia Sehat dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Boks II Simplifikasi SPJ Belanja Bantuan Pemerintah

Latar Belakang

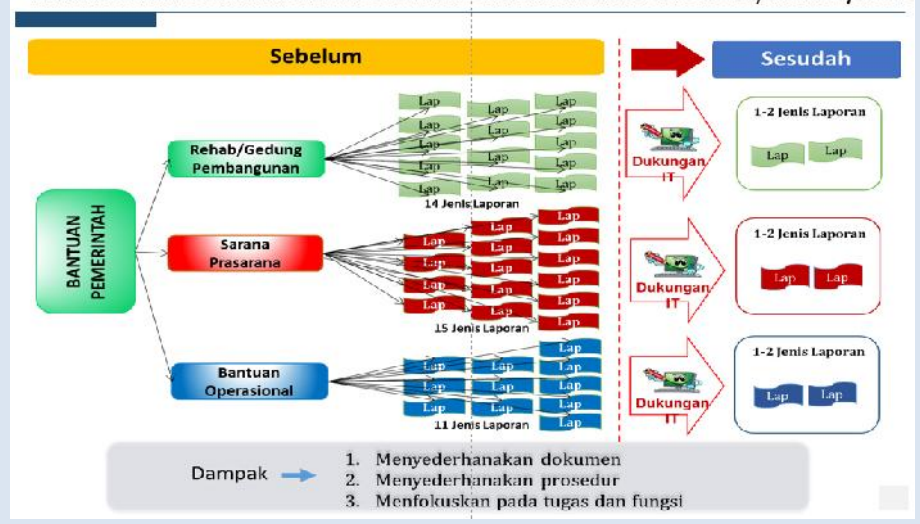
Presiden RI pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 tanggal 14 September 2017, memberikan arahan bahwa:

1. Kegiatan APBN/APBD tidak efisien sehingga perlu diperbaiki secara besar-besaran.
2. Para Gubernur/Bupati/Walikota agar mencontoh langkah Presiden dalam memberikan arahan kepada Menteri Keuangan untuk membuat prosedur laporan yang sederhana dan simpel, melalui revisi PMK 168/PMK.05/2015 menjadi PMK 173/PMK.05/2016.
3. Para Gubernur/Bupati/Walikota diminta agar turun ke lapangan untuk mengecek kepala sekolah yang bekerja sampai malam hanya untuk membuat SPJ.
4. Pemerintah daerah wajib menyusun Peraturan Daerah yang belum menerapkan simplifikasi yang menyebabkan bertambahnya jumlah laporan SPJ.
5. Meskipun jumlah laporan menjadi 2 (dua), tetapi harus akuntabel, gampang dicek, gampang dikontrol, mudah diawasi dan pengawasannya mudah diikuti.
6. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa masih memberatkan, sehingga Kepala Desa tidak fokus membuat irigasi atau embung namun lebih disibukkan dengan penyusunan laporan.
7. Saat ini dunia berubah sangat cepat, termasuk mengenai pembayaran *Non-cash transaction* menjadi sarana paling mudah dan sangat membantu.
8. Penggunaan IT dalam penyusunan laporan SPJ.

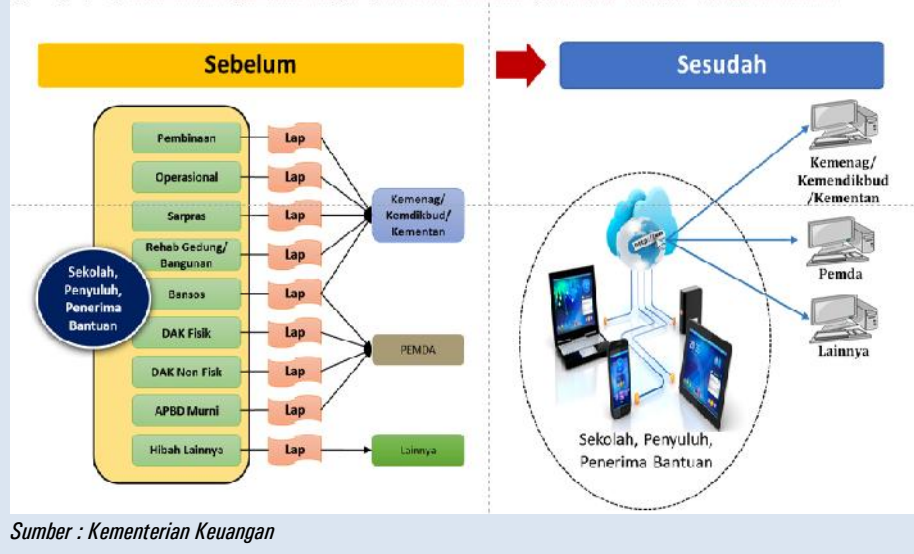
Tindak lanjut arahan Presiden tersebut agar dilakukan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan K/L Teknis, antara lain dengan melakukan:

1. Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran lainnya.
2. Koordinasi dengan Kemendagri dan Pemda dalam rangka simplifikasi APBD dan Dana Desa.

DAMPAK PENYEDERHANAAN LAPORAN PASCA REVISI PMK NOMOR 168/PMK.05/2015



Arsitektur IT (Topologi) penggunaan teknologi informasi dan penerapan dokumen elektronik (*less paper*) untuk mempermudah penyaluran bantuan, pembuatan laporan dan evaluasi.



Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan instrumen penting pendanaan Desentralisasi Fiskal

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan instrumen penting bagi pelaksanaan desentralisasi fiskal, untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa juga merupakan bentuk implementasi dari Nawacita, khususnya cita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Arah kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN Tahun 2017 adalah:

1. Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan pada kinerja pelaksanaan untuk setiap tahapannya di daerah.
2. Mengkonsolidasikan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sejalan dengan anggaran kementerian negara/lembaga (K/L), guna memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal.
3. Memperbaiki pengalokasian dan optimalisasi penggunaan Dana Transfer Umum, melalui: (a) perbaikan pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH); (b) perbaikan bobot Alokasi Dasar dan/atau bobot variabel yang digunakan dalam perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mempertimbangkan pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota kepada provinsi; (c) peningkatan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah; dan (d) Pagu DAU nasional tidak bersifat final atau dapat diubah sesuai perubahan PDN neto dalam Perubahan APBN.
4. Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk percepatan peningkatan pelayanan dasar publik dan pencapaian prioritas nasional, melalui: (a) pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah dan prioritas nasional, dengan memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi; dan (b) pengalokasian DAK Nonfisik sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik di daerah.
5. Meningkatkan alokasi anggaran Dana Insentif Daerah (DID) untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
6. Melakukan efisiensi dan efektivitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Provinsi Aceh, serta Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Meningkatkan alokasi Dana Desa secara bertahap untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara.

*Realisasi
Transfer ke
Daerah dan
Dana Desa
tahun 2017
Rp741,99 triliun*

Realisasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2017 mencapai Rp741.992,4 miliar (96,82 persen dari pagu pada APBNP), atau naik Rp31.735,5 miliar dari realisasi periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp710.256,9 miliar (91,50 persen dari pagu pada APBN tahun 2016). Realisasi transfer ke daerah dan dana desa tersebut terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp654.482,5 miliar (96,45 persen dari pagu), Dana Insentif Daerah Rp7.500 miliar (100 persen dari pagu), Dana Otonomi Khusus dan Keistimewaan DIY Rp20.243,3 miliar (100 persen dari pagu), dan Dana Desa sebesar Rp59.766,6 miliar (99,61 persen dari pagu).

**Boks III
Kebijakan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa**

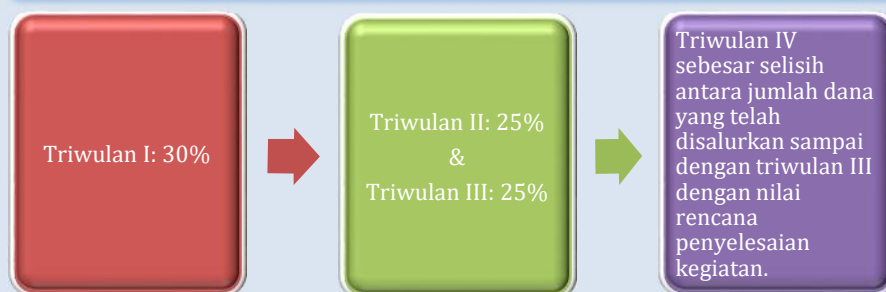
LATAR BELAKANG

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DAK Fisik dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sementara Dana Desa merupakan dana yang diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa juga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga atau K/L), maupun Pemerintah Daerah (yang dibiayai melalui DAK Fisik dan Dana Desa) harus terdapat sinkronisasi dalam pembangunannya sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai pedoman pemerintah dalam menyusun rencana APBN.

Salah satu program prioritas pemerintah (Nawa Cita), cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sebagai bentuk implementasi pencapaian sasaran tersebut pemerintah mendukung dengan mengalokasikan DAK Fisik dan Dana Desa. Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas monitoring penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, sesuai dengan PMK Nomor 50/PMK.07/2017 Pemerintah telah melaksanakan kebijakan berupa penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan oleh instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah.

Ketentuan Penyaluran DAK Fisik Bertahap (per Triwulan) TA 2017



Ketentuan Penyaluran Dana Desa TA 2017

Tahap I	Tahap II
•Penyaluran: Paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli •Besaran: 60%	•Penyaluran: Paling cepat bulan Agustus •Besaran: 40%

Sumber : Kementerian Keuangan

Kinerja Penyaluran DAK Fisik

Total realisasi penyaluran DAK Fisik sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp62.104,2 miliar atau 89,32 persen dari pagu Rp69.531,5 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pagu (miliar Rp)	Realisasi *) (miliar Rp)	% Realisasi
DAK Fisik bertahap	58.163,2	50.930,6	87,57
DAK Fisik Sekaligus	179,0	153,7	86,42
DAK Fisik Tambahan			
- Penyelesaian 2016	9.233,3	9.135,7	98,94
- Percepatan Infrastruktur	1.956,0	1.884,3	96,33

*) Perbedaan angka di belakang koma karena pembulatan

Total realisasi DAK Fisik bertahap sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp50.930,6 miliar atau 87,57 persen dari pagu sebesar Rp58.163,2 miliar. Dari enam regional yang ada, regional Sulawesi memiliki realisasi penyaluran DAK Fisik bertahap tertinggi sebesar Rp 9.268,5 miliar atau 93,03 persen dari pagu sebesar Rp9.962,9 miliar, sedangkan regional Maluku Papua memiliki realisasi penyaluran DAK Fisik paling rendah sebesar Rp6.692,7 miliar atau 81,69 persen dari alokasi pagu sebesar Rp 8.192,5 miliar. Dari rata-rata penyaluran Nasional sebesar 87,57 persen, terdapat 3 regional yang penyalurannya di atas rata-rata penyaluran nasional yaitu regional Sulawesi (93,03 persen), regional Sumatra (88,87 persen), dan Regional Kalimantan (88,43 persen), serta terdapat 3 regional lainnya penyalurannya di bawah rata-rata penyaluran nasional yaitu regional Maluku-Papua (81,69 persen), regional Jawa Bali (85,18 persen), dan Regional Nusa Tenggara (86,95 persen).

Tabel 10 Pagu dan Realisasi DAK Fisik Bertahap Per Regional Tahun 2017

No.	REGIONAL	PAGU (miliar Rp)	REALISASI (miliar Rp)	% REALISASI	SISA PAGU (miliar Rp)
1	SUMATERA	15.948,57	14.174,12	88,87%	1.774,45
2	JAWA BALI	12.688,81	10.808,40	85,18%	1.880,41
3	KALIMANTAN	6.804,80	6.017,25	88,43%	787,55
4	SULAWESI	9.962,87	9.268,46	93,03%	694,41
5	NUSTRA	4.565,66	3.969,70	86,95%	595,96
6	MALUKU PAPUA	8.192,46	6.692,65	81,69%	1.499,81
	JUMLAH	58.163,18	50.930,59	87,57%	7.232,59

Sumber : Kementerian Keuangan

Kinerja Penyaluran Dana Desa :

Total pagu Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp60.000,0 miliar. Penyaluran Dana Desa dibagi dalam dua tahap, yaitu penyaluran Tahap I sebesar 60 persen (Rp36.000,0 miliar)

dan Tahap II sebesar 40 persen (Rp24.000,0 miliar). Penyaluran Tahap I 2017 dilakukan paling lambat 31 Juli 2017, dan Tahap II mulai bulan Agustus 2017 s.d 13 Desember 2017. Total penyaluran Dana Desa sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp59.766,6 miliar atau 99,61 persen dari pagu sebesar Rp60.000,0 miliar, terdiri dari penyaluran Tahap I sebesar Rp35.839 miliar (99,55 persen) dan penyaluran Tahap II sebesar Rp23.928 miliar (99,70 persen).

Dari 6 (enam) regional, hampir semua regional realisasi Dana Desanya di atas 99 persen. Empat regional realisasi di atas rata-rata realisasi nasional (99,61 persen) yaitu regional Jawa-Bali (99,96 persen), Kalimantan (99,77 persen), Sulawesi (99,75 persen), dan Nusa Tenggara (99,85 persen). Dua regional realisasinya di bawah rata-rata realisasi nasional, yaitu regional Maluku Papua (98,80 persen) dan regional Sumatra (99,43 persen). Rincian realisasi Dana Desa per regional seperti berikut:

Tabel 11 Pagu dan Realisasi Dana Desa Per Regional Tahun 2017

No.	REGIONAL	PAGU (miliar Rp)	REALISASI (miliar Rp)	% REALISASI	SISA PAGU (miliar Rp)
1	SUMATERA	17.997,27	17.894,35	99,43%	102,92
2	JAWA BALI	19.186,85	19.179,77	99,96%	7,07
3	KALIMANTAN	5.258,36	5.246,32	99,77%	12,04
4	SULAWESI	6.872,79	6.855,95	99,75%	16,84
5	NUSTRA	3.225,37	3.220,44	99,85%	4,93
6	MALUKU PAPUA	7.459,37	7.369,77	98,80%	89,60
	Jumlah	60.000,00	59.766,58	99,61%	233,42

Sumber : Kementerian Keuangan

DEFISIT DAN PEMBIAYAAN

Arah kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2017 masih bersifat ekspansif

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2017 masih bersifat ekspansif. Arah kebijakan yang ekspansif tersebut difokuskan untuk mendukung kegiatan produktif guna meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Kebijakan fiskal yang ekspansif diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penerapan kebijakan fiskal ekspansif tersebut tetap diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal yang sehat dan berkesinambungan.

Dalam upaya untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah mengambil langkah-langkah (1) mengendalikan defisit dalam batas aman, (2) mengendalikan rasio utang terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas yang terkendali (*manageable*), serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, dan (3) mengendalikan keseimbangan primer melalui pengendalian kerentanan fiskal (*fiscal vulnerability*).

Berdasarkan penyesuaian besaran pendapatan negara dan belanja negara, defisit anggaran APBNP tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan besaran yang ditetapkan dalam APBN tahun 2017 menjadi 2,92 persen terhadap PDB.

Realisasi Defisit Anggaran 2017 sebesar Rp341,0 triliun

Realisasi defisit anggaran sebesar Rp340.975,9 miliar (85,84 persen dari target defisit APBNP tahun 2017 sebesar Rp397.235,8 miliar), yang berarti rasio defisit anggaran terhadap PDB adalah sebesar 2,51 persen. Rasio tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan dalam APBNP 2017 sebelumnya sebesar 2,92 persen. Hal tersebut mengindikasikan keberhasilan pemerintah menjaga defisit secara terkendali.

Tabel 12 Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB Tahun 2017
(dalam triliun rupiah)

Indikator	UU APBN	UU APBNP	Realisasi
Defisit Anggaran	330,17	397,24	340,98
PDB Nominal	13.716,7	13.613,2	13.588,8
% Defisit thd PDB	2,41%	2,92%	2,51%

Sumber: Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik

*Realisasi
Pembiayaan
APBN Tahun
2017 Rp366,6
triliun*

Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2017 mencapai Rp366.623,8 miliar atau 92,29 persen dari target APBNP tahun 2017 sebesar Rp397.235,8 miliar. Realisasi tersebut menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang mencapai Rp334.503,3 miliar. Realisasi pembiayaan secara lengkap disajikan pada tabel 13.

Tabel 13 Realisasi pembiayaan anggaran tahun 2017
(dalam miliar rupiah)

Uraian	APBN-P 2017	Realisasi
Pembiayaan Utang	461.343,6	429.076,6
Pembiayaan Investasi	-59.733,8	-59.754,1
Pemberian Pinjaman	-3.668,7	-2.052,4
Kewajiban Penjaminan	-1.005,4	-1.005,4
Pembiayaan Lainnya	300,0	359,1
Total Pembiayaan	397.235,7	366.623,8

Sumber: Kementerian Keuangan

*Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran
(SiLPA) sebesar
Rp25,65 triliun
pada tahun
2017*

Berdasarkan realisasi pembiayaan tersebut di atas, maka telah terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp25.647,9 miliar pada tahun 2017. SiLPA tersebut menjadi bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat digunakan sebagai bantalan fiskal (*fiscal buffer*) untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi pada tahun-tahun berikutnya.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disusun untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) dalam memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan dan dengan pendekatan kegunaan dalam pembuatan keputusan (*decision usefulness approach*). LKPP mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga (K/L), beserta unit organisasi di bawahnya yang meliputi Eselon I, Kantor Wilayah, dan Satuan Kerja (satker) yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

LKPP Tahun 2017 merupakan konsolidasian atas laporan keuangan entitas pelaporan BUN dan entitas pelaporan K/L. LKKL merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas akuntansi satuan kerja di bawahnya.

Berikut ini adalah Daftar Entitas Pelaporan Tingkat K/L dan BUN selaku Pengguna Anggaran atau Kuasa BUN dan jumlah Entitas Akuntansi untuk setiap K/L dan BUN, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dalam LKKL.

*Daftar entitas
pelaporan tingkat
Kementerian
Negara/Lembaga*

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2017	2016
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	74	71
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.656	1.657
5	BA 006	Kejaksaan Agung	524	521
6	BA 007	Sekretariat Negara	14	15
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	1.114	1.660
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	144	144
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	496	454
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1.388	1.342
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1.101	1.100
12	BA 018	Kementerian Pertanian	1.177	1.363
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	99	129
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	51	51
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	667	685
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	365	447
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.461	1.464
18	BA 025	Kementerian Agama	6.682	7.026
19	BA 026	Kementerian Ketenagakerjaan	354	448
20	BA 027	Kementerian Sosial	291	308
21	BA 029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	400	500
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	639	921
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.177	785
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3	3
27	BA 040	Kementerian Pariwisata	101	98
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	236	319
30	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	298	252
31	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	41	42
32	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	1

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2017	2016
33	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
34	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1	1
35	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
36	BA 054	Badan Pusat Statistik	513	513
37	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	36	36
38	BA 056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	520	558
39	BA 057	Perpustakaan Nasional	36	36
40	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	61	61
41	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.282	1.257
42	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	42	41
43	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
44	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	40	40
45	BA 066	Badan Narkotika Nasional	223	175
46	BA 067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	479	452
47	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	42
48	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
49	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	194	183
50	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	549	549
51	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	1
52	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1
53	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	46	47
54	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	20	20
55	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19	19
56	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	21	21
57	BA 083	Badan Informasi Geospasial	1	1
58	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
59	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3
60	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	8	8
61	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	38	35
62	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	16	15
63	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	40	39
64	BA 090	Kementerian Perdagangan	544	454
65	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	42	35
66	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
67	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
68	BA 100	Komisi Yudisial	1	1
69	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
70	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	29	29
71	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	1
72	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
73	BA 107	Badan SAR Nasional	36	36
74	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
75	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	1
76	BA 110	Ombudsman RI	1	1
77	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	58	53
78	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1	1
79	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	1
80	BA 114	Sekretariat Kabinet	1	1
81	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	35	35
82	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	71	71
83	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	30	30
84	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	1
85	BA 119	Badan Keamanan Laut	1	1
86	BA 120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	1
87	BA 121	Badan Ekonomi Kreatif	1	1

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Entitas Akuntansi	
			2017	2016
88	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.00	Kuasa Bendahara Umum Negara	183	181
	BA 999.01	Pengelolaan Utang	1	1
	BA 999.02	Hibah	3	3
	BA 999.03	Investasi Pemerintah	14	14
	BA 999.04	Pengelolaan Penerusan Pinjaman	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah	183	1
	BA 999.07	Belanja Subsidi	18	16
	BA 999.08	Belanja Lain-lain	56	11
	BA 999.99	Transaksi Khusus	23	19
	BA 999.09	Pengelolaan Badan Lainnya	1	1
Jumlah Entitas Akuntansi			26.146	26.982

LKPP mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut.

- 1) transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, dan dana urusan bersama;
- 2) ekuitas bersih dari Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker.

LKPP tidak mencakup entitas:

-) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
-) Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH);
-) Pemerintah Daerah; dan
-) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun demikian, penyertaan modal Pemerintah pada Perusahaan Negara (BUMN/Non BUMN) dan PTN Badan Hukum, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara. LKPP juga dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya.

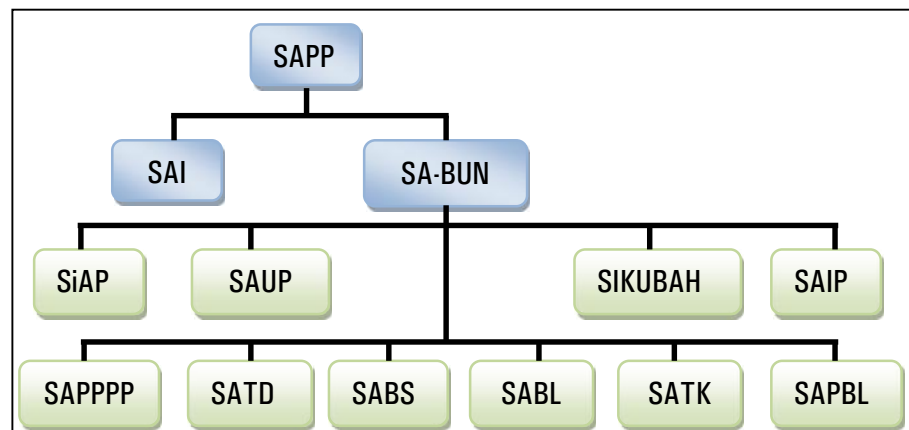
Sesuai dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker sampai tingkat K/L termasuk satker BLU dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Dana Tugas Pembantuan/Dana Urusan Bersama, untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Dalam pelaksanaannya, K/L membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL). SiAP menghasilkan

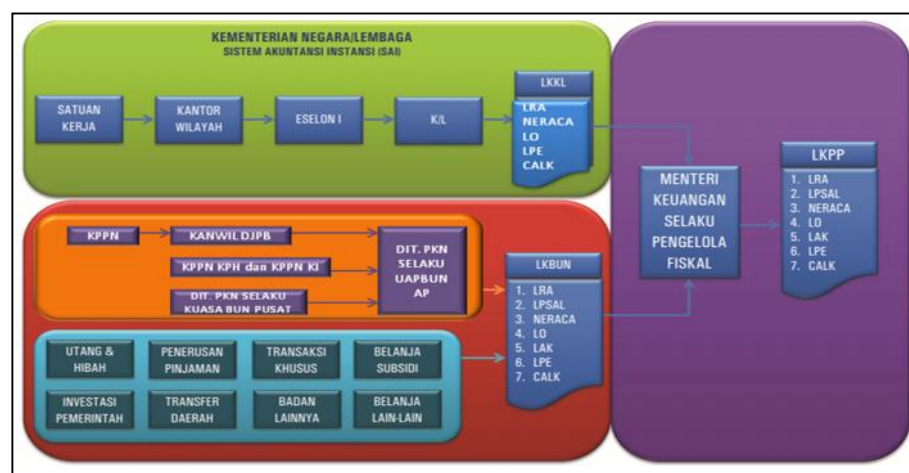
Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat dan Neraca Kuasa BUN sebagai data yang akan direkonsiliasi dengan data SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.

KERANGKA UMUM SAPP



ALUR PENYUSUNAN LKPP



SAPP dilaksanakan untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LRA) disusun berdasarkan kompilasi LRA seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. LRA terdiri dari Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

- Angka realisasi Pendapatan Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan uang riil yang masuk ke Kas Negara dan/atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) atas data BUN.
- Angka realisasi Belanja Negara pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh pengeluaran uang riil keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi belanja.

*LKPP terdiri dari LRA,
LPSAL, LO, LPE,
Neraca, LAK, dan CaLK.*

Dalam hal terdapat selisih data realisasi antara SiAP dengan K/L diungkapkan di dalam CaLK.

- Angka realisasi Pembiayaan pada LRA Tahun Anggaran Berjalan disajikan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang berasal dari pembukuan intrakomptabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang riil yang masuk ke atau keluar dari Kas Negara dan/atau melalui pengesahan atas transaksi pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) disusun berdasarkan beberapa komponen seperti nilai SAL awal yang berasal dari nilai SAL Pemerintah Pusat Awal Tahun Anggaran Berjalan, Penggunaan SAL di Tahun Anggaran Berjalan, SiLPA/SiKPA yang berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Berjalan, Penyesuaian Pembukuan, serta koreksi-koreksi yang mempengaruhi SAL dan SiLPA/SiKPA. Seluruh penyesuaian/koreksi yang mempengaruhi perhitungan catatan SAL disajikan sebagai Penyesuaian SAL pada tahun berjalan (tidak dilakukan penyesuaian terhadap SAL awal).

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun berdasarkan data Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dan Surplus/Defisit Pos Luar Biasa, yang dikompilasi dari seluruh LKKL dan LKBUN. Seluruh data tersebut diperhitungkan untuk menghasilkan Surplus/Defisit-LO yang menjadi nilai yang akan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) disusun berdasarkan nilai Ekuitas Awal yang berasal dari Ekuitas Awal Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran Berjalan, Surplus/Defisit-LO yang berasal dari hasil akhir Laporan Operasional Tahun Anggaran Berjalan, dan Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, yang diperhitungkan untuk menghasilkan nilai Ekuitas Akhir yang akan disajikan di Neraca.

5. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh LKKL dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kuasa BUN dan Neraca Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Khusus data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

6. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan ini mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN, termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah langsung dan belanja yang dananya berasal dari pendapatan hibah langsung, pengesahan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan belanja yang bersumber dari PHLN yang penarikannya melalui mekanisme *direct payment*, serta pengesahan pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan disusun dengan menggunakan SiAP. Dalam rangka menyajikan saldo kas dan setara kas yang selaras antara saldo di laporan arus kas dan saldo di neraca, pada laporan arus kas juga disajikan informasi tambahan terkait saldo kas yang berada dalam rekening yang dikuasai oleh kementerian negara/lembaga di luar saldo kas hibah dan kas BLU yang sudah disahkan. Informasi tambahan tersebut antara lain meliputi saldo kas di bendahara pengeluaran, saldo kas di bendahara penerimaan, saldo kas BLU/hibah yang belum disahkan dan lain-lain.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan SAL, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat pada tahun anggaran 2015. Atas ketentuan tersebut, mulai pelaporan keuangan tahun 2015, Pemerintah telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 atau SAP Berbasis Akrual. Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPP diharapkan telah sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca, serta Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional adalah berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset, hak tagih atas pendapatan dan/atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan oleh Pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

▪ **Pendapatan**

Kebijakan akuntansi pendapatan pada SAP Berbasis Akrual, terdiri atas:

a) **Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut jenis pendapatannya, pendapatan LO dibagi menjadi tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNPB-LO serta Pendapatan Hibah-LO. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengecualian terhadap asas bruto pada Pendapatan-LO berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2017. Paragraf 82 PSAP 13

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak Pemerintah untuk menagih suatu pendapatan atau telah terdapat realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau terjadinya pengesahan oleh KPPN

b) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening KUN yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Pendapatan BLU. Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran entitas pelaporan/akuntansi.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi. Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai. Hal ini dikarenakan penerimaan migas pada rekening migas dan penerimaan panas bumi pada rekening panas bumi masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *underlifting* Kontraktor, *fee* kegiatan usaha hulu migas, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas, dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, dan apabila terdapat saldo, kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan hulu migas sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Migas diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan petunjuk teknis yang digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan PNBP yang berasal dari kegiatan panas bumi sebagai pedoman atau kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Panas Bumi diatur melalui surat nomor S-10601/PB.6/2016 tanggal 22 Desember 2016 hal Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan PNBP Panas Bumi.

Selain pada penerimaan migas, pengecualian terhadap asas bruto atas Pendapatan-LRA juga berlaku untuk pengakuan dan penyajian pendapatan BLU yang berasal dari Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai konsekuensi penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada pelaporan keuangan tahun 2017. Paragraf 26 PSAP 13 menyatakan bahwa khusus untuk pendapatan dari kerja sama operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi, atau potensi jasa, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D)

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

▪ **Beban, Belanja, dan Transfer**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadinya konsumsi aset, dan saat timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis beban) dan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi konsumsi aset, dan/atau timbulnya kewajiban. Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening KUN yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Secara umum belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Khusus pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada lembar muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja diungkapkan menurut klasifikasi organisasi dan jenis belanja.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, antara lain dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian, dana bagi hasil milik Pemerintah Daerah, serta dana desa. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat. Pengeluaran transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Negara atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SPM/SP2D).

▪ **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan juga mencakup transaksi penyertaan modal negara, penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening KUN atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUN/Kuasa BUN. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas adalah berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran BUN 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

▪ Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat. Aset diukur dalam satuan uang (rupiah). Namun demikian, termasuk juga dalam jenis aset adalah sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian aset dalam hal ini, tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

- Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan jangka pendek, dan persediaan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang jangka pendek, investasi jangka pendek, dan persediaan.

Kas dicatat di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada saat transaksi. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh BUN atau Kuasa BUN terdiri atas:

-) Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Negara dan Sub Rekening Kas Umum Negara di Bank Sentral;
-) Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Sentral atau Bank Umum;
-) Kas pada Rekening Bank Persepsi dan Bank Operasional yang dikelola Kuasa BUN;
-) Rekening Khusus (*special account*) Pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Kas dan Setara Kas yang dikelola oleh K/L terdiri atas:

-) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja.
-) Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan K/L setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
-) Kas pada BLU merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di K/L.
-) Kas lainnya yang dikelola K/L dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan adalah saldo kas pada K/L selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, dan Kas pada BLU. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak yang belum disetor ke kas negara, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L.

Dalam hal Dana Bergulir ditetapkan oleh Pemerintah tidak digulirkan kembali, maka kas dari Dana Bergulir yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya dalam kelompok Aset Lainnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah ke rekening Pemerintah yang lain, namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.

Termasuk dalam klasifikasi Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Investasi jangka pendek meliputi, antara lain:

- a. Investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- b. Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- c. Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca.
- d. Reksadana.

Piutang Jangka Pendek dinyatakan dalam neraca menurut nilai nominal hak pemerintah yang timbul berdasarkan surat keputusan atau dokumen sumber lainnya sebagai dasar penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Perpajakan, Piutang Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang, Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, Piutang BLU, Piutang Lain-lain, Piutang Transfer ke Daerah, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. LKPP Tahun Anggaran Berjalan menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang jangka pendek dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak dilakukan untuk jenis piutang berupa Uang Muka Belanja/Beban Dibayar di Muka, Pendapatan yang Masih Harus Diterima, serta piutang yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode kompensasi dengan pembayaran belanja/transfer pada periode berikutnya, seperti piutang kelebihan transfer ke daerah.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam mencatat Persediaan, Pemerintah menggunakan metode pencatatan Perpetual. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir karena Pemerintah belum dapat mengimplementasikan Metode *First In First Out* (FIFO) dalam penilaian Persediaan.

- **Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek (telah

dijelaskan sebelumnya pada bagian Aset Lancar) dan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

a. Investasi Non Permanen

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen meliputi, antara lain:

-) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo;
-) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
-) Dana yang disisihkan Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat (dana bergulir);
-) Investasi non permanen lainnya, yang bersifat tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

b. Investasi Permanen

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus/berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi antara lain seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, badan usaha, atau badan hukum lainnya. Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah adalah sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan PMN pada perusahaan negara yang kepemilikan pemerintah kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. PMN dapat berupa surat berharga seperti saham pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan terbatas). Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan aset yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan BUMN berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh K/L. Aset-aset yang berstatus BPYBDS pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN pada neraca sebesar nilai perolehannya yang tertuang pada BAST atau nilai wajar berdasarkan penilaian dalam hal tidak terdapat nilai perolehannya. Pencatatan aset BPYBDS pada neraca BUMN didasarkan atas penggunaan prinsip *substance over form* dan *matching cost against revenue*, bahwa aset tersebut secara substansi telah digunakan oleh BUMN dalam kegiatan operasi dalam rangka memperoleh pendapatan. PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat

sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen, investasi pada PTN BH serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya.

Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, diakui sebagai pengurang nilai Investasi Pemerintah di Neraca dan dicatat sebagai beban penyesuaian di LO sebesar porsi nilai kepemilikan pemerintah berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang disampaikan oleh badan usaha penerima Investasi (*emiten*). Dalam hal nilai bagian pemerintah atas kerugian badan usaha penerima investasi dimaksud melebihi nilai Investasi Pemerintah (Investasi negatif), penyajian nilai Investasi Pemerintah di Neraca dilakukan sampai dengan nilai Investasi menjadi nihil. Dalam hal nilai Investasi bernilai negatif dan Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban konstruktif untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima Investasi (*emiten*), maka bagian pemerintah atas akumulasi rugi Investasi disajikan sebagai Investasi yang bernilai negatif di Neraca dan diberikan penjelasan yang memadai di CaLK.

- Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat proses perolehan aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

Pada prinsipnya, Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L tahun anggaran berjalan dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap yang diperoleh sebelum tahun 2004 pada Neraca Tahun Anggaran Berjalan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana Lampiran VII PMK No.120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu: Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran. Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Pemerintah telah menerapkan penyusutan Aset Tetap untuk seluruh entitas akuntansi mulai pelaporan keuangan tahun 2013 sebagaimana PMK No.1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK No.90/PMK.06/2014. Penyusutan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tetap ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap di Neraca.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai KDP sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. KDP yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah, Pemerintah melakukan proses Inventarisasi dan Penilaian Kembali Aset Tetap Pemerintah berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam periode tahun 2017 dan 2018. Pada pelaporan tahun 2017, aset tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan (*historical cost*). Hasil Penilaian Kembali yang telah dilakukan pada tahun 2017 diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2017, Catatan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2017, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017. Penyajian aset tetap berdasarkan nilai wajar hasil penilaian kembali dilakukan setelah proses penilaian kembali aset tetap Pemerintah Pusat telah selesai secara keseluruhan.

- **Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Piutang TPA merupakan piutang yang timbul karena adanya penjualan aset Pemerintah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas/kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada Pemda, BUMN, BUMD atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada Pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah di kemudian hari.

Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah piutang jangka panjang yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai jenis piutang sebagaimana dijelaskan di atas. TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau dana yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dapat diidentifikasi serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer, *lisensi* dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dan Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Dana Kelolaan BLU, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

Dana Penjaminan merupakan dana yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terjamin.

Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga.

Aset KKKS yang disajikan pada LKPP adalah:

- a. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) disajikan pada Neraca sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan tahun 2004 yang belum di-IP diungkapkan pada CaLK.
- b. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan telah dilakukan inventarisasi disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan. Dalam hal Aset KKKS tersebut tidak diketahui nilai perolehannya, namun sudah dilakukan penilaian, maka disajikan di Neraca sebesar nilai hasil penilaian. Aset KKKS yang diperoleh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang belum diinventarisasi diungkapkan pada CaLK.
- c. Aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 disajikan di Neraca sebesar nilai perolehan.
- d. Atas Aset KKKS yang telah diserahkan ke Pemerintah, dilakukan reklasifikasi dari aset lainnya menjadi aset tetap. Dikecualikan dari reklasifikasi tersebut adalah dalam hal Aset KKKS tersebut dimaksudkan untuk dilakukan pemindahtanganan atau Aset KKKS tersebut kondisinya rusak berat, usang atau secara ekonomis nilainya tidak material dan tidak sebanding dengan biaya pemeliharaannya.
- e. Aset KKKS yang dicatat dalam LKPP bukan merupakan hasil konsolidasian dari Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, melainkan berasal dari hasil konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dalam hal ini KPA BUN Transaksi Khusus pada DJKN).

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, Yayasan Gedung Veteran, SKK Migas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA, aset eks Pertamina, aset bekas milik asing/cina, aset BMN *idle*, dan aset PKP2B. Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun Anggaran Berjalan disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2016, mulai tahun anggaran 2016, dilakukan penerapan amortisasi atas BMN berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Amortisasi atas aset tak berwujud dilakukan menggunakan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai

sis/residu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tak Berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Masa manfaat penyusutan Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Penyusutan Aset Tak Berwujud diakumulasi setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Aset Lainnya di Neraca.

▪ **Kewajiban**

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban bersumber antara lain dari penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi Pemerintah dan masa pembayaran/pelunasannya diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain Utang Transfer, Utang Bunga, Utang Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Surat Perbendaharaan Negara, dan Utang Jangka Pendek Lainnya yang terdiri dari: (1) Pendapatan Diterima di Muka; (2) Utang Biaya; dan (3) Kewajiban pada Pihak Lain.

Utang Transfer merupakan kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan Pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *underlifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama SKK MIGAS.

Kewajiban akibat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *Inkracht*

Tuntutan hukum kepada Pemerintah yang dimaksud dalam laporan keuangan ini merupakan gugatan perdata, gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maupun gugatan arbitrase yang ditujukan kepada Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga yang dapat menimbulkan pengeluaran negara dari APBN, hilangnya aset tanah dan bangunan karena kepemilikan yang dipersengketakan, maupun hilangnya potensi penerimaan negara.

Pemerintah perlu melakukan upaya hukum yang maksimal termasuk upaya hukum luar biasa dalam menghadapi tuntutan hukum seperti pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan/atau meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Terkait tuntutan hukum atas Barang Milik Negara yang keputusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka Kementerian Negara/ Lembaga bersangkutan harus melaporkan tuntutan hukum tersebut kepada Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Apabila diperlukan, DJKN dapat melakukan gugatan intervensi atas perkara yang dipersengketakan.

Dalam hal putusan atas tuntutan hukum kepada pemerintah telah *inkracht* dan upaya hukum luar biasa telah dilaksanakan, maka Kementerian Negara/Lembaga terkait harus segera menindaklanjuti putusan *inkracht* tersebut untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi keuangan negara. Pendanaan atas pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah *inkracht* dianggarkan pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Kebijakan akuntansi atas putusan yang telah *inkracht* dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut.

-) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, dan telah dianggarkan dalam DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKKL;
-) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan yang *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan DIPA Kementerian Negara/Lembaga, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam CaLK LKKL secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum);
-) Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan tidak diungkapkan dalam CaLK dalam LKKL.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah antara lain terdiri dari Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Utang Obligasi/Surat Utang Negara (SUN), Utang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Utang Pembelian Cicilan, dan Utang Jangka Panjang Lainnya. Utang Luar Negeri Pemerintah antara lain adalah

pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rate bonds*, *variable rate bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2017 disajikan sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

-) **Fixed Rate (FR) Bonds** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
-) **Obligasi Negara Ritel (ORI)** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
-) **Variable Rate (VR) Bonds** adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
-) **Zero Coupon (ZC) Bond** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
-) **Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01.
-) **SU-002 dan SU-004** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
-) **SU-007** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. Angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
-) **SRBI-01** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen

per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.

) **International Bonds** adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

) **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs Rupiah terhadap USD yang ditetapkan secara khusus.

Pemerintah tidak mengakui adanya utang kepada pegawai (*Past Service Liabilities*) atas pensiun PNS. Hal ini dikarenakan bahwa saat ini Pemerintah menanggung seluruh pembayaran pensiun kepada para penerima pensiun, di samping bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah belum memiliki Program Dana Pensiun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka program pensiun yang akan datang perlu dibuat sedemikian rupa agar tidak diperlukan pengeluaran Pemerintah untuk membayar *Past Service Liabilities* dengan jumlah besar yang dapat berdampak negatif bagi APBN.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau nilainya tidak dapat diukur dengan andal.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah antara lain pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II, serta Program Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana diungkapkan secara memadai dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca. Kewajiban

*Kewajiban kontinjensi
diungkapkan dalam
catatan penting lainnya*

Kontijensi pada tahun anggaran berjalan juga meliputi kewajiban yang timbul akibat penyaluran subsidi non energi yaitu Subsidi Bunga Kredit Program yang belum dibayar oleh Pemerintah. Terhadap kewajiban ini, diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada CaLK Neraca.

Ekuitas

▪ Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah. Dalam Basis Akrua, Pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Kurs Mata Uang Asing

▪ Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

Z Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Z Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.

Z Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:

-) transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
-) transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 30 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	13.548,00	13.436,00
Dolar Australia [AUD]	1	10.557,29	9.724,31
Dolar Canada [CAD]	1	10.778,92	9.971,43
Franc Swiss [CHF]	1	13.842,15	13.177,76
Yuan China [CNY]	1	2.073,40	1.936,86
Kroner Denmark [DKK]	1	2.172,34	1.905,09
Euro [EUR]	1	16.173,62	14.161,55
Poundsterling Inggris [GBP]	1	18.218,01	16.507,51
Yen Jepang [JPY]	100	12.021,84	11.540,49
Korean Won [KRW]	1	12,70	11,15

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan. LKPP tahun anggaran berjalan menyajikan selisih kurs atas dalam mata uang asing sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional tahun anggaran berjalan.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas)

Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:

- 1) Jumlah mata uang asing yang keluar dari rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan dibagi dengan saldo awal rekening milik BUN dalam mata uang asing pada tanggal pelaporan sebelum terjadi transaksi pengeluaran mata uang asing dari rekening milik BUN dalam mata uang asing;
- 2) Hasil pembagian angka 1) dikalikan dengan saldo akhir selisih kurs belum terealisasi.
- 3) Selisih kurs diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs pada Pos Kegiatan Non Operasional dalam Laporan Operasional, dan sebagai belanja/pendapatan lain-lain pada Laporan Realisasi Anggaran.

Selisih kurs belum terealisasi dihitung dengan cara sebagai berikut.

- 1) Penghitungan saat pelaporan setiap hari kerja:
Mengurangi kurs hari pelaporan dengan kurs awal berupa kurs hari kerja sebelumnya, kemudian dikalikan dengan saldo akhir hari pelaporan, kemudian dikurangi dengan jumlah selisih kurs belum terealisasi atas transaksi konversi.
- 2) Penghitungan penyesuaian pada saat terjadi pemindahbukuan dari rekening BUN dalam mata uang asing ke rekening BUN dalam mata uang asing lainnya dan pada saat konversi:
 - a) Membandingkan antara besaran mata uang asing yang dipindahbukukan dengan saldo mata uang asing sebelum dipindahbukukan kemudian dikali saldo selisih kurs belum terealisasi saat pemindahbukuan;
 - b) Kemudian diakui sebagai untung/rugi selisih kurs belum terealisasi dan dicatat pada Laporan Operasional yang akan mempengaruhi posisi ekuitas di Neraca.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing (valas) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing:

(Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang Outstanding x Kurs Tengah BI Tanggal Pelaporan) – Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah.

Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai positif maka dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*). Dalam hal hasil pengurangan dimaksud bernilai negatif maka dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

*Aset/Kewajiban Eks
BRR NAD-Nias*

Pencatatan selisih kurs atas investasi dalam valas

Selisih kurs atas investasi dalam mata uang asing dicatat sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional. Sedangkan pengaruh selisih kurs atas investasi yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang Rupiah yang dikonversi dalam mata uang asing, dicatat sebagai komponen LPE.

▪ **Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU dengan UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR NAD-Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun demikian, sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP tahun anggaran berjalan, Neraca Likuidasi BRR NAD Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias tidak dikonsolidasikan pada LKPP tahun anggaran berjalan dan diungkapkan secara memadai di Catatan Penting Lainnya. Pada Catatan Penting Lainnya LKPP tahun anggaran berjalan yang diungkapkan adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK.

▪ **Eliminasi akun timbal balik dan reklasifikasi dalam konsolidasi Laporan Keuangan**

Dalam penyusunan LKPP, Pemerintah menerapkan eliminasi akun timbal balik terhadap transaksi/akun buku besar yang bersifat timbal balik. Eliminasi dilakukan sepanjang transaksi/akun dimaksud dapat diidentifikasi sifat dan nilainya dapat diukur secara handal. Di antara transaksi/akun timbal balik yang dieliminasi tersebut antara lain: Transaksi antar entitas, yaitu eliminasi akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar, eliminasi akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL), Setoran Surplus BLU, serta eliminasi akun Pengesahan Hibah Langsung.

Pada proses konsolidasi neraca, jurnal eliminasi juga dilakukan terhadap pos yang sama atau yang secara substansi sama yang disajikan oleh dua atau lebih entitas pelaporan, antara lain

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di KL dari Hibah, dan Kas pada BLU disajikan oleh K/L/BABUN dan Kuasa BUN. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh K/L/BABUN, sedangkan atas data yang berasal dari Kuasa BUN dilakukan eliminasi.
- b. Investasi Permanen BLU yang dicatat oleh Kementerian Agama dan BA BUN Investasi Pemerintah. LKPP menggunakan data yang disajikan oleh BA BUN Investasi Pemerintah, sedangkan atas data yang berasal dari Kementerian Agama dilakukan eliminasi.

Pada konsolidasi LKPP, eliminasi atas Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Berasal Dari Enititas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang secara Organisatoris Membawahinya (Antar K/L) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU belum dapat dilaksanakan pada pelaporan tahun 2017.

Di samping itu, Pemerintah juga melakukan jurnal penyesuaian/reklasifikasi pada saat proses konsolidasi, antara lain:

- Uang Muka dari KPPN yang merupakan akun kewajiban pada neraca LKKL menjadi ekuitas pada neraca;
- Utang atas Pajak yang Belum Disetor ke Kas Negara pada LKKL menjadi Pendapatan Pajak-LO;
- Hibah yang Belum Disahkan tahun anggaran berjalan pada LKKL dan Pendapatan yang ditangguhkan (hibah yang NoDnya belum diterima sehingga belum disahkan) pada BA BUN 999.02 menjadi Pendapatan Hibah-LO.
- Hibah yang Belum Disahkan tahun anggaran yang lalu pada LKKL menjadi Ekuitas.
- Jurnal penyesuaian/reklasifikasi lainnya yang diperlukan dalam rangka penyusunan Neraca Konsolidasian LKPP dapat dilakukan sepanjang mendapatkan otorisasi dari pejabat yang berwenang dalam penyusunan LKPP.

▪ **Kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS)**

Pada tahun 2010 International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dengan SAP dengan melakukan perbandingan antara SAP berbasis: Kas Menuju Akrua! sebagaimana diatur dalam Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan 26 (dua puluh enam) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2008. Setiap standar dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Indonesia pada saat itu. Kajian IPSASB tersebut menyimpulkan bahwa:

- a. PSAP berbasis Kas Menuju Akrua! pada Lampiran II PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berada di atas IPSAS berbasis kas dalam semua aspek yang signifikan; dan
- b. Langkah-langkah strategis telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan menunjukkan progress dalam sistem akuntansi.

Sehubungan dengan penerapan SAP berbasis akrual yang telah dimulai sejak tahun 2015, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah melakukan kajian kesesuaian antara IPSAS dan SAP berbasis akrual. Kajian dilakukan dengan membandingkan antara SAP berbasis Akrua! dengan 1 (satu) Kerangka Konseptual dan 38 (tiga puluh delapan) IPSAS berbasis akrual yang dipublikasikan dalam IPSAS Tahun 2016. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa:

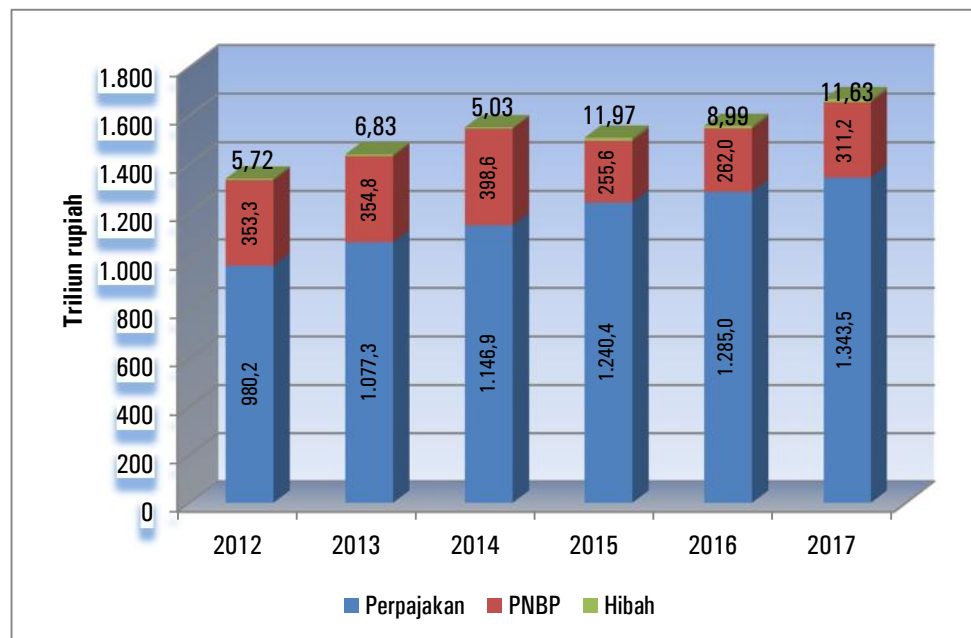
1. SAP berbasis akrual, yang meliputi PSAP berbasis Akrua! pada Lampiran I PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ditambah PMK penetapan PSAP, Kerangka Konseptual, Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, setara dengan IPSAS berbasis akrual dalam semua aspek yang signifikan;
2. Terdapat 22 SAP yang setara dengan Kerangka Konseptual dan IPSAS tanpa perbedaan yang material, serta terdapat 5 *draft* PSAP yang setara dengan IPSAS, namun sedang dalam pembahasan;
3. Perbedaan yang ada terjadi karena mempertimbangkan kondisi dan situasi Pemerintah Indonesia, misalnya adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebutuhan akuntansi dan pelaporan pemerintah Indonesia.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

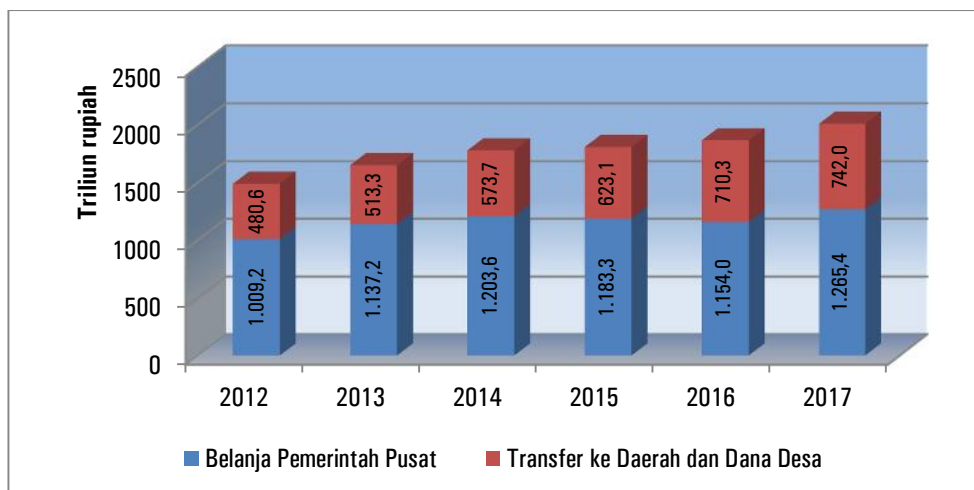
Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran (TA) 2017 adalah sebesar Rp1.666.375.912.658.085 atau mencapai 95,99 persen dari target APBN-P TA 2017 sebesar Rp1.736.060.149.915.000. Realisasi Pendapatan Negara berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.343.529.843.798.510, PNPB sebesar Rp311.216.253.857.085, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp11.629.815.002.490. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp8.933.799.207.486 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp280.946.213.728.

Pendapatan Negara TA 2017 mengalami kenaikan Rp110.441.761.825.295 atau lebih besar 7,10 persen jika dibandingkan dengan TA 2016. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan, PNPB dan Hibah sejak TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 19.



Grafik 19. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNPB TA 2012 - 2017

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp2.007.351.810.206.886 atau 94,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp2.133.295.900.020.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2016 adalah sebesar Rp1.864.275.091.894.965. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.265.359.428.745.519, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp741.992.381.461.367. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 20.



Grafik. 20 Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2012- 2017

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara sebesar Rp1.666.375.912.658.085 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp2.007.351.810.206.886, maka Defisit Anggaran pada TA 2017 sebesar Rp340.975.897.548.801.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2017 adalah sebesar Rp366.623.822.146.843, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp386.890.801.363.738 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp20.266.979.216.895.

Pembiayaan Neto sebesar Rp366.623.822.146.843 untuk menutupi Defisit Anggaran sebesar Rp340.975.897.548.801, tersebut mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2017 sebesar Rp25.647.924.598.042.

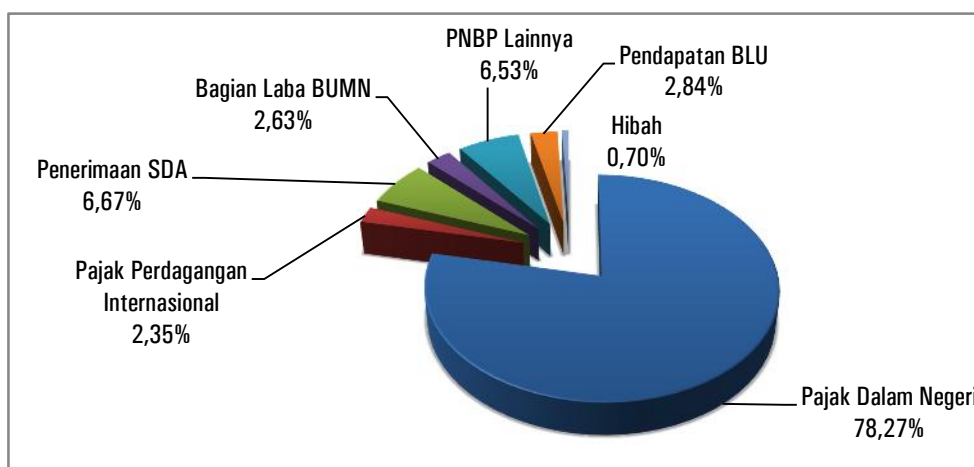
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara

*Pendapatan Negara
Rp1.666,37 triliun*

Realisasi Pendapatan Negara TA 2017 adalah sebesar Rp1.666.375.912.658.085 atau 95,99 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp1.736.060.149.915.000. Pendapatan Negara terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNPB, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara TA 2017 dapat dilihat pada Grafik 21



Grafik 21. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara TA 2017

Rincian pendapatan negara per akun dapat dilihat pada Lampiran 1.

*Penerimaan
Perpajakan
Rp1.343,52 triliun*

B.2.1.1.Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2017 adalah sebesar Rp1.343.529.843.798.510 atau 91,23 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp1.472.709.861.675.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2017 lebih besar Rp58.559.703.871.029 atau naik 4,56 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp1.284.970.139.927.481. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp8.933.799.207.486 dan Bea Masuk DTP sebesar Rp280.946.213.728.

*Penerimaan Pajak
Dalam Negeri
Rp1.304,31 triliun*

B.2.1.1.1.Pajak Dalam Negeri

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2017 adalah sebesar Rp 1.304.316.269.228.039 atau 90,78 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp1.436.730.861.675.000. Realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2017 lebih besar Rp54.816.789.777.608 atau naik 4,39 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016. Rincian realisasi Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
PPh Migas	50.315.750.744.783	36.098.555.090.638
PPh Nonmigas	587.543.573.276.305	621.064.182.802.521
PPh Fiskal	349.728.807	2.780.168.368
PPh Ditanggung Pemerintah	8.933.799.207.486	9.046.869.950.132
PPN dan PPnBM	480.724.607.483.756	412.213.453.510.472
PBB	16.770.346.937.156	19.443.228.194.707
BPHTB	1.216.911.547	481.361.509
Cukai	153.288.149.392.121	143.525.035.262.959
Pajak Lainnya	6.738.475.546.078	8.104.893.109.125
Jumlah	1.304.316.269.228.039	1.249.499.479.450.431

Penerimaan perpajakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 terutama pada PPh Migas sebesar 14.217.195.654.145, PPN dan PPnBM sebesar Rp68.511.153.973.284, dan Cukai sebesar Rp9.763.114.129.162. Kenaikan PPh Migas yang cukup signifikan sebesar 39,38 persen seiring harga ICP yang mulai membaik, dan meningkatnya pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar 16,62 persen yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas ekonomi domestik dan kepatuhan pembayaran PPN oleh WP.

*Pajak Perdagangan
Internasional
Rp39,21 triliun*

B.2.1.1.2.Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2017 adalah sebesar Rp39.213.574.570.471 atau 108,99 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp35.979.000.000.000. Pajak Perdagangan Internasional TA 2017 lebih besar Rp3.742.914.093.421 atau naik 10,55 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(Unaudited)	TA 2016 (Audited)
Bea Masuk	35.066.181.439.852	32.472.077.371.870
Bea Keluar	4.147.393.130.619	2.998.583.105.180
Jumlah	39.213.574.570.471	35.470.660.477.050

Kenaikan Pajak Perdagangan Internasional pada Tahun 2017 terutama dipengaruhi oleh membaiknya harga atas komoditi utama yang terkena Bea Keluar, dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai seperti penyempurnaan penggunaan IT, intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi, dan organisasi pemungutan, serta pemberantasan penyelundupan. Kenaikan pajak perdagangan internasional juga sejalan dengan meningkatnya ekspor impor sebagai dampak semakin membaiknya aktivitas perdagangan internasional.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp311,21 triliun

Realisasi PNBP TA 2017 adalah sebesar Rp311.216.253.857.085 atau 119,59 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp260.242.149.353.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2017 lebih besar Rp49.239.909.231.078 atau naik 18,8 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp261.976.344.626.007. Realisasi PNBP berasal dari (i). Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA Rp111,13 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2017 adalah sebesar Rp111.132.042.413.912, atau 116,19 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp95.643.149.163.000. Penerimaan SDA TA 2017 lebih besar Rp46.230.136.940.546 atau naik 71,23 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	58.203.042.976.236	31.448.046.588.915
Pendapatan Gas Bumi	23.639.900.993.613	12.645.694.067.924
Pendapatan Pertambangan Umum	23.763.165.037.383	15.756.799.135.341
Pendapatan Kehutanan	4.101.918.540.911	3.756.968.379.853
Pendapatan Perikanan	491.033.529.369	362.117.397.236
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	932.981.336.400	932.279.904.097
Jumlah	111.132.042.413.912	64.901.905.473.366

Kenaikan realisasi penerimaan SDA terjadi pada seluruh jenis pendapatan, dan secara signifikan pada pendapatan minyak bumi yang dipengaruhi terutama oleh naiknya ICP. Rata-rata realisasi ICP tahun 2017 mencapai USD 51.2 per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata ICP tahun 2016 yang tercatat sebesar USD 40.2 per barel. Kenaikan Pendapatan Pertambangan Umum dipengaruhi antara lain oleh membaiknya harga dan kinerja produksi batubara, dan komoditas pertambangan umum.

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Rp43,90 triliun

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2017 adalah sebesar Rp43.904.217.111.673 atau 107,08 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp41.000.000.000.000. Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2017 lebih besar Rp 6.771.044.237.596 atau naik 18,23 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	12.460.928.189.608	9.649.660.575.714
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	31.443.288.922.065	27.483.512.298.363
Jumlah	43.904.217.111.673	37.133.172.874.077

Kenaikan Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terutama disebabkan karena capaian realisasi bagian Laba BUMN perbankan yang mengalami peningkatan sebesar 29,13 persen terhadap realisasi anggaran di tahun 2016, dan non perbankan yang juga mengalami peningkatan peningkatan sebesar 14,41% terhadap realisasi anggaran di tahun 2016. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kinerja BUMN yang secara umum semakin baik maupun kondisi perekonomian yang mendukung kinerja BUMN.

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2017 tersebut, sebesar 82,77 persen berasal dari 10 BUMN terbesar (termasuk PT Freeport yang Kepemilikan Pemerintah adalah Minoritas), yaitu:

Nama BUMN		Jumlah
1	PT Pertamina	11.603.431.000.000
2	PT Telkom	6.056.439.231.454
3	PT Bank Rakyat Indonesia	6.000.476.958.000
4	PT Bank Mandiri	3.727.772.580.000
5	PT Bank Negara Indonesia	2.381.137.091.389
6	PT Perusahaan Listrik Negara	2.150.836.000.000
7	PT Freeport Indonesia (Kepemilikan Minoritas)	1.386.812.328.000
8	PT Pupuk Indonesia	1.070.874.000.000
9	PT Perusahaan Gas Negara	1.038.163.533.677
10	PT Semen Indonesia	922.586.000.000
Total 10 BUMN		36.338.528.722.520

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBPN Lainnya TA 2017 adalah sebesar Rp108.834.561.775.552 atau 127,95 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 yaitu sebesar Rp85.057.560.000.000. Hal ini berarti realisasi PNBPN Lainnya TA 2017 lebih kecil Rp9.160.815.967.047 atau turun 7,76 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016.

Realisasi PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Pendapatan Penjualan dan sewa		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	17.644.765.313.547	13.919.028.745.067
Pendapatan Penjualan aset	199.488.584.509	141.430.367.495
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	6.984.000.504.254	5.913.966.072.529
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	505.472.586.764	343.438.059.926
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	610.635.169.747	565.461.847.332
Total Pendapatan Penjualan Dan Sewa	25.944.362.158.821	20.883.325.092.349
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Jasa I	14.880.807.281.012	13.159.015.916.590
Pendapatan Jasa II	1.502.158.243.284	1.510.808.995.337
Pendapatan Jasa Luar Negeri	743.766.318.732	714.832.367.424
Pendapatan Jasa Perbankan	54.049.135.452	169.018.256.233
Pendapatan atas Pengelolaan TSA dan/atau atas Penempatan Uang Negara	5.041.464.684.573	4.512.895.840.399
Pendapatan Jasa Kepolisian I	8.910.656.236.000	3.662.803.290.000

PNBP Lainnya
Rp108,83 triliun

Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	19.651.741.073.263	13.887.313.019.827
Pendapatan Jasa Kepolisian II	634.622.492.530	150.599.306.078
Pendapatan Jasa Lainnya	1.269.958.268.295	1.171.084.691.813
Total Pendapatan Jasa	52.689.223.733.141	38.938.371.683.701
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Bunga	1.535.360.256.560	3.335.889.331.241
Pendapatan <i>Gain On Bond Redemption</i>	6.497.500.000	1.711.500.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	6.110.092.446.400	16.364.493.389.531
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	69.108.954.346	46.452.274.932
Total Pendapatan Bunga	7.721.059.157.306	19.748.546.495.704
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	769.795.544.007	879.046.087.325
Pendapatan Pendidikan	4.484.816.582.419	4.252.849.851.758
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	370.826.264.142	1.541.228.998.988
Pendapatan Iuran dan Denda	2.075.968.889.141	2.905.358.215.261
Total	7.701.407.279.709	9.578.483.153.332
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (Kontribusi Sosial)	221.236.987.053	115.077.877.950
Pendapatan Pelunasan Piutang	40.120.604.821	76.941.917.572
Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.452.252.303	1.042.396.862
Pendapatan Selisih Kurs	23.239.529.318	74.339.969.409
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu	12.377.609.709.560	9.435.682.785.721
Pendapatan dalam Rangka Refund Dana PHLN	222.432.614.993	161.419.084.298
Pendapatan Lain-lain (termasuk Pendapatan Bagian Pemerintah dari sisa surplus BI)	1.892.417.748.527	18.982.147.285.701
Total Pendapatan Lain-lain	14.778.509.446.575	28.846.651.317.513
Jumlah PNPB Lainnya	108.834.561.775.552	117.995.377.742.599

Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya TA 2017 menurun dibandingkan TA 2016 terutama karena penurunan dari Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia dan Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah.

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Pendapatan BLU
Rp47,34 triliun*

Realisasi Pendapatan BLU TA 2017 adalah sebesar Rp47.345.432.555.948 atau 122,84 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 yaitu sebesar Rp38.541.440.190.000. Realisasi Pendapatan BLU TA 2017 lebih besar Rp5.399.544.019.983 atau naik 12,87 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016. Realisasi Pendapatan BLU adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	25.499.135.736.497	23.784.221.372.618
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/ Kawasan Tertentu	1.173.415.343.107	1.141.669.018.989
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	17.327.970.928.406	14.516.091.355.846
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	250.097.458.163	25.944.832.683
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	44.250.619.466.173	39.467.926.580.136
Pendapatan Hibah BLU	174.211.852.608	64.919.719.731
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	578.904.594.476	852.858.957.288
Pendapatan BLU Lainnya	2.341.696.642.691	1.560.183.278.810
Jumlah	47.345.432.555.948	41.945.888.535.965

Pendapatan BLU melebihi target APBN-P TA 2017 terutama karena kinerja pendapatan BLU yang semakin baik berupa peningkatan kapasitas dan kualitas layanan BLU, penyesuaian tarif layanan pada beberapa BLU, dan BLU yang baru ditetapkan pada tahun 2017.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

*Penerimaan Hibah
Rp11,62 triliun*

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp11.629.815.002.490 atau 374,17 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp3.108.138.887.000. Penerimaan Hibah TA 2017 lebih besar Rp2.642.148.723.188 atau naik 29,40 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016.

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana	-	-
Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung	7.410.435.627.384	5.741.938.962.115
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	7.410.435.627.384	5.741.938.962.115
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana	530.076.024.609	1.226.991.075.038
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung	3.689.303.350.497	2.018.736.242.149
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	4.219.379.375.106	3.245.727.317.187
Jumlah Penerimaan Hibah	11.629.815.002.490	8.987.666.279.302

Realisasi Pendapatan Hibah mencapai 374,17 persen dikarenakan terdapat hibah langsung yang diterima oleh K/L tidak direncanakan dalam APBN-P TA 2017. Kesadaran K/L untuk melaporkan Hibah langsung yang diterima juga semakin membaik. Nilai Penerimaan Hibah Tahun 2017 pada Tabel Penerimaan Hibah belum termasuk penerimaan hibah langsung senilai Rp3.406.014.737.559 yang belum disahkan. Masih terdapat penerimaan hibah langsung Tahun Anggaran Yang Lalu yang belum disahkan yang disebabkan karena kendala waktu pengesahan.

B.2.2. Belanja Negara

*Belanja Negara
Rp2.007,35 triliun*

Realisasi Belanja Negara TA 2017 adalah sebesar Rp2.007.351.810.206.886 atau 94,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp2.133.295.900.020.000. Belanja Negara TA 2017 lebih besar Rp143.076.718.311.921 atau naik 7,67 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2016 sebesar Rp1.864.275.091.894.965. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

*Belanja Pemerintah
Pusat Rp1.265,35
triliun*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2017 adalah sebesar Rp1.265.359.428.745.519 atau 92,57 persen dari APBN-P TA 2017 sebesar Rp1.366.956.572.312.000. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2017 lebih besar Rp111.341.206.710.410 atau naik 9,65 persen dari Realisasi TA 2016 sebesar Rp1.154.018.222.035.109.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

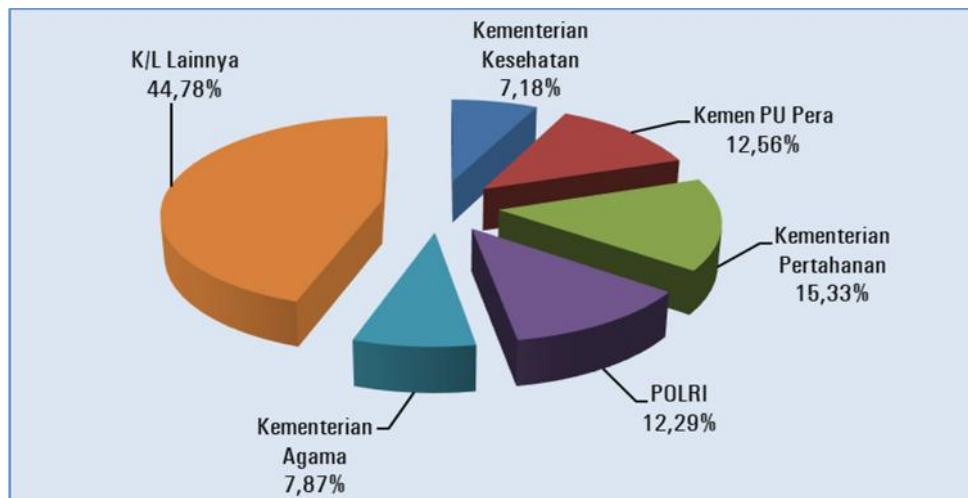
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

*Belanja Pemerintah
Pusat menurut
Organisasi/BA*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2017 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp 500.225.444.779.912 atau 39,53 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2017 pada K/L (selain BA BUN) adalah sebesar Rp765.133.983.965.901. Perbedaan pencatatan Total Realisasi Belanja

Pemerintah Pusat antara BUN dengan K/L secara neto adalah sebesar minus Rp294. Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2017 dapat dilihat pada Grafik 22.



Grafik 22. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2017

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Lampiran 2.A.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi kependudukan dan perlindungan sosial. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2017 dan 2016 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 14.

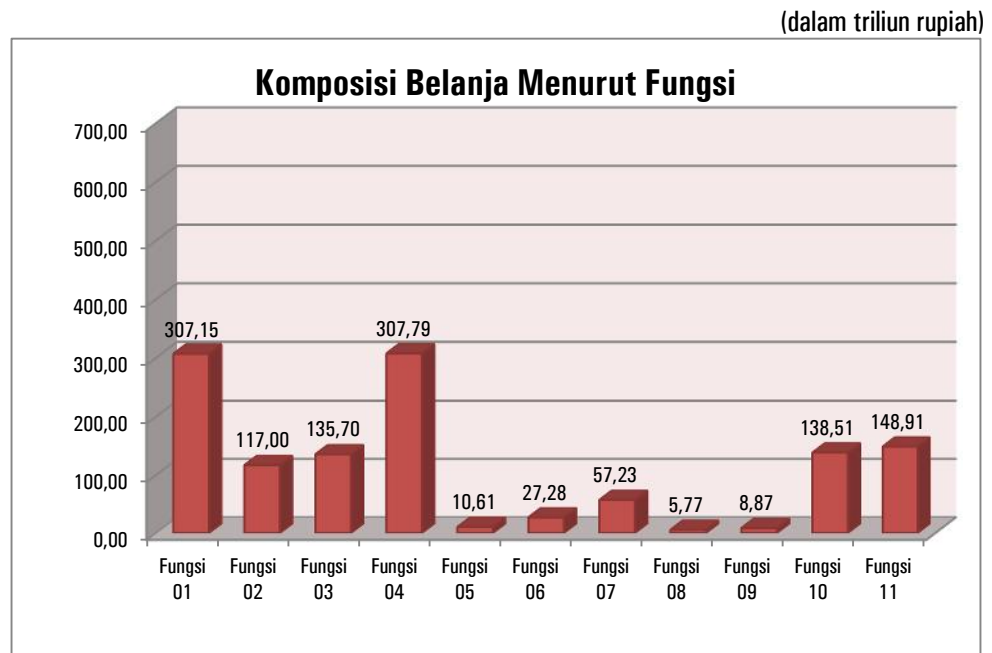
Tabel 14. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2017 dan TA 2016
(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	Anggaran	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
01	Pelayanan Umum	362.640.526.732.000	307.147.187.148.915	444.732.701.786.446
02	Pertahanan	115.038.947.159.000	117.506.617.827.295	98.069.366.021.102
03	Ketertiban dan Keamanan	145.469.613.635.000	135.748.091.293.879	111.323.004.660.434
04	Ekonomi	327.079.670.701.000	307.787.488.810.661	146.743.176.404.848
05	Lingkungan Hidup	12.562.856.748.000	10.613.749.846.516	8.846.056.850.136
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	30.074.058.219.000	27.277.374.331.722	20.119.397.543.458
07	Kesehatan	58.728.211.324.000	57.225.069.767.633	59.639.945.297.456
08	Pariwisata dan Budaya	6.457.483.615.000	5.770.640.693.430	4.787.454.629.474
09	Agama	9.786.363.333.000	8.870.392.959.219	5.771.072.465.137
10	Pendidikan*	143.997.554.611.000	138.507.296.388.955	132.165.479.653.781
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	155.121.286.235.000	148.905.519.677.588	121.820.563.589.927
00	Tidak ada fungsi**		(294)	3.132.910
	Total	1.366.956.572.312.000	1.265.359.428.745.519	1.154.018.222.035.109

* Anggaran pada fungsi Pendidikan tersebut di atas adalah anggaran pendidikan yang dialokasikan pada Belanja Pemerintah Pusat, tidak termasuk belanja pendidikan yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah. Total Anggaran Pendidikan adalah sebesar Rp426.702.412.309.000.

** Tidak ada fungsi artinya kode fungsi tidak ada dalam tabel referensi fungsi/selisih pencatatan.

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2017 terlihat pada Grafik 23.



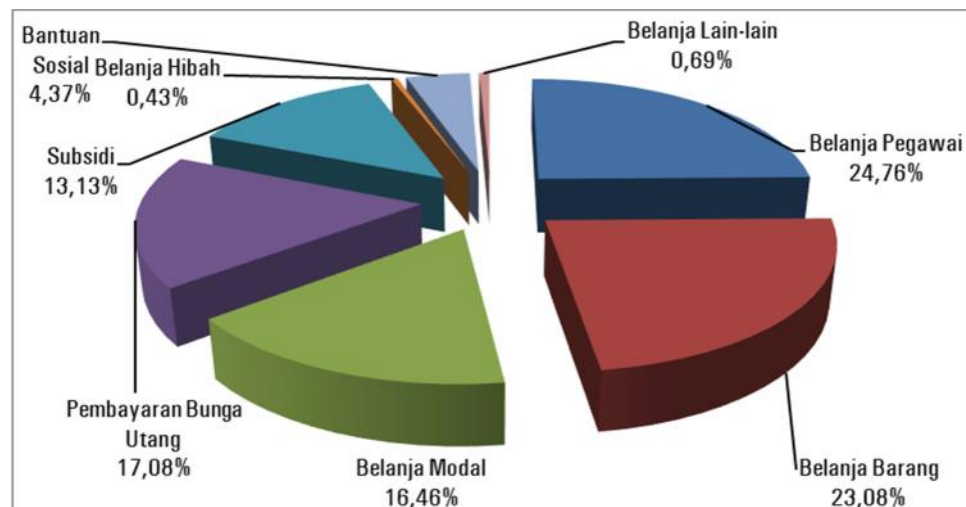
Grafik 23. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2017

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Lampiran 2.C

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 24.

*Belanja Pemerintah
Pusat menurut Jenis
Belanja*



Grafik 24. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2017

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 adalah sebesar Rp312.728.756.432.452 atau 91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp343.655.516.071.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2017 lebih besar Rp7.587.244.021.339 atau naik 2,49 persen dari realisasi TA 2016. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut.

Belanja Pegawai
Rp312,72 triliun

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.930.689.954.783	86.552.287.926.967
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	55.598.387.820.021	55.536.809.051.667
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	632.908.371.807	615.653.619.995
Belanja Gaji Dokter PTT	349.074.423.545	1.480.740.666.342
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	9.921.891.320.235	6.853.757.988.457
Belanja Honorarium	1.424.831.461.810	2.017.554.868.863
Belanja Lembur	726.231.100.431	707.748.044.673
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	54.327.231.140.342	51.899.093.200.070
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	97.518.558.624.900	94.253.393.066.064
Belanja Asuransi Kesehatan	5.299.056.321.310	5.224.231.693.706
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	(104.106.732)	242.284.309
Jumlah	312.728.756.432.452	305.141.512.411.113

Realisasi Belanja Pegawai yang mengalami kenaikan sebesar Rp7.587.244.021.339 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 terutama disebabkan karena adanya penyesuaian dan pemberian Tunjangan Kinerja pada pegawai Kementerian Negara/Lembaga.

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2017 adalah sebesar Rp291.459.133.344.592 atau 98,90 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp294.715.715.955.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2017 lebih besar Rp31.812.246.800.456 atau naik 12,25 persen dari Realisasi TA 2016. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Belanja Barang
Rp291,45 triliun

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Barang Operasional	35.348.784.715.218	34.626.548.247.855
Belanja Barang Non Operasional	54.833.055.287.147	51.389.069.209.841
Belanja Barang Pengganti Pajak dalam rangka Hibah Millennium Challenge Corporation (MCC)	7.170.705.049	10.909.455.752
Belanja Kontribusi	191.859.442.958	194.356.596.740
Belanja Bahan Persediaan	14.956.683.394.699	8.342.335.393.870
Belanja Jasa	29.604.088.264.675	26.808.296.889.673
Belanja Pemeliharaan	43.501.069.034.235	30.259.362.710.603
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	31.288.719.510.943	31.359.653.376.364
Belanja Perjalanan Luar Negeri	2.839.153.746.638	2.373.961.924.869
Belanja Barang BLU	36.570.860.054.466	34.718.785.745.184
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pemda	23.035.723.226.413	21.135.026.067.307
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	28.864.014.676	75.848.417.623
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Pada Masyarakat atau Pemda	19.251.191.596.011	18.334.996.122.044
Belanja untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau mantan Wakil Presiden	1.693.210.000	17.633.149.000
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	217.141.464	103.237.411
Jumlah	291.459.133.344.592	259.646.886.544.136

Belanja Barang BLU sebesar Rp36.570.860.054.466 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan	8.834.131.141.188	8.069.145.324.622
Belanja Barang	7.012.276.581.189	6.334.931.104.815
Belanja Jasa	3.242.509.237.465	1.917.302.276.197
Belanja Pemeliharaan	1.001.316.285.880	866.824.701.014
Belanja Perjalanan	779.580.000.133	689.463.855.862
Belanja atas Pengelolaan <i>Endowment Fund</i>	2.525.371.133.860	2.341.155.072.810
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	2.517.932.755.999	3.563.536.919.254
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	10.620.361.661.301	10.936.426.490.610
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	14.193.974.995	
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan - BLU	2.481.628.744	
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	5.400.000	
Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	20.700.253.712	
Jumlah	36.570.860.054.466	34.718.785.745.184

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Kinerja penyerapan Belanja Barang tahun 2017 yang lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun 2016 terutama disebabkan oleh kinerja pelaksanaan anggaran yang semakin baik di Satuan Kerja Pemerintah, kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas Belanja, dan meningkatnya belanja pemeliharaan (Belanja pemeliharaan atas aset tetap yang telah selesai dibangun dan untuk Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Peralatan dan Mesin).

B.2.2.1.3. Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp208,65 triliun*

Realisasi Belanja Modal TA 2017 adalah sebesar Rp208.656.670.235.846 atau 92,27 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp226.143.729.411.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2017 lebih besar Rp39.182.439.911.573 atau naik 23,12 persen dari Realisasi TA 2016. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Modal Tanah	3.420.693.140.383	4.617.813.544.693
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.603.303.025.072	68.173.240.218.080
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.821.932.251.082	25.279.502.268.215
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.442.482.866.724	63.963.599.322.266
Belanja Modal Fisik Lainnya	3.420.971.446.117	3.961.299.520.300
Belanja Modal BLU	3.947.412.016.494	3.478.634.539.530
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	(124.510.026)	140.911.189
Jumlah	208.656.670.235.846	169.474.230.324.273

Belanja Modal BLU Rp 3.947.412.016.494 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Modal Tanah	79.980.955.957	74.816.507.880
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.810.482.376.417	1.723.902.640.979
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.817.990.201.300	1.435.458.128.583
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	108.698.438.139	155.765.023.812
Belanja Modal Lainnya	130.260.044.681	88.692.238.276
Jumlah	3.947.412.016.494	3.478.634.539.530

Kinerja penyerapan belanja modal tahun 2017 yang lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun 2016 terutama disebabkan adanya percepatan proses lelang setelah Undang-Undang APBN Tahun 2017 ditetapkan, serta perbaikan tata kelola pelaksanaan Belanja Modal yang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja.

B.2.2.1.4. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp216,56 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2017 adalah sebesar Rp216.568.022.521.345 atau 98,80 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp219.196.342.938.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2017 lebih besar Rp33.806.752.176.418 atau naik 18,5 persen dari Realisasi TA 2016 sebesar Rp182.761.270.344.927.

Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	160.608.329.886.049	140.725.540.051.276
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	30.225.713.200.512	21.840.843.759.980
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	16.590.693.239.260	15.008.396.291.204
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SUN DN	7.212.316.604.950	4.457.749.934.927
Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	83.757.200.000	32.812.850.000
Belanja Pembayaran Imbalan <i>Discount</i> SBSN DN – Jangka Panjang	743.727.452.274	188.470.134.000
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah	1.103.484.938.300	507.457.323.540
Jumlah	216.568.022.521.345	182.761.270.344.927

Belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 terutama pada Belanja Pembayaran Bunga Utang DN–Jangka Panjang berupa Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah, Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas, Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri, dan Belanja Pembayaran *Discount* SUN Dalam Negeri. Pada Tahun 2017 terdapat pengembalian belanja pembayaran bunga Obligasi Negara Rupiah sebesar Rp143.215.203 yang berasal dari penyetoran kelebihan pembayaran bunga SRBI-01/MK/2003.

B.2.2.1.5. Belanja Subsidi

Subsidi Rp166,40 triliun

Realisasi Subsidi TA 2017 adalah sebesar Rp166.401.103.129.178 atau 98,53 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp168.876.783.743.000.

Realisasi Belanja Subsidi TA 2017 lebih kecil Rp7.825.767.042.329 atau turun 4,49 persen dari Realisasi TA 2016 sebesar Rp174.226.870.171.507. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Subsidi Premium	-	1.196.932.944.879
Belanja Subsidi Minyak Solar	6.578.231.530.501	15.316.461.330.328
Belanja Subsidi Minyak Tanah	1.718.878.334.674	2.234.522.358.747
Belanja Subsidi Elpiji	38.749.622.596.141	24.938.933.849.625
Belanja Subsidi Pangan	19.500.250.069.873	22.076.514.749.456
Belanja Subsidi Listrik	50.595.347.740.000	63.098.156.836.654
Belanja Subsidi Benih	764.685.996.611	419.174.423.969
Belanja Subsidi Pupuk	28.840.416.670.054	26.853.260.074.525
Belanja Subsidi PPh – DTP	8.933.666.779.147	9.046.828.201.046
Belanja Subsidi BM – DTP	280.946.213.728	280.001.769.046
Belanja Subsidi PT KAI	2.066.701.261.556	1.745.161.349.389

Belanja Subsidi PT PELNI	2.106.212.269.638	1.786.993.563.000
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya/LKBN Antara	136.812.799.346	137.883.728.082
Belanja Subsidi Uang Muka Perumahan	826.304.000.000	303.732.000.000
Belanja Subsidi Bunga KPR	1.472.174.173.954	259.210.087.172
Belanja Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	77.345.682.020	173.950.273.410
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI	-	1.639.656.750
Belanja Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	126.295.726.866	151.020.791.156
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	3.172.581.081.357	3.782.447.326.778
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat	414.349.387.000	402.207.369.243
Belanja Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	-	8.869.527
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	6.324.279.981	20.312.943.240
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	145.227.180	1.182.219.856
Belanja Subsidi Risk Sharing KKP dan Energi	33.811.309.551	333.455.629
Jumlah	166.401.103.129.178	174.226.870.171.507

Penurunan Belanja Subsidi pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016 terutama penurunan pada Subsidi Minyak Solar, Subsidi Listrik, dan Subsidi Pangan. Hal ini juga karena kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja Subsidi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Untuk belanja subsidi pada Tahun 2017 pagu alokasi DIPA adalah sebesar Rp178.816.698.870.000 yang terdiri dari pagu sesuai Undang-Undang APBNP sebesar Rp168.840.828.471.000, pergeseran anggaran dari Belanja Lain-lain sebesar Rp2.197.796.195.000, penambahan pagu sebesar Rp2.557.926.464.000 (sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (3) UU APBNP), dan sebesar Rp5.220.147.740.000 merupakan penambahan anggaran on top (untuk subsidi listrik). Penambahan anggaran belanja subsidi listrik menjadi Rp5.220.147.740.000 dilakukan dalam rangka menjaga capaian *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) PT PLN agar tetap diatas 1 dan akan digunakan untuk membayar kurang bayar subsidi listrik TA 2015.

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

*Belanja Hibah
Rp5,44 triliun*

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2017 adalah sebesar Rp5.445.667.259.156 atau berarti 98,44 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp5.532.197.004.000.

Realisasi Belanja Hibah TA 2017 lebih kecil Rp1.684.250.407.974 atau turun 23,62 persen dari Realisasi TA 2016 sebesar Rp7.129.917.667.130. Belanja hibah tersebut terdiri atas belanja hibah kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp5.423.119.350.876 dan hibah ke luar negeri sebesar Rp22.547.908.280. Rincian realisasi belanja Hibah antara lain sebagai berikut.

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Dukungan Kegiatan Operasional kepada Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG)	22.547.908.280
Pembangunan MRT	1.941.456.252.148
Proyek Air Minum	35.133.000.000
Proyek Air Limbah	5.200.000.000
<i>Water Resources and Irrigation Sector Management Project-APL2(WISMP-2)</i>	293.502.070.558
Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi	17.238.000.000
<i>Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)</i>	76.142.612.949
Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar	67.360.989.977
Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana	2.317.851.330.000
<i>Nationwide Water Hibah Program</i>	619.318.381.032

Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi	46.697.070.712
Hibah <i>Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser Ecosystem</i>	3.219.643.500
Jumlah	5.445.667.259.156

Realisasi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.317.851.330.000 menunjukkan kenaikan sebesar 210,19% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp747.225.000.000 yang digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya.

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp55,29 triliun

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 adalah sebesar Rp55.297.216.841.355 atau 93,78 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp58.962.009.059.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 lebih besar Rp5.683.677.707.878 atau naik 11,46 persen dari Realisasi TA 2016.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	330.347.968.057	462.256.184.812
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	35.809.212.856.984	34.817.725.562.440
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	2.665.538.268.830	2.825.195.427.249
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	12.716.131.609.642	9.008.034.496.376
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	1.998.168.889.240	636.636.513.000
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	1.777.805.773.602	1.864.174.249.600
Perbedaan Pencatatan antara BUN dengan SAI	11.475.000	(483.300.000)
Jumlah	55.297.216.841.355	49.613.539.133.477

Kenaikan realisasi Belanja Bantuan Sosial di tahun 2017 terutama disebabkan karena kebijakan pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemberantasan kemiskinan. Selain itu upaya simplifikasi pertanggungjawaban LPJ/SPJ terutama pada penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah juga ikut meningkatkan kinerja Belanja Bantuan Sosial.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain Rp8,80 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2017 adalah sebesar Rp8.802.858.981.595 atau 17,65 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp49.874.278.131.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2017 lebih besar Rp2.778.863.543.049 atau naik 46,13 persen dari Realisasi TA 2016.

Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN/ Belanja Lain-Lain II (Pembayaran selisih harga beras Bulog)		11.130.939.866
Belanja Lain-lain Dana Cadangan Beras	2.499.999.996.933	1.999.999.991.340
Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan	28.578.926.000	1.399.134.742.124
Belanja Lain-lain BUN	3.975.569.242.950	478.493.677.867
Belanja Lain-lain	2.298.710.815.712	2.135.236.087.349
Jumlah	8.802.858.981.595	6.023.995.438.546

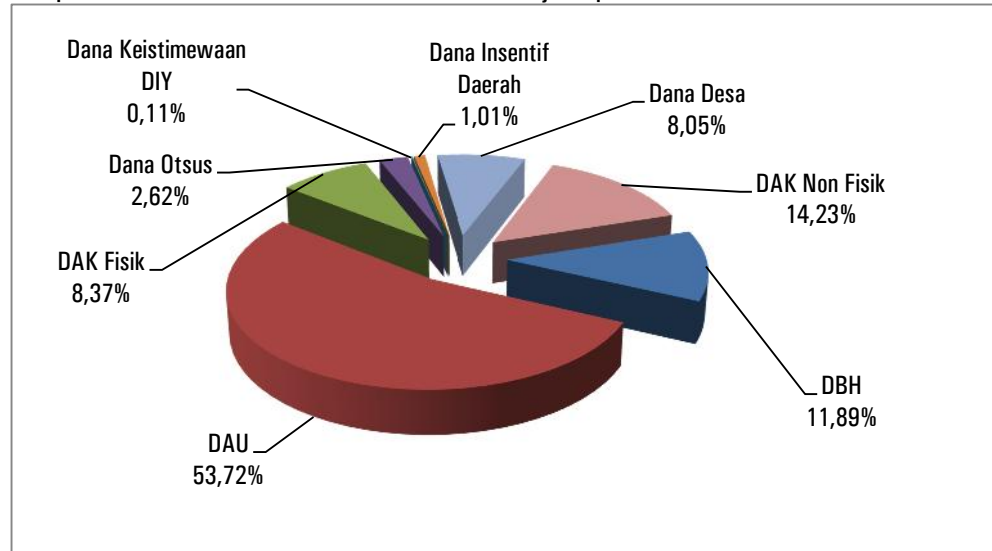
Realisasi Belanja Lain-lain tidak mencapai target APBN-P TA 2017 terutama karena terdapat Pagu Anggaran Belanja Lain-lain yang direalokasi ke K/L sesuai dengan karakteristik belanjanya melalui mekanisme Surat Alokasi Bagian Anggaran (SABA), dan pagu pada APBN-P 2017 tidak seluruhnya dialokasikan dalam DIPA yang terbit pada tahun 2017.

*Transfer ke Daerah
dan Dana Desa
Rp741,99 triliun*

B.2.2.2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp741.992.381.461.367 atau 96,82 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp766.339.327.708.000. Transfer ke Daerah dan Dana Desa terdiri dari Transfer ke Daerah yang meliputi (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus, serta Dana Desa. Dana Desa merupakan amanat UU tentang Desa dan pertama kalinya disalurkan oleh Pemerintah Pusat Pada Tahun 2015.

Komposisi realisasi Transfer ke Daerah TA 2017 disajikan pada Grafik 25.



Grafik 25. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017

Rincian penyaluran neto DBH, DAU dan Dana Penyesuaian ke masing-masing RKUD dapat dilihat pada Lampiran 3.

*Transfer ke Daerah
Rp682,22 triliun*

B.2.2.2.1 Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2017 adalah sebesar Rp682.225.803.933.964 atau 96,59 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp706.339.327.708.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2017 ini lebih besar Rp18.648.263.253.474 atau naik 2,81 persen dari Realisasi TA 2016. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, (ii) Dana Insentif Daerah, (iii) Dana Keistimewaan DIY, dan (iv) Dana Otonomi Khusus.

B.2.2.2.1.1 Dana Perimbangan

*Dana Perimbangan
Rp654,48 triliun*

Realisasi Dana Perimbangan TA 2017 adalah sebesar Rp654.482.511.343.964 atau 96,45 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp678.596.035.118.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2017 ini lebih besar Rp14.716.854.547.474 atau naik 2,3 persen dari realisasi TA 2016. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Transfer Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik. Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

*Dana Transfer Umum
Rp486,81 triliun*

B.2.2.2.1.1.1 Dana Transfer Umum

Realisasi Dana Transfer Umum TA 2017 adalah sebesar Rp 486.814.511.890.637 atau 98,55 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp493.959.535.082.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Umum TA 2017 lebih besar Rp10.918.731.644.570 atau naik sebesar 2,29 persen dibandingkan TA 2016.

B.2.2.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil*DBH Rp88,23 triliun*

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2017 adalah sebesar Rp88.232.197.142.637 atau 92,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp95.377.220.334.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2017 ini lebih kecil Rp2.302.736.003.430 atau turun 2,54 persen dari realisasi TA 2016.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
DBH Pajak		
DBH Pajak Penghasilan Perorangan	34.312.377.870.061	27.315.056.879.350
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	19.356.272.471.999	20.467.077.053.367
Jumlah DBH Pajak	53.668.650.342.060	47.782.133.932.717
DBH Cukai	2.921.873.779.440	2.854.105.033.200
DBH SDA		
DBH SDA Minyak Bumi	8.191.122.864.049	8.310.533.486.000
DBH SDA Gas Bumi	8.442.353.752.961	9.733.383.872.000
DBH SDA Pertambangan Umum/Mineral dan Batu Bara	11.835.084.190.433	19.376.484.546.800
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	970.633.323.538	697.952.441.000
DBH SDA Kehutanan	1.820.962.826.750	1.530.859.834.350
DBH SDA Perikanan	381.516.063.406	249.480.000.000
JUMLAH DBH SDA	31.641.673.021.137	39.898.694.180.150
Total DBH	88.232.197.142.637	90.534.933.146.067

Realisasi Dana Bagi Hasil yang lebih kecil dari anggarannya terutama disebabkan oleh DBH Pajak sebagai akibat turunnya target penerimaan pajak berdasarkan prognosa realisasi penerimaan pajak yang menjadi dasar penyaluran DBH Triwulan IV TA 2017 terhadap APBN-P TA 2017.

Realisasi Dana Bagi Hasil tahun 2017 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 terutama pada DBH SDA Pertambangan Umum. Pada tahun 2017 terdapat realisasi pembayaran terhadap kurang bayar tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp30.546.849.709.485.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil disajikan pada Lampiran 3.

B.2.2.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum*DAU Rp398,58 triliun*

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2017 adalah sebesar Rp398.582.314.748.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp398.582.314.748.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2017 ini lebih besar Rp13.221.467.648.000 atau naik 3,43 persen dari realisasi TA 2016 sebesar Rp385.360.847.100.000.

Kebijakan alokasi DAU ke daerah dilakukan dengan menggunakan formula yang didasarkan pada data dasar perhitungan DAU. Penggunaan formula tersebut menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Alokasi DAU tahun 2017 meningkat karena berdasarkan perhitungan 28,7 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto pada APBN-P TA 2017 dan tambahan DAU untuk provinsi sebagai akibat adanya pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Lampiran 3.

*Dana Transfer
Khusus Rp167,66
triliun*

B.2.2.2.1.1.2 Dana Transfer Khusus

Realisasi Dana Transfer Khusus TA 2017 adalah sebesar Rp 167.667.999.453.327 atau 90,81 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp184.636.036.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Transfer Khusus TA 2017 ini lebih besar Rp 3.798.122.902.904 atau naik 2,32 persen dari realisasi TA 2016 sebesar Rp163.869.876.550.423.

*DAK Fisik Rp62,10
triliun*

B.2.2.2.1.1.2.1 Dana Alokasi Khusus Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2017 adalah sebesar Rp62.104.230.254.352 atau 89,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp69.531.500.436.000. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan usulan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Realisasi DAK Fisik Tahun 2017 meliputi DAK Reguler, DAK Infrastruktur Publik Daerah, dan DAK Afirmasi dan Tambahan DAK Fisik dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
DAK Reguler	17.631.735.799.036	51.307.829.960.963
DAK Infrastruktur Publik Daerah	30.593.209.199.748	21.786.660.591.968
DAK Afirmasi	2.859.365.226.598	2.113.005.562.558
Tambahan DAK Fisik	11.019.920.028.970	
Jumlah DAK Fisik	62.104.230.254.352	75.207.496.115.489

B.2.2.2.1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2017 adalah sebesar Rp105.563.769.198.975 atau 91,71 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp115.104.999.600.000.

*DAK Non Fisik
Rp105,56 triliun*

Rincian realisasi DAK Non Fisik adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Dana Bantuan Operasional Sekolah	43.545.891.060.225	43.325.407.723.488
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	942.916.401.139	820.076.498.190
Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	49.929.771.976.077	39.167.587.555.402
Dana Bantuan Operasional KB	245.107.978.781	186.160.945.000
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	5.407.224.385.828	2.444.446.066.564
Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi	90.237.480.533	96.750.000.000
Dana Peningkatan Pengelolaan Ketenagakerjaan		140.738.459.290
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.248.930.102.292	2.281.900.000.000
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi		199.313.187.000
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	750.000.000.000	
Dana Tunjangan Khusus Guru	1.403.689.814.100	
Jumlah	105.563.769.198.975	88.662.380.434.934

Realisasi DAK Non Fisik dengan capaian 91,71 persen dari APBN-P 2017 terutama disebabkan karena realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp49.929.771.976.077 atau 89,84 persen dari pagu APBN-P 2017 sebesar Rp55.573.400.000.000, dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dengan realisasi 5.407.224.385.828 atau 78,25 persen dari pagu APBNP 2017 sebesar Rp6.910.000.000.000.

B.2.2.2.1.2 Dana Insentif Daerah***Dana Insentif Daerah
Rp7,5 triliun***

Realisasi Dana Insentif Daerah TA 2017 adalah sebesar Rp7.500.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp7.500.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2016, realisasi Dana Insentif Daerah TA 2017 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.500.000.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000.000.

Peningkatan realisasi Dana Insentif Daerah terutama untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

B.2.2.2.1.3 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta***Dana Keistimewaan
DIY Rp800 miliar***

Realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2017 adalah sebesar Rp800.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp800.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Keistimewaan DIY TA 2017 lebih besar Rp252.550.000.000 dibandingkan dengan realisasi TA 2016.

B.2.2.2.1.4 Dana Otonomi Khusus***Dana Otonomi
Khusus Rp19,44
triliun***

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2017 adalah sebesar Rp19.443.292.590.000 atau 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp19.443.292.590.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2017 ini lebih besar Rp1.178.858.706.000 atau naik 6,45 persen dari realisasi TA 2016.

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Rincian realisasasi Dana Otonomi Khusus adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Transfer Dana Otsus untuk Propinsi Aceh	7.971.646.295.000	7.707.216.942.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua	5.580.152.407.000	5.395.051.859.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.625.000.000.000	1.987.500.000.000
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat	2.391.493.888.000	2.312.165.083.000
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	875.000.000.000	862.500.000.000
Jumlah	19.443.292.590.000	18.264.433.884.000

Peningkatan realisasi Dana Otonomi Khusus dikarenakan adanya kenaikan pagu Dana Otonomi Khusus sebagai dampak dari kenaikan pagu DAU TA 2017 dibanding tahun sebelumnya, dan terdapat kenaikan dana tambahan insfrastruktur untuk Papua dan Papua Barat.

B.2.2.2.2. Dana Desa***Dana Desa Rp59,76
triliun***

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp59.766.577.527.403 atau 99,61 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp60.000.000.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Desa TA 2017 ini lebih besar Rp 13.087.248.348.037 atau naik 28,04 persen dari realisasi TA 2016 sebesar Rp46.679.329.179.366. Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Alokasi Dana Desa pertama kalinya dialokasikan pada APBN TA 2015.

Peningkatan realisasi Dana Desa pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016

terutama karena sesuai dengan arah kebijakan pemerintah berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah secara bertahap meningkatkan alokasi dana. Dana Desa TA 2017 tersebut dialokasikan kepada 74.954 desa. Jumlah desa dimaksud bertambah sebanyak 200 desa dibandingkan tahun 2016 sebanyak 74.754 desa.

B.2.3. Defisit Anggaran

*Defisit Anggaran
minus Rp340,97
triliun*

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan realisasi Belanja Negara TA 2017, maka Defisit Anggaran TA 2017 adalah sebesar Rp340.975.897.548.801 atau 85,84 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp397.235.750.105.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
Pendapatan Negara	1.666.375.912.658.085	1.555.934.150.832.790
Belanja Negara	2.007.351.810.206.886	1.864.275.091.894.965
Defisit Anggaran	(340.975.897.548.801)	(308.340.941.062.175)

B.2.4. Pembiayaan

*Pembiayaan (Neto)
Rp366,62 triliun*

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2017 adalah sebesar Rp366.623.822.146.843 atau 92,29 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp397.235.750.105.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah tetap menjaga defisit kumulatif APBN tahun 2017 dibawah ambang batas 3,0 persen terhadap PDB. Defisit Anggaran di tahun 2017 sebesar Rp340.975.897.548.801 dan Produk Domestik Bruto tahun 2017 sebesar Rp13.588.800.000.000.000, sehingga rasio defisit terhadap PDB sebesar 2,51 persen.

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

*Pembiayaan Dalam
Negeri Rp386,89
triliun*

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2017 adalah sebesar Rp386.890.801.363.738 atau 93,76 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp412.655.556.216.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, (ii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iii) Surat Berharga Negara (Neto), (iv) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (v) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vi) Kewajiban Penjaminan, (vii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

B.2.4.1.1. Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL

Penggunaan SAL

Pembiayaan dari Rekening Pemerintah adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Pada tahun 2017, Penggunaan SAL tidak dianggarkan dalam APBN-P TA 2017.

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

*Cicilan Pengembalian
Penerusan Pinjaman
Rp4,81 triliun*

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2017 adalah sebesar Rp4.816.530.007.277 atau 119 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp4.047.359.787.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	9.105.652.119	9.193.293.725
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	-	395.765.557.706

Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	332.670.226.562	1.916.658.895.930
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	11.923.640.707	11.048.753.371
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada Daerah	41.250.464.518	27.754.604.627
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	27.690.698.149	527.245.026.694
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	3.591.468.563.170	3.462.406.669.113
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	67.264.762.052	76.541.782.727
Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	735.156.000.000	354.000.000.000
Penerimaan Piutang yang belum disesuaikan	-	56.461.941
Total	4.816.530.007.277	6.780.671.045.834

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2017 adalah sebesar Rp359.085.434.905 atau 119,7 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp300.000.000.000. Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	233.478.439.644	418.638.877.783
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	125.606.995.261	133.072.263.444
Jumlah	359.085.434.905	551.711.141.227

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2017 adalah sebesar Rp441.826.322.911.086 atau 94,55 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp467.314.304.000.000.

Pemerintah menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran pemerintah dan untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	192.207.290.000.000	57.666.713.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	233.576.660.000.000	305.721.724.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	4.307.352.996.000	6.512.482.834.460
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	90.917.094.052.727	113.293.922.100.000
Imbalan Dibayar di Muka SBSN – Jangka Panjang	1.663.933.848.698	1.960.970.313.000
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	44.690.000.000.000	19.520.030.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	102.021.478.500.000	109.038.720.000.000
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	-	-
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	39.969.000.000.000	33.407.500.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN dlm Rangka Pembiayaan Proyek melalui SBSN PBS	16.918.172.947.273	13.677.199.900.000
Total Penerimaan	726.270.982.344.698	660.799.262.147.460
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(128.390.000.000.000)	(82.010.832.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(66.282.433.592.954)	(87.446.270.191.712)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(1.255.000.000.000)	(972.000.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(4.324.143.651.960)	(7.061.424.344.460)

Pelunasan SBSN-Jangka Pendek		-
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(22.555.554.000.000)	(35.598.875.000.000)
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(1.640.928.188.698)	(2.033.931.193.000)
Pelunasan SPN Syariah	(32.750.000.000.000)	(25.919.173.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas		-
Pelunasan Obligasi Negara Valas	(27.246.600.000.000)	(12.497.400.000.000)
Pelunasan SBSN Valas Jangka Panjang		-
Total Pengeluaran	(284.444.659.433.612)	(253.539.905.729.172)
Jumlah SBN (Neto)	441.826.322.911.086	407.259.356.418.288

Di dalam realisasi penerimaan pembiayaan SBN sebesar Rp726.270.982.344.698 tidak termasuk nilai prefunding 2018 sebesar Rp53.890.489.260.000. Hal ini berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah dan sesuai Undang-Undang APBN Tahun 2017, transaksi penerimaan SBN tersebut disajikan sebagai utang jangka panjang pada Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan. Terdapat sisa surplus Bank Indonesia tahun 2016 yang menjadi bagian Pemerintah sebesar Rp1.700.103.052.202 dan digunakan untuk melunasi sebagian pokok Obligasi Negara seri SRBI-01/MK/2003. Di dalam nilai Pelunasan Obligasi Dalam Negeri Tahun 2017 terdapat pengurangan pelunasan yang berasal dari penyetoran kelebihan pembayaran angsuran pokok SRBI-01/MK/2003 senilai Rp6.569.839.177.

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2017 adalah sebesar Rp648.291.571.852 atau 37,41 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P TA 2017 sebesar Rp1.733.027.719.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN dan Perusahaan Daerah. Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	1.251.027.557.472	1.245.718.686.054
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	54.027.644.775	89.014.925.682
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(656.763.630.395)	(283.174.257.224)
Jumlah	648.291.571.852	1.051.559.354.512

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2017 adalah sebesar minus Rp49.254.054.561.382 atau 100,04 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P TA 2017 sebesar minus Rp49.233.761.381.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2017 adalah:

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan Kembali Investasi Lainnya		-
PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya	(6.379.318.092.000)	(50.521.011.424.354)
PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya	(2.024.176.469.382)	(3.837.161.070.554)
Pengeluaran Pembiayaan Untuk Modal Awal BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	(32.050.560.000.000)	(16.000.000.000.000)
Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	(5.600.000.000.000)	(4.295.659.000.000)
Penyertaan Modal Negara Lainnya	(3.200.000.000.000)	(10.827.891.000.000)
Penerimaan Kembali Investasi		1.401.910.000.000
Jumlah	(49.254.054.561.382)	(84.079.812.494.908)

PMN untuk BUMN sebesar Rp6.379.318.092.000 merupakan PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp2.000.000.000.000, PT Sarana Multigriya Finansial sebesar

*Pinjaman Dalam Negeri (Neto)
Rp648,29 miliar*

*PMN/ Investasi Pemerintah minus
Rp49,25 triliun*

Rp1.000.000.000.000, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1.000.000.000.000, PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp2.000.000.000.000 dan PT Djakarta Lloyd sebesar Rp379.318.092.000.

PMN untuk Badan Internasional dan Penyertaan Modal Lainnya digunakan untuk *The Islamic Corporation for the Development of Private Sector* (ICD) sebesar Rp40.336.707.712, *International Development Bank* (IDB) sebesar Rp71.560.081.670, *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) sebesar Rp40.767.000.000, *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) sebesar Rp1.826.364.540.000, dan *International Development Association* sebesar Rp45.148.140.000.

Penyaluran Pembiayaan Dana Bergulir untuk BLU sebesar Rp5.600.000.000.000 adalah untuk BLU PPDPP sebesar Rp3.100.000.000.000, BLU LPMUKP sebesar Rp500.000.000.000, BLU LPDB KUMKM sebesar Rp500.000.000.000, dan BLU PIP sebesar Rp1.500.000.000.000.

Penyertaan Modal Negara Lainnya sebesar Rp3.200.000.000.000 merupakan PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

*Kewajiban
Penjaminan minus
Rp1,00 triliun*

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Dana Kewajiban Penjaminan sebesar minus Rp1.005.374.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan pada APBN-P TA 2017 sebesar minus Rp1.005.374.000.000.

Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp1.005.374.000.000 yang dianggarkan pada APBN-P TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
Proyek percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara	427.965.000.000	570.500.000.000
Proyek percepatan penyediaan air minum	1.157.000.000	674.000.000
Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	296.023.000.000	80.500.000.000
Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera	35.300.000.000	
Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Internasional Kepada BUMN	41.929.000.000	
Penugasan Kepada BUMN dalam rangka Pembiayaan Infrastruktur Daerah	203.000.000.000	
Jumlah	1.005.374.000.000	651.674.000.000

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

*Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional
minus Rp10,50
triliun*

Realisasi Pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2017 adalah minus Rp10.500.000.000.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P TA 2017 sebesar minus Rp10.500.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2016, realisasi Dana Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2017 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.500.000.000.000 dari sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000.000.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang dilakukan oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

*Pembiayaan LN
(Neto) minus
Rp20,26 triliun*

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2017 adalah sebesar minus Rp20.266.979.216.895 dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar minus Rp15.419.806.111.000. Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman luar negeri, (ii) penerusan pinjaman dan (iii) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

*Penarikan Pinjaman
Luar Negeri Rp51,72
triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2017 adalah sebesar Rp51.726.855.339.157 atau 89,96 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp57.500.276.256.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program dan (ii) penarikan pinjaman proyek.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

*Penarikan Pinjaman
Program Rp20,94
triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2017 adalah sebesar Rp20.947.967.337.503 atau 104,22 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp20.100.000.000.000. Jika dibandingkan TA 2016, realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2017 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.376.978.548.538 dari sebelumnya sebesar Rp 35.324.945.886.041. Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk *cash financing* yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran.

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

*Penarikan Pinjaman
Proyek Rp30,77
triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2017 adalah sebesar Rp30.778.888.001.654 atau 82,30 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar Rp37.400.276.256.000. Jika dibandingkan TA 2016, realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2017 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.679.456.461.423 dari sebelumnya sebesar Rp28.099.431.540.231.

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

*Penerusan Pinjaman
minus Rp6,86 triliun*

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2017 adalah sebesar minus Rp6.868.916.465.167 atau 89,02 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar minus Rp7.716.097.267.000. Rincian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan kepada Daerah	(1.003.985.193.194)	(354.422.478.860)
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan kepada BUMN	(5.864.931.271.973)	(4.763.492.726.073)
Total	(6.868.916.465.167)	(5.117.915.204.933)

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2017. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2017 adalah sebesar minus Rp65.124.918.090.885 atau 99,88 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2017 sebesar minus Rp65.203.985.100.000.

Rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016(Audited)
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN – Pinjaman Program	(16.320.383.114.913)	(15.560.138.215.156)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Lain-lain	(48.799.093.676.802)	(53.161.216.276.463)
Pengembalian pinjaman karena Pengeluaran <i>Ineligible</i> sampai dengan Tahun 2007	(5.441.299.170)	(4.641.343.113)
Jumlah	(65.124.918.090.885)	(68.725.995.834.732)

Anggaran dan Realisasi Pembiayaan berdasarkan Struktur APBN-P 2017

Pada APBN-P 2017 Anggaran Pembiayaan Neto sebesar Rp397.235.750.105.000 terdiri atas Pembiayaan Pembiayaan Utang, Pembiayaan Investasi, Pemberian Pinjaman, Kewajiban Penjaminan dan Pembiayaan Lainnya.

Rincian Anggaran Pembiayaan dan Realisasinya adalah sebagai berikut.

Uraian	APBN-P 2017	Realisasi
Pembiayaan Utang		
Surat Berharga Negara (Neto)	467.314.304.000.000	441.826.322.911.086
Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	1.733.027.719.000	648.291.571.852
Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(7.703.708.844.000)	(13.398.062.751.728)
Total	461.343.622.875.000	429.076.551.731.210
Pembiayaan Investasi		
Investasi Kepada BUMN	(6.379.318.092.000)	(6.379.318.092.000)
Investasi Kepada Lembaga/ Badan Lainnya	(3.200.000.000.000)	(3.200.000.000.000)
Investasi Kepada BLU (Dana Bergulir, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Lembaga Manajemen Aset Negara)	(48.150.560.000.000)	(48.150.560.000.000)
Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	(2.003.883.289.000)	(2.024.176.469.382)
Total	(59.733.761.381.000)	(59.754.054.561.382)
Pemberian Pinjaman		
Pinjaman Kepada BUMN/Pemda/Lembaga/Badan Lainnya	(7.716.097.267.000)	(6.868.916.465.167)
Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda	4.047.359.878.000	4.081.374.007.277
Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah		735.156.000.000
Total	(3.668.737.389.000)	(2.052.386.457.890)
Kewajiban Penjaminan		
Kewajiban Penjaminan	(1.005.374.000.000)	(1.005.374.000.000)
Total	(1.005.374.000.000)	(1.005.374.000.000)
Pembiayaan Lainnya		
Hasil Pengelolaan Aset/Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	300.000.000.000	359.085.434.905
Total	300.000.000.000	359.085.434.905
Total Pembiayaan	397.235.750.105.000	366.623.822.146.843

Pembayaran Cicilan
Pokok Utang LN
Rp65,12 triliun

*SiLPA Rp25,64
triliun*

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp340.975.897.548.801 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp366.623.822.146.843 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp25.647.924.598.042 dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2017(Audited)	TA 2016 (Audited)
Pendapatan Negara	1.666.375.912.658.085	1.555.934.150.832.790
Belanja Negara	2.007.351.810.206.886	1.864.275.091.894.965
Surplus (Defisit)	(340.975.897.548.801)	(308.340.941.062.175)
Pembiayaan Neto	366.623.822.146.843	334.503.339.851.560
SiLPA (SiKPA)	25.647.924.598.042	26.162. 398.789.385

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA**1. Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama**

Terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan/urusan bersama TA 2017, dengan rincian sebagai berikut.

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2017 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	20.882.879.894	27.449.053.166	
018	Kementerian Pertanian	1.449.116.491.506	9.954.131.139.250	
019	Kementerian Perindustrian	81.129.008.520		
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	385.113.703.186	50.039.744.853	
024	Kementerian Kesehatan	940.054.687.276		
026	Kementerian Ketenagakerjaan	156.578.297.421		
027	Kementerian Sosial	534.240.999.176	89.134.593.428	
029	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	51.226.528.854		
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	90.325.105.634	118.043.023.750	
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	13.217.833.319	1.775.128.345.921	
040	Kementerian Pariwisata	46.957.388.515		
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	85.362.390.856	51.914.491.267	
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	60.389.964.699		
055	Kementerian Negara PPN/Bappenas	20.755.200.288		
057	Perpustakaan Nasional	37.746.135.408		
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	12.531.547.078		
067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.651.554.318.145	437.995.861.341	218.197.030.352
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	25.716.484.319		
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	11.513.002.425		
090	Kementerian Perdagangan	73.937.196.548	1.399.374.622.138	
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	125.302.505.203		
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1.113.737.196	9.611.666.015	
	Total	5.874.765.405.466	13.912.822.541.129	218.197.030.352

2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan pasal 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep “*enterprising the government*” dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun Rencana Bisnis Anggaran yang akan digabungkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU. Pada tahun 2017, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Pelaporan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU sebagai Entitas Akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan BLU dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2017, terdapat 203 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah ditetapkan menjadi BLU, yang berasal dari 21 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Kementerian Kesehatan	53
2	Kementerian Keuangan	5
3	Kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	5
5	Kementerian Agama	16
6	Kementerian Koperasi dan UKM	2
7	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
8	Kepolisian Republik Indonesia	37
9	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	1
10	Kementerian Perhubungan	33
11	Kementerian ESDM	8
12	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2
13	Sekretariat Negara	2
14	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1
15	Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1
16	Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1
17	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
18	Kementerian Ristek Dikti	29
19	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1
20	Kementerian Pertahanan	1
21	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1
	Jumlah BLU	203

Ditinjau dari jenis layanan, dari 203 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

189 BLU bidang Penyediaan Barang dan/atau Jasa;

4 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;

10 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus;

Pada tahun 2017, BLU sebagai Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3. Kontrak Tahun Jamak

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 52 ayat 2 disebutkan bahwa kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000 dan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp10.000.000.000. Rincian kontrak tahun jamak/*multi years* dapat dilihat dalam Lampiran 4.

4. Withdrawal Application (WA) selama Tahun Anggaran 2017 yang belum diterbitkan Notice of Disbursement (NoD)

Withdrawal Application (WA) selama Tahun Anggaran 2017 yang belum diterbitkan NoD dari *Lender* adalah sebanyak 7 (tujuh) WA dengan nilai sebesar Rp167.768.009.881 (Ekuivalen Sesuai Kurs Kontrak).

5. Notice of Disbursement (NoD) yang belum terbit SP3 sampai dengan 2017

Terdapat *Notice of Disbursement* (NoD) yang sudah dicatat sebagai penambahan Utang, tetapi belum terbit SP3 tanggal valuta tahun 2015 sampai dengan 2017 sebesar Rp694.783.754.009 (tahun 2015 sebesar Rp306.659.230.023, tahun 2016 sebesar Rp166.639.798.653, tahun 2017 sebesar Rp221.484.725.333), yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penerusan pinjaman sebesar Rp37.450.142.574, dan Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp657.333.611.435. Hal tersebut berdampak pada Penerimaan Pinjaman Proyek, Pengeluaran Pembiayaan Penerusan Pinjaman dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga terkait NoD tersebut belum dapat dicatat sebagai transaksi tahun 2017 sesuai dengan periode penerbitan NoD. Hal ini disebabkan adanya permasalahan penganggaran yaitu ketidakcukupan anggaran.

6. Pembiayaan Luar Negeri melalui Mekanisme Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) dan Kreditur Swasta Asing (KSA)

Sebagai implementasi dari Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian Keuangan menyusun Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) dalam hal Daftar Kegiatan yang disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Menteri Keuangan memuat indikasi pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor (LPKE) atau Kreditur Swasta Asing (KSA). Penggunaan sumber pembiayaan melalui LPKE dan KSA ditujukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Polri dengan pertimbangan terdapat kebutuhan untuk mengakomodasi pengadaan alutsista dan almatsus TNI/Polri yang bersifat khusus.

Untuk daftar kegiatan Tahun 2011-2014, Menteri Keuangan telah menetapkan Penetapan Sumber Pembiayaan (PSP) untuk 79 kegiatan (65 kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan 14 kegiatan pada POLRI) dengan pagu USD7,104,014.000, yang terdiri dari 67 kegiatan senilai USD5,118,120,000 dengan pembiayaan KSA dan 12 kegiatan senilai USD 1,985,894,000 dengan pembiayaan LPKE. Sementara untuk daftar kegiatan tahun 2016-2019, Kementerian Keuangan telah menetapkan PSP atas 56 kegiatan (39 kegiatan pada Kementerian Pertahanan dan 17 kegiatan pada POLRI) dengan pagu sebesar USD7,613,300,000 yang terdiri dari 26 kegiatan senilai USD1,734,000,000 dengan pembiayaan KSA dan 30 kegiatan senilai USD5,879,300,000 dengan pembiayaan LPKE.

7. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan

Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Permenhan Nomor 15 tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan peraturan diatas, terdapat 5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk pada Kemhan yaitu:

1. DIPA Unit Organisasi (UO) Kemhan
2. DIPA Unit Organisasi (UO) Mabes TNI
3. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AD
4. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AL, dan
5. DIPA Unit Organisasi (UO) TNI AU

Masing-masing UO diperlakukan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), sehingga pada Kemhan terdapat 5 UAPPA-E1, yaitu UAPPA-E1 Kemhan, UAPPA-E1 Mabes TNI, UAPPA-E1 TNI AD, UAPPA-E1 TNI AL dan UAPPA-E1 TNI AU.

Kemudian dari masing-masing DIPA Induk terbagi menjadi:

1. DIPA Petikan untuk Satker Pusat yang terdiri dari:
 - a. DIPA Satker Kemhan
 - b. DIPA Satker Mabes TNI
 - c. DIPA Satker TNI AD
 - d. DIPA Satker TNI AL, dan
 - e. DIPA Satker TNI AU
2. DIPA Petikan untuk Satker Daerah

Untuk Satker Daerah mekanisme pelaksanaan anggarannya sama dengan satker pada Kementerian Negara lainnya.

Khusus untuk Satker Pusat, pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan diseluruh unit pada masing-masing UO. Mekanisme pelaksanaannya adalah Bendahara Pengeluaran Satker DIPA Pusat menarik Dana Uang Persediaan yang kemudian ditransfer ke Bendahara Pengeluaran Pembantu pada unit yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

Pada peraturan ini, khusus Satker DIPA Pusat, dari Uang Persediaan dapat digunakan untuk pembayaran kepada penyedia barang/jasa melampaui Rp50.000.000, dan saldo UP pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP dapat melebihi Rp50.000.000.

Untuk Kebijakan pencatat aset dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kemhan sehubungan dengan Satker DIPA Pusat adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan barang pada unit-unit dicatat terlebih dahulu sebagai Aset pada Satker DIPA Pusat;
2. Untuk memudahkan pencatatan, maka unit-unit pengadaan barang menjadi Subsatker dari Satker DIPA Pusat.
3. Setelah pengadaan barang dicatat pada Subsatker DIPA Pusat, kemudian atas aset tersebut dilakukan Transfer Keluar ke Satker DIPA Daerah.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran Kementerian Pertahanan Tahun 2017 meliputi DIPA Petikan Satuan Kerja Pusat sebesar Rp73.989.108.995.000 (terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp491.276.861.000, belanja barang sebesar Rp36.341.416.982.000 dan belanja modal sebesar Rp37.156.415.152.000) dan DIPA petikan satuan kerja Daerah sebesar Rp49.967.887.151.000 (terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp40.659.516.212.000, belanja barang sebesar Rp8.592.248.203.000 dan belanja modal sebesar Rp716.122.736.000) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan Nomor: 67/PMK.05/2013 dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 15 tahun 2013. Mekanisme DIPA pada Kementerian Pertahanan tersebut memiliki konsekuensi pengadaan dan pencatatan barang pada saat belanja dilaksanakan di satuan kerja DIPA Pusat, untuk selanjutnya dilakukan transaksi transfer kepada Satuan Kerja DIPA Daerah. Untuk menjamin keandalan sistem pengendalian intern, Pemerintah akan menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan anggaran pada Kementerian Pertahanan.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

*Saldo Awal SAL
per 1 Januari 2017
sebesar Rp 113,19
triliun*

Saldo Anggaran Lebih adalah akumulasi saldo SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan SiLPA/SiKPA tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal per 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp113.193.835.264.285 yang merupakan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2016 (*Audited*). Saldo Anggaran Lebih Awal meliputi saldo awal Kas BUN, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang Sudah Disahkan, dan Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga yang Sudah Disahkan, beserta penyesuaian dalam perhitungan fisik SAL yang dilakukan di Tahun 2016. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal adalah sebagai berikut.

Uraian	1 Januari 2017	1 Januari 2016
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Saldo Awal Kas BUN	81.150.105.652.341	76.146.349.893.524
Saldo Awal Kas di KPPN	1.818.956.055.570	2.234.269.280.080
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	262.946.369.485	329.040.889.462
Saldo Awal Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	32.440.062.300.360	33.731.092.815.930
Saldo Awal Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	3.350.959.289.659	2.311.403.814.634
	119.023.029.667.415	114.752.156.693.630
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL		
Utang PFK	(5.301.758.765.389)	(4.930.416.680.238)
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(614.356.802.242)	(1.452.177.186.861)
Selisih Kiriman Uang	-	90.331.454.900
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	87.051.367.150	(546.344.758.866)
Transaksi Persekot Gaji	(122.392.649)	-
Pengembalian Escrow PNB	(7.810.000)	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(5.829.194.403.130)	(6.838.607.171.065)
Saldo Anggaran Lebih Awal	113.193.835.264.285	107.913.549.522.565

C.2. Penyesuaian Awal SAL

*Penyesuaian Awal
SAL sampai dengan
31 Desember 2017
sebesar Rp0,00
triliun*

Penyesuaian Awal SAL adalah penyesuaian terhadap saldo awal SAL yang dilakukan untuk menyesuaikan pembukuan catatan SAL pada awal tahun. Sesuai dengan kebijakan penyajian dan perhitungan SAL tahun 2017, tidak terdapat Penyesuaian Awal SAL selama periode yang berakhir 31 Desember 2017.

Uraian	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
Koreksi Kas di KPPN	-	(6.680.552.820)
Koreksi Kas di BI	-	(90.696.050)
Koreksi Kas Hibah	-	(9.196.454.509)
Koreksi Kas BLU	-	1.563.645.497
Koreksi Utang PFK	-	(448.882.537.228)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	-	278.824.304.009
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (KPPN)	-	(1.556.487.384)
Penyesuaian Saldo Awal dari Selisih Kiriman Uang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	(5.588.644.917)
Penyesuaian Saldo Awal dari Selisih Rekening Khusus Tahun Anggaran Yang Lalu	-	546.344.758.866
Penyesuaian Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya	-	0
Total Penyesuaian Awal SAL	-	354.737.335.464

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,00

C.3. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017, pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, dan/atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 37 UU Nomor 18 Tahun 2016 tersebut, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya.

Pada Tahun Anggaran 2017 tidak terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan.

SiLPA/SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp25,64 triliun

C.4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp25.647.924.598.042 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Pendapatan Negara	1.666.375.912.658.085	1.555.934.150.832.790
Belanja Negara	2.007.351.810.206.886	1.864.275.091.894.965
Surplus (Defisit)	(340.975.897.548.801)	(308.340.941.062.175)
Pembiayaan Neto	366.623.822.146.843	334.503.339.851.560
SiLPA/(SiKPA)	25.647.924.598.042	26.162.398.789.385

Penyesuaian Pembukuan sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp0,52 triliun

C.5. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan merupakan koreksi tahun berjalan yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) yang terkait dengan koreksi SiLPA, perhitungan selisih kurs (*unrealized*), koreksi kas, dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL. Sesuai dengan kebijakan penyajian dan perhitungan SAL tahun 2017, koreksi kas dan utang terkait SAL yang dilakukan oleh BUN disajikan sebagai koreksi pembukuan tahun berjalan. Penyesuaian Pembukuan SAL sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar minus Rp526.298.971.307 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Koreksi SiLPA	149.497.232.083	(2.219.631.872.206)
Selisih Kurs (<i>Unrealized</i>)	115.136.054.861	377.440.060.546
Koreksi Kas BUN	(3.765.194.909)	-
Koreksi Kas KPPN	198.081.593	-
Koreksi Kas Hibah	(115.519.321.645)	-
Koreksi Kas BLU	(779.378.992.976)	-
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	3.504.402.474	-
Koreksi Utang PFK	32.865.609.137	-
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	71.163.158.075	-
Pembulatan	-	133
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	(526.298.971.307)	(1.842.191.811.527)

1. Koreksi SILPA sebesar Rp149.497.232.083 merupakan koreksi terhadap nilai SiLPA karena adanya pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu (TAYL) sebesar minus Rp453.500.672.144 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA sebesar Rp602.997.904.227. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian pendapatan TAYL melalui penerbitan SPM PP senilai Rp129.180.381.375 dan transaksi penerbitan SP3HL atas pengembalian Hibah senilai Rp324.320.290.769.
2. Penyesuaian Selisih Kurs sebesar Rp115.136.054.861 merupakan penyesuaian atas perhitungan pendapatan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi dan penyesuaian kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada BUN.
3. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp3.765.194.909 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka *refund* penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.
4. Koreksi Kas di KPPN sebesar Rp198.081.593 merupakan jurnal koreksi saldo yang dilakukan oleh KPPN karena koreksi penertiban Rekening Retur KPPN, koreksi penerimaan dana di Rekening Sub Rekening Kas Umum Negara 2016 yang belum tercatat, koreksi penerimaan dana di Rekening Persepsi 2016 yang baru dilaporkan oleh bank pada 2017, serta koreksi karena penyebab lainnya.
5. Koreksi Kas Hibah sebesar minus Rp115.519.321.645 merupakan penyesuaian atas saldo kas hibah yang sudah disahkan pada tahun 2017 di KPPN. Penyesuaian saldo awal hibah ini berupa jurnal koreksi kas hibah karena kesalahan pengesahan pendapatan hibah tahun anggaran lalu, kesalahan penanggalan SPHL, koreksi kesalahan segmen bank hibah, maupun koreksi saldo awal hibah karena kesalahan akuntansi/pembukuan lainnya.
6. Koreksi Kas BLU sebesar minus Rp779.378.992.976 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada tahun 2017, penghapusan saldo BLU yang beralih status menjadi non-BLU, dan koreksi saldo kas BLU untuk perbaikan akuntansi/pembukuan lainnya.
7. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.504.402.474 merupakan penyesuaian terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) dalam rangka perbaikan data (penyamaan data hasil rekonsiliasi, reklasifikasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran, maupun koreksi akuntansi/pembukuan lainnya).
8. Koreksi Utang PFK sebesar Rp32.865.609.137 merupakan koreksi terhadap saldo Utang PFK Pegawai maupun saldo Utang PFK Pajak Rokok yang dilakukan oleh BUN (UAPBUN Transaksi Khusus DJPK maupun Satker Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga).
9. Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar Rp71.163.158.075 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) untuk menyesuaikan terhadap saldo *audited* 2016 berdasarkan LKBUN, koreksi/penyesuaian retur tahun 2017, penghapusan Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN), maupun koreksi akuntansi/pembukuan lainnya.

C.6. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp0,03 triliun

Penyesuaian Lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan. Penyesuaian perhitungan catatan SAL dilakukan dengan membandingkan antara mutasi saldo Neraca dengan mutasi transaksinya selama periode berjalan untuk Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP dan kas yang bukan merupakan SAL (Rekening Pemerintah Lainnya, Rekening Escrow, dan Kas Transitoris). Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL tidak terkait langsung dengan transaksi, melainkan hanya terkait perhitungan SAL Akhir dalam rangka menyajikan nilai akhir Catatan SAL

yang akurat seperti yang seharusnya. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL yang dilakukan pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp37.554.962.578 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP	8.559.545.546	(10.277.993.705)
Penyesuaian Transaksi RPL	(66.177.733.509)	459.860.066.676
Penyesuaian Transaksi Rek. Escrow	(176.060.645.176)	(801.233.194.332)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	1.992	(31.945.450.241)
Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL	358.154.958.334	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yg Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(86.921.164.501)	-
Pembulatan	(108)	-
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	37.554.962.578	(383.596.571.602)

1. Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp8.559.545.546 merupakan nilai selisih dari hasil identifikasi antara mutasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca dengan mutasi transaksi Transito UP/TUP pada Laporan Arus Kas. Sesuai dengan kebijakan akuntansi LKPP, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang digunakan dalam perhitungan SAL LKPP adalah sesuai konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga. Nilai penyesuaian perhitungan catatan SAL ini merupakan nilai mutasi/pergerakan dari selisih saldo awal dengan selisih saldo akhir Kas di Bendahara Pengeluaran antara pencatatan menurut konsolidasian K/L dan pencatatan menurut BUN dengan rincian sebagai berikut.

	Saldo Kas di BP menurut pencatatan BUN (I)	Saldo Kas di BP menurut pencatatan K/L (II)	Selisih Saldo Kas di BP (II – I)
Saldo Awal	271.505.915.031	262.946.369.485	(8.559.545.546)
Saldo Akhir	210.828.164.140	210.828.164.140	-
Penyesuaian Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP yang dilakukan di LPSAL (selisih Saldo Akhir – selisih Saldo Awal)			8.559.545.546

2. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL terkait dengan transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Rekening Escrow, dan Kas Transitoris merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan dalam rangka menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai dengan fisik SAL. RPL, Rekening Escrow, dan Kas Transitoris bukan merupakan bagian fisik SAL, namun pada nilai catatan SAL (yang merupakan akumulasi SiLPA tahun lalu ditambah dengan SiLPA tahun berjalan) masih terpengaruh oleh transaksi-transaksi dari aktivitas rekening tersebut. Penyesuaian Transaksi RPL sebesar minus Rp66.177.733.509, Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow sebesar minus Rp176.060.645.176, dan Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris sebesar Rp1.992 merupakan nilai total transaksi yang memengaruhi Catatan SAL tahun berjalan yang berasal dari aktivitas transaksi rekening non-SAL tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap catatan SAL sehingga tersaji nilai SAL yang sesungguhnya.
3. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp358.154.958.334 merupakan penyesuaian terkait dengan Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) yang terdapat pada saldo awal Rekening Pemerintah Lainnya (RPL). Pada tahun 2017, Pemerintah melakukan perbaikan dalam sisi manajemen kas dan penyempurnaan dalam pemanfaatan sistem terintegrasi untuk penyusunan LKPP. Dengan penyempurnaan/perbaikan tersebut, dilakukan juga penajaman analisis terhadap perhitungan SAL dengan tetap mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-51/PB/2016 tentang perubahan atas Per-40/PB/2015 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pelaporan SAL. Berdasarkan hasil penajaman analisis perhitungan SAL, diketahui bahwa

perlu dilakukan penyesuaian terhadap catatan SAL karena terdapat saldo retur pada saldo awal RPL yang harus dihitung sebagai bagian dari SAL yakni sebesar Rp358.154.958.334.

4. Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar minus Rp86.921.164.501 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yg perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Total
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan (TAYL)	(87.051.367.150)
Transaksi Persekot Gaji (TAYL)	122.392.649
Pengembalian Escrow PNB (TAYL)	7.810.000
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(86.921.164.501)

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15 Perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Perhitungan Catatan SAL		
Saldo Awal SAL	113.193.835.264.285	107.913.549.522.565
Penyesuaian Awal SAL		
Penyesuaian Awal dari Selisih Kiriman Uang TAYL	-	(5.588.644.917)
Penyesuaian Awal dari Selisih Rekening Khusus TAYL	-	546.344.758.866
Koreksi Kas BUN	-	(90.696.050)
Koreksi Kas Hibah	-	(9.196.454.509)
Koreksi Kas KPPN	-	(6.680.552.820)
Koreksi Kas BLU	-	1.563.645.497
Koreksi Utang PFK	-	(448.882.537.228)
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	-	278.824.304.009
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	-	(1.556.487.384)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	-	(19.011.062.000.000)
SAL Awal setelah Penyesuaian Awal & Penggunaan SAL	113.193.835.264.285	89.257.224.858.029
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	25.647.924.598.042	26.162.398.789.385
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL	138.841.759.862.327	115.419.623.647.414
Penyesuaian Pembukuan		
Koreksi SiLPA	149.497.232.083	(2.219.631.872.206)
Selisih Kurs (<i>unrealized</i>)	115.136.054.861	377.440.060.546
Koreksi Kas BUN	(3.765.194.909)	-
Koreksi Kas KPPN	198.081.593	-
Koreksi Kas Hibah	(115.519.321.645)	-
Koreksi Kas BLU	(779.378.992.976)	-
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN) ¹⁾	3.504.402.474	-
Koreksi Utang PFK ²⁾	32.865.609.137	-
Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) ³⁾	71.163.158.075	-
Pembulatan	-	133
Total Penyesuaian Pembukuan	(526.298.971.307)	(1.842.191.811.527)
Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)		
Penyesuaian Perhitungan Kas di BP LKPP ¹⁾	8.559.545.546	(10.277.993.705)
Penyesuaian Transaksi RPL ⁴⁾	(66.177.733.509)	459.860.066.676
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow ⁵⁾	(176.060.645.176)	(801.233.194.332)
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris ⁶⁾	1.992	(31.945.450.241)
Penyesuaian Terkait Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL	358.154.958.334	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	(86.921.164.501)	-
Pembulatan	(108)	-
Total Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL	37.554.962.578	(383.596.571.602)
SALDO AKHIR CATATAN SAL	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran (I)	262.946.369.485	329.040.889.462
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (II)	210.828.164.140	262.946.369.485
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (I – II)	52.118.205.345	66.094.519.977
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran (III)	64.182.153.365	54.260.038.888
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II)	12.063.948.020	(11.834.481.089)
<i>Penjelasan Selisih:</i> Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran BUN (yang dilakukan oleh KPPN)	3.504.402.474	(1.556.487.384)
Selisih Mutasi dikurangi Koreksi Kas BP BUN = Penyesuaian Catatan SAL yang dilakukan terkait Perhitungan Kas di Bendahara Pengeluaran LKPP	8.559.545.546	(10.277.993.705)

2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Saldo Awal Utang PFK (I)	5.301.758.765.389	4.930.416.680.238
Saldo Akhir Utang PFK (II)	4.505.640.401.487	5.301.758.765.389
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(796.118.363.902)	371.342.085.151
Mutasi Transaksi PFK (III)	(763.256.756.069)	(77.540.452.077)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	32.861.607.833	(448.882.537.228)
Utang PFK dalam Bentuk <i>Invoice</i> /Tagihan (IV)	4.001.304	-
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (I-II) setelah memperhitungkan Utang PFK dalam bentuk <i>Invoice</i> /Tagihan	32.865.609.137	(448.882.537.228)
<i>Penjelasan Selisih:</i> Koreksi Utang PFK hasil rekonsiliasi dengan Pihak Ketiga dan koreksi akuntansi lainnya	32.865.609.137	-
<i>Penjelasan Selisih:</i> Koreksi PFK Pajak Rokok (Jurnal Manual)	-	(448.876.580.268)
<i>Penjelasan Selisih:</i> Koreksi PFK Reklasifikasi akun Utang PFK Beras Bulog ke Piutang PFK Beras Bulog	-	(5.956.960)

3) Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Saldo Awal Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (I)	614.356.802.242	1.452.177.186.861
Saldo Akhir Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (II)	239.936.781.997	614.356.802.242
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(374.420.020.245)	(837.820.384.619)
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga KPPN (III)	(303.256.862.170)	(558.996.080.610)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I)	71.163.158.075	278.824.304.009
<i>Penjelasan Selisih:</i> Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (oleh KPPN)	71.163.158.075	166.070.162.567
<i>Penjelasan Selisih:</i> Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (Koreksi di tingkat Konsolidasian terhadap KPPN)	-	112.754.141.442

4) Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Saldo Awal RPL	1.538.381.222.069	2.557.450.784.213
Koreksi Saldo RPL	-	(9.177.001)
<i>Dikurangi:</i> Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL Awal Tahun	(358.154.958.334)	-
Saldo Awal RPL untuk perhitungan SAL (I)	1.180.226.263.735	2.557.441.607.212
Saldo Akhir RPL	3.905.763.616.742	1.538.381.222.069
<i>Dikurangi:</i> Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. Retur RPL Akhir Tahun	(200.259.869.276)	-
Saldo Akhir RPL untuk perhitungan SAL (II)	3.705.503.747.466	1.538.381.222.069
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	2.525.277.483.731	(1.019.060.385.143)
Mutasi Transaksi RPL (III)	2.459.099.750.222	(559.200.318.467)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Catatan SAL yang perlu dilakukan terkait Transaksi RPL	(66.177.733.509)	459.860.066.676
Keterangan: Penyesuaian Transaksi RPL senilai minus Rp66.177.733.509 merupakan selisih kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi sebesar Rp66.191.776.364, nilai SiLPA di Rekening Penerusan Pinjaman sebesar minus Rp14.043.480, dan lainnya sebesar Rp625.		

5) Rekening Escrow

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Saldo Awal Rek. Escrow	53.822.105.986.135	75.383.092.325.887
Koreksi Saldo Rek. Escrow	-	496.555.996.406
<i>Dikurangi:</i> Saldo pada Rekening Dana PFK Awal Tahun	-	-
Saldo Awal Rek. Escrow untuk perhitungan SAL (I)	53.822.105.986.135	75.879.648.322.293
Saldo Akhir Rek. Escrow	65.211.736.255.835	53.822.105.986.135
<i>Dikurangi:</i> Saldo pada Rekening Dana PFK Akhir Tahun (yang mengandung Unsur Kas SAL pada tanggal pelaporan 2017)	(3.276.851.117.024)	-
Saldo Akhir Rek. Escrow untuk perhitungan SAL (II)	61.934.885.138.811	53.822.105.986.135
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	8.112.779.152.676	(22.057.542.336.158)
Mutasi Transaksi Rek. Escrow (III)	7.936.718.507.500	(22.858.775.530.490)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Catatan SAL yang perlu dilakukan terkait Transaksi Rekening Escrow	(176.060.645.176)	(801.233.194.332)
Keterangan: Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow senilai minus Rp176.060.645.176 adalah nilai perhitungan selisih kurs yang memengaruhi Kas Rekening Escrow.		

6) Kas Transitoris

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Saldo Awal Kas Transitoris	(43.855.341.992)	(79.145.441.439)
Koreksi Saldo Kas Transitoris	43.855.343.512	35.579.975.046
Saldo Awal Kas Transitoris setelah Koreksi (I)	1.520	(43.565.466.393)

Saldo Akhir Kas Transitoris (II)	(472)	(43.855.342.084)
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir (II – I)	(1.992)	(289.875.691)
Mutasi Transaksi Kas Transitoris (III)	-	(32.235.325.932)
Selisih Mutasi Transaksi (III) dan Mutasi Saldo (II-I) = Penyesuaian Catatan SAL yang perlu dilakukan terkait Transaksi Kas Transitoris	1.992	(31.945.450.241)
Keterangan: Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris senilai Rp1.992 adalah nilai selisih mutasi transaksi dengan mutasi saldo Kas Transitoris pada tahun 2017.		

*Terdapat selisih sebesar Rp92 antara Saldo Akhir Kas Transitoris 2016 dengan Saldo Awal Kas Transitoris 2017 karena pembulatan pada Sistem Aplikasi Terintegrasi LKPP.

C.7.Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp138,35 triliun

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 138.353.015.853.598. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL. Rincian saldo akhir SAL dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Saldo Akhir Kas BUN	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Saldo Akhir Kas di KPPN	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	210.828.164.140	262.946.369.485
Saldo Akhir Kas pada BLU yg Sudah Disahkan	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Saldo Akhir Kas Hibah di K/L yg Sudah Disahkan	4.834.494.025.327	3.350.959.289.659
	139.599.450.932.318	119.023.029.667.415
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Saldo di Rek. Escrow yang Memiliki Unsur SAL	3.276.851.117.024	-
Utang PFK	(4.505.640.401.487)	(5.301.758.765.389)
Utang PFK dalam Bentuk Invoice	4.001.304	-
Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(39.676.912.721)	(614.356.802.242)
Selisih Kiriman Uang	298.353.410.242	-
Pendapatan Hibah dalam Reksus Ditangguhkan	(276.326.293.082)	87.051.367.150
Transaksi Persekot Gaji	-	(122.392.649)
Pengembalian Escrow PNB	-	(7.810.000)
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(1.246.435.078.720)	(5.829.194.403.130)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	138.353.015.853.598	113.193.835.264.285

Dengan demikian, terdapat peningkatan Saldo SAL pada Tahun 2017 sebesar Rp25.159.180.589.313 dari Saldo SAL Tahun 2016.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut.

*Posisi Neraca
secara umum*

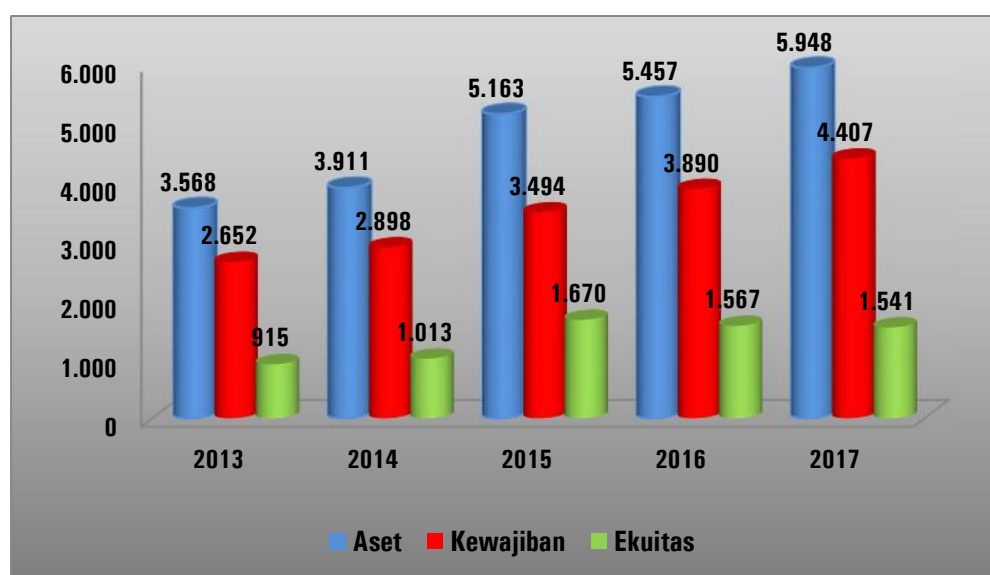
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Aset Lancar	336.812.365.233.132	304.611.773.163.182
Investasi Jangka Panjang	2.604.046.312.794.693	2.411.824.299.666.043
Aset Tetap	2.034.803.553.929.061	1.921.794.337.569.450
Piutang Jangka Panjang	47.810.448.151.143	47.128.879.666.666
Aset Lainnya	924.364.674.425.620	771.522.275.180.276
Jumlah Aset	5.947.837.354.533.649	5.456.881.565.245.617
Kewajiban Jangka Pendek	593.449.429.457.947	387.444.848.777.136
Kewajiban Jangka Panjang	3.813.604.268.146.762	3.502.504.964.461.832
Jumlah Kewajiban	4.407.053.697.604.709	3.889.949.813.238.968
Ekuitas	1.540.783.656.928.940	1.566.931.752.006.649
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5.947.837.354.533.649	5.456.881.565.245.617

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 26**.

(dalam triliun rupiah)

*Perbandingan
Neraca selama
5 tahun
terakhir*



Grafik 26 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada Neraca Tahun 2013 – 2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa nilai Ekuitas per 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar 1,66 persen dari posisi 31 Desember 2016.

D.2 PENJELASAN PER POS NERACA**D.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia**

*Rekening Kas
BUN di BI
Rp91,28 triliun*

Saldo Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp91.287.531.283.185 dan Rp81.150.105.652.341 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Rekening	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.251.960.416.588	2.237.264.769.384
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	41.095.824.987	16.005.325.838
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	98.275.892.483	2.108.662.535.922
Rekening KUN dalam Valuta EUR	250.343.675.250	2.495.876.097.188
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	10.242.036.867.562	8.664.279.233.781
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	2.965.512.966.366	1.731.463.307.169
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor 608.000991980	-	-
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta YEN Nomor 608.000111980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah Nomor 519.000124980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD Nomor 609.022411980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURO Nomor 609.000991980	-	-
Rekening SAL Nomor 500.000002980	66.383.586.349.132	56.023.564.674.298
Rekening Khusus dalam Valas dan Rupiah	9.054.719.290.821	7.872.989.708.766
Rekening RDI/RPD	-	-
Rekening Penerimaan pada Bank Mandiri	-	-
Rekening SUBRKUN Kuasa BUN Pusat	(4)	(4)
Rekening SUBBUN Talangan	-	-
Rekening Pengeluaran Surat Utang Negara	-	-
Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN- Non Gaji	-	-
Jumlah *)	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341

^{*) selisih antara data neraca Tahun 2016 dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan}

D.2.2. Rekening Pemerintah Lainnya

*RPL Rp3,90
triliun*

Saldo Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp3.905.763.616.747 dan Rp1.538.381.222.069 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Rekening	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji (4 rekening di BNI, Mandiri, BTN dan BRI)	195.453.950.729	356.245.241.248
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	1.984.038.711	1.909.717.086
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	1.709.479.552.436	1.164.006.404.427
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	1.995.770.488.537	15.952.109.335

Rekening Pertambahan dan Periklanan (Nomor 508.000071980)		-
Kas di Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)	253.706.468	267.749.959
Kas lainnya	2.821.879.836	-
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi (6 rekening dalam rupiah dan valas)	10	4
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah (Nomor 519000102980)	15	10
Jumlah	3.905.763.616.742	1.538.381.222.069

⁷ selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp5 karena pembulatan

Rekening Panas Bumi sebesar Rp1.709.479.552.436 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia termasuk kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp1.995.770.488.537 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada pemerintah.

Rekening Penerimaan – Dana Investasi merupakan rekening penerimaan yang menampung pengembalian dari piutang penerusan pinjaman yang terdiri dari piutang Penerusan Pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan atau Penerima Penerusan Pinjaman Lainnya (skema kredit program). Rekening ini terdiri dari 6 (enam rekening), yaitu:

No.	Nama Rekening	No. Rekening
1.	Rekening Dana Investasi	513000000980
2.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri (JPY)	607000111980
3.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri dalam valuta AUD (AUD)	607000311980
4.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri (USD)	607000411980
5.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri (GBP)	607000511980
6.	Rekening Dana Investasi k/penerimaan pengembalian pinjaman luar negeri (EUR)	607000991980

Rekening Penerimaan – Dana Pembangunan Daerah merupakan rekening penerimaan yang menampung penerimaan setoran dari pembayaran pinjaman pemerintah kepada Pemda.

Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

Rekening Kas di KPPN Rp2,28 triliun

D.2.3. Rekening Kas di KPPN

Saldo Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.282.077.569.283 dan Rp1.818.956.055.570 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia yang ditunjuk selaku Bank/Pos Persepsi serta Bank Operasional dan Rekening SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia.

Rincian Kas di KPPN dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

*Kas dalam
Transito
Rp330,58
miliar*

D.2.4. Kas dalam Transito

Saldo Kas dalam Transito per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp330.588.755.619 dan minus Rp11.620.016.100. Kas dalam Transito terdiri dari kas dalam transito pada rekening pinjaman dan hibah, transaksi dengan pajak ditanggung pemerintah, serta selisih antara catatan penerimaan kiriman uang dengan kode akun 818111 dan pengeluaran kiriman uang dengan kode akun 828111 pada seluruh rekening yang dikelola oleh BUN Pusat dan Daerah dengan rincian:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Kas Dalam Transito – BUN	(472)	84.742.809.983
2. Kas Dalam Transito – Rekening Pinjaman/Hibah	-	(43.855.342.084)
3. Selisih Kiriman Uang antar Rekening Bank	330.588.756.176	(52.507.484.000)
4. Pembulatan	(85)	-
Total*	330.588.755.619	(11.620.016.100)

1. Kas dalam Transito-BUN (111511) sebesar minus Rp472 berasal dari Dit. PKN yang merupakan Kas Transito antara Rekening Migas Valas USD yang akan dibayar dalam bentuk Rupiah;
2. Selisih Kiriman Uang (818111 dan 828111) sebesar Rp330.588.756.176 atau USD24,401,295.85 berasal dari penyesuaian Kas Dalam Transito Tahun Anggaran 2017 pada KPPN Penerimaan dikarenakan terdapat pelimpahan dari bank persepsi valas (USD) pada tanggal 30 Desember 2017 yang belum masuk ke rekening Sub RKUN BI pada tanggal 30 Desember 2017 dan baru dicatat di Sub RKUN BI pada tanggal 02 Januari 2018.

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp210,82
miliar*

D.2.5. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp210.828.164.140 dan Rp262.946.369.485 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp105,73
miliar*

D.2.6. Kas di Bendahara Penerimaan

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp105.738.412.756 dan Rp134.046.873.960 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp7,68 triliun*

D.2.7. Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp7.680.332.290.094 dan Rp6.534.321.641.665 merupakan sisa kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan

seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung K/L. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
K/L	7.680.309.646.436	6.534.171.185.459
BUN	22.643.658	150.456.206
Jumlah	7.680.332.290.094	6.534.321.641.665

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari K/L terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Setara kas lainnya	3.421.865.343	30.044.195.951
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.292.872.842.163	1.755.744.319.936
Kas Lainnya di K/L dari Hibah	4.834.494.025.327	3.350.959.289.559
Kas Lainnya di K/L Dana Kelolaan LPP RRI/TVRI	4.022.885.752	42.838.476.301
Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	782.400.419	9.585.779.922
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	571.809.033.280	548.380.450.165
Kas Lainnya di BLU	664.498.295.217	206.577.176.227
Kas Lainnya di K/L dari Hibah yang Belum Disahkan	308.408.298.935	590.041.497.398
Jumlah	7.680.309.646.436	6.534.171.185.459

Kas Lainnya dan Setara Kas pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

1. Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp2.736.090.651.979 sebagian besar merupakan hibah, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, dan pajak yang belum disetor ke kas negara.
2. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp790.575.624.052 merupakan pendapatan yang belum disahkan, uang muka kerja, dana pihak ketiga, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayar, hibah, dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
3. Kementerian Sosial sebesar Rp335.962.866.982 sebagian besar merupakan hibah, dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum disalurkan, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayar, dan jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
4. Badan Pengawas Pemilu sebesar Rp730.131.317.730 sebagian besar merupakan hibah, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan pajak/jasa giro yang belum disetor ke kas negara.
5. POLRI sebesar Rp741.201.340.537 sebagian besar merupakan hak pegawai/pihak ketiga, uang muka pasien Rumah Sakit BLU, hibah, pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, dan pajak/jasa giro/pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.
6. Kementerian Kesehatan sebesar Rp574.442.183.969 sebagian besar merupakan hibah, kas lainnya pada BLU, titipan/hak pihak ketiga, dan pajak yang belum disetor ke kas negara.
7. Kementerian Negara PPN/Bappenas sebesar Rp542.920.796.056 merupakan hibah dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara.

8. Kementerian Keuangan sebesar Rp471.927.362.187 merupakan pendapatan yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan, hak pegawai/pihak ketiga yang belum dibayarkan kepada yang bersangkutan, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di BLU, serta pajak yang belum disetor ke kas negara.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

Kas Lainnya dan Setara Kas pada BUN sebesar Rp22.643.658 merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas pada:

1. BA 999.07 sebesar Rp1.795.960 merupakan jasa giro yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan.
2. BA 999.08 sebesar Rp 20.847.698 utang pajak Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan.

D.2.8. Kas pada BLU

*Kas pada BLU
Rp28,77 triliun*

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp28.772.719.623.601 dan Rp28.520.592.254.174, merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa K/L, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	950.428.607.625	888.706.873.487
2. BLU di Kementerian Pertahanan	16.868.661.797	-
3. BLU di Kementerian Keuangan	5.098.913.847.342	5.999.320.527.659
4. BLU di Kementerian Pertanian	98.303.035.727	52.065.697.704
5. BLU di Kementerian Perindustrian	73.566.795.784	77.325.699.051
6. BLU di Kementerian ESDM	52.287.038.958	54.560.469.484
7. BLU di Kementerian Perhubungan	737.030.441.915	617.171.167.084
8. BLU di Kementerian Kesehatan	2.243.446.441.759	2.350.139.199.167
9. BLU di Kementerian Agama	858.430.167.529	746.624.184.795
10. BLU di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	839.952.533.771	726.679.583.653
11. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.723.562.568.513	1.369.418.471.402
12. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	2.591.818.310.642	3.204.442.468.004
13. BLU di Kementerian Negara KUKM	765.165.735.606	693.695.530.233
14. BLU di Kementerian Kominfo	11.931.874.968.079	10.805.877.138.751
15. BLU di Kepolisian RI	305.177.129.823	283.355.076.731
16. BLU di BPPT	38.097.086.146	20.650.610.924
17. BLU di LAPAN	-	3.051.198.630
18. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga	1.636.519.866	-
19. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam (BPKPBPB Batam)	442.619.085.919	622.848.698.190
20. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Sabang (BPKPBPB Sabang)	3.540.646.800	4.659.659.225
Jumlah	28.772.719.623.601	28.520.592.254.174

Kas pada BLU sebesar Rp28.772.719.623.601 terdiri dari Kas pada BLU yang sudah disahkan sebesar Rp28.780.111.401.997 dan Kas pada BLU yang belum disahkan sebesar Rp7.391.778.396. Disamping itu, terdapat Investasi Jangka Pendek berupa Deposito sebesar Rp12.204.408.488.386, yang berasal dari reklasifikasi Kas di BLU. Dengan demikian, jumlah Kas di BLU yang berasal dari Pengesahan SP3B menurut K/L adalah sebesar Rp40.984.519.890.383 (Rp28.780.111.401.997 + Rp12.204.408.488.386) dan telah sesuai dengan nilai Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN.

*Uang Muka dari
Rekening BUN
Rp38,16 miliar*

D.2.9 Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp38.165.547.963 dan Rp72.762.369.482 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Uang Muka dari Rekening BUN merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum dibebankan ke Reksus karena saldo Reksus tidak mencukupi. Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut *lender* adalah sebagai berikut.

<i>Lender</i>	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. IBRD	3.391.853.007	19.575.933.632
2. ADB	122.123.356	45.765.008.637
3. OECF/JBIC	19.459.000	218.082.200
4. IFAD	457.092.600	5.002.264.003
5. Uni Eropa	-	663.923.396
6. Australia	34.167.000.000	-
7. SBSN	8.020.000	1.537.157.614
Jumlah	38.165.547.963	72.762.369.482

*Investasi
Jangka Pendek
Rp12,20 triliun*

D.2.10. Investasi Jangka Pendek

Jumlah Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp12.204.408.488.386 dan Rp3.925.795.406.430 merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Investasi Jangka Pendek BLU per 31 Desember 2017 antara lain merupakan deposito yang berada di BLU pada Kementerian Keuangan sebesar Rp8.730.956.109.060, BLU pada Kementerian Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp2.953.985.171.122, BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp371.467.208.204, BLU pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp79.000.000.000, BLU pada Kementerian Agama sebesar Rp59.000.000.000, dan BLU pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebesar Rp10.000.000.000.

*Belanja Dibayar
di Muka dan
Uang Muka
Belanja
Rp17,26 triliun*

D.2.11. Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp17.261.771.032.885 dan Rp9.483.198.832.174, terdiri dari:

(dalam rupiah)		
Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Belanja Dibayar di Muka	6.048.710.078.004	7.064.500.516.264
2. Uang Muka Belanja	11.213.060.954.881	2.418.698.315.910
Jumlah	17.261.771.032.885	9.483.198.832.174

Belanja Dibayar di Muka yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.781.927.171.918. Uang Muka Belanja yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp10.838.536.884.561. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Belanja

Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja. Rincian Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp576,86
miliar*

D.2.12. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp576.867.095.851 dan Rp315.266.960.092. Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp265.793.509.448. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

*Piutang
Perpajakan
Rp58,62 triliun*

D.2.13. Piutang Perpajakan

Jumlah Piutang Perpajakan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp58.621.958.896.480 dan Rp105.656.377.094.983. Nilai Piutang Perpajakan per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp27.572.433.855.982 berasal dari nilai bruto sebesar Rp58.621.958.896.480 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp31.049.525.040.498.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2017.

Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Rincian Piutang Perpajakan menurut organisasi adalah sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	54.160.090.238	101.774.202.460
Penyisihan	(27.725.482.667)	(70.022.982.880)
Nilai Bersih	26.434.607.571	31.751.219.580
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	4.461.868.658	3.882.174.635
Penyisihan	(3.324.042.373)	(2.718.921.736)
Nilai Bersih	1.137.826.285	1.163.252.899
Piutang Perpajakan (Bruto)	58.621.958.896	105.656.377.095
Total Penyisihan	(31.049.525.040)	(72.741.904.616)
Piutang Perpajakan (Bersih)	27.572.433.856	32.914.472.479

Saldo piutang pajak bruto pada Direktorat Jenderal Pajak mengalami penurunan sebesar Rp47.034.418.199 atau sebesar 44,51%. Penyebab penurunan terbesar dikarenakan adanya Piutang Pajak deluwaras sebesar Rp32.754.196.844.939 yang tidak dicatat pada Neraca TA 2017, karena Pemerintah sudah tidak mempunyai hak untuk menagih atas

Piutang Pajak deluwarsa tersebut. Atas Piutang Pajak deluwarsa yang tidak dicatat lagi pada Neraca dilakukan pencatatan secara ekstrakomptabel dan tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan.

Rincian Piutang Perpajakan (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 16.**

Tabel 16. Piutang Pajak per Jenis Pajak

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	Kenaikan/ (penurunan)	%
1. Piutang Pajak PPH Non Migas	20.184.762.817	42.187.395.275	(22.002.632.458)	(52,15)
2. Piutang Pajak PPN	24.241.668.611	35.769.578.359	(11.527.909.748)	(32,23)
3. Piutang Pajak PPnBM	355.413.375	641.419.774	(286.006.399)	(44,59)
4. Piutang Pajak PBB dan BPHTB	6.819.833.386	11.263.339.405	(4.443.506.019)	(39,45)
5. Piutang Cukai dan Bea Meterai	90.082.913	91.580.549	(1.497.636)	(1,64)
6. Piutang Pajak Lainnya	3.093.487.414	12.232.540.191	(9.139.052.777)	(74,71)
7. Piutang Pajak Perdagangan Internasional	3.812.291.758	3.447.470.579	364.821.179	10,58
8. Piutang Bea Masuk Tindakan	24.418.623	23.052.962	1.365.661	5,92
Jumlah	58.621.958.896	105.656.377.094	(47.034.418.198)	(44,52)

Penyisihan Piutang Perpajakan tidak tertagih per jenis Piutang Perpajakan dapat dilihat pada **Tabel 17.**

Tabel 17. Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Jenis Pajak

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)	Kenaikan/ (penurunan)	%
1. Piutang Pajak PPH Non Migas	(12.327.832.755)	(29.266.421.240)	16.938.588.485	(57,88)
2. Piutang Pajak PPN	(11.863.974.672)	(24.760.299.199)	12.896.324.527	(52,08)
3. Piutang Pajak PPnBM	(299.430.166)	(584.978.976)	285.548.810	(48,81)
4. Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(2.126.318.365)	(7.417.665.280)	5.291.346.915	(71,33)
5. Piutang Cukai dan Bea Meterai*	(81.011.399)	(83.967.825)	2.956.426	(3,52)
6. Piutang Pajak Lainnya	(1.235.170.751)	(8.144.115.202)	6.908.944.451	(84,83)
7. Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(3.115.786.931)	(2.484.456.894)	(631.330.037)	25,41
Jumlah	(31.049.525.039)	(72.741.904.616)	41.692.379.577	(57,32)

*Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Meterai seluruhnya merupakan penyisihan atas Piutang Cukai dari DJBC

Rincian Piutang Pajak deluwarsa per 31 Desember 2017 sebesar Rp32.754.196.844.939 disajikan pada tabel berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)
Piutang Pajak PPh Non Migas	10.779.678.564
Piutang Pajak PPN	4.564.208.759
Piutang Pajak PPnBM	55.162.734
Piutang Pajak PBB dan BPHTB	4.931.555.950
Piutang Pajak Lainnya	12.423.590.836
Jumlah	32.754.196.843

Pada Tahun 2017 telah diusulkan penghapusan piutang yang telah daluwarsa penagihannya kepada Menteri Keuangan sebesar Rp26.450.326.929. Usulan penghapusan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Menteri Keuangan.

Dalam hal terdapat Piutang Perpajakan daluwarsa yang berdasarkan hasil penelitian terdapat kesalahan dalam penentuan kriteria daluwarsanya maka atas Piutang tersebut dicatat kembali di dalam Neraca. Demikian pula dalam hal terdapat Piutang Perpajakan daluwarsa yang dikeluarkan dari neraca tersebut di kemudian hari ternyata diterima pembayarannya, maka Piutang Pajak tersebut akan dicatat kembali sebesar nilai yang diterima.

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, pemerintah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak, yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp198.258.665.424.806.

Piutang Perpajakan yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Sampai dengan 31 Desember 2017, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 124.484 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp58.096.307.078.621 dan USD679,281,440.00. Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan pada **Tabel 18**.

Tabel 18. Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKBKB/SKPKBT
Terbit s.d. 31 Desember 2017
 (dalam ribuan rupiah)

Uraian	Kurs	Jumlah Data	Nilai Ketetapan Pajak	Nilai Setuju	Nilai Tidak setuju
PPh Pasal 21	IDR	5.200	745.333.514.987	414.978.487.889	330.355.027.098
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 22	IDR	905	1.878.755.948.517	79.754.740.031	1.799.001.208.486
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 23	IDR	10.145	3.224.101.601.037	372.748.900.299	2.851.352.700.738
	USD	1	10,743	10,743	-
PPh Pasal 25 Badan	IDR	2.506	17.884.527.073.029	2.085.881.170.956	15.798.645.902.073
	USD	242	584,048,405	41,413,554	542,634,851
PPh Pasal 25 OP	IDR	1.354	221.021.137.093	151.851.279.629	69.169.857.464
	USD	-	-	-	-
PPh Pasal 26	IDR	1.523	3.087.535.614.751	456.667.094.232	2.630.868.520.519
	USD	1	37,313	37,313	-
PPh Pasal 4 ayat (2)	IDR	31.108	2.773.013.734.182	512.770.313.985	2.260.243.420.197
	USD	33	52,069,701	10,433,757	41,635,944
PPN	IDR	71.399	28.240.576.954.536	5.174.929.277.686	23.065.647.676.850
	USD	4	43,115,278	43,115,278	-
PPnBM	IDR	35	40.886.698.489	15.866.528.746	25.020.169.743
	USD	-	-	-	-
PTLL	IDR	28	554.802.000	209.132.000	345.670.000
	USD	-	-	-	-
Jumlah	IDR	124.203	58.096.307.078.621	9.265.656.925.453	48.830.650.153.168
	USD	281	679,281,440	95,010,645	584,270,795

Rincian Piutang Perpajakan dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

D.2.14. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak
Rp158,62
triliun*

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp158.620.573.008.549 dan Rp157.317.644.684.473. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp31.365.970.152.304, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp158.620.573.008.549 dikurangi penyisihan sebesar Rp127.254.602.856.245. Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Piutang pada K/L:		
Nilai Bruto	37.946.995.596.919	34.405.512.144.647
Penyisihan	(27.798.207.844.367)	(26.302.177.848.313)
Nilai Bersih	10.148.787.752.552	8.103.334.296.334
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	120.673.577.411.630	122.912.132.539.826
Penyisihan	(99.456.395.011.878)	(84.881.816.696.856)
Nilai Bersih	21.217.182.399.752	38.030.315.842.970
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	158.620.573.008.549	157.317.644.684.473
Total Penyisihan	(127.254.602.856.245)	(111.183.994.545.169)
Piutang Bukan Pajak (Bersih)	31.365.970.152.304	46.133.650.139.304

*Piutang Bukan
Pajak di K/L
Rp37,94 triliun*

Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2017 sebesar Rp37.946.995.956.919 mengalami kenaikan sebesar Rp3.541.483.452.272 atau 10,29% dibandingkan tahun 2016 antara lain karena adanya kenaikan piutang pada beberapa K/L.

Beberapa Piutang Bukan Pajak pada K/L yang mempunyai nilai cukup signifikan, antara lain pada:

- Kejaksaan Agung sebesar Rp17.207.138.324.097 merupakan piutang dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi, denda tilang, dan sewa rumah dinas.
- Kementerian ESDM sebesar Rp11.795.354.469.701 sebagian besar merupakan piutang yang berasal dari luran Royalty dan luran Tetap Kontrak Karya (KK)/Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta kewajiban KKKS kepada negara berupa *Firm Commitment*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp3.604.825.051.714 berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH DR) dan tunggakan ganti rugi tegakan.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.405.493.494.580 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaran (BHP) Telekomunikasi dan Pengenaan Denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada K/L per 31 Desember 2017 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2017 sebesar Rp120.673.577.411.630 terdiri dari:

*Piutang Bukan
Pajak di BUN
Rp120,67
triliun*

(dalam rupiah)

Piutang PNB	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Piutang Dividen pada BA 999.03	130.507.641.516	140.287.825.516
2. Piutang pada BA 999.05	12.587.181.424.549	16.865.867.945.164
3. Piutang pada BA 999.07	2.418.199.044.056	295.630.919.267
4. Piutang pada BA 999.08	298.954.011.484	6.438.382.772
5. Piutang pada BA 999.99	105.238.735.290.025	105.603.907.467.107
Piutang PNB	120.673.577.411.630	122.912.132.539.826

1. Piutang Dividen (Laba BUMN) pada BA 999.03 per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp130.507.641.516 dan Rp140.287.825.516, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Rincian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Pokok Dividen	90.350.726.664	100.710.726.664
2	Denda	40.156.914.852	39.577.098.852
Jumlah		130.507.641.516	140.287.825.516

Piutang Bukan pajak (Laba BUMN) per tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	BUMN	Tahun Buku Terjadinya Piutang	Jumlah
1	PT Balai Pustaka	2004	266.749.800
2	Perum Perumnas	1991-1997	64.725.637.648
3	PT Perkebunan Nusantara II	1999	15.367.527.690
4	PT Inhutani I	2000	1.712.468.076
5	PT Inhutani V	1999	2.721.919.265
6	PT Bina Karya	2001	248.308.462
7	PT Istaka Karya	2003	8.391.154.934
8	PT Industri Sandang Nusantara	1978-2001	33.586.982.444
9	PT Kertas Gowa (telah dilikuidasi)	1972-1980	715.651.799
10	PT ASDP Ferry	2016	2.602.827.655
11	PT TWC Borobudur	2016	168.413.743
Jumlah			130.507.641.516

2. Piutang pada BA 999.05 per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp12.587.181.424.549 dan Rp16.865.867.945.164, merupakan merupakan piutang transfer ke daerah akibat lebih salur yang terjadi pada periode tahun berjalan ataupun tahun sebelumnya. Atas lebih salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan lebih salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan jenis akunnya, piutang pada BA 999.05 sebesar Rp12.587.181.424.549 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Piutang TKD	10.799.485.615.144	9.660.013.885.828
Piutang TKDD Lainnya	1.787.695.809.405	7.205.854.059.336
Jumlah	12.587.181.424.549	16.865.867.945.164

a. Piutang TKD

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017, meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun sebelumnya. Atas Lebih Salur ini, cara penyelesaian yang telah ditetapkan pemerintah adalah dengan memperhitungkan Lebih Salur tersebut melalui mekanisme pemotongan pada penyaluran tahun anggaran berikutnya. Piutang TKD TA 2017 sebesar Rp10.799.485.615.144 terdiri dari:

(dalam rupiah)

RINCIAN PIUTANG TKD	
Satker Dana Bagi Hasil	10.544.758.618.929
Satker DAU dan DAK Non Fisik	224.572.939.057
Satker DK DIY	26.564.467.571
Satker Dana Desa	3.589.589.587
Total Piutang TKD	10.799.485.615.144

) Nilai piutang TKD Satker DBH TA 2017 sebesar Rp 10.544.758.618.929 per tanggal 31 Desember 2017 yang terdiri dari Piutang LS DBH penetapan TA 2016 sebesar Rp3.635.414.953.009 dan Piutang LS DBH penetapan TA 2017 sebesar Rp6.909.343.665.920.

Piutang LS DBH periode sebelum TA 2016 sebesar Rp3.635.414.953.009 tercantum dalam PMK No. 259/PMK.07/2015 dan PMK No. 162/PMK.07/2016 yang sebagian telah diselesaikan melalui Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2017 dan Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor Per-5/PK/2017. Rincian Piutang TKD sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Dana	Lebih Bayar	Pemotongan LS (Per-1/PK/2017)	Pemotongan LS (Per-5/PK/2017)	Sisa
LS minyak bumi 15% TA 2014	370.946.192.551	370.946.192.551	-	-
LS gas bumi 30% TA 2014	113.649.839.276	113.649.839.276	-	-
LS gas bumi 0.5% TA 2014	117.776.526	117.776.526	-	-
LS minyak bumi otsus TA 2014	85.694.578.481	54.334.932.011	31.359.646.470	-
LS gas bumi otsus TA 2014	38.448.641.027	38.448.641.027	-	-
LS DBH Kehutanan - IIUPH TA 2014	4.139.669.351	4.139.669.351	-	-
LS DBH Kehutanan - PSDH TA 2014	52.449.713.227	39.995.675.293	12.454.037.934	-
LS DBH Kehutanan-DR TA 2014	136.522.756.351	68.160.782.907	68.361.973.444	-
LS DBH Minerba-royalti TA 2014	357.305.466.090	135.039.662.672	177.724.195.510	44.541.607.908
LS DBH Minerba- iuran tetap TA 2014	10.194.560.908	5.597.489.049	4.597.071.859	-
LS DBH PBB Bagian Daerah TA 2014 dan 2015	139.444.016.405	45.778.903.521	10.671.098.389	82.994.014.495
LS DBH PBB Biaya Pemungutan TA 2014 dan 2015	5.722.826.890	1.591.343.570	262.412.687	3.869.070.633

LS DBH PPH Pasal 21 TA 2013, 2014, dan 2015	458.824.210.285	416.745.862.318	13.471.435.614	28.606.912.353
LS DBH PPH Pasal 25/29 WPOPON TA 2013, 2014, dan 2015	77.956.040.744	68.506.586.354	606.672.170	8.842.782.220
LS DBH Minyak Bumi 15% TA 2015	1.431.871.855.157	659.542.642.722	343.219.751.319	429.109.461.116
LS DBH Minyak Bumi 0.5% TA 2015	47.640.040.831	19.579.873.517	6.432.934.963	21.627.232.351
LS DBH Gas Bumi 30% TA 2015	213.758.945.212	87.641.348.314	-	126.117.596.898
LS DBH Gas Bumi 15% TA 2015	3.562.637.355	1.460.358.595	-	2.102.278.760
LS DBH Kehutanan - IUPH TA 2015	55.424.398.321	27.860.714.198	27.563.684.123	-
LS DBH Kehutanan - PSDH TA 2015	59.719.237.784	41.651.521.368	18.067.716.416	-
LS DBH Kehutanan-DR TA 2015	143.936.569.323	44.284.473.794	42.730.759.787	56.921.335.742
LS DBH Minerba- iuran tetap TA 2015	807.483.513.460	147.485.234.772	563.090.960.555	96.907.318.133
LS DBH Minerba-royalti TA 2015	4.669.308.536.892	133.073.178.410	1.818.007.866.317	2.718.227.492.165
LS DBH Perikanan TA 2015	260.822.887.309	232.857.053.776	15.555.292.648	12.410.540.885
LS DBH Panas Bumi - Iuran Tetap TA 2015	1.729.510.948	1.729.510.948	-	-
LS DBH Cukai hasil Tembakau TA 2015	21.848.895.963	-	18.711.586.613	3.137.309.350
Jumlah	9.568.523.316.667	2.760.219.266.840	3.172.889.096.818	3.635.414.953.009

Pada tahun anggaran berjalan terdapat penetapan Lebih Salur DBH sebelum TA 2015 (diluar yang sudah ditetapkan dalam PMK No. 259/PMK.07/2015 dan PMK No. 162/PMK.07/2016) dan TA 2016 sebesar Rp 10.311.727.382.019 melalui PMK Nomor 187/PMK.07/2017 dengan cara penyelesaian diatur dalam Perdirjen PK Nomor Per-5/PK/2017. Sehingga Sisa Lebih Salur DBH per 31 Desember 2017 adalah sejumlah Rp6.909.343.665.920 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	2017	Penyesuaian/ Pemotongan	Sisa Lebih Salur
LS Kehutanan IUPH TA 2016	39.094.697.402	24.464.618.040	14.630.079.362
LS Kehutanan PSDH TA 2016	4.890.200.325	4.295.470.790	594.729.535
LS Kehutanan Dana Reboisasi TA 2016	35.211.438.052	22.231.798.460	12.979.639.592
LS Pertambangan Umum - Iuran Tetap TA 2016	641.085.325.231	270.527.309.548	370.558.015.683
LS Pertambangan Umum - Royalti TA 2016	4.390.300.851.360	348.856.699.234	4.041.444.152.126
LS Minyak Bumi 15% TA 2016	1.732.414.666.727	819.634.522.074	912.780.144.653
LS Minyak Bumi 0,5% TA 2016	57.358.244.975	13.954.926.150	43.403.318.825

LS Minyak Bumi dalam Rangka Otsus TA 2016	42.237.981.715	17.559.634.417	24.678.347.298
LS Gas Bumi 30% TA 2016	900.942.601.633	513.190.956.583	387.751.645.050
LS Gas Bumi 0,5% TA 2016	12.716.920.321	5.459.873.730	7.257.046.591
LS Gas Bumi dalam Rangka Otsus TA 2016	264.803.619.182	-	264.803.619.182
LS Panas Bumi - Iuran Tetap TA 2016	645.638.013	613.380.403	32.257.610
LS Panas Bumi - Iuran Produksi TA 2016	4.508.920.636	2.861.906.336	1.647.014.300
LS PPh Pasal 21 TA 2016	26.343.431.631	3.263.674.794	23.079.756.837
LS PPh Pasal 25/29 TA 2016	1.051.834.382.620	714.489.374.590	337.345.008.030
LS PBB Bag. Daerah TA 2016	299.105.472.852	108.785.234.731	190.320.238.121
LS PBB Biaya Pungut TA 2016	10.760.393.018	3.867.969.437	6.892.423.581
LS Cukai Hasil Tembakau TA 2016	77.431.920.559	30.490.562.123	46.941.358.436
LS Pertambangan Umum - Iuran Tetap TA 2015	27.924.898	-	27.924.898
LS Pertambangan Umum - Royalti TA 2015	18.604.451.780	-	18.604.451.780
LS Pertambangan Umum - Iuran Tetap TA 2014	25.260.646	-	25.260.646
LS Pertambangan Umum - Royalti TA 2014	19.332.757.799	157.609.246	19.175.148.553
LS PBB Bagi Rata TA 2013	47.092.982.540	36.834.467.228	10.258.515.312
LS PBB Insentif P2 TA 2013	239.203.677	190.623.344	48.580.333
LS PBB Insentif P3 TA 2013	25.118.556.166	20.390.921.643	4.727.634.523
LS PBB Bag. Daerah TA 2013	589.873.589.125	426.058.725.529	163.814.863.596
LS PBB Biaya Pungut TA 2013	19.725.949.136	14.203.457.669	5.522.491.467
Jumlah	10.311.727.382.019	3.402.383.716.099	6.909.343.665.920

) Piutang PNB pada Satker DAU-DAK (Non Fisik)

Piutang TKD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Satker DAU dan DAK per 31 Desember 2017 meliputi seluruh hak Pemerintah Pusat atas Lebih Salur transfer yang terjadi pada tahun anggaran berkenaan ataupun tahun anggaran sebelumnya. Nilai Piutang TKD yang tercatat per 31 Desember 2017 sebesar Rp224.572.939.057. Rincian Piutang TKD adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
SPM Lebih Salur TPG PNSD TA 2015	0	8.204.433.000
Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2016	0	35.703.300.000
Lebih Salur Dana BOK TA 2016	0	31.855.234.000
Lebih Salur Dana DAK Fisik TA 2016	48.931.543.176	0
Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2017	175.641.395.881	0
Jumlah	224.572.939.057	75.762.967.000

Piutang Lebih Salur TPG PNSD TA 2015 oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui suratnya Nomor 23561/BI/PR/2017 tanggal 15 Agustus 2017 menyatakan bahwa terkait piutang Lebih Salur TPG PNSD TA 2015 Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp8.204.433.000, telah diselesaikan melalui penghentian penyaluran Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2016 dengan Surat Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 33130/A.A1.1/PR/2016 pada Bulan Juli 2016. Direktur Dana Perimbangan selaku KPA menyampaikan dengan Nota Dinas Nomor 217/PK.2/2017 bahwa

perlu disesuaikannya piutang terkait pada Neraca LKTD TA 2017.

Piutang Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2016 sebesar Rp35.703.300.000 telah diselesaikan dengan memperhitungkan penyaluran Dana BOS Triwulan I TA 2017 pada bulan Januari 2017, meliputi: Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2016 Provinsi Jawa Timur sebesar Rp34.962.050.000 dan Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV TA 2016 Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp741.250.000. Dengan demikian Piutang TKD yang berasal dari Lebih Salur BOS Triwulan IV TA 2016 per 31 Desember 2017 adalah nihil.

Pelunasan Piutang yang berasal dari Lebih Salur Dana BOK TA 2016 sebesar Rp31.855.234.000 telah dilaksanakan seluruhnya melalui mekanisme pemotongan atas penyaluran Dana BOK TA 2017 sebagaimana disajikan pada Tabel 64 berikut. Dengan demikian Piutang TKD yang berasal dari Lebih Salur Dana BOK TA 2016 per 31 Desember 2017 adalah nihil. Rincian pemotongan penyaluran Dana BOK TA 2017 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Waktu Pemotongan BOK	Nilai
1.	Maret 2017	976.416.000
2.	April 2017	7.525.567.000
3.	Mei 2017	4.677.783.000
4.	Juni 2017	234.255.000
5.	Juli 2017	1.156.260.000
6.	Desember	17.284.953.000
Jumlah		31.855.234.000

Sebagai catatan bahwa dalam pelaporan Piutang Lebih Salur PK Naker TA 2016 pada Satker 999201 untuk Kabupaten Lumajang telah dilakukan penyelesaian melalui pemotongan DAU bulan Agustus, September, dan Oktober sebesar Rp4.773.800.000, sehingga piutang atas Lebih Salur PK Naker TA 2016 per 31 Desember 2017 adalah nihil.

Penambahan Piutang TKD terkait Lebih Salur Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2016 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 876/KMK.07/2017 tentang Kelebihan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp48.931.543.176 terdiri dari Piutang Lebih Salur DAK Fisik Reguler sebesar Rp42.020.542.905 dan Piutang Lebih Salur DAK Fisik Afirmasi sebesar Rp6.911.000.271. Kelebihan penyaluran DAK Fisik TA 2016, sebagai implikasi penyesuaian pagu alokasi DAK Fisik pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dimana daerah-daerah yang tercantum dalam KMK dimaksud, maka penyaluran DAU bulan Februari 2018, akan diperhitungkan dengan kelebihan penyaluran DAK Fisik Tahun 2016 ini, dengan rincian:

(dalam rupiah)

No	Piutang TKD	Nilai
1.	Piutang Lebih Salur DAK Fisik Reguler	42.020.542.905
2.	Piutang Lebih Salur DAK Fisik Afirmasi	6.911.000.271
Jumlah		48.931.543.176

Penambahan Piutang TKD terkait Lebih Salur Dana BOS Triwulan IV atau Semester II TA 2017 sebesar Rp175.641.395.881, sebagaimana Surat

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8378/D.D3/KU/2017 Tanggal 12 Desember 2017 hal Penyaluran dana BOS TW IV Tahun 2017 dan 453/D.D3/KU/2018 Tanggal 19 Januari 2018 hal Penyaluran Dana BOS TW IV Tahun 2017 Susulan 14 Provinsi (informasi setelah tanggal neraca yang mempengaruhi piutang per 31 Desember 2017). Piutang Lebih Salur dimaksud akan diselesaikan melalui mekanisme pemotongan Dana BOS pada Tahun Anggaran Berikutnya.

-) Piutang Lebih Salur Satker DK DIY sebesar Rp26.564.467.571. Nilai tersebut merupakan sisa dana DK DIY TA 2017 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap Akhir TA 2017, mengacu pada pasal 11 PMK No.173/PMK.07/2017. Piutang tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran DK DIY melalui potongan SPM Penyaluran DK DIY Tahap I TA 2018 sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 15 PMK No.124/PMK.07/2015.
-) Piutang Satker Dana Desa per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.589.589.587.

b. Piutang TKDD Lainnya

Piutang TKDD Lainnya untuk Satker DBH 2017 adalah sebesar **Rp1.787.695.809.405** berasal dari piutang DBH Estimasi (ND-30/PK.2.1/2018 dan ND-47/PK.2.1/2018) sebesar Rp1.659.664.583.146 dan tambahan Estimasi Piutang DBH (ND-90/PK.2.1/2018) sebesar Rp128.031.226.259.

Piutang TKDD Lainnya Satker DBH berdasarkan ND-30/PK.2.1/2018 dan ND-47/PK.2.1/2018 adalah sebesar Rp1.659.664.583.146 (yang diterbitkan oleh Subdirektorat Dana Bagi Hasil Direktorat Dana Perimbangan). Nilai tersebut berdasarkan penerimaan PNPB dan Pajak yang seharusnya dibagihasikan pada TA 2017 berdasarkan data penerimaan tahun berjalan yang disesuaikan dengan realisasi penyaluran DBH per 31 Desember 2017.

Selain Estimasi Piutang DBH, berdasarkan ND-90/PK.2.1/2018 (yang diterbitkan oleh Subdirektorat Dana Bagi Hasil) terdapat tambahan Estimasi Piutang DBH yang bersumber dari koreksi atas perhitungan Lebih Bayar DBH dalam PMK No.187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian DBH dan Pendapatan Kurang Bayar dan Lebih Bayar pada TA 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya sebesar Rp128.031.226.259, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Tambahan Estimasi Piutang
Minyak bumi	84.032.036.052
) 15%	18.046.447.091
) 0,5%	1.694.650
) DBH Otsus Migas Aceh	317.436.811
) DBH Otsus Migas Papua	65.666.457.500
Gas bumi	13.769.898.036
) 30%	8.877.229.035
) 0,5%	87.906.562
) DBH Otsus Migas Aceh	4.000.351.994

DBH Otsus Migas Papua	804.410.445
Minerba	30.229.292.171
Iuran Tetap	30.229.292.171
Jumlah	128.031.226.259

3. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.418.199.044.056 dan Rp295.630.919.267. Piutang tersebut merupakan piutang subsidi dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kementerian Sosial	834.824.264.978	-
Kementerian Perhubungan	385.229.458.233	-
Kementerian Pertanian	1.198.145.320.845	295.630.919.267
Jumlah	2.418.199.044.056	295.630.919.267

a. Kementerian Sosial

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp834.824.264.978 pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial merupakan lebih bayar Subsidi Pangan TA 2017 berdasarkan hasil audit BPK pada Perum BULOG selaku BUMN Operator Subsidi Pangan.

b. Kementerian Perhubungan

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp385.229.458.233 terdapat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang merupakan lebih bayar PSO PT PELNI TA 2017 selaku BUMN Operator PSO PT PELNI sebesar Rp1.510.567.225 dan pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian yang merupakan lebih bayar PSO PT KAI TA 2017 selaku BUMN Operator PSO PT KAI sebesar Rp383.718.891.008 berdasarkan hasil audit BPK.

c. Kementerian Pertanian

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.198.145.320.845 terdapat pada 2 (dua) satker KPA yaitu:

1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.453.015.134 merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2014.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp17.453.015.134, telah disetor oleh PT Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp5.000.000.000 yang merupakan setoran angsuran terkait Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan belanja subsidi pada PT Sang Hyang Seri (Persero) berupa kelebihan pembayaran Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Tahun 2012 kepada Perum Jasa Tirta II sebesar Rp840.743.845, dan angsuran kelebihan pembayaran subsidi benih Tahun 2014 sebesar Rp4.159.256.155.

2) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.185.692.305.711 merupakan kelebihan pembayaran Subsidi Pupuk Tahun 2017 berdasarkan hasil audit BPK, yang terdiri dari PT Petrokimia Gresik sebesar Rp1.093.614.774.016 dan PT Pupuk Sriwijaya Palembang sebesar Rp92.077.531.695.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp278.177.904.133 merupakan kelebihan pembayaran subsidi pupuk pada PT Petrokimia Gresik berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2016, yang telah disetor sebesar Rp252.889.003.758 sedangkan selisihnya sebesar Rp25.288.900.375 merupakan pajak, yang sudah dipotong untuk disetor ke kas negara pada saat penyaluran di tahun 2016.

4. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp298.954.011.484 dan Rp6.438.382.772, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Kementerian Keuangan	19.694.995.500	286.798.713
Kementerian Pertanian	279.109.577.585	4.811.607.957
Otoritas Jasa Keuangan	149.438.400	149.438.400
SKK Migas	0	1.190.537.702
Jumlah*	298.954.011.485	6.438.382.772

*selisih sebesar Rp1 karena pembulatan

- a. Piutang sebesar Rp19.694.995.500 pada Kementerian Keuangan merupakan penjualan Operasi Pasar Murni (OPM) Satuan Kerja BA BUN Direktorat Jenderal Perbendaharaan (BA999.08.999979) CBP Tahun 2017 yang akan diterima pelunasannya pada bulan Januari Tahun 2018.
- b. Piutang sebesar Rp279.109.577.585 pada Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian terdiri dari:
 - Jasa giro dana pengelolaan CBN yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2017 yaitu pada PT Sang Hyang Seri senilai Rp68.590.220, terdiri dari jasa giro tahun 2016 sebesar Rp54.484.256 dan jasa giro tahun 2017 sebesar Rp14.105.964. Adapun jasa giro PT Pertani senilai Rp30.112.114 merupakan jasa giro dari bulan Juli s.d. Desember 2017.
 - Uang muka penyegaran benih CBN pada PT Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp4.811.607.957 yang harus disetorkan ke Kas Negara berdasarkan LHP BPK RI No. 25/LHP/XVII/06/2013.
 - Reklasifikasi dari akun Belanja Dibayar di Muka (*Prepaid*) sebesar Rp274.199.267.294. Reklasifikasi tersebut berdasarkan Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan UAP BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) Tahun 2017 Nomor: NKF-999.08/62/R/DJA/PB.6/2018 tanggal 20 April 2018 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Benih CBN di penangkar	47.614.294.265	60.218.555.548
2	Benih CBN tidak terdapat di gudang dan penangkar	196.957.839.678	186.745.165.653
3	Biaya Distribusi Benih CBN	14.810.489.747	14.986.010.660
4	Calon Benih	2.128.255.052	-
5	Benih Rusak/Kadaluarsa	12.688.388.552	-
	Jumlah	274.199.267.294	261.949.731.861

- c. Piutang sebesar Rp149.438.400 pada Otoritas Jasa Keuangan merupakan kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

5. Piutang PNBP pada Bagian Anggaran Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp105.238.735.290.025 dan Rp105.603.907.467.107, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Piutang pada UAPBUN TK DJPBN	132.742.498.288	141.962.481.007
Piutang Migas	16.131.433.244.963	16.483.140.763.818
Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina dan Piutang Lelang Gratifikasi	1.176.734.112.748	1.181.128.417.689
Piutang Aset BLBI dan Aset KKKS	87.797.825.434.026	87.797.675.804.593
Jumlah	105.238.735.290.025	105.603.907.467.107

- a. Piutang pada UAPBUN TK DJPBN sebesar Rp132.742.498.288, antara lain terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	Saldo
Pendapatan atas pelaksanaan <i>Treasury Notional Pooling</i> bulan Desember 2017	255.006.813
Piutang kepada PT Taspen (Persero) berupa kelebihan pencairan dana pensiun bulan Desember 2017	10.222.318.458
Piutang PT Taspen (Persero) berupa Kelebihan/Keterlanjuran Bayar 2017	6.575.294.759
Piutang kepada PT Taspen (Persero) berupa saldo uang pensiun 2017	24.110.640.612
Piutang kepada PT Taspen (Persero) piutang jasa giro 2017	1.924.109.915
Piutang kepada PT Asabri (Persero) piutang jasa giro 2017	206.159.388
Piutang pada PT Asabri (Persero) atas ketelanjuran bayar kepada penerima pensiun	1.639.584.418
Piutang pada PT Asabri (Persero) berupa saldo uang pensiun dan retur Desember 2017	2.760.991.400
Piutang pada PT Asabri (Persero) berupa kelebihan non Dapem 2017	34.526.821.617
Piutang pada PT Asabri (Persero) berupa saldo uang pensiun 2017	36.014.474.400
Piutang PT Taspen (Persero) berupa kelebihan pembayaran kontribusi pensiun eks Kemenhub Triwulan IV 2017 pada PT Kereta Api Indonesia	14.507.096.508
Jumlah	132.742.498.288

- b. Piutang Migas merupakan piutang PNBP Migas 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp16.131.433.244.963 dan Rp16.483.140.763.818 merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas pada UAPBUN TK DJA. Piutang migas terdiri dari piutang minyak bumi, gas bumi dan migas lainnya dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Hasil Penjualan Minyak	9.918.983.786.794	7.342.649.820.181
Hasil Penjualan Gas	4.210.019.459.533	3.830.175.981.664
<i>Overlifting</i> KKKS	1.548.862.123.895	4.814.223.552.671
PNBP Migas Lainnya	453.567.874.741	496.091.409.302
Jumlah	16.131.433.244.963	16.483.140.763.818

Saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.131.433.244.963 adalah lebih rendah Rp351.707.518.855 dari posisi per 31 Desember 2016. Dari total saldo piutang PNBP Migas Jangka Pendek per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.131.433.244.963 tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan sebagai berikut.

Dari jumlah piutang PNBP migas jangka pendek sebesar Rp16.131.433.244.963 tersebut, di dalamnya juga masih termasuk piutang PNBP Migas yang masih *dispute* yang disebabkan adanya perbedaan pendapat antara SKK Migas dengan KKKS

ataupun antara KKKS dengan buyers, yaitu piutang yang berasal dari transaksi *overlifting* KKKS CNOOC SES Ltd. Tahun 2015 sebesar US\$887,672 dan *overlifting* KKKS Tahun 2016 sebesar US\$12,197,508, yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman kontraktual PSC yang terkait dengan klausula yang berkenaan dengan besaran kewajiban KKKS atas Domestic Market Obligation (DMO), yang berdampak pada perbedaan perhitungan bagi hasil atas over/under lifting tahun 2015 dan 2016 antara SKK Migas dan KKKS CNOOC SES Ltd. Untuk tahun 2015, menurut perhitungan SKK Migas, KKKS CNOOC SES Ltd. memiliki *overlifting* minyak sebesar USD887,672, namun menurut perhitungan KKKS CNOOC SES Ltd. Pemerintah malah dianggap memiliki kewajiban atas *underlifting* KKKS tahun 2015 sebesar USD27,571,054. Sementara itu untuk tahun 2016, menurut perhitungan SKK Migas KKKS CNOOC SES Ltd. memiliki *overlifting* sebesar USD12,197,508, namun menurut KKKS CNOOC SES Ltd. *overlifting*-nya hanya sebesar USD1,518,247.

Dalam nilai saldo piutang tersebut sebesar USD99.940.099 atau setara dengan Rp1.353.988.459.029 juga masih merupakan nilai piutang yang bersifat estimasi, yaitu atas piutang *overlifting* KKKS tahun 2017 yang disampaikan oleh SKK Migas. Dari total nilai estimasi piutang *overlifting* KKKS tersebut, sebagian merupakan *overlifting* KKKS yang penyelesaiannya diselesaikan melalui mekanisme cargo settlement, yaitu dari KKKS BP Berau Ltd. sebesar USD39,093,008. Nilai estimasi piutang *overlifting* yang disampaikan oleh SKK Migas tersebut adalah berdasarkan cut off hasil evaluasi dan pembahasan antara SKK Migas dan KKKS per 11 April 2018. Dimana, dari total 98 KKKS yang telah menyampaikan Financial Quarterly Report kepada SKK Migas, baru 32 KKKS yang masuk proses evaluasi dan pembahasan. Selanjutnya, dari 32 KKKS tersebut baru 5 KKKS yang telah memperoleh nilai over/underlifting secara final, dengan total nilai net *overlifting* KKKS sebesar USD6,310,843. Keseluruhan nilai final over/underlifting tahun 2017 baru dapat diperoleh sekitar akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 2018.

- c. Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina dan Piutang Lelang Gratifikasi sebesar Rp1.176.734.112.748, terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Piutang TKD	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1.	Sewa BMN eks Pertamina yg digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	1.176.715.352.919	1.181.128.417.689
2.	Piutang Bukan Pajak Aset Lain-lain yang timbul dari transaksi lelang	18.759.829	-
Jumlah		1.176.734.112.748	1.181.128.417.689

Perhitungan Piutang PNBPD didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKK00000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa equipment, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS). Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338

tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003. Oleh karena itu, maka tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina adalah sebesar Rp6.630.929.353.338: 384 bulan = Rp17.268.045.191 per bulan.

Perhitungan Piutang PNBPN untuk sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP hingga Tahun 2017 sebesar Rp1.176.715.352.919, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Mutasi Piutang PNBPN	Nilai (Rp)
Saldo 1 Januari 2017	1.181.128.417.689
Mutasi Tambah:	
Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP selama Tahun Buku 2017	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	
Pembayaran Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP	(207.216.542.292)
Transfer piutang sewa fasilitas Arun oleh PHE (1 Okt – 31 Des 15) ke LMAN (BA 015)	(130.900.000)
Koreksi Pencatatan	(4.282.164.770)
Saldo 31 Desember 2017	1.176.715.352.919

- d. Piutang Aset BLBI dan KKKS per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp87.797.825.434.026 dan Rp87.797.675.804.593, dengan rincian sebagai berikut

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Aset kredit eks BPPN	68.570.198.091.260	68.388.414.083.140
Aset kredit eks Kelolaan PT PPA	8.188.857.769.778	8.170.973.041.845
Aset Kredit Yang Diserahkan Kelolaan Kepada PT PPA	873.811.488.440	910.452.390.331
Piutang Bank Dalam Likuidasi (BDL)	10.132.339.475.545	10.257.946.470.807
Piutang Pada PT PPA	12.721.729.178	50.626.707.647
Piutang Bukan Pajak yang timbul dari Pemberian BLBI	633.769.000	
Aset KKKS	19.263.110.823	19.263.110.823
Jumlah*	87.797.825.434.024	87.797.675.804.593

^{*)} selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp2 karena pembulatan

- 1) Aset kredit eks BPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp68.570.198.091.260 dan Rp68.388.414.083.140. Perubahan nilai aset kredit eks BPPN disebabkan adanya penyerahan pengurusan piutang negara, pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur/obligor, koreksi besaran piutang negara, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, serta pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Rincian Aset kredit eks BPPN terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Aset Kredit yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya Kepada PUPN (telah tahap PB/PJPN)	17.243.322.303.288	18.695.268.744.758
Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	23.586.482.694.981	23.596.898.822.480
Aset Kredit <i>Asset Transfer Kit</i> (ATK) yang Masih dikelola Kementerian Keuangan (DJKN)	25.128.605.191.177	23.471.068.347.196
Aset Kredit ATK Lainnya	2.611.787.901.814	2.625.178.168.706
Jumlah	68.570.198.091.260	68.388.414.083.140

- 2) Piutang pada BA 999.99 merupakan Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA. Aset kredit eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.188.857.769.778 dan Rp8.170.973.041.845. Perubahan nilai aset kredit eks Kelolaan PT PPA disebabkan adanya pembayaran dan/atau penyelesaian piutang oleh para debitur, penyesuaian kenaikan/penurunan nilai kurs mata uang asing, dan pengkategorian piutang menjadi Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Rincian Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Aset Kredit yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negaranya Kepada PUPN	3.919.833.561.326	3.909.265.229.696
Aset Kredit yang masih dikelola Kementerian Keuangan (DJKN)	4.269.024.208.453	4.261.707.812.149
Jumlah	8.188.857.769.779	8.170.973.041.845

¹ selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp1 karena pembulatan

Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang masih dikelola oleh DJKN sebesar Rp2.736.829.806.146 belum dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN dikarenakan masih dalam tahap restrukturisasi utang dan penambahan aset kredit pada tahun 2014 sebesar Rp1.507.625.063.249 berasal dari tagihan kepada Group Texmaco yang dikembalikan oleh PT PPA (Persero) dikarenakan adanya perkara hukum di lembaga peradilan sehingga tidak termasuk katagori *free and clear*. Selain itu, terdapat juga penambahan 5 debitur sesuai laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2013 yang termasuk dalam aset kredit yang dikembalikan oleh PT PPA (persero) kepada Menteri Keuangan sebesar Rp24.569.339.058.

- 3) Piutang Lain-Lain aset kredit yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) per 31 Desember 2017 sebesar Rp873.811.488.440 sedangkan Per 31 Desember 2016 sebesar Rp910.452.420.331. Nilai sebesar Rp873.811.488.440 berasal dari saldo nilai aset kredit eks BPPN yang diserahkan kepada PT PPA (persero) dikurangi dengan hasil pengelolaan aset yang telah diperoleh PT PPA (persero) selama periode pelaporan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2017, nilai aset kredit yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) didasarkan pada nilai aset yang tercantum dalam perjanjian serah kelola antara Kementerian Keuangan dengan PT PPA (Persero) tanggal 23 Agustus 2017. Aset kredit yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) adalah aset kredit eks BPPN yang tidak terkait dengan perkara di lembaga peradilan (*free and clear*) dan diserahkan kepada PT PPA (Persero) berdasarkan perjanjian pengelolaan aset antara Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Kekayaan Negara selaku pemegang kuasa Menteri Keuangan dengan PT PPA (Persero). Penurunan nilai Aset Kredit eks BPPN Yang Diserahkan kepada PT PPA (Persero) dikarenakan adanya pembayaran pokok piutang yang berada pada PT Tuban Petro sebesar Rp36.640.901.891. Rincian Piutang Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA adalah sebagai berikut.

Debitur	31 Desember 2017 (Audited)		31 Desember 2016 (Audited)	
	Nilai Aset (dalam Rp)	Nilai Aset (dalam USD)	Nilai Aset (dalam Rp)	Nilai Aset (dalam USD)
PT Tuban Petrochemical Industries	873.811.488.440		910.452.390.331	-

- 4) Saldo Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.132.339.475.545 merupakan Piutang eks BDL terdiri dari 15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan dan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan.

15 (lima belas) BDL Eks Dana Talangan terdiri dari:

-) 13 (tiga belas) Bank Dalam Likuidasi telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
-) 1 (satu) BDL yaitu PT Bank Umum Majapahit Jaya telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham pembubaran Tim Likuidasi;
-) 1 (satu) BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta, namun PT Bank Jakarta pada tahun 2012 telah melunasi kewajibannya.

Sedangkan 5 (lima) BDL Eks Dana Penjaminan sebagai berikut.

-) 4 (empat) BDL yaitu Bank Prasadha Utama, PT Bank Asiatic, PT Bank Global Internasional, dan PT Bank Dagang Bali telah melaksanakan penandatanganan BAST Aset dari Tim Likuidasi (TL) kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan;
-) 1 (satu) BDL, yaitu PT Bank Ratu, tidak melakukan penandatanganan BAST Aset, namun pada semester II tahun 2017 telah melunasi kewajibannya.

Saldo Piutang eks BDL per 31 Desember 2017 sebesar Rp10.132.339.475.545 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp10.257.946.470.807. Penurunan nilai Piutang eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan setoran kas dari Tim Likuidasi PT Bank Dagang Bali dan PT Bank Ratu.

- 5) Saldo Piutang Pada PT PPA per 31 Desember 2017 sebesar Rp12.721.729.178. Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN berupa hasil pengelolaan aset yang telah diperoleh dalam tahun anggaran namun belum disetorkan ke kas umum negara
- 6) Piutang bukan pajak pada neraca aset yang timbul dari pemberian BLBI per 31 Desember 2017 sebesar Rp633.769.000, terdiri dari:
- a. Sewa Indosat 2014-2019 sampai awal tahun sebesar Rp264.074.000;
 - b. Sewa Telkomsel 2014-2019 tahun berjalan sebesar Rp109.272.000;
 - c. Sewa Telkomsel 2015-2020 sampai awal tahun sebesar Rp168.509.000;
 - d. Sewa Telkomsel 2015-2020 tahun berjalan sebesar Rp91.914.000.
- 7) Piutang lain-lain Satker DJKN Pengelola Aset KKKS sebesar Rp19.263.110.823 merupakan piutang piutang pada Satker BUN-TK yang berasal dari KKKS.

D.2.15. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar
TPA Rp9,68
miliar*

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp9.689.533.832 dan Rp11.333.345.828 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan sebesar

Rp7.815.376.206 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp9.689.533.832 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.874.157.626. Saldo Bagian Lancar TPA tersebut berada di Kementerian PUPERA sebesar Rp7.824.348.084, Kementerian KUKM sebesar Rp1.220.552.288, dan LPP RRI sebesar Rp644.633.460.

D.2.16. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

*Bagian Lancar
Tagihan TGR
Rp134,43
miliar*

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp134.439.614.178 dan Rp144.168.549.546 merupakan saldo Tagihan TGR pada K/L yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp45.827.081.186 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp134.439.614.178 dikurangi penyisihan sebesar Rp88.612.532.992.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing K/L dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

D.2.17. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

*Bagian Lancar
Penerusan
Pinjaman
Rp22,59 triliun*

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp22.591.650.468.443 dan Rp7.289.654.233.165. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (audited)
Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	12.712.303.683.642	3.628.194.074.880
Piutang Denda Penerusan Pinjaman	796.105.289.184	924.223.316.645
Piutang Bunga Penerusan Pinjaman Penyesuaian	4.387.248.377.574	320.438.739.133
Piutang Jasa Bank Penerusan Pinjaman	957.372.476.610	1.956.242.102.508
Piutang Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman	3.365.746.890.439	-
Piutang Bunga AkruaL Penerusan Pinjaman	372.873.750.994	-
Piutang Lancar Kredit	-	460.556.000.000
Jumlah*	22.591.650.468.443	7.289.654.233.166

*selisih tahun 2016 sebesar Rp1 karena pembulatan

Untuk tahun 2017 Piutang lancar Kredit Pemerintah (KUKM) dipisahkan menjadi akun tersendiri.

D.2.18. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya

*Bagian Lancar
Piutang Jangka
Panjang
Lainnya Rp1,08
triliun*

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.086.601.779.631 dan Rp0 merupakan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada BA 999.99. Nilai piutang sebesar Rp1.086.601.779.631 adalah bagian lancar piutang jangka panjang PT Minarak Lapindo Jaya di akhir Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp573.849.480.773 ditambah bunga yang timbul hingga tahun 2017 sebesar Rp37.122.338.378 dan denda kelambatan pengembalian pinjaman sebesar Rp282.284.448.089 dan piutang jangka panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang jatuh tempo pada Tahun 2017 sebesar Rp193.345.512.391.

D.2.19. Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp6.429.911.707.728 dan Rp5.321.939.368.267. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar

*Piutang dari
Kegiatan BLU
Rp6,42 triliun*

Rp4.407.275.975.249 berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.429.911.707.728 dikurangi penyisihan sebesar Rp2.022.635.732.479. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari Piutang dari Kegiatan Operasional BLU sebesar Rp5.594.480.950.819 dan Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU sebesar Rp835.430.756.909.

Piutang dari Kegiatan Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	686.877.856.732	685.929.908.769
2. BLU di Kementerian Pertahanan	110.768.287.162	0
3. BLU di Kementerian Keuangan	49.824.275.493	3.693.666.732
4. BLU di Kementerian Pertanian	2.355.596.525	5.874.082.000
5. BLU di Kementerian Perindustrian	2.761.119.950	2.987.978.450
6. BLU di Kementerian ESDM	23.787.415.450	17.566.724.845
7. BLU di Kementerian Perhubungan	48.815.532.767	40.783.861.098
8. BLU di Kementerian Kesehatan	2.366.739.177.023	2.009.415.810.944
9. BLU di Kementerian Agama	35.446.573.467	18.975.977.875
10. BLU di Kementerian PU dan PERA	1.160.652.888.495	775.694.434.782
11. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	290.849.520.158	427.162.821.878
12. BLU di Kementerian KUKM	4.312.144.444	849.965.186
13. BLU di Kementerian Kominfo	228.029.375.073	265.728.536.138
14. BLU di Kepolisian RI	204.687.487.913	95.076.143.275
15. BLU di BPPT	10.074.801.800	11.952.345.481
16. BLU di LAPAN	-	586.960.320
17. BLU di BPKPBPB Batam	368.498.898.367	369.477.744.235
Jumlah Nilai Bruto	5.594.480.950.819	4.731.756.962.008
Penyisihan	(1.998.515.231.060)	(1.489.089.367.180)
Jumlah Nilai Bersih	3.595.965.719.759	3.242.667.594.828

Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	612.892.012	11.026.815.451
2. BLU di Kementerian Keuangan	467.335.113	533.335.113
3. BLU di Kementerian ESDM	22.916.667	-
4. BLU di Kementerian Perhubungan	1.348.210.637	382.812.869
5. BLU di Kementerian Kesehatan	13.165.815.819	4.092.738.621
6. BLU di Kementerian Agama	4.809.756.024	2.845.061.482
7. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	39.433.675.371	22.266.368.229
8. BLU di Kementerian Kominfo	768.068.505.266	549.004.251.354
9. BLU di Kepolisian RI	1.650.000	6.950.000
10. BLU di Kementerian Pemuda dan Olah Raga	7.500.000.000	-
11. BLU di BPPT	-	24.073.140
Jumlah Nilai Bruto	835.430.756.909	590.182.406.259
Penyisihan	(24.120.501.419)	(18.033.547.080)
Jumlah Nilai Bersih	811.310.255.490	572.148.859.179

D.2.20. Piutang PFK

*Piutang PFK
Rp4,00 juta*

Jumlah Piutang PFK per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.001.304 dan Rp5.956.960. Piutang PFK merupakan Piutang PFK Beras Bulog.

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya Rp776,23 miliar

D.2.21. Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya

Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp776.236.492.092 dan Rp573.849.480.773. Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 terdiri dari Piutang Denda Penyaluran KUMK sebesar Rp924.492.092 dan Piutang Lancar Kredit Pemerintah (KUMK) sebesar Rp775.312.000.000.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Rp160,41 triliun

D.2.22. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp160.417.250.319.840 dan Rp185.756.595.265.767 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Piutang Pajak	31.049.525.040.498	72.741.904.616.236
2. Piutang Bukan Pajak	127.254.602.856.245	111.183.994.545.169
3. Bagian Lancar TPA	1.874.157.626	5.393.323.254
4. Bagian Lancar TP/TGR	88.612.532.992	95.888.595.944
5. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	0	222.291.270.904
6. Piutang dari Kegiatan BLU	2.022.635.732.479	1.507.122.914.260
Penyisihan Piutang	160.417.250.319.840	185.756.595.265.767

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak sebesar Rp31.049.525.040.498 merupakan penyisihan Piutang Pajak. Rincian Penyisihan Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 8**.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak sebesar Rp127.254.602.856.245 dapat dilihat pada **Lampiran 9**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TPA sebesar Rp1.874.157.626 merupakan penyisihan TPA pada Kementerian PUPERA, Kementerian Koperasi dan UKM dan Lembaga Penyiaran Publik RRI.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp88.612.532.992 dapat dilihat pada **Lampiran 12**.
5. Tidak ada Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
6. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp2.022.635.732.479 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	67.153.462.624	60.925.745.245
2. BLU di kementerian Pertahanan	11.909.016.278	0
3. BLU di Kementerian Keuangan	1.403.937.845	629.856.697
4. BLU Kementerian Pertanian	11.777.983	29.370.410
5. BLU di Kementerian Perindustrian	254.660.746	1.064.280.749
6. BLU di Kementerian ESDM	13.374.883.794	10.744.860.067

7. BLU di Kementerian Perhubungan	2.644.268.267	719.218.723
8. BLU di Kementerian Kesehatan	406.228.132.538	360.151.024.781
9. BLU di Kementerian Agama	8.504.979.603	3.782.120.317
10. BLU di Kementerian PU dan PERA	1.023.971.470.822	637.429.731.497
11. BLU di Kementerian Ristek dan Dikti	166.097.728.693	196.388.336.484
12. BLU di Kementerian KUKM	3.635.415.465	113.696.051
13. BLU di kementerian Kominfo	234.658.847.884	175.506.462.935
14. BLU di Kepolisian RI	1.641.141.509	1.105.341.132
15. BLU di BPPT	91.936.509	178.224.021
16. BLU di LAPAN	-	2.934.802
17. BLU di Kementerian Pemuda dan Olah Raga	37.500.000	
18. BLU di BPKPBPB Batam	81.016.571.919	58.351.710.349
Jumlah	2.022.635.732.479	1.507.122.914.260

D.2.23. Persediaan

*Persediaan
Rp84,30 triliun*

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp84.301.758.170.225 dan Rp80.306.059.604.541 merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca K/L dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Persediaan di K/L	82.262.262.310.961	80.120.283.362.776
Persediaan di BUN	2.039.495.859.264	185.776.241.765
Jumlah	84.301.758.170.225	80.306.059.604.541

Persediaan di K/L per 31 Desember 2017 terbesar terdapat pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp48.618.947.782.931, Kementerian Perhubungan sebesar Rp7.022.058.287.675, POLRI sebesar Rp4.980.541.918.826, Kementerian PU dan PERA sebesar Rp4.398.225.644.611, Kementerian Kesehatan sebesar Rp3.443.123.902.754, Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp1.802.435.378.484, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.428.258.639.787, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp851.505.706.652, Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp842.295.854.659, dan BKKBN sebesar Rp639.967.637.712. Rincian Persediaan di K/L dan BLU dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

Persediaan di BUN per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.039.495.859.264 adalah Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN – Belanja Lainnya (BA BUN - 999.08), dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
015	Kementerian Keuangan	2.030.473.182.609	158.438.693.025
018	Kementerian Pertanian	4.578.322.340	18.839.007.277
103	BNPB	0	2.724.463.400
	Otoritas Jasa Keuangan	1.534.803.820	1.625.402.930
	SKK Migas	2.909.550.495	4.148.675.133
Total		2.039.495.859.264	185.776.241.765

- Persediaan pada Kementerian Keuangan merupakan persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar Rp2.030.473.182.609 atau setara 232.803.954 kg. HPB CBP ditetapkan sebesar Rp8.721 per kg. Laporan rekapitulasi mutasi CBP adalah sebagai berikut.

(dalam kilogram)

No	Uraian	Mutasi Persediaan		Saldo
		Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	
1.	Saldo Awal			17.872.385
2.	Penambahan Stok 2015	286.664.373		304.536.758
3.	Penggunaan Operasi Pasar		58.101.584	246.435.174
4.	Penggunaan Bencana Alam		8.631.220	237.803.954
5.	Bantuan Internasional		5.000.000	232.803.954

- b. Persediaan pada Kementerian Pertanian adalah persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga berupa Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp4.578.322.340 merupakan Cadangan Benih Nasional (CBN) di Gudang BUMN yang dicadangkan sebagai pemulihan pertanaman yang rusak/fuso akibat bencana alam atau serangan OPT Komoditas benih yang dicadangkan berupa Padi Hibrida, Padi Non Hibrida, Kedelai, Jagung Hibrida dan Jagung Komposit. Hasil *stock opname* persediaan di gudang (pencatatan persediaan manual) sebagai berikut.

No	Tahun	31 Desember 2017 (Audited)		31 Desember 2016 (Audited)	
		Kg	Nilai (Rp)	Kg	Nilai (Rp)
1.	Padi Non Hibrida	672.788	4.578.322.340	873.869	5.946.678.545
2.	Padi Hibrida	0	0	0	0
3.	Jagung Komposit	0	0	23.490	203.940.180
4.	Jagung Hibrida	0	0	387.148	12.688.388.552
5.	Kedelai	0	0	0	0
Jumlah		672.788	4.578.322.340	1.284.507	18.839.007.277

- c. Persediaan pada BNPB sebesar Rp2.724.463.400 telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Simeuleue dengan Nomor BAST 02/BNPB/11/2017 tanggal 12 Juni 2017 sehingga saldo persediaan menjadi nihil (0).

- d. Persediaan pada OJK sebesar Rp1.534.803.820 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Barang Konsumsi	1.532.242.195	1.622.670.530
Barang untuk Pemeliharaan	2.561.625	2.732.400
Jumlah	1.534.803.820	1.625.402.930

- e. Persediaan pada SKK Migas sebesar Rp2.909.550.495 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Barang Konsumsi	2.883.214.405	4.110.360.331
Barang untuk Pemeliharaan	26.336.090	38.314.802
Jumlah	2.909.550.495	4.148.675.133

Dana Bergulir
Rp34,75 triliun

D.2.24. Dana Bergulir

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp34.757.069.042.734 dan Rp33.669.878.397.728 merupakan dana yang dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, dan lain-lain yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	473.887.356.891	251.365.733.833
2. Kementerian Lingkungan Hidup	19.300.021.582	21.397.837.886
3. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUKM	3.445.531.671.700	4.111.023.032.799
4. BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	25.625.590.772.984	24.547.907.357.025
5. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	4.616.134.219.577	4.738.184.436.185
6. BLU Pusat Investasi Pemerintah	565.500.000.000	-
7. BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	11.125.000.000	-
Jumlah	34.757.069.042.734	33.669.878.397.728

Dana bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp473.887.356.891 dan Rp251.365.733.833 merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. Perubahan nilai investasi jangka panjang non permanen/dana bergulir disebabkan oleh penyaluran dana bergulir kepada masyarakat selama tahun 2017.

Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp19.300.021.582 dan Rp21.397.837.886 merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS).

Dana bergulir pada BLU LPDB KUKM per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp3.445.531.671.700 dan Rp4.111.023.032.799. Dana bergulir yang dikelola oleh LPDB KUKM ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir.

Perubahan dana bergulir yang dikelola oleh BLU LPDB KUKM disebabkan oleh:

1. Adanya pengembalian pokok dan penyaluran dana bergulir yang dilakukan oleh BLU LPDB KUKM; dan
2. Pengalihan dana bergulir yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM menjadi dana bergulir BUN Investasi Pemerintah.

Dana Bergulir pada BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp25.625.590.772.984 dan Rp24.547.907.357.025 merupakan mekanisme bantuan pembiayaan perumahan melalui penyediaan dana murah jangka panjang yang berasal dari APBN atau sumber dana jangka panjang lainnya yang dicampurkan dengan dana bank penerbit kredit untuk pembiayaan perumahan dengan metode *blended financing*.

Dana Bergulir pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp4.616.134.219.577 dan

Rp4.738.184.436.185 merupakan piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BLU BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai.

Dana Bergulir pada BLU Pusat Investasi Pemerintah per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp565.500.000.000 dan Rp0

Dana Bergulir pada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp11.125.000.000 dan Rp0.

*Dana Bergulir
Diragukan
Tertagih minus
Rp823,74
miliar*

D.2.25. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp823.745.637.784 dan minus Rp662.475.190.133 merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir yang dikelola oleh K/L maupun BLU K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUKM	793.779.058.004	635.667.325.290
2. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	10.666.558.198	5.410.026.957
3. Kementerian Lingkungan Hidup	19.300.021.582	21.397.837.886
Jumlah	823.745.637.784	662.475.190.133

D.2.26. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.132.872.181 dan Rp151.813.406.601 merupakan Investasi Non Permanen pada BLU Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari BA 999.03, dengan rincian sebagai berikut.

*Investasi Non
Permanen
Lainnya Rp4,13
miliar*

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
BA 999.03:		
Kementerian Perindustrian	4.132.872.181	4.147.135.601
Lembaga Manajemen Aset Negara	0	147.666.271.000
Jumlah	4.132.872.181	151.813.406.601

Investasi non permanen lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.132.872.181 merupakan investasi jangka panjang non permanen lainnya pada BA BUN 999.03 yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil. Penurunan terjadi akibat adanya penyetoran pokok investasi oleh debitur yang telah menerima bantuan pinjaman.

*Cadangan
Penurunan Nilai
Investasi Non
Permanen
Lainnya Rp4,13
miliar*

D.2.27. Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya

Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.132.872.181 dan Rp4.281.153.081 merupakan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya pada BA BUN 999.03, yang berasal dari pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya pada investasi non permanen SKIM 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian dan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara. Penurunan penyisihan pada investasi non permanen SKIM 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian disebabkan adanya pengembalian atas piutang yang telah disisihkan, lebih lanjut dana tersebut tidak digulirkan kembali sehingga tidak terjadi peningkatan NPL.

*Investasi
Permanen PMN
Rp2.133,75
triliun*

D.2.28. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.133.750.339.987.427 dan Rp2.027.471.536.964.905 yang meliputi Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero, Perum, Luar Negeri, dan pada Badan Usaha Lainnya. Investasi jangka panjang permanen PMN meliputi:

(dalam rupiah)

PMN	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Persero	2.053.384.644.525.322	1.956.130.405.125.370
2. Perum	36.931.206.575.871	34.403.325.651.510
3. Lembaga Keuangan Internasional	17.951.256.260.707	15.349.580.678.752
4. Badan Usaha Lainnya	25.483.232.625.529	21.588.225.509.270
Jumlah*	2.133.750.339.987.429	2.027.471.536.964.902

**) selisih sebesar Rp2 dan Rp3 karena pembulatan*

*PMN pada
Persero*

1. PMN pada Persero per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.053.384.644.525.322 dan Rp1.956.130.405.125.370 merupakan kepemilikan Negara pada BUMN yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah 51 persen, sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas. PMN pada Persero dikelola oleh 2 pihak yakni:

- a. PMN Pada Persero Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.998.472.944.288.818 dan Rp1.907.604.503.439.200. Penyertaan Modal Negara pada Persero yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah 51% sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

- b. PMN pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan

PMN pada BUMN Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp54.911.700.236.504 dan Rp48.525.901.686.170. Investasi ini merupakan investasi permanen penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau Lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

PMN pada BUMN Persero yang masih terdapat di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multigriya Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, PT Geo Dipa Energi, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Rincian PMN pada BUMN di bawah Pembinaan Kementerian Keuangan dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

PMN pada Perum

- PMN pada Perum per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp36.931.206.575.871 dan Rp34.403.325.651.510 merupakan kepemilikan Negara pada perusahaan BUMN yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan.

Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Perum dinilai PMN pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. Nilai investasi tersebut sudah memperhitungkan penihilan ekuitas negatif terhadap Perum PPD.

BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh Kementerian BUMN. Per 31 Desember 2017, BUMN dengan bentuk Perum berjumlah 14 BUMN.

Penyertaan pada Lembaga Internasional

- Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp17.951.256.260.707 dan Rp15.349.580.678.752.

Kenaikan PMN ini disebabkan oleh perubahan kurs dan bertambahnya nilai PMN pada Organisasi Internasional-LKI.

Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

PMN pada Badan Usaha Lainnya

- Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp25.483.232.625.529 dan Rp21.588.225.509.270 terdiri dari:

(dalam rupiah)		
URAIAN	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	21.268.011.000.000	17.440.565.000.000
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara	525.265.031	505.786.916
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri	2.534.744.360.498	2.481.090.722.354
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Luar Negeri	1.679.952.000.000	1.666.064.000.000
JUMLAH	25.483.232.625.529	21.588.225.509.270

Rincian PMN pada Badan Usaha Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 17**.

D.2.29. Investasi Permanen BLU

Investasi Permanen BLU Rp8,32 miliar

Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp8.325.008.679 dan Rp8.160.316.474. Investasi Permanen BLU sebesar Rp8.325.008.679 merupakan penyertaan modal oleh BLU yang terdiri dari:

- Penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 dengan porsi 10 persen; dan
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara dengan nilai investasi permanen sebesar Rp1.687.814.179 yang merupakan penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani.

*Investasi
Permanen
Lainnya
Rp436,35
triliun*

D.2.30. Investasi Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp436.354.324.393.637 dan Rp351.189.666.923.549 merupakan nilai penyertaan modal negara pada PMN Lain-lain, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan dengan jumlah:

(dalam rupiah)

PMN	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. PMN Lain-lain	44.806.336.620.637	36.912.651.163.549
2. Bank Indonesia	303.083.468.000.000	241.725.372.000.000
3. Lembaga Penjamin Simpanan	87.464.519.773.000	72.551.643.760.000
Jumlah	435.354.324.393.637	351.189.666.923.549

1. PMN Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp44.806.336.620.637 dan Rp36.912.651.163.549 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. Institut Pertanian Bogor	1.510.825.849.228	1.385.818.220.786
b. Universitas Airlangga	2.057.508.228.351	1.928.642.689.204
c. Institut Teknologi Bandung	2.173.453.041.763	1.970.462.187.133
d. Universitas Indonesia	4.173.262.381.142	3.893.304.625.978
e. Universitas Gajah Mada	3.656.484.520.737	3.490.236.393.601
f. Universitas Pendidikan Indonesia	779.700.402.216	739.128.612.613
g. Universitas Sumatera Utara	1.981.325.939.928	2.077.629.207.466
h. Universitas Padjajaran	1.213.663.368.482	0
i. Universitas Diponegoro	1.901.765.280.198	0
j. Universitas Hasanuddin	1.954.643.450.248	0
k. Institut Teknologi Sepuluh Nopember	968.809.319.343	0
l. BP MIGAS	352.405.757.084	352.405.757.084
m. BPJS Kesehatan	10.161.365.113.684	10.344.737.255.279
n. BPJS Ketenagakerjaan	11.921.123.968.233	10.730.286.214.405
Jumlah	44.806.336.620.637	36.912.651.163.549

Perguruan Tinggi eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 11 (sebelas) Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai PTN BH dan kekayaannya ditetapkan sebagai kekayaan negara dipisahkan yang merupakan bagian dari Investasi Pemerintah. Mutasi kenaikan nilai PTN BH disebabkan Pendapatan PTNBH (Operasional, Bantuan Dana APBN, Dana BPPTN, Hibah/Sumbangan dan Lain-lain) lebih besar dibandingkan Beban Aktivitas PTNBH.

Terkait BP Migas, sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pembubaran BPMIGAS, pelaporan kekayaan/ekuitas bersih BPMIGAS/SKK Migas dilakukan oleh Sistem Akuntansi Badan Lainnya, sehingga nilai ekuitas bersih BPMIGAS yang dicatat pada Laporan Keuangan SAIP merupakan nilai ekuitas per tanggal 13 November 2012 setelah audit.

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Mutasi kenaikan investasi pada BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan nilai pengeluaran pembiayaan – PMN/Dana Investasi kepada BPJS Kesehatan karena pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan suntikan dana pemerintah kepada aset DJS Kesehatan yang bernilai negatif dan langsung disalurkan oleh BPJS Kesehatan kepada Aset DJS Kesehatan melalui mekanisme hibah dari BPJS Kesehatan ke DJS Kesehatan.

2. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp303.083.468.000.000 dan Rp241.725.372.000.000 Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan.
3. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp87.464.519.773.000 dan Rp72.551.643.760.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan.

Ikhtisar laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

D.2.31. Aset Tetap

*Aset Tetap
Rp2.687,01
triliun*

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.687.012.386.941.310 dan Rp2.477.013.158.358.622. Nilai bersih Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.034.803.553.929.061, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.687.012.386.941.310 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp652.208.833.012.249.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Tanah	1.037.757.720.329.050	1.014.770.924.509.309
Peralatan dan Mesin	519.896.090.337.204	429.336.179.594.261
Gedung dan Bangunan	275.152.781.045.431	248.289.310.177.760
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	681.081.175.258.573	606.677.449.768.757
Aset Tetap Lainnya	51.165.291.629.744	58.830.898.663.776
Konstruksi Dalam Pengerjaan	121.959.328.341.308	119.108.395.644.759
Aset Tetap sebelum Penyusutan	2.687.012.386.941.310	2.477.013.158.358.622
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(652.208.833.012.249)	(555.218.820.789.172)
Jumlah Aset Tetap	2.034.803.553.929.061	1.921.794.337.569.450

Nilai Aset Tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp209.999.228.582.688 atau 8,47 persen dari nilai per 31 Desember 2016, sedangkan nilai buku Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp113.009.216.359.611 atau 5,88 persen. Kenaikan nilai aset tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Belanja Modal.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada **Lampiran 19**.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp652,20
triliun*

D.2.32. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp652.208.833.012.249 dan Rp555.218.820.789.172 merupakan nilai Penyusutan Aset Tetap berdasarkan neraca K/L dan Neraca BUN. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	287.580.018.262.056	248.619.300.346.552
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	56.276.139.037.825	50.421.051.211.110
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	303.091.656.042.603	251.559.317.522.765
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.261.019.669.765	4.619.151.708.745
Jumlah	652.208.833.012.249	555.218.820.789.172

K/L melaksanakan penyusutan mulai Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah sebagaimana diubah untuk kedua kali dengan PMK No.247/PMK.06/2014, penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan dilaksanakan dengan menggunakan metode garis lurus. Penentuan masa manfaat Aset Tetap berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

D.2.33. Piutang Jangka Panjang

*Piutang Jangka
Panjang
Rp50,90 triliun*

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp50.906.493.098.191 dan Rp66.020.849.376.910. Nilai bersih Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp47.810.448.151.143 yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp50.906.493.098.191 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.096.044.947.048.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	104.817.554.622	117.736.454.668
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	261.894.714.759	177.308.644.926
3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	47.184.454.676.040	60.964.713.477.332
4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah	775.312.000.000	1.842.224.000.000
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.580.014.152.770	2.918.866.799.984
Jumlah	50.906.493.098.191	66.020.849.376.910
Penyisihan	(3.096.044.947.048)	(18.891.969.710.244)
Nilai Bersih	47.810.448.151.143	47.128.879.666.666

1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

*Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp104,81
miliar*

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp104.817.554.622 dan Rp117.736.454.668. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp104.293.466.849 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp104.817.554.622 dikurangi penyisihan sebesar Rp524.087.773 merupakan Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian PUPERA sebesar Rp104.773.468.561, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI

sebesar Rp44.086.061 yang berasal dari transaksi penjualan kavling tanah kepada pegawai LPP RRI.

2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

*Tagihan TGR
Rp261,89
miliar*

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp261.894.714.759 dan Rp177.308.644.926. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp40.024.055.948 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp261.894.714.759 dikurangi penyisihan sebesar Rp221.870.658.811. Rincian Tagihan TGR pada K/L dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

*Piutang Jangka
Penerusan
Pinjaman
Rp47,18 triliun*

3. Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman

Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp47.184.454.676.040 dan Rp Rp60.964.713.477.332. Nilai Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Nilai Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp46.300.173.639.206 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp47.184.454.676.040 dikurangi penyisihan sebesar Rp884.281.036.834.

*Piutang Jk
Panjang Kredit
Pemerintah
Rp775,31
miliar*

4. Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah

Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp775.312.000.000 dan Rp1.842.224.000.000. Nilai Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah merupakan total pokok pinjaman Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Nilai Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp771.435.440.000 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp775.312.000.000 dikurangi penyisihan sebesar Rp3.876.560.000.

*Piutang Jangka
Panjang
Lainnya Rp2,58
triliun*

5. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.580.014.152.770 dan Rp2.918.866.799.984. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp590.644.989.140 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.580.014.152.770 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.989.369.163.630. Berikut rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga/BA BUN	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Kementerian Hukum dan HAM	11.151.900.000	12.792.500.000
2. Kementerian Perindustrian	0	7.216.329.773
3. Kementerian ESDM	252.729.574.320	401.137.587.576
4. Kementerian Perhubungan	28.766.646.208	17.953.902.454
5. Kementerian Kesehatan	101.560.972	261.560.972
6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	37.499.960.000	49.223.363.000
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan	114.162.631.206	115.705.235.349
8. Kementerian Ristek dan Dikti	0	1.286.175.375
9. Kementerian KUKM	15.792.703.300	15.792.703.300
10. BKKBN	8.240.685.016	8.427.673.414
11. BATAN	8.314.680	0
12. LAPAN	2.633.830.161	2.633.830.161
13. BA BUN 999.99	2.108.926.346.907	2.286.435.938.610

Nilai Bruto	2.580.014.152.770	2.918.866.799.984
Penyisihan	(1.989.369.163.630)	(1.962.759.114.649)
Nilai Bersih	590.644.989.140	956.107.685.335

Penjelasan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp11.151.900.000 merupakan piutang atas sewa tanah yang belum dibayar oleh pihak ketiga, untuk masa sewa tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian ESDM sebesar Rp252.729.574.320 merupakan reklasifikasi dari uang muka pada satker unit induk pembangunan atas koreksi BPK
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp28.766.646.208 merupakan piutang macet pada Ditjen Perhubungan Laut.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp101.560.972 merupakan piutang pada Ditjen Pelayanan Kesehatan.
5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp37.499.960.000 merupakan bunga/denda Piutang HTI *Rescheduling*, pembayaran Piutang HTI *Rescheduling*, dan reklasifikasi piutang jangka pendek menjadi piutang jangka panjang.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp114.162.631.206 merupakan Piutang Pendapatan dari Kontribusi Tetap KSP Pulau Nipa pada satker Setditjen PRL.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian KUKM sebesar Rp15.792.703.300 merupakan ketidaktertagihan atas kegiatan pengadaan *lift*.
8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.240.685.016 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang.
9. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp8.314.680 merupakan pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu.
10. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebesar Rp2.633.830.161 merupakan piutang yang jatuh tempo sampai dengan tahun 2015.
11. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.99 sebesar Rp2.108.926.346.907 merupakan piutang migas yang berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) sebesar Rp1.915.580.834.517 yang tergolong dalam kategori piutang macet dan Piutang Jangka Panjang Penanggungan Lumpur Sidoarjo sebesar Rp193.345.512.390.

D.2.34. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp3.096.044.947.048 dan Rp18.891.969.710.244 terdiri dari:

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Piutang Jangka
Panjang
Rp3,09 triliun*

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	524.087.773	588.682.273
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	221.870.658.811	149.586.372.902
3. Piutang Penerusan Pinjaman	884.281.036.834	16.779.035.540.420
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya	1.989.369.163.630	1.962.759.114.649
Jumlah	3.096.044.947.048	18.891.969.710.244

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp524.087.773 merupakan Penyisihan pada Piutang Tagihan Penjualan Angsuran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp523.867.343 dan Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp220.430.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp221.870.658.811 dapat dilihat pada **Lampiran 20**.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Penerusan Pinjaman sebesar Rp884.281.036.834 merupakan Penyisihan pada Piutang Penerusan Pinjaman dan Piutang RDI.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp1.989.369.163.630 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Lainnya pada K/L dan Pengelola Bagian Anggaran sebagai berikut.

(dalam rupiah)

K/L	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Kementerian Hukum dan HAM	55.759.500	63.962.500
Kementerian Perindustrian	0	36.081.649
Kementerian ESDM	10.100.786.394	12.597.946.757
Kementerian Perhubungan	28.766.646.208	17.953.902.454
Kementerian Kesehatan	507.805	1.307.805
Kementerian Kehutanan	3.749.996.000	4.922.336.300
Kementerian Kelautan dan Perikanan	570.813.156	578.025.602
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	0	6.430.877
Kementerian Koperasi dan UKM	15.792.703.300	15.792.703.300
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	8.240.685.016	8.427.673.414
Badan Tenaga Nuklir Nasional	41.573	0
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	2.633.830.161	2.633.830.161
BA 999.99	1.919.457.394.517	1.899.744.913.830
Jumlah	1.989.369.163.630	1.962.759.114.649

**Jelajah sebesar Rp200 karena pembulatan*

D.2.35. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.155.861.083.987.356 dan Rp955.992.389.178.366. Nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp924.364.674.425.620 berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.155.861.083.987.356 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp221.423.780.525.753 dan sebesar Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Rp10.072.629.035.983. Aset Lainnya terdiri dari:

*Aset Lainnya
Rp1,15
kuadriliun*

(dalam rupiah)

Aset Lainnya	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	140.933.161.376.717	133.986.958.084.243
2. Aset Tak Berwujud	31.293.091.131.831	24.269.238.842.638
3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya	259.379.354.966.485	214.185.677.265.195
4. Dana Penjaminan	3.327.794.435.749	593.487.374
5. Dana Kelolaan BLU	45.821.116.060.256	21.032.093.463.366
6. Aset KKKS	489.508.659.091.683	416.995.629.577.966
7. Aset Eks BPPN (Tim Koordinasi)	2.574.749.283.103	2.543.920.246.320
8. Aset Lain-lain	167.431.643.860.809	128.875.351.921.271
9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	15.591.513.780.723	14.102.926.289.993
Jumlah*	1.155.861.083.987.360	955.992.389.178.366
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(221.423.780.525.753)	(177.174.396.032.052)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.072.629.035.983)	(7.295.717.966.038)
Nilai Bersih	924.364.674.425.620	771.522.275.180.276

*selisih Rp4 karena pembulatan

*Kemitraan
dengan Pihak
Ketiga Rp140,93
triliun*

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp140.933.161.376.717 dan Rp133.986.958.084.243. Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di K/L dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada K/L	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. Kementerian Perhubungan	347.594.837.654	0
b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	140.151.873.669.767	133.541.579.113.010
c. Kementerian Pariwisata	182.980.000.000	182.980.000.000
d. Kementerian Negara PPN/BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
e. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	167.065.369.296	178.751.471.233
Jumlah	140.933.161.376.717	133.986.958.084.243

- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp347.594.837.654 dan Rp0. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp347.594.837.654 merupakan aset Ditjen Perhubungan Laut yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga melalui kerja sama pemanfaatan aset oleh Satker KSOP Probolinggo berupa tanah hasil reklamasi dengan nilai Rp67.852.260.528 dan dermaga dengan nilai Rp279.742.577.126.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp140.151.873.669.767 dan Rp133.541.579.113.010. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp140.151.873.669.767 merupakan aset pada Ditjen Bina Marga yang dikelola melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) selama periode tertentu sesuai dengan perjanjian sebesar Rp139.978.567.669.767 dan aset pada Ditjen Cipta Karya sebesar Rp173.306.000.000.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp182.980.000.000 dan Rp182.980.000.000.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian Pariwisata sebesar Rp182.980.000.000 berupa tanah seluas 9.419 m² yang terletak di Jalan Merdeka Barat No. 16-19 Jakarta. Atas persetujuan Menteri Keuangan nomor 242/MK.03/1993 tanggal 23 Februari 1993 telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan (*Build, Operate, and Transfer*) Tanah dan Gedung Sapta Pesona B antara Kementerian Pariwisata dengan PT Sisindosat Lintas Buana.

- d. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp83.647.500.000 dan Rp83.647.500.000. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Kementerian PPN/BAPPENAS sebesar Rp83.647.500.000 berupa tanah untuk mendirikan gedung perkantoran (Wisma Bakrie) yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Kav. B2 berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah/*Built, Operating, dan Transfer (BOT)* bersama PT Bakrie Swasakti Utama dengan No.4300/SES/09/2004 tanggal 24 September 2004. Jangka waktu hak pengelolaan bagi PT Bakrie Swasakti Utama selama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak 01 Januari 2005 sampai 31 Desember 2029 dan setelah selesai, aset ini akan direklasifikasi menjadi Aset Tetap.
- e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp167.065.369.296 dan Rp178.751.471.233. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebesar Rp167.065.369.296 merupakan aset pada Kantor Pelabuhan Laut sebesar Rp40.121.852.086 yang dikelola melalui kerja sama dengan PT Synergy Tharada dan PT Tuah Selimangkarang dan aset pada Kantor Air dan Limbah sebesar Rp126.943.517.210 yang dikelola melalui kerja sama dengan PT Adhya Tirta Batam.

Aset Tak Berwujud Rp31,29 triliun

2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp31.293.091.131.831 dan Rp24.269.238.842.638 merupakan aset berupa *software*, hasil kajian, dan hak paten yang berada di K/L dan BUN. Nilai bersih Aset Tak Berwujud sebesar Rp21.220.462.095.848 berasal dari nilai bruto Aset Tak Berwujud sebesar Rp31.293.091.131.831 dikurangi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp10.072.629.035.983 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Tak Berwujud	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. Aset Tak Berwujud pada K/L	31.146.316.888.464	24.140.449.124.421
b. Aset Tak Berwujud pada BUN	146.774.243.367	128.789.718.217
Jumlah	31.293.091.131.831	24.269.238.842.638
c. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada K/L	(10.015.012.414.379)	(7.256.504.324.691)
d. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada BUN	(57.616.621.604)	(42.953.242.203)
Nilai Bersih	21.220.462.095.848	16.969.781.275.744

- a. Aset Tak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2017 sebesar Rp31.146.316.888.464 dengan nilai tertinggi terdapat pada K/L, antara lain:
 - 1) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp7.127.711.671.826 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa hasil kajian/penelitian senilai Rp4.852.511.503.108;
 - 2) Kementerian Pertahanan sebesar Rp3.436.995.015.041 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa *software* senilai Rp1.936.497.580.181;

- 3) Kepolisian Negara RI sebesar Rp2.566.058.520.086 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa *software* senilai Rp1.871.417.617.189;
 - 4) Badan Intelijen Negara sebesar Rp2.395.915.619.396 dengan nilai Aset Tak Berwujud terbesar berupa *software* senilai Rp1.984.150.652.136.
- b. Aset Tak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2017 sebesar Rp146.774.243.367 berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, yaitu:
- 1) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam sebesar Rp3.301.927.750 berupa hasil kajian/penelitian;
 - 2) Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp81.527.065.112 berupa *software* dan lisensi;
 - 3) Satuan Kerja Khusus Migas sebesar Rp61.945.250.505 berupa *software* dan lisensi.

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran 21**.

3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp259.379.354.966.485 dan Rp214.185.677.265.195. Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp259.379.354.966.485 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L	16.003.558.774.228	16.514.889.360.183
1) Kementerian Luar Negeri	586.016.904.919	567.365.636.447
2) Kementerian Pertahanan	9.410.583.279.561	8.689.313.944.775
3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	4.739.962.225.000	5.384.144.344.496
4) Kementerian Kesehatan	6.680.396.861	7.878.117.509
5) Kementerian Agama	745.810.975.324	1.439.575.404.223
6) Kementerian Sosial	118.977.765.758	0
7) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	0	2.342.647.890
8) Kepolisian Negara Republik Indonesia	391.631.329.360	420.368.767.398
9) LPP RRI	3.895.897.445	3.900.497.445
b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN	243.375.796.192.257	197.670.787.905.012
Jumlah	259.379.354.966.485	214.185.677.265.195

- a. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp16.003.558.774.228 dan Rp16.514.889.360.183. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada K/L dijelaskan sebagai berikut.
- 1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp586.016.904.919 dan Rp567.365.636.447. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp586.016.904.919 merupakan dana kas besi yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan RI di Luar Negeri untuk dapat digunakan dalam hal kondisi darurat di negara setempat, kunjungan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menerima jaminan tertulis dari Sekretariat Negara, terjadi keterlambatan penerimaan Uang Persediaan (UP), dan/atau pembayaran belanja barang operasional di luar perjalanan dinas sesuai ketentuan perundang-undangan. Dana ini juga digunakan untuk menutupi BPJ Minus dan BPPR Minus.
 - 2) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp9.410.583.279.561 dan

*Dana yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp259,37 triliun*

Rp8.689.313.944.775. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp9.410.583.279.561 merupakan dana kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2017 dan diantaranya sebesar Rp8,72 triliun merupakan saldo dana yang telah dinyatakan definitif sebagai pengeluaran belanja yang bersumber dari DIPA Petikan Satker Pusat dari kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.

Dana tersebut ditampung di rekening escrow atas nama pihak rekanan. Kondisi tersebut sebagai implikasi penerapan Peraturan Panglima (Perpang) TNI No. 33 Tahun 2017 sebagai pengganti Perpang TNI No. 23 tahun 2012 terkait langkah-langkah akhir tahun yang masih perlu disempurnakan agar selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan APBN dan PMK Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran.

- 3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.739.962.225.000 dan Rp5.384.144.344.496. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp4.739.962.225.000 merupakan saldo retur rekening bank penyalur bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum tersalurkan sampai dengan tahun 2017 pada Ditjen Dikdasmen.
- 4) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp6.680.396.861 dan Rp7.878.117.509. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp6.680.396.861 merupakan Dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang belum digunakan sampai dengan 31 Desember 2017 yang berupa dana Jamkesmas Rujukan sebesar Rp6.656.455.053 dan dana Jamkesmas Dasar sebesar Rp23.941.808.
- 5) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp745.810.975.324 dan Rp1.439.575.404.223. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar Rp745.810.975.324 merupakan aset bersih (*net asset*) Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji (LK PIH).
- 6) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp118.977.765.758 dan Rp0. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Sosial sebesar Rp118.977.765.758 merupakan Dana Bantuan Sosial PKH yang belum tersalurkan pada rekening BNI dan akan disalurkan pada tahun 2018.
- 7) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 Rp0 dan Rp2.342.647.890. Tidak ada Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi per 31 Desember 2017.
- 8) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp391.631.329.360 dan Rp420.368.767.398. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebesar Rp391.631.329.360 merupakan dana yang digunakan untuk kegiatan operasional POLRI yang tidak dibiayai dari DIPA, seperti untuk keperluan pada samsat, Jasa Raharja, DPK, kapitasi BPJS, rumkit non-BLU, parkir, FPU, dan lain-lain.

- 9) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Penyiaran Publik RRI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp3.895.897.445 dan Rp3.900.497.445. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Penyiaran Publik RRI sebesar Rp3.895.897.445 merupakan cadangan untuk penyelesaian kewajiban perpajakan LPP RRI atas statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang sampai saat ini masih dalam proses audit.
- b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp243.375.796.192.257 dan Rp197.670.787.905.012. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp243.375.796.192.257 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana yang Dibatasi pada BUN	31 Desember 2017 (Audited)
BA 999.00 (Kuasa BUN)	65.211.736.255.835
1) Rekening Khusus Dana PFK (510000281980)	3.276.851.117.024
2) Rekening Cadangan Dana Reboisasi	167.860.809.595
3) Rekening Pembangunan Hutan	3.579.017.301.000
4) BUN untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan (502.000002980)	82.107.368.550
5) Rekening Pembangunan Hutan BTN (BTN 0001401400236565)	800.000.000.000
6) Reksus Menkeu karena Penjualan Saham PT Telkom di Pasar Domestik (510000239980)	(8)
7) Menkeu c.q. Dirjen Perbendaharaan (500.000004980)	88.259.399.674
8) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519.000126980)	3.124.151.000.000
9) Pengelolaan Surat Berharga Negara (609024411980)	53.890.489.260.000
10) Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	203.000.000.000
11) Rekening Lainnya di BUN	0
BA 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah)	31.174.122.123.664
12) Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir atas DNS (UAIP)	56.422.123.664
13) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional - LPDP (UAKPA Dit SMI DJPb)	31.117.700.000.000
14) Dana Penjaminan EAS	0
BA 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi)	237.204.000.000
15) Subsidi Selisih Bunga dan Bantuan Uang Muka Perumahan	237.204.000.000
BA 999.99 (Pengelolaan Transaksi Khusus) (Iuran Dana Pensiun pada PT Taspen dan PT Asabri)	150.079.884.812.758
Penyesuaian BA 999.00	
16) Penyesuaian Dana Penjaminan	(3.327.151.000.000)
Jumlah	243.375.796.192.257

4. Dana Penjaminan

Dana Penjaminan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp3.327.794.435.749 dan Rp593.487.374. Rincian Dana Penjaminan disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Penjaminan	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. Dana Penjaminan pada K/L	643.435.749	593.487.374
b. Dana Penjaminan pada BUN	3.327.151.000.000	-
Jumlah	3.327.794.435.749	593.487.374

*Dana
Penjaminan
Rp3,32 triliun*

- a. Dana Penjaminan pada K/L per 31 Desember 2017 sebesar Rp643.435.749 terdapat pada Kementerian Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai jaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Cadangan Penjaminan Kredit dan Pembiayaan untuk Koperasi dan UKM. Dana Penjaminan tersebut tersimpan dalam rekening dana penampungan, dana penjaminan, dana pembinaan, dan dana penampungan subrogasi dikurangi jasa pengelolaan hak Perum Jamkrindo.
- b. Dana Penjaminan pada BUN per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.327.151.000.000 terdapat pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dana Penjaminan tahun 2017 merupakan dana yang dicadangkan untuk menjamin berlangsungnya proyek pembangunan pemerintah. Pada tahun 2016, dana tersebut diklasifikasikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Sesuai dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-537/PB.6/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang mengatur nilai dana cadangan penjaminan pemerintah, dana tersebut dicatat pada Aset Lainnya dengan akun Dana Penjaminan. Dana Penjaminan pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Dana Penjaminan pada BUN	31 Desember 2017 (Audited)
BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah:	
1) Dit. EAS	3.082.222.000.000
2) Dit. PKRN	244.929.000.000
Jumlah	3.327.151.000.000

- 1) Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Evaluasi Akuntansi dan Setelmen sebesar Rp3.082.222.000.000 digunakan untuk tujuan berikut.
 - a) Pemberian jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara.
 - b) Pemberian jaminan pemerintah dalam rangka percepatan penyediaan air minum.
 - c) Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
 - d) Proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.
- 2) Dana Penjaminan yang dikelola Dit. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara sebesar Rp244.929.000.000 terdiri dari penjaminan atas pinjaman langsung *Sumatera Electricity Grid Strengthening* dari *Asian Development Bank* kepada PT PLN sebesar Rp41.929.000.000 dan penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp203.000.000.000.

5. Dana Kelolaan BLU

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp45.821.116.060.256 dan Rp21.032.093.463.366. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BA 999.03 atau pengalihan dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarnya atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali. Dana Kelolaan BLU dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

*Dana Kelolaan
BLU Rp45,82
triliun*

Dana Kelolaan pada BLU	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	1.031.955.780.423	909.905.563.815
b. BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	2.049.523.227.017	27.206.642.975
c. BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	1.540.695.342.109	1.763.216.965.167
d. BLU LPDB KUKM	2.028.750.985.012	855.092.380.659
e. BLU Lembaga Manajemen Aset Negara	37.746.815.725.695	17.473.265.887.000
f. BLU UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	0	3.406.023.750
g. BLU Pusat Investasi Pemerintah	934.500.000.000	0
h. BLU LPMUKP	488.875.000.000	0
i. Jumlah	45.821.116.060.256	21.032.093.463.366

- a. Dana Kelolaan BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.031.955.780.423 dan Rp909.905.563.815.
- b. Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.049.523.227.016 dan Rp27.206.642.975. Penempatan Dana Kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Perumahan dirincikan dalam **Lampiran 29**.
- c. Dana kelolaan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.540.695.342.109 dan Rp1.763.216.965.167. Dana Kelolaan BLU P3H dirincikan berikut.
- 1) Rekening Dana Kelolaan BRI No. 0193-01-000830-30-1 Rp41.120.959.524;
 - 2) Deposito BRI sebesar Rp1.300.000.000.000;
 - 3) Deposito BNI sebesar Rp200.000.000.000.

Terdapat perbedaan antara jumlah dana kelolaan yang belum digulirkan yang terdapat di rekening dana kelolaan dengan yang seharusnya. Jumlah dana yang terdapat pada rekening sebesar Rp1.541.120.959.524 sedangkan seharusnya sebesar Rp1.540.695.342.109 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp425.617.415. Hal ini antara lain disebabkan karena:

- 1) Bunga jasa giro sebesar Rp91.980.405 pada tanggal 31 Desember 2017 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan sampai dengan akhir periode pelaporan TA 2017;
 - 2) Terdapat bunga pinjaman/layanan bulan Desember sebesar Rp18.126.050 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
 - 3) Terdapat bunga deposito bulan November sebesar Rp690.410.958 yang belum dipindahbukukan ke rekening pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
 - 4) Terdapat penarikan dana pemindahbukuan bulan November yang belum dikembalikan oleh BRI sebesar Rp374.900.000.
 - 5) Terdapat perbedaan Rp2 yang merupakan pembulatan.
- d. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.028.750.985.012 dan Rp855.092.380.659. Dana Kelolaan BLU LPDB KUMKM dirincikan sebagai berikut.
- 1) Sudah akad belum dicairkan mitra sebesar Rp669.100.200.000;
 - 2) Disetujui komite sebesar Rp25.769.187.500;
 - 3) Adapun sisa dana tersebut sebesar Rp1.333.881.597.512 merupakan dana bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2018.

- e. Dana Kelolaan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp37.746.815.725.695 dan Rp17.473.265.887.000. Tujuan penempatan Dana Kelolaan BLU LMAN, yaitu:

(dalam rupiah)

Dana Investasi	Jumlah
Aktivitas pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN)	36.328.328.003.821
Dana kelolaan untuk aktivitas manajemen aset	1.418.487.721.874
Jumlah	37.746.815.725.695

Mutasi Dana Kelolaan BLU LMAN dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2016	17.473.265.887.000
Perolehan Aset Lain-Lain BUN berupa tanah infrastruktur PSN	(11.722.231.996.179)
Perolehan Aset Lain-Lain BUN berupa aset eks HTBI batch II	(53.295.000.000)
Upgrading Aset Lain-lain BUN eks HTBI batch I	(1.483.165.126)
Penambahan dana kelolaan dari APBN TA 2017 untuk aktivitas pendanaan tanah infrastruktur PSN	32.050.560.000.000
Jumlah	37.746.815.725.695

- f. Dana Kelolaan BLU UIN Maulana Malik Ibrahim per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp3.406.023.750. Dana Kelolaan BLU UIN Maulana Malik Ibrahim disediakan untuk kegiatan kerja sama dengan lembaga lain, seperti untuk penelitian dosen dan beasiswa.
- g. Dana Kelolaan BLU Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp934.500.000.000 dan Rp0.
- h. Dana Kelolaan BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp488.875.000.000 dan Rp0.

6. Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Aset KKKS per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp489.508.659.091.683 dan Rp416.995.629.577.966. Nilai bersih Aset KKKS per 31 Desember 2017 sebesar Rp327.015.283.386.153 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp489.508.659.091.683 dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp162.493.375.705.530 dengan penjelasan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset KKKS	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. Aset Tanah	22.028.148.948.127	20.819.996.739.758
b. Aset NonTanah	467.480.510.143.557	396.175.632.838.208
1) Harta Benda Modal (HBM)	442.731.782.028.218	370.928.185.846.133
2) Harta Benda Inventaris (HBI)	70.785.280.181	58.622.414.607
3) Material Persediaan	24.677.942.835.158	25.188.824.577.468
Jumlah	489.508.659.091.683	416.995.629.577.966
c. Akumulasi Penyusutan	(162.493.375.705.530)	(128.687.122.961.759)
Nilai Bersih	327.015.283.386.153	288.308.506.616.207

- a. Aset KKKS berupa Tanah

Aset KKKS berupa tanah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp22.028.148.948.127 dan Rp20.819.996.739.758. Aset KKKS berupa tanah sebesar Rp22.028.148.948.127 dijelaskan sebagai berikut.

Aset KKKS
Rp489,50
triliun

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
20.819.996.739.758	1.980.111.487.259	(771.959.278.890)	22.028.148.948.127

Aset KKKS berupa tanah per 31 Desember 2017 dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Saldo awal Aset KKKS berupa tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2016 *Audited* sebesar Rp20.819.996.739.758.
- 2) Penambahan Aset KKKS berupa tanah sebesar Rp1.980.111.487.259 berasal dari:
 - a) kurang catat pemasukan nilai wajar pada KKKS PT Kalila Korinci Baru sebesar Rp4.554.705.800;
 - b) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Medco EP Rimau sebesar Rp11.689.366.939;
 - c) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Petrochina East Java sebesar Rp721.205.775.000;
 - d) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Medco EP Indonesia sebesar Rp66.584.469.272;
 - e) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS PT BOB Siak Pusako sebesar Rp432.162.804.000;
 - f) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Petrochina International Jabung sebesar Rp302.634.535.510;
 - g) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Triangle Pase sebesar Rp10.650.867.000;
 - h) koreksi tambah karena adanya penggabungan catatan yang semula tercatat sebagai VICO Sanga-sanga, VICO Unit Semberah, VICO Unit Pamaguan, VICO Unit Mutiara, VICO Unit Badak & Nilam menjadi VICO Indonesia LLc sebesar Rp367.087.884.214;
 - i) koreksi tambah karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS VICO Indonesia LLc sebesar Rp59.426.285.524,39;
 - j) pembelian tanah pada tahun 2017 pada KKKS Odira Energi sebesar Rp3.136.854.000;
 - k) pembelian tanah pada tahun 2017 pada KKKS Indo CBM sebesar Rp362.060.000;
 - l) pembelian tanah pada tahun 2017 pada KKKS Tropic Energy Pandan sebesar Rp615.880.000.
- 3) Pengurangan Aset KKKS berupa tanah sebesar Rp771.959.278.890 berasal dari:
 - a) koreksi kurang karena hasil IP karena tanah merupakan kawasan adat dan masuk dalam kawasan hutan (IPPKH) sebesar Rp2.803.256.710,80;
 - b) koreksi kurang karena adanya penggabungan catatan yang semula tercatat sebagai VICO Sanga-sanga, VICO Unit Semberah, VICO Unit Pamaguan, VICO Unit Mutiara, VICO Unit Badak & Nilam menjadi VICO Indonesia LLc sebesar Rp367.087.884.214;
 - c) koreksi kurang karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Medco EP Rimau sebesar Rp5.562.224.007;
 - d) koreksi kurang karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Petrochina East Java sebesar Rp66.459.346.700;
 - e) koreksi kurang karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Medco EP Indonesia sebesar Rp2.112.767.000;
 - f) koreksi kurang karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS PT BOB Siak Pusako sebesar Rp4.100.448.000;

- g) koreksi kurang karena hasil IP tahun 2017 pada KKKS Petrochina International Jabung sebesar Rp323.833.352.258,20.
- 4) Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa tanah diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat diperoleh/dibeli serta digunakan oleh KKKS.
- 5) Terkait pengukuran, berdasarkan Pasal 11, 12 dan 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016, nilai Aset Tanah dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:
- menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset tanah yang diperoleh tahun 2010 ke bawah;
 - menggunakan nilai perolehan untuk aset tanah yang diperoleh setelah tahun 2011.
- b. Aset KKKS Non Tanah berupa Harta Benda Modal (HBM)
- Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp442.731.782.028.218 dan Rp370.928.185.846.133. Aset KKKS berupa HBM sebesar Rp442.731.782.028.218 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
370.928.185.846.133	88.831.565.216.596	(17.027.969.034.511)	442.731.782.028.218

Aset KKKS berupa HBM per 31 Desember 2017 dijelaskan sebagai berikut.

- Saldo awal Aset KKKS berupa HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2016 *Audited* sebesar Rp370.928.185.846.133.
- Penambahan Aset KKKS berupa HBM sebesar Rp88.831.565.216.596 berasal dari:
 - Penambahan aset yang baru dilaporkan SKK Migas dengan tahun perolehan di atas tahun 2011 sebesar Rp47.138.116.518.236;
 - Koreksi nilai perolehan aset sebesar Rp41.693.448.698.360, yang berasal dari:
 - Koreksi hasil rekonsiliasi UAKPA tahun 2017 sebesar Rp9.337.261.534.296;
 - Koreksi hasil rekonsiliasi *subsequent expenditure* sebesar Rp10.119.494.169.759;
 - Selisih pembulatan sebesar Rp42.494;
 - Koreksi pencatatan atas persetujuan AFE close out, late charges, hasil audit, tindak lanjut IP, dan buka-tutup atas pembenahan catatan HBM oleh SKK Migas sebesar Rp17.735.699.351.178;
 - Koreksi perbaikan kurs rupiah sebesar Rp4.500.993.600.632.
- Pengurangan Aset KKKS berupa HBM sebesar Rp17.027.969.034.511 disebabkan beberapa hal berikut.
 - Koreksi hasil rekonsiliasi UAKPA tahun 2017 sebesar Rp9.277.076.510.636.
 - Penghapusan sebesar Rp56.671.764.
 - Selisih Pembulatan sebesar Rp12.120.
 - Koreksi pencatatan oleh SKK Migas sebesar Rp4.479.247.669.277.
 - Koreksi perbaikan kurs rupiah sebesar Rp3.158.349.974.878.
 - Dalam proses penghapusan atau terminasi sebesar Rp113.238.195.836.
- Terkait pengakuan, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa

Barang Milik Negara yang Berasal dari KKKS, Aset KKKS berupa HBM diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *Placed into Service (PIS)*.

5) Terkait pengukuran, nilai aset KKKS berupa HBM dibedakan berdasarkan tahun perolehan aset, yaitu:

- a. menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) yang dilaksanakan oleh Tim IP untuk aset HBM yang diperoleh sampai dengan tahun 2010.
- b. dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang USD yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada saat *PIS* untuk aset HBM yang diperoleh setelah tahun 2011.

c. Aset KKKS NonTanah berupa HBI

Aset KKKS berupa HBI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp70.785.280.181 dan Rp58.622.414.607. Aset KKKS berupa HBI sebesar Rp70.785.280.181 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
58.622.414.607	13.224.628.049	(1.061.762.475)	70.785.280.181

Aset KKKS berupa HBI yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2017 dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Saldo awal Aset KKKS berupa HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2016 *Audited* sebesar Rp58.622.414.607.
 - 2) Penambahan aset HBI sebesar Rp13.224.628.049 berasal dari tambahan aset HBI (PIS) sebesar Rp11.853.741.994 dan koreksi pencatatan sebesar Rp1.370.886.055.
 - 3) Pengurangan Aset KKKS berupa HBI sebesar Rp1.061.762.475 berasal dari koreksi kurang aset HBI yang berasal dari koreksi pencatatan sebesar Rp701.680.161, penghapusan sebesar Rp166.190.225, *transfer out* sebesar Rp193.892.089;
 - 4) Terkait pengakuan, Aset KKKS berupa HBI diakui sebagai aset milik Pemerintah Pusat pada saat *PIS*.
 - 5) Terkait pengukuran, nilai HBI dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang US dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal perolehan/*PIS*.
 - 6) HBI yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 dan belum dilakukan inventarisasi belum disajikan ke dalam Neraca.
- d. Aset KKKS NonTanah berupa Material Persediaan
- Aset KKKS berupa material persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp24.677.942.835.158 dan Rp25.188.824.577.468. Aset KKKS berupa material persediaan sebesar Rp24.677.942.835.158 dijelaskan sebagai berikut.

Saldo Awal (USD)	Penambahan (USD)	Pengurangan (USD)	Saldo Akhir (USD)	Saldo Akhir (Rp)
1.874.726.450	2.849.125.996	(2.902.333.193)	1.821.519.253	24.677.942.835.157*

*selisih antara nilai face dengan perhitungan kurs sebesar Rp4.487 karena pembulatan dalam mata uang asing

Aset material persediaan dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Saldo awal Aset KKKS berupa material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2016 *Audited* sebesar USD1.874.726.450 atau setara Rp25.188.824.577.468 (kurs per 31 Desember 2016 adalah Rp13.436/USD).

- 2) Penambahan Aset KKKS berupa material persediaan sebesar USD2.849.125.996 berasal dari koreksi saldo awal sebesar USD20.879.990, mutasi tambah sebesar USD8.921.496, dan koreksi lainnya sebesar USD2.819.324.510.
 - 3) Pengurangan material sebesar USD2.902.333.193 berasal dari koreksi saldo awal sebesar USD8.596.363 dan mutasi kurang sebesar USD2.893.736.830.
 - 4) Saldo akhir Aset KKKS berupa material persediaan yang dicatatkan pada Neraca per 31 Desember 2017 merupakan stok material persediaan yang disimpan di gudang KKKS per 31 Desember 2017 senilai USD1.821.519.253. Saldo akhir dicatat sebesar harga perolehan dalam mata uang US dollar yang dikonversi ke rupiah menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2017, yaitu Rp13.548/USD.
- e. Akumulasi Penyusutan Aset KKKS NonTanah
- Akumulasi Penyusutan Aset KKKS NonTanah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp162.493.375.705.530 dan Rp128.687.122.961.759. Akumulasi Penyusutan Aset KKKS NonTanah sebesar Rp162.493.375.705.530 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
128.687.122.961.759	42.608.590.808.867	(8.802.338.065.096)	162.493.375.705.530

Akumulasi Penyusutan Aset KKKS non tanah yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2017, terdiri dari:

1) Akumulasi Penyusutan Aset KKKS non tanah berupa HBM

Akumulasi Penyusutan Aset KKKS non tanah berupa HBM sebesar Rp162.462.929.076.653 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
128.665.906.985.639	42.598.767.407.031	(8.801.745.316.017)	162.462.929.076.653

- a) Saldo awal merupakan Akumulasi Penyusutan Aset KKKS berupa HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2016 *Audited* sebesar Rp128.665.906.985.639.
- b) Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset KKKS berupa HBM sebesar Rp42.598.767.407.031 berasal dari:
 - Penyusutan atas penambahan aset yang baru dilaporkan SKK Migas sebesar Rp1.455.960.030.127;
 - Koreksi Penyusutan sebesar 16,876,642,792,165;
 - Penyusutan dari *transfer in* sebesar Rp75.177.453.639;
 - Selisih pencatatan sebesar Rp5.473,60
 - Penyusutan tambahan dari saldo awal BMN sebesar Rp24.190.987.125.626.
- c) Pengurangan penyusutan aset HBM sebesar Rp8.801.745.316.017 berasal dari:
 - Penyusutan dari aset HBM yang dihapus sebesar Rp56.671.764;
 - Selisih pencatatan sebesar Rp811,50;
 - Koreksi penyusutan sebesar Rp8.765.020.917.367;
 - Penyusutan aset dalam proses penghapusan/terminasi sebesar Rp36.667.726.886.

2) Akumulasi Penyusutan Aset KKKS non tanah berupa HBI

Akumulasi Penyusutan Aset KKKS berupa HBI yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2017 sebesar Rp30.446.628.877 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
21.215.976.120	9.823.401.837	(592.749.079)	30.446.628.877

- Saldo awal Akumulasi Penyusutan Aset KKKS berupa HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP Tahun 2016 *Audited* sebesar Rp21.215.976.120.
- Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset KKKS berupa HBI sebesar Rp9.823.401.837 berasal dari:
 - Penyusutan dari tambahan aset HBI sebesar Rp8.803.440.673.
 - Koreksi tambah aset HBI sebesar Rp1.019.961.164 berasal dari koreksi kesalahan perhitungan penyusutan tahun yang lalu.
- Koreksi kurang aset HBI sebesar Rp592.749.079 berasal dari koreksi kesalahan perhitungan penyusutan tahun yang lalu.

*Aset Eks BPPN
Rp2,57 triliun*

7. Aset Eks BPPN

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.574.749.283.103 dan Rp2.543.920.246.320. Aset Eks BPPN merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Aset ini berada dalam pengelolaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari aset inventaris, properti, nostro, surat berharga, dan saham. Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2017 merupakan hasil inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Eks BPPN	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. Aset Properti Eks BPPN	1.709.554.940.253	1.683.118.440.566
b. Aset Inventaris	11.009.466.267	11.903.097.376
c. Aset Nostro	14.092.050.712	9.314.176.101
d. Surat Berharga Eks BPPN	454.405.774.008	450.702.277.795
e. Saham Eks BPPN	385.687.051.863	388.882.254.482
Jumlah	2.574.749.283.103	2.543.920.246.320

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Lampiran 22**.

a. Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti Eks BPPN per 31 Desember 2017 sejumlah 1.488 aset dengan nilai sebesar Rp1.709.554.940.253. Sedangkan per 31 Desember 2016 sejumlah 912 aset dengan nilai sebesar Rp1.683.118.440.566. Aset Properti Eks BPPN yang disajikan di neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*). Perubahan jumlah dan nilai Aset Properti Eks BPPN disebabkan beberapa hal sebagai berikut.

- Penambahan aset sejumlah 583 unit dengan nilai sebesar Rp37.000.000.000 yang berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih PT Pentabinangun Sejahtera dan sejumlah 1 unit aset yang sebelumnya belum dilaporkan sebagai aset properti.
- Koreksi pengurangan aset sejumlah 3 (tiga) unit dengan nilai Rp2.626.300.000 disebabkan pencatatan dua kali dalam Neraca per 31 Desember 2016.
- Pengurangan aset sejumlah 1 (satu) unit dengan nilai Rp1.600.409.549 diakrenakan telah ditetapkan status penggunaannya sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 273/KM.6/2017 tanggal 6 April 2017.

- 4) Pengurangan aset sejumlah 4 (empat) unit dengan nilai Rp6.336.790.764 terjual lelang pada tanggal 22 Agustus 2017 sesuai Risalah Lelang No: 365/33/2017.

Aset Properti Eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) yaitu:

Dokumen Kepemilikan	Jumlah Unit
Dokumen <i>copy</i>	264
Dokumen selain dokumen kepemilikan	416
Tidak ada keterangan	26
Jumlah	706

Aset tersebut berkurang sejumlah 667 aset disebabkan beberapa hal berikut.

- 1) Menurut informasi dokumen
 - a) Disita Kejaksaan sejumlah 33 aset;
 - b) Telah terjual sejumlah 51 aset;
 - c) Tercatat di neraca aset properti eks BPPN sejumlah 43 aset;
 - d) Tercatat di neraca aset properti eks kelolaan PT PPA sejumlah 1 aset;
 - e) Pencatatan ganda sejumlah 3 aset.
 - 2) Kepemilikan tidak ada
 - a) Disita Kejaksaan sejumlah 44 aset;
 - b) Telah terjual sejumlah 379 aset;
 - c) Tercatat di neraca aset properti eks BPPN sejumlah 55 aset;
 - d) Tercatat di neraca aset properti eks kelolaan PT PPA sejumlah 2 aset.
 - e) Pencatatan ganda sejumlah 1 aset
 - 3) Tidak ada keterangan
 - a) Disita Kejaksaan Sejumlah 44 Aset;
 - b) Telah terjual sejumlah 6 aset;
 - c) Tercatat di neraca aset properti eks BPPN sejumlah 4 aset;
 - d) Pencatatan ganda sejumlah 1 aset.
 - 4) Selain itu, terdapat 1 aset properti HTBI yang belum tercatat dalam neraca, namun telah terselesaikan oleh Kemenkeu dan BI yaitu tanah dan bangunan eks Uppindo Jl. Rasuna Said Kav. C-12 Jakarta diserahkan kepada LMAN dan dibukukan di LMAN sesuai surat Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan No.S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017. Kemudian, terdapat 1 aset properti HTBI yang belum tercatat dalam neraca dan belum terselesaikan oleh Kemenkeu dan BI yaitu tanah dan bangunan di Jl. Pemuda No. 46 Bangunharjo, Semarang yang ditetapkan penggunaan sementara kepada Kemenkeu sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-428/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017.
- b. Aset Inventaris Eks BPPN
- Aset Inventaris adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Nilai wajar aset inventaris per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp11.009.466.267 dan Rp11.903.097.376. Perubahan nilai Aset Inventaris Eks BPPN disebabkan penjualan aset inventaris sebanyak 4.403 unit dengan nilai sebesar Rp893.631.109.
- c. Aset Nostro
- Aset Nostro per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 sebesar

Rp14.092.050.712 dan Rp9.314.176.101. Penurunan nilai Aset Nostro disebabkan adanya Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD 350.526,24 dan penurunan kurs mata uang. Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2017 sebesar Rp468.539.188.084. Dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh DJKN. Jika Aset Nostro tersebut telah memenuhi syarat pengakuan aset, akan disajikan di neraca.

d. Surat Berharga Eks BPPN

Surat Berharga Eks BPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp454.405.774.008 dan Rp450.702.277.795. Surat Berharga Eks BPPN merupakan surat berharga yang belum *free and clear* pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan *Custodial Agreement* tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Setelah tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan, belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi. Pencatatan nilai Surat Berharga Eks BPPN berdasarkan nilai pasar surat berharga yang disajikan pada *Monthly Report* Citibank.

e. Aset Saham Eks BPPN

Aset Saham Eks BPPN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp385.687.051.863 dan Rp388.882.254.482. Aset Saham Eks BPPN adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari asset *settlement* BTO dan BBKU. Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Penurunan nilai aset saham eks BPPN dikarenakan adanya penurunan nilai pasar saham selama tahun 2017. Nilai Aset Saham Eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan *Monthly Report* Citibank per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp95.810.476.569,72. Sedangkan nilai Aset Saham Eks BPPN yang dikelola langsung oleh DJKN per 31 Desember 2017 sebesar Rp95.810.476.569.

Aset Lain-lain
Rp167,43
triliun

8. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp167.431.643.860.809 dan Rp128.875.351.921.271. Aset Lain-lain merupakan jenis aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp109.061.188.783.793 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp167.431.643.860.809 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp58.370.455.671.016. Aset Lain-lain dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. K/L	61.455.378.467.188	48.343.537.420.233
b. BLU pada K/L	0	511.886.882.303
c. BA 999.03	54.182.632.231.984	13.234.602.981
d. BA 999.99	51.793.633.161.637	80.006.693.015.754
Jumlah	167.431.643.860.809	128.875.351.921.271
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain:		(48.065.475.718.780)
e. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada K/L	(19.829.198.690.520)	
f. Akumulasi Penyusutan AL pada BUN	(38.541.256.980.496)	
Nilai Bersih	109.061.188.189.793	80.809.876.202.491

a. Aset Lain-lain K/L

Aset Lain-lain K/L per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp61.455.378.467.188 dan Rp48.343.537.420.233. Nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Aset Lain-lain K/L per 31 Desember 2017 sebesar Rp41.626.179.776.668 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp61.455.378.467.188 dikurangi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rp19.829.198.690.520. Rincian Aset Lain-lain di masing-masing K/L disajikan pada **Lampiran 23**.

b. Aset Lain-lain Badan Layanan Umum (BLU) pada K/L

Aset Lain-lain pada BLU merupakan reklasifikasi aset tetap yang diberhentikan penggunaannya dan dana yang dikelola BLU. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dari Aset Lain-lain pada BLU per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp511.886.882.303.

c. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp54.182.632.231.984 dan Rp13.234.602.981. Rincian Aset Lain-lain BA 999.03 disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.03	31 Desember 2017 (Audited)
UAIP	
1) Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan	13.234.602.981
BLU LMAN	
2) Aset Eks Kelolaan PT PPA	96.259.270.000
3) Aset Eks Pertamina	28.361.658.924.923
4) Aset Lain-lain BUN	25.711.479.434.081
Jumlah*	54.182.632.231.985

*selisih Rp1 karena pembulatan

1) Aset Eks Dana Bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Aset Eks Dana bergulir pada Kementerian Kelautan per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.234.602.981 merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2004. Program PUPTSK terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI);
- b) Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI);
- c) Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS);
- d) Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

Sasaran dari program PUPTSK adalah nelayan dan pengolah ikan skala kecil. Mengingat pendidikan/keterampilan dan kondisi sosial ekonomi mereka pada umumnya relatif rendah, diperlukan peran optimal Pemerintah dalam memberdayakan mereka.

2) Aset Eks Kelolaan PT PPA

Aset Lain-lain Eks Kelolaan PT PPA 31 Desember 2017 sebesar Rp96.259.270.000. Aset Eks Kelolaan PT PPA pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN Eks kelolaan PT PPA yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi

husus. Aset Eks Kelolaan PT PPA disajikan sebesar nilai wajar aset pada keputusan Dirjen Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaannya. Pada tahun 2017, entitas belum melakukan penyusutan atas Aset Eks Kelolaan PT PPA karena belum diperolehnya data-data yang diperlukan guna menghitung sisa umur ekonomis aset. Saldo Aset Lain-lain Eks Kelolaan PT PPA yang berada pada pengelolaan entitas per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp96.259.270.000 yang merupakan nilai sebelum penyusutan atas 106 unit apartemen di Puri Casablanca. Aset Eks kelolaan PT PPA tersebut tidak diberlakukan penyusutan karena pada entitas sedang dilakukan analisis atas sisa umur ekonomis aset sejak tanggal laporan penilaian. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp17.380.145.972.

3) Aset Eks Pertamina

Aset Eks Pertamina per 31 Desember 2017 sebesar Rp28.361.658.924.923. Aset Eks Pertamina pada kelompok Aset Lain-lain BUN digunakan untuk mencatat aset BUN eks Pertamina yang diserahkan kepada entitas. Sebelum penyerahkelolaan, aset tersebut disajikan pada laporan keuangan transaksi khusus. Aset Eks Pertamina disajikan sebesar nilai wajar pada laporan keuangan transaksi khusus (*audited*) pada tahun sebelum penyerahkelolaan atau menggunakan nilai wajar apabila termuat pada keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait penyerahkelolaan atau pada BAST penyerahkelolaan. Aset Eks Pertamina sebesar Rp28.361.658.924.923 berasal dari:

- a) Penyerahkelolaan Kilang LNG Badak sebesar Rp16.301.881.511.632;
- b) Penyerahkelolaan Kilang Gas Arun sebesar Rp10.820.874.332.291;
- c) Penyerahkelolaan Tanah Jalan Terogong sebesar Rp1.233.433.545.000;
- d) Penyerahkelolaan Tanah dan Bangunan di Jalan Dipati Ukur Bandung sebesar Rp5.469.536.000.

Akumulasi Penyusutan Aset Pertamina sebesar Rp11.250.051.815.081.

4) Aset Lain-lain BUN

Aset Lain-lain BUN per 31 Desember 2017 sebesar Rp25.711.479.434.081. Aset Lain-lain BUN berasal dari:

- a) Penyajian pertama kali berdasarkan PSAP 13 dan kebijakan/sistem akuntansi yang diterbitkan Dit. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebesar Rp147.666.271.000;
- b) Pengembalian penyerahkelolaan aset eks HTBI *batch* I di Perumahan Permata Semeru, Semarang sebesar minus Rp2.471.660.000;
- c) Perolehan aset tanah infrastruktur PSN sebesar Rp11.722.231.996.179;
- d) Penebusan aset eks HTBI *batch* II sebesar Rp53.295.000.000;
- e) Pengembangan/*upgrade* 6 aset eks HTBI *batch* I sebesar Rp1.483.165.126;
- f) Pengakuan kewajiban atas aset tanah infrastruktur PSN yang telah dibayarkan oleh BUJT dan telah lolos verifikasi BPKP namun belum dilakukan penggantian sebesar Rp13.789.274.661.776.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp995.122.467.

d. Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus

Aset Lain-lain BUN Pengelolaan Transaksi Khusus per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp51.793.633.161.637 dan 80.006.693.015.754, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BA 999.99	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1) Aset Lain-lain BLBI	4.467.365.349.620	4.768.013.571.680
2) Aset Eks Pertamina	12.944.737.727.945	41.459.431.869.274
3) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T)	72.019.011.500	26.621.110.500
4) Aset BMN <i>/dile</i>	54.663.708.402	40.623.835.279
5) Aset PKP2B	34.238.755.875.568	33.705.051.589.051
6) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara	16.091.488.602	6.951.039.970
Jumlah Aset Lain-lain BA 999.99	51.793.633.161.637	80.006.693.015.754

- 1) Aset Lain-lain BLBI per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.467.365.349.620 dan Rp4.768.013.571.680 merupakan aset non lancar lainnya yang terdiri dari aset properti eks kelolaan PT PPA, surat berharga eks kelolaan PT PPA, Aset Saham (nonBank) Eks Kelolaan PT PPA, dan Saham yang Diserahkelolakan kepada PT PPA. Aset Lain-Lain BLBI dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain BLBI	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a) Aset Properti Eks PT PPA	4.375.122.232.666	4.669.926.572.666
b) Surat Berharga Eks PT PPA	16.657.242.209	16.657.242.209
c) Saham NonBank Eks PT PPA	53.107.124.745	58.951.006.805
d) Saham yang Diserahkelolakan kepada PT PPA	22.478.750.000	22.478.750.000
Jumlah	4.467.365.349.620	4.768.013.571.680

- a) Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.375.122.232.666 dan Rp4.669.926.572.666. Penurunan nilai aset tersebut terjadi karena adanya pengurangan jumlah aset. Jumlah Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA per 31 Desember 2017 sebanyak 1.721 unit aset, sedangkan per 31 Desember 2016 sebanyak 1.877 unit aset.
- b) Surat Berharga Eks PT PPA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 tidak mengalami perubahan nilai, yaitu sebesar Rp16.657.242.209. Surat Berharga Eks PT PPA merupakan surat berharga yang telah *free and clear* pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009.
- c) Saham NonBank Eks PT PPA per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp53.107.124.745 dan Rp58.951.006.805. Saham NonBank Eks PT PPA merupakan saham yang telah *free and clear* pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset di tahun 2009. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA disajikan pada **Lampiran 24**.
- d) Saham yang Diserahkelolakan kepada PT PPA per 31 Desember 2017 sebesar Rp22.478.750.000 dan per 31 Desember 2016 tidak mengalami perubahan nilai, yaitu sebesar Rp22.478.750.000.
- 2) Aset Eks Pertamina berupa BMN eks Pertamina per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp12.944.737.727.945 dan Rp41.459.431.869.274. Aset Eks Pertamina dirincikan sebagai berikut.

- 6 (enam) aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta dan Depok senilai Rp414.633.194.000.
- BMN eks kontrak kerjasama Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp12.530.104.533.945.

Penurunan nilai Aset Eks Pertamina pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus karena sebagian Aset Eks Pertamina dialihkan pencatatannya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah. Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina Rp3.788.728.908.894.

- 3) Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp72.019.011.500 dan Rp26.621.110.500. ABMA/T sebesar Rp72.019.011.500 merupakan aset lainnya pada Neraca ABMA/T dalam Pengelolaan DJKN. Nilai tersebut merupakan saldo awal sebesar Rp26.621.110.500 ditambah mutasi ABMA/T sebesar Rp50.277.307.000 dikurangi dengan penyelesaian ABMA/T yang terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp4.879.406.000.
- 4) Aset BMN *Idle* per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp54.663.708.402 dan Rp40.623.835.279. Aset BMN *Idle* merupakan bagian dari BMN. BMN *Idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *Idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang. Pada tahun 2017, terdapat mutasi tambah atas Aset BMN *Idle* sebesar Rp15.703.170.123 yang terdiri dari mutasi tambah tanah sebesar Rp11.640.911.602 dan mutasi tambah bangunan sebesar Rp4.062.258.521. Mutasi kurang Aset BMN *Idle* pada tahun 2017 sebesar Rp1.663.297.000 yang terdiri dari Hibah BMN eks BMN *Idle* berupa Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen kepada Pemerintah Kabupaten Majene sebesar Rp109.485.000 dan Hibah BMN eks BMN *Idle* berupa 3 (tiga) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen kepada Pemerintah Kota Kendari sebesar Rp1.553.812.000. Akumulasi Penyusutan Aset BMN *Idle* sebesar Rp2.820.549.658. Rincian Aset BMN *Idle* disajikan pada **Lampiran 25**.
- 5) Aset Perjanjian Kerja sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp34.238.755.875.568 dan Rp33.705.051.589.051. Aset PKP2B terdiri dari aset negara berupa tanah sebesar Rp69.823.683.000, aset non tanah sebesar Rp34.168.932.192.568, dan akumulasi penyusutan sebesar Rp23.481.280.438.424 yang tersebar pada 7 PKP2B, yaitu PT Adaro Indonesia, PT Arutmin Indonesia, PT Berau Coal, PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Multi Harapan Utama, dan PT Tanito Harum.
- 6) Aset Lain-Lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp16.091.488.602 dan Rp6.951.039.970. Berikut rincian Aset Lain-lain dalam Pengelolaan Ditjen Kekayaan Negara:

(dalam rupiah)

Aset Lain-lain dalam Pengelolaan DJKN	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Barang Gratifikasi KPK	14.435.139.309	5.900.681.970
Aset Eks USAID	95.189.293	328.200.000
Aset dari pembubaran badan yang dibentuk K/L	0	722.158.000
Aset Eks GIZ-APCC	180.260.000	0

Aset Eks GIZ-SREGIP	755.900.000	0
Saham PT Aldevelco	625.000.000	0
Jumlah	16.091.488.602	6.951.039.970

*Aset Lainnya
dari Unit
Pemerintah
Lainnya
Rp15,59 triliun*

9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan Ekuitas pada Unit Badan Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp15.591.513.780.723 dan Rp14.102.926.289.993. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Pemerintah Lainnya	31 Desember 2017 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2016 (<i>Audited</i>)
a. Yayasan TMII	89.955.509.968	87.956.319.377
b. Otorita Asahan	13.616.233.168	13.912.038.837
c. Yayasan Gedung Veteran	8.101.230.962	10.578.039.697
d. Baznas	140.005.041.457	93.536.900.686
e. Badan Wakaf Indonesia	1.303.893.178	1.403.816.697
f. BP Dana Abadi Umat	3.327.847.280.828	2.994.317.988.098
g. SKK Migas	(368.357.330.572)	(348.464.029.974)
h. Bapertarum PNS	8.019.539.592.771	7.211.731.495.881
i. OJK	4.359.502.328.963	4.037.953.720.694
Jumlah	15.591.513.780.723	14.102.926.289.993

a. Aset Lainnya dari Yayasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Aset Lainnya dari Yayasan TMII per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp89.955.509.968 dan Rp87.956.319.377. Nilai Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2017 sebesar Rp89.955.509.968 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited*. Sedangkan nilai Aset Lainnya dari Yayasan TMII per 31 Desember 2016 sebesar Rp87.956.319.377 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2016 *Unaudited*. Hal tersebut disebabkan karena sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2016 *Audited*, Yayasan TMII belum menyampaikan Laporan Keuangan Yayasan TMII Tahun 2016 *Audited*.

b. Aset Lainnya dari Otorita Asahan

Aset Lainnya dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp13.616.233.168 dan Rp13.912.038.837. Aset Lainnya sebesar Rp13.616.233.168 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.245.202.116.477 dikurangi penyesuaian atas pos Setoran PNBPN ke Negara pada aset lancar di neraca sebesar Rp1.231.585.883.309. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan merujuk kepada surat Menteri Keuangan Nomor S-619/MK.02/2012 tanggal 29 Agustus 2012 perihal Pengelolaan Dana Otorita Asahan, yang meminta kepada Otorita Asahan menyetor dana *environmental fund* serta pendapatan lainnya yang sah yang menjadi hak negara ke kas negara sebagai PNBPN Lainnya.

c. Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran

Aset Lainnya dari Yayasan Gedung Veteran tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp8.101.230.962 dan Rp10.578.039.697. Aset dari Yayasan Gedung Veteran merupakan total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran per 31 Desember 2017..

- d. **Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)**
Aset Lainnya dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp140.005.041.457 dan Rp93.536.900.686. Aset Lainnya dari Baznas merupakan nilai ekuitas bersih BAZNAS berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 *Audited*. Pada tahun 2017, salah satu sumber dana yang dihimpun oleh BAZNAS adalah dana APBN yang berasal dari Kementerian Agama. Dana APBN tersebut disalurkan untuk kegiatan operasional. Untuk tahun 2017 BAZNAS memperoleh dana APBN melalui Kementerian Agama sebesar Rp6.000.000.000.
- e. **Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia**
Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.303.893.178 dan Rp1.403.816.697. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2017 *Audited*. Pada tahun 2017, Badan Wakaf Indonesia memperoleh alokasi dana APBN melalui Kementerian Agama sebesar Rp6.000.000.000 untuk bantuan operasional.
- f. **Aset Lainnya dari Badan Pengelolaan Dana Abadi Umat (BP DAU)**
Aset Lainnya dari BP DAU per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp3.327.847.280.828 dan Rp2.994.317.988.098. Aset Lainnya dari BP DAU merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BP DAU per 31 Desember 2017.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 20, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH merupakan badan hukum publik berdasarkan undang-undang yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dan harus sudah terbentuk paling lama satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Berdasarkan PMA Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat Pasal 3, dinyatakan bahwa pengelolaan DAU dilakukan oleh BPKH dan dalam hal BPKH belum terbentuk Menteri menetapkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pengelola DAU. Pada saat laporan keuangan ini disusun, BPKH telah terbentuk. Dalam rangka likuidasi telah disusun Laporan Keuangan Penutup BPDAU per 30 Juni 2017 dan telah diaudit oleh BPK RI dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 37.A/LHP/XVIII/12/2017 tanggal 21 Desember 2017. Sehubungan hal tersebut, BPDAU telah dilikuidasi dan seluruh asetnya akan diserahkan kepada BPKH.
- g. **Aset Lainnya dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)**
Aset Lainnya dari SKK MIGAS per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp368.357.330.572 dan minus Rp348.464.029.974. Aset Lainnya yang berasal dari SKK MIGAS merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK MIGAS Tahun 2017 *Audited*. Penjelasan Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Aset Lainnya SKK Migas	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas Tahun 2016 <i>Audited</i>	(900.301.995.633)
Penyesuaian Kewajiban Pasca Imbalan Kerja	1.008.710.882.482
Ekuitas Bersih SKK Migas sebagai Satker dalam BA 999.08	(124.360.460.337)
Ekuitas BP MIGAS per 13 Nov 2012	(352.405.757.084)
Aset Lainnya dari SKK Migas 31 Des 2017	(368.357.330.572)

Aset Lainnya dari SKK Migas per 31 Desember 2017 sebesar minus Rp368.357.330.572 diperoleh dari perhitungan saldo awal ekuitas bersih SKK Migas per 1 Januari 2017 (berdasarkan saldo per 31 Desember 2016 *audited*) sebesar minus Rp900.301.995.633, ditambah penyesuaian Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.008.710.882.482, ditambah ekuitas bersih SKK Migas pada Laporan Keuangan SKK MIGAS untuk BA 999.08 sebesar minus Rp124.360.460.337, dan ditambah ekuitas bersih BP MIGAS per tanggal 13 November 2012 sebesar minus Rp352.405.757.084.

- h. Aset Lainnya dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan PNS (Bapertarum PNS)
Aset Lainnya dari Bapertarum PNS per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp8.019.539.592.771 dan Rp7.211.731.495.881. Aset Lainnya dari Bapertarum PNS merupakan total ekuitas bersih yang ada pada BAPERTARUM-PNS per tanggal 31 Desember 2017. Sedangkan nilai Aset Lainnya dari Bapertarum-PNS per 31 Desember 2016 sebesar Rp7.211.731.495.881 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2016 *Unaudited*. Hal tersebut disebabkan karena sampai dengan batas akhir penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2016 *Audited*, Bapertarum PNS belum menyampaikan Laporan Keuangan Bapertarum PNS Tahun 2016 *Audited*.

Bapertarum PNS akan dilikuidasi pada tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Seluruh aset Bapertarum PNS dilikuidasi dan dikembalikan kepada PNS aktif dan PNS yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal dunia. Bapertarum PNS melaksanakan pengalihan aset dan hak peserta PNS secara bertahap dan menyelesaikannya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Bapertarum PNS telah mengubah basis akuntansi penyusunan dan pengukuran laporan keuangan Bapertarum PNS dan basis akuntansi kelangsungan usaha menjadi basis akuntansi likuidasi efektif tanggal 31 Desember 2017. Berita Acara Rapat Anggota Bapertarum PNS tanggal 20 Februari 2018 memberikan keputusan bahwa pengalihan aset dan hak peserta mulai bulan Maret 2018 berdasarkan Laporan Keuangan Bapertarum PNS per 31 Desember 2017. Pembayaran atau pembagian hak peserta dari rekening Bapertarum PNS. Hak peserta yang tidak diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun diserahkan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan PNS.

- i. Aset Lainnya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Aset Lainnya dari OJK (selaku satker BA 999.08) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.359.502.328.963 dan Rp4.037.953.720.694. Aset Lainnya dari OJK merupakan nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BA BUN 999.08, laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BA BUN 999.08.

D.2.36. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp231.496.409.561.736 dan Rp184.470.113.998.090.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Lainnya
dan Amortisasi
Aset Tak
Berwujud
Rp231,49
triliun*

1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp221.423.780.525.753 dan Rp177.174.396.032.052. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L	20.389.147.839.727	18.491.232.013.268
2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN	201.034.632.686.026	158.683.164.018.784
Jumlah	221.423.780.525.753	177.174.396.032.052

a. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L per 31 Desember sebesar Rp20.389.147.839.727. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada K/L terdiri dari:

- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp559.949.149.207;
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sebesar Rp29.980.044.461;
- 3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp19.797.985.135.464;
- 4) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Badan Layanan Umum sebesar Rp315.632.700;
- 5) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Badan Layanan Umum sebesar Rp917.877.895.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN per 31 Desember 2017 sebesar Rp201.034.632.686.026. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN terdiri dari:

- 1) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah sebesar Rp11.268.427.083.520, yaitu Akumulasi Penyusutan untuk Aset Eks Pertamina dan Aset Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp189.766.205.602.506, yaitu Akumulasi Penyusutan untuk Aset Eks Pertamina, Aset BMN *Idle*, Aset KKKS, dan Aset PKP2B.

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp10.072.629.035.983 dan Rp7.295.717.966.038. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada K/L	10.015.012.414.379	7.252.764.723.835
b. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada BUN	57.616.621.604	42.953.242.203
Jumlah	10.072.629.035.983	7.295.717.966.038

a. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada K/L

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada K/L per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp10.015.012.414.379 dan Rp7.252.764.723.835. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada K/L dirincikan sebagai berikut.

- 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp194.966.750;

- 2) Akumulasi Amortisasi Hak Cipta sebesar Rp15.865.985.028;
- 3) Akumulasi Amortisasi Paten sebesar Rp63.847.775.008;
- 4) Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp7.977.120.609.898;
- 5) Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp53.152.976.727.
- 6) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya sebesar Rp1.109.470.098.669;
- 7) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan sebesar Rp311.360.002.299.

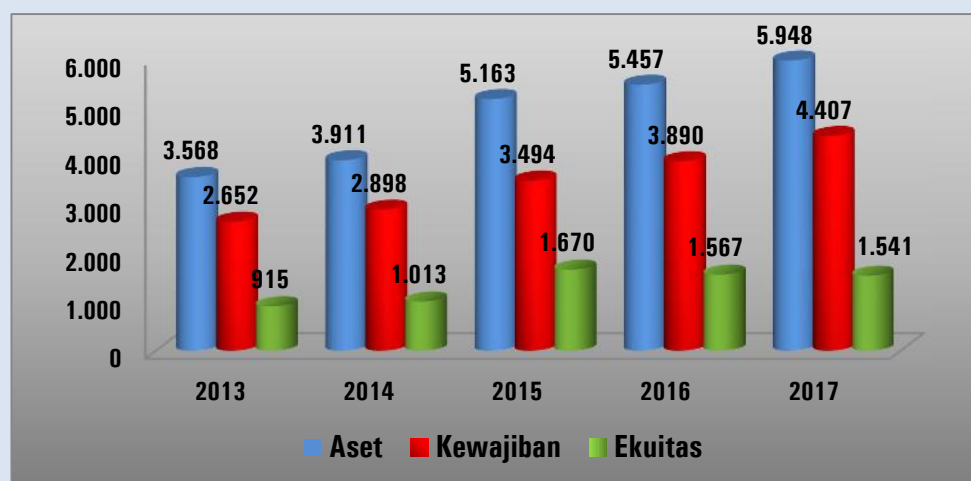
b. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada BUN

Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud pada BUN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp57.616.621.604 dan 42.953.242.203. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tersebut berasal dari BUN Pengelolaan Belanja Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Akumulasi Amortisasi *Software* sebesar Rp39.822.161.339;
- 2) Akumulasi Amortisasi Lisensi sebesar Rp17.794.460.265.

Boks IV
Perkembangan Aset Pemerintah Pusat

Pemerintah terus berkomitmen mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Untuk itu, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat juga diharapkan dapat memberikan gambaran ke masyarakat bahwa dari penggunaan dan pelaksanaan APBN juga berdampak kepada pergerakan aset dan kewajiban yang ada pada neraca Pemerintah Pusat. Pada lima tahun terakhir, pergerakan dan perkembangan Aset pemerintah menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Pada tahun 2013, total aset Pemerintah Pusat mencapai Rp3.568 triliun dan nilai ini telah meningkat pada setiap tahunnya, dan pada tahun 2017 telah mencapai Rp5.948 Triliun atau naik sebesar 66,7 persen. Perkembangan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pemerintah pada lima tahun terakhir tergambar pada grafik berikut.



Peningkatan Aset pemerintah terutama berasal dari Belanja Modal untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya, peningkatan penyertaan modal negara, peningkatan nilai investasi pemerintah, dan semakin tertibnya pencatatan Aset K/L. Peningkatan jumlah Aset Pemerintah menunjukkan pemerintah mengelola keuangan negara secara *prudent* dan

transparan, serta diharapkan dengan aset pemerintah tersebut dapat menjadi pendukung utama peningkatan layanan pemerintahan dan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.

Komponen Aset Pemerintah Pusat yang terbesar dan dengan perkembangan rata-rata yang terus meningkat adalah Investasi Jangka Panjang yang mencapai Rp2.604 Triliun atau 43,8 persen dari total aset, dan Aset Tetap yang mencapai Rp2.035 Triliun atau 34,2 persen dari total aset. Aset pemerintah berupa Aset Tetap dan Investasi Jangka Panjang tersebut menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan, Aset yang tergambarkan pada Neraca Pemerintah Pusat hanya menggambarkan aset yang dimiliki, digunakan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Untuk aset yang dimiliki, digunakan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, walaupun sebagian sumber dananya berasal dari Belanja Negara dalam APBN berupa Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, pencatatan Aset adalah berada pada Laporan Keuangan masing-masing Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, perlu dipahami bahwa APBN yang digunakan oleh Pemerintah Pusat selain berpengaruh pada peningkatan Aset yang tergambarkan pada Neraca Pemerintah Pusat, juga secara tidak langsung ikut mempengaruhi perkembangan Aset Pemerintah Daerah. Namun demikian, secara keseluruhan baik aset yang dicatat oleh Pemerintah Pusat, maupun oleh Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

Utang PFK Rp4,50 triliun

D.2.37. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.505.640.401.487 dan Rp5.301.758.765.389. Utang PFK merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga. Utang PFK sebesar Rp4.505.640.401.487 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang PFK	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Utang PFK DJPK	4.364.577.414.806	4.977.732.268.765
2. Utang PFK DJPB	141.062.986.681	324.026.496.624
Jumlah	4.505.640.401.487	5.301.758.765.389

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

Utang PFK DJPK per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.364.577.414.806 dan Rp4.977.752.268.765. Utang PFK DJPK sebesar Rp4.364.577.414.806 berasal dari hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok triwulan IV 2016 sebesar Rp35.097.274.250 dan hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok triwulan I 2018 sebesar Rp4.329.480.140.556.

2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Ditjen Perbendaharaan (DJPB)

Utang PFK DJPB per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp141.062.986.681 dan Rp324.026.496.624. Utang PFK DJPB sebesar Rp141.062.986.681 dirincikan menurut badan penyelenggara sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Badan Penyelenggara	Nilai
1.	BPJS Kesehatan	113.516.533.532
2.	Perum BULOG	157.972.645
3.	PT. Taspen (Persero)	26.770.522.176
4.	PT. ASABRI (Persero)	412.725.731
5.	BAPERTARUM-PNS	205.232.597
Jumlah		141.062.986.681

D.2.38. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp44,43
triliun*

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp44.438.234.758.803 dan Rp36.134.167.737.437. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2015 (Audited)
K/L	14.934.504.654.454	22.438.518.540.842
BUN	29.503.730.104.349	13.695.649.196.595
Jumlah	44.438.234.758.803	36.134.167.737.437

1. Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L

Utang Kepada Pihak Ketiga pada K/L per 31 Desember 2017 sebesar Rp14.934.504.654.454 berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas penyelesaian pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor/hak pihak ketiga yang belum dibayarkan, dan tertundanya pembayaran tagihan dari pihak ketiga.

Utang kepada Pihak Ketiga pada K/L dengan nilai cukup signifikan, antara lain:

- Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.454.161.190.355 sebagian besar merupakan kewajiban kepada pihak ketiga atas Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan belanja Listrik Telepon Gas Air (LTGA) yang masih harus dibayar.
- Kementerian Agama sebesar Rp1.098.066.469.844 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
- Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.492.156.224.516 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.
- Kementerian Keuangan sebesar Rp1.486.741.001.607 merupakan belanja yang masih harus dibayar dan hak pihak ketiga.

Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

2. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN

Utang Kepada Pihak Ketiga pada BUN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp29.503.730.104.349 dan Rp13.695.649.196.595, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. BA 999.01 (Pengelolaan Utang)	-	20.751.000.000
b. BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain)	4.514.126.912	2.687.200.000
c. BA 999.99 (BUN Transaksi Khusus)	15.470.004.533.664	13.063.632.417.049

d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	239.936.781.997	608.578.579.546
e. BA 999.03 (BUN PIP)	13.789.274.661.776	-
Jumlah	29.503.730.104.349	13.695.649.196.595

- a. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.01 (Pengelolaan Utang) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp20.751.000.000. Tidak ada Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.01. Terdapat pembayaran bunga SBN yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2018, penerbitan SP2D, penyediaan dana dan pelunasan dilakukan pada tanggal 3 Januari 2018 dan menjadi beban tahun 2018 menggunakan DIPA tahun anggaran 2018.
- b. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (BUN Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.514.126.912 dan Rp2.687.200.000. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 sebesar Rp4.514.126.912 merupakan utang kepada pihak ketiga pada Kementerian Keuangan, terdapat pada:
- 1) Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.981.237.400 terdiri dari:

No	Uraian		Nilai (Rp)
1	Pembayaran Tahap III atas Penyedia Jasa Hukum oleh Rajah dan Tann LPP	USD200,000 x Rp 13.548 (Nilai Kurs Tengah BI per 31 Desember 2017)	2.709.600.000
2	PPN	10% x USD200,000	270.960.000
3	Biaya Transfer valuta asing	USD 50 x Rp 13.548	677.400
Total Nilai Utang kepada Pihak Ketiga			2.981.237.400

- 2) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp239.770.820. Utang Kepada Pihak Ketiga tersebut merupakan Utang Satker Pengelola Dana Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua Barat kepada pihak ketiga (PD. Irian Bhakti) atas pekerjaan penyaluran beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat yang belum terbayarkan.
- 3) SKK Migas sebesar Rp1.293.118.692, merupakan pembayaran belanja perwakilan SKK Migas di daerah yang terlambat diproses.
- c. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp15.470.004.533.664 dan Rp13.063.632.417.049. Utang kepada Pihak Ketiga pada BA 999.99 sebesar Rp15.470.004.533.664 terdiri dari Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp6.062.601.535.454, Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Anggaran sebesar Rp9.405.611.924.212, dan Utang Kepada Pihak Ketiga pada Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp1.791.073.998.
- 1) Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perbendaharaan sebesar Rp6.062.601.535.454 terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Perbendaharaan	31 Desember 2017 (Audited)
1	Utang PPN RTGS/Swift Bank Indonesia	546.012.987
2	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Bagian Lancar <i>UPSL</i> 2007-2011	4.161.745.000.000
3	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Bagian Lancar <i>UPSL</i> 2012-2013	1.500.000.000.000
4	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Bagian Lancar <i>UPSL</i> 2014-2015	300.000.000.000
5	Utang kepada BPJS Kesehatan berupa Kekurangan Pencairan Dana luran Jamkes	31.425.601.167
6	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Kekurangan pencairan dana luran JKK Triwulan IV TA 2017	147.929.922

7	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Kekurangan pencairan dana luran JKm Triwulan IV TA 2017	34.125.686.376
8	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa Kekurangan pencairan dana luran JKm Triwulan III TA 2017 akibat Kenaikan Premi	34.024.754.279
9	Utang kepada PT Asabri (Persero) berupa kekurangan pencairan dana luran JKK Triwulan IV TA 2017	38.438.659
10	Utang kepada PT Asabri (Persero) berupa kekurangan pencairan dana luran JKm Triwulan IV TA 2017	62.814.398
11	Utang kepada Perum Bulog berupa Kekurangan Pencairan Selisih Harga Pembelian Beras Bulog Tahun 2016	482.798.858
12	Utang kepada PT Taspen (Persero) berupa kekurangan pembayaran dana kontribusi pensiun eks Kemenhub untuk pembayaran pensiun ke-13 bulan Oktober s.d. Desember TA 2017 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.498.808
Total		6.062.601.535.454

2) Utang Kepada Pihak Ketiga pada Ditjen Anggaran per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.405.611.924.212, terdiri dari:

(a) Utang kepada Pihak Ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Jumlahnya yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp7.696.132.786.165. Sumber dana pembayaran kewajiban kontraktual tersebut berasal dari penerimaan migas pada Rekening Migas Nomor 600.000411980. Utang Kepada Pihak Ketiga Migas dijelaskan sebagai berikut.

- (1) *Reimbursement* PPN per 31 Desember 2017 sebesar Rp366.949.823.328. Mekanisme pembayaran *reimbursement* PPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158/PMK.02/2016. KKKS menagihkan *reimbursement* PPN kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas meneruskan tagihan kepada Kementerian Keuangan (dhi. Direktur Jenderal Anggaran).
- (2) Pajak Penerangan Jalan Non PLN per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.729.116.271. Seperti halnya Pajak Air Tanah dan Air Permukaan, Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas juga merupakan pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi *assumed and discharged* yang diatur dalam *PSC*.
- (3) *DMO Fee* KKKS per 31 Desember 2017 sebesar USD158,399,722.74 atau ekuivalen sebesar Rp2.145.999.443.684 dengan kurs tengah BI sebesar Rp13.548/USD. Mekanisme pembayaran *DMO Fee* kepada KKKS mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pembayaran *DMO Fee* dan *Over/Under Lifting* di Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.02/2015. KKKS menagihkan *DMO Fee* kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi

tersebut, selanjutnya SKK Migas melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan (d.h.i Direktur Jenderal Anggaran).

- (4) *Underlifting* KKKS per 31 Desember 2017 sebesar USD380,735,937 atau ekuivalen sebesar Rp5.158.210.477.791 dengan kurs tengah BI sebesar Rp13.548/USD. *Underlifting* KKKS adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor apabila dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. *(Terdapat perbedaan sebesar Rp3.315 antara nilai face dengan perhitungan disebabkan pembulatan dalam mata uang asing)*

- (5) Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp15.243.925.092 dan Rp15.117.905.044 terdiri dari Utang Jangka Pendek Lainnya Migas. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari Rekening Migas Nomor 600.000411980 yang disebabkan salah setor PT Madura Mandiri Barat yang peruntukannya sebagai PPh Migas sebesar USD1,125,179 atau setara dengan Rp15.243.925.092 apabila dikonversi menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.548/USD. Terkait dana salah setor tersebut telah dilakukan pembahasan dengan instansi terkait sehubungan dengan permintaan pengembalian oleh PT Madura Mandiri Barat kepada Direktorat Jenderal Anggaran. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, permintaan pengembalian dana oleh PT Madura Mandiri Barat tidak dapat dipenuhi sebagaimana disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran No. S- 216/AG/2018 tanggal 5 Februari 2018.

- (b) Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.709.479.138.046. Utang kepada pihak ketiga panas bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi. Pada Neraca tahun 2017, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (*reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga definitive diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi	31 Desember 2017 (Audited)
Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi <i>Reimbursement</i> PPN	1.174.802.449.696
Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi - PBB Panas Bumi	0
Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi – <i>Reimbursement</i> PPN	368.675.356.156
Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi Diestimasi – Penggantian Bonus Produksi	166.001.332.194
Jumlah	1.709.479.138.046

- 3) Utang Kepada Pihak Ketiga pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.791.073.998. Pada 31 Desember 2017 saldo utang kepada

pihak ketiga berkurang sebesar Rp188.754.088 yang merupakan pembayaran utang tahun sebelumnya kepada organisasi *ASEAN Plus Three Macroeconomic Research Office* (AMRO). Di sisi lain, terdapat tagihan dari organisasi *Indian Ocean Rim Association* (IORA) sebesar USD250.000 dengan realisasi pembayaran sesuai SP2D sebesar USD248.000, namun *IORA* tidak menagihkan sisanya karena sifatnya merupakan hibah, sehingga tagihan dianggap lunas. Selisih sebesar USD2.000 diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain pada Laporan Operasional. Kurs yang digunakan adalah kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2017. (EUR1 = IDR16.173,62 dan USD1 = IDR13.548).

- d. Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp239.936.781.997 dan Rp608.578.579.546 atau mengalami penurunan sebesar Rp368.641.797.549 (60,57%). Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) sebesar Rp239.936.781.997 merupakan utang kepada pihak ketiga dari pemerintah kepada penerima dana SP2D yang timbul akibat terdapat dana SP2D yang gagal disalurkan akibat kesalahan pencantuman nama dan/atau nomor rekening penerima dana SP2D pada SPM yang belum dikoreksi dan disampaikan kembali kepada KPPN oleh satuan kerja terkait sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan penerimaan/pengeluaran non anggaran pihak ketiga karena kesalahan sistem perbankan.
- e. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 (BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah) per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp13.789.274.661.776 dan Rp0. Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.03 sebesar Rp13.789.274.661.776 merupakan nilai dana talangan yang telah dibayarkan oleh BUJT dan telah lolos verifikasi BPKP namun belum direalisasikan pengantiannya oleh LMAN.

Termasuk dalam kewajiban tersebut adalah hasil verifikasi *cost of fund* yang terbit pada tahun 2018. Informasi *cost of fund* tersebut merupakan *adjusting event after the reporting date*.

Hasil verifikasi tahap I (penggantian dengan dana investasi APBN-P TA 2016)	12.408.109.143.323
Hasil verifikasi tahap II (penggantian dengan dana investasi APBN-P TA 2016)	2.202.572.578.021
Hasil verifikasi tahap II (penggantian dengan dana investasi APBN-P TA 2017)	10.662.476.499.199
Hasil verifikasi cost of fund	238.348.437.412
Total hasil verifikasi	25.511.506.657.955
(-) Realisasi penggantian s.d. 31 Desember 2017	11.722.231.996.179
Saldo Kewajiban	13.789.274.661.776

D.2.39. Utang Biaya Pinjaman

*Utang Biaya
Pinjaman
Rp57,63 triliun*

Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp57.638.432.861.401 dan Rp52.125.297.935.737, merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Utang Biaya Pinjaman	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Pada BUN:		
Utang Bunga SBN	53.851.009.055.387	48.731.358.514.658
Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	54.839.859.751	56.270.983.681

Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri	3.732.502.361.236	3.337.621.476.609
Subtotal	57.638.351.276.374	52.125.250.974.948
Pada KL:		
Utang Biaya Pinjaman pada Kemenlu	81.585.027	46.960.789
Jumlah BUN + KL	57.638.432.861.401	52.125.297.935.737

D.2.40. Utang Subsidi

*Utang Subsidi
Rp32,19 triliun*

Utang Subsidi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp32.192.914.590.833 dan Rp2.576.637.802.426. Kenaikan Utang Subsidi tersebut Rp29.616.276.788.407 atau 1.149% lebih besar dari Utang Subsidi per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.576.637.802.426. Kenaikan Utang Subsidi yang signifikan per 31 Desember 2017 antara lain disebabkan adanya reklasifikasi Utang Subsidi, yang semula Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek. Rekalsifikasi Utang Subsidi tersebut disebabkan dampak kebijakan Pemerintah dalam mengalokasikan sebagian penyelesaian Kurang Bayar Subsidi/PSO pada APBN TA 2018. Selain itu, kenaikan Utang Subsidi juga dipengaruhi oleh adanya Utang Subsidi Estimasi terhadap tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud.

Reklasifikasi Utang Subsidi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 264/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi. Berikut penjelasan dari reklasifikasi Utang Subsidi:

1. Nilai per Utang Subsidi yang dilakukan reklasifikasi

Utang Jangka Panjang Subsidi yang dilakukan reklasifikasi ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek dikarenakan telah dianggarkan pada APBN TA 2018 sebesar Rp26.143.733.816.487 yang terdiri dari:

- Utang Subsidi BBM dan LPG sebesar Rp12.300.000.000.000
- Utang Subsidi Listrik sebesar Rp5.300.000.000.000
- Utang Subsidi Pupuk sebesar Rp7.950.489.339.000
- Utang Subsidi Pangan sebesar Rp140.372.114.951
- Utang PSO PT Peln sebesar Rp78.715.467.702
- Utang PSO PT KAI sebesar Rp110.501.878.520
- Utang Subsidi Kredit Program Rp15.905.799.630
- Utang Subsidi IJP KUR Rp10.545.216.684
- Utang Subsidi Uang Muka Perumahan Rp237.204.000.000

Kontra Akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp237.204.000.000 yang terdapat pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dimana merupakan dana yang sudah terbit SP2D nya per tanggal pelaporan, tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL per 31 Desember 2017

2. Nilai Utang Subsidi Estimasi

Terdapat Utang Subsidi Estimasi dikarenakan terdapat tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud sebesar Rp6.049.180.774.346, antara yaitu sebagai berikut.

- Utang Subsidi Bunga Air Bersih sebesar Rp2.586.025.974
- Utang Subsidi Selisih Bunga Perumahan sebesar Rp132.515.568.895

- c. Utang Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp46.340.000.000
- d. Utang Subsidi Bunga KUR dan IJP KUR sebesar Rp5.867.739.179.477

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga tahun 2017 dan 2016 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Kementerian Keuangan	17.615.905.799.630	77.120.651.474
2. Kementerian Pertanian	7.950.489.339.000	0
3. Kementerian Perhubungan	189.217.346.222	0
4. Kementerian Sosial	140.372.114.951	0
5. Kementerian PU dan PR	418.645.594.869	170.707.912.401
6. Kementerian Koperasi dan UKM	5.878.284.396.161	2.328.809.238.551
Jumlah	32.192.914.590.833	2.576.637.802.426

1. Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan

Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp17.615.905.799.630 dan Rp77.120.651.474. Rincian utang jangka pendek disajikan pada tabel berikut.

(dalam rupiah)

Eselon I	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. Ditjen Anggaran	17.600.000.000.000	0
b. Ditjen Perbendaharaan	15.905.799.630	77.120.651.474
Jumlah	17.615.905.799.630	77.120.651.474

a. Utang Subsidi pada DJA

Berdasarkan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan BA 999.07 Tingkat UAP BUN TA 2017, bahwa sesuai rekomendasi Inspektorat V, Itjen Kemenkeu, terdapat reklasifikasi Utang Subsidi Jangka Panjang menjadi Utang Subsidi Jangka Pendek sebesar Rp17.600.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah
	Utang Subsidi Jangka Pendek	17.600.000.000.000
1	Kurang Bayar Subsidi BBM dan LPG	12.300.000.000.000
2	Kurang Bayar Subsidi Listrik	5.300.000.000.000

b. Utang Subsidi pada Ditjen Perbendaharaan

Utang Subsidi pada Ditjen Perbendaharaan berupa Utang Subsidi Kredit Program per 31 Desember 2017 sebesar Rp15.905.799.630. Utang tersebut terdiri dari:

- 1) KKPE sebesar Rp10.673.523.227
 - 2) KPNRP sebesar Rp3.499.569.009
 - 3) KUPS sebesar Rp1.664.099.615
 - 4) SSRG sebesar Rp17.491.443
- Risk Sharing KKPE sebesar Rp51.116.336.

2. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian

Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp7.950.489.339.000 dan Rp0. Utang Subsidi Kementerian Pertanian per 31 Desember 2017 berasal dari adanya reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Subsidi

ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek terkait kurang bayar Subsidi Pupuk berdasarkan LHP BPK dimana telah dianggarkan di APBN TA 2018 sebesar Rp7.950.489.339.000.

3. Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan

Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp189.217.346.222 dan sebesar Rp0. Utang Subsidi Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2017 antara lain disebabkan:

- a) Dilakukan reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Subsidi ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek terkait kurang bayar PSO KAI berdasarkan LHP BPK TA 2015 sebesar Rp108.276.981.441 dan TA 2016 sebesar Rp2.224.897.079 yang telah dianggarkan di APBN TA 2018.
- b) Dilakukan reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Subsidi ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek terkait kurang bayar PSO PT Pelni berdasarkan LHP BPK TA 2016 sebesar Rp78.715.467.702 yang telah dianggarkan di APBN TA 2018.

4. Utang Subsidi pada Kementerian Sosial

Utang Subsidi pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp140.372.114.951 dan Rp0. Utang Subsidi pada Kementerian Sosial per 31 Desember 2017 sebesar Rp140.372.114.951 disebabkan adanya reklasifikasi dari Utang Jangka Panjang Subsidi ke Utang Subsidi pada Kewajiban Jangka Pendek berupa kurang bayar Subsidi Pangan Program Raskin Tahun 2016 berdasarkan hasil audit BPK sebesar Rp140.372.114.951 yang telah dianggarkan di APBN TA 2018 pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan rincian subsidi Raskin Tahun 2016 pada Perum Bulog sebesar Rp138.114.658.450 dan margin fee TA 2016 sebesar Rp2.257.456.500.

5. Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Utang Subsidi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp418.645.594.869 dan Rp170.707.912.401. Jumlah utang subsidi tersebut lebih besar Rp247.937.682.468 dari utang subsidi per 31 Desember 2016. Utang subsidi per 31 Desember 2017 terdiri dari:

- a. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan per 31 Desember 2017 sejumlah Rp416.059.568.895, terdiri dari kontra akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp237.204.000.000 dan Utang Subsidi Estimasi sebesar Rp178.855.568.895. Dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp237.204.000.000 merupakan dana yang sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL per 31 Desember 2017.
- b. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya
Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.586.025.974 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.839.383.655. Utang Subsidi pada Direktorat Jenderal Cipta berupa Estimasi Tagihan Bunga Subsidi PDAM disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

PDAM	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Kota Bogor	91,264,776	138,344,711
Kota Ciamis	68,848,328	103,269,272
Kab Lombok Timur	5,975,918	22,997,337
Kota Banjarmasin	1,011,838,235	1,207,573,529
Kota Malang	108,103,670	213,935,374
Kota Denpasar	266,286,950	301,995,928
Kota palopo	240,855,898	164,335,969
Kab. Cilacap	24,727,422	0
Kab Giri Menang	564,991,874	450,748,410
Kab Banyumas	203,132,904	236,183,125
Jumlah	2,586,025,974*	2,839,383,655

*selisih Rp1 karena pembulatan

6. Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM

Utang Subsidi pada Kementerian Koperasi dan UKM per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.878.284.396.161 dan Rp2.328.809.238.551. Utang subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.878.284.396.161 dapat dirinci sebagai berikut.

- └ Utang Subsidi IJP KUR sebesar Rp10.545.216.684
- └ Utang Subsidi IJP KUR Estimasi sebesar Rp1.178.702.404.970
- └ Utang Subsidi Bunga KUR Estimasi sebesar Rp4.689.036.774.507

D.2.41. Utang Transfer

*Utang Transfer
Rp26,09 triliun*

Utang Transfer per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp26.096.171.127.047 dan Rp27.295.376.677.939. Utang Transfer tersebut terdiri dari Kewajiban TKD Diestimasi sebesar Rp26.096.171.125.691 dan Kewajiban TKD sebesar Rp1.356. Pada Tahun 2015, Kewajiban Transfer Ke Daerah (TKD) Diestimasi dan Kewajiban TKD disajikan sebagai bagian dari Utang Kepada Pihak Ketiga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-311/PB/2015 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, pada tahun 2016 Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar tersebut disajikan sebagai bagian dari Utang Transfer.

1. Kewajiban TKD (Dana Bagi Hasil)

Kewajiban TKD merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul dari timbulnya kewajiban atas pemerintah daerah dikarenakan adanya kurang bayar TKD periode sebelumnya. Kewajiban TKD untuk DBH per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.356. Sedangkan untuk rincian lengkap didapat dari kurang bayar periode lampau berdasarkan terbitnya PMK 162 Tahun 2016 yang telah dilakukan penyesuaian pelunasan kurang bayar dalam PMK 19/PMK.07/2017 sebesar Rp10.856.892.466.000 dan berdasarkan PMK 144/PMK.07/2017 terdapat pelunasan kurang bayar sebesar Rp2.994.286.153.000. Kewajiban TKD dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Kurang Bayar s.d. 2015	Pelunasan PMK 19/PMK.07/2017	Pelunasan PMK 144/PMK.07/2017	Sisa Kurang Bayar
Kurang Bayar PPH Pasal 21 TA 2015	3.370.205.721.532	3.370.205.721.532	0	
Kurang Bayar PPh Pasal 25 TA 2015	644.104.459.596	644.104.459.596	0	
Kurang Bayar PBB Bagi Rata TA 2015	68.661.285.685	68.661.285.685	0	
Kurang Bayar PBB Bag Daerah TA 2015	2.902.420.605.827	1.370.246.661.011	1.532.173.944.000	816
Kurang Bayar Biaya Pemungutan PBB TA 2015	98.315.249.236	98.315.249.236	0	
Kurang Bayar CHT TA 2015	3.930.228.940	3.930.228.940	0	
Kurang Bayar Kehutanan IIUPH TA 2015	9.094.263.483	9.094.263.483	0	
Kurang Bayar Kehutanan PSDH TA 2015	168.119.636.462	168.119.636.462	0	
Kurang Bayar Kehutanan DR TA 2015	231.431.029.433	231.431.029.433	0	
Kurang Bayar Pertum Iuran Tetap TA 2015	83.318.599.087	83.318.599.087	0	
Kurang Bayar Pertum Royalty TA 2015	277.998.829.442	277.998.829.442	0	
Kurang Bayar Minyak Bumi TA 2015	1.361.107.856.206	1.361.107.856.206	0	
Kurang Bayar Gas Bumi TA 2015	4.388.304.341.990	2.926.192.132.600	1.462.112.209.000	390
Kurang Bayar Panas Bumi Iuran Tetap TA 2015	5.265.261.388	5.265.261.388	0	
Kurang Bayar Panas Bumi Set. Bag. Pem. TA 2015	238.901.252.049	238.901.251.899	0	150
Jumlah	13.851.178.620.356	10.856.892.466.000	2.994.286.153.000	1.356

2. Kewajiban TKD Estimasi (Dana Bagi Hasil)

Kewajiban TKD Diestimasi (TKDD) per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp26.096.171.125.691. Kewajiban TKD Estimasi Satker DBH merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul dari timbulnya hak atas daerah-daerah akibat perbedaan realisasi penerimaan pajak dan PNPB Sumber Daya Alam (yang telah diperiksa BPK) dengan besaran DBH Pajak dan SDA yang sudah disalurkan. Kewajiban TKD Diestimasi dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)
Kewajiban TKD Diestimasi yang Belum Direklasifikasi	85.645.026.050
Kewajiban TKDD Lainnya TA 2017	25.622.927.477.744
Tambahan Estimasi Kurang Bayar DBH TA 2017	387.598.621.897
Jumlah	26.096.171.125.691

Kewajiban TKD Diestimasi yang Belum Direklasifikasi per 31 Desember 2016 (Nota Dinas usulan koreksi ND-134/PK.2/2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Dana Perimbangan), namun belum direklasifikasi menjadi kewajiban TKD Satker DBH pada TA 2017 berdasarkan terbitnya PMK 187/PMK.07/2017 sebagai Kurang Bayar TA 2016 sebesar Rp85.645.026.050. Rincian lebih lengkap sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kewajiban KB DBH - Diestimasi TA 2017	Estimasi
Estimasi Kurang Bayar DBH Kehutanan PSDH TA 2012	2.181.793
Estimasi Kurang Bayar Kehutanan IIUPH TA 2012	1.418.721.780
Estimasi Kurang Bayar Kehutanan TA 2013	71.162.060.861
Estimasi Kurang Bayar Kehutanan IIUPH TA 2015	4.593.392
Estimasi Kurang Bayar Kehutanan DR TA 2015	13.057.468.224
Jumlah	85.645.026.050

Selain itu terdapat Kewajiban TKDD Lainnya TA 2017 sebesar Rp25.622.927.477.744. Nilai tersebut berdasarkan penerimaan PNPB dan Pajak yang seharusnya dibagihasikan berdasarkan pada TA 2017 berdasarkan data penerimaan tahun berjalan yang disesuaikan dengan realisasi penyaluran DBH per 31 Desember 2017. Rincian lebih lengkap sebagai berikut.

No	Jenis	Realisasi Buku Merah	Per 31 Desember 2017	Utang Estimasi
	1	2	3	4=2-3
1	Estimasi DBH PPh Pasal 21	23.569.954.663.020	20.727.656.943.000	2.842.297.720.020
2	Estimasi DBH PBB Bagi Rata	1.703.244.275.599	1.383.647.334.400	319.596.941.199
3	Estimasi DBH PBB BD untuk Provinsi	2.759.255.726.471	1.709.266.944.360	1.049.988.782.111
4	Estimasi DBH PBB DB untuk Kab/Kota	11.037.022.905.884	6.837.067.777.440	4.199.955.128.444
5	Estimasi DBH PBB Biaya/Upah pungut Kab/Kota	482.267.506.412	295.179.823.400	187.087.683.012
6	Estimasi DBH Minyak Bumi 15%	9.201.779.901.166	6.027.714.000.000	3.174.065.901.166
7	Estimasi DBH Minyak Bumi 0,5%	306.725.996.706	200.923.800.000	105.802.196.706
8	Estimasi DBH Gas Bumi 30%	6.346.988.849.069	3.108.228.900.000	3.238.759.949.069
9	Estimasi DBH Gas Bumi 0,5%	105.783.147.484	51.803.815.000	53.979.332.484
10	Estimasi DBH Minerba - Royalti	18.598.096.793.519	9.411.348.164.152	9.186.748.629.367
11	Estimasi DBH Kehutanan- PSDH	734.619.089.478	299.683.522.350	434.935.567.128
12	Estimasi DBH Kehutanan- Dana Reboisasi	691.941.729.488	317.077.778.250	374.863.951.238
13	Estimasi DBH Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	727.330.390.743	367.588.248.600	359.742.142.143
14	Estimasi DBH Panas Bumi- Iuran Tetap	18.072.611.932	11.567.279.700	6.505.332.232
15	Estimasi DBH Panas Bumi - Iuran Produksi	1.200.044.733		1.200.044.733
16	Estimasi DBH Perikanan	392.940.307.926	342.000.000.000	50.940.307.926
17	Estimasi DBH Cukai Hasil Tembakau	2.954.401.419.266	2.917.943.550.500	36.457.868.766
	Total	79.631.625.358.896	54.008.697.881.152	25.622.927.477.744

Selain kewajiban sebagaimana pada tabel diatas, telah ditetapkan juga Kurang Bayar DBH TA 2016 dan Tambahan Kurang Bayar DBH sebelum TA 2016 yang baru teridentifikasi kementerian terkait pada TA 2017. Kewajiban akibat kurang bayar tersebut ditetapkan melalui PMK No. 187/PMK.07/2017. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dalam PMK No. 187/PMK.07/2017 ditetapkan sebesar Rp16.389.383.550.150. Selain itu terdapat tambahan estimasi utang DBH TA 2015 dan 2016 sebesar Rp387.598.621.897, yang bersumber dari :

1. Koreksi perhitungan Kurang Bayar DBH 2016 dalam PMK No.187/PMK.07/2017 sebesar Rp26.753.819.450,-
 2. Tambahan Estimasi Kurang Bayar TA 2016 sebesar Rp71.089.761.909,- dan
 3. Tambahan Estimasi Kurang Bayar TA 2015 sebesar Rp289.755.040.538,-
- Rincian dapat dilihat pada tabel berikut .

(dalam rupiah)

Jenis Penerimaan	Estimasi KB DBH Tahun 2015	Estimasi KB DBH TA 2016	Koreksi Kurang Bayar DBH PMK 187/PK.07/2017	Total Tambahan Estimasi Kurang Bayar
1. Migas			26.753.819.450	26.753.819.450
a. Minyak bumi			19.485.382.647	19.485.382.647
) 15%			18.856.821.917	18.856.821.917
) 0,5%			628.560.730	628.560.730
) DBH Otsus Migas Aceh				-
) DBH Otsus Migas Papua				-
b. Gas bumi			7.268.436.803	7.268.436.803
) 30%			7.149.270.036	7.149.270.036
) 0,5%			119.166.767	119.166.767
) DBH Otsus Migas Aceh				-
) DBH Otsus Migas Papua				-
2. Minerba	288.069.988.871	27.323.669.273		315.393.658.144
) Iuran Tetap	77.475.602.993	1.834.044.238		79.309.647.231
) Royalti	210.594.385.878	25.489.625.035		236.084.010.913
3. Kehutanan	1.685.051.667	43.766.092.636		45.451.144.303
) IIUPH		16.440.906.631		16.440.906.631
) PSDH	1.685.051.667	2.592.787.271		4.277.838.938
) DR		24.732.398.734		24.732.398.734
Total	289.755.040.538	71.089.761.909	26.753.819.450	387.598.621.897

*Bagian Lancar
Utang Jangka
Panjang
Rp272,70
triliun*

D.2.42. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp272.701.715.607.467 dan Rp181.089.944.300.968 merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai bersih Bagian Lancar Utang Jangka Panjang sebesar Rp272.684.344.284.467 yang berasal dari nilai Bruto sebesar Rp272.701.715.607.467 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp52.370.697.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp34.999.374.000.

Discount dan *Premium* yang belum diamortisasi (*Unamortized Discount* dan *Unamortized Premium*) atas seri-seri SBN yang diterbitkan sebelum Tahun 2017, perhitungan nilainya yang disajikan dalam LKPP Tahun 2017 (Audited) menjadi saldo awal *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi untuk tahun-tahun selanjutnya.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
BUN:		
Bagian Lancar UJP Pinjaman LN	72.242.010.438.961	65.854.121.375.615
Bagian Lancar UJP Pinjaman DN	1.367.467.507.395	781.918.346.346
Bagian Lancar SBN	199.021.153.186.177	114.379.703.711.065
Subtotal Bagian Lancar BUN	272.630.631.132.533	181.015.743.433.026
KL:		
Bagian Lancar UJP pada Kemenlu	71.084.474.934	74.200.867.942
Jumlah Bagian Lancar	272.701.715.607.467	181.089.944.300.968
<i>Unamortized Discount</i>	(52.370.697.000)	(1.394.289.000)
<i>Unamortized Premium</i>	34.999.374.000	96.427.268.000
Nilai Bersih	272.684.344.284.467	181.184.977.279.968

D.2.43. Utang SBN Jangka Pendek

*Utang SBN
Jangka Pendek
Rp124,49
triliun*

Jumlah SBN Jangka Pendek Bruto per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp124.497.290.000.000 dan Rp48.740.000.000.000, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek sebesar Rp122.842.328.897.000 merupakan nilai bersih dari nilai Bruto sebesar Rp124.497.290.000.000 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp1.654.961.103.000 dan *Unamortized Premium* sebesar Rp0.

D.2.44. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp17,45 triliun*

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp17.452.254.907.564 dan Rp21.105.615.601.681 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang diterima dari penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (audited)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir pada Kementerian Keuangan.	17.295.682.218.033	20.902.612.152.597
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian Pertanian	-	1.000.000
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	156.409.158.398	202.906.017.951
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada LIPI	17.100.000	-
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Badan Pemeriksa Keuangan	50.000.000	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya DJPB (BA 999.99)	96.431.133	96.431.133
Jumlah	17.452.254.907.564	21.105.615.601.681

*Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp15,54 triliun*

D.2.45. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp15.549.048.517.692 dan Rp13.683.518.972.548 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga.
(dalam rupiah)

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
K/L	15.422.121.457.965	13.496.790.769.043
BUN	126.927.059.727	186.728.203.505
Jumlah	15.549.048.517.692	13.683.518.972.548

1. Pendapatan Diterima di Muka yang berada di K/L sebesar Rp15.422.121.457.965 sebagian besar saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp11.660.741.708.117 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi dan BP Batam sebesar Rp1.169.990.012.803. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada Lampiran 26.
2. Jumlah Pendapatan Diterima di Muka yang berada di BUN sebesar Rp126.927.059.727 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Pendapatan Diterima di Muka pada BUN terdiri dari:
 - a. Pendapatan Diterima di Muka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI adalah sebesar Rp6.290.156.110.
 - 1) Aset eks PT PPA kepada PT Blo Farma (Persero) selama 3 tahun yang dimulai tanggal 5 Agustus 2015 sebesar Rp20.821.340.000. Sehingga sampai dengan 31 Desember 2017 nilai sewa yang masih menjadi kewajiban Kementerian Keuangan selama 8 bulan adalah sebesar Rp4.626.964.444;
 - 2) Aset eks BPPN kepada Srijati Pohan selama 3 tahun yang dimulai tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp108.000.000. Sehingga nilai sewa yang masih menjadi kewajiban Kementerian Keuangan adalah selama 26 bulan adalah sebesar Rp78.000.000;
 - 3) Transaksi sewa atas aset eks PT PPA kepada Srijati Pohan selama 5 tahun yang dimulai tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp125.000.000. Sehingga nilai sewa yang masih menjadi kewajiban Kementerian Keuangan adalah selama 50 bulan adalah sebesar Rp104.166.667;
 - 4) Transaksi sewa atas aset eks PT PPA kepada Bank Nusa Parahyangan selama 3 tahun yang dimulai tanggal 10 April 2017 sebesar Rp1.350.000.000. Sehingga nilai sewa yang masih menjadi kewajiban Kementerian Keuangan adalah selama 27 bulan adalah sebesar Rp1.012.500.000;
 - 5) Transaksi sewa atas aset eks PT PPA kepada CV Jaya Agung selama 2 tahun belum dilakukan perjanjian akan tetapi telah menyetorkan biaya sewanya, sehingga nilai sewa yang masih menjadi kewajiban Kementerian Keuangan adalah selama 27 bulan adalah sebesar Rp450.000.000.
 - 6) Utang Perwalian/PFK Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL sebesar Rp18.524.999.
 - b. Pendapatan Diterima di Muka yang berasal dari sewa aset KKKS Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp101.648.323.863 merupakan pendapatan yang diterima dari sewa pemanfaatan BMN yang berasal dari KKKS namun belum

dirasakan pemanfaatannya oleh pihak ketiga sebagaimana lampiran II laporan keuangan ini.

- c. Pendapatan Diterima di Muka yang berasal dari pembayaran pihak ketiga untuk kompensasi ABMA/T namun belum dapat diterbitkan KMK pelepasan ABMA/T sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp1.843.115.200 dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) ABMA/T Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo sebesar Rp100.000.000;
 - 2) ABMA/T SD, SMP, SMA Gajah Mada Medan sebesar Rp827.529.000;
 - 3) ABMA/T SD Dewi Sartika SMP Berdikari Serdang Bedagai sebesar Rp249.406.000;
 - 4) ABMA/T Tempat Tinggal Munawar dan Toko Susi (dh. SDN Tonjong I, II, III) Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp49.450.000;
 - 5) ABMA/T SMK Kerabat Kita Bumiayu dan Koperasi SMK Kerabat Kita Bumiayu (dh. SMP, SMA, SMEA Kerabat Kita, Gedung Bioskop Sena dan Perumahan Penduduk) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp616.730.200.
- d. Saldo pendapatan diterima di muka sebesar USD1,265,534.73 atau setara dengan Rp17.145.464.554 yang dikonversi menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2017 sebesar Rp13.548/USD merupakan penerimaan di Rekening Migas Nomor 600.000411980 yang belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut, namun atas penerimaan tersebut telah terhitung sebagai penerimaan yang telah dipindahbukukan ke Rekening KUN Nomor 600.502411980. Pendapatan diterima dimuka tersebut terdiri dari pendapatan yang berasal dari tahun 2016 sebesar \$294 dan tahun 2017 sebesar \$1.265.241.

D.2.46. Pendapatan yang Ditangguhkan

*Pendapatan
Yang
Ditangguhkan
Rp33,56 miliar*

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp33.564.572.441 dan Rp834.208.053 merupakan pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas yang belum dapat diakui sebagai PNBK karena *earning process*-nya belum selesai.

Pendapatan yang Ditangguhkan pada BA 999.99 sebesar \$2.477.456 atau setara dengan Rp33.564.572.441 apabila dikonversi menggunakan kurs tengah BI per 30 Desember 2017 Rp13.548/USD merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per 31 Desember 2017, yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut dengan rincian sebagai berikut (*Selisih antara angka face dengan rincian sebesar Rp1.447 dikarenakan pembulatan dalam mata uang asing*).

- a. Transaksi tahun 2017 sebesar \$2,420,359
- b. Transaksi tahun 2016 sebesar \$896
- c. Transaksi tahun 2015 sebesar \$2,002
- d. Transaksi tahun 2014 sebesar \$10,600
- e. Transaksi tahun 2013 sebesar \$43,598

Pendapatan yang Ditangguhkan sebesar Rp723.814.213.395 pada BA 999.02 merupakan kontra akun dari Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus yang digunakan untuk mencatat penerimaan hibah yang telah masuk ke Rekening Khusus namun NoD-nya belum diterima. Nantinya, setelah NoD diterima, Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus akan direklas sehingga akan menjurnal balik akun Pendapatan yang Ditangguhkan dan memunculkan akun pengakuan pendapatan hibah. Sesuai dengan

kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP, Pendapatan yang Ditangguhkan senilai Rp723.814.213.395 direklas menjadi Pendapatan Hibah di LO LKPP.

*Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp16,49 miliar*

D.2.47. Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp16.494.539.212 dan Rp76.693.939.958, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
K/L	71.046.171.406	82.302.142.358
BUN	20.847.698	15.117.905.044
Reklasifikasi ke Pendapatan Pajak	(54.572.479.892)	(20.726.107.444)
Jumlah	16.494.539.212	76.693.939.958

1. Utang Jangka Pendek Lainnya yang berada di K/L sebesar Rp71.046.171.406 antara lain berupa pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas negara, utang pajak yang bersumber dari non APBN, utang satker BLU dan Perguruan Tinggi yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Utang Jangka Pendek Lainnya di K/L yang nilainya signifikan antara lain pada Polri sebesar Rp24.104.024.451, Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.660.097.620, pada Kementerian Sekretariat Negara Rp7.218.551.826.
2. Utang Jangka Pendek lainnya pada BUN sebesar Rp20.847.698 merupakan utang pajak bendahara yang belum di setor pada BA 999.08.
3. Dari Utang Jangka Pendek lainnya yang berasal dari pungutan pajak yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan ke kas negara dilakukan reklasifikasi dari Utang ke pendapatan pajak pada Laporan Operasional sebesar Rp54.572.479.892.

*Utang Jangka
Panjang DN
Perbankan
Rp4,41 triliun*

D.2.48. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.414.348.818.183 dan Rp4.350.662.878.199. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan yang terdiri dari BUMN dan pinjaman dari perusahaan daerah yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
BJB	664.290.892.406	978.590.505.687
Bank Mandiri	712.234.857.729	1.002.719.448.501
PT BNI (Persero)	2.202.502.235.666	1.293.430.905.493
PT BRI (Persero)	165.593.738.400	228.882.092.415
Bank Jateng	130.154.840.943	117.194.937.584
Bank DKI	539.572.253.039	729.844.988.519
Jumlah^{*)}	4.414.348.818.183	4.350.662.878.199

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri Rp2.871,22 triliun

D.2.49. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp2.871.222.232.762.317 dan Rp2.570.709.481.830.380 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Nilai bersih Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.888.351.691.068.317 berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.871.222.232.762.317 dikurangi *Unamortized Discount* sebesar Rp20.297.983.982.000 dan ditambah *Unamortized Premium* sebesar Rp37.427.442.288.000.

Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri pada tahun 2017 termasuk penambahan utang jangka panjang SBN Dalam Negeri senilai Rp6.569.839.177 yang berasal dari kelebihan pembayaran angsuran pokok SRBI-01/MK/2003 sesuai surat Gubernur BI kepada Menteri Keuangan Nomor 19/21/GBI-Dkeu/Srt/B tanggal 23 Mei 2017. *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi (*Unamortized Discount* dan *Unamortized Premium*) atas seri-seri SBN yang diterbitkan sebelum Tahun 2017, perhitungan nilainya yang disajikan dalam LKPP Tahun 2017 (Audited) menjadi saldo awal *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Nilai *discount* dan *premium* disajikan secara rinci yang termuat pada Lampiran 27.

Pembiayaan SBN Ditangguhkan Rp53,89 triliun

D.2.50. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan

Jumlah Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp53.890.489.260.000 dan Rp46.782.035.830.000. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan tersebut berasal dari total *cash proceeds* penerbitan SBN Valas pada bulan Desember 2017 dengan menggunakan kurs tanggal pelaporan yang diperuntukkan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun anggaran 2018 (*Prefunding*).

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT Rp9,65 triliun

D.2.51. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

Saldo Utang Kepada Dana pensiun dan THT per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah Rp9.657.081.539.263 dan Rp15.618.826.539.263.

Pada tahun 2017, tidak terdapat penambahan *UPSL* yang diakui oleh pemerintah karena tidak ada penetapan *UPSL* baru oleh Menteri Keuangan sepanjang tahun tersebut. Jumlah Utang Kepada Dana Pensiun dan THT per 31 Desember 2017 mengalami penurunan dibandingkan saldo per 31 Desember 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya reklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi utang jangka pendek karena sejumlah nilai tersebut dibayarkan pada tahun 2018.

Utang kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) per 31 Desember 2017 sebesar Rp 9.657.081.539.263 yang terdiri dari *UPSL* tahun 2012-2013 sebesar Rp 3.057.126.930.000 dan *UPSL* tahun 2014-2015 sebesar Rp 6.599.954.609.263.

Pengaturan mengenai *Unfunded Past Service Liability (UPSL)* Program THT diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero), dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota Polri, Dan PNS Kementerian Pertahanan/Polri Yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut *UPSL* yang diakui adalah *UPSL* yang terjadi akibat kondisi sebagai berikut.

- perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua
- kenaikan tabel gaji pokok yang menjadi dasar pembayaran manfaat Program Tabungan Hari Tua; dan/atau
- penambahan peserta baru yang tanggal penempatan berbeda dengan tanggal pengangkatan.

Dalam PMK diatur bahwa PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) menyampaikan hasil perhitungan *UPSL* kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan menjadi dasar pengakuan *UPSL* sebagai kewajiban oleh Pemerintah. Metode perhitungan *UPSL* yang digunakan oleh aktuaris PT Taspen (Persero) dan/atau PT Asabri (Persero) terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan kepada Menteri Keuangan. *UPSL* program THT yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah sebagai berikut.

No	UPSL	Surat Penetapan	Nilai
1	UPSL PT Taspen (Persero) 2007-2011	S-160/MK.02/2013 Tgl 4 Maret 2013	Rp19.161.745.000.000
2	UPSL PT Asabri (Persero) 2001-2012	S-884/MK.02/2014, Tgl 30 Desember 2014	Rp1.087.341.000.000
3	UPSL PT Taspen (Persero) 2012-2013	S-912/MK.02/2014, Tgl 31 Desember 2014	Rp7.557.126.930.000
4	UPSL PT Taspen (Persero) 2014-2015	S-840/MK.02/2016 tgl 30 September 2016	Rp6.899.954.609.263
Jumlah			Rp34.706.167.539.263

Sedangkan skema dan pembayaran yang telah dilakukan untuk tiap *UPSL* tersebut adalah sebagai berikut.

1. *UPSL* PT Taspen (Persero) Tahun 2007-2011

Atas *UPSL* ini, pada tanggal 21 Desember 2012 dan 29 Mei 2013 pemerintah telah membayar angsuran masing-masing sebesar Rp1.000.000.000.000, sehingga melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-888/MK.02/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Persetujuan Skema Pembayaran *UPSL* Program THT, skema pembayaran yang diatur adalah sejumlah Rp17.161.745.000.000. Rincian skema dan pembayaran yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	SPM	Jumlah
2014	2.000.000.000.000	SPM Nomor 00044A tanggal 28 Mei 2014	2.000.000.000.000
2015	3.000.000.000.000	SPM 00013A/987361/2015 Tgl 2 Februari 2015	3.000.000.000.000
2016	4.000.000.000.000	SPM 00033T/987361/2016 Tgl 12 Februari 2016	4.000.000.000.000
2017	4.000.000.000.000	SPM 00020A/987361/2017 tgl 24 Januari 2017	4.000.000.000.000
2018	4.161.745.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	4.161.745.000.000
Jumlah	17.161.745.000.000	-	17.161.745.000.000

Atas pembayaran tersebut, jumlah *UPSL* 2007-2011 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah sebesar Rp 0.

2. *UPSL* PT Asabri (Persero) 2001-2012

Skema pembayaran *UPSL* ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-58/MK.02/2015 tanggal 23 Januari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	SPM	Jumlah
2015	375.000.000.000	SPM Nomor 00044A tanggal 28 Mei 2014	375.000.000.000
2016	712.341.000.000	SPM 00013A/987361/2015 Tgl 2 Februari 2015	712.341.000.000
Jumlah	1.087.341.000.000		1.087.341.000.000

Atas pembayaran tersebut, per 31 Desember 2017 utang *UPSL* 2001-2012 telah selesai dilakukan pembayaran.

3. *UPSL* PT Taspen (Persero) 2012-2013

Skema pembayaran *UPSL* ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-100/MK.02/2015 tanggal 13 Februari 2015. Skema dan pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	SPM	Jumlah
2016	1.500.000.000.000	SPM 00034T/987361/2016 tanggal 12 Feb 2016	1.500.000.000.000
2017	1.500.000.000.000	SPM 00021A/987361/2017 tgl 24 Januari 2017	1.500.000.000.000
2018	1.500.000.000.000	Diubah menjadi kewajiban jangka pendek	1.500.000.000.000
2019	1.500.000.000.000	-	-
2020	1.557.126.930.000	-	-
Jumlah	7.557.126.930.000		4.500.000.000.000

Berdasarkan pembayaran tersebut, jumlah *UPSL* 2012-2013 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah sebesar Rp 3.057.126.930.000.

4. *UPSL* PT Taspen (Persero) 2014-2015

Skema pembayaran *UPSL* ini diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1101/MK.02/2016 tanggal 13 Desember 2016 dengan skema sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Skema Pembayaran		Pembayaran	
Tahun	Jumlah	SPM	Jumlah
2018	300.000.000.000	diubah menjadi kewajiban jangka pendek	300.000.000.000
2019	3.500.000.000.000	-	-

2020	3.099.954.609.263	-	-
Jumlah	6.899.954.609.263		-

Berdasarkan pembayaran tersebut, jumlah *UPSL* 2014-2015 yang masih menjadi utang jangka panjang adalah Rp6.599.954.609.263.

D.2.52. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp160.704.149.324.311 dan Rp132.925.441.051.110, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Kewajiban atas <i>Risk Sharing</i> Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen	126.013.566.421.159	102.693.565.264.409
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri pada PT Asabri	24.066.318.391.599	20.329.414.199.407
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUMPNS	8.019.539.592.771	7.211.731.495.881
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L	692.797.191.623	778.802.364.254
Jumlah	160.704.149.324.311	132.925.441.051.110

Utang Jangka Panjang DN Lainnya Rp160,70 triliun

) Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya sebesar 1.911.927.727.159 merupakan Kewajiban Kontinjensi atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *Risk Sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.360, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.700, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *Risk Sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.315. *Risk Sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159 (52,25% x Rp3.659.191.822.315).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *Risk Sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *Risk Sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

-) Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Taspen sebesar Rp126.013.566.421.159 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun PNS sampai dengan 31 Desember 2017 atas dana yang dikelola PT Taspen.
-) Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri
Dana titipan atas iuran program pensiun pada PT Asabri sebesar Rp24.066.318.391.599 merupakan kewajiban kepada peserta program pensiun TNI, Anggota POLRI dan PNS KEMHAN/POLRI sampai dengan 31 Desember 2017 atas dana yang dikelola PT Asabri.
-) Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUM PNS
Dana titipan atas Tabungan Perumahan pada BAPERTARUM PNS sebesar Rp8.019.539.592.771 merupakan kewajiban kepada peserta program tabungan perumahan PNS sampai dengan 31 Desember 2017 atas ekuitas bersih BAPERTARUM PNS.
-) Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L
Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp692.797.191.623, adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp658.530.040.663 dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebesar Rp34.267.150.960.

D.2.53. Utang Jangka Panjang Subsidi

Utang Jangka Panjang Subsidi Rp28,41 triliun

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp28.415.009.897.486 dan Rp53.317.878.872.334. Utang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

NO.	K/L	JUMLAH		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		31 Desember 2017	31 Desember 2016		
1	Keuangan	18.587.563.958.211	34.800.934.611.658	(16.213.370.653.447)	(46,59)
2	Pertanian	9.818.329.939.275	17.935.569.673.807	(8.117.239.734.532)	(45,26)
3	Perhubungan	0	432.062.471.919	(432.062.471.919)	(100,00)
4	PUPR	9.116.000.000	8.940.000.000	176.000.000	1,97
5	Sosial	0	140.372.114.950	(140.372.114.950)	(100,00)
	Jumlah	28.415.009.897.486	53.317.878.872.334	(24.902.868.974.848)	(46,71)

1. Kementerian Keuangan

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp18.587.563.958.211 dan Rp34.800.934.611.658.

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp18.587.563.958.211 terdiri dari:

a. DJA sebesar Rp18.201.427.185.287

Utang Subsidi merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik.

Sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi, Utang subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat berita acara verifikasi atau

dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada 31 Desember 2017, utang Jangka Panjang Subsidi yang dapat diakui adalah sebesar Rp18.201.427.185.287 yang terdiri atas:

Utang Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg	15.912.442.792.210
Utang Subsidi Listrik	2.288.984.393.077
Total Utang Subsidi Energi	18.201.427.185.287

Adapun rincian total utang subsidi energi adalah sebesar Rp35.801.427.185.287. Nilai tersebut merupakan nilai utang subsidi jangka panjang yang telah direklasifikasi ke utang subsidi jangka pendek sebesar Rp17.600.000.000.000 ditambah dengan utang subsidi jangka panjang sebesar Rp18.201.427.185.287. Rincian total utang subsidi tersebut dirinci sebagai berikut:

- 1) Utang sebesar Rp28.212.442.792.210 merupakan kekurangan subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg kepada PT Petronas Niaga Indonesia, PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. dengan rincian:
 - a) Utang sebesar Rp5.238.150.599,00 yang merupakan utang kekurangan subsidi Premium hasil audit BPK-RI Tahun 2011 kepada PT Petronas Niaga Indonesia.
 - b) Utang sebesar Rp547.140,00 yang merupakan utang kekurangan subsidi Premium hasil audit BPK-RI Tahun 2012 kepada PT Petronas Niaga Indonesia.
 - c) Utang sebesar Rp22.277.856.236.632,00 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Tanah, Minyak Solar, dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2016 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2016, yang terdiri atas:
 -) Kekurangan Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp409.886.081.316,00;
 -) Kekurangan Subsidi Minyak Solar sebesar Rp6.088.827.824.898,00;
 -) Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp15.779.142.330.418,00.
 - d) Utang sebesar Rp51.051.113.784,00 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Solar Tahun 2016 kepada PT AKR Corporindo Tbk berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2016.
 - e) Utang sebesar Rp5.868.200.382.336,00 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Tanah, Minyak Solar, dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2017 kepada PT Pertamina (Persero) berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017, yang terdiri atas:
 -) Kekurangan Subsidi Minyak Tanah sebesar Rp185.963.787.579,00;
 -) Kekurangan Subsidi Minyak Solar sebesar Rp668.099.506.550,00;
 -) Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp5.014.137.088.207,00.
 - f) Utang sebesar Rp10.096.361.719,00 merupakan utang kekurangan subsidi Minyak Solar Tahun 2017 kepada PT AKR Corporindo Tbk berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017.
- 2) Utang sebesar Rp7.588.984.393.077,00 merupakan kekurangan pembayaran subsidi listrik kepada PT PLN (Persero) yang terdiri atas:
 - a) Kekurangan pembayaran Subsidi Listrik hasil audit BPK tahun 2016 sebesar Rp7.225.969.353.514,00.
 - b) Kekurangan pembayaran Subsidi Listrik Tahun 2017 berdasarkan hasil audit BPK-RI Tahun 2017 sebesar Rp363.015.039.563,00

b. DJP

Utang Subsidi per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp386.136.772.923 dan Rp20.671.469.753. Utang Subsidi per 31 Desember 2017 merupakan Utang Subsidi Jangka Panjang atas tagihan Subsidi PPh DTP yang telah dilakukan verifikasi namun belum dilakukan pembayaran di Tahun 2017 karena pagu anggaran Tahun 2017 tidak mencukupi.

(dalam rupiah)

No	PPh DTP	Pagu APBNP 2017	TAGIHAN	REALISASI	SISA PAGU	Kurang Bayar 2017
1	2	3	4	5	6=3-5	7=4-5
I.	Panas Bumi	1.646.361.470.000	1.940.253.237.388	1.646.361.470.000	-	293.891.767.388
	1. Triwulan III 2016		20.671.469.753	20.671.469.753		-
	2. Triwulan IV 2016		438.096.220.121	438.096.220.121		-
	3. Triwulan I 2017		414.830.280.147	414.830.280.147		-
	4. Triwulan II 2017		529.122.990.039	529.122.990.039		-
	5. Triwulan III 2017		537.532.277.328	243.640.509.940		293.891.767.388
II.	SBN Valas	7.230.485.435.000	7.322.718.097.387	7.230.485.435.000	-	92.232.662.387
	1. Januari s.d. Sept 2017		6.538.977.462.719	6.538.977.462.719		-
	2. Oktober s.d. Des 2017		783.740.634.668	691.507.972.281		92.232.662.387
III.	Penghapusan Piutang PDAM	59.269.019.000	56.205.088.147	56.205.088.147	3.063.930.853	-
IV.	Recurrent Cost SPAN	614.786.000	627.129.148	614.786.000	-	12.343.148
	Total (I+II+III+IV)	8.936.730.710.000	9.319.803.552.070	8.933.666.779.147	3.063.930.853	386.136.772.923

2. Kementerian Pertanian

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp9.818.329.939.275 dan Rp17.935.569.673.807. Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.818.329.939.276 terdapat pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang terdiri dari:

- a. Utang Subsidi sebesar Rp1.833.249.604.469 yang merupakan hasil audit BPK atas Subsidi Pupuk TA 2017 pada BUMN operator, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

NO	PRODUSEN	JUMLAH SUBSIDI AUDITED	JUMLAH SUBSIDI YANG TELAH DIBAYARKAN OLEH KPA	SELISIH/ JUMLAH SUBSIDI PUPUK YANG BELUM DIBAYARKAN
1	PT Pupuk Kaltim	5.018.725.596.060	4.073.476.225.477	945.249.370.583
2	PT Pupuk Kujang	2.572.886.886.808	2.521.319.713.886	51.567.172.922
3	PT Pupuk Iskandar Muda	2.578.875.256.466	1.742.442.195.502	836.433.060.964
	JUMLAH	10.170.487.739.334	8.337.238.134.865	1.833.249.604.469

- b. Utang Subsidi sebesar Rp7.985.080.334.806 merupakan kurang bayar Subsidi Pupuk berdasarkan LHP BPK, dimana sisa kurang bayar yang belum bisa diselesaikan pada TA 2018.

3. Kementerian Perhubungan

Jumlah Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp432.062.471.919.

(dalam rupiah)

Unit Eselon I	2017	2016	Kenaikan/ (penurunan)	%
Ditjen Perkeretaapian	0	155.550.809.217	(155.550.809.217)	(100,00)
Ditjen Perhubungan Laut	0	276.511.662.702	(276.511.662.702)	-
Jumlah	0	432.062.471.919	(432.062.471.919)	(100,00)

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp0.

Mutasi pengurangan Utang Jangka panjang diantaranya dikarenakan pembayaran utang pada Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp197.796.195.000 atas kurang bayar subsidi PSO PELNI TA 2014 dan 2015 tersebut seluruhnya bersumber dari hasil pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07). Sisanya sebesar Rp78.715.467.702 direklasifikasi ke utang subsidi.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp9.116.000.000 dan Rp8.940.000.000.

Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2017 sebesar Rp9.116.000.000 terdapat pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan selaku KPA Subsidi Selisih Bunga KPR dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan. Utang Jangka Panjang Subsidi tersebut merupakan sisa tagihan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dari Bank Pelaksana yang belum terbayar pada Tahun 2016 dan 2017.

(dalam rupiah)

No	Uraian	SBUM
1	Tagihan 2016 yang belum diverifikasi	8.940.000.000
2	Tagihan 2017 yang belum diverifikasi	176.000.000
	Jumlah	9.116.000.000

Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp668,14 triliun

D.2.54. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp668.147.269.113.375 dan Rp663.859.199.798.301 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
222115	Outstanding Utang Program	325.464.854.248.659	319.831.503.462.618
222116	Outstanding Utang Proyek	342.682.414.864.716	344.027.696.335.683
	Total	668.147.269.113.375	663.859.199.798.301

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya Rp24,22 miliar

D.2.55. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp24.229.125.827 dan Rp23.587.645.245. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya sebesar Rp24.229.125.827 merupakan hutang Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa promissory notes yang belum akan dibayar dalam jangka waktu satu tahun ke depan. Tidak terdapat tagihan pencairan hutang pada Periode per 31 Desember 2017.

Perubahan nilai *promissory notes* pada Lembaga Keuangan Internasional disebabkan oleh:

1. Perubahan kurs pada tanggal pelaporan, mengingat *promissory notes* diterbitkan dalam mata uang asing, sehingga nilainya menyesuaikan kurs pada tanggal pelaporan, misalnya *promissory notes* pada *Multilateral Investment Guarantee Agency* dan *Common Fund for Commodities*.

(dalam rupiah)

No	Lembaga Keuangan Internasional	31 Desember 2017	31 Desember 2016	Naik/(turun)
1	International Development Association (IDA) RUPIAH	5.237.901.545	5.173.139.668	64.761.877
2	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	15.377.223.864	15.250.101.848	127.122.016
3	Common Fund for Commodities (CFC)	3.614.000.418	3.164.403.729	449.596.689
Jumlah		24.229.125.827	23.587.645.245	641.480.582

2. Terdapat koreksi penambahan utang jangka panjang pada IDA sebesar Rp64.761.877 yang disebabkan adanya kurang catat pada periode sebelumnya. Koreksi dilakukan karena diperoleh bukti pendukung atas keberadaan utang *promissory notes* Pemri pada IDA tertanggal 19 Januari 1973 yang baru didapatkan pada tahun berjalan. Detail *promissory note* Pemerintah Indonesia pada IDA adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Rincian	Tanggal	Jumlah
1	2 (two) <i>promissory note</i>	19 Januari 1973	129.523.754,28
2	1 (one) <i>promissory note</i>	21 Juni 1973	355.340.803,50
3	1 (one) <i>promissory note</i>	26 Desember 1973	71.956.501,40
4	1 (one) <i>promissory note</i>	25 Mei 1974	514.542.828,77
5	1 (one) <i>promissory note</i>	30 Juni 2000	2.163.936.250
6	1 (one) <i>promissory note</i>	14 Mei 2003	2.002.601.407
Total			5.237.901.544,95

Boks V

Kebijakan Pengelolaan Utang Pemerintah dalam Pengelolaan APBN

Pemerintah terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan (*sustainable*). Langkah konsisten dan hati-hati dari pemerintah telah menghasilkan kepercayaan yang semakin kuat terhadap APBN dan perekonomian Indonesia. Hal ini terkonfirmasi dengan membaiknya peringkat Investasi Indonesia yang berasal dari lima lembaga pemeringkat dunia (S&P, Moodys, Fitch, JCR, R&I). Pemerintah senantiasa menjaga disiplin APBN (*fiscal responsibilities rules*) terkait defisit maupun utang pemerintah, dan konsisten menjalankannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Disiplin fiskal Pemerintah ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap besaran defisit dan rasio utang terhadap PDB. Pada tahun 2017, defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,92% dari PDB, berhasil dijaga di bawah target APBN pada angka 2,49% dari PDB. Demikian juga dengan rasio utang yang berhasil dikendalikan pada angka 29,39% dari PDB, atau jauh dibawah ambang batas 60% dari PDB, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kebijakan utang dalam APBN senantiasa diperhitungkan secara cermat, agar dapat bermanfaat secara optimal dalam kegiatan pembangunan, baik pembangunan soft infrastruktur maupun infrastruktur yang bersifat fisik. Pembangunan soft infrastruktur diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Pembangunan infrastruktur yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah yang dibiayai dari

APBN, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Utang pemerintah dikelola dalam beberapa instrumen, yang saat ini didominasi dalam bentuk instrumen Surat Berharga Negara atau SBN, disamping dalam bentuk SBSN, utang bilateral, dan utang multilateral. Optimalisasi penggunaan instrumen SBN terutama ditujukan untuk membangun pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri. Jadi, penarikan utang tidak hanya digunakan sebagai instrumen untuk menutup defisit belanja Pemerintah, namun juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah terus melakukan diversifikasi instrumen utang, dengan harapan agar partisipasi masyarakat dapat terus ditingkatkan. Dengan mayoritas utang Pemerintah berada di dalam negeri, maka risiko yang timbul terkait utang pemerintah dapat semakin dikendalikan.

Kebijakan utang dalam APBN juga ditujukan untuk membantu membangun pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri. Jadi utang tidak hanya sebagai alat menambal defisit belanja pemerintah, tetapi juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari jumlah investor ritel yang membeli Surat Berharga Negara (SBN) meningkat setiap tahun sejak diterbitkannya SBN ritel tahun 2006, yaitu 16.561 investor ritel dalam negeri, dan mencapai 83.662 investor ritel pada 2016. Secara jumlah total pada 2018, investor ritel pemegang SBN telah mencapai 501.713.

Pengelolaan utang yang pruden, antara lain berdampak pada menurunnya imbal hasil (*yield*) Surat Utang Negara berjangka 10 tahun, dari angka 7,97% pada Desember 2016, menurun menjadi 6,32% pada Desember 2017. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh pada menurunnya biaya utang yang ditanggung pemerintah. Selanjutnya, Pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas kebijakan, mempertajam alternatif pilihan pembiayaan dan memperbaiki tata kelola serta proses perencanaan pengelolaan utang, sehingga setiap instrumen kebijakan dapat menghasilkan dampak positif yang nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

D.2.56. Ekuitas

*Ekuitas
Rp1.540,78
triliun*

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.540.783.656.928.940 dan Rp1.566.931.752.006.649. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun 2017, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga jenis rekening pada Bank Indonesia (Rekening Migas, Rekening Penerimaan Panas Bumi, dan Rekening Pertambangan dan Perikanan) dan rekening pada Bank Umum (Rekening Kredit Program dan Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN). Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

a. Rekening SDA Migas, Nomor 600.000411.980 Rekening Hasil Minyak Perjanjian *Karya Production Sharing (KPS)*

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 138/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 Tentang Rekening Minyak Dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,15% hak pihak lain dan 13,85% merupakan Pendapatan Pajak.

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursement* PPN, PBB dan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000084980 ke RKUN/Pengusaha Panas Bumi/Bank Persepsi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

c. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI No. 166/KMK.011/1979 tanggal 16 April 1979 tentang Penetapan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Sebagai Pejabat Yang Diberi tugas Untuk Atas Nama Menteri Keuangan Mengelola Rekening Dep. Keuangan di Bank Indonesia, yaitu Nomor 508.071 Rekening Khusus Penerimaan Bidang Pertambangan Umum dan Perikanan (sekarang nomor 508.000071.980 sesuai perubahan struktur nomor rekening Bank Indonesia, dan dikelola oleh Dirjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat). Rekening Pertambangan dan Perikanan digunakan untuk menampung setoran penerimaan yang berasal dari bidang pertambangan dan perikanan, yaitu penerimaan yang berasal dari PT Inalum dan penerimaan yang berasal dari perusahaan pertambangan lainnya.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Bank Persepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, DJA terlebih dahulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

d. Rekening Dana Bergulir (Kredit Program)

Rekening Kredit Program adalah rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kredit program pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dari debitur di Bank Umum, yang terdiri atas:

1. Sepuluh rekening yang diatur sesuai Perdirjen nomor Per-39/PB/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Transaksi Rekening Kredit Program (mulai bulan Februari 2015 rekening tersebut berkurang satu sehubungan dengan ditutupnya satu rekening, yaitu rekening bank Muamalat pada tanggal 26 Februari 2015 sesuai surat konfirmasi penutupan dari Bank Muamalat nomor 046/BMI/CORFD/III/2015). Rekening-rekening tersebut akan dinihalkan setiap bulan untuk dipindahbukukan ke Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 dan jasa giro dari rekening tersebut masuk dalam program *Treasury Notional Pooling (TNP)*.

2. Tujuh rekening penampungan PIR/UPP yang setelah dilakukan reklasifikasi oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (saat ini oleh KPPN Khusus Investasi) dan permintaan pemindahbukuan oleh Direktur Sistem Manajemen Investasi (saat ini oleh Kepala KPPN Khusus Investasi) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara melalui Rekening Dana Investasi nomor 513.000000980 secara berkala setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

e. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Non Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-SPAN adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Non Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR – SPAN yaitu

- └ Rekening RR SPAN Mandiri 1190006666620
- └ Rekening RR SPAN BNI 0296474245
- └ Rekening RR SPAN BTN 0001401390005113
- └ Rekening RR SPAN BRI 032901003296301

f. Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji

Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR-Gaji adalah rekening yang dibuka pada BO I Pusat untuk menampung dana SP2D Gaji Bulanan yang diretur oleh Bank Penerima dan telah diterima BO I Pusat. Terdapat beberapa Rekening RR-Gaji yaitu :

- └ Rekening RR-Gaji BRI 032901003298303
- └ Rekening RR-Gaji Mandiri 1190006666646
- └ Rekening RR-Gaji BNI 0296474369
- └ Rekening RR-Gaji BTN 0001401390005139

Rincian Saldo Rekening Pemerintah Lainnya sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kode Bank	Nama dan Nomor Rekening	Kode AKUN	Uraian AKUN	Saldo
E1040	Retur SPAN BRI (032901003296301)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	75.263.605.782
E1041	Retur GAJI BRI (032901003298303)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	1.543.491.341
E1042	Retur SPAN-MDRI (1190006666620)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	53.038.428.840
E1043	Retur GAJI-MDRI (1190006666646)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	278.923.216
E1044	Retur SPAN-BNI (0296474245)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	51.492.216.120
E1045	Retur gaji-BNI (0296474369)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	90.039.589
E1046	Retur SPAN-BTN (0001401390005113)	111341	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	15.659.699.987
E1047	Retur GAJI-BTN (0001401390005139)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN – Gaji	24.244.165
S0001	DEPKEU K/Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing (600000411980)	111315	Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL	1.995.770.488.537
S0002	Rekening Penerimaan Bidang Pertambangan Dan Perikanan (508000071980)	111317	Kas di Rekening Pertambangan dan Perikanan pada KBUN Pusat	-

S0003	Rekening Penerimaan Panas Bumi (508000084980)	111316	Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada KBUN Pusat	1.709.479.552.436
S0004	Menteri Keuangan untuk Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dlm Rupiah (519000124980)	111311	Kas Pemerintah Lainnya dalam Rupiah	0
T0001	Menteri Keuangan Rekg.Pembangunan Daerah (519000102980)	111314	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	15
U0001	Dana Investasi (513000000980)	111313	Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	10
W0001	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (020601000023305)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	253.706.468
W0002	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%) (1160094009835)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0004	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%) (020601000022309)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0007	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%) (020601000032304)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0008	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali (020601000015302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	1
W0012	Rekening Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah (032901000510308)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0017	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP) (020601000010302)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	0
W0020	RPL BUN PIR non SPH (KLP) (1170006607899)	111328	Kas di Rekening Dana Bergulir	(1)
E9006	RR RPKBUNP GAJI BSM (7745145196)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	36.440.400
E9012	RR RPKBUNP GAJI BPD DIY (001111001493)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	6.432.400
E9014	RR RPKBUNP GAJI BJB SYARIAH (0080102004544)	111342	Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	4.467.600
E8001	Rekening Retur SBSN BRISyariah (3010201701)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	420.110.007
E8002	RR Reksus SBSN BNI Syariah (1011201721)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	302.882.119
E8003	RR Reksus SBSN Bank Syariah Mandiri (7788884518)	111343	Kas di Rekening Retur SBSN	2.098.887.710
Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya				3.905.763.616.742

2. Rekening Migas (Rekening Nomor 600.000.411980)

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (rekening migas) per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.995.770.488.537. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2017.

Tabel 19. Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2017 dan 2016

URAIAN	31 Desember 2017 (Audited)		31 Desember 2016 (Audited)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	1,187,266.53	15,952.11	52,723,330.16	727.318,32
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya ^{a)}	3.155.440.189,20	42.283.813,96	2,246,602,469.35	29.929.765,96
2. Koreksi Pembukuan	-	-	-	-
3. Penerimaan lain-lain ^{b)}	2.420.359,24	32.623,96	6,385,171.25	84.462,82
4. Retur/Pengembalian karena salah rekening ^{c)}	3.184.791,72	42.270,15	-	1.159.821,94
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit	-	1.014.491,36	-	-
Total Penerimaan	3,161,045,340.16	43,373,199.42	2,252,987,640.60	31.174.050,72
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III	118,633,924.26	1,604,167.92	83,766,415.05	1.123.600,81
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	8,648,243.23	115,432.20	3,594,921.46	48.539,50
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980 ^{d)}				
) Pendapatan PNBP SDA Migas	625,955,470.35	8,479,672.87	260,645,951.63	3.508.951,80
) Pendapatan Migas lainnya (423139)	6,752,396.82	91,756.82	-	-
) Lainnya	-	-	6,703,270.81	89.962,51
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD	759,990,034.66	10,291,029.81	354,710,558.95	4.771.054,62
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. <i>Reimbursement</i> PPN ke Kontraktor	1,120,069,435.54	14,959,651.41	1,093,359,250.07	14.588.867,16
b. Pembayaran DMO <i>Fee</i> KKKS ^{e)}	663,389,208.76	8,879,949.24	523,454,796.23	6.939.928,93
c. Pembayaran <i>Fee</i> Anggaran SKK Migas	-	-	-	-
d. Pembayaran <i>Underlifting</i> KKKS ^{f)}	439,793,314.71	5,890,206.21	271,428,079.61	3.597.789,22
e. Pembayaran <i>Fee</i> penjualan PT Pertamina (Persero)	28,519,031.41	381,974.64	54,743,378.26	734.693,85
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD	2,251,770,990.42	30,111,781.51	1,942,985,504.17	25.861.279,16
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI	-	-	4,549,390.32	60.223,09
4. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit ^{g)}	-	948,299.58	-	1.162.664,67
5. Pengeluaran lainnya	-	-	2,278,250.79	30.195,41
6. Administrasi Bank ^{h)}	-	-	-	-
7. Retur/Pengembalian karena salah rekening	3,160,503.05	42,270.15	-	-
8. Dana Talangan	-	-	-	-
Total Pengeluaran	3,014,921,528.13	41,393,381.04	2,304,523,704.23	31.885.416,95
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	146,123,812.03	1,979,818.38	(51,536,063.63)	(711.366,23)
V. Saldo Akhir (I + IV) ⁱ⁾	147,311,078.56	1,995,770.49	1,187,266.53	15.952,09

Penjelasan:**Penerimaan**

a) Penerimaan di Rekening Migas yang meliputi Penerimaan PPh Migas, PNBP SDA Migas dan PNBP lainnya.

- PNBP SDA Migas

Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak dan gas bumi bagian Negara serta setoran atas *Overlifting* KKKS sebesar USD3,148,358,028.07 atau setara Rp42.118.188.162.213

- PNBP Migas Lainnya dari kegiatan usaha hulu migas

Meliputi setoran atas Bunga, Denda, dan Penalti, Kelebihan Pembayaran *DMO Fee* serta Bonus Produksi sebesar USD7,082,161.13 atau setara Rp95.625.799.556

b) Penerimaan Lain-Lain

Pada penerimaan lain-lain terdiri dari koreksi Pembukuan Kredit oleh Bank Indonesia dan Penerimaan Belum Jelas Peruntukannya (BJP), diuraikan sebagai berikut.

- Koreksi pembukuan kredit sebesar USD0.04 atau setara Rp534 merupakan koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan double yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

- Penerimaan yang belum jelas peruntukannya sebesar USD2,420,359.20 atau setara dengan Rp32.623.954.769 adalah penerimaan yang belum dapat diklasifikasikan baik penyeter maupun peruntukannya sampai dengan saat penyusunan laporan keuangan.

c) Retur/Pengembalian Karena Salah Rekening

Merupakan dana yang dikembalikan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi atas transaksi pembayaran kewajiban Pemerintah yang di-retur/dikembalikan karena kesalahan administrasi atau kesalahan data pada rekening penerima. Nilai retur tersebut terdiri dari dana yang dikembalikan atas retur penyelesaian *reimbursement* PPN sebesar USD3,160,503.05 dan keuntungan atas selisih kurs retur karena perbedaan jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diretur sebesar USD24,288.67.

d) Pemindahbukuan ke Rekening KUN

Terdiri atas pemindahbukuan sebagai berikut.

- Pemindahbukuan PNBPD SDA Migas, merupakan proses pemindahbukuan penerimaan SDA migas dari rekening migas Nomor 600.000411980 ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 600.502411980 yang dilakukan setiap akhir bulan setelah diperhitungkan/dicadangkan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas. Proses pemindahbukuan ini merupakan tahapan akhir agar penerimaan SDA migas dapat diakui sebagai realisasi pendapatan negara.
- Pemindahbukuan Migas Lainnya, merupakan pemindahbukuan atas penerimaan bonus dan transfer material yang disetor KKKS ke rekening migas Nomor 600.000411980.

e) Pembayaran DMO Fee KKKS

Dalam pembayaran DMO Fee KKKS sebesar USD663,389,208.76 atau setara dengan Rp8.879.949.240.259.

f) Pembayaran *Underlifting* KKKS

Dalam pembayaran *Underlifting* KKKS sebesar USD439,793,314.7 atau setara dengan Rp5.890.206.213.414.

g) Selisih Kurs Pembukuan Debit

Selisih kurs pembukuan debit sebesar USD948,299,578,739.20 merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.

h) Biaya Administrasi Bank (*Bank Charges*)

Merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KKKS karena adanya retur atau pengembalian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diretur.

i) Saldo Akhir

Dari total saldo akhir sebesar USD147,311,078.56 atau setara dengan Rp1.995.770.492.331 ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp13.548/USD).

3. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan D.2.2 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.709.479.552.436 dan Rp1.164.006.404.427. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

(dalam rupiah)

	URAIAN	31 Desember 2017	31 Desember 2016
I.	Saldo Awal	1.164.006.404.427	894.760.992.714
II.	Penerimaan:		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	1.919.581.767.637	1.549.503.460.172
	2. Koreksi Pembukuan Kredit	4	-
	Total Penerimaan	1.919.581.767.641	1.549.503.460.172
III.	Pengeluaran:		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi ^{a)}	250.060.927.241	211.566.478.327
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ^{b)}	214.884.703.962	165.105.737.735
	3. Pemindahbukuan PNPB Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ^{c)}	909.162.988.429	903.585.832.397
	4. Pinjaman untuk Dana Talangan		-
	5. Koreksi Pembukuan debit		-
	Total Pengeluaran	1.374.108.619.632	1.280.258.048.459
IV.	Kenaiikan/Penurunan (II - III)	545.473.148.009	269.245.411.713
V.	Saldo Akhir (I + IV) ^{d)}	1.709.479.552.436	1.164.006.404.427

Penjelasan:

- a. Pemindahbukuan PBB Pertambangan Panas Bumi Tahun 2017 sebesar Rp250.060.927.241 dibayarkan seluruhnya dalam satu kali pembayaran.
- b. Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp214.884.703.962 adalah reimbursement PPN yang pengajuannya pada Tahun 2016 dan 2017 dengan perincian sebagai berikut.
 - 1) Reimbursement PPN yang pengajuannya Tahun 2016 sebesar Rp68.004.632.024
 - 2) Reimbursement PPN yang pengajuannya Tahun 2017 sebesar Rp146.880.071.938
- c. Pemindahbukuan PNPB Panas Bumi Tahun 2017 ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp909.162.988.429 terdiri dari:
 - 1) PNPB Panas Bumi Triwulan I Tahun 2017 sebesar Rp118.412.582.817
 - 2) PNPB Panas Bumi Triwulan II Tahun 2017 sebesar Rp115.474.793.393
 - 3) PNPB Panas Bumi Triwulan III Tahun 2017 sebesar Rp275.702.912.629
 - 4) PNPB Panas Bumi Triwulan IV Tahun 2017 sebesar Rp399.572.699.590
- d. Saldo rekening 508.000084980 per 31 Desember 2017 merupakan cadangan untuk pembayaran kewajiban reimbursement PPN, penggantian bonus produksi yang terkait dengan kegiatan usaha panas bumi, serta bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan dengan rincian sebagai berikut.

No	Pengusaha	Reimbursement PPN	Bonus Produksi	Bagian pemerintah yang belum dipindahbukukan	Total
1.	PT Pertamina Geothermal Energi (Persero)	189.765.400.045	62.885.546.890	414.390	252.651.361.325
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	496.298.392.628	50.884.531.959		547.182.924.587
3.	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	471.551.582.418	27.743.239.064		499.294.821.482
4.	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	385.862.430.755	24.488.014.283		410.350.445.038
	Grand Total	1.543.477.805.846	166.001.332.195	414.390	1.709.479.552.431

4. Kebijakan Penilaian Kembali BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) *"Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah."*
- (2) *"Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional".*

Dalam rangka memperoleh nilai aset tetap yang terkini dalam LKPP sesuai nilai wajarnya dan untuk membangun database aset yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di kemudian hari, pemerintah memandang perlu untuk melakukan penilaian kembali (revaluasi) atas BMN dengan tujuan antara lain untuk:

1. memperoleh nilai aset tetap yang update dalam laporan keuangan;
2. membangun database BMN yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMN di kemudian hari;
3. mengidentifikasi BMN idle; dan
4. meningkatkan leverage BMN sebagai *underlying asset* untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Terkait dengan pelaksanaan revaluasi BMN tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

Pelaksanaan revaluasi BMN dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:

1. tanah,
2. gedung dan bangunan, dan
3. jalan, irigasi, dan jaringan yang meliputi:
 - a. jalan dan jembatan, dan
 - b. bangunan air

pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodifikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang melaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah. Atas hasil pelaksanaan penilaian kembali BMN yang telah dilakukan, selanjutnya Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan koreksi data dan nilai BMN melalui Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN (LHIP).

Berdasarkan database BMN Kementerian/Lembaga Tahun 2017 (audited) diketahui terdapat 83 Kementerian/Lembaga yang memiliki objek revaluasi dengan jumlah keseluruhan sebanyak 939.803 Nomor Urut Pendaftaran (NUP), terdiri dari 124.471 NUP tanah, 435.049 NUP gedung dan bangunan, 83.598 NUP Jalan dan Jembatan, 295.591 NUP bangunan air, serta 1.094 NUP BMN pada aset kemitraan pihak ketiga.

Atas pelaksanaan revaluasi yang selesai di tahun 2017, berdasarkan LBMN tahun 2017 (audited) yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga diketahui bahwa jumlah BMN yang telah disajikan dengan nilai wajar adalah sebanyak 300.980 NUP. BMN tersebut tersebar pada 7.865 Satuan Kerja pada 79 Kementerian/Lembaga dengan total koreksi nilai revaluasi BMN (transaksi 205) sebesar Rp1.874.275.414.154.960. Selain itu, dalam proses pelaksanaan Penilaian Kembali terdapat BMN yang baru ditemukan dan belum dilakukan pencatatan sebanyak 13.574 NUP.

Terhadap BMN yang baru ditemukan ini, dilakukan pencatatan dan disajikan sebagai BMN berlebih dengan nilai wajar keseluruhan sebesar Rp45.930.225.133.461.

Namun demikian, dalam rangka pemenuhan prinsip konsistensi dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 (audited), nilai BMN hasil penilaian kembali tahun 2017 pada LKKL dan LKPP 2017 audited disajikan dengan menggunakan nilai historical cost dan hasil penilaian kembali dituangkan dalam CaLK.

Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN akibat pelaksanaan revaluasi BMN Tahun 2017 pada 79 K/L adalah sebagai berikut.

KENAIKAN/(PENURUNAN) NILAI BMN DARI REVALUASI ASET TETAP
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017

BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	NILAI
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	624.977.904.902
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	988.884.712.188
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	3.974.748.052.924
005	MAHKAMAH AGUNG	10.369.939.318.758
006	KEJAKSAAN	10.386.118.627.454
007	SEKRETARIAT NEGARA	284.017.301.933.079
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.261.384.990.754
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.069.727.618.263
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	316.558.034.198.414
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	26.151.326.861.179
015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	75.975.423.031.858
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	35.692.171.191.744
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	6.348.830.247.561
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.960.707.092.313
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	95.294.552.201.124
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	14.158.674.169.988
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	47.525.260.398.944
025	KEMENTERIAN AGAMA	34.496.611.656.259
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4.036.541.977.297
027	KEMENTERIAN SOSIAL RI	15.250.735.202.085
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	6.797.425.734.801
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.900.206.737.097
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	419.589.654.846.767
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN	3.925.194.930
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	10.113.676.653
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	4.028.510.497
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	4.961.824.030.567
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.160.300.520.883
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	190.728.671.140.640
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	2.148.147.757.953
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	17.768.486.506

048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI	29.163.448.394
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	3.118.141.847.029
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	427.967.461.006
054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.258.094.135.860
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.219.620.544.166
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	6.697.468.852.367
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.616.817.495.228
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.941.492.416.853
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	117.491.450.450.151
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	940.693.740.673
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.413.481.362.919
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.740.850.077.799
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	15.270.378.803
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	418.648.914.318
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.930.796.673.380
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	3.372.746.739
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.314.761.788.826
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	514.998.567.601
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	330.026.072.893
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	324.855.497.524
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	22.022.229.167.995
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	12.269.929.358.482
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	3.921.737.536.398
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.633.493.345.522
083	BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL	164.334.306.637
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	68.178.945.244
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	3.601.088.568.028
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	716.819.995.387
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	2.260.525.926.684
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	3.316.076.286.725
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	1.710.226.791.125
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	556.968.958.083
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.271.590.097.291
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	79.483.912.660
100	KOMISI YUDISIAL	211.749.326.321
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	56.400.219.741
104	BNP2TKI	200.851.012.057
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	225.955.997.823
107	BADAN SAR	682.485.406.377
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	146.848.939.999
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	(383.558.841)
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	27.053.532.234.208

113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	(47.599.972.648)
115	BADAN PENGAWAS PEMILU RI	2.346.592.238
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	10.009.779.614.754
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	8.994.177.335.929
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	(65.402.686.170)
JUMLAH		1.874.275.414.154.960

6. Pelaksanaan Program Pensertipikatan BMN Berupa Tanah Tahun 2017

Sesuai amanat Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa BMN/D berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Guna melaksanakan pensertipikatan BMN berupa tanah, Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional membuat Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa Tanah pada tanggal 18 November 2009. Peraturan Bersama tersebut diantaranya mengatur bahwa sertipikasi BMN berupa tanah disertipikatkan dengan hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bersama tersebut serta adanya temuan BPK atas LKPP Tahun 2011, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bersama Kementerian ATR/BPN dan Kementerian/Lembaga melaksanakan program percepatan sertipikasi BMN berupa tanah mulai tahun 2012.

Pokok kegiatan percepatan sertipikasi dilaksanakan dengan mengkoordinasikan K/L untuk melakukan:

- Penyusunan daftar indikatif bidang tanah yang akan disertipikatkan berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh satuan kerja dan telah dilakukan verifikasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas kesesuaian data terhadap pencatatan/penatausahaan dan dokumen kelengkapan;
- Mengkoordinasikan daftar indikatif kepada Kementerian ATR/BPN guna penganggaran kebutuhan biaya pensertipikatan yang dilaksanakan kantor pertanahan.

Pelaksanaan sertipikasi BMN juga sebagai tindak lanjut amanat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016. Dalam penjelasan Pasal 13 UU Nomor 10 Tahun 2017 tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, Pemerintah akan melakukan beberapa hal antara lain melakukan penertiban aset yang meliputi antara lain legalitas aset tetap seluruh Kementerian Negara/Lembaga.

Capaian kinerja program percepatan sertipikasi BMN per 31 Desember 2017:

- Hasil identifikasi/pendataan bidang tanah sebanyak 80.564 bidang dengan uraian 42.699 bidang tanah telah bersertipikat (53% bersertipikat) dan 37.865 bidang tanah belum bersertipikat (47% belum bersertipikat). Dalam 42.699 bidang tanah telah bersertipikat tersebut, termasuk 3.912 bidang tanah yang diterbitkan selama tahun 2017.
- Hasil verifikasi bidang tanah sebanyak 69.558 atau sebesar 86,34% dari target tahun 2017 sebesar 75%.
- Untuk lebih mengakselerasi program percepatan sertipikasi BMN, Pemerintah merencanakan sertipikasi BMN ini sebagai salah satu program prioritas pada tahun anggaran 2019.

7. Aset Bersejarah (Heritage Assets)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- Majelis Permusyawaratan Rakyat, berupa Gedung Merdeka berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 65, Kelurahan Braga, Bandung, Jawa Barat.
- Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.
- Kementerian Perhubungan berupa 2 Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.

- e. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
 -) Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 29.857 meter linier.
 -) Arsip Kartografi/Peta sebanyak 100.370 lembar.
 -) Arsip Film sebanyak 59.109 reel.
 -) Arsip Mikrofilm sebanyak 9.932 roll (negatif) dan 4.732 roll (positif), Arsip *Microfische* sebanyak 7200 *fische*.
 -) Arsip Video sebanyak 27.350 kaset.
 -) Arsip Rekaman Suara sebanyak 43.276 kaset dan arsip *reel to reelsound* sebanyak 871 *reel*.
 -) Arsip *Optical Disc* sebanyak 8.707 keping.
 -) Arsip foto sebanyak 1.663.000 lembar (negatif dan cetak).
 -) Arsip foto belum terdata sebanyak 221 boks dan 282 album.
- f. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai 4 unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffless, Makam Belanda (Santiong), dan Patung Kepala Sapi.
- g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
- h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 764.988 unit aset bersejarah yang dikelompokkan menjadi:
 -) Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb); dan
 -) Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
- i. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 9.942 eksemplar naskah kuno. Terdapat penambahan naskah kuno sejumlah 169 eksemplar pada tahun 2014.
- j. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 13 unit.
- k. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan Lainnya sebanyak 3 unit, 2 unit Tugu Pembangunan, serta 1 Unit Makam Bersejarah.
- l. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak 1 unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
- m. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
 -) tugu peringatan sebanyak 14 unit;
 -) bangunan bersejarah (Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen, Rumah Adat, Makam Bersejarah) sebanyak 4 unit;
 -) monografi sebanyak 2 buah; dan
 -) Laporan sebanyak 7 buah.

8. Badan Lainnya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 butir g dan l, Keuangan Negara juga meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut pada LKPP dilaporkan sebagai Unit Badan Lainnya. Unit Badan Lainnya yang selanjutnya disingkat UBL adalah unit organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau mendukung fungsi Kementerian Negara/Lembaga dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga tertentu.

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Keputusan Presiden. UBL antara lain berbentuk akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja.

Untuk dapat dikategorikan sebagai UBL, terdapat beberapa kriteria yaitu:

- a. Didirikan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Bukan merupakan Pengguna Anggaran;
- c. Bukan merupakan Perusahaan Negara;
- d. Menggunakan fasilitas dari Negara berupa Barang Milik Negara, dan/atau Pemberian kewenangan untuk menerima dan mengelola dana publik;
- e. Tidak terdapat penyertaan modal pemerintah; dan
- f. Terdapat pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan UBL, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Bendahara Umum telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya sebagai pedoman teknis pelaporan keuangan bagi UBL. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, maka mekanisme pelaporan UBL adalah sebagai berikut.

a. UBL Satker/ Bagian Satker

UBL Satker/Bagian Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. UBL Satker/Bagian Satker merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) atau bagian dari UAKPA pada Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi UBL dimaksud. Dalam hal UBL Satker/Bagian Satker mendapatkan dana di luar APBN, dana dimaksud diperlakukan sebagai pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pendapatan hibah, sepanjang memenuhi kriteria PNBP dan pendapatan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme pengelolaan PNBP dan hibah. Dalam hal dana yang didapatkan dari non APBN oleh UBL Satker/Bagian Satker tidak dapat diperlakukan sebagai pendapatan PNBP atau hibah, dana tersebut dikelola dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan UBL berkenaan.

b. UBL Bukan Satker

UBL Bukan Satker melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi seluruh aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan belanja, termasuk dana pihak ketiga sesuai mekanisme yang diatur oleh masing-masing UBL. Dalam menyusun laporan keuangan, UBL Bukan Satker diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). UBL Bukan Satker dilaporkan di LKPP sebesar *net equity* (selisih aset dikurangi dengan kewajiban) sebagai aset lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-612/PB/2017 tahun 2017 terdapat 74 Unit Badan Lainnya. terdapat penambahan 5 UBL yaitu :

1. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
2. Badan Restorasi Gambut (BRG)
3. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
4. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
5. Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP)

pengurangan sebanyak 3 (tiga) UBL yaitu :

1. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)
2. Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)
3. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

Perubahan Nomenklatur 2 (dua) UBL yaitu :

1. Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPBAM)
2. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun

Sehingga untuk Laporan Keuangan Tahun 2016 *Audited* ini terdapat 72 UBL.

Dalam Laporan Keuangan Badan Lainnya tahun 2017 *Audited*, terhadap 72 UBL tersebut secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut.

1. UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 64 UBL.
2. UBL Bukan Satker sebanyak 10 UBL.

Untuk SKK MIGAS dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Terdapat tiga Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu :

1. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan terdapat tiga UBL dan untuk Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.
2. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda
Sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor KU.05.08-SK/128 tanggal 28 Februari 2014, sampai saat ini Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda tersebut telah dibentuk namun belum aktif dan tidak mendapatkan alokasi dana APBN.
3. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Sesuai dengan surat Kepala Badan Pelaksana BPKH nomor : B.2901/BPKH/01/2017 tanggal 29 Januari 2018 hal penyampaian laporan keuangan BPKH, BPKH baru akan mengelola dana BPIH dan DAU setelah diserahkan dari Kementerian Agama ke BPKH yang dilaksanakan di awal tahun 2018
Ikhtisar Laporan Keuangan UBL Satker/Bagian Satker dan UBL Bukan Satker tersebut diatas disajikan dalam **Lampiran 28**.

9. **Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok**

Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok (ABMA/T) merupakan Aset yang dikuasai Negara adalah aset bekas yang bersumber dari:

- a. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/ 0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
- b. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
- c. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan perkumpulan-perkumpulan tersebut dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang ditertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan
- d. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang memiliki status kewarganegaraan bukan negara yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Penyelesaian ABMA/T diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK-154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/T dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

- a. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
- b. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
- c. Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
- d. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
- e. Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Tiongkok.

Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/T Sampai Dengan Tahun 2017

Atas peran Tim Penyelesaian ABMA/T Tingkat Pusat dan Tim Asistensi Daerah (TAD), pada Tahun 2017 sebanyak 29 aset diselesaikan status hukumnya secara keseluruhan, dan 32 aset diselesaikan sebagian status hukumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Daftar ABMA/T Yang Telah Dimantapkan Status Hukumnya Pada Tahun 2017

TAD	Penyelesaian Seluruhnya				Penyelesaian Sebagian		
	BMN	BMD	BMN dan BMD Sebagian	BMN	BMD	BMD Sebagian**	BMN
I	0	0	0	0	0	0	0
II	0	2	0	2	0	4	0
III	0	1	0	0	0	1	0
IV	0	3	0	0	0	3	0
V	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	1	1	0	0	2	0
IX	0	0	0	0	0	0	0
X	1	2	0	0	0	3	1
XI	1	9	0	0	1	11	0
XII	0	0	0	0	0	0	0
XIII	0	2	0	0	0	2	0
XIV	0	1	0	1	0	2	0
XV	0	0	0	0	0	0	0
XVI	0	0	0	2	0	2	0
XVII	0	0	0	0	0	0	0
Σ	2	21	1	5	1	30	1

Sampai dengan Tahun 2017, dari total ABMA/T sebanyak 1.010 dalam Lampiran PMK Nomor 31/PMK.06/2015 dan 5 aset Temuan Baru, 428 aset telah diselesaikan pemantapan status hukumnya, sehingga masih terdapat 587 aset yang belum diselesaikan pemantapan status hukumnya yang terdiri dari 543 aset belum dimantapkan status hukum seluruhnya dan 44 aset belum dimantapkan sebagian status hukumnya.

10. Aset Properti Eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah aset tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan utang atas kredit di bank. Oleh karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran utang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan utang berupa *fixed asset* dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran utang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Terhadap permasalahan ini, Ditjen Kekayaan Negara telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut dan menyampaikan hasil penelusuran kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan

tanggal 9 September 2013. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPK, maka sisa aset properti eks BPPN yang masih harus ditelusuri per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut.

Daftar Hasil Penelusuran Aset Properti Eks BPPN

(dalam rupiah)

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Aset Properti Eks BPPN yang perlu ditelusuri	843	1.070.152.309.824
Hasil Penelusuran TA 2013:		
▪ Terjual di BPPN dan PPA	7	36.496.849.932
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	16	13.376.203.837
▪ Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	145	482.990.603.127
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	26	35.552.445.176
▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	23	101.446.523.368
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)*	626	400.289.684.384

*) Terdapat selisih pembulatan sebesar Rp1

Untuk menindaklanjuti sisa selisih penelusuran data aset properti eks BPPN dalam LHP BPK per 31 Desember 2013, pada tahun 2014, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI telah melakukan upaya sebagai berikut.

1. Menyampaikan surat kepada PT PPA (Persero) dengan nomor S-1509/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait aset properti yang terjual selama periode pengelolaan oleh PT PPA (Persero).
2. Menyampaikan surat kepada Notaris/PPAT dengan nomor S-1501 s.d. S-1504/KN.5/2014 tanggal 30 Juni 2014 terkait penjualan aset properti yang dilakukan oleh BPPN.
3. Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Setempat dengan surat nomor S-1799 s.d. S-1927/KN.5/2014 tanggal 25 Juli 2014 terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pemegang hak atas tanah.
4. Menyampaikan surat kepada KPKNL dengan nomor S-2063/KN.5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 guna meminta bantuan untuk melakukan peninjauan fisik atas aset-aset properti.

Dari upaya yang telah dilakukan terhadap aset properti, diperoleh hasil dari semula senilai Rp400.289.684.383 menjadi tersisa 358 unit senilai Rp122.069.231.522 pada akhir tahun 2014

Pada tahun 2017, terhadap aset properti eks BPPN tersebut dilakukan penelusuran menjadi tersisa Rp75.706.848.310 berdasarkan hasil verifikasi BPK, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Hasil Penelusuran DJKN	
	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	358	122.069.231.521
Hasil Penelusuran TA 2016:		
▪ Terjual di BPPN dan PPA	23	7.179.057.006
▪ Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-
▪ Sita Kejaksaan dan Indikasi Sita	1	133.203.182
▪ Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
▪ Aset jaminan BDL dan PKPS	1	-
▪ Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	79	39.050.123.023
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2017)	253	75.706.848.310

Pemerintah tetap berkomitmen menjalankan amanat UU No 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2013 yang mengamanatkan agar Pemerintah menyelesaikan permasalahan Aset Eks BPPN secara signifikan setiap tahun dan diselesaikan dalam waktu paling lama lima tahun yaitu sampai dengan TA 2018.

11. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah. Terealisasinya kewajiban kontinjensi mengakibatkan terjadinya tambahan pengeluaran. Kewajiban kontinjensi bersumber dari pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, dan kewajiban Pemerintah untuk menambahkan modal pada lembaga keuangan tertentu.

1) Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah memberikan dukungan dan/atau jaminan terhadap beberapa proyek pembangunan infrastruktur, yaitu program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW Tahap I dan Tahap II oleh PT PLN (Persero), program percepatan penyediaan air minum oleh PDAM, dan proyek dengan skema Kerja sama Pemerintah-Swasta (KPS) melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT. PLN (Persero), PDAM dan BUMN/BUMD/KL tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur/badan usaha.

Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I dan Tahap II)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, Pemerintah antara lain telah menetapkan kebijakan untuk memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dalam melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik berdasarkan Perpres Nomor 71 Tahun 2006 jo Perpres Nomor 59 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW/*Fast Track Program*/FTP Tahap I). Pemerintah memberikan jaminan penuh terhadap pembayaran kewajiban PT PLN (Persero) kepada kreditur atau perbankan yang memberikan pinjaman untuk proyek-proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik dimaksud sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 91 Tahun 2007 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. Penjaminan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan kredit PT PLN (Persero) dalam mencari pinjaman (*creditworthiness*) sekaligus menurunkan biaya modal atas pendanaan proyek. Proyek dalam program FTP I tersebut dibiayai dari anggaran PT PLN (Persero) dan pembiayaan perbankan.

Sementara pada tahap II, melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2010 Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan kelayakan usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk garansi, dan hanya diberikan kepada proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik (*Independent Power Producer/IPP*).

Sampai dengan akhir tahun 2017 telah diterbitkan 36 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara (Program 10.000 MW tahap I (FTP-1) termasuk pembangkit dan transmisi), dengan nilai penjaminan sebesar IDR40,89 triliun, dan USD3,96 miliar, atau equivalent sebesar IDR 94,52 triliun. Sementara pada tahap II, melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2010 Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk penjaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero). Jaminan kelayakan usaha tersebut dilaksanakan dalam bentuk garansi, dan hanya diberikan kepada proyek pembangkit tenaga listrik yang dibangun melalui kerja sama antara PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta dengan skema jual beli tenaga listrik (*Independent Power Producer/IPP*).

Program Percepatan Penyediaan Air Minum

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum bagi masyarakat dan untuk mencapai *Millenium Development Goals* (MDG's), Pemerintah memandang perlu untuk mendorong peningkatan investasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Upaya tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan akses PDAM untuk memperoleh kredit investasi dari perbankan nasional melalui kebijakan pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan dimaksud dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2009 Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada perbankan, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan Pemerintah tersebut selanjutnya akan dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% yang akan diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% menjadi pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya, pemberian jaminan dan subsidi bunga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011.

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah diterbitkan 10 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum terkait 10 PDAM (Kabupaten Bogor, Kabupaten Ciamis, Lombok Timur, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar, Giri Menang, Tirta Satria Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kota Palopo), dengan nilai penjaminan sebesar IDR324,66 miliar. PDAM Kabupaten Buleleng telah mengundurkan diri dari program penjaminan proyek percepatan penyediaan air minum;

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011, proses lelang proyek IPP PLTU Jawa Tengah telah dilakukan dan ditetapkan pemenangnya oleh PT PLN (Persero). Pada tanggal 6 Oktober 2011 telah dilakukan penandatanganan dokumen pelaksanaan dan penjaminan proyek. Proyek tersebut mendapatkan penjaminan dengan skema penjaminan bersama antara Pemerintah dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur. Proyek ini ditargetkan beroperasi komersial (*commercial operation date*/COD) pada tahun 2017. Terkait penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama Pemerintah dengan badan Usaha (KPS) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 78/2010, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan.

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah diterbitkan 5 Perjanjian Penjaminan untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) terkait proyek Central Java Power Plant dengan nilai penjaminan sebesar USD3,20 miliar, Proyek Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek II Elevated dengan nilai penjaminan sebesar IDR14,77 triliun, Proyek Jalan Tol Krian-Legundi Bunder dengan nilai penjaminan sebesar IDR9,02 triliun, Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,78 triliun dan Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,33 triliun;

Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah diterbitkan 5 Perjanjian Penjaminan untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) terkait proyek Central Java Power Plant dengan nilai penjaminan sebesar USD3,20 miliar, Proyek Jalan Tol Ruas Jakarta-Cikampek II Elevated dengan nilai penjaminan sebesar IDR14,77 triliun, Proyek Jalan Tol Krian-Legundi Bunder dengan nilai penjaminan sebesar IDR9,02 triliun, Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,78 triliun dan Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang dengan nilai penjaminan sebesar IDR5,33 triliun;

Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah diterbitkan 5 Surat Jaminan untuk Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, terdiri dari 2 Surat Jaminan untuk pinjaman PT Utama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol ruas Medan-Binjai senilai IDR481 miliar dan ruas Palembang-Indralaya senilai IDR1,24 triliun, sedangkan 3 Surat Jaminan untuk obligasi PT Utama Karya (Persero) untuk pembangunan jalan tol di Sumatera yaitu Obligasi I senilai IDR1 triliun, Obligasi II senilai IDR1,97 triliun dan Obligasi III senilai IDR3,53 triliun.

Proyek-proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada PT PLN (Persero)

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah diterbitkan 4 Perjanjian Penjaminan untuk Proyek-proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada PT PLN (Persero) senilai USD2,03 miliar dengan rincian sebagai berikut. (i) Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank dalam mendanai Pengembangan/Penguatan Jaringan Kelistrikan di Sumatera (Rekonduktoring dan Penguatan Jaringan Distribusi) senilai USD600 juta atau setara dengan Rp8,04 triliun dengan skema result based loan, (ii) Pinjaman Langsung dari World Bank dalam mendanai Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera senilai USD500 juta atau setara dengan Rp6,7 triliun dengan skema Program for Result (PforR), (iii) Pinjaman Langsung dari Islamic Development Bank dalam mendanai Power Grid Enhancement Project (Penguatan Jaringan Kelistrikan berupa Pengadaan dan Pemasangan Trafo Tegangan Tinggi dan Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan Barat dan Sulawesi) senilai USD330 Juta atau setara dengan Rp4,42 triliun dengan skema Installment Sale Agreement, (iv) Pinjaman Langsung dari Asian Development Bank dalam mendanai Pengembangan Jaringan Distribusi di Indonesia Timur (Sulawesi dan Nusa Tenggara) senilai USD600 juta atau setara dengan Rp8,04 triliun dengan skema result based loan.

Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN

Sampai dengan akhir tahun 2017, telah diterbitkan 1 Surat Jaminan untuk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Dalam Rangka Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Alokasi Anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dalam APBN TA 2017 diperhitungkan sebagai berikut.

Program Penjaminan	Exposure	Probability of Default	x (100% - Recovery Rate)	= Expected Loss
Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara	Rp46,52 triliun	x 0,92%	x (100% - 0%)	= Rp427,96 miliar
Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum	Rp137,72 miliar	x 0,84%	x (100% - 0%)	= Rp1,16 miliar
Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI)	Rp22,26 triliun	x 1,33%	x (100% - 0%)	= Rp296,02 miliar
Proyek Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera	Rp1,00 triliun	x 3,53%	x (100% - 0%)	= Rp35,30 miliar
Proyek infrastruktur yang didanai melalui Pinjaman Langsung dari LKI kepada BUMN	Rp2,81 triliun	x 1,49%	x (100% - 0%)	= Rp41,93 miliar
Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	Rp1,25 triliun	x 16,26%	x (100% - 0%)	= Rp203,00 miliar
Total				Rp1.005,37 miliar

Expected loss merupakan kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah yang mungkin timbul di tahun 2017, diperkirakan sebesar Rp1.005,37 miliar, dan dialokasikan dalam APBN-P TA 2017. Selanjutnya, berdasarkan amanat PMK nomor 257/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah dan Pasal 32 ayat (3) UU APBN 2017; bahwa dalam hal terdapat anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah yang telah dialokasikan tidak habis digunakan dalam tahun berjalan, anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah dan rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah yang dibuka di Bank Indonesia. Oleh karena itu, alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan tahun 2017 telah dipindahbukukan ke rekening sebagai berikut:

- Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah sebesar Rp802,37 miliar yang berasal dari program penjaminan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek KPBU yang dilakukan melalui BUPI, proyek percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera, dan Program Penjaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara.
- Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah sebesar Rp203 miliar yang berasal dari program jaminan penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara

Indikasi Tentang Ketidakpastian Yang Terkait Dengan Jumlah Atau Waktu Arus Keluar Sumber Daya

Kewajiban Pemerintah kepada kreditur dan/atau Badan Usaha baru akan timbul jika pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK, dan PT Utama Karya (Persero)) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/Badan Usaha (gagal bayar). Terjadinya gagal bayar dimaksud sangat tergantung dengan kondisi keuangan pihak terjamin (PT. PLN (Persero), PDAM, PJPK, dan PT Utama Karya (Persero)). Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat ketidakpastian mengenai kapan dan berapa kewajiban Pemerintah yang harus dibayarkan. Untuk memperkirakan terjadinya gagal bayar, Pemerintah telah melakukan pemantauan secara berkala pada proyek infrastruktur yang telah diberikan penjaminan yaitu melalui pemantauan atas kondisi kesehatan keuangan dari pihak terjamin dan pemantauan atas penyelesaian konstruksi proyek-proyek sesuai jadwal serta mempercepat operasionalisasi proyek yang berdampak meningkatkan pendapatan bagi pihak terjamin.

Selain itu, dalam rangka memitigasi terjadinya kondisi gagal bayar pihak terjamin, Pemerintah telah berkoordinasi dengan stakeholders terkait pada tahun 2017 untuk membantu likuiditas pihak terjamin seperti dengan upaya peningkatan pendapatan pihak terjamin melalui pembayaran utang subsidi. Pemerintah juga menjaga kemampuan keuangan pihak terjamin antara lain melalui penanaman modal negara atau mengupayakan penanaman modal oleh pemerintah daerah kepada pihak terjamin. Dengan demikian kondisi gagal bayar pihak terjamin tidak terjadi sehingga tidak terjadi klaim hingga akhir tahun 2017.

2) Kewajiban Menjaga Modal Minimum Lembaga Keuangan Tertentu

Kewajiban kontinjensi Pemerintah pada sektor keuangan terutama berasal dari kewajiban Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan, yaitu Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), jika modal lembaga keuangan tersebut di bawah modal sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Bank Indonesia (BI)

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, modal BI ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp2,0 triliun. Dalam hal terjadi risiko atas pelaksanaan tugas dan wewenang BI yang mengakibatkan modalnya berkurang dari Rp2 triliun, sebagian atau seluruh surplus tahun berjalan dialokasikan untuk cadangan umum guna menutup risiko dimaksud. Dalam hal setelah dilakukan upaya pengalokasian surplus tahun berjalan untuk cadangan umum, jumlah modal BI masih kurang dari Rp2 triliun, Pemerintah wajib menutup kekurangan tersebut yang dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun sebaliknya, apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia mencapai di atas 10 persen, BI akan memberikan bagian kepada Pemerintah atas surplus BI sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan tentang BI.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS diatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal, Pemerintah dengan persetujuan DPR menutup kekurangan tersebut. Dalam Pasal 85 ayat (2) juga diatur bahwa dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas, LPS dapat memperoleh pinjaman dari Pemerintah. Untuk menjalankan fungsinya, LPS pada awal berdirinya tahun 2005 telah diberikan modal awal oleh Pemerintah sebesar modal minimal LPS yaitu Rp4 triliun. LPS setiap tahun juga membentuk cadangan klaim penjaminan sebagai estimasi risiko pembayaran klaim untuk satu tahun berikutnya.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2009 tentang LPEI, modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4 triliun. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4 triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku.

3) Subsidi Bunga Kredit program

Kewajiban Diestimasi timbul pada saat kewajiban pemerintah atas aktivitas Belanja Subsidi yang belum selesai proses bisnis transaksi rekonsiliasi dan verifikasi sampai dengan periode pelaporan keuangan tahunan. Kewajiban Diestimasi diakui dan ditetapkan penetapannya oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi pada saat derajat kepastian pembayaran dan nilainya dapat diestimasi secara andal. Dalam hal kewajiban pembayaran tagihan Belanja Subsidi tidak dapat diestimasi nilainya secara andal, Kewajiban Diestimasi diungkapkan secara memadai di CaLK (sebagaimana diatur dalam PMK nomor 217/PMK.05/2016).

Nilai Kewajiban diestimasi (dalam milyar) yaitu kurang lebih sebesar Rp23,13 Miliar, yang terdiri dari:

- ⌋ KKPE kurang lebih sebesar Rp6,32 Miliar
- ⌋ KUPS kurang lebih sebesar Rp0,007 Miliar
- ⌋ KPEN-RP kurang lebih sebesar Rp16,75 Miliar
- ⌋ SSRG kurang lebih sebesar Rp0,055 Miliar

12. Pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dan Pemulihan Lingkungan atau *Abandonment & Site Restoration* (ASR) KKKS

Dana *Abandonment and Site Restoration* (ASR) KKKS merupakan dana yang diminta untuk disisihkan oleh KKKS setiap tahun dalam Anggaran Biaya Operasi Tahunan untuk dicadangkan dalam rangka pemulihan wilayah operasi pertambangan pasca masa eksploitasi, yaitu untuk membongkar fasilitas operasi migas yang akan ditinggalkan, yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama dan diberlakukan sebagai biaya operasi yang dapat dikembalikan (*cost recovery*).

Pencadangan dana ASR juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut.

- 1) Kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu;
- 2) Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran;
- 3) Penempatan alokasi dana tersebut disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- 4) Cadangan biaya ASR wajib disimpan dalam rekening bersama antara Badan Pelaksana dan Kontraktor di bank umum Pemerintah Indonesia di Indonesia.

Pencadangan dana ASR dilakukan oleh KKKS setiap semester dengan melakukan penyetoran dana dalam satuan mata uang USD ke rekening bersama (*joint account*) antara KKKS dengan SKK Migas selama jangka waktu pengumpulan, dan atas dana tersebut tidak dapat digunakan tanpa adanya otorisasi dari kedua belah pihak.

Pengelolaan dan pengawasan dana ASR selama ini berada dibawah pengendalian SKK Migas sebagai institusi yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan usaha hulu migas. Dana ASR tersebut selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh SKK Migas melalui Laporan Keuangan SKK Migas (Buku I) dan Laporan Informasi Keuangan Kontrak Kerja Sama Dari Kegiatan Usaha Hulu Migas (Buku II).

Sampai dengan posisi per 31 Desember 2016, total saldo dana ASR yang ditempatkan di rekening bersama adalah USD1,110,716,611.47 termasuk didalamnya jasa giro sebesar USD26,189,996.51.

13. Pemanfaatan BMN eks KKKS Pertamina

Pemanfaatan Kilang LNG Arun

Berdasarkan *Agreements for Use and Operation of Plant 2nd Amendment* antara Pertamina dan PT Arun NGL, pengoperasian kilang LNG Arun oleh PT Arun NGL berakhir pada saat berakhirnya Kontrak Penjualan LNG, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2014 saat pengapalan cargo LNG yang terakhir.

Terkait pengoperasian kilang Arun untuk pemrosesan gas dan condensate milik ExxonMobil dari Lapangan North Sumatera Offshore dan North Sumatera B Block, telah ditetapkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-249/MK.6/2014 dan Nomor: S-250/MK.6/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Nomor: S-337/MK.6/2014 dan Nomor: S-338/MK.6/2014 tanggal 31 Desember 2014, Nomor: S-22/MK.6/2015 dan Nomor: S-23/MK.6/2014 tanggal 30 Januari 2015, Nomor: S-45/MK.6/2015 dan Nomor: S-46/MK.6/2014 tanggal 27 Februari 2015, dan Nomor: S-104/MK.6/2015 tanggal 30 April 2015, bahwa biaya pemanfaatan aset oleh PT Arun c.q. ExxonMobil untuk sewa periode 16 Oktober 2014 s.d. 31 Desember 2015 dan oleh PT Pertamina c.q. ExxonMobil untuk sewa periode 1 Juli 2015 s.d. 2018 akan dibebankan kepada ExxonMobil sesuai ketentuan perundangan di bidang pengelolaan BMN.

Selanjutnya, dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-61/MK.6/2015 dan Nomor: S-62/MK.6/2015 tanggal 25 Maret 2015 telah ditetapkan bahwa tarif sewa untuk pemrosesan gas dan *condensate* milik ExxonMobil sebesar USD0,0386/MMBTU per bulan.

Pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak

Terkait pemanfaatan Aktiva Kilang LNG Badak, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-651/MK.6/2011 tanggal 20 Oktober 2011 hal Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Kilang LNG Badak, diputuskan bahwa pemanfaatan aktiva kilang LNG Badak, baik oleh Kontraktor KKS dan/atau PT Pertamina dalam rangka perpanjangan kontrak ataupun penyediaan sumber gas baru secara komersial, diwajibkan menyetorkan biaya pemanfaatan BMN kepada Negara.

Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-221/MK.06/2014 tanggal 18 September 2014 hal Persetujuan Pemanfaatan BMN Berupa Aktiva Kilang LNG Badak Untuk Proyek *Indonesia Deepwater Development (IDD)* Chevron, diputuskan bahwa aktiva kilang LNG Badak dapat dimanfaatkan untuk Proyek IDD Chevron selama 10 tahun (tahun 2018-2027) dengan tarif pemanfaatan sebesar USD 0,22/mmbtu, di luar biaya *operating and maintenance* serta *capital expenditure*.

14. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

Nilai PMN pada Perusahaan Negara yang disajikan pada neraca, sudah termasuk nilai Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). Nilai BPYBDS per tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp26.936.491.979.720 dan Rp56.051.774.564.956. Nilai BPYBDS per 31 Desember 2017 terdiri dari BPYBDS pada:

BUMN	BPYBDS per 31 Desember 2016 (Rp)	Pengurangan selama Tahun 2017 (Rp)	Penambahan selama Tahun 2017 (Rp)	Nilai BPYBDS per 31 Desember 2017 Rekon (Rp)	BPYBDS per 31 Desember 2017 (Rp)	Selisih (Rp)
Perum DAMRI	310.794.912.055	0	0	310.794.912.055	310.794.912.055	0
Perum PPD	103.869.300.016	103.869.300.016	0	0	0	0
PT Perusahaan Listrik Negara	19.020.567.880.378	0	550.536.905.828	19.571.104.786.206	20.729.902.275.383	(1.158.797.489.177)
PT Angkasa Pura II	2.502.012.941.856	2.390.490.374.856	769.500.186.453	881.022.753.453	552.273.794.533	328.748.958.920
PT Pelindo I	422.533.281.925	0	103.351.380.328	525.884.662.253	525.884.662.253	0
PT ASDP	1.662.528.350.959	868.238.877.777	0	794.289.473.182	794.289.473.182	0
Perum Produksi Film Negara (PFN)	14.903.777.061	14.903.777.061	0	0	0	0
PT Pertamina	12.452.878.179	0	0	12.452.878.179	12.452.878.179	0
Perum LPPNPI	1.351.018.859.662	375.512.760.000	0	975.506.099.662	975.506.099.662	0
Jumlah	25.400.682.182.090	3.753.015.089.710	1.423.388.472.609	23.071.055.564.990	23.901.104.095.247	(830.048.530.257)

Secara keseluruhan, nilai BPYBDS per 31 Desember 2017 dibandingkan dengan nilai BPYBDS 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar Rp1.499.578.086.843 atau turun 5,90% dari nilai tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, telah dilakukan rekonsiliasi terhadap nilai BPYBDS yang mengakibatkan penyesuaian/selisih nilai dengan keterangan sebagai berikut.

- 1) PT Perusahaan Listrik Negara
Selisih sebesar Rp1.158.797.489.177 sebagaimana dicantumkan dalam Berita Acara No.9/KN.3/Rekon.BPYBDS/2018 merupakan:
 - a) Aset BRR Aceh yang dicatat dalam Pembukuan PT PLN (persero) sebesar Rp429.167.616.703;
 - b) Aset BRR Nias yang dicatat dalam pembukuan PT PLN (Persero) sebesar Rp37.698.240.862;
 - c) Aset konstruksi dalam pengerjaan (Satker UIP) dan uang muka yang dicatat dalam pembukuan PT PLN (Persero) sebesar Rp691.931.631.612.
- 2) PT Angkasa Pura II
Selisih sebesar Rp328.748.958.920 karena pada neraca PT Angkasa Pura II tidak terdapat akun khusus BPYBDS, melainkan terdapat akun komponen ekuitas lainnya yang terdiri dari akun BPYBDS dan pengalihan modal pemerintah pada Perum LPPNPI.
Nilai komponen ekuitas lainnya pada PT AP II adalah sebesar Rp552.273.794.533 dengan rincian sebagai berikut.
 - a) BPYBDS Rp881.022.753.453
 - b) Modal pemerintah yang dialihkan ke perum LPPNPI minus Rp328.748.958.920. Dengan demikian tidak terdapat selisih antara kesepakatan bar (nilai BPYBDS 2017 dengan LK BUMN audited 2017).

15. Barang Milik Negara *Idle*

BMN idle merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN *Idle* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *Idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN *Idle* dan sudah diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain. BMN idle yang telah diserahkan ke Pengelola Barang sebesar Rp54.663.708.402 (nilai sebelum penyusutan). Pada periode Tahunan Tahun 2017 terdapat mutasi atas BMN idle sebagai berikut.

Mutasi tambah:

Nilai mutasi tambah BMN *Idle* Tahunan Tahun 2017 dengan nilai perolehan sebesar Rp15.703.170.123 terdiri dari mutasi tambah tanah sebesar Rp11.640.911.602 dan mutasi tambah bangunan sebesar Rp4.062.258.521. Mutasi tambah senilai Rp15.703.170.123 terdiri dari transfer masuk senilai Rp7.522.721.123 dan saldo awal senilai Rp8.180.449.000 dengan rincian sebagai berikut.

No	KPKNL	Nama Barang	Nilai Perolehan (Rp)
Transfer Masuk			7.522.721.123
1	KPKNL Banjarmasin	Tanah	817.600.000
		Bangunan	228.632.000
2	KPKNL Jakarta III	Tanah	3.068.000.000
		Bangunan	3.060.546.084
3	KPKNL Metro	Tanah	176.421.000
		Bangunan	8.694.000
4	KPKNL Batam	Tanah	8.640.000
		Bangunan	15.271.000
5	KPKNL Medan	Tanah	93.112.602
		Bangunan	45.804.437
Saldo Awal			8.180.449.000
1	KPKNL Bandung	Tanah	1.481.747.000
		Bangunan	94.220.000
2	KPKNL Jakarta II	Tanah	5.995.391.000
		Bangunan	609.091.000
Jumlah Mutasi Tambah BMN <i>Idle</i>			15.703.170.123

Mutasi kurang:

Nilai mutasi kurang BMN eks BMN Idle pada Tahunan Tahun 2017 sebesar Rp1.663.927.000 terdiri dari:

- 1) Hibah BMN eks BMN Idle berupa Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen kepada Pemerintah Kabupaten Majene dengan total nilai sebesar Rp109.485.000 dengan berita acara serah terima Nomor BAST-01/MK.6/WKN.15/KNL.03/2016 pada tanggal 26 Januari 2016.
- 2) Hibah BMN eks BMN Idle berupa 3 (tiga) unit Bangunan Gedung Kantor Permanen kepada Pemerintah Kota Kendari dengan total nilai sebesar Rp1.553.812.000 dengan berita acara serah terima Nomor BAST-01/WKN.15/KNL.05/2017 pada tanggal 20 Juli 2016.

Saldo Akhir:

Saldo akhir BMN Idle pada Pengelola Barang per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp54.663.708.402.

16. Inkracht

Berdasarkan PMK Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 219/PMK.05/2013 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa dalam hal terjadi tuntutan hukum, maka perlakuan atas putusan pengadilan yang *inkracht* atas tuntutan hukum kepada Pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah dan telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum BUN
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan keuangan (CALK) secara agregat
- c. Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah, maka tidak dilakukan penataan pada neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CALK.

Pada Akhir Tahun Anggaran 2017 terdapat 6 tuntutan hukum pada Direktorat Jenderal Pajak yang telah memiliki putusan pengadilan *inkracht*, telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, tidak terdapat lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah, namun belum dianggarkan dalam DIPA. Objek tuntutan hukum tersebut berupa BMN berupa tanah dan bangunan.

17. Yayasan Supersemar

Piutang Negara pada Yayasan Supersemar didasarkan pada amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015, dalam perkara antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia lawan Yayasan Supersemar dan H.M. Soeharto, yang dimenangkan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga Yayasan Supersemar wajib mengganti kerugian negara sebesar USD315.002.183 (tiga ratus lima belas juta dua ribu seratus delapan puluh tiga dolar Amerika Serikat) dan Rp139.438.536.678,56 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah lima puluh enam sen), atau setara dengan Rp4,4 Triliun (sesuai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 2017).

Bahwa atas amar putusan ini telah terdapat eksekusi pencairan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp242.404.759.586,- (dua ratus empat puluh dua miliar, empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdapat beberapa objek yang belum dieksekusi terutama tanah/bangunan Gedung Granadi, dan sebidang tanah di Jalan Raya Megamendung No. 6 masih dalam proses di Pengadilan Negeri Cibinong.

Pemerintah akan melakukan pencatatan dan pengelolaan atas Piutang Yayasan Supersemar dan akan disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2018.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3610/PB/2018 tanggal 20 April 2018 hal Pencatatan Piutang Negara Supersemar, UAP BUN TK DJKN mengungkapkan piutang yang dimaksud pada Catatan atas Laporan Keuangan UAP BUN TK atas pengelola aset yang berada dalam pengelolaan DJKN Tahun 2017 (audited) dan akan disajikan dalam face Neraca Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018.

Lebih lanjut, mengingat per 31 Desember 2017 belum ada penetapan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK) yang melakukan pencatatan, maka DJKN akan menetapkan kemudian. Pencatatan dimaksud dilakukan oleh BUN, namun pengelolaan piutang atas Yayasan Supersemar dilakukan secara bersama-sama oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam hal ini Kejaksaan Agung, Sekretariat Negara, dan Kementerian Keuangan.

18. LK Transaksi Khusus Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361)

Terdapat perbedaan antara *Unfunded Past Service Liability (UPS)* THT PNS yang dicatat oleh PT Taspen (Persero) dengan yang dicatat dalam LKBUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang diakibatkan belum diakuinya kewajiban pemerintah kepada PT Taspen (Persero) atas *UPS* tahun 2016 dan tahun 2017.

Pada 27 Januari 2017, Direksi PT Taspen (Persero) telah mengajukan permohonan pengakuan *UPS* sebesar Rp713.341.551.167 kepada Menteri Keuangan melalui surat nomor SRT-14/DIR.1/012017 hal Permohonan Pengakuan *Unfunded Past Service Liability (UPS)* Akibat Perubahan Formula dan Perbedaan Tanggal Pengangkatan dan Tanggal Penempatan Pegawai ASN. Namun demikian, sampai dengan sekarang belum terdapat penetapan dari Menteri Keuangan yang menjadi dasar pencatatan kewajiban *UPS* pemerintah pada Laporan Keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, pengakuan atas kewajiban *UPS* oleh Pemerintah adalah pada saat besaran *UPS* ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan pengukurannya adalah sebesar nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Berkaitan dengan belum diterbitkannya penetapan Menteri Keuangan atas *UPS* THT PNS sebesar Rp713.341.551.167 tersebut, berdasarkan Surat Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-39/AG.8/2018 tanggal 11 April 2018, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kebijakan terkait *UPS Program* THT PNS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability Program* Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero).
- b. Direksi PT Taspen (Persero) telah mengajukan permohonan pengakuan *UPS* sebesar Rp713.341.551.167 kepada Menteri Keuangan melalui surat nomor SRT-14/DIR.1/012017 tanggal 27 Januari 2017. Berdasarkan perhitungan aktuaris PT Taspen (Persero), perubahan formula rumusan manfaat THT PNS terjadi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat THT bagi PNS, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat THT bagi Hakim.
- c. Perubahan formula rumusan manfaat THT PNS tersebut berupa perubahan batas usia pensiun dari 56 tahun menjadi 58 tahun sehingga menimbulkan *UPS Program* THT bagi peserta yang meninggal sebelum mencapai usia pensiun dengan jumlah *UPS* sebesar Rp669.808.470.045. Selain itu, di tahun 2015 dan 2016 terdapat pengangkatan CPNS sebanyak 148.492 orang yang tanggal penempatannya berbeda dengan tanggal pengangkatannya sehingga menimbulkan *UPS* sebesar Rp43.533.081.122. Total jumlah *UPS* yang diusulkan PT Taspen (Persero) adalah sebesar Rp713.341.551.167.

- d. Menindaklanjuti usulan PT Taspen (Persero), pada tanggal 13 dan 27 Februari 2017 telah dilaksanakan rapat pembahasan di Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA dengan melibatkan Biro Hukum (Setjen Kementerian Keuangan), Direktorat Sistem Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Penyusunan APBN (DJA), dan PT Taspen (Persero). Pokok-pokok pembahasan dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut.
 - Melalui Nota Dinas Nomor ND-294/AG/2016 tanggal 11 Juli 2016, Direktur Jenderal Anggaran telah menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa dengan dilakukannya perubahan atas KMK Nomor 478/KMK.06/2002 jo KMK Nomor 500/KMK.06/2004 (melalui PMK Nomor 128/PMK.02/2016), dimana rumusan P2 (gaji pokok terakhir ditetapkan berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2015) dikunci dan batas usia pensiun PNS diubah dari 56 tahun menjadi 58 tahun, maka tidak lagi timbul *UPSL* Program THT.
 - Namun demikian, berdasarkan perhitungan aktuaris PT Taspen (Persero), terdapat *UPSL* yang timbul karena adanya perubahan formula manfaat pensiun Program THT PNS (dengan berlakunya PMK Nomor 128/PMK.02/2016 dan PMK Nomor 159/PMK.02/2016) dan penambahan peserta baru yang tanggal penempatan berbeda dengan tanggal pengangkatan PNS dengan jumlah sebesar Rp713.341.551.167.
 - PT Taspen (Persero) menyampaikan *UPSL program* THT yang diusulkan sebesar Rp713.341.551.167 agar dapat diakui oleh pemerintah, namun sumber pendanaannya tidak melalui APBN melainkan internal financing PT Taspen (Persero) dengan menggunakan dana cadangan tujuan. Hal ini karena pada dasarnya pemupukan dana cadangan tujuan dimaksudkan untuk menaikkan manfaat program kepada peserta, mengurangi beban pemerintah sebagai pemberi kerja, dan untuk pengeluaran tidak terduga.
 - Mengingat dalam PMK Nomor 25/PMK.02/2013 tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa *UPSL* yang diakui pemerintah dapat dipenuhi secara internal financing PT Taspen (Persero), maka penyelesaiannya agar dilakukan dengan cara PT Taspen (Persero) menyampaikan kembali surat kepada Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti surat permohonan pengakuan *UPSL* sebelumnya, dimana perihal utamanya adalah meminta persetujuan pemenuhan *UPSL* melalui penggunaan dana cadangan. Selanjutnya, berdasarkan surat PT Taspen (Persero) tersebut, akan disampaikan surat jawaban Menteri Keuangan yang isinya mengenai penetapan *UPSL* program THT yang telah dihitung oleh aktuaris PT Taspen (Persero) dimaksud dan persetujuan pemenuhannya dilakukan secara internal financing melalui konversi cadangan dengan mempertimbangkan tingkat solvabilitas PT Taspen (Persero).
- e. Berdasarkan hasil rapat pembahasan dimaksud, PT Taspen diminta segera menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta persetujuan pemenuhan *UPSL program* THT dimaksud melalui penggunaan dana cadangan.
- f. Sampai dengan saat ini PT Taspen (Persero) belum menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka e sehingga belum ada penetapan *UPSL program* THT akibat perubahan formula dan perbedaan tanggal pengangkatan dan tanggal penempatan PNS serta persetujuan pemenuhan *UPSL* melalui penggunaan dana cadangan tujuan dimaksud.
- g. Selanjutnya, Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran DJA akan berkoordinasi dengan PT Taspen (Persero) untuk dapat segera menindaklanjuti hasil rapat pembahasan sebelumnya untuk penyelesaian *UPSL program* THT dimaksud.

19. Subsidi Energi

- a. Subsidi energi berupa BBM (termasuk BBN), LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dianggarkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan BBM, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik dengan harga yang terjangkau.
- b. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM), yang diberikan subsidi oleh Pemerintah adalah Jenis BBM Tertentu yang terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar.
- c. Pemerintah menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak. Harga dasar terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin. Harga jual eceran merupakan harga dasar ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- d. Subsidi BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg terdiri dari subsidi harga dan PPN atas penyerahan BBM Jenis Minyak Tanah dan LPG Tabung 3 Kg oleh badan usaha kepada Pemerintah. Sedangkan, BBM Jenis Minyak Solar diberikan subsidi tetap.
- e. Penyaluran BBM (termasuk BBN) dalam Tahun 2017 melalui PT. Pertamina (Persero) dan badan usaha pedamping yaitu PT. AKR Corporindo Tbk (AKR). Sementara itu, penyaluran LPG Tabung 3 Kg bersubsidi melalui PT. Pertamina (Persero).
- f. Kekurangan pembayaran subsidi Tahun 2011 dan 2012 yang belum dibayarkan masing-masing sebesar Rp5.238.150.599 dan Rp547.141 merupakan kekurangan pembayaran subsidi kepada PT Petronas Niaga Indonesia. Penyelesaian

kekurangan pembayaran subsidi tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak adanya tagihan dari PT Petronas Niaga Indonesia. Hal tersebut disebabkan mulai bulan Mei 2012, PT Petronas Niaga Indonesia sudah tidak mendistribusikan BBM subsidi

- g. LPG bersubsidi merupakan LPG Tabung 3 Kilogram dan diberikan kepada konsumen rumah tangga, usaha mikro, dan kapal perikanan bagi nelayan kecil.
- h. Pembayaran subsidi BBM (termasuk BBN) dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2017 secara final diselesaikan berdasarkan hasil audit yang disampaikan oleh auditor yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- i. Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat/pelanggan dengan golongan tarif yang harga jual tenaga listrik rata-ratanya lebih rendah dari biaya pokok penyediaan tenaga listrik pada tegangan di golongan tarif tersebut, kecuali golongan tarif yang telah menerapkan tarif keekonomian.
- j. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, pada intinya diatur bahwa Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran BBM di masyarakat, sesuai dengan formula perhitungan. Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2016, pada intinya diatur bahwa Menteri ESDM menetapkan harga jual eceran BBM dengan mempertimbangkan antara lain:
 -) Kemampuan keuangan negara atau situasi perekonomian;
 -) Kemampuan daya beli masyarakat; dan/atau
 -) Ekonomi riil dan sosial masyarakat.Dengan mempertimbangkan ketiga hal di atas, menyebabkan penetapan harga jual eceran BBM di masyarakat dapat berbeda dengan hasil perhitungan sesuai formula. Hal ini menimbulkan kelebihan/kekurangan pendapatan Badan Usaha dari selisih harga jual eceran BBM sesuai formula dan harga jual eceran BBM penetapan Pemerintah.
- k. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.02/2017 tanggal 2 Mei 2017 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP Tahun 2015 terkait Penetapan Status Dana atas Penetapan Harga Jual Eceran BBM Jenis Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut.
 -) Kelebihan pendapatan dari hasil penjualan jenis BBM Tertentu Minyak Solar Tahun 2015 diakui sebagai pendapatan PT Pertamina (Persero), sedangkan kekurangan pendapatan dari penjualan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium Tahun 2015 sebagai kerugian PT Pertamina (Persero).
 -) Kelebihan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar Tahun 2015 PT AKR Corporindo Tbk sebesar Rp3.802.767.953,00 diperhitungkan dengan kekurangan pendapatan dari penjualan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium Tahun 2015 PT AKR Corporindo Tbk sebesar Rp1.813.124.216 dan selanjutnya atas selisih kelebihan pendapatan sebesar Rp1.989.643.737 (Rp3.802.767.953 – Rp1.813.124.216) disetorkan ke kas negara.
 -) Untuk Tahun 2016:
 - Dalam hal terdapat kelebihan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium, Badan Usaha wajib menyetorkan kelebihan tersebut ke kas negara.
 - Dalam hal terdapat kekurangan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium, Badan Usaha dapat mengajukan penggantian.
 - Besaran nilai kelebihan/kekurangan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang.
 -) Kementerian ESDM bersama-sama Kementerian Keuangan akan menyusun aturan sebagai landasan hukum apabila terjadi kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium untuk tahun-tahun mendatang. Ketentuan tersebut akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
- l. Berdasarkan hasil audit BPK RI Tahun 2016 atas penugasan Subsidi Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut.
 -) PT Pertamina agar menyetorkan kelebihan pendapatan atas kegiatan penyaluran JBT dan JBKP Tahun 2016 sebesar Rp2.725.093.137.650 ke Kas Negara.
 -) PT AKR Corporindo agar melakukan klaim kekurangan pendapatan atas kegiatan penyaluran JBT Tahun 2016 sebesar Rp7.559.386.800 kepada Pemerintah.
 -) Kementerian ESDM dhi. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan serta PT Pertamina dan PT AKR Corporindo untuk menentukan status kelebihan/kekurangan potensi pendapatan atas penyaluran JBT dan JBKP Tahun 2016. Untuk selanjutnya, agar menyusun SOP yang berisi pola perhitungan acuan parameter dan periode data yang digunakan dalam penyusunan formula harga dasar.
- m. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.02/2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPP Tahun 2015 Terkait Penetapan Status Dana atas Penetapan Harga Jual Eceran (HJE) BBM Jenis Minyak Solar dan Premium, menetapkan sebagai berikut.
 -) Untuk Tahun 2015, kelebihan pendapatan (neto) oleh PYT AKR Corporindo sebesar Rp1,99 Triliun disetor ke kas negara

-) Untuk Tahun 2016, kelebihan pendapatan oleh PT Pertamina sebesar Rp2,72 Triliun disetor ke kas negara dan kekurangan pendapatan oleh PT Pertamina sebesar Rp7,56 Milyar dapat dimintakan penggantian kepada Pemerintah.
- n. Menteri Keuangan belum menetapkan kebijakan penyelesaian atas kelebihan/kekurangan pendapatan badan usaha dari selisih HJE formula dan HJE penetapan pemerintah atas penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Tahun 2017.
- o. Terkait dengan pengungkapan dalam CALK LKBUN dapat dijelaskan sebagai berikut.
-) Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor: S-367/MK.02/2017, kebijakan yang ditempuh apabila terjadi kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Premium mempunyai landasan hukum yang kuat, maka saat ini Menteri Keuangan menunggu penetapan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014;
-) Mengingat Perpres Nomor 191 Tahun 2014 diinisiasi oleh Kementerian ESDM maka revisinya juga berada dalam kewenangannya. Pembahasan revisi Perpres dimaksud telah dilakukan (telah dibentuk Panitia Antar Kementerian) dan saat ini sedang proses untuk permohonan harmonisasi dari Kementerian ESDM ke Kementerian Hukum dan HAM; dan
-) Dengan demikian, dalam rangka kehati-hatian, prinsip akuntabel dan *good governance*, Menteri Keuangan belum dapat menetapkan mekanisme pencatatan dan pelaporan atas kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan BBM selama belum ditetapkan aturannya, sehingga atas hal tersebut belum dilakukan pencatatan dan pelaporannya.

Asersi Manajemen BUMN Operator dan KPA Belanja Subsidi/Pso dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Subsidi Tahun 2017 *Unaudited*

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 60b/LHP/XV/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang LHP BPK RI atas LKPP Tahun 2016, terdapat temuan pemeriksaan yaitu Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi kurang memadai dengan rekomendasi kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar menetapkan standarisasi Asersi Manajemen yang harus dibuat oleh KPA dan BUMN Operator.

Melalui surat Nomor S-2224/AG/2017 tanggal 27 Oktober 2017 hal Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Asersi Manajemen Tahunan Tahun 2017, Direktur Jenderal Anggaran telah menyampaikan form asersi manajemen tersebut kepada KPA Belanja Subsidi/PSO dan Direksi BUMN Operator untuk diisi dan diungkapkan dalam Laporan Keuangan Belanja Subsidi Tahun 2017 *Unaudited*.

20. Klasifikasi Utang Pemerintah

Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk. Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut (dalam miliar rupiah):

No	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah (Rp miliar)
		Valas (Rp miliar)	Rupiah (Rp miliar)	
1	Utang Luar Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	827.194	836.147	1.663.341
	b. Pinjaman luar negeri	739.340	-	739.340
	Jumlah Utang Luar Negeri	1.566.534	836.147	2.402.681
2.	Utang Dalam Negeri			
	a. SBN yang dimiliki oleh penduduk	80.334	1.504.956	1.585.290
	b. Pinjaman dalam negeri	-	5.741	5.741
	Jumlah Utang Dalam Negeri	80.334	1.510.697	1.591.031
	Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri Pemerintah	1.646.868	2.346.844	3.993.712

Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan *unamortized discount* dan *unamortized premium*).

21. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPP Tahun 2016

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2015, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah menyusun laporan tindak lanjut terhadap Rekomendasi BPK dalam LHP atas LKPP Tahun 2016 dan menyampaikannya kepada BPK.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

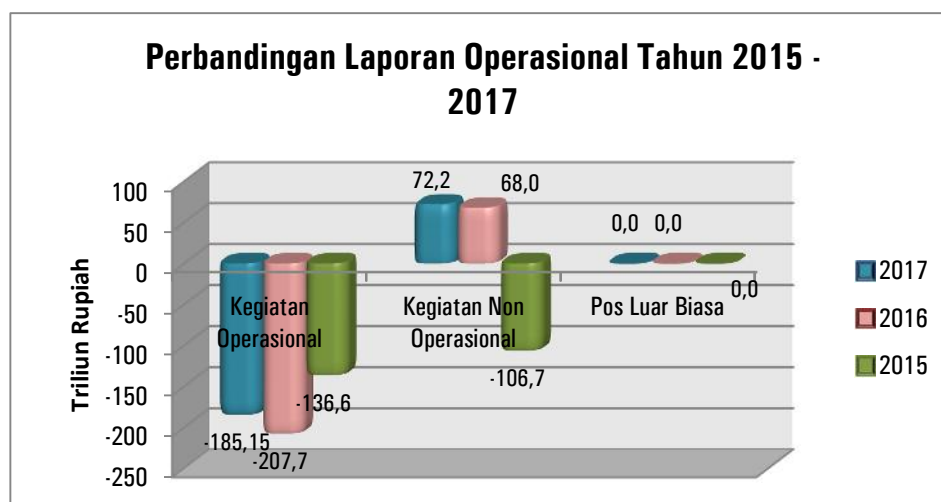
Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit LO.

Defisit LO Tahun 2017 adalah sebesar Rp112.982.816.158.602. Dibandingkan Tahun 2016 yang mengalami defisit sebesar Rp139.724.987.772.978 nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp26.742.171.614.376 atau minus 19,14 persen. Surplus/(Defisit) LO Tahun 2017 terdiri dari Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp185.150.585.052.461 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp72.167.768.893.859, sedangkan Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa sebesar Rp0.

Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2017 sebesar Rp185.150.585.052.461, diperoleh dari Pendapatan Operasional sebesar Rp1.806.520.138.549.830 dan Beban Operasional sebesar Rp1.991.670.723.602.291.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp72.167.768.893.859, diperoleh dari Defisit Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp51.589.678.445.482, Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp120.797.322.243 dan surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp123.878.244.661.584.

Laporan Operasional Tahun 2017 menyajikan angka Tahun 2016 sebagai pembanding. Perkembangan Laporan Operasional sejak Tahun 2015 dapat dilihat pada grafik 27.



Grafik 27. Perbandingan Laporan Operasional Tahun 2015 s.d Tahun 2017

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

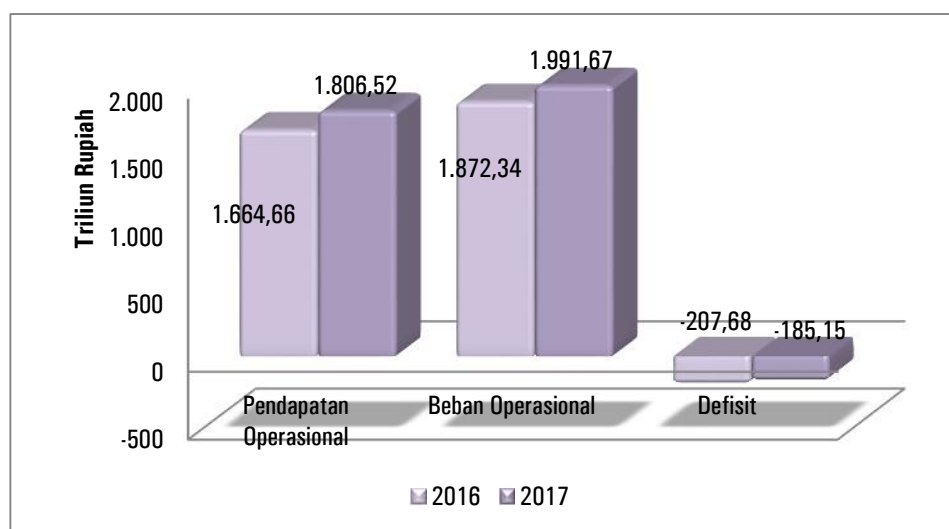
E.2.1 Kegiatan Operasional

Kegiatan operasional keuangan Pemerintah Pusat tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Transaksi keuangan yang dilaporkan sebagai kegiatan operasional Pemerintah Pusat adalah seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara normal oleh seluruh entitas akuntansi lingkup Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Operasional seluruhnya merupakan Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak, dan Pendapatan Hibah. Pendapatan Perpajakan terdiri dari Pendapatan Pajak Penghasilan, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, Pendapatan Pajak Lainnya, Pendapatan Bea Masuk, Pendapatan Bea Keluar dan Pendapatan Pajak Lain-lain. Pendapatan Negara Bukan Pajak meliputi Penerimaan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Pendapatan BLU.

Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, Beban Lain-lain, dan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Defisit Tahun 2017 dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp185.150.585.052.461. Dibandingkan dengan Tahun 2016 yang mengalami defisit sebesar Rp207.681.508.623.871 nilai ini mengalami penurunan sebesar Rp22.530.923.571.410 atau minus 10,85 persen. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2017 dan 2016 dapat dilihat pada grafik 28.



Grafik 28. Perbandingan Pendapatan, Beban, dan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2017 dan Tahun 2016

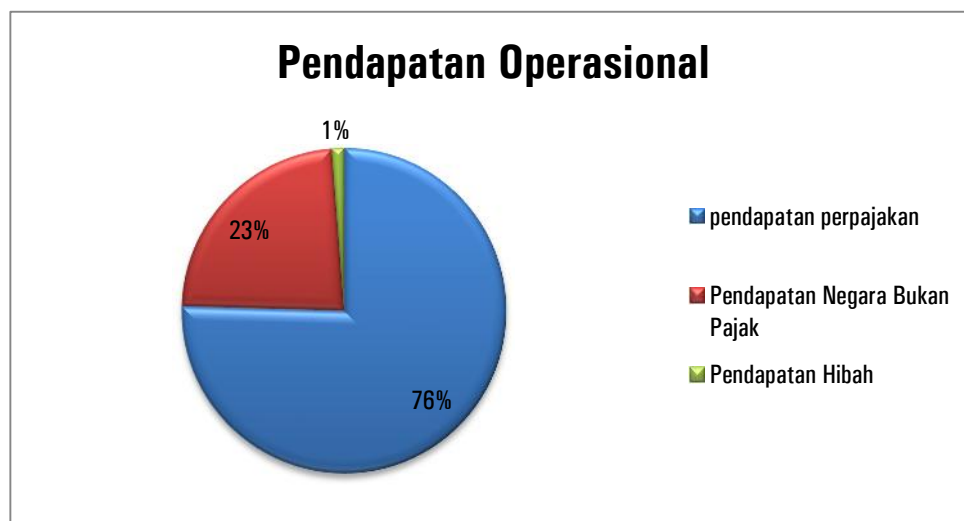
E.2.1.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Rp1.806,52 triliun

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan operasional sebesar Rp1.806.520.138.549.830 terdiri dari pendapatan perpajakan sebesar Rp1.363.122.621.463.588, Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp421.295.487.747.415, dan Pendapatan Hibah sebesar Rp22.102.029.338.827. Nilai Pendapatan Operasional lebih tinggi sebesar Rp141.863.686.701.928 atau 8,52 persen dibanding

Tahun 2016 yang nilainya adalah sebesar Rp1.664.656.451.847.902. Besaran perbandingan komponen pendapatan operasional dapat dilihat pada Grafik 29.



Grafik 29. Komposisi Pendapatan Operasional Tahun 2017

E.2.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

*Pendapatan
Perpajakan
Rp1.363,12
triliun*

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak Pemerintah Pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Untuk Tahun 2017, pendapatan perpajakan adalah sebesar Rp1.363.122.621.463.588. Nilai pendapatan ini naik sebesar Rp75.587.923.524.071 atau 5,87 persen dibanding tahun 2016 sebesar Rp1.287.534.697.939.517. Pendapatan perpajakan Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan Pajak Penghasilan	662.417.200.380.162	662.897.745.520.696
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	479.591.110.489.748	412.513.505.989.075
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	17.129.686.745.834	19.279.436.983.667
Pendapatan Cukai	153.286.335.416.261	143.491.380.633.046
Pendapatan Pajak Lainnya	11.065.264.993.893	14.438.834.522.693
Pendapatan Bea Masuk	35.054.329.773.200	31.905.961.605.581
Pendapatan Bea Keluar	4.544.847.292.042	3.010.424.441.356
Pendapatan Pajak Lain-Lain	33.846.372.448	(2.591.756.597)
Total	1.363.122.621.463.588	1.287.534.697.939.517

E.2.1.1.1.1 Pajak Penghasilan

*Pajak
Penghasilan
Rp662,41
triliun*

Pajak Penghasilan Tahun 2017 adalah sebesar Rp662.417.200.380.162. Pendapatan Pajak Penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp480.545.140.534 atau minus 0,07 persen dibanding periode Tahun 2016 sebesar Rp662.897.745.520.696. Pajak Penghasilan Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan PPh Minyak Bumi	16.607.135.959.156	10.800.338.822.787
Pendapatan PPh Gas Bumi	33.711.719.503.816	25.275.273.264.425
Pendapatan PPh Migas Lainnya	4.604.623.804	20.572.194.519
Pendapatan PPh Pasal 21	118.232.109.781.647	109.695.995.976.713

Pendapatan PPh Pasal 22	16.193.970.914.029	11.352.820.623.759
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	43.189.095.956.050	37.946.097.141.169
Pendapatan PPh Pasal 23	35.528.626.703.126	29.001.847.899.279
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	7.321.389.939.374	5.358.233.643.043
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	218.520.440.033.635	165.713.949.246.317
Pendapatan PPh Pasal 26	46.195.666.837.559	36.272.470.142.582
Pendapatan PPh Final	105.893.884.322.644	118.247.987.704.062
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	12.084.406.869.029	104.165.339.750.037
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	349.728.807	(49.956.126)
Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	132.161.316	40.178.295
Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah	219.978	3.244.182
Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah	614.833.045	340.909
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Ditanggung Pemerintah	1.702.566.558.147	1.909.022.081.136
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	7.230.485.435.000	7.137.803.223.608
Jumlah	662.417.200.380.162	662.897.745.520.696

Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2017 terbesar berasal dari Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan. Pendapatan tersebut menunjukkan adanya kinerja positif sektoral secara umum terutama pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan. Adapun penurunan pada PPh Final antara lain disebabkan oleh selesainya masa intensif revaluasi aktiva tetap dan penurunan tarif PPh Final Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan.

E.2.1.1.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2017 adalah sebesar Rp479.591.110.489.748. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp67.077.604.500.673 atau 16,26 persen dibandingkan periode Tahun 2016 sebesar Rp412.513.505.989.075. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

*Pajak
Pertambahan
Nilai dan
Penjualan
Barang Mewah
Rp479,59
triliun*

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan PPN Dalam Negeri	312.942.569.311.304	273.321.504.779.516
Pendapatan PPN Impor	149.224.820.121.550	122.780.380.159.161
Pendapatan PPN Lainnya	150.814.235.849	262.608.259.609
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	13.367.715.729.437	11.799.175.397.605
Pendapatan PPnBM Impor	3.797.914.102.090	4.284.102.480.961
Pendapatan PPnBM Lainnya	107.276.989.518	65.734.912.223
Jumlah	479.591.110.489.748	412.513.505.989.075

Peningkatan pada Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2017 dipengaruhi oleh pertumbuhan positif pada Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan Besar, serta pertumbuhan realisasi belanja barang dan modal termasuk realisasi Dana Desa. Tingginya konsumsi bahan bakar dalam negeri dan konsumsi Barang Konsumsi juga meningkatkan nilai impor yang berpengaruh positif terhadap peningkatan Pajak Pertambahan Nilai Impor. Adapun peningkatan pada PPnBM berasal dari sektor industri otomotif berupa pertumbuhan penjualan mobil baru. Aktivitas pemeriksaan, penagihan dan

penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah serta adanya pertumbuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak juga memengaruhi peningkatan nilai Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah.

E.2.1.1.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

*Pajak Bumi dan
Bangunan
Rp17,12 triliun*

Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 adalah sebesar Rp17.129.686.745.834. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.149.750.237.833 atau minus 11,15 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp19.279.436.983.667. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan PBB Pedesaan	-	(656.068.620)
Pendapatan PBB Perkebunan	2.258.996.189.377	2.105.311.540.010
Pendapatan PBB Kehutanan	693.240.372.820	608.500.546.446
Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	1.798.108.620.064	1.037.292.566.461
Pendapatan PBB Migas	12.071.509.430.753	15.267.971.009.097
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	253.462.867.931	215.845.331.211
Pendapatan PBB Lainnya	54.369.264.889	45.172.059.062
Jumlah	17.129.686.745.834	19.279.436.983.667

Nilai Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 sebesar Rp17.129.686.745.834 termasuk di dalamnya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.216.911.547.

E.2.1.1.1.4 Pajak Cukai

*Pajak Cukai
Rp153,28
triliun*

Pajak Cukai Tahun 2017 adalah sebesar Rp153.286.335.416.261. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.794.954.783.215 atau 6,83 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp143.491.380.633.046. Pajak Cukai Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	147.718.195.604.756	137.935.634.471.524
Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	147.025.706.280	171.012.170.260
Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	5.567.468.557.500	5.307.817.827.474
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	(159.167.177.380)	65.870.206.870
Pendapatan Cukai Lainnya	12.812.725.105	11.045.956.918
Jumlah	153.286.335.416.261	143.491.380.633.046

E.2.1.1.1.5 Pajak Lainnya

*Pajak Lainnya
Rp11,06 triliun*

Pajak Lainnya Tahun 2017 adalah sebesar Rp11.065.264.993.893. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.373.569.528.800 atau minus 23,36 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp14.438.834.522.693. Pajak Lainnya Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan Bea Materai	1.367.164.381.348	1.338.844.474.663
Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	3.785.684.479.195	3.399.428.098.412
Pendapatan PPN Batubara	982.575.599.538	1.082.038.500.742
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	33.820.989.027	22.497.315.192

Pendapatan Bunga Penagihan PPh	2.391.952.222.219	4.711.628.388.315
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	2.457.001.906.848	3.847.462.240.304
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	46.863.187.478	33.289.118.631
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	202.228.240	3.646.386.434
Jumlah	11.065.264.993.893	14.438.834.522.693

Penurunan pendapatan pajak lainnya tahun 2017 antara lain disebabkan oleh pendapatan yang tidak berulang berupa pembayaran bunga penagihan di tahun 2016 dengan nilai yang cukup signifikan.

E.2.1.1.1.6 Bea Masuk

*Bea Masuk
Rp35,05 triliun*

Bea Masuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp35.054.329.773.200. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.148.368.167.619 atau 9,87 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp31.905.961.605.581. Bea Masuk Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan Bea Masuk	33.492.227.346.535	30.341.899.348.316
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	589.834.024.710	703.569.187.564
Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan impor Tujuan Ekspor (KITE)	440.871.610.209	445.524.656.730
Pendapatan BM-DTP	280.946.213.728	280.001.769.046
Pendapatan Pabean Lainnya	4.671.058.018	17.328.688.824
Pendapatan Bea Masuk Antidumping	182.032.920.000	86.525.981.890
Pendapatan Bea Masuk Imbalan	2.105.000	58.707.473
Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	63.744.495.000	31.053.265.738
Jumlah	35.054.329.773.200	31.905.961.605.581

Peningkatan Bea Masuk tahun 2017 berasal dari peningkatan devisa impor dan peningkatan utilitasi *Free Trade Agreement* (FTA).

E.2.1.1.1.7 Bea Keluar

*Bea Keluar
Rp4,54 triliun*

Bea Keluar Tahun 2017 adalah sebesar Rp4.544.847.292.042. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.534.422.850.686 atau 50,97 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp3.010.424.441.356. Bea Keluar tersebut terdiri dari Pendapatan Bea Keluar, Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar, dan Pendapatan Bunga. Bea Keluar Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan Bea Keluar	4.535.319.521.260	3.012.429.921.824
Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	9.287.233.578	(2.588.481.734)
Pendapatan Bunga Bea Keluar	240.537.204	583.001.266
Jumlah	4.544.847.292.042	3.010.424.441.356

Pendapatan Bea Keluar Tahun 2017 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan ekspor mineral dan harga kontrak *Crude Palm Oil* (CPO) yang belum melewati ambang batas USD 750/barel.

E.2.1.1.1.8 Pajak Lain-Lain

*Pajak Lain-lain
Rp33,84 miliar*

Pajak lain-lain Tahun 2017 adalah sebesar Rp33.846.372.448. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp36.438.129.045 atau 1.405,92 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar minus

Rp2.591.756.597. Pendapatan Pajak Lain-lain tersebut adalah pendapatan yang berasal dari pajak yang telah dipungut oleh Bendahara namun sampai dengan 31 Desember 2017 belum disetorkan ke kas negara (berada pada rekening Bendahara) sehingga sudah merupakan pendapatan bagi Pemerintah Pusat.

E.2.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp421,29
triliun*

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada Tahun 2017 sebesar Rp421.295.487.747.415 yang merupakan pendapatan dari Penerimaan Sumber Daya Alam sebesar Rp135.324.531.870.897, pendapatan dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN sebesar Rp137.711.638.621.387, PNBPN Lainnya sebesar Rp100.052.858.157.571 dan Pendapatan BLU sebesar Rp48.206.459.097.560. Secara keseluruhan nilai PNBPN mengalami kenaikan sebesar Rp56.541.099.024.685 atau 15,50 persen dibandingkan Tahun 2016 yaitu pendapatan PNBPN sebesar Rp364.754.388.722.730.

E.2.1.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

*Pendapatan
Sumber Daya
Alam Rp135,32
triliun*

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Tahun 2017 adalah sebesar Rp135.324.531.870.897. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp45.619.726.503.272 atau 50,86 persen dibandingkan Tahun 2016 yaitu pendapatan SDA sebesar Rp89.704.805.367.625. Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan Minyak dan Gas Bumi	106.391.959.607.594	68.990.581.836.072
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	585.724.704.360	514.336.417.448
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan batubara	22.164.409.725.679	15.176.568.662.531
Pendapatan Dana Reboisasi	1.586.709.274.019	1.494.541.496.584
Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	862.625.212.833	808.208.590.245
Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	5.181.430.850	10.742.349.935
Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	31.011.178.520	101.033.639.500
Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	1.508.940.299.429	1.321.221.793.605
Pendapatan Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air dan Energi Air	635.002.996	359.055.750
Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang perbenihan	94.892.000	-
Pendapatan dari Sertifikasi Benih	78.805.810	167.112.750
Pendapatan Perikanan	491.074.184.369	362.159.886.655
Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah Pertambangan Panas Bumi	1.669.520.840.396	903.585.832.397
Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi	25.081.291.549	20.451.060.413
Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Panas Bumi	1.485.420.493	847.633.740
Jumlah	135.324.531.870.897	89.704.805.367.625

Kenaikan pendapatan SDA Tahun 2017 antara lain terdapat pada pendapatan iuran tetap dan iuran produksi pertambangan Minerba. Kenaikan realisasi penerimaan SDA tersebut juga secara signifikan adalah pada pendapatan minyak bumi yang dipengaruhi oleh naiknya ICP. Rata-rata realisasi ICP tahun 2017 mencapai USD 51,2 per barel, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata ICP tahun 2016 yang tercatat sebesar USD 40,2 per barel. Kenaikan Pendapatan Pertambangan

Umum dipengaruhi antara lain oleh membaiknya harga dan kinerja produksi batubara, dan komoditas pertambangan umum.

Komponen pendapatan SDA Tahun 2017 terbesar disumbang oleh pendapatan minyak dan gas bumi. Pendapatan Minyak Bumi LO dan Pendapatan Gas Bumi LO diakui pada saat diterimanya tagihan atas hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA Migas yang diterbitkan oleh SKK Migas dalam periode Januari s.d. Desember 2017. Pendapatan Minyak Bumi LO dan Gas Bumi LO akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang PNPB SDA Migas. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas, namun di sisi lain merupakan pendapatan pajak. Di dalam Pendapatan Migas – LO juga termasuk nilai estimasi tagihan *overlifting* KKKS Tahun 2017.

E.2.1.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN Tahun 2017 adalah sebesar Rp137.711.638.621.387. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.271.312.425.682 atau 6,39 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp129.440.326.195.705.

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN diakui sebesar jumlah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham BUMN dan Perusahaan Minoritas/Lainnya untuk ditetapkan sebagai dividen yang harus dibayarkan kepada Pemerintah RI, yang terdiri dari PNPB Bagian Pemerintah atas Laba BUMN di bawah Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan, PNPB Laba Perusahaan Penerbit SBSN, dan PNPB Pendapatan Dividen perusahaan minoritas dengan *cost method*.

E.2.1.1.2.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

PNBP Lainnya Tahun 2017 adalah sebesar Rp100.052.858.157.571. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.077.039.038.568 atau minus 2,03 persen dari tahun 2016 sebesar Rp102.129.897.196.139. PNPB Lainnya Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan dan Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan)		
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	16.882.736.366.225	13.278.122.611.898
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	37.629.836.703
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	15.151.790.443.323	17.554.030.090.198
Pendapatan Sewa dan Pemanfaatan BMN	434.871.371.242	367.630.620.122
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	521.031.874.232	474.834.784.412
Total Pendapatan dan Pengelolaan BMN	32.990.430.055.022	31.712.247.943.333
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Jasa I	14.877.588.269.071	12.756.029.767.381
Pendapatan Jasa II	1.497.418.350.518	1.490.443.753.442
Pendapatan Jasa Luar Negeri	689.618.070.787	634.629.690.928
Pendapatan Jasa Perbankan	2.185.557.412.093	55.903.806.990
Pendapatan atas Pengelolaan TSA dan/atau atas Penempatan Uang Negara	5.012.412.454.044	4.521.164.483.204
Pendapatan Jasa Kepolisian I	8.904.134.803.835	3.668.352.947.446
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	19.010.322.821.945	14.229.404.017.109
Pendapatan Jasa Kepolisian II	636.426.616.239	150.475.366.503
Pendapatan Jasa Lainnya	1.389.788.173.001	1.285.797.728.123

Bagian
Pemerintah
atas Laba
BUMN
Rp137,71
triliun

Pendapatan
Bukan Pajak
Lainnya
Rp100,05
triliun

Total Pendapatan Jasa	54.203.266.971.533	38.792.201.561.126
Pendapatan Bunga		
Pendapatan Bunga	572.709.196.587	1.526.603.236.415
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah	69.108.954.346	46.452.274.932
Total Pendapatan Bunga	641.818.150.933	1.573.055.511.347
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	873.840.662.791	939.688.615.790
Pendapatan Pendidikan	4.462.234.079.337	4.353.674.948.380
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	1.362.171.827.496	2.601.501.560.528
Pendapatan Iuran dan Denda	2.441.937.738.503	1.991.160.805.373
Total Pendapatan Kejaksaan, Pendidikan, Gratifikasi, Iuran dan Denda	9.140.184.308.127	9.886.025.930.071
Pendapatan Lain-lain		
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	119.678.881.905	58.353.565.588
Pendapatan Pelunasan Piutang	890.371.662	23.037.425.054
Pendapatan dari Penutupan Rekening	1.452.252.303	1.042.418.092
Pendapatan Selisih Kurs	23.214.731.478	248.507.333.765
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	-	202.718.733.280
Pendapatan dari retur SP2D	293.491.620.646	430.803.844.287
Pendapatan setoran dari sisa uang non TP/TGR pensiunan	2.948.681.700	-
Pendapatan Lain-lain II	1.897.836.438.621	18.937.842.734.431
Total Pendapatan Lain-lain	2.339.512.978.315	19.902.306.054.497
Pendapatan Penyesuaian Akrua		
Pendapatan Sitaan/Rampasan	737,645,693,641	264.060.195.765
Total Pendapatan Penyesuaian Akrua	737,645,693,641	264.060.195.765
Jumlah PNPB Lainnya	100.052.858.157.571	102.129.897.196.139

E.2.1.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

*Pendapatan
BLU Rp48,20
triliun*

Pendapatan BLU Tahun 2017 adalah sebesar Rp48.206.459.097.560. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.727.099.134.299 atau 10,87 persen dari tahun 2016 sebesar Rp43.479.359.963.261. Pendapatan BLU Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	25.801.151.973.538	24.756.350.010.820
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.136.550.154.351	1.225.531.326.977
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	17.634.171.781.976	14.327.610.931.994
Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	340.511.688.488	95.336.367.279
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	44.912.385.598.353	40.404.828.637.070
Pendapatan Hibah BLU	317.681.155.334	217.795.073.592
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	594.401.221.874	877.180.555.101
Pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat	9.673.878.071	-
Pendapatan BLU Lainnya	2.360.973.399.149	1.978.505.182.825
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	11.338.544.779	1.050.514.673
Pendapatan BLU Lainnya dari penjualan BMN BLU	5.300.000	-
Jumlah	48.206.459.097.560	43.479.359.963.261

Kenaikan pendapatan BLU terutama disebabkan oleh adanya penyesuaian tarif layanan pada beberapa BLU dan adanya BLU yang baru ditetapkan pada tahun 2016.

Pendapatan Hibah Rp22,10 triliun

E.2.1.1.3 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah selama Tahun 2017 adalah sebesar Rp22.102.029.338.827. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.734.664.153.172 atau 78,71 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp12.367.365.185.655. Pendapatan Hibah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas yang berasal dari negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, individu, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa, yang tidak dimaksudkan untuk dibayar kembali oleh pemerintah kepada pemberi hibah dan manfaatnya dinikmati oleh pemerintah.

Pendapatan Hibah Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan Hibah Dalam Negeri		
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Barang	2.960.516.973.884	849.965.398.570
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Jasa	148.800.000	4.706.782.066
Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang	7.410.435.627.384	5.741.933.922.587
Total Pendapatan Hibah Dalam Negeri	10.371.101.401.268	6.596.606.103.223
Pendapatan Hibah Luar Negeri		
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	530.076.024.609	1.226.991.075.038
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	1.016.604.071.107	529.293.392.007
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	4.557.855.044.216	1.656.093.745.463
Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	3.689.303.350.497	2.018.741.281.677
Total Pendapatan Hibah Luar Negeri	9.793.879.490.429	5.431.119.494.185
Pendapatan Hibah Langsung Lainnya	1.937.089.447.130	339.639.588.247
Jumlah Pendapatan Hibah	22.102.029.338.827	12.367.365.185.655

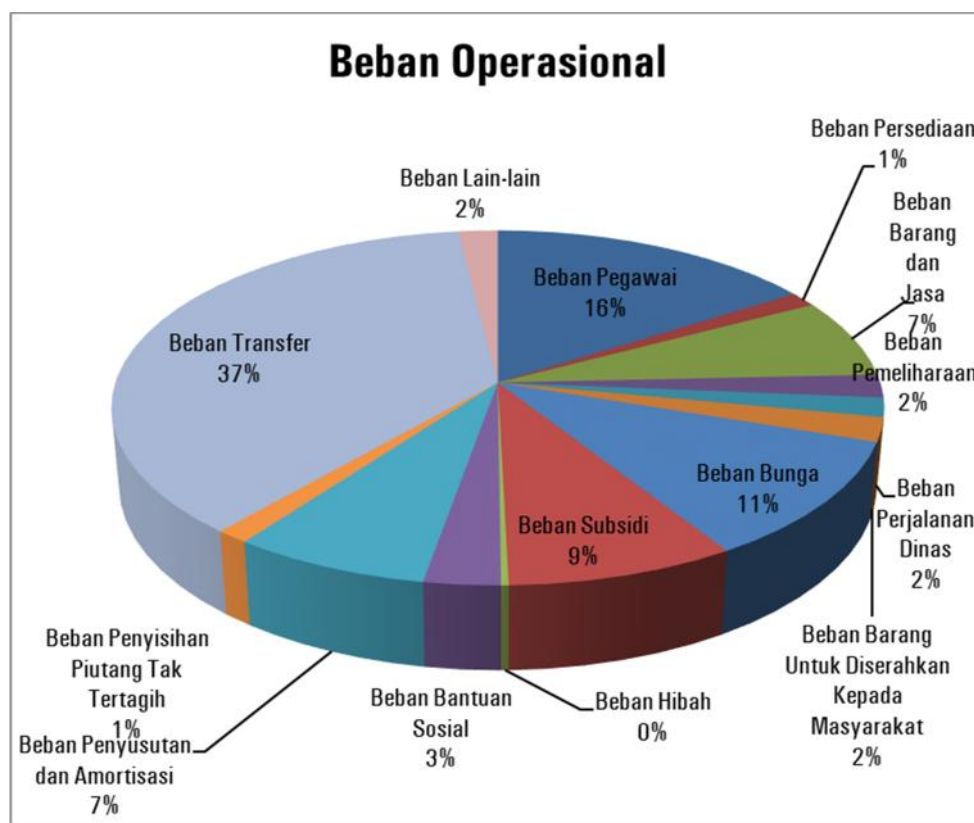
Pendapatan Hibah langsung lainnya sebesar Rp1.937.089.447.130 adalah pendapatan hibah langsung yang diterima K/L namun belum disahkan sebagai pendapatan hibah oleh Bendahara Umum Negara yang diterima di tahun 2017. Pendapatan hibah langsung lainnya termasuk di dalamnya pendapatan hibah dalam bentuk uang yang pencairannya melalui kuasa BUN sebesar Rp723.814.213.395 yang belum diterima NoD-nya.

Beban Operasional Rp1.991,67 triliun

E.2.1.2 Beban Operasional

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.991.670.723.602.291. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp119.332.763.130.518 atau 6,37 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp1.872.337.960.471.773. Beban Operasional meliputi Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan dan Amortisasi serta Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Perbandingan besaran beban operasional dapat dilihat pada grafik 30.



Grafik 30. Komposisi Beban Operasional Tahun 2017

Rincian Beban Operasional Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Pegawai	313.570.939.079.330	309.722.353.734.438
Beban Persediaan	26.506.371.268.281	26.135.101.551.288
Beban Barang dan Jasa	143.272.384.828.489	138.649.541.418.029
Beban Pemeliharaan	41.623.251.981.571	36.040.691.199.649
Beban Perjalanan Dinas	34.884.409.891.254	34.422.142.054.918
Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	43.450.653.025.621	39.447.838.053.777
Beban Bunga	217.040.353.670.203	189.923.429.054.649
Beban Subsidi	167.834.411.964.126	163.883.662.035.641
Beban Hibah	5.445.667.259.156	7.129.917.667.130
Beban Bantuan Sosial	55.858.510.175.202	45.630.374.577.137
Beban Transfer	735.149.293.850.265	686.802.250.757.309
Beban Lain-lain	37.776.589.355.266	30.456.234.208.826
Beban Penyusutan dan Amortisasi	144.842.686.552.886	134.417.111.004.057
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	24.415.200.700.641	29.677.313.154.925
Jumlah	1.991.670.723.602.291	1.872.337.960.471.773

E.2.1.2.1 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp313,57
triliun*

Beban Pegawai untuk Tahun 2017 adalah sebesar Rp313.570.939.079.330. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.848.585.344.892 atau 1,24 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp309.722.353.734.438. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti Dokumen Kepegawaian, Daftar Gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud. Beban Pegawai Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Gaji PNS	37.961.653.987.262	37.951.385.709.074
Beban Tunjangan PNS	22.284.506.568.915	23.805.547.989.268
Beban Tunjangan Umum, Profesi Guru, Dosen, Profesor, Hakim Adhoc	20.342.647.958.846	21.724.100.089.141
Beban Gaji Pokok PNS TNI/POLRI	3.495.246.940.109	3.540.157.803.916
Beban Tunjangan PNS TNI/POLRI	1.449.413.380.877	1.434.926.045.132
Beban Gaji Pokok TNI/POLRI	31.508.158.982.839	31.262.542.879.480
Beban Tunjangan TNI/POLRI	24.090.702.030.115	24.273.927.248.872
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	633.585.187.202	615.894.589.528
Beban Gaji dan Tunjangan Dokter dan Bidan PTT	349.048.423.545	1.480.740.666.342
Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS	8.847.289.629.256	8.042.664.442.629
Beban Honorarium	1.436.541.593.948	2.019.665.408.635
Beban Lembur	726.465.940.735	707.073.464.783
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	54.432.772.543.919	51.860.841.687.567
Beban Pensiun dan Uang Tunggu PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara, Hakim, Veteran, Askes, Cadangan	97.278.241.946.210	93.148.869.336.599
Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU	8.734.663.965.552	7.854.016.373.472
Jumlah	313.570.939.079.330	309.722.353.734.438

Persentase kenaikan pada komponen beban pegawai Tahun 2017 terdapat pada Beban Gaji dan Tunjangan Non PNS serta Beban Gaji dan Tunjangan Pegawai BLU, sedangkan persentase penurunan yang signifikan terdapat pada Beban Gaji dan Tunjangan Dokter dan Bidan PTT dan Beban Honorarium.

E.2.1.2.2 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp26,50 triliun*

Beban Persediaan pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp26.506.371.268.281. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp371.269.716.993 atau 1,42 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp26.135.101.551.288. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Persediaan konsumsi	8.960.009.757.490	8.646.093.564.634
Beban Persediaan amunisi	2.642.815.847.024	1.180.100.110.229
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	6.353.373.570	142.173.004.035
Beban Persediaan bahan baku	7.693.477.915.628	7.407.903.629.602
Beban Persediaan barang dalam proses	-	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	683.903.388.079	3.056.469.872.259
Beban Persediaan Lainnya	6.519.810.986.490	1.848.005.664.864
Beban Persediaan Badan Layanan Umum	-	3.854.355.705.665
Jumlah	26.506.371.268.281	26.135.101.551.288

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Pencatatan beban persediaan hanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Beban persediaan dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara menghitung saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang untuk selanjutnya nilainya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

E.2.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp143,27
triliun*

Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 adalah sebesar Rp143.272.384.828.489. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.622.843.410.460 atau 3,33 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp138.649.541.418.029. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Barang Operasional	34.198.511.297.295	32.085.532.793.682
Beban Barang Non Operasional	53.196.825.930.617	50.552.840.966.883
Beban Barang Pengganti Pajak Pusat Dalam Rangka Hibah MCC	11.935.532.901	8.581.127.596
Beban Kontribusi	191.543.039.201	194.234.478.592
Beban Langganan Daya dan Jasa (listrik, telepon, air dan lainnya)	5.884.563.934.738	5.412.742.044.490
Beban Jasa Pos dan Giro	23.441.961.207	17.745.350.441
Beban Jasa Konsultan	9.048.231.664.457	7.620.675.858.158
Beban Sewa	3.820.164.353.004	3.448.544.330.732
Beban Jasa Profesi	4.135.452.364.447	4.143.004.071.238
Beban Jasa Lainnya	10.193.624.065.864	7.972.514.318.075
Beban Barang dan Jasa BLU	22.430.503.575.452	21.946.056.307.842
Beban Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	-	5.206.132.190.006
Beban Aset Ekstrakomptabel	137.587.109.306	40.937.580.294
Jumlah	143.272.384.828.489	138.649.541.418.029

Persentase kenaikan beban barang dan jasa yang signifikan terdapat pada Beban Aset Ekstrakomptabel disebabkan adanya realisasi belanja modal yang nilainya di bawah nilai kapitalisasi.

E.2.1.2.4 Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp41,62 triliun*

Beban Pemeliharaan Tahun 2017 adalah sebesar Rp41.623.251.981.571. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.582.560.781.922 atau 15,49 persen dibandingkan periode Tahun 2016 sebesar Rp36.040.691.199.649. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.257.018.273.116	5.853.993.481.834
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	272.388.818.828	252.623.733.166
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.819.980.166.644	9.672.958.992.532
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	5.758.299.250.582	7.428.630.142.510
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	237.184.279.134	218.462.684.568
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	5.055.736.692.978	3.740.483.003.853
Beban Pemeliharaan Irigasi	848.411.865.919	236.475.764.980

Beban Pemeliharaan Jaringan	1.469.618.768.322	1.318.076.728.566
Beban Pemeliharaan Lainnya	351.993.090.934	359.734.369.023
Beban Pemeliharaan BLU	1.005.732.416.743	2.138.234.949.469
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	312.766.216.914	1.536.728.692.507
Beban Persediaan suku cadang	7.234.122.141.457	3.284.288.656.641
Jumlah	41.623.251.981.571	36.040.691.199.649

Persentase kenaikan paling signifikan pada Beban Pemeliharaan Tahun 2017 terdapat pada Beban Pemeliharaan Irigasi yaitu sebesar 258,77 persen dan Beban Persediaan Suku Cadang sebesar 120,26 persen.

E.2.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp34,88
triliun*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 adalah sebesar Rp34.884.409.891.254. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp462.267.836.336 atau 1,34 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp34.422.142.054.918. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Perjalanan Biasa	16.747.144.795.003	15.596.726.569.245
Beban Perjalanan Tetap	73.054.664.231	104.611.199.335
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.645.789.146.429	1.554.079.950.265
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota	4.855.706.875.572	5.084.062.150.330
Beban Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota	7.945.015.527.711	8.999.751.055.892
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1.393.783.671.513	1.095.097.601.377
Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	4.361.213.393	2.330.666.869
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.436.308.590.633	1.295.728.426.324
Beban Perjalanan Badan Layanan Umum	783.245.406.769	689.754.435.281
Jumlah	34.884.409.891.254	34.422.142.054.918

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan Dinas Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* dalam kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri meliputi Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri, Beban Perjalananan Dinas Tetap Luar Negeri, dan Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya.

*Beban Barang
untuk
diserahkan
kepada
masyarakat
Rp43,45 triliun*

E.2.1.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang yang Diserahkan ke Masyarakat Tahun 2017 adalah sebesar Rp43.450.653.025.621. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.002.814.971.844 atau 10,15 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp39.447.838.053.777. Beban Barang yang Diserahkan ke Masyarakat berupa barang yang dibeli oleh pemerintah namun diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	18.764.527.056.029	24.175.514.321.817

Beban Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	49.027.000	37.700.000
Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	24.493.640.754.204	14.552.819.649.534
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	1.693.210.000	2.633.949.000
Beban Persediaan Barang Untuk Dijual atau diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	190.742.978.388	716.832.433.426
Jumlah	43.450.653.025.621	39.447.838.053.777

Pada tahun 2017, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dengan jumlah yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Kesehatan.

E.2.1.2.7 Beban Bunga

*Beban Bunga
Rp217,04
triliun*

Beban Bunga selama periode Tahun 2017 sebesar Rp217.040.353.670.203 merupakan Beban Bunga dari yang telah terjadi atau jatuh tempo seiring dengan berjalannya waktu. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.116.924.615.554 atau 14,28 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp189.923.429.054.649. Beban Bunga tersebut berasal dari Beban Bunga pada Bagian Anggaran 999.01. Beban Bunga Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Bunga SBN		
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	133.949.026.514.603	118.847.155.512.672
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	33.845.310.000	110.131.572.500
Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	32.720.775.638.334	30.242.988.858.991
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara - Valas	70.545.022.922	125.533.364.522
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	25.825.121.654.965	19.408.327.062.244
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya imbalan SBSN Jangka Panjang	50.555.585.000	157.150.610.000
Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	6.947.447.169.801	5.242.698.218.611
Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	33.424.303.300	50.513.277.600
Beban Bunga Instrumen Pinjaman		
Beban Bunga Pinjaman Program	7.421.003.656.483	5.839.964.610.529
Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	424.038.347.391	401.832.925.719
Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	47.783.462.225	63.700.963.036
Beban Bunga Pinjaman Proyek	8.576.771.751.776	8.804.917.054.662
Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	939.498.647.770	627.995.368.070
Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	516.605.633	519.655.493
Jumlah	217.040.353.670.203	189.923.429.054.649

Beban Bunga pada Tahun 2017 mengalami persentase kenaikan signifikan pada Beban Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Proyek, Beban Bunga Pinjaman Program, dan Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang. Selain itu, terdapat persentase penurunan beban Bunga yang signifikan pada Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara, dan Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya imbalan SBSN Jangka Panjang.

Nilai beban bunga atas SBN yang disajikan dalam Laporan Operasional Tahun 2017 termasuk nilai beban diskonto sebagai penambah nilai beban bunga dan nilai pendapatan premium sebagai pengurang nilai beban bunga. Nilai beban bunga atas beban diskonto dan pendapatan premium termasuk beban diskonto atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS). Adapun nilai rincian per akun beban diskonto dan pendapatan premium yang mengurangi dan menambah nilai beban bunga adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
541211	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara - Rupiah	9.096.788.011.050	6.105.574.800.371
541251	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Valas	278.335.300.500	-
541311	Beban Pembayaran Imbalan SBSN – Jangka Panjang	1.291.855.261.574	371.541.298.100
	Jumlah	10.666.978.573.124	6.477.116.098.471

E.2.1.2.8 Beban Subsidi

*Beban Subsidi
Rp167,83
triliun*

Beban Subsidi selama Tahun 2017 adalah sebesar Rp167.834.411.964.126 merupakan Beban Subsidi dari BA 999.07. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.950.749.928.485 atau 2,41 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp163.883.662.035.641. Beban subsidi merupakan beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Subsidi Minyak Solar	7.256.427.398.770	10.143.704.938.682
Subsidi Minyak Tanah	1.904.842.122.253	1.444.924.081.316
Subsidi Elpiji	43.763.759.684.348	26.596.386.330.418
Subsidi Pangan	18.665.425.804.895	20.162.823.223.225
Subsidi Listrik	45.738.215.039.563	58.043.264.928.514
Subsidi Benih	764.685.996.611	419.174.423.969
Subsidi Pupuk	27.488.258.355.598	29.514.833.376.740
Subsidi PSO Lainnya/LKBN Antara	136.812.799.346	137.883.728.082
Subsidi Imbalan Jasa Penjamin KUR	-	598.677.356.169
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	39.434.492.233	122.044.174.907
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLBI	-	-
Subsidi Risk Sharing Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi	295.873.402	46.176.000
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	30.136.759.180	59.706.767.073
Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	2.750.753.157.508	4.391.070.190.421
Subsidi PT KAI	1.682.982.370.548	1.792.435.177.165
Subsidi PT PELNI	1.906.905.507.413	1.865.709.030.539
Subsidi PPh-DTP	8.861.035.862.196	7.713.721.581.388
Subsidi BM-DTP	280.946.213.728	280.001.769.046
Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	-	4.200.799
Subsidi Kredit Sektor Peternakan	6.176.062.252	11.328.239.070
Subsidi Kredit Resi Gudang	94.078.416	127.726.200
Bantuan Uang Muka Perumahan	826.480.000.000	316.584.000.000

Subsidi Bunga KPR	1.190.908.323.782	269.210.615.918
Beban Subsidi Estimasi	4.539.836.062.084	-
Jumlah	167.834.411.964.126	163.883.662.035.641

Kenaikan yang signifikan pada Beban Subsidi tahun 2017 terdapat pada Subsidi Bunga KPR, Bantuan Uang Muka Perumahan, serta Subsidi *Risk Sharing* Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi. Penurunan yang signifikan terdapat pada Subsidi Bunga Ketahanan Pangan (KKP) dan Energi, Subsidi Imbalan Jasa Penjamin KUR, serta Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias.

E.2.1.2.9 Beban Hibah

*Beban Hibah
Rp5,44 triliun*

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi. Beban Hibah selama Tahun 2017 sebesar Rp5.445.667.259.156. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.684.250.407.974 atau minus 23,62 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp7.129.917.667.130. Beban Hibah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah, dan hibah ke Pemerintah Luar Negeri. Beban Hibah Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri	-	13.114.000.000
Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	22.547.908.280	-
Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah	5.423.119.350.876	7.116.803.667.130
Jumlah	5.445.667.259.156	7.129.917.667.130

Beban Hibah tahun 2017 antara lain berupa Beban Hibah untuk Dukungan Kegiatan Operasional kepada Sekretariat *Melanesian Spearhead Group* (MSG), Beban Hibah MRT, Beban Hibah Air Minum, Beban Hibah Air Limbah, Beban Hibah *Water Resources and Irrigation Sector Management Project-APL2* (WISMP-2), Beban Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi (SAIG), Beban Hibah Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal (PKP-SPM) Pendidikan Dasar, Beban Hibah *Biodiversity Conservation and Climate Protection in Gunung Leuser Ecosystem*, Beban Hibah *Provincial Road Improvement and Maintenance*, Beban Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Beban *Nationwide Water* Hibah Program, dan Beban Hibah Pengelolaan Hibah Sanitasi.

E.2.1.2.10 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp55,85
triliun*

Jumlah Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp55.858.510.175.202. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.228.135.598.065 atau 22,42 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp45.630.374.577.137. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Beban Bantuan Sosial Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	312.083.934.625	432.362.748.710
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam bentuk Uang	36.253.246.488.171	31.497.676.690.253
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk Uang	2.397.123.317.502	1.527.878.631.496
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	242.622.399.898	1.040.724.146.522

Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	12.952.704.236.842	8.597.325.101.867
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	9.432.000
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang	1.988.992.887.695	651.360.323.000
Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Barang/jasa	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang	759.913.568.528	1.075.499.420.807
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Barang/Jasa	951.823.341.941	807.538.082.482
Jumlah	55.858.510.175.202	45.630.374.577.137

Peningkatan signifikan pada Belanja Sosial Tahun 2017 terdapat pada Beban Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Dalam Bentuk Uang dan Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam bentuk Uang, sedangkan penurunan terdapat pada Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa. Program Keluarga Harapan serta program Penanganan Fakir Miskin, merupakan Beban Bantuan Sosial yang paling besar sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam permasalahan sosial dan mengentaskan kemiskinan.

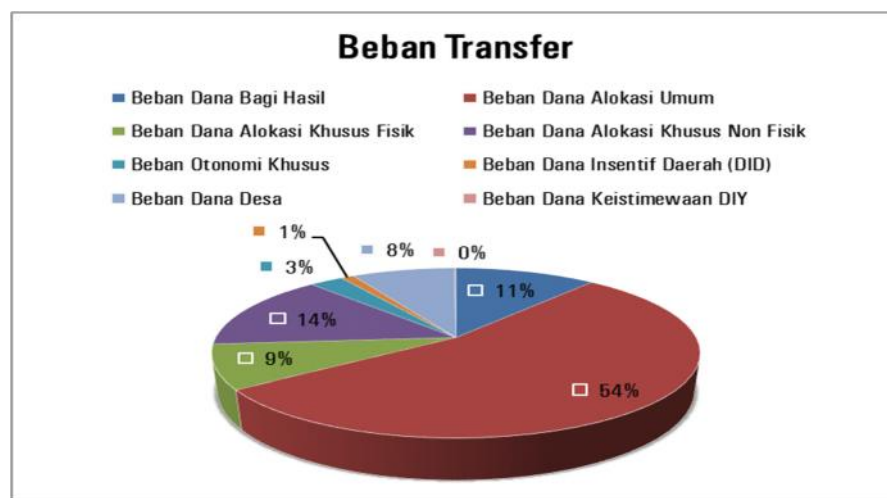
E.2.1.2.11 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2017 sebesar Rp735.149.293.850.265 merupakan Beban Transfer kepada Pemerintah Daerah dan Desa. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp48.347.043.092.956 atau 7,04 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp686.802.250.757.309. Beban Transfer Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

*Beban Transfer
Rp735,14
triliun*

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Dana Bagi Hasil	81.648.610.327.750	67.163.600.179.768
Beban Dana Alokasi Umum	398.582.314.748.000	385.360.847.100.000
Beban Dana Alokasi Khusus Fisik	62.055.298.711.176	75.207.496.115.489
Beban Dana Alokasi Khusus Non Fisik	105.383.354.003.094	88.594.821.900.934
Beban Otonomi Khusus	19.443.292.590.000	18.264.433.884.000
Beban Dana Insentif Daerah (DID)	7.500.000.000.000	5.000.000.000.000
Beban Dana Desa	59.762.987.937.816	46.679.329.179.366
Beban Dana Keistimewaan DIY	773.435.532.429	531.722.397.752
Jumlah	735.149.293.850.265	686.802.250.757.309

Besarnya bagian masing-masing dana transfer dapat dilihat dalam grafik 31 berikut.



Grafik 31. Komposisi Beban Transfer Tahun 2017

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Tahun 2017 adalah sebesar Rp81.648.610.327.750. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp14.485.010.147.982 atau 21,57 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp67.163.600.179.768. Dana Bagi Hasil Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	23.569.954.663.020	21.928.731.585.397
Beban Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	1.571.540.526.139	1.062.757.342.951
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	2.798.264.913.061	2.169.890.578.250
Beban Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	10.998.013.719.294	13.253.408.315.416
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	52.744.051.400	66.099.563.150
Beban Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/kota	429.523.455.012	301.296.610.950
Beban Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan sama rata ke Kabupaten/Kota	1.703.244.275.599	1.708.800.319.228
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	9.026.906.109.066	4.566.710.838.246
Beban Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	299.269.621.906	196.057.434.400
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka otonomi khusus	182.330.166.900	226.810.109.600
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi	6.251.178.559.669	3.500.386.591.867
Beban Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	103.468.628.284	60.571.146.400
Beban Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus	98.124.808.600	309.148.127.200
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	375.281.426.095	324.591.472.074
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	18.635.249.847.283	12.281.625.527.880
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran bagian Pemerinah	727.330.390.743	723.536.526.171
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - iuran Tetap	18.072.611.932	22.287.397.106
Beban Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - iuran produksi (royalti)	1.200.044.733	-
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	33.009.962.856	102.951.520.154
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	734.619.089.478	661.635.572.845
Beban Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	691.941.729.488	647.129.351.090
Beban Dana Bagi Hasil Perikanan	392.940.307.926	289.807.142.069
Beban Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	2.954.401.419.266	2.759.367.107.324
Jumlah	81.648.610.327.750	67.163.600.179.768

Dana Alokasi Umum

Beban Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2017 adalah sebesar Rp398.582.314.748.000 yaitu Beban DAU untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. DAU merupakan transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nilai DAU Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp13.221.467.648.000 atau 3,43 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp385.360.847.100.000.

Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 adalah sebesar Rp62.055.298.711.176. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Nilai DAK Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp13.152.197.404.313 atau 17,49 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp75.207.496.115.489.

Beban DAK Fisik terdiri dari realisasi DAK Reguler, DAK Penugasan, DAK Afirmasi, dan Tambahan DAK Fisik.

Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2017 adalah sebesar Rp105.383.354.003.094. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.788.532.102.160 atau 18,95 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp88.594.821.900.934. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	49.929.771.976.077	39.167.587.555.402
Beban Dana Tunjangan Khusus PNSD di Daerah Khusus	1.403.689.814.100	-
Beban Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	942.916.401.139	820.076.498.190
Beban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.370.249.664.344	43.289.704.423.488
Beban Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	-	199.313.187.000
Beban Bantuan Operasional Kesehatan	5.407.224.385.828	2.412.590.832.564
Beban Bantuan Operasional Keluarga Berencana	245.107.978.781	186.160.945.000
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi	90.237.480.533	96.750.000.000
Beban Dana Peningkatan Kapasitas Ketenagakerjaan	(4.773.800.000)	140.738.459.290
Beban Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.248.930.102.292	2.281.900.000.000
Beban Pelayanan Administrasi Kependudukan	750.000.000.000	-
Jumlah	105.383.354.003.094	88.594.821.900.934

Beban DAK Non Fisik tidak memperhitungkan potongan Lebih Salur BOS dan BOK TA 2016 terhadap penyaluran tahun anggaran berjalan sebagai pelunasan sebagaimana kebijakan akuntansi dalam PMK Nomor 216/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus Tahun 2017 adalah sebesar Rp 19.443.292.590.000. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.178.858.706.000 atau naik 6,45 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp18.264.433.884.000. Dana Otonomi khusus Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh	7.971.646.295.000	7.707.216.942.000
Beban Dana Otonomi Khusus untuk Papua	5.580.152.407.000	5.395.051.859.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua	2.625.000.000.000	1.987.500.000.000
Beban Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat	2.391.493.888.000	2.312.165.083.000
Beban Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	875.000.000.000	862.500.000.000
Jumlah	19.443.292.590.000	18.264.433.884.000

Dana Otonomi Khusus diperuntukkan bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh didasarkan pada UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dana Insentif Daerah

Beban Dana Insentif Daerah Tahun 2017 sebesar Rp7.500.000.000.000 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode TA 2017. Beban Dana Insentif Daerah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp5.000.000.000.000. Dana Insentif Daerah bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan dan fiskal daerah, pelayanan dasar, serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan Beban Dana Insentif Daerah tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pagu anggaran DID sebesar Rp2.500.000.000.000.

Dana Desa

Beban Dana Desa Tahun 2017 adalah sebesar Rp59.762.987.937.816. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp13.083.658.758.450 atau 28,02 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp46.679.329.179.366. Beban ini meliputi penyaluran anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peningkatan Beban Dana Desa pada tahun 2017 disebabkan pemerintah secara bertahap meningkatkan alokasi dana desa. Dana Desa TA 2017 dialokasikan kepada 74.954 desa atau bertambah sebanyak 200 desa dibandingkan tahun 2016 sebanyak 74.754 desa.

Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2017 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan Lebih Salur pada periode tersebut. Beban Dana Keistimewaan DIY Tahun 2017 adalah sebesar Rp773.435.532.429 merupakan transfer dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi DIY. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar

Rp241.713.134.677 atau 45,45 persen dari nilai Tahun 2016 sebesar Rp531.722.397.752. Beban Dana Keistimewaan DIY tahun 2017 tersebut telah memperhitungkan pengakuan lebih salur atas transfer Dana Keistimewaan DIY selama periode TA 2017.

E.2.1.2.12 Beban Lain-Lain

*Beban Lain-lain
Rp37,77 triliun*

Beban Lain-lain selama periode Tahun 2017 sebesar Rp37.776.589.355.266. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.320.355.146.440 atau 24,04 persen dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp30.456.234.208.826. Beban Lain-lain Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	29.061.724.858	-
Beban Cadangan Stabilisasi Harga Pangan	-	1.399.134.742.124
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	38.700.170.872	77.345.999.238
Beban Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	2.808.777.900	10.704.504.806
Beban Lain-lain BUN Lainnya	3.600.000.000.000	-
Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi	-	83.732.068.943
Beban Lain-lain	2.189.006.307.261	2.013.676.660.314
Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening milik BUN	337.108.842.898	385.565.611.645
Beban Pihak Ketiga Migas	30.817.021.745.678	26.486.074.621.756
Beban Pembayaran <i>Reimbursement</i> PPN Panas Bumi	228.205.097.449	-
Beban pihak ketiga diestimasi <i>Reimbursement</i> PPN dan penggantian bonus produksi panas bumi	534.676.688.350	-
Jumlah	37.776.589.355.266	30.456.234.208.826

Beban Pihak Ketiga Migas sebesar Rp30.817.021.745.678 terdiri dari *Reimbursement* PPN KKKS, *Underlifting* KKKS, DMO fee KKKS, dan Pajak Penerangan Jalan non PLN ke Pemda, sedangkan Beban lain-lain BUN Lainnya sebesar Rp 3.600.000.000.000 merupakan beban untuk mencatat penyaluran Dana Program JKN yang telah disalurkan kepada BPJS pada Tahun 2017.

E.2.1.2.13 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp144,84 triliun*

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 adalah sebesar Rp144.842.686.552.886. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.425.575.548.829 atau 7,76 persen dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp134.417.111.004.057. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (<i>Audited</i>)	Tahun 2016 (<i>Audited</i>)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.253.139.476.514	38.795.529.337.189
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	-	1.487.345.318.814
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	7.123.990.674.523	6.067.600.707.311
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan - BLU	67.304.325	284.479.583.105
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	40.202.160.771.151	36.507.284.630.337
Beban Penyusutan Irigasi	7.787.180.703.026	8.148.540.962.916
Beban Penyusutan Jaringan	1.769.276.236.124	1.680.442.299.700

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	-	68.927.200.693
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.368.972.409.329	7.653.200.615.017
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - BLU	14.823.248	7.562.240.716
Beban Amortisasi Goodwill	-	213.568.622
Beban Amortisasi Hak Cipta	2.279.069.483	2.208.653.575
Beban Amortisasi Paten	10.801.350.135	3.700.845.804
Beban Amortisasi Software	1.518.495.770.976	1.127.913.461.880
Beban Amortisasi Lisensi	187.149.358.179	106.922.655.981
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	251.925.571.662	4.141.794.797
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional pemerintahan	18.511.597.488	17.250.810.021
Beban Amortisasi Software-Badan Layanan Umum	-	11.646.650.097
Beban Amortisasi-Hak Cipta BLU	-	25.227.718
Beban Amortisasi-Paten BLU	-	37.222.143
Beban Amortisasi-Aset Tak Berwujud Lainnya-Badan Layanan Umum	-	822.552.945
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah - BLU	-	3.610.310
Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	110.698.638.439	112.142.755.919
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	97.266.345
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.498.446.630.908	1.432.064.604.338
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerjasama	25.655.750.596.426	25.354.165.356.670
Beban Penyusutan Aset Eks Kelolaan PT. PPA	2.673.868.611	-
Beban Penyusutan Aset Eks Pertamina	2.141.552.385.925	680.560.724.098
Beban Penyusutan Aset yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	3.938.570.033.052	4.854.690.080.753
Beban Penyusutan Aset Idle yang Sudah Diserahkan ke DJKN	365.048.513	335.371.080
Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN	664.234.849	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain BLU	-	828.543.739
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan BLU	-	6.426.351.424
Jumlah	144.842.686.552.886	134.417.111.004.057

E.2.1.2.14 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih minus
Rp24,41 triliun*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2017 adalah sebesar Rp24.415.200.700.641. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.262.112.454.284 atau minus 17,73 persen dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp29.677.313.154.925. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang pada Tahun 2017. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	14.720.933.154.760	4.079.140.734.946
Beban Penyisihan Piutang PPN	(321.455.391.552)	10.258.241.679.789

Beban Penyisihan Piutang PPnBM	63.523.241.361	153.796.405.840
Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB	(330.770.978.196)	(190.762.508.370)
Beban Penyisihan Piutang Cukai dan Bea Materai	(2.956.425.989)	(2.313.998.654)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	6.493.746.394.384	4.393.965.640.318
Beban Penyisihan Piutang Pajak Perdagangan Internasional	631.330.037.665	-
Beban Penyisihan Piutang Cukai Lainnya	-	539.951.719.753
Beban Penyisihan Piutang PNBP	1.544.128.801.208	10.816.220.134.583
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(251.982.115.300)	193.337.601.043
Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	1.088.382.766.626	666.735.814
Beban Penyisihan Piutang Potensi Tunggakan Yang Dapat ditagih	-	167.971.711.454
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-	37.500
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	-	1.298.436.843
Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	(59.635.416)	-
Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	7.011.291.155	9.795.223.415
Beban Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	99.423.323	(129.084.409)
Beban Penyisihan Piutang BLU	195.748.450.269	214.530.898.852
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	392.105.543.132	194.027.429.472
Beban Penyisihan Piutang Sewa Aset BLU	971.528.862	798.324.914
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	4.235.069.394	(1.688.402.245)
Beban Dana Bergulir diragukan tertagih	163.368.263.955	105.937.485.249
Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tagihan Penjualan Angsuran	(392.355.518)	(3.939.390)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	5.857.888.807	(3.267.412.276)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR BLU	1.472.745.486	5.261.624.903
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang-Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	-	9.473.894.022
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Aset Lainnya RDI	-	(1.283.231.262.505)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Aset Lainnya Kredit Program	-	(392.752.141)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Piutang Jangka Panjang Lainnya	9.903.002.225	14.686.796.205
Jumlah	24.415.200.700.641	29.677.313.154.925

Besarnya beban penyisihan piutang tak tertagih yang signifikan pada Tahun 2017 terdapat pada Kementerian Keuangan sebesar Rp21.257.126.841.481, BA 999.04 sebesar

Rp1.088.382.766.626, Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp604.457.701.761, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp391.799.309.885, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp386.515.304.960. Adapun penurunan yang signifikan pada Beban Penyisihan Piutang Pajak disebabkan oleh pelaksanaan Program Inventarisasi dan Penilaian Saldo (Provenido) Piutang Pajak.

E.2.2 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Surplus Rp72,16 triliun

Surplus Kegiatan Non Operasional selama periode Tahun 2017 sebesar Rp72.167.768.893.859 berasal dari defisit pelepasan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang dan surplus kegiatan non operasional lainnya. Dibandingkan dengan surplus Tahun 2016 yaitu sebesar Rp67.956.520.850.893, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.211.248.042.966 atau 6,20 persen. Pos Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

E.2.2.1 Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar

Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar Rp51,58 triliun

Defisit Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2017 sebesar Rp51.589.678.445.482. Defisit ini naik sebesar Rp44.613.523.294.998 atau 639,51 persen dari Tahun 2016 yaitu sebesar Rp6.976.155.150.484. Defisit Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp234.320.099.124 dan Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp51.823.998.544.606.

E.2.2.1.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Rp234,32 miliar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2017 adalah sebesar Rp234.320.099.124. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp75.979.559.091 atau 47,98 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp158.340.540.033.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar tersebut berasal dari K/L yaitu ketika Pendapatan yang diterima dari pelepasan aset non lancar lebih besar dari nilai buku aset non lancar yang dilepas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Pendapatan dari Penjualan tanah, Gedung dan Bangunan	817.437.691	8.010.899.484
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	22.374.742.651	10.454.082.794
Pendapatan Penjualan Sewa Beli	3.660.651.656	5.333.176.281
Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	1.416.464.500	-
Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	114.500	500.000
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	158.481.872.062	96.616.470.726
Pendapatan Pelepasan Aset	47.568.816.064	37.925.410.748
Jumlah	234.320.099.124	158.340.540.033

E.2.2.1.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar Rp51,82 triliun

Beban Pelepasan Aset Non Lancar selama periode Tahun 2017 adalah sebesar Rp51.823.998.544.606. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp44.689.502.854.089 atau 626,39 persen dibanding Tahun 2016 sebesar Rp7.134.495.690.517.

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban yang terbentuk dari berkurangnya Aset Non Lancar (Aset Tetap dan Aset Lainnya), karena Satuan Kerja melakukan pelepasan Aset Non Lancar kepada pihak lain, seperti masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak lainnya, maupun karena kondisi aset non lancar tersebut. Pelepasan Aset tersebut dapat berupa penghapusan, penjualan, barang hilang, barang rusak berat yang diusulkan dihapus, maupun barang yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Beban pelepasan aset non lancar yang signifikan berasal dari BA 999.99 Rp36.645.469.392.777, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp6.125.182.698.363, Kementerian Desa dan PDT Rp2.696.809.329.672, serta Kementerian Perdagangan Rp2.353.143.976.782.

E.2.2.2 Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Surplus/(Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban Jk.
Panjang minus
Rp120,79
miliar*

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2017 adalah sebesar Rp120.797.322.243. Defisit ini naik sebesar Rp87.611.446.814 atau 264,00 persen dibandingkan Tahun 2016 sebesar Rp33.185.875.429. Defisit tersebut berasal dari BA BUN 999.01. Surplus/(Defisit) tersebut terkait Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN atau Pembelian Kembali Obligasi Negara.

E.2.2.2.1 Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Pendapatan
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp5,63 miliar*

Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang selama periode Tahun 2017 adalah sebesar Rp5.631.521.326. Pendapatan ini naik sebesar Rp4.126.549.450 atau 274,19 persen dibanding Tahun 2016 sebesar Rp1.504.971.876. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan sebagai akibat pembelian kembali obligasi negara jangka panjang.

E.2.2.2.2 Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

*Beban
Penyelesaian
Kewajiban
Jangka Panjang
Rp126,42
miliar*

Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahun 2017 adalah sebesar Rp126.428.843.569. Pendapatan ini naik sebesar Rp91.737.996.264 atau 264,44 persen dibanding Tahun 2016 sebesar Rp34.690.847.305. Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang berasal dari BA BUN 999.01 yang terkait dengan beban pembelian kembali obligasi negara/Pembayaran *Loss on Bond Redemption/debt switching* SBN.

E.2.2.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Non
Operasional
Lainnya
Rp123,87
triliun*

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2017 adalah sebesar Rp123.878.244.661.584. Nilai tersebut naik sebesar Rp48.912.382.784.778 atau 65,25 persen dibanding Tahun 2016 yaitu sebesar Rp74.965.861.876.806. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp192.808.566.996.268 dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp68.930.322.334.684.

E.2.2.3.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Pendapatan
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp192,80
triliun*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp192.808.566.996.268. Nilai tersebut naik sebesar Rp49.270.346.520.442 atau 34,33 persen dibanding Tahun 2016 sebesar Rp143.538.220.475.826. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut berasal dari K/L sebesar Rp26.596.409.236.128 dan dari BA BUN sebesar Rp166.212.157.760.140. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	46.457.400	76.498.000
Pendapatan Pelunasan Piutang	59.898.701.956	73.216.386.232
Pendapatan dari Selisih Kurs	62.796.449	42.743.901.340
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	2.096.996.797.693	3.296.232.473.916
Pendapatan dari Hibah yang belum disahkan	86.711.899	310.904.058.648
Pendapatan Setoran dari sisa uang non TP/TGR Pensiunan	11.298.199.899	
Pendapatan Selisih Kurs terealisasi – BLU	938.347.918	375.844.274
Penerimaan Kembali Belanja BLU TAYL	545.258.313	-
Pendapatan Selisih Kurs yang belum terealisasi	1.829.592.945.242	38.125.609.557.398
Pendapatan Penyesuaian Lainnya	78.770.454.797.959	133.569.525.992
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	87.159.715.730.708	76.082.925.454.721
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	22.831.321.364.280	25.220.216.287.777
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	1.651.871.552	13.849.133
Penerimaan Kembali Belanja lain-lain TAYL	-	12.704.687.843
Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran yang Lalu	-	239.631.950.552
Pendapatan Pelepasan Aset	45.957.015.000	-
Jumlah	192.808.566.996.268	143.538.220.475.826

Besarnya pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya yang signifikan terdapat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (999.99), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (999.03), dan Kementerian Pertahanan. Pada BA 999.99 terdapat Pendapatan Perolehan Aset Lainnya sebesar Rp85.804.759.902.779 yang merupakan hasil pengelolaan BMN dari Aset eks KKKS, sedangkan pendapatan penyesuaian lainnya sebesar Rp78.770.454.797.959 di antaranya adalah berasal dari BA 999.03 sebesar Rp78.770.454.797.959 yang merupakan kenaikan mutasi ekuitas permanen lainnya pada Lembaga Otorita (LPS), Bank Indonesia, dan Investasi lain-lain (PTNBH dan BPJS). Adapun penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp22.831.321.364.280 di antaranya berasal dari Kementerian Pertahanan Rp11.306.084.386.145, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp2.744.963.976.383, Kementerian Pertanian Rp2.209.312.575.118, Kementerian ESDM Rp1.741.851.584.847 dan KL lainnya.

E.2.2.3.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp68,93 triliun*

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp68.930.322.334.684. Beban ini mengalami kenaikan sebesar Rp357.963.735.664 atau 0,52 dibandingkan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp68.572.358.599.020. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2017 (Audited)	Tahun 2016 (Audited)
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis	371.925.930	2.067.572.346
Beban Selisih Harga SBN	1.628	-
Beban penyesuaian Nilai persediaan	25.711.249.619.654	22.439.975.166.197
Beban Kerugian Tuntutan Ganti Rugi	-	81.933.374

Kerugian Persediaan Rusak/Usang dan pembulatan	383.619.668.517	842.134.600.892
Beban Penghapusan Piutang TP/TGR Kementerian Lembaga	195.564.500	-
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	42.802.551.367.682	2.838.901.602.110
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi BLU	4.013.455.630	18.819.899.425
Beban Penyesuaian selisih kurs	2.443.197.655	1.577.910.734
Beban Lain-lain Selisih Kurs Terealisasi	25.537.272.827	144.511.542.888
Beban Pembulatan	-	1
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	-	753.388.385
Beban Lain-lain	-	42.283.534.982.668
Beban Penyesuaian Selisih Kurs <i>Invoice</i> /SPP ke SP2D dan	340.260.661	-
Jumlah	68.930.322.334.684	68.572.358.599.020

Besarnya beban dari kegiatan non operasional lainnya yang signifikan terdapat pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01) berupa Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp42.500.346.542.214. Adapun Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp25.711.249.619.654 yang signifikan terdapat pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertanian berupa penyesuaian nilai persediaan.

E.2.3 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
minus Rp0*

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Tidak terdapat Pos Luar Biasa pada Tahun 2017.

E.2.3.1 Pendapatan Luar Biasa

*Pendapatan
Luar Biasa Rp0*

Tidak terdapat transaksi pendapatan luar biasa pada Tahun 2017.

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa Pemerintah Pusat, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat.

E.2.3.2 Beban Luar Biasa

*Beban Luar
Biasa Rp0*

Tidak terdapat transaksi Beban Luar Biasa pada Tahun 2017.

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh Pemerintah Pusat seperti beban akibat bencana alam.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1. SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per
1 Januari 2017
sebesar Rp174,07
triliun

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2017 adalah sebesar Rp174.076.715.164.142, yang merupakan saldo akhir kas per 31 Desember 2016. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas Setelah Koreksi TA 2016 sebesar Rp187.761.173.797.082, Saldo Awal Kas TA 2017 mengalami penurunan sebesar Rp13.684.458.632.940.

Rincian Saldo Awal Kas adalah sebagai berikut (dalam Rp).

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Saldo Awal Kas:		
Kas BUN di BI (Rp)	72.237.484.171.519	70.390.965.109.465
Kas BUN di BI (Valas)	8.912.621.480.822	5.755.384.784.061
Kas di KPPN	1.818.956.055.570	2.234.269.280.080
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	1.538.381.222.069	2.557.450.784.213
Kas Transitoris	(43.855.342.084)	(79.145.441.439)
Kas Escrow	53.822.105.986.135	75.383.092.325.887
Kas pada BLU yang telah disahkan	32.440.062.300.360	33.731.092.815.930
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	3.350.959.289.659	2.311.403.814.634
Saldo Awal Kas Sebelum Koreksi	174.076.715.164.050	192.284.513.472.831
Koreksi Saldo Awal		
Koreksi Kas BLU		(5.039.498.766.821)
Koreksi Kas di KPPN		(6.680.552.820)
Koreksi Kas BUN di BI		(90.696.050)
Koreksi Kas dari Hibah		(9.196.454.509)
Koreksi Kas Dana yang Dibatasi Penggunaannya		496.555.996.406
Koreksi Rekening Pemerintah Lainnya (Dana Bergulir)		(9.177.001)
Koreksi Kas Transitoris		35.579.975.046
Koreksi Kas Rekening Escrow		-
Total Koreksi Saldo Awal		(4.523.339.675.749)
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi*)	174.076.715.164.050	187.761.173.797.082

*) Saldo Awal Kas menurut SPAN adalah sebesar Rp174.076.715.164.142, terdapat selisih Rp92, karena pembulatan di sistem terintegrasi LKPP.

F.1.2. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS

Kenaikan Kas
sebesar Rp34,42
triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(132.518.715.897.464)	(139.008.141.105.397)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(268.122.368.777.814)	(258.158.575.310.459)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	426.289.009.273.320	423.329.115.205.241
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	9.371.459.675.688	(18.993.603.610.888)
Penggunaan SAL		(19.011.062.000.000)
Koreksi Pembukuan*)	(589.976.797.589)	(1.842.191.811.529)
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Koreksi	34.429.407.476.141	(13.684.458.633.032)

*) Koreksi Pembukuan sebesar minus Rp589.976.797.589, dengan rincian sebagai berikut.

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Koreksi SILPA	149.497.232.083
2.	Koreksi Selisih Kurs (unrealized)	115.136.054.861
3.	Akumulasi Koreksi Pembukuan	(854.610.084.533)
Total Akumulasi Koreksi Pembukuan		(589.976.797.589)

Koreksi Pembukuan terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar Rp149.497.232.083 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp453.500.672.144 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SILPA (311211) sebesar Rp602.997.904.227.
2. Selisih Kurs sebesar Rp115.136.054.861 merupakan nilai pendapatan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi dari proses revaluasi dan penyesuaian kerugian selisih kurs yang belum terealisasi.
3. Koreksi Kas pada BLU sebesar minus Rp779.378.992.976 terdapat pada KPPN.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN BANDA ACEH (001)	2.548.666.113
2	KPPN MEDAN I (004)	1.648.638.664
3	KPPN PEKANBARU (008)	1.331.883.839
4	KPPN JAMBI (012)	855.232.040
5	KPPN BENGKULU (016)	(7.724.353.152)
6	KPPN JAKARTA I (018)	(788.704.506)
7	KPPN BANDUNG I (022)	(47.451.332.274)
8	KPPN BOGOR (023)	(113.141.000)
9	KPPN SEMARANG I (026)	(516.186.715.343)
10	KPPN SURAKARTA (028)	(8.504.756.260)
11	KPPN SURABAYA I (031)	(149.811.593.552)
12	KPPN MALANG (032)	8.504.756.260
13	KPPN MATARAM (038)	87.989.431
14	KPPN BALIKPAPAN (047)	1.149.540.770
15	KPPN MAKASSAR I (054)	(73.132.285.344)
16	KPPN JAKARTA III (088)	8.992.590.779
17	KPPN MEDAN II (123)	(759.769.333)
18	KPPN TEBING TINGGI (124)	270.405.000
19	KPPN TANGERANG (127)	(296.045.108)
		(779.378.992.976)

4. Koreksi Kas dari Hibah sebesar minus Rp115.519.321.645 terdapat pada KPPN.

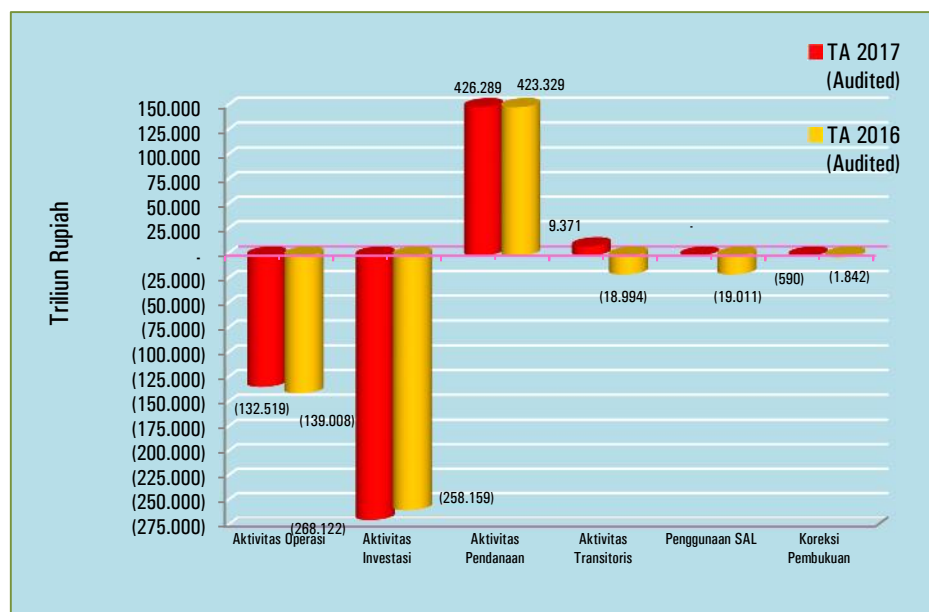
NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN PEMATANG SIANTAR (005)	(1.194.374.677)
2	KPPN JAMBI (012)	(1.597)
3	KPPN BANDAR LAMPUNG (017)	(299.814.000)
4	KPPN PURWOREJO (027)	(100)
5	KPPN SAMARINDA (046)	(15.044.824.901)
6	KPPN BALIKPAPAN (047)	(859)
7	KPPN LUBUK LINGGAU (070)	(7.700.000.000)
8	KPPN BANYUWANGI (100)	(4.393.403.785)
9	KPPN WAMENA (113)	(5.169.725.270)
10	KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140)	(81.717.176.456)
		(115.519.321.645)

5. Koreksi Kas di KPPN sebesar Rp198.081.593 terdapat pada KPPN.

NO	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN BANDAR LAMPUNG (017)	(20.000)
2	KPPN BANDUNG I (022)	(150.622.819)
3	KPPN KUPANG (039)	28.897.939
4	KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140)	319.826.472
5	KPPN JAKARTA VI (175)	1
		198.081.593

6. Koreksi Kas Bendahara Umum Negara pada Rekening Khusus sebesar minus Rp3.765.194.909 pada KPPN Khusus Pinjaman Hibah.
7. Koreksi Kas Transitoris sebesar Rp43.855.343.512 pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
8. Koreksi pembulatan sebesar minus Rp108.

Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas disajikan dalam Grafik 32.



Grafik 32: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

F.1.3. SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp134.575.579.715.420 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya.

Rincian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut.

Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 sebesar Rp134,57 triliun

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Saldo Akhir Kas*)	208.506.122.640.283	174.076.715.164.050
Kas di Bendahara Pengeluaran	210.828.164.140	262.946.369.485
Kas di Bendahara Penerimaan	105.738.412.756	134.046.873.960
Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang Telah Disahkan **)	2.845.838.264.767	3.183.362.352.006
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ***)	(7.391.778.396)	6.325.360.244
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek BLU)	(12.204.408.488.386)	(3.925.795.406.430)
Kas/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	(65.211.736.255.835)	-
Kas Transito (Kiriman Uang)****)	330.588.756.091	-
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas *****)	134.575.579.715.420	173.737.600.713.315

Terdapat perbedaan Saldo Akhir Kas dan Setara Kas antara Neraca dan LAK sebesar Rp5, karena pembulatan di SPAN.

*) Saldo Akhir Kas terdiri dari saldo Kas BUN di BI, KPPN, BLU yang sudah disahkan, Hibah di K/L yang disahkan, Kas Transitoris, Kas RPL, dan Kas Rekening *Escrow*, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Rekening Kas BUN di BI	91.287.531.283.185	81.150.105.652.341
Rekening Kas di KPPN	2.282.077.569.283	1.818.956.055.570
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Hibah Langsung K/L yang Sudah Disahkan	4.834.494.025.327	3.350.959.289.659
Saldo Akhir Kas Rekening Pemerintah Lainnya	3.905.763.616.742	1.538.381.222.069
Saldo Akhir Kas Transitoris	(472)	(43.855.342.084)
Saldo Akhir Aset Lainnya (Kas Rekening <i>Escrow</i>)	65.211.736.255.835	53.822.105.986.135
Jumlah	208.506.122.640.283	174.076.715.164.050

- Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2017 sebesar Rp40.984.519.890.383 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek BLU) sebesar Rp12.204.408.488.386 oleh Satker BLU.
- **) Kas Lainnya dan Setara Kas Selain Hibah Yang Sudah Disahkan sebesar Rp2.845.838.264.767 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp7.680.332.290.094 dikurangi dengan Kas dari Hibah Langsung Kementerian/Lembaga yang sudah disahkan sebesar Rp4.834.494.025.327.
- ***) Kas pada BLU sebesar minus Rp7.391.778.396 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh satker BLU ke KPPN, dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Total Kas pada BLU menurut K/L	28.772.719.623.601	28.520.592.254.174
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	12.204.408.488.386	3.925.795.406.430
	40.977.128.111.987	32.446.387.660.604
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	40.984.519.890.383	32.440.062.300.360
Kas pada BLU yang belum disahkan	(7.391.778.396)	6.325.360.244

- ****) Kas Transito (Kiriman Uang) merupakan total selisih kiriman uang tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)
Kas Dalam Transito (Neraca)	330.588.755.619
Kas Transitoris (LAK)	(472)
Kas Transito (Kiriman Uang)	330.588.756.091

- *****) Dalam rangka menyajikan kesesuaian antara Saldo Akhir Kas dan Setara Kas yang disajikan pada Laporan Arus Kas dengan Saldo Akhir Kas dan Setara Kas pada Neraca sebesar Rp134.575.579.715.425, dilakukan perubahan penyajian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas pada laporan Arus Kas Tahun 2017, dengan rincian sebagai berikut.

1. Saldo Kas Rekening Escrow sebesar Rp65.211.736.255.835 pada Neraca disajikan dalam komponen Aset Lainnya sebagai komponen Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (bukan sebagai komponen Kas dan Setara Kas). Dengan demikian, Saldo Kas Rekening Escrow sebesar Rp65.211.736.255.835 disajikan sebagai pengurang Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas.
2. Selisih saldo Kas Transito antara Neraca dan LAK sebesar Rp330.588.756.091 disajikan sebagai penambah saldo akhir Kas pada Laporan Arus Kas. Saldo tersebut merupakan total selisih kiriman uang tahun 2017 yang disajikan sebagai bagian Kas Dalam Transito pada Neraca.

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2017. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp132.518.715.897.464, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.666.176.424.073.576	1.555.792.720.465.295
Dikurangi Arus Kas Keluar	1.798.695.139.971.040	1.694.800.861.570.692
Arus Kas Bersih	(132.518.715.897.464)	(139.008.141.105.397)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp132,51 triliun

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Dari Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2017 sebesar minus Rp132.518.715.897.464 menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Lebih rendahnya Arus Kas Masuk selama TA 2017 dibandingkan Arus Kas Keluar mengindikasikan rendahnya capaian realisasi penerimaan negara yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian domestik maupun global serta tingginya belanja pemerintah seperti belanja subsidi.

Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2016, terdapat penurunan sebesar Rp6.489.425.207.933.

F.2.1. Penerimaan Perpajakan

*Penerimaan
Perpajakan sebesar
Rp1.343,52 triliun*

Penerimaan Perpajakan TA 2017 sebesar Rp1.343.529.843.798.510 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp1.304.316.269.228.039 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp39.213.574.570.471. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2017 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPh)	646.793.472.957.381	666.212.388.011.659
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM)	480.724.607.483.756	412.213.453.510.472
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.770.346.937.156	19.443.228.194.707
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.216.911.547	481.361.509
Cukai	153.288.149.392.121	143.525.035.262.959
Pajak Lainnya	6.738.475.546.078	8.104.893.109.125
Jumlah Penerimaan Pajak DN	1.304.316.269.228.039	1.249.499.479.450.431
Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	35.066.181.439.852	32.472.077.371.870
Bea Keluar	4.147.393.130.619	2.998.583.105.180
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	39.213.574.570.471	35.470.660.477.050
Penerimaan Perpajakan	1.343.529.843.798.510	1.284.970.139.927.481

Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan pada TA 2017 lebih besar Rp58.559.703.871.029 atau 4,56 persen dibandingkan TA 2016.

F.2.1.1. Pajak Penghasilan

*Pajak Penghasilan
sebesar Rp646,79
triliun*

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) TA 2017 adalah sebesar Rp646.793.472.957.381 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	16.599.430.743.163	10.802.737.196.125
PPh Gas Alam	33.711.719.453.816	25.275.247.016.815
PPh Migas Lainnya	4.600.547.804	20.570.877.698
Jumlah PPh Migas	50.315.750.744.783	36.098.555.090.638
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	117.764.553.599.746	109.644.003.959.877
PPh Pasal 22	16.172.671.971.729	11.351.858.339.343
PPh Pasal 22 Impor	43.156.722.093.470	37.977.707.951.270
PPh Pasal 23	34.005.879.655.650	29.142.388.691.193
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	7.806.580.852.307	5.313.790.324.230

PPh Pasal 25/29 Badan	206.550.829.248.758	169.687.708.767.886
PPh Pasal 26	43.691.062.125.980	36.095.237.400.838
PPh Final dan Fiskal LN	106.311.286.059.450	117.679.209.268.355
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	8.933.799.207.486	9.046.869.950.132
PPh Non Migas Lainnya	12.084.337.398.022	104.175.058.267.897
Jumlah PPh Non Migas	596.477.722.212.598	630.113.832.921.021
Jumlah Pajak Penghasilan	646.793.472.957.381	666.212.388.011.659

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2017 lebih kecil Rp19.418.915.054.278 atau 2,91 persen dibandingkan TA 2016.

PPN dan PPnBM
sebesar Rp480,72
triliun

F.2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) TA 2017 adalah sebesar Rp480.724.607.483.756. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	327.635.365.094.845	284.814.982.302.464
PPN dan PPnBM Impor	152.831.151.163.544	127.070.128.036.176
PPN dan PPnBM lainnya	258.091.225.367	328.343.171.832
Jumlah PPN dan PPnBM	480.724.607.483.756	412.213.453.510.472

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2017 lebih besar Rp68.511.153.973.284 atau 16,62 persen dari TA 2016.

PBB sebesar
Rp16,77 triliun

F.2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2017 adalah sebesar Rp16.770.346.937.156. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
PBB Pedesaan	-	(655.568.620)
PBB Perkebunan	2.175.377.454.058	1.885.674.062.555
PBB Kehutanan	595.957.370.926	402.633.716.641
PBB Pertambangan	1.480.177.403.749	1.637.941.682.580
PBB Migas	12.230.011.698.753	15.272.318.235.857
PBB Pertambangan Panas Bumi	253.462.867.931	211.324.161.821
PBB Lainnya	35.360.141.739	33.991.903.873
Jumlah Penerimaan PBB	16.770.346.937.156	19.443.228.194.707

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2017 lebih kecil Rp2.672.881.257.551 atau 13,75 persen dari TA 2016.

BPHTB sebesar
Rp1,21 miliar

F.2.1.4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2017 adalah sebesar Rp1.216.911.547, lebih besar Rp735.550.038 atau 152,81 persen dari TA 2016 sebesar Rp481.361.509.

F.2.1.5. Cukai

Penerimaan Cukai pada TA 2017 adalah sebesar Rp153.288.149.392.121, dengan rincian sebagai berikut.

Cukai sebesar
Rp153,28 triliun

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Cukai Hasil Tembakau	147.719.216.343.096	137.968.355.366.214
Cukai Ethyl Alkohol	147.122.735.280	171.144.229.260
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	5.567.468.557.500	5.307.660.504.474
Denda Administrasi Cukai	(158.239.602.120)	68.363.827.950
Cukai Lainnya	12.581.358.365	9.511.335.061
Jumlah Penerimaan Cukai	153.288.149.392.121	143.525.035.262.959

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2017 lebih besar Rp9.763.114.129.162 atau 6,80 persen dari TA 2016.

F.2.1.6. Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2017 adalah sebesar Rp6.738.475.546.078. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut.

*Pajak Lainnya
sebesar Rp6,73
triliun*

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penjualan Benda dan Bea Materai	5.082.167.687.070	4.808.948.253.378
Pendapatan PPN Batubara	982.575.599.538	1.082.038.500.742
Pajak Tidak Langsung	33.451.910.552	23.900.478.192
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	406.970.758.069	1.025.405.906.665
- Bunga Penagihan PPN	232.614.159.194	1.159.310.071.661
- Bunga Penagihan PPNBM	493.203.415	1.643.512.053
- Bunga Penagihan PTLL	202.228.240	3.646.386.434
Jumlah Pajak Lainnya	6.738.475.546.078	8.104.893.109.125

Dengan demikian, Penerimaan Pajak Lainnya TA 2017 lebih kecil Rp1.366.417.563.047 atau 16,86 persen dari TA 2016.

F.2.1.7. Pajak Perdagangan Internasional

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2017 sebesar Rp39.213.574.570.471 terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp35.066.181.439.852 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp4.147.393.130.619. Rincian Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut.

*Pajak Perdagangan
Internasional sebesar
Rp39,21 triliun*

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Bea Masuk		
Bea Masuk	33.495.272.858.547	30.633.370.467.412
Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	103.997.545
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	582.649.947.955	894.231.050.707
Bea Masuk dalam rangka KITE	457.334.656.735	466.530.304.772
Bea Masuk - DTP	280.946.213.728	280.001.769.046
Pabean Lainnya	5.181.494.887	5.893.986.712
Bea Masuk Antidumping	182.509.916.000	141.817.946.477
Bea Masuk Imbalan	2.105.000	53.932.473
Bea Masuk Tindakan Pengamanan	62.284.247.000	50.073.916.726
Jumlah Bea Masuk	35.066.181.439.852	32.472.077.371.870
Bea Keluar		
Bea Keluar	4.137.811.636.557	3.000.790.659.110
Denda Administrasi Bea Keluar	9.287.233.578	(2.214.399.982)
Pendapatan Bunga Bea Keluar	294.260.484	6.846.052
Jumlah Bea Keluar	4.147.393.130.619	2.998.583.105.180
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	39.213.574.570.471	35.470.660.477.050

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2017 lebih besar Rp3.742.914.093.421 atau 10,55 persen dari TA 2016.

F.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2017 adalah sebesar Rp311.016.765.272.576, lebih besar Rp49.181.851.014.064 atau 18,78 persen dari TA 2016. PNBP tersebut berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, PNBP Lainnya dan Pendapatan BLU dikurangi dengan pengembalian PNBP. Rincian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut.

*PNBP sebesar
Rp311,01 triliun*

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan Sumber Daya Alam	111.132.042.413.912	64.901.905.473.366
Pendapatan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN	43.904.217.111.673	37.133.172.874.077
Pendapatan PNBP Lainnya	108.635.073.191.043	117.853.947.375.104
Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	47.345.432.555.948	41.945.888.535.965
Jumlah PNBP	311.016.765.272.576	261.834.914.258.512

F.2.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan SDA
sebesar Rp111,13
triliun

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2017 adalah sebesar Rp111.132.042.413.912 yang merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	58.203.042.976.236	31.448.046.588.915
Pendapatan Gas Alam	23.639.900.993.613	12.645.694.067.924
Pendapatan Pertambangan Umum	23.763.165.037.383	15.756.799.135.341
Pendapatan Kehutanan	4.101.918.540.911	3.756.968.379.853
Pendapatan Perikanan	491.033.529.369	362.117.397.236
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	932.981.336.400	932.279.904.097
Jumlah Penerimaan SDA	111.132.042.413.912	64.901.905.473.366

Dengan demikian, Penerimaan Sumber Daya Alam TA 2017 lebih besar Rp46.230.136.940.546 atau 71,23 persen dari TA 2016.

F.2.2.2. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Penerimaan Bagian
Pemerintah atas
Laba BUMN sebesar
Rp43,90 triliun

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2017 adalah sebesar Rp43.904.217.111.673, lebih besar Rp6.771.044.237.596 atau 18,23 persen dari TA 2016 sebesar Rp37.133.172.874.077. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

F.2.2.3. PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP
Lainnya sebesar
Rp108,63 triliun

PNBP Lainnya pada TA 2017 adalah sebesar Rp108.635.073.191.043, yang terdiri dari.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	25.744.873.574.312	20.741.894.724.854
Pendapatan Jasa	52.689.223.733.141	38.938.371.683.701
Pendapatan Bunga	7.721.059.157.306	19.748.546.495.704
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	769.795.544.007	879.046.087.325
Pendapatan Pendidikan	4.484.816.582.419	4.252.849.851.758
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	370.826.264.142	1.541.228.998.988
Pendapatan Iuran dan Denda	2.075.968.889.141	2.905.358.215.261
Pendapatan Lain-lain	14.778.509.446.575	28.846.651.317.513
Jumlah PNBP Lainnya	108.635.073.191.043	117.853.947.375.104

Dengan demikian, Penerimaan PNBP Lainnya TA 2017 lebih kecil Rp9.218.874.184.061 atau 7,82 persen dari TA 2016.

F.2.2.4. Penerimaan Badan Layanan Umum

Penerimaan BLU
sebesar Rp47,34
triliun

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) TA 2017 adalah sebesar Rp47.345.432.555.948, yang terdiri dari.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	44.250.619.466.173	39.467.926.580.136
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	174.211.852.608	64.919.719.731
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	578.904.594.476	852.858.957.288
Pendapatan BLU Lainnya	2.341.696.642.691	1.560.183.278.810
Jumlah Penerimaan BLU	47.345.432.555.948	41.945.888.535.965

Dengan demikian, penerimaan BLU pada TA 2017 lebih besar Rp5.399.544.019.983 atau 12,87 persen dari TA 2016.

F.2.3. Penerimaan Hibah

*Penerimaan Hibah
sebesar Rp11,62
triliun*

Penerimaan Hibah pada TA 2017 adalah sebesar Rp11.629.815.002.490. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Perorangan	228.975.340.000	53.083.138.755
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	137.817.215.944	158.452.526.546
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Pemerintah Daerah	7.043.656.235.321	5.515.579.169.314
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang – Lainnya	(13.163.881)	14.824.127.500
Jumlah Hibah Dalam Negeri	7.410.435.627.384	5.741.938.962.115
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri - Terencana		
Hibah Luar Negeri – Bilateral	234.472.316.950	361.889.435.027
Hibah Luar Negeri – Multilateral	295.603.707.659	865.101.640.011
Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang		
Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Perorangan	-	104.639.542
Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Bilateral	2.994.461.088.630	1.265.014.158.159
Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Multilateral	652.784.794.782	707.053.067.964
Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Lainnya	42.057.467.085	46.564.376.484
Jumlah Hibah Luar Negeri	4.219.379.375.106	3.245.727.317.187
Jumlah Hibah	11.629.815.002.490	8.987.666.279.302

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2017 lebih besar Rp2.642.148.723.188 atau 29,40 persen dari TA 2016.

F.2.4. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
sebesar Rp312,72
triliun*

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai pada TA 2017 adalah sebesar Rp312.728.756.432.452, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	86.928.589.744.958	86.547.284.955.368
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	55.599.900.348.167	55.546.104.938.126
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	632.908.371.807	615.670.480.895
Belanja Gaji Dokter PTT	349.074.423.545	1.480.740.666.342
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	9.922.083.655.765	6.850.782.908.036
Belanja Honorarium	1.424.790.271.010	2.017.515.187.148
Belanja Lembur	726.253.425.631	708.537.229.303
Belanja Vakasi	-	-
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	54.327.541.245.359	51.897.251.286.125
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	97.518.558.624.900	94.253.393.066.064
Belanja Asuransi Kesehatan	5.299.056.321.310	5.224.231.693.706
Total Belanja Pegawai	312.728.756.432.452	305.141.512.411.113

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2017 mengalami kenaikan Rp7.587.244.021.339 atau 2,49 persen dibandingkan TA 2016.

*Belanja Barang
sebesar Rp291,45
triliun*

F.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang pada TA 2017 adalah sebesar Rp291.459.133.344.592 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa guna mendukung kegiatan operasional kantor, pemeliharaan, perjalanan dinas dan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Barang	105.340.094.252.818	94.570.063.818.435
Belanja Jasa	29.605.458.267.170	26.809.299.792.259
Belanja Pemeliharaan	43.501.200.802.930	30.253.236.741.261
Belanja Perjalanan	34.126.165.284.538	33.732.671.541.196
Belanja Barang BLU	36.570.860.054.466	34.718.785.745.184
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kpd Masyarakat/Pemda	42.313.661.472.670	39.545.195.756.801
Belanja Barang untuk diserahkan kepada mantan presiden dan/atau wakil presiden	1.693.210.000	17.633.149.000
Jumlah Belanja Barang	291.459.133.344.592	259.646.886.544.136

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2017 lebih besar Rp31.812.246.800.456 atau 12,25 persen dibandingkan TA 2016.

*Belanja Pembayaran
Bunga Utang sebesar
Rp216,56 triliun*

F.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2017 sebesar Rp216.568.022.521.345 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (outstanding principal), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan Rp33.806.752.176.418 atau 18,50 persen dari TA 2016 sebesar Rp182.761.270.344.927. Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp199.977.329.282.085 dan Rp16.590.693.239.260 dengan rincian sebagai berikut.

a. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp199.977.329.282.085 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	160.608.329.886.049	140.725.540.051.276
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri	30.225.713.200.512	21.840.843.759.980
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri	7.212.316.604.950	4.457.749.934.927
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption	83.757.200.000	32.812.850.000
Belanja Pembayaran Discount SBSN Dalam Negeri	1.847.212.390.574	695.927.457.540
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	199.977.329.282.085	167.752.874.053.723

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri mengalami kenaikan Rp32.224.455.228.362 atau 19,21 persen dari TA 2016.

b. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar negeri sebesar Rp16.590.693.239.260 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Bunga Pinjaman Program	7.077.108.709.167	5.561.346.358.236
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	9.513.067.924.460	9.446.530.277.475
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman LN	516.605.633	519.655.493
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	16.590.693.239.260	15.008.396.291.204

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri mengalami kenaikan Rp1.582.296.948.056 atau 10.54 persen dari TA 2016.

*Belanja Subsidi
sebesar Rp166,40
triliun*

F.2.7. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi TA 2017 sebesar Rp166.401.103.129.178 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Belanja Subsidi adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	47.046.732.461.316	43.686.850.483.579
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	99.700.700.476.538	112.447.106.084.604
Subsidi Non BBM - Pajak	9.214.612.992.875	9.326.829.970.092
Subsidi Lembaga Non-Keuangan - PSO	4.309.726.330.540	3.670.038.640.471
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	160.271.772.261.269	169.130.825.178.746
Subsidi Perusahaan Swasta		
Subsidi Lembaga Keuangan	826.304.000.000	303.732.000.000
Subsidi - Bunga Kredit	4.848.396.664.197	4.368.268.135.266
Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan KUR dan Risk Sharing	448.160.696.551	402.540.824.872
Subsidi Kredit Program II	6.469.507.161	21.504.032.623
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	6.129.330.867.909	5.096.044.992.761
Jumlah Belanja Subsidi	166.401.103.129.178	174.226.870.171.507

Dengan demikian, Belanja Subsidi ini lebih kecil Rp7.825.767.042.329 atau 4,49 persen dari TA 2016.

F.2.8. Belanja Hibah

*Belanja Hibah
sebesar Rp5,44
triliun*

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan Pemerintah Daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2017 terdapat Belanja Hibah sebesar Rp5.445.667.259.156, sehingga lebih kecil Rp1.684.250.407.974 atau 23,62 persen dari TA 2016, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	-	13.114.000.000
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	22.547.908.280	-
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah	5.423.119.350.876	7.116.803.667.130
Jumlah Belanja Hibah	5.445.667.259.156	7.129.917.667.130

F.2.9. Belanja Bantuan Sosial

*Bantuan Sosial
sebesar Rp55,29
triliun*

Belanja Bantuan Sosial TA 2017 sebesar Rp55.297.216.841.355 merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	330.347.968.057	462.256.184.812
Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	35.809.227.856.984	34.817.725.562.440
Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	2.665.538.268.830	2.825.204.427.249
Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	12.716.128.084.642	9.007.542.196.376
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	1.998.168.889.240	636.636.513.000
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	1.777.805.773.602	1.864.174.249.600
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	55.297.216.841.355	49.613.539.133.477

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2017 ini lebih besar Rp5.683.677.707.878 atau 11,46 persen dari TA 2016.

F.2.10. Belanja Lain-lain

*Belanja Lain-lain
sebesar Rp8,80
triliun*

Belanja Lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah. Belanja Lain-lain pada TA 2017 adalah sebesar Rp8.802.858.981.595, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Lain-lain		
Belanja Cadangan Stabilisasi Harga Pangan	-	1.399.134.742.124
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	2.499.999.996.933	1.999.999.991.340
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN		
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	28.578.926.000	11.130.939.866
Belanja Lain-lain BUN		
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	38.460.400.052	92.928.066.222
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	337.108.842.898	385.565.611.645
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	3.600.000.000.000	-
Belanja Lain-lain Lainnya	2.298.710.815.712	2.135.236.087.349
Jumlah Belanja Lain-lain	8.802.858.981.595	6.023.995.438.546

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp2.778.863.543.049 atau 46,13 persen dari TA 2016.

F.2.11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak

*Dana Bagi Hasil
Pajak sebesar
Rp53,66 triliun*

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2017 adalah sebesar Rp53.668.650.342.060, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	34.312.377.870.061	27.315.056.879.350
Bagi Hasil PBB	19.356.272.471.999	20.467.077.053.367
Jumlah Bagi Hasil Pajak	53.668.650.342.060	47.782.133.932.717

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2017 lebih besar Rp5.886.516.409.343 atau 12,32 persen dari TA 2016.

F.2.12. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

*Dana Bagi Hasil
Sumber Daya Alam
sebesar Rp31,64
triliun*

Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Dana Bagi Hasil SDA dalam TA 2017 adalah sebesar Rp31.641.673.021.137, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Bagi Hasil Minyak Bumi	8.191.122.864.049	8.310.533.486.000
Bagi Hasil Gas Alam	8.442.353.752.961	9.733.383.872.000
Bagi Hasil Pertambangan Umum	11.835.084.190.433	19.376.484.546.800
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	970.633.323.538	697.952.441.000
Bagi Hasil Kehutanan	1.820.962.826.750	1.530.859.834.350
Bagi Hasil Perikanan	381.516.063.406	249.480.000.000
Jumlah Bagi Hasil SDA	31.641.673.021.137	39.898.694.180.150

Dengan demikian, Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2017 lebih kecil Rp8.257.021.159.013 atau 20,69 persen dari TA 2016.

F.2.13. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai

*Dana Bagi Hasil
Cukai sebesar
Rp2,92 triliun*

Transfer Dana Bagi Hasil Cukai merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai pada TA 2017 adalah sebesar Rp2.921.873.779.440, jumlah tersebut lebih besar Rp67.768.746.240 atau 2,37 persen dari TA 2016 sebesar Rp2.854.105.033.200.

F.2.14. Dana Alokasi Umum

*Dana Alokasi Umum
sebesar Rp398,58
triliun*

Dana Alokasi Umum merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2017 sebesar Rp398.582.314.748.000, jumlah tersebut lebih besar Rp13.221.467.648.000 atau 3,43 persen dari TA 2016 sebesar Rp385.360.847.100.000.

F.2.15. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)

*Dana Alokasi Khusus
sebesar Rp62,10
triliun*

Transfer Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2017 sebesar Rp62.104.230.254.352, jumlah tersebut lebih kecil Rp13.103.265.861.137 atau 17,42 persen dari TA 2016 sebesar Rp75.207.496.115.489.

F.2.16. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah

*Dana Otonomi
Khusus, Dana
Keistimewaan DIY,
Dana Insentif Daerah
sebesar Rp27,74
triliun*

Transfer Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY. Transfer Dana Insentif Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.

Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah pada TA 2017 sebesar Rp27.743.292.590.000, jumlah tersebut lebih besar Rp3.931.408.706.000 atau 16,51 persen dari TA 2016, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Dana Otonomi Khusus	19.443.292.590.000	18.264.433.884.000
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	800.000.000.000	547.450.000.000
Dana Insentif Daerah	7.500.000.000.000	5.000.000.000.000
Jumlah	27.743.292.590.000	23.811.883.884.000

F.2.17. Transfer Lainnya

*Transfer Lainnya
sebesar Rp105,56
triliun*

Transfer Lainnya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Lainnya pada TA 2017 adalah sebesar Rp105.563.769.198.975, lebih besar Rp16.901.388.764.041 atau 19,06 persen dari TA 2016, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	51.333.461.790.177	39.167.587.555.402
Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	942.916.401.139	820.076.498.190
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.545.891.060.225	43.325.407.723.488
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi/P2D2	-	199.313.187.000
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.652.332.364.609	2.630.607.011.564
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan	840.237.480.533	237.488.459.290
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	3.248.930.102.292	2.281.900.000.000
Jumlah	105.563.769.198.975	88.662.380.434.934

F.2.18. Dana Desa

Dana Desa sebesar Rp59,76 triliun

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan untuk membantu Desa dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana Desa pada TA 2017 adalah sebesar Rp59.766.577.527.403, lebih besar Rp13.087.248.348.037 atau 28,04 persen dari TA 2016 sebesar Rp46.679.329.179.366.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp268,12 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Aktivitas Investasi pada TA 2017 menunjukkan arus kas bersih sebesar minus Rp268.122.368.777.814, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Arus Kas Masuk	1.293.730.019.414	2.449.051.508.722
Dikurangi Arus Kas Keluar	269.416.098.797.228	260.607.626.819.181
Arus Kas Bersih	(268.122.368.777.814)	(258.158.575.310.459)

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi pada TA 2017 lebih kecil Rp9.963.793.467.355 atau 3,86 persen dari TA 2016.

F.2.19. Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pengelolaan dan Penjualan BMN sebesar Rp199,48 miliar

Penerimaan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Penerimaan dari Penjualan Aset merupakan penerimaan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, dan aset yang rusak atau berlebihan. Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2017 adalah sebesar Rp199.488.584.509, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.011.857.500	8.476.218.457
Penjualan Peralatan dan Mesin	22.369.347.651	10.467.276.544
Penjualan Sewa Beli	17.481.104.672	21.514.167.218
Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	2.857.517.700	402.254.000
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	114.500	500.000
Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	100.569.951.276
Pemindahtanganan BMN Lainnya	155.768.642.486	-
Jumlah Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN	199.488.584.509	141.430.367.495

Dengan demikian, Penerimaan Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2017 lebih besar Rp58.058.217.014 atau 41,05 persen dari TA 2016.

Penerimaan dari
Penjualan Aset
Program
Restrukturisasi
sebesar Rp359,08
miliar

F.2.20. Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan dari Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2017 sebesar Rp359.085.434.905 merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	233.411.243.099	418.638.877.783
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	125.674.191.806	133.072.263.444
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	359.085.434.905	551.711.141.227

Dengan demikian, Penerimaan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2017 lebih kecil Rp192.625.706.322 atau 34,91 persen dari TA 2016.

Penerimaan
Pembiayaan Dana
Bergulir sebesar Rp0

F.2.21. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2017, sedangkan pada TA 2016 sebesar Rp1.401.910.000.000.

Penerimaan Investasi
Pemerintah sebesar
Rp735,15 miliar

F.2.22. Penerimaan Investasi Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah pada TA 2017 adalah sebesar Rp735.156.000.000 merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah, lebih besar Rp381.156.000.000 atau 107,67 persen dari TA 2016 sebesar Rp354.000.000.000.

Belanja Modal
sebesar Rp208,65
triliun

F.2.23. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal TA 2017 adalah sebesar Rp208.656.670.235.846, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Belanja Modal Tanah	3.421.319.416.306	4.679.260.989.833
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.605.672.819.037	68.173.006.731.025
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.819.212.471.582	25.218.097.056.167
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	80.441.877.902.717	63.963.737.273.038
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.421.175.609.710	3.961.493.734.680
Belanja Modal BLU	3.947.412.016.494	3.478.634.539.530
Jumlah Belanja Modal	208.656.670.235.846	169.474.230.324.273

Belanja Modal pada TA 2017 lebih besar Rp39.182.439.911.573 atau 23,12 persen dari TA 2016.

Pengeluaran
Pengembangan
Pendidikan Nasional
sebesar Rp10,50
triliun

F.2.24. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional

Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2017 sebesar Rp10.500.000.000.000 lebih besar Rp5.500.000.000.000 atau 110,00 persen dari TA 2016 sebesar Rp5.000.000.000.000.

Pengeluaran
Pembiayaan Dana
Bergulir sebesar
Rp5,60 triliun

F.2.25. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir TA 2017 sebesar Rp5.600.000.000.000 lebih besar Rp1.304.341.000.000 atau 30,36 persen dari TA 2016 sebesar Rp4.295.659.000.000.

Penyertaan Modal
Negara sebesar
Rp11,60 triliun

F.2.26. Penyertaan Modal Negara

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta PMN/Dana

Investasi Pemerintah. Penyertaan Modal Negara TA 2017 adalah sebesar Rp11.603.494.561.382, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	6.379.318.092.000	50.521.011.424.354
Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	2.024.176.469.382	3.837.161.070.554
Penyertaan Modal Negara Lainnya	3.200.000.000.000	10.827.891.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	11.603.494.561.382	65.186.063.494.908

Dengan demikian, Penyertaan Modal Negara TA 2017 lebih kecil Rp53.582.568.933.526 atau 82,20 persen dari TA 2016.

*Pengeluaran
Investasi Pemerintah
sebesar Rp33,05
triliun*

F.2.27. Pengeluaran Investasi Pemerintah

Pengeluaran Investasi Pemerintah TA 2017 sebesar Rp33.055.934.000.000 merupakan Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional dan Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional	32.050.560.000.000	16.000.000.000.000
Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	1.005.374.000.000	651.674.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	33.055.934.000.000	16.651.674.000.000

Dengan demikian, Pengeluaran Investasi Pemerintah dalam TA 2017 lebih besar Rp16.404.260.000.000 atau 98,51 persen dari TA 2016.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp132.518.715.897.464 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus Rp268.122.368.777.814 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp400.641.084.675.278. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pendanaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

*Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Pendanaan
sebesar Rp426,28
triliun*

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2017 adalah sebesar Rp426.289.009.273.320, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Arus Kas Masuk	783.384.266.893.379	750.996.106.231.302
Dikurangi Arus Kas Keluar	357.095.257.620.059	327.666.991.026.061
Arus Kas Bersih	426.289.009.273.320	423.329.115.205.241

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2017 lebih besar Rp2.959.894.068.079 atau 0,70 persen dari TA 2016.

F.2.28. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

*Penerimaan
Pembiayaan Dalam
Negeri sebesar
Rp727,57 triliun*

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2017 adalah sebesar Rp727.576.037.546.945, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Perbankan	-	19.011.062.000.000
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	1.305.055.202.247	1.334.733.611.736
Penerimaan Surat Berharga Negara	584.280.503.844.698	518.353.042.147.460
Penerimaan Surat Berharga Negara - Valuta Asing	141.990.478.500.000	142.446.220.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	727.576.037.546.945	681.145.057.759.196

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri TA 2017 lebih besar Rp46.430.979.787.749 atau 6,82 persen dibandingkan dengan TA 2016.

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Pada TA 2017, tidak terdapat Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan, sementara pada TA 2016, Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri – Perbankan sebesar Rp19.011.062.000.000 berasal dari Penerimaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

b. Penerimaan pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam negeri – Non Perbankan TA 2017 adalah sebesar Rp1.305.055.202.247 berasal dari penerimaan pinjaman dalam negeri. Penerimaan ini lebih kecil Rp29.678.409.489 atau 2,22 persen dari TA 2016 sebesar Rp1.334.733.611.736.

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan pembiayaan SBN TA 2016 sebesar Rp584.280.503.844.698, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	192.207.290.000.000	57.666.713.000.000
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara	237.884.012.996.000	312.234.206.834.460
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	100.624.076.197.896	115.254.892.413.000
Penerimaan Surat Utang Perbendaharaan Dalam Negeri - Jangka Panjang	44.690.000.000.000	19.520.030.000.000
Penerimaan Penerbitan SBSN dalam rangka Pembiayaan Proyek	8.875.124.650.802	13.677.199.900.000
Total Penerimaan SBN	584.280.503.844.698	518.353.042.147.460

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN TA 2017 lebih besar Rp65.927.461.697.238 atau 12,72 persen dibandingkan TA 2016.

d. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) – Valas

Penerimaan pembiayaan SBN – Valuta Asing TA 2016 sebesar Rp141.990.478.500.000 lebih kecil Rp455.741.500.000 atau 0.32 persen dibandingkan TA 2016, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerbitan/Penjualan Obligasi LN - Valas	102.021.478.500.000	109.038.720.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas – Jangka Panjang	39.969.000.000.000	33.407.500.000.000
Total Penerimaan SBN Valas	141.990.478.500.000	142.446.220.000.000

F.2.29. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2017 sebesar Rp51.726.855.339.157 merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan Pinjaman Program	20.947.967.337.503	35.324.945.886.041
Penerimaan Pinjaman Proyek	30.778.888.001.654	28.099.431.540.231
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	51.726.855.339.157	63.424.377.426.272

Dengan demikian, Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri TA 2017 lebih kecil Rp11.697.522.087.115 atau 18,44 persen dari TA 2016.

Penerimaan
Pembiayaan Luar
Negeri sebesar
Rp51,72 triliun

Penerimaan Cicilan
Pengembalian
Penerusan Pinjaman
sebesar Rp4,08
triliun

F.2.30. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2017 sebesar Rp4.081.374.007.277 merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD, dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN	353.699.519.388	2.332.666.500.732
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN	3.727.674.487.889	4.093.948.083.161
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	4.081.374.007.277	6.426.614.583.893

Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam TA 2017 lebih kecil Rp2.345.240.576.616 atau 36,49 persen dari TA 2016.

Penerimaan
Pembiayaan Lain
sebesar Rp0

F.2.31. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Tidak terdapat transaksi Penerimaan Pembiayaan Lain-lain pada TA 2017, sedangkan pada TA 2016 sebesar Rp56.461.941.

Pengeluaran
Pembiayaan DN
sebesar Rp285,10
triliun

F.2.32. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2017 sebesar Rp285.101.423.064.007 digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam negeri dan valuta asing, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri - Non Perbankan	656.763.630.395	283.174.257.224
Pengeluaran untuk Pelunasan SBN Dalam Negeri	257.198.059.433.612	241.042.505.729.172
Pengeluaran Untuk Pelunasan SBN - Valuta Asing	27.246.600.000.000	12.497.400.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	285.101.423.064.007	253.823.079.986.396

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2017 lebih besar Rp31.278.343.077.611 atau 12,32 persen dibandingkan TA 2016.

Pengeluaran
Pembiayaan LN
sebesar Rp65,12
triliun

F.2.33. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2017 sebesar Rp65.124.918.090.885, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri –Pinjaman Program	16.320.383.114.913	15.560.138.215.156
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri –Pinjaman Proyek	48.799.093.676.802	53.161.216.276.463
Pengembalian Pinjaman karena Pengeluaran Ineligible sampai dengan Tahun 2007	5.441.299.170	4.641.343.113
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	65.124.918.090.885	68.725.995.834.732

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2017 lebih kecil Rp3.601.077.743.847 atau 5,24 persen dibandingkan dengan TA 2016.

Penerusan Pinjaman
(RDI/RPD) sebesar
Rp6,86 triliun

F.2.34. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)

Penerusan Pinjaman RDI/RPD merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan Pinjaman Luar Negeri TA 2017 adalah sebesar Rp6.868.916.465.167. Jumlah tersebut lebih besar Rp1.751.001.260.234 atau 34,21 persen dibandingkan dengan TA 2016 sebesar Rp5.117.915.204.933.

*Sisa Lebih
Pembiayaan
Anggaran (SiLPA)
Rp25,64 triliun*

Berdasarkan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp426.289.009.273.320 dan defisit anggaran sebesar Rp400.641.084.675.278, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2017 sebesar Rp25.647.924.598.042.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

*Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Transitoris
sebesar Rp9,37
triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Dalam TA 2017, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris adalah sebesar Rp9.371.459.675.688, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	(763.254.906.069)	(77.540.452.077)
Transito (Neto)	1.069.556.153.365	(28.137.726.635)
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	9.363.511.838.634	(18.940.432.916.227)
Kiriman Uang antar Rekening Bank (Neto)	(298.353.410.242)	52.507.484.052
Arus Kas Bersih	9.371.459.675.688	(18.993.603.610.887)

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2017 lebih besar Rp28.365.063.286.575 atau 149,34 persen dari TA 2016.

F.2.35. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)

*PFK (Neto) sebesar
minus Rp763,25
miliar*

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) TA 2017 sebesar minus Rp763.254.906.069 berasal dari penerimaan pemerintah dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2017 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran PFK		
Penerimaan PFK 10 % Gaji	24.069.529.360.516	23.937.031.819.282
Penerimaan PFK 2 % Gaji Terusan	4.215.180.920	3.504.483.136
Penerimaan PFK Beras BULOG	285.699.694.065	285.892.059.674
Penerimaan PFK 2 % Iuran Kesehatan Pemda	4.557.674.919.056	4.573.322.575.240
Penerimaan PFK 2 % Asuransi Bidan/Dokter PTT	101.799.639	258.631.011
Penerimaan PFK Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja		
Pemborong Minyak dan Gas Bumi (PFK DTP Migas)	-	293.280
Penerimaan PFK Penutupan Rekening	-	621.438
Penerimaan PFK Lain-lain	372.703.882.449	380.772.440.191
Jumlah Penerimaan PFK	29.289.924.836.645	29.180.782.923.252
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	14.799.182.410.730	13.795.876.306.440
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	9.500.000.000	-
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi	1.850.000	-
	14.808.684.260.730	13.795.876.306.440
Pengeluaran Non Anggaran PFK		
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 10% Gaji	(22.319.792.812.634)	(27.222.610.531.370)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 2% Gaji Terusan	(1.565.564.682.564)	(463.909.661.979)
Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Beras Bulog	(285.541.721.420)	(279.509.825.132)
Pengembalian Penerimaan PFK 2 % Pemda	(4.894.630.362.776)	(1.515.326.466.567)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(374.497.159.361)	(383.176.491.530)

Jumlah Pengeluaran PFK	(29.440.026.738.755)	(29.864.532.976.578)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak		
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Setoran Pajak Rokok	(15.412.337.264.689)	(13.189.666.705.191)
Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pengalihan Piutang	(9.500.000.000)	-
	(15.421.837.264.689)	(13.189.666.705.191)
Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	(763.254.906.069)	(77.540.452.077)

Dengan demikian, Perhitungan Pihak Ketiga TA 2017 lebih kecil Rp685.714.453.992 atau 884,33 persen dibandingkan dengan TA 2016.

*Transito (Neto)
sebesar Rp1,06
triliun*

F.2.36. Transito (Neto)

Transito (Neto) TA 2017 sebesar Rp1.069.556.153.365 merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu dan transaksi *escrow* dana subsidi dan reboisasi, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Transito	9.566.708.865.307	9.695.658.479.280
Penerimaan Transito - BLU	2.503.323.901.989	5.041.062.412.318
Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	13.211.533.263	834.030.482
Penerimaan Persekot	-	122.392.649
Penerimaan Transito Uang Persediaan	14.961.779.659.349	21.401.803.565.421
Penerimaan Escrow	5.552.252.110.595	4.701.996.114.189
Penerimaan Pengembalian Escrow	-	7.810.000
Jumlah Penerimaan Transito	32.597.276.070.503	40.841.484.804.339
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran Transito	(9.531.270.619.075)	(9.777.186.307.485)
Pengembalian Penerimaan Dana dari BLU pada Rekening BUN	(2.503.323.901.989)	-
Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(13.211.533.263)	(834.030.482)
Pengeluaran Persekot Gaji	-	-
Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) Dana Rupiah	(14.933.035.752.216)	(21.266.015.698.328)
Pengeluaran Escrow	(4.546.878.110.595)	(9.825.586.494.679)
Jumlah Pengeluaran Transito	(31.527.719.917.138)	(40.869.622.530.974)
Jumlah Transito (Neto)	1.069.556.153.365	(28.137.726.635)

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam TA 2017 lebih besar Rp1.097.693.880.000 atau 3.901,15 persen dari TA 2016.

*Transaksi Non
Anggaran Pihak
Ketiga (Neto)
sebesar Rp9,36
triliun*

F.2.37. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) TA 2017 adalah sebesar Rp9.363.511.838.634. Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul karena Kesalahan Rekening, Utang kepada Pihak Ketiga karena retur SP2D, rr, RKUN yang ditanggihkan, Kesalahan Sistem Perbankan dan Koreksi Pemindahbukuan, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	26.448.911.183.027	38.275.077.494.585

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga		
Rekening Pemerintah Lainnya	783.516.087.380.724	690.823.994.644.714
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	40.402.811.314.026	30.829.757.626.300
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	414.190.403.263.438	345.743.024.529.513
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	6.481.687.890.981	6.173.921.760.729
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	50.000.000.000.000	31.800.000.000.000
	1.321.039.901.032.196	1.143.645.776.055.841
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga		
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	(26.789.564.814.910)	(38.833.850.055.648)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	(774.127.099.972.136)	(709.742.195.235.434)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	(40.402.811.314.892)	(30.662.529.194.841)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	(414.188.948.263.438)	(345.286.437.838.719)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus	(6.205.361.597.899)	(6.260.973.127.879)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	(50.000.000.000.000)	(31.800.000.000.000)
	(1.311.713.785.963.275)	(1.162.585.985.452.521)
	9.326.115.068.921	(18.940.209.396.680)
PFK terkait Kesalahan Sistem Perbankan		
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Sistem Perbankan	22.198.068.982.679	46.702.916.739.041
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena Kesalahan Sistem Perbankan	(22.193.398.493.197)	(46.703.101.835.261)
	4.670.489.482	(185.096.220)
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	613.692.610.196	11.022.970.284
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(580.966.329.965)	(11.061.393.611)
	32.726.280.231	(38.423.327)
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	9.363.511.838.634	(18.940.432.916.227)

Dengan demikian, Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (neto) dalam TA 2017 lebih besar Rp28.303.944.754.861 atau 149,44 persen dari TA 2016.

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) sebesar minus Rp298,35 miliar

F.2.38. Kirim Uang Antar Rekening Bank (Neto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto) TA 2017 sebesar minus Rp298.353.410.242 merupakan penerimaan dan pengeluaran Kirim Uang Antar Rekening Bank. Dalam transaksi Kirim Uang Antar Rekening Bank TA 2017 dan TA 2016 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran Kirim Uang Antar Rekening Bank yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat pengeluaran kirim uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Rincian Kirim Uang Antar Rekening Bank (neto) TA 2017 dan TA 2016 adalah sebagai berikut.

Uraian	TA 2017 (Audited)	TA 2016 (Audited)
Penerimaan Kirim Uang antar Rekening Bank	12.585.894.182.296.760	11.780.746.292.660.552
Pengeluaran Kirim Uang antar Rekening Bank	(12.586.192.535.707.002)	(11.780.693.785.176.500)
Jumlah KU (Neto)	(298.353.410.242)	52.507.484.052

Dengan demikian, Kirim Uang Antar Rekening Bank (Neto) dalam TA 2017 lebih kecil Rp350.860.894.294 atau 668,21 persen dari TA 2016.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

G.1. EKUITAS AWAL

*Ekuitas Awal
Rp1.566,93
triliun*

Ekuitas Awal per 1 Januari 2017 dan 1 Januari 2016 sebesar Rp1.566.931.752.006.649 dan Rp1.669.790.895.690.636. Nilai Ekuitas Awal tahun 2017 merupakan nilai Ekuitas Akhir Neraca per 31 Desember 2016 pada LKPP Tahun 2016 *Audited*.

*Penyesuaian
Ekuitas Awal Rp0*

G.1.1. Penyesuaian Ekuitas Awal

Penyesuaian Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan minus Rp1.530.307.195.836. Sesuai dengan kebijakan dalam penyajian LKPP, penyesuaian ekuitas konsolidasian merupakan bagian dari koreksi tahun berjalan sehingga pada tahun 2017 disajikan pada pos Koreksi lainnya.

*Defisit LO
Rp112,98 triliun*

G.2. SURPLUS/(DEFISIT) LO

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp112.982.816.158.602 dan Rp139.724.987.772.978. Defisit LO merupakan penjumlahan antara Surplus/(Defisit) kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Rincian Surplus/(Defisit) LO per 31 Desember 2017 disajikan dalam Laporan Operasional.

G.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp11,29
miliar*

G.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp11.292.013.385 dan Rp0 merupakan penyesuaian atas SAL BLU pada Kementerian Negara Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp8.504.756.260, Kementerian Perhubungan sebesar Rp238.591.012, dan BP Sabang sebesar Rp2.548.666.113.

Koreksi Kas Rp0

G.3.2. Koreksi Kas

Koreksi Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp525.355.551.813.

*Koreksi Kas Dalam
Transito Rp0*

G.3.3. Koreksi Kas Dalam Transito

Koreksi Kas Dalam Transito untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan minus Rp5.814.671.707.

*Penggunaan SAL
Rp0*

G.3.4. Penggunaan SAL

Penggunaan SAL untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan minus Rp19.011.062.000.000.

*Koreksi Utang
Kepada Pihak
Ketiga Rp0*

G.3.5. Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga

Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp284.602.526.705.

*Penyesuaian SiLPA
Rp473,81 miliar*

G.3.6. Penyesuaian SiLPA

Penyesuaian SiLPA untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp473.817.522.854 dan minus Rp1.560.393.916.008. Penyesuaian SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama periode berjalan ditambah dengan koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu. Dalam penyesuaian SiLPA, terdapat Koreksi SiLPA sebesar Rp156.906.188.392 yang merupakan koreksi terhadap nilai SiLPA karena pengembalian pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp453.500.672.144, serta penyesuaian selisih kurs terealisasi yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (akun 311211) sebesar Rp610.406.860.536.

*Mutasi Uang Muka
dari Rekening KUN
Rp0*

G.3.7. Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN

Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan minus Rp87.937.257.364. Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN merupakan jurnal manual dengan menggunakan akun Uang Muka Reksus Kosong (akun 112221) selama periode berjalan. Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN diperoleh dari perhitungan nilai saldo akhir dikurangi nilai saldo awal. Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 disajikan dalam pos Koreksi Lain-lain.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp5,82 triliun*

G.3.8. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp5.823.271.175.506 dan minus Rp7.010.190.560.386. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan pada K/L yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Rincian koreksi nilai persediaan yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

1. Kementerian Pertahanan sebesar Rp2.990.532.652.070 yang disebabkan penyesuaian nilai persediaan tahun lalu antara Neraca dengan Laporan BMN.
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp2.261.534.079.212 yang merupakan Koreksi Nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
3. Kepolisian RI sebesar Rp244.353.251.074 merupakan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya sehingga terjadi penambahan saldo awal persediaan.
4. Koreksi Nilai Persediaan pada K/L lainnya sebesar Rp326.851.193.150.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0***G.3.9. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp1.177.063.117.956.

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp76,51 triliun***G.3.10. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp76.515.960.269.354 dan Rp8.492.525.680.556. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi tahun 2017 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan nilai aset yang tidak terkait dengan revaluasi aset pada tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2017 dan koreksi atas nilai Aset Tetap yang baru ditemukan (barang berlebih) selama proses Penilaian Kembali BMN pada tahun 2017. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi dan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L	49.905.188.759.638	29.289.735.296.709
2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L	2.722.315.377.302	(7.264.809.134.393)
3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN	24.068.677.065.565	(31.478.517.837)
4. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN	(14.706.277.361)	(13.500.921.963.923)
5. Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(165.514.655.790)	0
Jumlah	76.515.960.269.354	8.492.525.680.556

1. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

- a. Kementerian PU dan PERA sebesar Rp19.634.401.041.726 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017;
- b. Kementerian Pertahanan sebesar Rp9.619.953.576.460 antara lain disebabkan koreksi saldo awal pada aplikasi SAIBA untuk disamakan dengan saldo awal pada aplikasi SIMAK BMN;
- c. Kementerian Perhubungan sebesar Rp9.266.303.456.074 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017;
- d. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp2.175.400.064.635 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017;
- e. Kejaksaan Agung RI sebesar Rp1.796.226.088.633 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017;
- f. Kepolisian RI sebesar Rp1.653.081.984.594 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017;
- g. Kementerian Agama sebesar Rp1.433.581.975.397 merupakan koreksi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2017;
- h. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada K/L lainnya sebesar Rp4.326.240.572.119.

2. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L yang signifikan, antara lain terdapat pada K/L:
 - a. Kementerian Ristek dan Dikti sebesar Rp2.488.117.837.862 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - b. Kepolisian RI sebesar Rp813.815.284.031 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2017
 - c. Badan Intelijen Negara sebesar Rp707.690.780.930 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - d. Kementerian Pertahanan sebesar Rp343.482.175.467 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - e. Kejaksaan Agung RI sebesar Rp216.885.909.368 merupakan koreksi aset lainnya yang diperoleh sebelum tahun 2017;
 - f. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada K/L lainnya sebesar Rp7.292.307.364.960.
3. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN sebesar Rp24.068.677.065.565. Koreksi tersebut berasal dari:
 - a. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain sebesar Rp244.480.860. Koreksi tersebut merupakan koreksi atas aset tetap pada BP Batam, Otoritas Jasa Keuangan dan SKK Migas dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp249.476.250 merupakan nilai buku hasil pengadaan tahun 2014 hasil inventarisasi tahun 2017 di Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan sebesar Rp93.039.375 dan Kantor OJK Sulawesi Tengah sebesar Rp156.436.875.
 - 2) SKK Migas sebesar minus Rp4.995.390.
 - b. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp24.068.432.584.705. Koreksi tersebut terdiri dari koreksi Pencatatan pada aset PKP2B dan aset KKKS dengan rincian sebagai berikut.
 - 1) Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi satker pengelola BMN yang berasal dari KKKS sebesar Rp23.814.960.845.390 yang terdiri dari :

Koreksi Tambah Nilai Wajar pada tahun 2017, yaitu :

 - koreksi atas Tanah sebesar Rp1.975.996.693.258,
 - HBM sebesar Rp41.693.448.698.359,
 - HBI sebesar Rp1.370.886.055, dan
 - MP sebesar Rp613.719.898.037.
 - Pembulatan sebesar Rp1.

Koreksi Kurang Nilai Wajar pada tahun 2017, yaitu :

 - koreksi atas Tanah sebesar Rp771.959.278.890,
 - HBM sebesar Rp16.935.717.412.970,
 - HBI sebesar Rp1.061.762.475, dan
 - MP sebesar Rp2.760.836.875.985.
 - 2) Koreksi Aset tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi Aset Eks Pertamina sebesar Rp153.923.980.326. Koreksi tersebut berasal dari koreksi atas pos Piutang PNPB dan Pendapatan Diterima di Muka yang terbawa pada Laporan Keuangan BUN Pengelolaan Transaksi Khusus Tahun 2016, namun masih tercatat juga

pada Laporan Keuangan BA 015 pada BLU LMAN sehingga berpotensi terjadi *double-posting*.

- 3) Koreksi ekuitas atas nilai Aset Lainnya Non Revaluasi Aset PKP2B yang merupakan koreksi nilai Aset PKP2B yang telah disesuaikan sebesar Rp93.665.064.585;
- 4) Mereklasifikasi selisih nilai buku dan harga jual yang dicatat sebagai koreksi lain lain atas penghapusan BMN sebanyak 32 unit sesuai KMK Nomor 48/KM.6/2017 tentang Penghapusan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Pertamina sebesar Rp5.882.694.409.
4. Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah sebesar minus Rp14.706.277.361. Koreksi tersebut merupakan penyusutan sekaligus (penyusutan transaksional) selama 11 semester sejak periode tanggal laporan penilaian (semester II 2011) sampai dengan semester II 2016 atas aset eks kelolaan PT. PPA di Apartemen Puri Casablanca yang diterima tahun 2017.
5. Penyesuaian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada tingkat LKPP sebesar minus Rp165.514.655.790 merupakan pencatatan transaksi Aset BPYBDS pada Kementerian Perindustrian yang direklasifikasi dari akun Diterima Dari Entitas Lainnya (DKEL) ke Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.

G.3.11. Revaluasi Aset BUMN

*Revaluasi Aset
BUMN minus
Rp2,17 triliun*

Revaluasi Aset BUMN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp2.171.167.258.138 dan Rp74.621.739.602.006. Nilai Revaluasi Aset BUMN tersebut berasal dari selisih (keuntungan/kerugian) atas revaluasi aset tetap sebagai dampak implementasi Kebijakan Paket Ekonomi Jilid V. Rincian Revaluasi Aset BUMN disajikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BUMN	Nilai
PT. Asuransi Jasa Indonesia	4.482.867.000
PT. Balai Pustaka	127.151.471.464
PT. Energy Management Indonesia	756.664.338
PT. Garuda Indonesia	414.258.189.870
PT. Indra Karya	70.731.000.000
PT. Krakatau Steel	1.016.038.329.600
PT. LEN Industri	6.624.000.000
PT. Pembangunan Perumahan	58.189.888.498
PT. Perkebunan Nusantara III	(1.027.674.371)
PT. Perusahaan Listrik Negara	(6.933.307.000.000)
PT. Perusahaan Pengelola Aset	264.436.000.000
PT. Pos Indonesia	1.389.669.844.863
PT. Primmisima	3.173.206.900
PT. Pupuk Indonesia	99.725.000.000
PT. Rajawali Nusantara Indonesia	658.217.667.941
PT. Reasuransi Indonesia Utama	178.931.897.995
PT. Surveyor Indonesia	(4.776.313.563)
PT. Waskita Karya	1.530.301.527
PT. Bank Negara Indonesia	(2.274.600.000)
PT. Bank Mandiri	315.664.800.000
PT. Industri Sandang Nusantara (Persero)	160.637.199.800
Jumlah	(2.171.167.258.138)

*Koreksi Lain-lain
Rp4,31 triliun*

G.3.12. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp4.317.975.497.496 dan minus Rp20.354.811.605.168. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi yang tidak termasuk dalam Penyesuaian Nilai Aset dan SiLPA, Koreksi atas Kas, Utang, Nilai Piutang, Nilai Persediaan, dan Aset, Penggunaan SAL, Selisih Revaluasi Aset Tetap, dan Revaluasi Aset BUMN yang mempengaruhi ekuitas. Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 mencakup Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker, Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran, Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah, dan Mutasi Kas BLU. Koreksi Lain-lain dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lain-lain	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1. Koreksi Lain-lain pada K/L	9.224.749.807.565	(19.562.520.414.875)
2. Koreksi Lain-lain pada BUN	6.802.942.018.571	(156.371.098.051)
3. Penyesuaian	(11.709.716.328.641)	
Penyesuaian Utang Pajak Bendahara	-	23.317.864.041
Penyesuaian Kas di BP, Kas pada BLU, dan Hibah pada BA BUN 999.00	-	(659.237.956.198)
Jumlah*	4.317.975.497.495	(20.354.811.605.083)*

*selisih tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp1 dan Rp85 karena pembulatan

1. Koreksi Lain-lain pada K/L

Koreksi Lain-lain pada K/L untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp9.224.749.807.565 dan minus Rp19.562.520.414.875. Koreksi Lain-lain pada K/L untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 yang paling signifikan, antara lain terdapat pada K/L:

- Kementerian Pertahanan sebesar Rp8.497.823.535.717, yang berasal dari masing-masing unit organisasi dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lain-lain pada Kemenhan (Eselon 1)	31 Desember 2017 (Audited)
Kementerian Pertahanan	288.443.524.075
Mabes TNI	62.240.305.615
TNI AD	6.586.385.579.057
TNI AL	58.608.009.835
TNI AU	1.502.146.117.135
Jumlah	8.497.823.535.717

Koreksi Lain-lain pada Eselon 1 TNI AD sebesar Rp6.586.385.579.057, paling signifikan berasal dari Satker Mabes TNI AD sebesar Rp6.552.599.693.323.

- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp482.669.932.095, yang berasal dari masing-masing unit organisasi dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lain-lain pada Kementerian ESDM (Es 1)	31 Desember 2017 (Audited)
Setjen	(2.298.753.000)
Ditjen Ketanagalistrikan	(353.262.874.165)
Ditjen Minerba	1.791.141.689.415

Badan Litbang	(996.815.550)
Badan PSDM	37.489.500
Badan Geologi	(60.751.008.738)
Ditjen EBTKE	(891.199.795.367)
Jumlah	482.669.932.095

Koreksi Lain-lain pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral paling signifikan berasal dari Ditjen Minerba yang disebabkan koreksi piutang akibat verifikasi dan adanya pembayaran/pelunasan piutang dari periode sebelumnya.

- c. Kementerian Perhubungan sebesar minus Rp477.461.677.543, yang berasal dari masing-masing unit organisasi dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lain-lain pada Kemenhub (Es 1)	31 Desember 2017 (Audited)
Ditjen Perhubungan Laut	(488.731.705.812)
Ditjen Perhubungan Udara	96.040.400
Ditjen Perkeretaapian	(1.140.084.531)
Badan PSDM	12.314.072.400
Jumlah	(477.461.677.543)

Koreksi Lain-lain pada Kementerian Perhubungan paling signifikan berasal dari Ditjen Perhubungan Laut yang berupa Koreksi Aset.

2. Koreksi Lain-lain pada BUN

Koreksi Lain-lain pada BUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp6.802.942.018.571 dan minus Rp156.371.098.051. Koreksi Lain-lain pada BUN dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bagian Anggaran	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a. 999.00 Kuasa BUN	11.056.774.037.490	124
b. 999.01 Pengelolaan Utang	(1.128.291.748.037)	94.025.948.047
c. 999.02 Pengelolaan Hibah	0	709.967.979.000
d. 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah	7.677.326.743.059	(5.314.206.847.258)
e. 999.04 Pengelolaan Penerusan Pinjaman	(19.692.179.601)	4.126.582.028.753
f. 999.05 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	(499.016.564.819)	1.818.597.387.740
g. 999.06 Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain	(277.255.821)	0
h. 999.07 Pengelolaan Belanja Subsidi	(816.393.850.063)	(13.598.783.706.745)
i. 999.08 Pengelolaan Belanja Lain-lain	0	23.100.014.748
j. 999.09 Pengelolaan Badan Lainnya	680.779.393.840	1.070.310.217.438
k. 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus	(9.143.224.596.255)	10.914.035.879.832
l. Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada BUN	(1.005.041.960.222)	0
Jumlah *	6.802.942.019.571	(156.371.098.321)

*selisih angka tabel dan face pada tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp1.000 dan Rp270 karena pembulatan

- a. Koreksi Lain-lain pada Kuasa BUN

Koreksi Lain-lain pada Kuasa BUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp11.056.774.037.490 dan

Rp124. Koreksi Lain-lain pada BA 999.00 sebesar Rp11.056.774.037.490, terdiri dari:

- 1) Koreksi kas di rekening penerimaan, pengeluaran, dan jaminan, dana penjaminan, retur, dan transito di Kuasa BUN, koreksi utang, dan lainnya sebesar Rp1.089.389.745.458;
- 2) Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar minus Rp60.608.033.659;
- 3) Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah sebesar Rp1.483.534.735.668;
- 4) Mutasi Kas BLU sebesar Rp8.544.457.590.023.

b. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Utang

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Utang untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp1.128.291.748.037 dan Rp94.025.948.047. Koreksi Lain-lain pada Pengelolaan Utang dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Koreksi	31 Desember 2017 (Audited)
Penyesuaian nilai pembayaran bunga pinjaman	22.575.157.665
Penyesuaian nilai posisi pinjaman per 31 Desember 2016	(1.569.714.345.692)
Penyesuaian nilai Pinjaman Dalam Negeri	(943.529.181)
Penyesuaian nilai Utang Program	26.940.244.479
Penyesuaian nilai Utang Proyek	392.850.724.692
Jumlah	(1.128.291.748.037)

c. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Hibah

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp709.967.979.000. Tidak ada Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Hibah selama tahun 2017.

d. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp7.677.326.743.059 dan minus Rp5.314.206.847.258. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

UAKPA	Koreksi	31 Desember 2017 (Audited)
KPA Dit PNBPDJA	Koreksi atas Penerimaan Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN dengan kepemilikan saham mayoritas dan saham minoritas, Piutang Denda keterlambatan, dan dividen interim.	42.303.675.087.650
BLU LPDB KUMKM	Koreksi karena pengalihan dari program kementerian, mutasi NRB, dan Dana Penjaminan Jamkrindo.	8.167.243.255
KPA Kemen BUMN	Koreksi atas OCI non revaluasi, dividen, BPYBDS, PKBL, <i>treasury stock</i> , saldo awal, <i>restatement</i> , pencatatan tambahan modal, kurs, dan komponen LPE lainnya.	(39.604.449.323.202)
KPA DJKN	Koreksi atas OCI non revaluasi, dividen, laba/rugi yang belum direalisasi, dan bagian laba pemerintah.	(261.338.851.460)

UAIP	Koreksi pada Univ Padjajaran, Univ Hassanudin, Univ Diponegoro, dan ITS Sepuluh November.	6.886.135.618.475
BLU LMAN	Koreksi atas saldo Akumulasi Penyusutan Aset Eks Pertamina, saldo Akumulasi Penyusutan Aset Eks HTBI batch I, dan koreksi karena pengembalian penyerahkelolaan atas Aset Eks HTBI batch I.	(1.657.552.815.679)
KPA BKF	Koreksi atas Utang Jangka Panjang Luar Negeri pada IDA dan dividen saham ICD.	2.689.784.020
Jumlah		7.677.326.743.059

e. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp19.692.179.601 dan Rp4.126.582.028.753. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman sebesar minus Rp19.692.179.601 berasal dari koreksi penyesuaian piutang aset lainnya kredit program PIR/UPP/P3 Bali sebesar minus Rp2.692.179.601 dan koreksi penyesuaian piutang jangka pendek KUMK sebesar minus Rp17.000.000.000.

f. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengeloaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengeloaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp499.016.564.819 dan Rp1.818.597.387.740. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengeloaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar minus Rp499.016.564.819 berasal dari Satker DAU dan DAK Non Fisik sebesar minus Rp8.204.433.000 dan Satker Dana Bagi Hasil sebesar minus Rp490.812.131.819.

g. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi dan Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp277.255.821 dan Rp0. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi tersebut merupakan koreksi atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BA 999.06 yang telah dilikuidasi.

h. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Belanja Subsidi

Koreksi Lain-lain pada BUN Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp816.393.850.063 dan minus Rp13.598.783.706.745. Koreksi Lain-lain tersebut merupakan koreksi atas beban sebesar minus Rp524.577.612.278 dan koreksi atas beban sebesar minus Rp291.816.237.785, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Kementerian/Lembaga	31 Desember 2017 (Audited)
A	Koreksi Atas Utang	
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	39.127.841
2	Perhubungan	45.048.930.697
3	Pertanian	(25.004.513.540)
4	Kuangan	(544.661.157.277)
	Jumlah Koreksi Utang	(524.577.612.279)
B	Koreksi Atas Beban	

1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(281.265.850.172)
2	Koperasi dan UKM	(10.545.216.684)
3	Keuangan	(5.170.929)
	Jumlah Koreksi Beban	(291.816.237.785)
	Jumlah Koreksi Lain-Lain*	(816.393.850.064)

*selisih Rp1 karena pembulatan

- i. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain
Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp0 dan Rp23.100.014.748.
- j. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya
Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp680.779.393.840 dan Rp1.070.310.217.438. Koreksi Lain-Lain pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya sebesar Rp680.779.393.840 merupakan koreksi kenaikan/penurunan Ekuitas UBL Bukan Satker dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Badan Lainnya	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1) Otorita Asahan	(295.805.669)	(88.047.943.818)
2) Yayasan TMII	1.999.190.591	5.175.440.833
3) Yayasan Gedung Veteran	(2.476.808.735)	(363.644.327)
4) Baznas	46.468.140.771	29.725.768.686
5) Badan Wakaf Indonesia	(99.923.519)	40.938.623
6) BP Dana Abadi Umat	333.529.292.730	176.030.778.659
7) SKK Migas	(19.893.300.598)	(42.191.857.523)
8) OJK	321.548.608.269	989.940.736.305
Jumlah	680.779.393.840	1.070.310.217.438

- k. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus
Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp9.143.224.596.255 dan Rp10.914.035.879.832. Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1) UAPBUN TK Ditjen Perbendaharaan	(34.175.033.855)	11.830.875.115.755
2) UAPBUN TK Ditjen Kekayaan Negara	(8.761.423.371.207)	1.877.746.110.302
3) UAPBUN TK Ditjen Anggaran	(347.626.191.192)	(2.345.706.921.194)
4) UAPBUN TK Badan Kebijakan Fiskal	0	(1.844.763)
5) UAPBUN TK Ditjen Perimbangan Keuangan	0	(448.876.580.268)
Jumlah	(9.143.224.596.255)*	10.914.035.879.832

*selisih Rp1 karena pembulatan

- 1) Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus Ditjen Perbendaharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp34.175.033.855. Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus Ditjen Perbendaharaan terdiri dari:

- a) Koreksi pada satker PFK sebesar Rp32.859.652.177;
 - b) Koreksi pada satker Pengelolaan Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan, Program Tunjangan Hari Tua (THT), Belanja PPN BI RTGS, dan Belanja Selisih Harga Beras Bulog sebesar Rp4.111.031.520;
 - c) Koreksi pada Satker Direktorat Pengelolaan Kas Negara Transaksi Khusus sebesar minus Rp71.145.717.552.
- 2) Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus Ditjen Kekayaan Negara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp8.761.423.371.207. Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dirincikan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Koreksi Lain-lain pada BUN Pengelolaan Transaksi Khusus DJKN	31 Desember 2017 (Audited)
a) Koreksi Lain-lain atas Aset Lainnya	8.180.449.000
b) Koreksi Lain-lain atas ABMA/T	50.277.307.000
c) Koreksi Lain-lain atas Aset PKP2B	(795.767.828.624)
d) Koreksi Lain-lain atas pendapatan, beban, hibah langsung, piutang, dan utang	(8.173.266.000.194)
e) Koreksi Lain-lain atas Aset BLBI	149.152.701.611
Jumlah	(8.761.423.371.207)

- 3) Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus Ditjen Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar minus Rp347.626.191.192. Koreksi Lain-lain tersebut berasal dari transaksi Usaha Hulu Migas sebesar minus Rp350.150.539.414 dan dari kegiatan Usaha Panas Bumi sebesar Rp2.524.348.222.
 - 4) Tidak ada Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus Badan Kebijakan Fiskal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.
 - 5) Tidak ada Koreksi Lain-lain pada UAPBUN Transaksi Khusus Ditjen Perimbangan Keuangan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.
- I. Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada BUN
- Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada BUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp1.005.041.960.222 dan Rp0. Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada BUN sebesar Rp1.005.041.960.222 berasal dari penyesuaian mutasi dana cadangan penjaminan yang sudah disajikan pada BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah.

3. Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada LPE

Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar minus Rp11.709.716.328.641 dan minus Rp635.920.092.157. Penyesuaian Koreksi Lain-lain pada LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penyesuaian Koreksi Lain-lain	Nilai	Keterangan
Jurnal balik ekuitas penyesuaian konsolidasian tahun 2016	34.298.902.496.272	Jurnal balik ekuitas konsolidasian karena perbedaan penyajian ekuitas LKKL dan LKPP Konsolidasian
Koreksi lainnya utang pajak tahun lalu	20.726.107.444	Koreksi utang pajak tahun lalu yang sudah diakui sebagai pendapatan
Eliminasi Kas Bendahara Pengeluaran menurut UAPBUN AP	(210.828.164.140)	Jurnal eliminasi Akun resiprokal karena sudah disajikan di KL
Eliminasi Kas Lainnya di KL menurut UAPBUN AP	(4.834.494.025.327)	Jurnal eliminasi Akun resiprokal karena sudah disajikan di KL
Eliminasi Kas BLU menurut UAPBUN AP	(40.984.519.890.383)	Jurnal eliminasi Akun resiprokal karena sudah disajikan di KL
Pencatatan Kas UAPBUN AP pada BA 999.06	497.147.493	Pencatatan kembali Kas Bendahara Pengeluaran pada BA 999.06 di
Jumlah	(11.709.716.328.641)	

Jurnal balik ekuitas konsolidasian sebesar Rp34.298.902.496.272 dijelaskan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2017 (Audited)
Penyesuaian Ekuitas konsolidasian:	
a. Hibah Yang Belum Disahkan tahun 2016	(1.468.925.290.429)
b. Uang Muka dari KPPN tahun 2016	(268.195.389.260)
c. Utang Pajak Bendahara yang direklas ke Ekuitas melalui Pendapatan LO tahun 2016	(20.726.107.444)
d. Kas di UA BUN AP	36.062.527.505.049
e. Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga	(5.778.222.696)
f. Selisih saldo awal Ekuitas 2017 dgn saldo akhir Ekuitas 2016 (BA 999.07)	1.000
g. Koreksi Pembulatan	52
Jumlah	34.298.902.496.272

- a. Pada LKKL, akun Hibah Yang Belum Disahkan tahun 2016, disajikan sebagai bagian dari pos Kewajiban di neraca. Berdasarkan kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP, Hibah Yang Belum Disahkan tahun 2016 tersebut diakui sebagai pendapatan hibah tahun 2016 dan menambah ekuitas tahun 2016. Dengan demikian, saldo awal Ekuitas tahun 2017 disesuaikan sebesar minus Rp1.468.925.290.429.
- b. Pada LKKL, Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2016 disajikan sebagai bagian dari pos Kewajiban. Berdasarkan kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP, Uang Muka dari KPPN disajikan sebagai Ekuitas di neraca tahun 2016. Dengan demikian, saldo awal Ekuitas tahun 2017 disesuaikan sebesar minus Rp268.195.389.260.
- c. Potongan Pajak yang sudah diterima oleh Bendahara namun belum disetor ke Rekening Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2016 dalam LKKL disajikan sebagai utang pajak bendahara yang belum disetor yang merupakan bagian dari pos Kewajiban. Pada LKPP tahun 2016, pajak yang belum disetor tersebut diakui sebagai Pendapatan pajak lainnya di LO. Dengan demikian, saldo awal Ekuitas tahun 2017 disesuaikan sebesar minus Rp20.726.107.444.

- d. Saldo Kas di Unit Akuntansi Pembantu BUN Akuntansi Pusat (UAPBUN AP) sebesar Rp36.062.527.505.049, yang terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran (Kas di BP) sebesar Rp271.505.915.030, Kas lainnya di K/L sebesar Rp3.350.959.289.659, dan Kas pada BLU sebesar Rp32.440.062.300.360. Pencatatan Kas di BP, Kas lainnya di K/L dan Kas pada BLU oleh UAPBUN AP merupakan kontrol atas pencatatan saldo kas terkait pada LKKL, karena Kas di BP, Kas Lainnya di K/L dan Kas BLU berada dalam penguasaan Bendahara K/L. Kebijakan akuntansi dalam penyusunan LKPP mengatur bahwa saldo kas di BP, Kas Lainnya di K/L dan Kas BLU disajikan berdasarkan data LKKL, sehingga dalam penyusunan LKPP tahun 2016, saldo kas terkait di UAPBUN AP sebesar Rp36.062.527.505.049 dieliminasi agar tidak terjadi pencatatan ganda. Sebagai akibat kebijakan tersebut, saldo awal Ekuitas tahun 2017 disesuaikan sebesar Rp36.062.527.505.049.
- e. Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar minus Rp5.778.222.696 karena dalam LKPP tahun 2016, Utang Pihak Ketiga yang berasal dari BUN dicatat sebesar Rp608.578.579.546, yang seharusnya sebesar Rp614.356.802.242. Hal tersebut terjadi karena perbedaan *cut off* data. Dengan demikian, saldo awal Ekuitas tahun 2017 disesuaikan sebesar minus Rp5.778.222.696.
- f. Selisih saldo awal Ekuitas tahun 2017 dengan saldo akhir Ekuitas tahun 2016 pada BUN Belanja Subsidi sebesar Rp1.000.
- g. Koreksi karena pembulatan pada ekuitas konsolidasian sebesar Rp52.

G.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp184.315.553.360 dan minus Rp72.406.275.018. Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dijelaskan sebagai berikut.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp184,31 miliar*

(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
Ditagihkan Ke Entitas Lain	7.667.629.414.023.180	7.565.697.447.811.740
Diterima Dari Entitas Lain	(7.689.683.255.327.710)	(7.571.783.024.702.010)
Pengesahan Hibah Langsung	19.920.061.337.943	11.729.861.018.471
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(325.761.880.913)	(319.259.921.626)
Setoran Surplus BLU	2.496.676.098.011	(5.041.062.412.318)
Transfer Keluar	(204.411.874.523.524)	(297.374.387.215.241)
Transfer Masuk	204.559.055.826.370	297.018.019.145.967
Jumlah*	184.315.553.357	(72.406.275.018)

*Selisih sebesar Rp3 karena pembulatan

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua/lebih entitas yang berbeda, baik internal K/L, antar K/L, antar BUN maupun K/L dengan BUN. Transaksi Antar Entitas di LKPP terdiri dari Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh K/L dan Transaksi Antar Entitas yang dicatat oleh BA BUN. Transaksi Antar Entitas terdiri dari empat jenis transaksi, yaitu:

1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) /Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Belanja pada K/L yang melibatkan Kas Negara (BUN), dan Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan pada BA BUN dengan Kas Negara (BUN).
2. Transaksi Antar Entitas pengesahan hibah langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA BUN.
3. Setoran Surplus BLU merupakan setoran ke kas negara dari BLU atas surplus kas BLU atau pengembalian setoran BLU dari kas negara ke kas BLU.
4. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA BUN.

Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan disajikan pada akun Diterima Dari Entitas Lain, dan Transaksi Antar Entitas atas Belanja, Transfer ke Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan disajikan pada akun Ditagihkan Ke Entitas Lain, sedangkan Pengesahan atas pendapatan Hibah Langsung yang diterima oleh K/L disajikan pada akun Pengesahan Hibah Langsung. Penjelasan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

1. Transaksi Antar Entitas atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, terdiri dari DKEL sebesar Rp7.667.629.414.023.180, DDEL sebesar minus Rp7.689.683.255.327.710, pengesahan hibah langsung sebesar Rp19.920.061.337.943, pengesahan pengembalian hibah langsung sebesar minus Rp325.761.880.913 dan Setoran Surplus BLU Rp2.496.676.098.011 terdiri dari setoran pengembalian sebesar Rp2.500.000.000.000 pada Kementerian Keuangan dan setoran Surplus BLU sebesar minus Rp3.323.901.989 pada LAPAN. Nilai neto/selisih atas Transaksi Antar Entitas ini sebesar Rp37.134.250.510,.

Beberapa yang menjadi penyebab selisih Transaksi Antar Entitas antara lain sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
a) Perbedaan pencatatan TAE antara Unit Akuntansi Kas Negara (UAPBUN AP) dan BA BUN	0	3.590.911
b) Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L	132.492.464	181.967.135.745
c) Mutasi Akun Transitoris (81 dan 82)	77.540.752.671	17.503.736.065
d) Perbedaan pencatatan belanja K/L dengan UAPBUN AP	(294)	(113.550.336)
e) Perbedaan pencatatan DDEL 999.02 dari Hibah Langsung dengan Pengesahan Hibah Langsung di K/L	(40.564.410.058)	85.089.331.144
f) Perbedaan pencatatan TAE yang masih dalam penelusuran	25.415.727	(488.449.273)
Jumlah	37.134.250.510	283.961.794.256

Penyebab terjadinya selisih atas Transaksi Antar Entitas sebesar Rp37.134.250.510 diantaranya sebagai berikut.

- a) Tidak ada perbedaan pencatatan TAE antara Unit Akuntansi Kas Negara (UAPBUN AP) dan BA BUN
 - b) Perbedaan pencatatan pendapatan antara Kas Negara dengan K/L sebesar Rp132.492.464. Perbedaan tersebut berasal dari perbedaan antara realisasi pendapatan Netto yang dilaporkan pada KL dan BA BUN sebesar Rp1.666.375.780.165.621 lebih kecil dibanding kas masuk pada kas negara/ SiAP (DKEL) sebesar Rp1.666.375.912.658.085.
 - c) Perbedaan pencatatan antara SiAP dengan SAI dimana pengeluaran dan penerimaan transito UP/TUP pada SiAP dicatat sebagai DDEL/ DKEL sedangkan pada K/L dicatat sebagai Uang Muka dari KPPN. Selama tahun 2017 mutasi transaksi transito (Akun 81xxxx dan 82xxxx) pada K/L sebesar Rp77.540.752.671 lebih besar akun 81.
 - d) Perbedaan pencatatan belanja K/L dengan UAPBUN AP sebesar minus Rp294
 - e) Terdapat selisih DDEL 999.02 dari Hibah Langsung (HL) dan DKEL SiAP dari pengembalian sisa hibah TAYL dengan Pengesahan HL di K/L. Pengesahan Hibah Langsung yang dicatat K/L merupakan kontra pos dari DDEL pada BA 999.02 dari pendapatan hibah langsung dan DKEL pada SiAP dari pengembalian sisa hibah TAYL. DDEL pada BA 999.02 dari pendapatan hibah langsung sebesar Rp19.634.863.867.088. Nilai net akun Pengesahan Hibah Langsung yang dicatat K/L adalah sebesar Rp19.594.299.457.030 yang berasal dari Pengesahan Hibah langsung sebesar Rp19.920.061.337.943 dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sebesar Rp325.761.880.913. Dengan demikian, sisa selisih yang mempengaruhi TAE adalah sebesar minus Rp40.564.410.058 dimana nilai DDEL pada 999.02 lebih besar dibanding Pengesahan Hibah Langsung di K/L. Nilai signifikan selisih DDEL pada 999.02 dengan Pengesahan Hibah langsung di K/L diantaranya disebabkan adanya Hibah Barang/Jasa yang belum dicatat pada Kementerian Ristekdikti sebesar Rp31.354.446.469, dan kesalahan pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang pada Kementerian Agama sebesar Rp11.750.000.000.
 - f) Transaksi antar entitas lain-lain dalam penelusuran adalah sebesar Rp25.415.727.
2. Transaksi Antar Entitas atas Transfer Masuk dan Transfer Keluar konsolidasian LKPP, terdiri dari Transfer Keluar sebesar Rp204.411.874.523.524 dan Transfer Masuk sebesar Rp204.559.055.826.370. Selisih Transfer Masuk lebih besar daripada Transfer Keluar sebesar Rp147.181.302.846.
- Penjelasan atas saldo TKTM konsolidasian yang signifikan antara lain sebagai berikut.
- a. Selisih sebesar minus Rp565.889.094.223 miliar pada Kementerian Koordinator Polhukam merupakan alih status ke Badan Keamanan Laut. Selisih sebesar Rp6.187.500 merupakan kurang transfer berupa aset yang dihentikan penggunaannya. Bakamla sudah mencatat transfer masuk atas alih status BMN tersebut.

- b. Selisih sebesar Rp383.780.612.877 pada Kementerian Agama antara lain berasal dari alih status dari LPP RRI sebesar Rp329.401.747.335, dari Kementerian PUPR sebesar Rp55.985.381.267, dari Kementerian ESDM dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp23.268.100.
- c. Selisih sebesar minus Rp239.038.002.612 pada Kementerian PUPERA antara lain karena alih status penggunaan kepada:
 - Kementerian Agama sebesar Rp55.985.381.267.
 - Kementerian Setneg sebesar Rp58.057.685.017
 - Kementerian Sosial sebesar Rp48.765.727.500.
 - Kementerian RistekDikti sebesar Rp21.328.469.994.
 - Kementerian Perhubungan sebesar Rp13.515.970.365.
 - POLRI sebesar Rp1.675.806.256.
- d. Selisih sebesar minus Rp304.974.760.960 pada LPP RRI antara lain karena:
 - Transfer masuk berupa Peralatan Pemancar FM Radio 5 KW dari KemenKominfo sebesar Rp27.881.837.500 dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.454.851.125. Berdasarkan BAST Nomor: 01/KOMINFO/BPPPTI.31/BAST/PL.04.01/03/2017 Tanggal 14 Maret 2017
 - Transfer keluar berupa Tanah ke Kementerian Agama sebesar Rp329.401.747.335. Berdasarkan BAST Nomor: 774/DU/05/2017 dan Nomor: 01/MA/05/2017 Tanggal 9 Mei 2017
- e. Selisih sebesar Rp146.554.037.557 pada LPP TVRI karena alih status penggunaan dari Kementerian Kominfo sebesar Rp161.933.051.970
- f. Selisih sebesar minus Rp146.439.373.872 pada LKBUN merupakan alih status BMN dari BA BUN 999 99 ke KL (satker lingkup Kementerian Keuangan, satker BNN untuk BLBI, dan satker Kementerian Pertahanan) sebesar Rp153.367.026.505 dan alih status dari KL ke BA 999 99 sebesar Rp6.927.652.633 (penyerahan BMN Idle dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dengan nilai buku).

Rincian Transaksi Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada KL dan BA BUN terdapat pada **Lampiran 30**.

*Reklasifikasi
Kewajiban Ke
Ekuitas Rp1,67
triliun*

G.5. REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS

Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp1.679.256.307.076 dan Rp1.397.481.091.442. Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas merupakan reklasifikasi akun kewajiban Uang Muka dari KPPN dan Hibah Langsung yang Belum Disahkan.

*Penurunan
Ekuitas minus
Rp26,14 triliun*

G.6. KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS

Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp26.148.095.077.709 dan Rp101.328.836.488.151. Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/(Defisit) LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, Koreksi-koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, dan Reklasifikasi Kewajiban Ke Ekuitas.

*Ekuitas Akhir
Rp1.540,78
triliun*

G.7. EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.540.783.656.928.940 dan Rp1.566.931.752.006.649. Nilai Ekuitas Akhir diperoleh dari penjumlahan saldo Ekuitas Awal sebesar Rp1.566.931.752.006.649 dikurangi penurunan Ekuitas sebesar Rp26.148.095.077.709.

INDEKS CALK

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah			Halaman
Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara	70
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan	71
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	71
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	71
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	72
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	72
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	72
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	73
Catatan	B.2.1.2.4	Pendapatan BLU	74
Catatan	B.2.1.3	Penerimaan Hibah	75
Belanja Negara			
Catatan	B.2.2	Belanja Negara	75
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	75
Catatan	B.2.2.1.1	Belanja Pegawai	78
Catatan	B.2.2.1.2	Belanja Barang	78
Catatan	B.2.2.1.3	Belanja Modal	79
Catatan	B.2.2.1.4	Belanja Pembayaran Bunga Utang	80
Catatan	B.2.2.1.5	Belanja Subsidi	80
Catatan	B.2.2.1.6	Belanja Hibah	81
Catatan	B.2.2.1.7	Belanja Bantuan Sosial	82
Catatan	B.2.2.1.8	Belanja Lain-lain	82
Catatan	B.2.2.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	83
Catatan	B.2.2.2.1	Transfer ke Daerah	83
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Perimbangan	83
Catatan	B.2.2.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	83
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil	84
Catatan	B.2.2.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	84
Catatan	B.2.2.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	85
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	85
Catatan	B.2.2.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	85
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Insentif Daerah	86
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Keistimewaan DIY	86
Catatan	B.2.2.2.1.4	Dana Otonomi Khusus	86
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Desa	86
Surplus (Defisit) Anggaran			
Catatan	B.2.3	Defisit Anggaran	87
Pembiayaan			
Catatan	B.2.4	Pembiayaan	87
Catatan	B.2.4.1	Pembiayaan Dalam Negeri	87
Catatan	B.2.4.1.1	Rekening Pemerintah/Penggunaan SAL	87
Catatan	B.2.4.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	87
Catatan	B.2.4.1.3	Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	88
Catatan	B.2.4.1.4	Surat Berharga Negara (Neto)	88

Catatan	B.2.4.1.5	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	89
Catatan	B.2.4.1.6	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	89
Catatan	B.2.4.1.7	Kewajiban Penjaminan	90
Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	90
Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	91
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	91
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	91
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	91
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	91
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	92

SiLPA (SiKPA)

Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)	93

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	94

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Catatan	C.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	98
Catatan	C.2	Penyesuaian SAL Awal	98
Catatan	C.3	Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	99
Catatan	C.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	99
Catatan	C.5	Penyesuaian Pembukuan	99
Catatan	C.6	Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Catatan SAL)	100
Catatan	C.7	Saldo Anggaran Lebih Akhir	105

NERACA

ASET

Catatan	D.2.1	Rekening Kas BUN di BI	107
Catatan	D.2.2	Rekening Pemerintah Lainnya	107
Catatan	D.2.3	Rekening Kas di KPPN	108
Catatan	D.2.4	Kas Dalam Transit	109
Catatan	D.2.5	Kas di Bendahara Pengeluaran	109
Catatan	D.2.6	Kas di Bendahara Penerimaan	109
Catatan	D.2.7	Kas Lainnya dan Setara Kas	109
Catatan	D.2.8	Kas Pada BLU	111
Catatan	D.2.9	Uang Muka dari Rekening BUN	112
Catatan	D.2.10	Investasi Jangka Pendek	112
Catatan	D.2.11	Belanja Dibayar Di Muka dan Uang Muka Belanja	112
Catatan	D.2.12	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	113
Catatan	D.2.13	Piutang Perpajakan	113
Catatan	D.2.14	Piutang Bukan Pajak	116
Catatan	D.2.15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	129
Catatan	D.2.16	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	130
Catatan	D.2.17	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	130
Catatan	D.2.18	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	130
Catatan	D.2.19	Piutang dari Kegiatan BLU	130
Catatan	D.2.20	Piutang PFK	131
Catatan	D.2.21	Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	132
Catatan	D.2.22	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang	132
Catatan	D.2.23	Persediaan	133

		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	D.2.24	Dana Bergulir	135
Catatan	D.2.25	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	136
Catatan	D.2.26	Investasi Non Permanen Lainnya	136
Catatan	D.2.27	Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	137
Catatan	D.2.28	Investasi Permanen PMN	137
Catatan	D.2.29	Investasi Permanen BLU	138
Catatan	D.2.30	Investasi Permanen Lainnya	139
Catatan	D.2.31	Aset Tetap	140
Catatan	D.2.32	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	141
Catatan	D.2.33	Piutang Jangka Panjang	141
Catatan	D.2.34	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	143
Catatan	D.2.35	Aset Lainnya	144
Catatan	D.2.36	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan Amortisasi Aset Tak Berwujud	167
		KEWAJIBAN	
		Kewajiban Jangka Pendek	
Catatan	D.2.37	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	169
Catatan	D.2.38	Utang Kepada Pihak Ketiga	170
Catatan	D.2.39	Utang Biaya Pinjaman	175
Catatan	D.2.40	Utang Subsidi	175
Catatan	D.2.41	Utang Transfer	178
Catatan	D.2.42	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	182
Catatan	D.2.43	Utang SBN Jangka Pendek	183
Catatan	D.2.44	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	183
Catatan	D.2.45	Pendapatan Diterima di Muka	183
Catatan	D.2.46	Pendapatan yang Ditangguhkan	185
Catatan	D.2.47	Utang Jangka Pendek Lainnya	185
		Kewajiban Jangka Panjang	
Catatan	D.2.48	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	186
Catatan	D.2.49	Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri	186
Catatan	D.2.50	Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	186
Catatan	D.2.51	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	187
Catatan	D.2.52	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	189
Catatan	D.2.53	Utang Jangka Panjang Subsidi	191
Catatan	D.2.54	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	193
Catatan	D.2.55	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	193
		EKUITAS	
Catatan	D.2.56	Ekuitas	195
		CATATAN PENTING LAINNYA	
Catatan	D.3	Catatan Penting Lainnya	196
		LAPORAN OPERASIONAL	
Catatan	E.2.1	Kegiatan Operasional	222
Catatan	E.2.1.1	Pendapatan Operasional	223
Catatan	E.2.1.1.1	Pendapatan Perpajakan	224
Catatan	E.2.1.1.1.1	Pajak Penghasilan	224
Catatan	E.2.1.1.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	225
Catatan	E.2.1.1.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	226
Catatan	E.2.1.1.1.4	Pajak Cukai	226

Catatan	E.2.1.1.1.5	Pajak Lainnya	226
Catatan	E.2.1.1.1.6	Bea Masuk	227
Catatan	E.2.1.1.1.7	Bea Keluar	227
Catatan	E.2.1.1.1.8	Pajak Lain-lain	227
Catatan	E.2.1.1.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	228
Catatan	E.2.1.1.2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	228
Catatan	E.2.1.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	229
Catatan	E.2.1.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	229
Catatan	E.2.1.1.2.4	Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	230
Catatan	E.2.1.1.3	Pendapatan Hibah	231
Catatan	E.2.1.2	Beban Operasional	231
Catatan	E.2.1.2.1	Beban Pegawai	232
Catatan	E.2.1.2.2	Beban Persediaan	233
Catatan	E.2.1.2.3	Beban Barang dan Jasa	234
Catatan	E.2.1.2.4	Beban Pemeliharaan	234
Catatan	E.2.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	235
Catatan	E.2.1.2.6	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	235
Catatan	E.2.1.2.7	Beban Bunga	236
Catatan	E.2.1.2.8	Beban Subsidi	237
Catatan	E.2.1.2.9	Beban Hibah	238
Catatan	E.2.1.2.10	Beban Bantuan Sosial	238
Catatan	E.2.1.2.11	Beban Transfer	239
Catatan	E.2.1.2.12	Beban Lain-lain	243
Catatan	E.2.1.2.13	Beban Penyusutan dan Amortisasi	243
Catatan	E.2.1.2.14	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	244
Catatan	E.2.2	Kegiatan Non Operasional	246
Catatan	E.2.2.1	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	246
Catatan	E.2.2.1.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	246
Catatan	E.2.2.1.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	246
Catatan	E.2.2.2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	247
Catatan	E.2.2.2.1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	247
Catatan	E.2.2.2.2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	247
Catatan	E.2.2.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	247
Catatan	E.2.2.3.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	247
Catatan	E.2.2.3.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	248
Catatan	E.2.3	Pos Luar Biasa	249
Catatan	E.2.3.1	Pendapatan Luar Biasa	249
Catatan	E.2.3.2	Beban Luar Biasa	249

LAPORAN ARUS KAS

Catatan	F.1.1	Saldo Awal Kas	250
Catatan	F.1.2	Kenaikan Penurunan Kas	250
Catatan	F.1.3	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	252

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Catatan	F.2.1	Penerimaan Perpajakan	254
Catatan	F.2.1.1	Pajak Penghasilan	254
Catatan	F.2.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	255
Catatan	F.2.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	255
Catatan	F.2.1.4	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	255
Catatan	F.2.1.5	Cukai	255
Catatan	F.2.1.6	Pajak Lainnya	256
Catatan	F.2.1.7	Pajak Perdagangan Internasional	256

Catatan	F.2.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	256
Catatan	F.2.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	257
Catatan	F.2.2.2	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	257
Catatan	F.2.2.3	Penerimaan PNBPN Lainnya	257
Catatan	F.2.2.4	Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU)	257
Catatan	F.2.3	Penerimaan Hibah	258
Catatan	F.2.4	Belanja Pegawai	258
Catatan	F.2.5	Belanja Barang	259
Catatan	F.2.6	Belanja Pembayaran Bunga Utang	259
Catatan	F.2.7	Belanja Subsidi	260
Catatan	F.2.8	Belanja Hibah	260
Catatan	F.2.9	Bantuan Sosial	260
Catatan	F.2.10	Belanja Lain-Lain	261
Catatan	F.2.11	Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	261
Catatan	F.2.12	Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	261
Catatan	F.2.13	Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	262
Catatan	F.2.14	Dana Alokasi Umum	262
Catatan	F.2.15	Transfer Dana Alokasi Khusus	262
Catatan	F.2.16	Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	262
Catatan	F.2.17	Transfer Lainnya	262
Catatan	F.2.18	Dana Desa	263
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Catatan	F.2.19	Pengelolaan dan Penjualan BMN	263
Catatan	F.2.20	Penjualan Aset Program Restrukturisasi	264
Catatan	F.2.21	Penerimaan Pembiayaan Biaya Bergulir	264
Catatan	F.2.22	Penerimaan Investasi Pemerintah	264
Catatan	F.2.23	Belanja Modal	264
Catatan	F.2.24	Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	264
Catatan	F.2.25	Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	264
Catatan	F.2.26	Penyertaan Modal Negara	264
Catatan	F.2.27	Pengeluaran Investasi Pemerintah	265
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Catatan	F.2.28	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	265
Catatan	F.2.29	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	266
Catatan	F.2.30	Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	267
Catatan	F.2.31	Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	267
Catatan	F.2.32	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	267
Catatan	F.2.33	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	267
Catatan	F.2.34	Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)	267
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Catatan	F.2.35	Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	268
Catatan	F.2.36	Transito (Neto)	269
Catatan	F.2.37	Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Neto)	269
Catatan	F.2.38	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Neto)	270

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Catatan	G.1	Ekuitas Awal	271
Catatan	G.1.1	Penyesuaian Ekuitas Awal	271
Catatan	G.2	Surplus/Defisit LO	271
Catatan	G.3	Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/mengurangi Ekuitas	271
Catatan	G.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	271
Catatan	G.3.2	Koreksi Kas	271
Catatan	G.3.3	Koreksi Kas Dalam Transito	271
Catatan	G.3.4	Penggunaan SAL	271
Catatan	G.3.5	Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga	272
Catatan	G.3.6	Penyesuaian SiLPA	272
Catatan	G.3.7	Mutasi Uang Muka dari Rekening KUN	272
Catatan	G.3.8	Koreksi Nilai Persediaan	272
Catatan	G.3.9	Selisih Revaluasi Aset Tetap	273
Catatan	G.3.10	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	273
Catatan	G.3.11	Revaluasi Aset BUMN	275
Catatan	G.3.12	Koreksi Lain-lain	276
Catatan	G.4	Transaksi Antar Entitas	283
Catatan	G.5	Reklasifikasi Kewajiban ke Ekuitas	286
Catatan	G.6	Kenaikan/Penurunan Ekuitas	286
Catatan	G.7	Ekuitas Akhir	287

DAFTAR SINGKATAN

INDEKS SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BMN	: Barang Milik Negara
BNP2TKI	: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	: Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BUJT	: Badan Usaha Jalan Tol
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CAR	: <i>Capital Adequate Ratio</i>
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
CICR	: <i>Consolidated Interest Coverage Ratio</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat
DBH	: Dana Bagi Hasil
DEP	: Dana Ekonomi Produktif
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DNS	: <i>Debt for Nature Swap</i>
DPM	: Dana Penguatan Modal
DPPN	: Dana Pengembangan Pendidikan Nasional
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DSCR	: <i>Debt Service Coverage Ratio</i>
DTP	: Ditanggung Pemerintah
EDI	: <i>Electronic Data Interchange</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
GIZ-ProFI	: <i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –Promotion of Small Financial Institutions</i>
GIZ-GGPAS	: <i>Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit –Good Governance in Population Administration Systems</i>
HTI	: Hutan Tanaman Industri
INDRA	: <i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
ITPT	: Industri Tekstil dan Produksi Tekstil
JPY	: <i>Japanese Yen</i>
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPRSH	: Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat
KPS	: Kontraktor <i>Production Sharing</i>
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUT	: Kredit Usaha Tani
LAK	: Laporan Arus Kas
LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	: Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	: Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MPN	: Modul Penerimaan Negara
MP3	: Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak

NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
ORI	: Obligasi Ritel Indonesia
PBS	: <i>Project Based Sukuk</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PFK	: Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PIR	: Perusahaan Inti Rakyat
PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerja sama
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPAP	: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	: <i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	: Rekening Dana Investasi
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	: Rekening Pemerintah Lainnya
RTGS	: <i>Real Time Gross Settlement</i>
SAA	: <i>Separate Arrangement Agreement</i>
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	: <i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SIKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SILPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	: Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	: Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk

SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
SP3	: Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SPU	: Sarana Pengembangan Usaha
SUN	: Surat Utang Negara
SWIFT	: <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
TA	: Tahun Anggaran
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
THT	: Tabungan HariTua
TP	: Tim Pemberesan Aset
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	: <i>Treasury Single Account</i>
TSP	: Tempat Simpan Pinjam
USAID	: <i>United State Agency for International Development</i>
USD	: <i>United State Dollar</i>
UPP	: Unit Pelaksana Proyek
UP3	: Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah
USP	: Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	: Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan



**Pemerintah Republik Indonesia
Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat**





Republik Indonesia

LAMPIRAN

LKPP TAHUN 2017

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

AUDITED



MEI 2018

LAMPIRAN
LKPP TAHUN 2017
AUDITED

MEI 2018

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA2017 dan 2016	L.1
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut BA dan Eselon I TA 2017	L.16
3. Laporan Realisasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2017	L.29
4. Persetujuan <i>Multi Years Contract</i> (Kontrak Tahun Jamak)	L.80
5. Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016	L.81
6. Kas pada K/L dan BUN per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	L.87
7. Uang Muka Belanja dan Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	L.90
8. Piutang Perpajakan per 31 Desember 2017	L.93
9. Piutang PNB per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	L.97
10. Rincian Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi	L.101
11. Aset Kredit Eks BPPN	L.102
12. Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	L.109
13. Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	L.111
14. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara BUMN Tahun 2017	L.114
15. Penyertaan Modal Negara pada Perusahaan Negara/Lembaga Di Bawah Pembinaan Kementerian Keuangan per 31 Desember 2017	L.122
16. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional per 31 Desember 2017	L.124
17. Penyertaan Modal Negara pada Non BUMN per 31 Desember 2017	L.125
18. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2017	L.127
19. Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga per 31 Desember 2017	L.129
20. Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	L.147
21. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	L.149
22. Aset Eks BPPN per 31 Desember 2017	L.152
23. Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016	L.160
24. Aset PT PPA per 31 Desember 2017	L.164
25. Daftar Barang Milik Negara Eks Bmn Idle	L.170
26. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017	L.172
27. <i>Outstanding</i> Utang Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2017	L.174
28. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya per 31 Desember 2017	L.180
29. Dana Kelolaan BLU pada Pusat Pembiayaan Perumahan	L.184
30. Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk	L.186
31. Laporan Pertanggungjawaban SBN	L.188

1. LRA PENDAPATAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	TAHUN ANGGARAN 2017	%	TAHUN ANGGARAN 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
41	Penerimaan Perpajakan	1.472.709.861.675.000	1.343.529.843.798.510	91,23%	1.284.970.139.927.480	58.559.703.871.029	4,56%
411	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.436.730.861.675.000	1.304.316.269.228.040	90,78%	1.249.499.479.450.430	54.816.789.777.608	4,39%
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan	783.970.270.000.000	646.793.472.957.381	82,50%	666.212.388.011.659	(19.418.915.054.278)	-2,91%
41111	Pendapatan Pajak PPh Migas	41.770.270.000.000	50.315.750.744.783	120,46%	36.098.555.090.638	14.217.195.654.145	39,38%
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	15.228.260.000.000	16.599.430.743.163	109,00%	10.802.737.196.125	5.796.693.547.038	53,66%
411112	Pendapatan PPh Gas Bumi	26.542.010.000.000	33.711.719.453.816	127,01%	25.275.247.016.815	8.436.472.437.001	33,38%
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya	-	4.600.547.804	-	20.570.877.698	(15.970.329.894)	-77,64%
41112	Pendapatan PPh Non-Migas	742.200.000.000.000	587.543.573.276.305	79,16%	621.064.182.802.521	(33.520.609.526.216)	-5,40%
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	148.054.692.449.000	117.764.553.599.746	79,54%	109.644.003.959.877	8.120.549.639.869	7,41%
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	11.064.847.078.000	16.172.671.971.729	146,16%	11.351.858.339.343	4.820.813.632.386	42,47%
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	52.543.762.547.000	43.156.722.093.470	82,13%	37.977.707.951.270	5.179.014.142.200	13,64%
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	36.389.829.367.000	34.005.879.655.650	93,45%	29.142.388.691.193	4.863.490.964.457	16,69%
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	19.936.629.927.000	7.806.580.852.307	39,16%	5.313.790.324.230	2.492.790.528.077	46,91%
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	242.663.588.930.000	206.550.829.248.758	85,12%	169.687.708.767.886	36.863.120.480.872	21,72%
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	55.118.095.829.000	43.691.062.125.980	79,27%	36.095.237.400.838	7.595.824.725.142	21,04%
411128	Pendapatan PPh Final	156.183.661.070.000	106.310.936.330.643	68,07%	117.676.429.099.987	(11.365.492.769.344)	-9,66%
411129	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	20.244.892.803.000	12.084.337.398.022	59,69%	104.175.058.267.897	(92.090.720.869.875)	-88,40%
41113	Pendapatan PPh Fiskal		349.728.807	-	2.780.168.368	(2.430.439.561)	-87,42%
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	-	349.728.807	-	2.780.168.368	(2.430.439.561)	-87,42%
41114	Pendapatan PPh ditanggung Pemerintah		8.933.799.207.486	-	9.046.869.950.132	(113.070.742.646)	-1,25%
411141	Pendapatan PPh psl 21 ditanggung Pemerintah	-	132.161.316	-	38.163.995	93.997.321	246,30%
411142	Pendapatan PPh psl 22 ditanggung Pemerintah	-	219.978	-	3.244.182	(3.024.204)	-93,22%
411143	Pendapatan PPh psl 22 Import ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	-
411144	Pendapatan PPh psl 23 ditanggung Pemerintah	-	614.833.045	-	340.909	614.492.136	180251,07%
411146	Pendapatan PPh psl 25/29 ditanggung Pemerintah	-	1.702.566.558.147	-	1.909.024.977.438	(206.458.419.291)	-10,81%
411147	Pendapatan PPh psl 26 ditanggung Pemerintah	-	7.230.485.435.000	-	7.137.803.223.608	92.682.211.392	1,30%
411148	Pendapatan PPh Final ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	-
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	475.483.491.675.000	480.724.607.483.756	101,10%	412.213.453.510.472	68.511.153.973.284	16,62%
41121	Pendapatan PPN	460.678.653.675.000	463.528.437.616.523	100,62%	396.042.209.672.571	67.486.227.943.952	17,04%
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri	328.071.074.554.000	314.342.826.531.220	95,82%	273.004.855.546.038	41.337.970.985.182	15,14%
411212	Pendapatan PPN Impor	132.355.785.650.000	149.034.796.849.454	112,60%	122.774.745.866.924	26.260.050.982.530	21,39%
411219	Pendapatan PPN Lainnya	251.793.471.000	150.814.235.849	59,90%	262.608.259.609	(111.794.023.760)	-42,57%
41122	Pendapatan PPNBM	14.804.838.000.000	17.196.169.867.233	116,15%	16.171.243.837.901	1.024.926.029.332	6,34%
411221	Pendapatan PPNBM Dalam Negeri	10.642.601.625.000	13.292.538.563.625	124,90%	11.810.126.756.426	1.482.411.807.199	12,55%
411222	Pendapatan PPNBM Impor	4.077.044.036.000	3.796.354.314.090	93,12%	4.295.382.169.252	(499.027.855.162)	-11,62%
411229	Pendapatan PPNBM Lainnya	85.192.339.000	107.276.989.518	125,92%	65.734.912.223	41.542.077.295	63,20%
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	15.412.100.000.000	16.770.346.937.156	108,81%	19.443.228.194.707	(2.672.881.257.551)	-13,75%
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	15.412.100.000.000	16.770.346.937.156	108,81%	19.443.228.194.707	(2.672.881.257.551)	-13,75%
411311	Pendapatan PBB Pedesaan	-	-	-	(655.568.620)	655.568.620	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	TAHUN ANGGARAN 2017	%	TAHUN ANGGARAN 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6
411312	Pendapatan PBB Perkotaan	-	-	-	-	-	-
411313	Pendapatan PBB Perkebunan	1.455.364.779.000	2.175.377.454.058	149,47%	1.885.674.062.555	289.703.391.503	15,36%
411314	Pendapatan PBB Kehutanan	302.595.253.000	595.957.370.926	196,95%	402.633.716.641	193.323.654.285	48,01%
411315	Pendapatan PBB Pertambangan	1.727.400.328.000	1.480.177.403.749	85,69%	1.637.941.682.580	(157.764.278.831)	-9,63%
411316	Pendapatan PBB Migas	11.926.739.640.000	12.230.011.698.753	102,54%	15.272.318.235.857	(3.042.306.537.104)	-19,92%
411317	Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	-	253.462.867.931	-	211.324.161.821	42.138.706.110	19,94%
411319	Pendapatan PBB Lainnya	-	35.360.141.739	-	33.991.903.873	1.368.237.866	4,03%
4114	Pendapatan BPHTB	-	1.216.911.547	-	481.361.509	735.550.038	152,81%
41141	Pendapatan BPHTB	-	1.216.911.547	-	481.361.509	735.550.038	152,81%
411411	Pendapatan BPHTB	-	1.216.911.547	-	481.361.509	735.550.038	152,81%
4115	Pendapatan Cukai	161.865.000.000.000	153.288.149.392.121	94,70%	143.525.035.262.959	9.763.114.129.162	6,80%
41151	Pendapatan Cukai	161.865.000.000.000	153.288.149.392.121	94,70%	143.525.035.262.959	9.763.114.129.162	6,80%
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	147.487.222.498.000	147.719.216.343.096	100,16%	137.968.355.366.214	9.750.860.976.882	7,07%
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	147.994.124.000	147.122.735.280	99,41%	171.144.229.260	(24.021.493.980)	-14,04%
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	5.529.783.378.000	5.567.468.557.500	100,68%	5.307.660.504.474	259.808.053.026	4,89%
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai	-	(158.239.602.120)	-	68.363.827.950	(226.603.430.070)	-331,47%
411519	Pendapatan Cukai Lainnya	8.700.000.000.000	12.581.358.365	0,14%	9.511.335.061	3.070.023.304	32,28%
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	-	6.738.475.546.078	-	8.104.893.109.125	(1.366.417.563.047)	-16,86%
41161	Pendapatan Pajak Lainnya	-	6.098.195.197.160	-	5.914.887.232.312	183.307.964.848	3,10%
411611	Pendapatan Bea Meterai	-	1.367.164.381.348	-	1.338.838.981.493	28.325.399.855	2,12%
411612	Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai	-	3.715.003.305.722	-	3.470.109.271.885	244.894.033.837	7,06%
411613	Pendapatan PPN Batubara	-	982.575.599.538	-	1.082.038.500.742	(99.462.901.204)	-9,19%
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	33.451.910.552	-	23.900.478.192	9.551.432.360	39,96%
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak	-	640.280.348.918	-	2.190.005.876.813	(1.549.725.527.895)	-70,76%
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh	-	406.970.758.069	-	1.025.405.906.665	(618.435.148.596)	-60,31%
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN	-	232.614.159.194	-	1.159.310.071.661	(926.695.912.467)	-79,94%
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPhBM	-	493.203.415	-	1.643.512.053	(1.150.308.638)	-69,99%
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	-	202.228.240	-	3.646.386.434	(3.444.158.194)	-94,45%
41163	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	-
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah	-	-	-	-	-	-
412	Pajak Perdagangan Internasional	35.979.000.000.000	39.213.574.570.471	108,99%	35.470.660.477.050	3.742.914.093.421	10,55%
4121	Pendapatan Bea Masuk	33.279.000.000.000	35.066.181.439.852	105,37%	32.472.077.371.870	2.594.104.067.982	7,99%
41211	Pendapatan Bea Masuk	33.279.000.000.000	34.821.385.171.852	104,63%	32.280.131.576.194	2.541.253.595.658	7,87%
412111	Pendapatan Bea Masuk	33.279.000.000.000	33.495.272.858.547	100,65%	30.633.370.467.412	2.861.902.391.135	9,34%
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	-	-	103.997.545	(103.997.545)	-100,00%
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean	-	582.649.947.955	-	894.231.050.707	(311.581.102.752)	-34,84%
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	-	457.334.656.735	-	466.530.304.772	(9.195.648.037)	-1,97%
412115	Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang penga	-	-	-	-	-	-
412116	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DPT)	-	280.946.213.728	-	280.001.769.046	944.444.682	0,34%
412119	Pendapatan Pabean Lainnya	-	5.181.494.887	-	5.893.986.712	(712.491.825)	-12,09%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	TAHUN ANGGARAN 2017	%	TAHUN ANGGARAN 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6
41212	Pendapatan Bea Masuk Tindakan		244.796.268.000	-	191.945.795.676	52.850.472.324	27,53%
412121	Pendapatan Bea Masuk Antidumping	-	182.509.916.000	-	141.817.946.477	40.691.969.523	28,69%
412122	Pendapatan Bea Masuk Imbalan	-	2.105.000	-	53.932.473	(51.827.473)	-96,10%
412123	Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	-	62.284.247.000	-	50.073.916.726	12.210.330.274	24,38%
4122	Pendapatan Bea Keluar	2.700.000.000.000	4.147.393.130.619	153,61%	2.998.583.105.180	1.148.810.025.439	38,31%
41221	Pendapatan Bea Keluar	2.700.000.000.000	4.147.393.130.619	153,61%	2.998.583.105.180	1.148.810.025.439	38,31%
412211	Pendapatan Bea Keluar	2.700.000.000.000	4.137.811.636.557	153,25%	3.000.790.659.110	1.137.020.977.447	37,89%
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	-	9.287.233.578	-	(2.214.399.982)	11.501.633.560	
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar	-	294.260.484	-	6.846.052	287.414.432	4198,25%
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	260.242.149.353.000	311.216.253.857.085	119,59%	261.976.344.626.007	49.239.909.231.078	18,80%
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	95.643.149.163.000	111.132.042.413.912	116,19%	64.901.905.473.366	46.230.136.940.546	71,23%
4211	Pendapatan Minyak Bumi	57.406.800.000.000	58.203.042.976.236	1	31.448.046.588.915	26.754.996.387.321	85,08%
421111	Pendapatan Minyak Bumi	57.406.800.000.000	58.203.042.976.236	1	31.448.046.588.915	26.754.996.387.321	85,08%
4212	Pendapatan Gas Bumi	14.801.090.000.000	23.639.900.993.613	159,72%	12.645.694.067.924	10.994.206.925.689	86,94%
421211	Pendapatan Gas Bumi	14.801.090.000.000	23.639.900.993.613	2	12.645.694.067.924	10.994.206.925.689	86,94%
4213	Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara	17.858.519.157.000	23.763.165.037.383	1	15.756.799.135.341	8.006.365.902.042	50,81%
421311	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	1.455.408.952.000	515.832.971.394	35,44%	405.379.247.623	110.453.723.771	27,25%
421312	Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	16.403.110.205.000	23.247.332.065.989	1	15.351.419.887.718	7.895.912.178.271	51,43%
421313	Pendapatan dari Keuntungan Bersih izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	-	-	-	-	-	-
4214	Pendapatan Kehutanan	3.955.484.622.000	4.101.918.540.911	103,70%	3.756.968.379.853	344.950.161.058	9,18%
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	1.761.543.212.000	1.728.935.988.957	98,15%	1.617.842.736.621	111.093.252.336	6,87%
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	1.761.543.212.000	1.728.935.988.957	98,15%	1.617.842.736.621	111.093.252.336	6,87%
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	832.454.228.000	918.354.417.067	110,32%	827.046.155.417	91.308.261.650	11,04%
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	832.454.228.000	918.354.417.067	110,32%	827.046.155.417	91.308.261.650	11,04%
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)	194.560.473.000	40.477.518.350	20,80%	128.668.336.935	(88.190.818.585)	-68,54%
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	194.560.473.000	5.181.430.850	2,66%	10.742.349.935	(5.560.919.085)	-51,77%
421432	Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu	-	-	-	-	-	-
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan	-	-	-	-	-	-
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	-	35.296.087.500	-	117.925.987.000	(82.629.899.500)	-70,07%
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	1.166.884.076.000	1.413.976.918.727	121,18%	1.183.243.525.630	230.733.393.097	19,50%
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	1.164.846.576.000	1.413.168.383.981	121,32%	1.183.084.469.880	230.083.914.101	19,45%
421444	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar kegiatan Kehutanan	2.037.500.000	808.534.746	39,68%	159.055.750	649.478.996	408,33%
42145	Pendapatan Jasa Perbenihan dan Kehutanan	42.633.000	173.697.810	407,43%	167.625.250	6.072.560	3,62%
421451	Pendapatan dari Kegiatan Perijinan di Bidang Perbenihan	14.459.000	94.892.000	656,28%	-	94.892.000	
421452	Pendapatan dari Sertifikasi Benih	8.961.000	78.805.810	879,43%	167.625.250	(88.819.440)	-52,99%
421453	Pendapatan dari Pengumpulan Benih dan Anakan	19.213.000	-	-	-	-	-
4215	Pendapatan Perikanan	950.000.000.000	491.033.529.369	51,69%	362.117.397.236	128.916.132.133	35,60%
42151	Pendapatan Perikanan	950.000.000.000	491.033.529.369	51,69%	362.117.397.236	128.916.132.133	35,60%
421511	Pendapatan Perikanan	950.000.000.000	491.033.529.369	51,69%	362.117.397.236	128.916.132.133	35,60%
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	671.255.384.000	932.981.336.400	138,99%	932.279.904.097	701.432.303	0,08%
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	671.255.384.000	932.981.336.400	138,99%	932.279.904.097	701.432.303	0,08%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	TAHUN ANGGARAN 2017	%	TAHUN ANGGARAN 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6
421611	Pendapatan Setoran Bagian Pertambangan Panas Bumi	651.014.733.000	909.162.988.429	139,65%	903.585.832.397	5.577.156.032	0,62%
421612	Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Panas Bumi	20.240.651.000	22.320.119.055	110,27%	27.859.246.383	(5.539.127.328)	-19,88%
421613	Pendapatan Iuran Produksi/Royalty Pertambangan Panas Bumi	-	1.498.228.916	-	834.825.317	663.403.599	79,47%
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	41.000.000.000.000	43.904.217.111.673	107,08%	37.133.172.874.077	6.771.044.237.596	18,23%
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	41.000.000.000.000	43.904.217.111.673	107,08%	37.133.172.874.077	6.771.044.237.596	18,23%
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	10.521.740.830.000	12.460.928.189.608	118,43%	9.649.660.575.714	2.811.267.613.894	29,13%
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	10.521.740.830.000	12.460.928.189.608	118,43%	9.649.660.575.714	2.811.267.613.894	29,13%
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	30.478.259.170.000	31.443.288.922.065	103,17%	27.483.512.298.363	3.959.776.623.702	14,41%
422121	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	30.478.259.170.000	31.443.288.922.065	103,17%	27.483.512.298.363	3.959.776.623.702	14,41%
423	Pendapatan PNPB Lainnya	85.057.560.000.000	108.834.561.775.552	127,95%	117.995.377.742.599	(9.160.815.967.047)	-7,76%
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa	23.443.817.903.000	25.944.362.158.821	110,67%	20.883.325.092.349	5.060.862.986.630	24,23%
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	15.743.434.515.000	17.644.765.313.547	112,08%	13.919.028.745.067	3.725.736.568.480	26,77%
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	14.378.176.000	18.447.128.213	128,30%	22.753.358.204	(4.306.229.991)	-18,93%
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	37.184.404.000	63.292.431.730	170,21%	47.800.870.278	15.491.561.452	32,41%
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	14.859.110.620.000	16.856.247.876.611	113,44%	11.396.500.215.082	5.459.747.661.529	47,91%
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaa/Rampasan dan Harta Peninggalan	44.358.867.000	146.799.516.068	330,94%	120.592.280.978	26.207.235.090	21,73%
423115	Pendapatan Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya	-	-	-	13.561.000	(13.561.000)	-100,00%
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	54.333.578.000	102.755.561.086	189,12%	33.156.786.660	69.598.774.426	209,91%
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	16.885.000	1.635.891.000	9688,43%	648.977.020	986.913.980	152,07%
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni	702.967.810.000	404.568.064.997	57,55%	2.258.964.925.459	(1.854.396.860.462)	-82,09%
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	31.084.175.000	51.018.843.842	164,13%	38.597.770.386	12.421.073.456	32,18%
42312	Pendapatan Penjualan Aset	139.504.002.000	199.488.584.509	143,00%	141.430.367.495	58.058.217.014	41,05%
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	157.653.000	1.011.857.500	641,83%	8.476.218.457	(7.464.360.957)	-88,06%
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.980.887.000	22.369.347.651	1129,26%	10.467.276.544	11.902.071.107	113,71%
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli	7.280.121.000	17.481.104.672	240,12%	21.514.167.218	(4.033.062.546)	-18,75%
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/ Cina	-	2.857.517.700	-	402.254.000	2.455.263.700	610,38%
423125	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	-	114.500	-	500.000	(385.500)	-77,10%
423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-
423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	130.085.341.000	155.768.642.486	119,74%	100.569.951.276	55.198.691.210	54,89%
42313	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	4.545.502.000.000	6.984.000.504.254	153,65%	5.913.966.072.529	1.070.034.431.725	18,09%
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak	-	-	-	511.002	(511.002)	-100,00%
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	4.465.170.000.000	6.239.688.148.016	139,74%	4.524.608.733.157	1.715.079.414.859	37,91%
423133	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	-	4.580.305.448	-	600.907.936	3.979.397.512	662,23%
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	80.332.000.000	739.732.050.790	920,84%	1.388.755.920.434	(649.023.869.644)	-46,73%
42314	Pendapatan Sewa	3.015.377.386.000	505.472.586.764	23828,00%	343.438.059.926	162.034.526.838	47,18%
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.559.554.063.000	423.279.205.010	16,54%	283.714.501.406	139.564.703.604	49,19%
423142	Pendapatan Sewa Peralatan, dan Mesin	10.265.674.000	14.357.024.388	139,85%	10.737.033.056	3.619.991.332	33,72%
423143	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.000.000	2.365.920.600	23659,21%	778.278.158	1.587.642.442	203,99%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	TAHUN ANGGARAN 2017	%	TAHUN ANGGARAN 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6
423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	7.949.500.447	-	13.077.297.531	(5.127.797.084)	-39,21%
423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-	1.000	-	247.000.000	(246.999.000)	-100,00%
423146	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
423147	Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)	-	-	-	-	-	-
423148	Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)	-	-	-	-	-	-
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya	445.547.649.000	55.238.502.319	12,40%	34.883.949.775	20.354.552.544	58,35%
423154	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	-	2.282.433.000	-	-	2.282.433.000	-
42315	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Pe	-	610.635.169.747	-	565.461.847.332	44.999.242.573	7,96%
423151	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	-	207.282.595.250	-	518.202.680.200	(310.920.084.950)	-60,00%
423152	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	-	401.644.630.034	-	45.824.174.319	355.820.455.715	776,49%
423153	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	-	586.695.000	-	487.823.192	98.871.808	20,27%
423155	Pendapatan atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain	-	1.121.249.463	-	947.169.621	-	0,00%
4232	Pendapatan Jasa	43.846.068.487.000	52.689.223.733.141	120,17%	38.938.371.683.701	6.422.606.371.588	16,49%
42321	Pendapatan Jasa I	15.360.538.665.000	14.880.807.281.012	96,88%	13.159.015.916.590	1.484.470.623.295	11,28%
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	699.364.311.000	706.258.962.065	100,99%	131.193.115.471	575.065.846.594	438,34%
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)	3.823.477.000	15.889.100.893	415,57%	8.057.314.440	7.831.786.453	97,20%
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor	1.740.673.030.000	1.887.808.918.910	108,45%	1.960.290.944.853	(72.482.025.943)	-3,70%
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	1.937.925.040.000	2.576.964.484.894	132,98%	2.621.210.380.971	(44.245.896.077)	-1,69%
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	309.542.889.000	676.511.073.121	218,55%	501.481.586.557	175.029.486.564	34,90%
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi sesuai Dengan Tugas Dan f	2.595.597.826.000	1.729.039.879.031	66,61%	1.129.532.511.434	599.507.367.597	53,08%
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	730.844.400.000	796.259.570.822	108,95%	738.964.138.344	57.295.432.478	7,75%
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	5.136.950.177.000	4.173.205.256.034	81,24%	3.986.736.630.405	186.468.625.629	4,68%
423219	Pendapatan pelayanan pertanian	2.205.817.515.000	2.318.870.035.242	105,13%	2.081.549.294.115	-	0,00%
42322	Pendapatan Jasa II	1.504.363.031.000	1.502.158.243.284	99,85%	1.510.808.995.337	(8.650.752.053)	-0,57%
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	286.414.722.000	208.907.991.702	72,94%	233.572.361.147	(24.664.369.445)	-10,56%
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	958.035.492.000	1.018.510.242.815	106,31%	1.019.915.631.991	(1.405.389.176)	-0,14%
423223	Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin	-	-	-	3.919.015	(3.919.015)	-100,00%
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil	-	-	-	46.485.892	(46.485.892)	-100,00%
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	982.732.000	2.522.550.922	256,69%	3.487.519.698	(964.968.776)	-27,67%
423226	Pendapatan Uang Pwarganegaraan	3.506.250.000	4.121.800.000	117,56%	2.792.050.000	1.329.750.000	47,63%
423227	Pendapatan Bea Lelang	231.547.720.000	238.448.003.875	102,98%	203.012.516.479	35.435.487.396	17,45%
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	12.528.590.000	19.124.578.970	152,65%	27.785.312.781	(8.660.733.811)	-31,17%
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	11.347.525.000	10.523.075.000	92,73%	20.193.198.334	(9.670.123.334)	-47,89%
42323	Pendapatan Jasa Luar Negeri	545.656.253.000	743.766.318.732	136,31%	714.832.367.424	9.248.006.899	1,29%
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI	306.886.006.000	452.259.609.518	147,37%	482.121.219.646	(29.861.610.128)	-6,19%
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler	205.257.025.000	127.200.619.861	61,97%	88.751.308.106	38.449.311.755	43,32%
423233	Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri	-	61.336.779.510	-	41.650.835.101	-	0,00%
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri	33.513.222.000	102.969.309.843	307,25%	102.309.004.571	660.305.272	0,65%
42324	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	54.049.135.452	-	169.018.256.233	(114.969.120.781)	-68,02%
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	-	72.441.207	-	24.734.097	47.707.110	192,88%
423242	Pendapatan Jasa Bank dari Penerusan Pinjaman	-	6.473.966.920	-	109.058.456.952	(102.584.490.032)	-94,06%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	TAHUN ANGGARAN 2017	%	TAHUN ANGGARAN 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6
423243	Pendapatan Biaya Lain-lain Penerusan Pinjaman	-	47.502.727.325	-	59.935.065.184	(12.432.337.859)	-20,74%
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan U	2.950.000.000.000	5.041.464.684.573	170,90%	4.512.895.840.399	528.568.844.174	11,71%
423251	Pendapatan Atas Penertiban SP2D Dalam Rangka TSA	-	-	-	300.000	(300.000)	-100,00%
423252	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum	100.000.000.000	148.697.096.222	148,70%	68.728.806.768	79.968.289.454	116,35%
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	100.000.000.000	285.028.502.724	285,03%	258.151.870.578	26.876.632.146	10,41%
423254	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	2.750.000.000.000	4.607.739.085.627	167,55%	4.186.014.863.053	421.724.222.574	10,07%
423255	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	-	-	-	-	-	-
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian I	6.617.363.656.000	8.910.656.236.000	134,66%	3.662.803.290.000	4.142.930.736.000	113,11%
423261	Pendapatan Surat Ijin Mengemudi (SIM)	1.192.855.320.000	660.298.000.000	55,35%	1.112.593.735.000	(452.295.735.000)	-40,65%
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1.914.654.416.000	3.502.910.836.000	182,95%	1.010.729.900.000	2.492.180.936.000	246,57%
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	71.655.975.000	80.598.700.000	112,48%	55.503.575.000	25.095.125.000	45,21%
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)	2.109.885.450.000	2.317.695.905.000	109,85%	834.581.000.000	1.483.114.905.000	177,71%
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	1.292.888.320.000	1.211.267.435.000	93,69%	617.292.580.000	593.974.855.000	96,22%
423266	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi Melalui Simulator	32.417.450.000	29.639.150.000	91,43%	28.720.950.000	918.200.000	3,20%
423267	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak	3.006.725.000	3.324.000.000	110,55%	3.381.550.000	(57.550.000)	-1,70%
423268	Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	-	572.269.710.000	-	-	-	-
423269	Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	-	532.652.500.000	-	-	-	-
42327	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	15.908.218.973.000	19.651.741.073.263	123,53%	13.887.313.019.827	(4.921.446.351)	-0,04%
423271	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol Suramadu	-	116.200.792.942	-	121.122.239.293	(4.921.446.351)	-4,06%
423272	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	-	124.536.710.562	-	325.005.305	-	0,00%
423273	Pendapatan yang berasal dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan	2.956.334.465.000	2.850.730.691.399	96,43%	80.678.058.772	-	0,00%
423274	Pendapatan dari penggunaan spektrum dan frekuensi radio	12.951.884.508.000	16.560.272.878.360	127,86%	13.685.187.716.457	-	0,00%
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	356.549.980.000	634.622.492.530	177,99%	150.599.306.078	287.055.903.923	190,61%
423281	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	147.727.750.000	172.810.750.000	116,98%	70.415.150.000	102.395.600.000	145,42%
423282	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	208.822.230.000	264.844.460.000	126,83%	76.930.000.000	187.914.460.000	244,27%
423283	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Lapori Diri	-	-	-	10.000	(10.000)	-100,00%
423284	Pendapatan Penerbitan Karti Sidik Jari (Inafis Card)	-	-	-	21.595.000	(21.595.000)	-100,00%
423285	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-	3.232.551.077	(3.232.551.077)	-100,00%
423286	Pendapatan Pengamanan Obyek Vital	-	169.933.842.529	-	-	-	-
423287	Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	-	23.558.130.001	-	-	-	-
423289	Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya	-	3.475.310.000	-	1	-	0,00%
42329	Pendapatan Jasa Lainnya	603.377.929.000	1.269.958.268.295	210,47%	1.171.084.691.813	98.873.576.482	8,44%
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	573.079.529.000	1.056.369.784.876	184,33%	1.035.663.206.656	20.706.578.220	2,00%
423292	Pendapatan Bea Lelang oleh Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II	-	50.712.440.833	-	41.133.055.296	9.579.385.537	23,29%
423293	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	-	101.978.082.340	-	61.260.928.915	40.717.153.425	66,47%
423294	Pendapatan Jasa Siaran	30.247.400.000	53.714.415.124	177,58%	32.890.850.946	20.823.564.178	63,31%
423295	Pendapatan Jasa Non Siaran	51.000.000	7.183.545.122	14085,38%	136.650.000	7.046.895.122	5156,89%
4233	Pendapatan Bunga	2.708.020.737.000	7.721.059.157.306	285,12%	19.748.546.495.704	(11.182.196.442.398)	-56,62%
42331	Pendapatan Bunga	935.592.196.000	1.535.360.256.560	164,11%	3.335.889.331.241	(1.800.529.074.681)	-53,97%
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi	-	-	-	-	-	-
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	TAHUN ANGGARAN 2017	%	TAHUN ANGGARAN 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6
423313	Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	935.591.500.000	1.117.768.921.744	119,47%	2.847.898.843.852	(1.730.129.922.108)	-60,75%
423314	Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah	-	118.014.288.401	-	159.345.322.042	(41.331.033.641)	-25,94%
423315	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	-	299.075.698.586	-	328.511.943.464	(29.436.244.878)	-8,96%
423316	Pendapatan Komitmen Penerusan Pinjaman	-	-	-	-	-	-
423319	Pendapatan Bunga Lainnya	696.000	501.347.829	72032,73%	133.221.883	368.125.946	276,33%
42332	Pendapatan Gain On Bond Redemption	-	6.497.500.000	-	1.711.500.000	4.786.000.000	279,64%
423321	Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang	-	6.497.500.000	-	1.711.500.000	4.786.000.000	279,64%
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	1.702.873.247.000	6.110.092.446.400	358,81%	16.364.493.389.531	(9.409.110.047.131)	-57,50%
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	1.702.873.247.000	4.092.987.718.300	240,36%	13.502.097.765.431	(9.409.110.047.131)	-69,69%
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	-	-	-	-	-	-
423333	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam negeri/rupee	-	2.017.104.728.100	-	2.862.395.624.100	-	0,00%
42334	Pendapatan Fee Lainnya atas Surat Berharga Negara	-	-	-	-	-	-
423341	Pendapatan atas Transaksi Security Lending SUN	-	-	-	-	-	-
42336	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah	69.555.294.000	69.108.954.346	99,36%	46.452.274.932	22.656.679.414	48,77%
423361	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	69.555.294.000	69.108.954.346	99,36%	46.452.274.932	22.656.679.414	48,77%
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	272.162.012.000	769.795.544.007	282,84%	879.046.087.325	(109.250.543.318)	-12,43%
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	270.162.012.000	725.098.357.127	268,39%	507.155.662.112	217.942.695.015	42,97%
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	-	39.937.682	-	3.132.608.500	(3.092.670.818)	-98,73%
423412	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	165.970.000	362.775.000	218,58%	509.393.000	(146.618.000)	-28,78%
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1.068.978.000	1.045.013.200	97,76%	1.562.782.016	(517.768.816)	-33,13%
423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	150.629.366.000	561.353.321.860	372,67%	399.143.805.657	162.209.516.203	40,64%
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	17.422.404.000	25.854.627.187	148,40%	25.209.220.745	645.406.442	2,56%
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	90.000.000.000	47.324.463.717	52,58%	9.758.057.421	37.566.406.296	384,98%
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	-	566.487.997	-	119.360.005	447.127.992	374,60%
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	10.875.294.000	88.551.730.484	814,25%	67.720.434.768	20.831.295.716	30,76%
42342	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	2.000.000.000	44.697.186.880	2234,86%	371.890.425.213	(327.193.238.333)	-87,98%
423421	Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah Ditetapkan Pengadilan	1.000.000.000	1.723.459.987	172,35%	371.787.423.213	(370.063.963.226)	-99,54%
423422	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	1.000.000.000	42.973.726.893	4297,37%	103.002.000	42.870.724.893	41621,25%
4235	Pendapatan Pendidikan	4.036.005.391.000	4.484.816.582.419	111,12%	4.252.849.851.758	231.966.730.661	5,45%
42351	Pendapatan Pendidikan	4.036.005.391.000	4.484.816.582.419	111,12%	4.252.849.851.758	231.966.730.661	5,45%
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	3.645.249.166.000	3.956.797.554.032	108,55%	3.745.725.284.127	211.072.269.905	5,64%
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	87.966.533.000	116.818.727.398	132,80%	117.568.568.057	(749.840.659)	-0,64%
423513	Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek	9.896.612.000	18.015.651.525	182,04%	29.606.642.100	(11.590.990.575)	-39,15%
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	292.893.080.000	393.184.649.464	134,24%	359.949.357.474	33.235.291.990	9,23%
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	99.665.099.000	370.826.264.142	372,07%	1.541.228.998.988	(1.170.402.734.846)	-75,94%
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	99.665.099.000	370.826.264.142	372,07%	1.541.228.998.988	(1.170.402.734.846)	-75,94%
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan	29.230.757.000	94.500.382.533	323,29%	77.220.944.658	17.279.437.875	22,38%
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	3.400.000.000	4.501.256.489	132,39%	14.687.803.617	(10.186.547.128)	-69,35%
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan Penyelenggaraan Keuangan	-	1.000.000	-	628.207.366	(627.207.366)	-99,84%
423614	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan	66.974.342.000	249.676.794.437	372,79%	333.063.424.790	(83.386.630.353)	-25,04%
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	60.000.000	22.146.830.683	36911,38%	1.115.628.618.557	(1.093.481.787.874)	-98,01%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	TAHUN ANGGARAN 2017	%	TAHUN ANGGARAN 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6
4237	Pendapatan iuran dan Denda	1.266.832.103.000	2.075.968.889.141	163,87%	2.905.358.215.261	(822.608.763.337)	-28,31%
42371	Pendapatan iuran Badan Usaha	900.000.000.000	1.157.518.727.502	128,61%	1.083.188.204.940	74.330.522.562	6,86%
423711	Pendapatan iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM	664.746.718.000	862.796.192.354	129,79%	758.547.771.068	104.248.421.286	13,74%
423712	Pendapatan iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	235.253.282.000	294.722.535.148	125,28%	324.640.433.872	(29.917.898.724)	-9,22%
423713	Pendapatan iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-
42372	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	-	15.305.136.259	-	11.009.273.074	(1.873.926.452)	-17,02%
423721	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan	-	710.427.366	-	2.584.353.818	(1.873.926.452)	-72,51%
423722	Pendapatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup Melalui Pengadilan dan di Luar Peng	-	14.594.708.893	-	8.424.919.256	-	0,00%
42373	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	100.856.236.000	204.800.656.757	203,06%	194.855.773.227	9.944.883.530	5,10%
423731	Pendapatan iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan	10.061.141.000	25.498.378.834	253,43%	15.706.057.966	9.792.320.868	62,35%
423732	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)	240.000.000	1.321.330.000	550,55%	2.799.639.691	(1.478.309.691)	-52,80%
423733	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)	-	-	-	-	-	-
423734	Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB)	-	-	-	-	-	-
423735	Pungutan masuk Obyek Wisata Alam	89.087.880.000	157.160.542.682	176,41%	132.349.096.112	24.811.446.570	18,75%
423736	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)	1.410.415.000	795.372.405	56,39%	860.174.998	(64.802.593)	-7,53%
423737	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)	-	-	-	-	-	-
423738	Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan	-	19.791.592.836	-	42.976.109.460	(23.184.516.624)	-53,95%
423739	Pendapatan Pungutan Hasil Usaha Jasa Wisata Alam	56.800.000	233.440.000	410,99%	164.695.000	68.745.000	41,74%
42374	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan	-	-	-	-	-	-
423741	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan	-	-	-	-	-	-
42375	Pendapatan Denda I	265.974.767.000	691.910.795.944	260,14%	475.701.011.930	216.209.784.014	45,45%
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan	-	130.724.825.316	-	51.460.495.528	79.264.329.788	154,03%
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	259.974.767.000	447.302.680.840	172,06%	396.095.645.415	51.207.035.425	12,93%
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB	-	16.317.255	-	272.711.763	(256.394.508)	-94,02%
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal	-	267.273	-	4.963.819	(4.696.546)	-94,62%
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	6.000.000.000	112.024.713.544	1867,08%	22.330.616.682	89.694.096.862	401,66%
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	-	11.737.858	-	1.163.687	10.574.171	908,68%
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia	-	-	-	10.800.000	(10.800.000)	-100,00%
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	-	9.019.805	-	1.844.501	7.175.304	389,01%
423759	Pendapatan Denda Atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos	-	1.821.234.053	-	5.522.770.535	(3.701.536.482)	-67,02%
42376	Pendapatan Denda II	-	6.390.503.299	-	1.140.572.752.090	(1.121.231.896.371)	-98,30%
423761	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I	-	-	-	440.225	(440.225)	-100,00%
423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB	-	-	-	-	-	-
423763	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Penerimaan Pinjaman	-	21.354.797	-	1.123.130.353.705	(1.123.108.998.908)	-100,00%
423764	Pendapatan Denda Penyaluran Kredit Program	-	4.031.337.358	-	2.718.524.140	1.312.813.218	48,29%
423765	Denda Administrasi Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	-	123.631.250	-	-	123.631.250	-
423766	Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	-	483.288.294	-	42.190.000	441.098.294	1045,50%
423767	Pendapatan Denda atas Keterlamb	-	-	-	-	-	-
423769	Pendapatan Denda Lainnya	-	1.730.891.600	-	14.681.244.020	-	0,00%
42377	Pendapatan Izin Pemanfaatan Hutan	1.100.000	43.069.380	3915,40%	31.200.000	11.869.380	38,04%
423771	Pendapatan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	TAHUN ANGGARAN 2017	%	TAHUN ANGGARAN 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6
423772	Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi	-	69.380	-	-	69.380	
423773	Pendapatan Iuran Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam	1.100.000	43.000.000	3909,09%	31.200.000	11.800.000	37,82%
4239	Pendapatan Lain-Lain	9.384.988.268.000	14.778.509.446.575	157,47%	28.846.651.317.513	(15.768.244.923.140)	-54,66%
42391	Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	-	221.236.987.053	-	115.077.877.950	106.159.109.103	92,25%
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-	-	-	6.198.173	(6.198.173)	-100,00%
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	-	221.236.016.033	-	115.065.525.396	106.170.490.637	92,27%
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	-	971.020	-	4.043.009	(3.071.989)	-75,98%
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Pinjaman LN TAYL	-	-	-	-	-	
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	-	-	-	2.111.372	(2.111.372)	-100,00%
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL	-	-	-	-	-	
423917	Penerimaan Kembali Belanja Transfer ke Daerah TAYL	-	-	-	-	-	
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang	158.903.795.000	40.120.604.821	25,25%	76.941.917.572	(36.821.312.751)	-47,86%
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara	157.663.932.000	25.421.722.548	16,12%	48.471.660.951	(23.049.938.403)	-47,55%
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara(Masuk TP/TGR)	1.239.863.000	14.698.882.273	1185,52%	28.470.256.621	(13.771.374.348)	-48,37%
42393	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	1.452.252.303	-	1.042.396.862	409.855.441	39,32%
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	1.452.252.303	-	1.042.396.862	409.855.441	39,32%
42394	Pendapatan dari Selisih Kurs	100.021.516.000	23.239.529.318	23,23%	74.339.969.409	(51.100.440.091)	-68,74%
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUN	100.000.000.000	23.214.731.478	23,21%	74.223.321.218	(51.008.589.740)	-68,72%
423942	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI	21.516.000	24.797.840	115,25%	116.646.324	(91.848.484)	-78,74%
423943	Pendapatan dari Selisih Kurs yang Terealisasi	-	-	-	1.867	(1.867)	-100,00%
42395	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	6.174.867.840.000	12.377.609.709.560	231206762%	9.435.682.785.721	2.941.926.923.839	31,18%
423951	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	26.239.382.000	457.149.799.641	1742,23%	964.923.411.529	(507.773.611.888)	-52,62%
423952	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	4.548.910.000	843.192.718.010	18536,15%	975.039.341.494	(131.846.623.484)	-13,52%
423953	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	389.128.000	1.003.032.535.452	257764,16%	1.777.095.377.840	(774.062.842.388)	-43,56%
423954	Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran yang Lalu	1.957.000	1.631.000	83,34%	849.948.225	(848.317.225)	-99,81%
423955	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran yang Lalu	625.000	258.983.070.509	41437291,28%	735.590.340.447	(476.607.269.938)	-64,79%
423956	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran yang Lalu	686.843.000	28.819.974.494	4196,01%	16.652.221.550	12.167.752.944	73,07%
423957	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran yang Lalu	150.000.000	302.316.583.514	201544,39%	1.605.787.853.894	(1.303.471.270.380)	-81,17%
423958	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran yang Lalu	6.142.845.995.000	5.464.727.290	0,09%	21.764.476.654	(16.299.749.364)	-74,89%
423959	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran yang Lalu	5.000.000	9.464.280.214.429	189285604%	3.337.979.814.088	6.126.300.400.341	183,53%
423971	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	12.094.364.721	-	-	12.094.364.721	
423972	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan	-	1.405.586.100	-	-	1.405.586.100	
423973	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri	-	858.304.400	-	-	858.304.400	
423974	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara	-	10.200.000	-	-	10.200.000	
42396	Pendapatan Dalam Rangka Refund Dana PHLN	-	222.432.614.993	-	161.419.084.298	61.013.530.695	37,80%
423961	Pendapatan Dalam Rangka Refund Dana PHLN	-	-	-	1.120.947.115	(1.120.947.115)	-100,00%
423962	Pendapatan dari Retur SP2D	-	222.345.903.094	-	146.996.745.102	75.349.157.992	51,26%
423963	Pendapatan Surplus Pungutan Otoritas Jasa Keuangan	-	-	-	12.336.257.618	(12.336.257.618)	-100,00%
423964	Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	-	86.711.899	-	965.134.463	(878.422.564)	-91,02%
42399	Pendapatan Lain-Lain	2.951.195.117.000	1.892.417.748.527	247,16%	18.982.147.285.701	(18.789.832.589.376)	-98,99%
423991	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	12.639.302.000	16.823.574.332	133,11%	12.425.570.841	4.398.003.491	35,39%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	TAHUN ANGGARAN 2017	%	TAHUN ANGGARAN 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	-	98.074.018	-	180.936.766	(82.862.748)	-45,80%
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)	-	2.204.000	-	7.000.000	(4.796.000)	-68,51%
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah	-	-	-	-	-	-
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia	1.700.109.880.000	1.700.103.052.202	100,00%	18.155.945.768.978	(18.155.945.768.978)	-100,00%
423996	Pendapatan Jasa Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
423997	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari bank/pos Persepsi	-	-	-	1.327.316.846	(1.327.316.846)	-100,00%
423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak	-	1.277.285.335	-	105.719.609	1.171.565.726	1108,18%
423999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	1.238.445.935.000	174.113.558.640	14,06%	812.154.972.661	(638.041.414.021)	-78,56%
498111	Suspense Pendapatan	-	-	-	-	-	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-	-	-
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-	-	-
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-	-	-
425994	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi	-	-	-	-	-	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	-	-	-	-	-
424	Pendapatan Badan Layanan Umum	38.541.440.190.000	47.345.432.555.948	122,84%	41.945.888.535.965	5.399.544.019.983	12,87%
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	37.013.226.935.000	44.250.619.466.173	119,55%	39.467.926.580.136	4.558.540.260.557	11,55%
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	22.776.997.128.000	25.499.135.736.497	111,95%	23.784.221.372.618	1.714.914.363.879	7,21%
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	11.990.913.607.000	12.514.890.768.413	104,37%	10.486.606.055.433	2.028.284.712.980	19,34%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	7.235.780.619.000	9.342.558.845.242	129,12%	9.840.473.609.903	(497.914.764.661)	-5,06%
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	454.173.048.000	374.488.613.094	82,46%	301.586.952.420	72.901.660.674	24,17%
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	1.296.375.000	997.359.907	76,93%	1.385.949.601	(388.589.694)	-28,04%
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	139.509.609.000	205.551.198.212	147,34%	24.137.295.214	181.413.902.998	751,59%
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	2.329.409.056.000	2.469.169.897.608	106,00%	2.616.942.421.561	(147.772.523.953)	-5,65%
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	1.775.030.000	521.558.428	29,38%	1.081.909.392	(560.350.964)	-51,79%
424118	Pendapatan Penyediaan Barang	-	578.022.735	-	581.529.995	(3.507.260)	-0,60%
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	624.139.784.000	590.379.472.858	94,59%	511.425.649.099	78.953.823.759	15,44%
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	1.392.105.238.000	1.173.415.343.107	84,29%	1.141.669.018.989	31.746.324.118	2,78%
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1.158.197.829.000	976.117.914.519	84,28%	941.678.062.765	34.439.851.754	3,66%
424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu	-	-	-	-	-	-
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	-	870.631.200	-	1.302.175.263	(431.544.063)	-33,14%
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	233.907.409.000	196.426.797.388	83,98%	198.688.780.961	(2.261.983.573)	-1,14%
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	12.802.245.904.000	17.327.970.928.406	135,35%	14.516.091.355.846	2.811.879.572.560	19,37%
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan	-	-	-	-	-	-
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah	-	-	-	-	-	-
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	2.449.000.000	7.192.215.956	293,68%	7.410.095.729	(217.879.773)	-2,94%
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	304.703.600.000	454.883.174.310	149,29%	732.123.476.187	(277.240.301.877)	-37,87%
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	24.053.400.000	26.685.223.399	110,94%	32.082.577.721	(5.397.354.322)	-16,82%
424136	Pendapatan Investasi	-	754.207.224.761	-	627.140.437.869	127.066.786.892	20,26%
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa	10.663.291.000.000	14.277.243.703.515	133,89%	11.687.489.149.029	2.589.754.554.486	22,16%
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	1.807.748.904.000	1.807.759.386.465	100,00%	1.429.845.619.311	377.913.767.154	26,43%
42414	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	41.878.665.000	250.097.458.163	597,20%	25.944.832.683	-	0,00%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	TAHUN ANGGARAN 2017	%	TAHUN ANGGARAN 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6
424141	Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	41.878.665.000	250.097.458.163	597,20%	25.944.832.683		0,00%
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	14.862.182.000	174.211.852.608	1172,18%	64.919.719.731	109.292.132.877	168,35%
42421	Pendapatan Hibah Terkait	1.495.000.000	150.380.967.979	10058,93%	60.490.807.688	89.890.160.291	148,60%
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan	550.000.000	508.500.000	92,45%	18.158.465.000	(17.649.965.000)	-97,20%
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	700.000.000	10.803.345.551	1543,34%	12.793.989.555	(1.990.644.004)	-15,56%
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda	245.000.000	137.175.876.053	55990,15%	29.538.353.133	107.637.522.920	364,40%
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan	-	-	-	-	-	-
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-	-	-
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara	-	1.893.246.375	-	-	1.893.246.375	-
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya	-	-	-	-	-	-
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat	13.367.182.000	23.830.884.629	178,28%	4.428.912.043	19.401.972.586	438,08%
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan	10.630.705.000	23.029.134.629	216,63%	2.277.830.000	20.751.304.629	911,01%
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	1.736.477.000	801.750.000	46,17%	-	801.750.000	-
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda	1.000.000.000	-	0,00%	1.754.812.043	(1.754.812.043)	-100,00%
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan	-	-	-	-	-	-
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	396.270.000	(396.270.000)	-100,00%
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara	-	-	-	-	-	-
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya	-	-	-	-	-	-
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	474.748.594.000	578.904.594.476	121,94%	852.858.957.288	(273.954.362.812)	-32,12%
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	474.748.594.000	578.904.594.476	1	852.858.957.288	(273.954.362.812)	-32,12%
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	80.465.616.000	63.202.955.819	1	74.207.870.602	(11.004.914.783)	-14,83%
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	350.094.458.000	441.892.939.535	126,22%	649.127.725.205	(207.234.785.670)	-31,93%
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	44.188.520.000	73.808.699.122	167,03%	129.523.361.481	(55.714.662.359)	-43,02%
4249	Pendapatan BLU Lainnya	1.038.602.479.000	2.341.696.642.691	225,47%	1.560.183.278.810	780.837.882.569	50,05%
42491	Pendapatan BLU Lainnya	1.038.602.479.000	2.341.696.642.691	222,53%	1.560.183.278.810	780.837.882.569	50,05%
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	1.038.538.828.000	2.311.074.174.733	222,53%	1.560.183.278.810	750.890.895.923	48,13%
424912	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU yang dibatasi pengelolaannya	63.651.000					
424913	Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	-	143.730.000				
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	531.751.312				
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	-	145.263.871	-	-	145.263.871	
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	-	21.563.050.330	-	-	21.563.050.330	
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	-	370.024.000	-	-	370.024.000	
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	-	838.244.772	-	-	838.244.772	
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	-	6.789.074.673	-	-	6.789.074.673	
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	-	187.076.000	-	-	187.076.000	
424925	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	-	48.653.000	-	-	48.653.000	
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	-	300.000	-	-	300.000	
424939	Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	-	5.300.000	-	-	5.300.000	
43	Penerimaan Hibah	3.108.138.887.000	11.629.815.002.490	374,17%	8.987.666.279.302	2.642.148.723.188	29,40%
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	3.108.138.887.000	11.629.815.002.490	374,17%	8.987.666.279.302	2.642.148.723.188	29,40%
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	7.410.435.627.384	-	5.741.938.962.115	1.668.496.665.269	29,06%

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2017 DAN TAHUN 2016
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	TAHUN ANGGARAN 2017	%	TAHUN ANGGARAN 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7 / 6
43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana		-	-	-	-	
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Perorangan	-	-	-	-	-	
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Lembaga/Badan Usaha	-	-	-	-	-	
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Lainnya	-	-	-	-	-	
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga		-	-	-	-	
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Barang	-	-	-	-	-	
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Jasa	-	-	-	-	-	
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Surat Berharga	-	-	-	-	-	
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung Bentuk Uang	-	7.410.435.627.384	-	5.741.938.962.115	1.668.496.665.269	29,06%
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Perorangan	-	228.975.340.000	-	53.083.138.755	175.892.201.245	331,35%
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Lembaga/Badan Usaha	-	137.817.215.944	-	158.452.526.546	(20.635.310.602)	-13,02%
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Pemerintah Daerah	-	7.043.656.235.321	-	5.515.579.169.314	1.528.077.066.007	27,70%
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang-Lainnya	-	(13.163.881)	-	14.824.127.500	(14.837.291.381)	-100,09%
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	3.108.138.887.000	4.219.379.375.106	135,75%	3.245.727.317.187	973.652.057.919	30,00%
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana	-	530.076.024.609	-	1.226.991.075.038	(696.915.050.429)	-56,80%
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Perorangan	-	-	-	-	-	
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Bilateral	-	234.472.316.950	-	361.889.435.027	(127.417.118.077)	-35,21%
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Multilateral	-	295.603.707.659	-	865.101.640.011	(569.497.932.352)	-65,83%
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Lainnya	-	-	-	-	-	
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga		-	-	-	-	
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Barang	-	-	-	-	-	
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Jasa	-	-	-	-	-	
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Surat Berharga	-	-	-	-	-	
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang	3.108.138.887.000	3.689.303.350.497	118,70%	2.018.736.242.149	1.670.567.108.348	82,75%
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung --Langsung Bentuk Uang Perorangan	-	-	-	104.639.542	(104.639.542)	-100,00%
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Bilateral	3.108.138.887.000	2.994.461.088.630	96,34%	1.265.014.158.159	1.729.446.930.471	136,71%
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Multilateral	-	652.784.794.782	-	707.053.067.964	(54.268.273.182)	-7,68%
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri -Langsung Bentuk Uang Lainnya	-	42.057.467.085	-	46.564.376.484	(4.506.909.399)	-9,68%
Jumlah Penerimaan		1.736.060.149.915.000	1.666.375.912.658.085	96%	1.555.934.150.832.790	110.441.761.825.295	7,10%

**REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
I. BUMN		41.090.610.752.005
PERBANKAN		12.423.655.293.868
1	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.000.476.958.000
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.727.772.580.000
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.381.137.091.389
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	314.268.664.479
NON PERBANKAN		28.666.955.458.137
1	PT Pertamina (Persero)	11.603.431.000.000
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	6.056.439.231.454
3	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2.150.836.000.000
4	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1.070.874.000.000
5	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.038.163.533.677
6	PT Jasa Raharja (Persero)	711.990.228.205
7	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	922.586.000.000
8	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	427.704.677.113
9	PT Pegadaian (Persero)	660.000.000.000
10	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	396.755.671.917
11	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	453.438.000.000
12	Perum Jaminan Kredit Indonesia	48.000.000.000
13	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	63.000.000.000
14	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	90.000.000.000
15	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	311.198.916.450
16	PT Angkasa Pura II (Persero)	330.000.000.000
17	PT Angkasa Pura I (Persero)	140.000.000.000
18	PT Biofarma (Persero)	150.313.000.000
19	PT Timah (Persero) Tbk	49.107.194.800
20	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	97.661.700.000
21	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	220.081.000.000
22	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	197.587.276.005
23	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	339.455.238.981
24	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	171.793.000.000
25	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	49.380.750.000
26	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	156.575.528.878
27	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	31.069.508.550
28	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	48.150.000.000
29	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	47.958.005.533
30	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	20.232.593.770
31	Perum Jasa Tirta II	8.532.282.000
32	PT Hutama Karya (Persero)	60.240.372.626

**REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
33	Perum Jasa Tirta I	6.033.963.000
34	PT Sucofindo (Persero)	14.000.000.000
35	PT Brantas Abipraya (Persero)	35.415.830.352
36	PT Surveyor Indonesia (Persero)	8.000.000.000
37	PT Dahana (Persero)	4.763.000.000
38	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	8.067.690.673
39	PT Bhandha Ghara Rekha (Persero)	6.277.130.504
40	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	2.171.781.894
41	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	5.434.073.825
42	PT Kawasan Industri Makassar	812.767.939
43	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	267.809.979.720
44	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	290.214.293
45	Perum Pembangunan Perumahan Nasional	19.116.229.659
46	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	6.000.000.000
47	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	19.089.000.000
48	Perum Damri	4.247.272.065
49	PT Pos Indonesia	28.572.068.683
50	PT TWC Borobudur	7.477.329.203
51	Perum Peruri	40.044.928.784
52	PT ASDP Indonesia Ferry	58.353.000.000
53	PT Yodya Karya	2.424.487.584
II. NON BUMN (MINORITAS)		1.619.181.201.072
PERBANKAN		37.272.895.740
1	PT Bank Bukopin	37.272.895.740
NON PERBANKAN		1.581.908.305.332
1	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	11.010.621.272
2	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	17.408.739.777
3	PT Socfin Indonesia	84.244.397.750
4	PT Indosat	55.280.167.500
5	PT Perkebunan Nusantara XII (minoritas)	1.035.247.284
6	PT Perkebunan Nusantara XI (minoritas)	5.844.351.637
7	PT Perkebunan Nusantara VI (minoritas)	290.269.540
8	PT Perkebunan Nusantara V (minoritas)	1.270.196.736
9	PT Perkebunan Nusantara IV (minoritas)	16.716.053.047
10	PT Freeport Indonesia	1.386.812.328.000
11	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	1.995.932.789

**REALISASI PENERIMAAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017**

(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
III. PEMBAYARAN PIUTANG		12.280.000.000
1	PT Perkebunan Nusantara II	1.000.000.000
2	PT Inhutani I	800.000.000
3	PT Inhutani V	240.000.000
4	PT Balai Pustaka	120.000.000
5	Perum Perumnas	-
6	PT Bina Karya	120.000.000
7	PT Industri Sandang Nusantara	10.000.000.000
IV. BUMN DI BAWAH KEMENTERIAN KEUANGAN		789.075.158.596
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	242.560.672.460
2	PT Sarana Multigriya Finansial	63.500.000.000
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100.650.000.000
4	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	382.364.486.136
V. PEMBAYARAN DIVIDEN INTERIM		393.070.000.000
1	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	171.430.000.000
2	PT ASDP Indonesia Ferry	85.640.000.000
3	PT Angkasa Pura II (Persero)	100.000.000.000
4	PT Garam (Persero)	27.000.000.000
5	Perum Perumnas	9.000.000.000
JUMLAH TOTAL (I+II+III+IV+V)		43.904.217.111.673

2. LRA BELANJA

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	(dalam rupiah)
						REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	902.803.014.000	826.118.231.605	11.646.021.845	814.472.209.760	(88.330.804.240)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	147.252.084.000	129.841.228.704	120.325.050	129.720.903.654	(17.531.180.346)
02	MAJELIS	755.550.930.000	696.277.002.901	11.525.696.795	684.751.306.106	(70.799.623.894)
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4.761.562.620.000	4.271.903.601.412	85.733.659.261	4.186.169.942.151	(575.392.677.849)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.076.710.426.000	1.009.927.430.965	5.039.791.898	1.004.887.639.067	(71.822.786.933)
02	DEWAN	3.684.852.194.000	3.261.976.170.447	80.693.867.363	3.181.282.303.084	(503.569.890.916)
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.768.213.049.000	2.693.069.727.673	22.511.581.557	2.670.558.146.116	(97.654.902.884)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.060.995.283.000	2.012.376.911.138	11.967.417.749	2.000.409.493.389	(60.585.789.611)
02	B.P.K. PUSAT	707.217.766.000	680.692.816.535	10.544.163.808	670.148.652.727	(37.069.113.273)
005	MAHKAMAH AGUNG	8.181.335.295.000	7.937.038.356.415	5.135.284.837	7.931.903.071.578	(249.432.223.422)
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	7.697.608.245.000	7.472.526.760.949	3.129.429.298	7.469.397.331.651	(228.210.913.349)
02	KEPANITERAAN	157.270.100.000	155.867.193.346	162.544.187	155.704.649.159	(1.565.450.841)
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	110.368.121.000	104.343.991.106	499.044.291	103.844.946.815	(6.523.174.185)
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	66.643.906.000	65.922.176.182	203.316.211	65.718.859.971	(925.046.029)
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	21.210.123.000	20.695.875.940	23.684.759	20.672.191.181	(537.931.819)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN P	96.834.800.000	86.298.643.939	1.097.363.793	85.201.280.146	(11.633.519.854)
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	31.400.000.000	31.383.714.953	19.902.298	31.363.812.655	(36.187.345)
006	KEJAKSAAN RI	5.495.893.950.000	5.219.229.233.190	4.775.332.381	5.214.453.900.809	(281.440.049.191)
01	KEJAKSAAN RI	5.495.893.950.000	5.219.229.233.190	4.775.332.381	5.214.453.900.809	(281.440.049.191)
007	SEKRETARIAT NEGARA	1.734.576.841.000	1.878.461.563.716	2.560.279.925	1.875.901.283.791	141.324.442.791
01	SEKRETARIAT NEGARA	959.566.605.000	1.036.074.296.185	1.402.637.364	1.034.671.658.821	75.105.053.821
03	SEKRETARIAT KEPRESIDENAN	347.896.649.000	414.619.545.627	175.818.501	414.443.727.126	66.547.078.126
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	125.088.835.000	156.642.905.211	-	156.642.905.211	31.554.070.211
05	SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN	29.250.000.000	28.387.161.479	318.246.458	28.068.915.021	(1.181.084.979)
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	44.090.846.000	47.100.227.575	-	47.100.227.575	3.009.381.575
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	34.800.000.000	33.010.857.404	50.146.350	32.960.711.054	(1.839.288.946)
09	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	73.035.906.000	73.770.345.131	518.116.582	73.252.228.549	216.322.549
10	KANTOR STAF PRESIDEN	120.848.000.000	88.856.225.104	95.314.670	88.760.910.434	(32.087.089.566)
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.213.976.075.000	2.698.262.893.849	17.881.139.830	2.680.381.754.019	(533.594.320.981)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	912.461.186.000	857.386.272.476	3.766.760.301	853.619.512.175	(58.841.673.825)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	69.581.254.000	58.120.376.482	1.953.347.017	56.167.029.465	(13.414.224.535)
03	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	159.635.402.000	147.177.128.476	284.967.831	146.892.160.645	(12.743.241.355)
04	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM	195.998.552.000	170.859.392.149	882.448.169	169.976.943.980	(26.021.608.020)
05	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	221.660.249.000	190.966.755.259	2.396.547.044	188.570.208.215	(33.090.040.785)
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	192.278.094.000	183.433.119.573	2.161.258.085	181.271.861.488	(11.006.232.512)
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	131.043.653.000	109.073.352.522	1.588.301.612	107.485.050.910	(23.558.602.090)
08	DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	969.074.593.000	675.903.361.023	1.791.896.636	674.111.464.387	(294.963.128.613)
09	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	87.371.958.000	72.303.752.573	1.250.513.273	71.053.239.300	(16.318.718.700)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	54.270.070.000	47.890.844.765	633.581.492	47.257.263.273	(7.012.806.727)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	220.601.064.000	185.148.538.551	1.171.518.370	183.977.020.181	(36.624.043.819)
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.167.954.604.000	6.685.823.685.332	5.582.056.148	6.680.241.629.184	(487.712.974.816)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2017**

(dalam rupiah)						
KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.052.020.737.000	5.477.265.753.840	3.607.401.382	5.473.658.352.458	(578.362.384.542)
02	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	82.525.036.000	78.330.420.252	359.369.852	77.971.050.400	(4.553.985.600)
03	DITJEN AMERIKA DAN EROPA	46.524.509.000	45.173.998.210	40.944.815	45.133.053.395	(1.391.455.605)
04	DITJEN KERJASAMA ASEAN	58.685.315.000	57.096.439.419	237.860.905	56.858.578.514	(1.826.736.486)
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	618.349.292.000	733.801.718.856	201.232.822	733.600.486.034	115.251.194.034
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	92.094.148.000	84.873.312.816	158.622.912	84.714.689.904	(7.379.458.096)
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	40.161.454.000	38.855.203.467	171.465.597	38.683.737.870	(1.477.716.130)
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	117.874.291.000	112.835.637.410	737.010.574	112.098.626.836	(5.775.664.164)
09	INSPEKTORAT JENDERAL	32.637.961.000	29.532.034.121	26.756.869	29.505.277.252	(3.132.683.748)
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	27.081.861.000	28.059.166.941	41.390.420	28.017.776.521	935.915.521
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	114.823.194.623.000	117.407.263.808.873	107.622.800.892	117.299.641.007.981	2.476.446.384.981
01	KEMENTERIAN PERTAHANAN	22.834.813.118.000	17.812.059.650.248	20.221.595.025	17.791.838.055.223	(5.042.975.062.777)
21	MARKAS BESAR TNI	10.044.784.184.000	10.753.673.128.598	14.346.414.754	10.739.326.713.844	694.542.529.844
22	MARKAS BESAR TNI AD	47.836.131.191.000	49.522.204.788.317	50.816.530.959	49.471.388.257.358	1.635.257.066.358
23	MARKAS BESAR TNI AL	18.612.967.779.000	21.927.216.573.078	2.567.752.938	21.924.648.820.140	3.311.681.041.140
24	MARKAS BESAR TNI AU	15.494.498.351.000	17.392.109.668.632	19.670.507.216	17.372.439.161.416	1.877.940.810.416
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	11.208.889.548.000	10.438.721.047.405	20.694.703.553	10.418.026.343.852	(790.863.204.148)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.510.979.972.000	2.919.875.100.701	847.459.000	2.919.027.641.701	408.047.669.701
02	INSPEKTORAT JENDERAL	31.677.286.000	29.446.615.284	331.191.890	29.115.423.394	(2.561.862.606)
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	649.864.932.000	587.602.251.370	7.981.950.477	579.620.300.893	(70.244.631.107)
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	5.427.426.968.000	4.474.120.313.202	1.633.374.137	4.472.486.939.065	(954.940.028.935)
06	DITJEN IMIGRASI	2.116.872.255.000	1.975.750.960.256	7.777.476.842	1.967.973.483.414	(148.898.771.586)
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	174.154.874.000	165.062.844.990	1.256.947.274	163.805.897.716	(10.348.976.284)
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	40.610.135.000	40.083.907.931	45.434.783	40.038.473.148	(571.661.852)
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	35.812.229.000	34.903.196.991	34.183.636	34.869.013.355	(943.215.645)
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	90.873.346.000	85.863.983.126	91.176.522	85.772.806.604	(5.100.539.396)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANAN HAM	29.671.407.000	28.544.165.730	20.719.672	28.523.446.058	(1.147.960.942)
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	100.946.144.000	97.467.707.824	674.789.320	96.792.918.504	(4.153.225.496)
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	40.541.464.301.000	40.415.365.086.602	30.461.459.696	40.384.903.626.906	(156.560.674.094)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	16.649.924.913.000	16.641.727.568.340	16.869.411.980	16.624.858.156.360	(25.066.756.640)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	109.379.037.000	94.693.949.058	245.292.389	94.448.656.669	(14.930.380.331)
03	DITJEN ANGGARAN	154.381.351.000	128.455.863.013	642.042.165	127.813.820.848	(26.567.530.152)
04	DITJEN PAJAK	6.518.655.742.000	6.237.827.920.553	3.363.726.102	6.234.464.194.451	(284.191.547.549)
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	3.156.591.327.000	3.214.338.143.244	1.559.900.155	3.212.778.243.089	56.186.916.089
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	129.015.096.000	110.401.496.729	520.412.551	109.881.084.178	(19.134.011.822)
07	DITJEN PENGELOLAAN UTANG	120.852.921.000	106.485.916.967	817.155.557	105.668.761.410	(15.184.159.590)
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	12.160.802.760.000	12.422.053.640.884	2.173.074.354	12.419.880.566.530	259.077.806.530
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	677.601.382.000	674.071.459.477	1.235.967.932	672.835.491.545	(4.765.890.455)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	709.927.739.000	653.064.360.055	2.939.228.115	650.125.131.940	(59.802.607.060)
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	154.332.033.000	132.244.768.282	95.248.396	132.149.519.886	(22.182.513.114)
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	24.146.411.929.000	21.947.203.428.052	36.645.574.068	21.910.557.853.984	(2.235.854.075.016)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	(dalam rupiah)
						REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.460.297.169.000	1.384.400.691.196	3.168.489.884	1.381.232.201.312	(79.064.967.688)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	92.439.375.000	86.876.546.076	1.155.657.961	85.720.888.115	(6.718.486.885)
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	7.162.403.488.000	6.375.827.935.827	9.832.254.269	6.365.995.681.558	(796.407.806.442)
04	DITJEN HOLTIKULTURA	1.443.187.209.000	1.211.692.342.253	182.325.853	1.211.510.016.400	(231.677.192.600)
05	DITJEN PERKEBUNAN	1.148.531.631.000	945.088.688.443	175.865.104	944.912.823.339	(203.618.807.661)
06	DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.876.515.022.000	1.668.598.146.726	4.113.228.740	1.664.484.917.986	(212.030.104.014)
08	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	6.926.098.850.000	6.368.703.298.985	6.426.273.518	6.362.277.025.467	(563.821.824.533)
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	1.640.727.753.000	1.558.756.151.555	1.702.373.442	1.557.053.778.113	(83.673.974.887)
10	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDA PERTANIAN	1.204.044.524.000	1.118.213.693.154	2.940.674.613	1.115.273.018.541	(88.771.505.459)
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	451.885.901.000	438.313.729.103	6.221.767.835	432.091.961.268	(19.793.939.732)
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	740.281.007.000	790.732.204.734	726.662.849	790.005.541.885	49.724.534.885
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.601.371.152.000	2.436.389.062.523	4.299.472.673	2.432.089.589.850	(169.281.562.150)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	984.230.198.000	929.240.993.868	2.673.576.126	926.567.417.742	(57.662.780.258)
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	171.211.050.000	164.389.647.947	98.675.472	164.290.972.475	(6.920.077.525)
03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR	117.386.833.000	109.226.102.563	49.051.202	109.177.051.361	(8.209.781.639)
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	119.549.089.000	99.211.367.868	34.779.650	99.176.588.218	(20.372.500.782)
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	305.424.611.000	290.045.721.480	277.362.299	289.768.359.181	(15.656.251.819)
06	INSPEKTORAT JENDERAL	38.435.964.000	36.448.515.687	162.915.918	36.285.599.769	(2.150.364.231)
07	BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI	561.342.643.000	525.007.816.937	742.297.583	524.265.519.354	(37.077.123.646)
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	259.104.577.000	243.484.790.448	213.892.467	243.270.897.981	(15.833.679.019)
09	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL	44.686.187.000	39.334.105.725	46.921.956	39.287.183.769	(5.399.003.231)
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.566.958.112.000	4.930.001.796.224	12.108.878.250	4.917.892.917.974	(1.649.065.194.026)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	398.922.429.000	370.524.399.408	1.454.868.239	369.069.531.169	(29.852.897.831)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	79.690.724.000	73.504.163.434	717.437.773	72.786.725.661	(6.903.998.339)
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	2.221.504.736.000	1.323.444.541.492	107.001.900	1.323.337.539.592	(898.167.196.408)
05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	160.714.252.000	147.111.177.871	419.787.899	146.691.389.972	(14.022.862.028)
06	DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	322.785.258.000	301.228.741.798	1.286.184.605	299.942.557.193	(22.842.700.807)
07	DEWAN ENERGI NASIONAL	63.911.144.000	58.874.462.305	96.248.759	58.778.213.546	(5.132.930.454)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	555.502.941.000	496.614.357.681	1.150.701.572	495.463.656.109	(60.039.284.891)
12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	513.062.754.000	468.862.771.974	802.288.585	468.060.483.389	(45.002.270.611)
13	BADAN GEOLOGI	748.066.390.000	666.879.614.509	3.782.125.705	663.097.488.804	(84.968.901.196)
14	BPH MIGAS	206.900.236.000	155.554.850.398	2.125.512.508	153.429.337.890	(53.470.898.110)
15	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	1.295.897.248.000	867.402.715.354	166.720.705	867.235.994.649	(428.661.253.351)
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	44.641.902.142.000	41.465.104.701.860	59.587.336.231	41.405.517.365.629	(3.236.384.776.371)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	536.027.315.000	488.610.549.783	1.189.946.545	487.420.603.238	(48.606.711.762)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	90.310.512.000	83.311.038.967	235.881.170	83.075.157.797	(7.235.354.203)
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	4.001.669.726.000	3.471.326.018.300	2.665.115.492	3.468.660.902.808	(533.008.823.192)
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	11.162.267.615.000	10.125.447.243.215	6.761.276.477	10.118.685.966.738	(1.043.581.648.262)
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	8.823.242.335.000	7.787.196.363.685	38.669.054.927	7.748.527.308.758	(1.074.715.026.242)
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	15.604.561.318.000	15.489.036.893.834	1.640.785.957	15.487.396.107.877	(117.165.210.123)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	116.194.498.000	97.928.929.003	791.024.242	97.137.904.761	(19.056.593.239)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	(dalam rupiah)
						REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN	4.187.184.823.000	3.810.856.220.815	7.545.446.934	3.803.310.773.881	(383.874.049.119)
13	BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK	120.444.000.000	111.391.444.258	88.804.487	111.302.639.771	(9.141.360.229)
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	37.965.097.991.000	37.074.139.512.650	208.698.827.985	36.865.440.684.665	(1.099.657.306.335)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.729.130.891.000	1.640.471.345.461	8.788.374.967	1.631.682.970.494	(97.447.920.506)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	188.237.861.000	175.831.974.526	9.965.905.344	165.866.069.182	(22.371.791.818)
03	DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	21.966.319.454.000	21.539.822.683.889	72.802.348.468	21.467.020.335.421	(499.299.118.579)
05	DITJEN PAUD-DIKMAS	1.721.635.709.000	1.604.803.253.515	21.547.730.721	1.583.255.522.794	(138.380.186.206)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD	1.022.526.101.000	942.918.053.097	9.992.138.371	932.925.914.726	(89.600.186.274)
13	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	372.715.582.000	346.793.786.183	6.073.305.189	340.720.480.994	(31.995.101.006)
15	DITJEN KEBUDAYAAN	1.717.986.563.000	1.572.064.381.965	7.711.959.657	1.564.352.422.308	(153.634.140.692)
16	DITJEN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	9.246.545.830.000	9.251.434.034.014	71.817.065.258	9.179.616.968.746	(66.928.861.254)
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	55.863.552.638.000	55.360.660.925.557	448.379.419.650	54.912.281.505.907	(951.271.132.093)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	28.938.745.166.000	27.109.921.194.140	8.827.559.076	27.101.093.635.064	(1.837.651.530.936)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	96.356.716.000	92.899.502.300	1.638.708.319	91.260.793.981	(5.095.922.019)
03	DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.661.135.451.000	1.588.726.618.524	5.134.235.896	1.583.592.382.628	(77.543.068.372)
04	DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN	14.628.279.316.000	15.588.484.324.960	355.444.922.038	15.233.039.402.922	604.760.086.922
05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	2.413.700.021.000	2.914.132.562.810	16.771.255.068	2.897.361.307.742	483.661.286.742
07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	2.939.266.372.000	3.341.457.910.393	4.339.460.795	3.337.118.449.598	397.852.077.598
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	735.363.403.000	656.019.647.066	18.501.508.227	637.518.138.839	(97.845.264.161)
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	4.450.706.193.000	4.069.019.165.364	37.721.770.231	4.031.297.395.133	(419.408.797.867)
025	KEMENTERIAN AGAMA	63.486.855.936.000	60.303.779.524.836	124.223.205.840	60.179.556.318.996	(3.307.299.617.004)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.434.520.425.000	2.026.729.853.304	5.165.962.792	2.021.563.890.512	(412.956.534.488)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	126.126.912.000	125.418.836.914	1.176.751.802	124.242.085.112	(1.884.826.888)
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	5.090.917.736.000	4.847.548.682.789	9.355.379.091	4.838.193.303.698	(252.724.432.302)
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	50.229.478.414.000	48.483.622.003.156	83.293.965.175	48.400.328.037.981	(1.829.150.376.019)
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	1.882.571.258.000	1.602.405.602.507	7.239.411.509	1.595.166.190.998	(287.405.067.002)
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATHOLIK	948.722.422.000	803.898.476.002	3.872.539.166	800.025.936.836	(148.696.485.164)
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	792.145.005.000	628.694.134.761	2.555.054.790	626.139.079.971	(166.005.925.029)
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	266.009.491.000	234.314.308.378	2.609.570.433	231.704.737.945	(34.304.753.055)
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	1.133.284.292.000	1.027.608.011.306	3.528.286.412	1.024.079.724.894	(109.204.567.106)
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	583.079.981.000	523.539.615.719	5.426.284.670	518.113.331.049	(64.966.649.951)
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.231.964.028.000	2.981.496.382.986	10.645.314.731	2.970.851.068.255	(261.112.959.745)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	248.489.986.000	220.928.507.794	211.227.109	220.717.280.685	(27.772.705.315)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	57.197.436.000	51.808.068.252	838.280.187	50.969.788.065	(6.227.647.935)
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	673.405.938.000	598.011.236.998	5.248.120.421	592.763.116.577	(80.642.821.423)
05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	200.190.326.000	186.296.717.902	2.070.241.086	184.226.476.816	(15.963.849.184)
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	284.540.175.000	263.343.849.552	393.681.072	262.950.168.480	(21.590.006.520)
11	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI	96.458.091.000	90.873.745.477	168.096.659	90.705.648.818	(5.752.442.182)
13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	1.671.682.076.000	1.570.234.257.011	1.715.668.197	1.568.518.588.814	(103.163.487.186)
027	KEMENTERIAN SOSIAL	17.318.913.957.000	17.299.993.160.797	135.422.952.760	17.164.570.208.037	(154.343.748.963)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	265.127.445.000	254.228.375.815	653.777.108	253.574.598.707	(11.552.846.293)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	(dalam rupiah)
						REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
02	INSPEKTORAT JENDERAL	35.342.714.000	34.512.385.963	106.637.107	34.405.748.856	(936.965.144)
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	448.190.358.000	482.034.535.108	4.439.658.219	477.594.876.889	29.404.518.889
04	DITJEN REHABILITASI SOSIAL	926.189.670.000	910.324.560.974	3.326.874.923	906.997.686.051	(19.191.983.949)
05	DITJEN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	13.169.587.259.000	13.077.795.631.930	31.513.070.502	13.046.282.561.428	(123.304.697.572)
06	DITJEN PENANGANAN FAKIR MISKIN	2.146.933.000.000	2.222.179.142.707	94.014.418.423	2.128.164.724.284	(18.768.275.716)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	327.543.511.000	318.918.528.300	1.368.516.478	317.550.011.822	(9.993.499.178)
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	6.463.271.982.000	5.885.919.273.426	14.255.816.948	5.871.663.456.478	(591.608.525.522)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	531.683.393.000	489.821.945.995	804.363.878	489.017.582.117	(42.665.810.883)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	61.401.402.000	60.132.948.465	271.693.376	59.861.255.089	(1.540.146.911)
03	DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI	449.724.426.000	401.373.808.386	906.501.804	400.467.306.582	(49.257.119.418)
04	DITJEN PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG	1.162.120.932.000	1.063.084.624.530	768.377.250	1.062.316.247.280	(99.804.684.720)
05	DITJEN KONSERVASI SDA DAN	1.834.030.312.000	1.690.903.951.529	3.008.020.764	1.687.895.930.765	(146.134.381.235)
06	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	321.066.163.000	293.112.386.911	953.294.219	292.159.092.692	(28.907.070.308)
07	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI	281.794.865.000	289.306.610.943	727.878.838	288.578.732.105	6.783.867.105
08	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER	303.052.193.000	297.895.931.667	317.197.616	297.578.734.051	(5.473.458.949)
09	DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMARITIMAN	194.231.786.000	167.443.042.255	678.591.072	166.764.451.183	(27.467.334.817)
10	DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN	218.824.386.000	212.283.928.791	364.554.605	211.919.374.186	(6.905.011.814)
11	DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	392.791.481.000	362.646.075.310	2.006.063.194	360.640.012.116	(32.151.468.884)
12	DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN	169.864.608.000	155.352.074.468	732.165.104	154.619.909.364	(15.244.698.636)
13	DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN	542.686.035.000	402.561.944.176	2.717.115.228	399.844.828.948	(142.841.206.052)
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.138.308.737.000	6.119.973.585.037	8.528.757.007	6.111.444.828.030	(3.026.863.908.970)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	474.788.952.000	413.488.642.566	1.711.755.468	411.776.887.098	(63.012.064.902)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	78.855.369.000	63.948.577.014	28.286.444	63.920.290.570	(14.935.078.430)
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	1.861.382.052.000	1.279.728.795.078	424.959.732	1.279.303.835.346	(582.078.216.654)
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	1.166.435.446.000	965.697.337.652	1.871.948.796	963.825.388.856	(202.610.057.144)
05	DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN	855.375.357.000	564.669.820.941	488.414.175	564.181.406.766	(291.193.950.234)
06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	1.098.823.937.000	646.251.506.180	394.293.934	645.857.212.246	(452.966.724.754)
07	DITJEN KELAUTAN, PESIRIS DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	1.023.197.473.000	444.575.234.041	585.109.863	443.990.124.178	(579.207.348.822)
11	BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP)	154.639.070.000	152.925.683.849	242.011.429	152.683.672.420	(1.955.397.580)
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.901.610.831.000	1.033.911.118.626	2.456.716.102	1.031.454.402.524	(870.156.428.476)
13	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	523.200.250.000	554.776.869.090	325.261.064	554.451.608.026	31.251.358.026
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	104.237.823.312.000	96.144.551.983.375	41.235.727.054	96.103.316.256.321	(8.134.507.055.679)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	558.375.000.000	497.650.114.195	673.446.583	496.976.667.612	(61.398.332.388)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	104.653.000.000	89.666.418.169	918.691.006	88.747.727.163	(15.905.272.837)
04	DITJEN BINA MARGA	43.668.953.672.000	41.607.831.767.579	7.372.755.441	41.600.459.012.138	(2.068.494.659.862)
05	DITJEN CIPTA KARYA	16.701.240.428.000	15.141.457.771.185	4.466.065.620	15.136.991.705.565	(1.564.248.722.435)
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	33.173.413.412.000	29.403.300.505.295	3.729.386.015	29.399.571.119.280	(3.773.842.292.720)
07	DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN	8.148.813.000.000	7.701.957.705.886	18.720.773.639	7.683.236.932.247	(465.576.067.753)
08	DITJEN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	237.113.000.000	211.671.380.958	346.464.909	211.324.916.049	(25.788.083.951)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	615.000.000.000	541.314.506.464	1.052.188.055	540.262.318.409	(74.737.681.591)
13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI	320.422.528.000	304.101.128.951	1.216.930.838	302.884.198.113	(17.538.329.887)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	(dalam rupiah)
						REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
14	BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	256.263.528.000	241.891.671.704	865.411.740	241.026.259.964	(15.237.268.036)
15	BADAN PENGEMBANGAN SDM	453.575.744.000	403.709.012.989	1.873.613.208	401.835.399.781	(51.740.344.219)
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	282.946.426.000	284.517.407.024	47.969.445	284.469.437.579	1.523.011.579
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	282.946.426.000	284.517.407.024	47.969.445	284.469.437.579	1.523.011.579
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	463.774.266.000	447.420.603.762	431.743.133	446.988.860.629	(16.785.405.371)
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	463.774.266.000	447.420.603.762	431.743.133	446.988.860.629	(16.785.405.371)
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	321.535.133.000	265.030.473.911	655.574.885	264.374.899.026	(57.160.233.974)
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	321.535.133.000	265.030.473.911	655.574.885	264.374.899.026	(57.160.233.974)
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	3.567.229.812.000	3.201.457.754.700	3.419.292.267	3.198.038.462.433	(369.191.349.567)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	3.567.229.812.000	3.201.457.754.700	3.419.292.267	3.198.038.462.433	(369.191.349.567)
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	198.865.072.000	189.654.422.333	628.296.419	189.026.125.914	(9.838.946.086)
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	198.865.072.000	189.654.422.333	628.296.419	189.026.125.914	(9.838.946.086)
042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	39.487.605.345.000	38.097.448.457.484	317.105.289.825	37.780.343.167.659	(1.707.262.177.341)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	28.003.734.566.000	28.095.905.572.150	283.830.725.110	27.812.074.847.040	(191.659.718.960)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	40.447.429.000	40.266.534.791	845.969.054	39.420.565.737	(1.026.863.263)
03	DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI	895.089.187.000	816.993.091.158	6.001.148.106	810.991.943.052	(84.097.243.948)
04	DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN	7.251.749.582.000	6.105.095.784.562	12.775.263.181	6.092.320.521.381	(1.159.429.060.619)
05	DITJEN SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI	1.372.888.774.000	1.199.272.517.417	4.418.193.718	1.194.854.323.699	(178.034.450.301)
06	DITJEN RISET DAN PENGEMBANGAN	1.580.126.673.000	1.512.143.416.334	7.133.513.460	1.505.009.902.874	(75.116.770.126)
07	DITJEN PENGUASAAN INOVASI	343.569.134.000	327.771.541.072	2.100.477.196	325.671.063.876	(17.898.070.124)
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	960.773.348.000	881.096.738.428	407.896.008	880.688.842.420	(80.084.505.580)
01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	960.773.348.000	881.096.738.428	407.896.008	880.688.842.420	(80.084.505.580)
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	503.084.190.000	488.727.153.495	2.087.920.685	486.639.232.810	(16.444.957.190)
01	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	503.084.190.000	488.727.153.495	2.087.920.685	486.639.232.810	(16.444.957.190)
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	184.304.700.000	175.981.866.536	3.071.967.761	172.909.898.775	(11.394.801.225)
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	184.304.700.000	175.981.866.536	3.071.967.761	172.909.898.775	(11.394.801.225)
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	9.829.055.605.000	9.498.100.052.637	169.317.844	9.497.930.734.793	(331.124.870.207)
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	9.829.055.605.000	9.498.100.052.637	169.317.844	9.497.930.734.793	(331.124.870.207)
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.361.941.676.000	1.314.568.828.747	2.407.637.737	1.312.161.191.010	(49.780.484.990)
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.361.941.676.000	1.314.568.828.747	2.407.637.737	1.312.161.191.010	(49.780.484.990)
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	168.653.282.000	159.822.158.479	6.575.000	159.815.583.479	(8.837.698.521)
01	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL	168.653.282.000	159.822.158.479	6.575.000	159.815.583.479	(8.837.698.521)
054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.137.998.603.000	3.625.919.400.790	8.367.437.539	3.617.551.963.251	(520.446.639.749)
01	BADAN PUSAT STATISTIK	4.137.998.603.000	3.625.919.400.790	8.367.437.539	3.617.551.963.251	(520.446.639.749)
055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.358.939.289.000	2.997.282.057.628	4.095.905.833	2.993.186.151.795	1.634.246.862.795
01	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	1.358.939.289.000	2.997.282.057.628	4.095.905.833	2.993.186.151.795	1.634.246.862.795
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	6.607.638.825.000	5.720.027.610.682	12.429.068.910	5.707.598.541.772	(900.040.283.228)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.362.900.898.000	5.499.747.444.647	9.451.654.656	5.490.295.789.991	(872.605.108.009)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	10.362.719.000	9.774.072.114	287.820.080	9.486.252.034	(876.466.966)
03	DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG	52.501.341.000	50.127.120.355	36.518.666	50.090.601.689	(2.410.739.311)
04	DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR KEAGRARIAAN	81.292.535.000	60.385.580.863	745.963.623	59.639.617.240	(21.652.917.760)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	(dalam rupiah)
						REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
05	DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN	29.117.920.000	29.505.318.336	418.574.260	29.086.744.076	(31.175.924)
06	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN AGRARIA	11.335.106.000	11.143.953.260	530.703.457	10.613.249.803	(721.856.197)
07	DIREKTORAT JENDERAL PENGADAAN TANAH	9.939.519.000	9.617.751.242	289.143.939	9.328.607.303	(610.911.697)
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH	44.457.545.000	44.235.363.824	650.623.079	43.584.740.745	(872.804.255)
09	DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN MASALAH AGRARIA	5.731.242.000	5.491.006.041	18.067.150	5.472.938.891	(258.303.109)
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	614.560.997.000	588.197.756.794	219.186.090	587.978.570.704	(26.582.426.296)
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	614.560.997.000	588.197.756.794	219.186.090	587.978.570.704	(26.582.426.296)
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4.916.731.229.000	4.422.549.629.454	13.075.710.108	4.409.473.919.346	(507.257.309.654)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	296.126.190.000	289.065.447.261	665.283.692	288.400.163.569	(7.726.026.431)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	24.409.497.000	22.207.301.680	120.271.657	22.087.030.023	(2.322.466.977)
03	DITJEN SUMBER DAYA PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	747.873.568.000	700.738.977.569	1.441.239.716	699.297.737.853	(48.575.830.147)
04	DITJEN APLIKASI INFORMATIKA	362.455.362.000	325.493.545.584	497.820.096	324.995.725.488	(37.459.636.512)
05	DITJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	2.842.268.020.000	2.474.614.748.553	9.278.800.140	2.465.335.948.413	(376.932.071.587)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	238.876.418.000	235.719.843.494	756.661.028	234.963.182.466	(3.913.235.534)
07	BADAN INFORMASI PUBLIK	404.722.174.000	374.709.765.313	315.633.779	374.394.131.534	(30.328.042.466)
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	98.218.761.061.000	94.634.201.395.442	636.667.389.153	93.997.534.006.289	(4.221.227.054.711)
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	98.218.761.061.000	94.634.201.395.442	636.667.389.153	93.997.534.006.289	(4.221.227.054.711)
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.670.011.283.000	1.573.840.494.254	8.644.807.222	1.565.195.687.032	(104.815.595.968)
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.670.011.283.000	1.573.840.494.254	8.644.807.222	1.565.195.687.032	(104.815.595.968)
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	232.048.405.000	220.042.526.170	360.872.230	219.681.653.940	(12.366.751.060)
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	232.048.405.000	220.042.526.170	360.872.230	219.681.653.940	(12.366.751.060)
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	453.739.151.000	440.826.247.369	2.790.964.189	438.035.283.180	(15.703.867.820)
01	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	453.739.151.000	440.826.247.369	2.790.964.189	438.035.283.180	(15.703.867.820)
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.906.316.940.000	1.765.155.800.631	4.623.080.813	1.760.532.719.818	(145.784.220.182)
01	PELAKSANA HARIAN BNN	1.906.316.940.000	1.765.155.800.631	4.623.080.813	1.760.532.719.818	(145.784.220.182)
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	4.673.388.937.000	4.194.549.679.369	12.200.908.815	4.182.348.770.554	(491.040.166.446)
02	ITJEN KDPDTT	56.500.000.000	48.715.930.291	307.040.436	48.408.889.855	(8.091.110.145)
03	DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.642.387.437.000	2.361.258.019.579	9.172.747.870	2.352.085.271.709	(290.302.165.291)
04	DITJEN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	291.540.655.000	286.517.656.614	550.142.147	285.967.514.467	(5.573.140.533)
05	DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU	226.224.766.000	198.633.984.047	227.712.012	198.406.272.035	(27.818.493.965)
06	DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	217.723.218.000	199.461.695.890	584.337.660	198.877.358.230	(18.845.859.770)
07	DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	357.698.391.000	341.516.563.884	257.753.314	341.258.810.570	(16.439.580.430)
08	DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	305.853.346.000	292.418.589.157	140.961.139	292.277.628.018	(13.575.717.982)
09	BALITBANG DIKLAT SERTA INFO	210.461.124.000	193.299.927.622	298.200.725	193.001.726.897	(17.459.397.103)
10	SETJEN KEMENDES PDT DAN TRANSMIGRASI	365.000.000.000	272.727.312.285	662.013.512	272.065.298.773	(92.934.701.227)
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.728.591.665.000	2.242.747.253.628	10.595.294.698	2.232.151.958.930	(496.439.706.070)
01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.728.591.665.000	2.242.747.253.628	10.595.294.698	2.232.151.958.930	(496.439.706.070)
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	88.952.858.000	78.144.155.465	874.097.623	77.270.057.842	(11.682.800.158)
01	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	88.952.858.000	78.144.155.465	874.097.623	77.270.057.842	(11.682.800.158)
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.546.760.074.000	1.486.620.096.547	7.997.522.204	1.478.622.574.343	(68.137.499.657)
01	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.546.760.074.000	1.486.620.096.547	7.997.522.204	1.478.622.574.343	(68.137.499.657)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	(dalam rupiah)
						REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.288.570.557.000	5.430.701.961.307	7.025.354.063	5.423.676.607.244	2.135.106.050.244
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.288.570.557.000	5.430.701.961.307	7.025.354.063	5.423.676.607.244	2.135.106.050.244
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	312.368.954.000	301.386.112.370	1.037.747.367	300.348.365.003	(12.020.588.997)
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	312.368.954.000	301.386.112.370	1.037.747.367	300.348.365.003	(12.020.588.997)
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	117.169.305.000	111.402.462.744	301.236.380	111.101.226.364	(6.068.078.636)
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	117.169.305.000	111.402.462.744	301.236.380	111.101.226.364	(6.068.078.636)
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.163.398.198.000	1.099.651.570.314	1.669.212.484	1.097.982.357.830	(65.415.840.170)
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.163.398.198.000	1.099.651.570.314	1.669.212.484	1.097.982.357.830	(65.415.840.170)
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	705.899.781.000	658.088.804.564	3.547.050.623	654.541.753.941	(51.358.027.059)
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	705.899.781.000	658.088.804.564	3.547.050.623	654.541.753.941	(51.358.027.059)
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.400.177.699.000	1.427.540.848.739	1.730.153.664	1.425.810.695.075	25.632.996.075
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	1.400.177.699.000	1.427.540.848.739	1.730.153.664	1.425.810.695.075	25.632.996.075
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	807.460.593.000	720.137.891.900	692.837.430	719.445.054.470	(88.015.538.530)
01	L A P A N	807.460.593.000	720.137.891.900	692.837.430	719.445.054.470	(88.015.538.530)
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	764.196.437.000	711.639.036.539	2.875.688.577	708.763.347.962	(55.433.089.038)
01	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	764.196.437.000	711.639.036.539	2.875.688.577	708.763.347.962	(55.433.089.038)
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	164.522.097.000	156.607.443.851	827.176.633	155.780.267.218	(8.741.829.782)
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	164.522.097.000	156.607.443.851	827.176.633	155.780.267.218	(8.741.829.782)
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	176.242.516.000	167.125.909.009	1.787.023.123	165.338.885.886	(10.903.630.114)
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	176.242.516.000	167.125.909.009	1.787.023.123	165.338.885.886	(10.903.630.114)
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	285.560.979.000	268.792.885.854	832.839.837	267.960.046.017	(17.600.932.983)
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	285.560.979.000	268.792.885.854	832.839.837	267.960.046.017	(17.600.932.983)
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	227.320.826.000	213.700.973.547	2.232.108.130	211.468.865.417	(15.851.960.583)
01	ARSIP NASIONAL	227.320.826.000	213.700.973.547	2.232.108.130	211.468.865.417	(15.851.960.583)
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	596.196.054.000	638.077.252.908	850.137.754	637.227.115.154	41.031.061.154
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	596.196.054.000	638.077.252.908	850.137.754	637.227.115.154	41.031.061.154
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.429.852.715.000	1.303.127.931.307	2.529.797.279	1.300.598.134.028	(129.254.580.972)
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.429.852.715.000	1.303.127.931.307	2.529.797.279	1.300.598.134.028	(129.254.580.972)
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.274.366.048.000	2.951.519.590.759	5.742.674.597	2.945.776.916.162	(328.589.131.838)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	653.406.518.000	587.135.227.211	630.169.460	586.505.057.751	(66.901.460.249)
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.860.949.438.000	1.679.431.473.170	2.727.612.324	1.676.703.860.846	(184.245.577.154)
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	139.836.609.000	127.265.185.907	257.918.021	127.007.267.886	(12.829.341.114)
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	128.423.060.000	116.427.901.388	112.072.570	116.315.828.818	(12.107.231.182)
05	INSPEKTORAT JENDERAL	41.164.273.000	38.213.777.954	151.946.714	38.061.831.240	(3.102.441.760)
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	139.714.127.000	111.457.263.250	107.769.214	111.349.494.036	(28.364.632.964)
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	67.570.633.000	56.544.863.400	525.723.504	56.019.139.896	(11.551.493.104)
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN	34.716.953.000	32.258.837.969	100.180.245	32.158.657.724	(2.558.295.276)
09	DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	208.584.437.000	202.785.060.510	1.129.282.545	201.655.777.965	(6.928.659.035)
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.640.802.079.000	3.965.185.571.485	10.570.007.081	3.954.615.564.404	(686.186.514.596)
01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	4.640.802.079.000	3.965.185.571.485	10.570.007.081	3.954.615.564.404	(686.186.514.596)
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	734.218.331.000	792.190.997.673	4.900.740.295	787.290.257.378	53.071.926.378

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2017**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	(dalam rupiah)
						REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	734.218.331.000	792.190.997.673	4.900.740.295	787.290.257.378	53.071.926.378
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	958.774.583.000	918.608.692.168	16.100.726.625	902.507.965.543	(56.266.617.457)
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	216.804.191.000	194.689.670.482	769.821.410	193.919.849.072	(22.884.341.928)
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	741.970.392.000	723.919.021.686	15.330.905.215	708.588.116.471	(33.382.275.529)
100	KOMISI YUDISIAL RI	113.567.890.000	116.533.095.734	532.011.320	116.001.084.414	2.433.194.414
01	KOMISI YUDISIAL RI	113.567.890.000	116.533.095.734	532.011.320	116.001.084.414	2.433.194.414
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.887.403.421.000	2.668.557.089.754	24.146.434.509	2.644.410.655.245	757.007.234.245
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.887.403.421.000	2.668.557.089.754	24.146.434.509	2.644.410.655.245	757.007.234.245
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	367.665.142.000	340.660.373.939	455.530.790	340.204.843.149	(27.460.298.851)
01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	367.665.142.000	340.660.373.939	455.530.790	340.204.843.149	(27.460.298.851)
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	448.498.922.000	310.096.226.452	179.050.000	309.917.176.452	(138.581.745.548)
01	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	448.498.922.000	310.096.226.452	179.050.000	309.917.176.452	(138.581.745.548)
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	190.203.129.000	170.663.333.692	2.558.293.134	168.105.040.558	(22.098.088.442)
01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	190.203.129.000	170.663.333.692	2.558.293.134	168.105.040.558	(22.098.088.442)
107	BADAN SAR NASIONAL	2.542.288.955.000	2.482.992.192.665	3.028.926.464	2.479.963.266.201	(62.325.688.799)
01	BADAN SAR NASIONAL	2.542.288.955.000	2.482.992.192.665	3.028.926.464	2.479.963.266.201	(62.325.688.799)
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	110.404.167.000	128.870.692.131	1.109.836.201	127.760.855.930	17.356.688.930
01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	110.404.167.000	128.870.692.131	1.109.836.201	127.760.855.930	17.356.688.930
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	277.469.252.000	222.859.528.734	41.625.680	222.817.903.054	(54.651.348.946)
01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	277.469.252.000	222.859.528.734	41.625.680	222.817.903.054	(54.651.348.946)
110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	131.221.531.000	141.533.372.702	2.817.073.840	138.716.298.862	7.494.767.862
01	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	131.221.531.000	141.533.372.702	2.817.073.840	138.716.298.862	7.494.767.862
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	173.248.626.000	152.480.424.218	1.115.149.044	151.365.275.174	(21.883.350.826)
01	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	173.248.626.000	152.480.424.218	1.115.149.044	151.365.275.174	(21.883.350.826)
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	1.750.805.429.000	1.533.516.094.476	22.000.000	1.533.494.094.476	(217.311.334.524)
01	BPKPB BATAM	1.750.805.429.000	1.533.516.094.476	22.000.000	1.533.494.094.476	(217.311.334.524)
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	724.959.368.000	716.644.110.931	772.600.311	715.871.510.620	(9.087.857.380)
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	724.959.368.000	716.644.110.931	772.600.311	715.871.510.620	(9.087.857.380)
114	SEKRETARIAT KABINET	214.679.229.000	212.001.808.734	1.314.959.042	210.686.849.692	(3.992.379.308)
01	SEKRETARIAT KABINET	214.679.229.000	212.001.808.734	1.314.959.042	210.686.849.692	(3.992.379.308)
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	1.917.516.530.000	1.998.794.635.516	18.726.388.096	1.980.068.247.420	62.551.717.420
01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	1.917.516.530.000	1.998.794.635.516	18.726.388.096	1.980.068.247.420	62.551.717.420
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	960.347.534.000	856.675.427.710	661.484.360	856.013.943.350	(104.333.590.650)
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	960.347.534.000	856.675.427.710	661.484.360	856.013.943.350	(104.333.590.650)
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	761.281.114.000	731.124.284.159	932.787.244	730.191.496.915	(31.089.617.085)
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	761.281.114.000	731.124.284.159	932.787.244	730.191.496.915	(31.089.617.085)
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	249.655.176.000	148.065.039.951	24.750.000	148.040.289.951	(101.614.886.049)
01	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	249.655.176.000	148.065.039.951	24.750.000	148.040.289.951	(101.614.886.049)
119	BADAN KEAMANAN LAUT	767.519.049.000	721.085.256.293	524.101.955	720.561.154.338	(46.957.894.662)
01	BADAN KEAMANAN LAUT	767.519.049.000	721.085.256.293	524.101.955	720.561.154.338	(46.957.894.662)
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	300.532.233.000	269.526.333.484	7.316.153.435	262.210.180.049	(38.322.052.951)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2017**

(dalam rupiah)						
KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (Pagu Anggaran berdasarkan Rincian Perpres APBNP 2017)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	300.532.233.000	269.526.333.484	7.316.153.435	262.210.180.049	(38.322.052.951)
121	BADAN EKONOMI KREATIF	702.395.058.000	569.953.778.449	4.986.669.090	564.967.109.359	(137.427.948.641)
01	SEKRETARIAT BADAN EKONOMI KREATIF	702.395.058.000	569.953.778.449	4.986.669.090	564.967.109.359	(137.427.948.641)
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	568.371.308.797.000	500.480.054.985.903	254.610.205.991	500.225.444.779.912	(68.145.864.017.088)
01	PENGELOLA UTANG PEMERINTAH	219.196.342.938.000	216.568.165.736.548	143.215.203	216.568.022.521.345	(2.628.320.416.655)
02	PENGELOLA HIBAH	5.532.197.004.000	5.445.667.259.156	-	5.445.667.259.156	(86.529.744.844)
07	PENGELOLA BELANJA SUBSIDI	168.876.783.743.000	166.444.204.534.299	43.101.405.121	166.401.103.129.178	(2.475.680.613.822)
08	PENGELOLA BELANJA LAINNYA	66.659.307.314.000	8.439.994.936.024	2.823.723.327	8.437.171.212.697	(58.222.136.101.303)
99	TRANSAKSI KHUSUS	108.106.677.798.000	103.582.022.519.876	208.541.862.340	103.373.480.657.536	(4.733.197.140.464)
XXX					(294)	
XX					(294)	
	JUMLAH	1.366.956.572.312.000	1.268.222.574.617.819	2.863.145.872.006	1.265.359.428.745.813	(101.597.143.566.187)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2017 (Audited)
(dalam rupiah)**

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bansos	Belanja Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	76.902.513.750	717.920.867.132	19.648.828.878	-	-	-	-	-	814.472.209.760
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	991.035.135.608	3.027.520.677.684	167.614.128.859	-	-	-	-	-	4.186.169.942.151
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.135.348.569.875	1.387.394.996.562	147.814.579.679	-	-	-	-	-	2.670.558.146.116
005	MAHKAMAH AGUNG	6.117.773.614.098	1.225.798.252.250	588.331.205.230	-	-	-	-	-	7.931.903.071.578
006	KEJAKSAAN RI	2.745.170.264.205	1.297.585.329.735	1.171.698.306.869	-	-	-	-	-	5.214.453.900.809
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	367.149.777.285	1.374.620.482.720	134.131.023.786	-	-	-	-	-	1.875.901.283.791
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	662.931.711.113	1.840.157.674.415	177.292.368.491	-	-	-	-	-	2.680.381.754.019
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3.101.096.080.301	3.004.164.079.205	574.981.469.678	-	-	-	-	-	6.680.241.629.184
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	39.966.286.321.253	43.841.855.225.349	33.491.499.461.379	-	-	-	-	-	117.299.641.007.981
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	4.892.271.875.697	3.910.053.634.074	1.615.700.834.081	-	-	-	-	-	10.418.026.343.852
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	17.284.051.723.036	21.960.137.442.737	1.140.714.461.133	-	-	-	-	-	40.384.903.626.906
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	2.165.578.779.483	19.056.638.955.021	688.340.119.480	-	-	-	-	-	21.910.557.853.984
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	617.084.428.442	1.459.149.816.769	355.855.344.639	-	-	-	-	-	2.432.089.589.850
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	781.825.866.622	3.056.615.076.708	1.079.451.974.644	-	-	-	-	-	4.917.892.917.974
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.034.278.286.490	11.020.238.052.613	27.351.001.026.526	-	-	-	-	-	41.405.517.365.629
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7.706.324.333.196	18.574.764.317.980	1.118.718.529.547	-	-	-	9.465.633.503.942	-	36.865.440.684.665
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	4.801.082.279.310	21.711.803.822.374	2.981.598.351.223	-	-	-	25.417.797.053.000	-	54.912.281.505.907
025	KEMENTERIAN AGAMA	38.913.510.446.787	16.168.845.619.770	3.676.624.548.627	-	-	-	1.420.575.703.812	-	60.179.556.318.996
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	385.653.671.367	1.962.740.895.238	622.456.501.650	-	-	-	-	-	2.970.851.068.255
027	KEMENTERIAN SOSIAL	427.469.522.513	2.674.455.795.594	139.348.753.691	-	-	-	13.923.296.136.239	-	17.164.570.208.037
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	1.794.590.018.252	3.576.281.596.834	500.791.841.392	-	-	-	-	-	5.871.663.456.478
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.385.059.540.602	3.909.533.565.806	816.851.721.622	-	-	-	-	-	6.111.444.828.030
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	2.294.778.686.206	21.040.345.217.964	72.768.192.352.151	-	-	-	-	-	96.103.316.256.321
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN	50.225.480.718	214.452.003.091	19.791.953.770	-	-	-	-	-	284.469.437.579
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	74.392.997.460	353.364.335.165	19.231.528.004	-	-	-	-	-	446.988.860.629
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PMK	53.431.760.327	203.265.304.879	7.677.833.820	-	-	-	-	-	264.374.899.026
040	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	228.565.629.248	2.625.586.232.788	343.886.600.397	-	-	-	-	-	3.198.038.462.433
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	43.581.581.959	126.674.779.294	18.769.764.661	-	-	-	-	-	189.026.125.914
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	12.722.298.354.674	17.874.762.092.773	3.758.395.625.132	-	-	-	3.424.887.095.080	-	37.780.343.167.659
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	104.053.500.259	706.995.046.200	69.640.295.961	-	-	-	-	-	880.688.842.420
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	38.292.678.383	445.957.863.332	2.388.691.095	-	-	-	-	-	486.639.232.810
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	60.380.996.764	99.884.527.778	12.644.374.233	-	-	-	-	-	172.909.898.775
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	231.601.321.643	2.218.862.249.050	7.047.467.164.100	-	-	-	-	-	9.497.930.734.793
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	103.761.109.155	199.517.085.264	1.008.882.996.591	-	-	-	-	-	1.312.161.191.010
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	19.944.077.373	43.498.300.106	96.373.206.000	-	-	-	-	-	159.815.583.479
054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.676.842.809.537	1.722.914.992.701	217.794.161.013	-	-	-	-	-	3.617.551.963.251
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	138.134.339.864	2.772.295.894.281	82.755.917.650	-	-	-	-	-	2.993.186.151.795

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2017 (Audited)
(dalam rupiah)**

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bansos	Belanja Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.947.766.899.940	3.123.431.041.636	636.400.600.196	-	-	-	-	-	5.707.598.541.772
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	81.015.453.615	292.188.033.465	214.775.083.624	-	-	-	-	-	587.978.570.704
059	KEMENTERIAN KOMINFO	443.870.086.203	3.413.535.754.336	552.068.078.807	-	-	-	-	-	4.409.473.919.346
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	40.918.297.388.829	18.778.156.895.333	34.301.079.722.127	-	-	-	-	-	93.997.534.006.289
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	429.453.873.700	716.730.409.286	419.011.404.046	-	-	-	-	-	1.565.195.687.032
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	63.149.215.067	111.228.215.853	45.304.223.020	-	-	-	-	-	219.681.653.940
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	119.973.849.249	300.769.158.567	17.292.275.364	-	-	-	-	-	438.035.283.180
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	425.447.386.593	765.946.545.526	569.138.787.699	-	-	-	-	-	1.760.532.719.818
067	KEMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	208.337.577.246	3.781.100.564.852	192.910.628.456	-	-	-	-	-	4.182.348.770.554
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	360.428.786.194	1.792.583.258.689	79.139.914.047	-	-	-	-	-	2.232.151.958.930
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	25.037.880.097	51.966.934.245	265.243.500	-	-	-	-	-	77.270.057.842
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	492.698.815.980	666.830.791.023	319.092.967.340	-	-	-	-	-	1.478.622.574.343
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.143.855.887.944	4.104.709.458.826	175.111.259.474	-	-	-	-	-	5.423.676.607.244
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	43.270.965.292	247.624.541.658	9.452.858.053	-	-	-	-	-	300.348.365.003
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	47.239.044.122	50.953.812.612	12.908.369.630	-	-	-	-	-	111.101.226.364
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	549.184.513.601	389.263.986.547	159.533.857.682	-	-	-	-	-	1.097.982.357.830
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	352.625.216.625	216.280.384.375	85.636.152.941	-	-	-	-	-	654.541.753.941
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	377.878.143.567	445.735.216.173	602.197.335.335	-	-	-	-	-	1.425.810.695.075
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	140.063.560.557	198.797.667.454	380.583.826.459	-	-	-	-	-	719.445.054.470
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	74.228.450.387	224.333.196.563	410.201.701.012	-	-	-	-	-	708.763.347.962
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	42.824.096.152	102.193.662.734	10.762.508.332	-	-	-	-	-	155.780.267.218
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	52.437.274.278	96.529.984.865	16.371.626.743	-	-	-	-	-	165.338.885.886
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	113.688.481.646	141.434.868.997	12.836.695.374	-	-	-	-	-	267.960.046.017
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	69.787.192.114	102.344.644.721	39.337.028.582	-	-	-	-	-	211.468.865.417
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	317.469.141.299	217.138.648.936	102.619.324.919	-	-	-	-	-	637.227.115.154
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	861.107.715.977	400.209.172.264	39.281.245.787	-	-	-	-	-	1.300.598.134.028
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	419.099.411.684	1.091.571.494.969	1.435.106.009.509	-	-	-	-	-	2.945.776.916.162
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	81.010.331.949	3.796.519.396.244	77.085.836.211	-	-	-	-	-	3.954.615.564.404
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	471.795.760.487	228.230.633.758	87.263.863.133	-	-	-	-	-	787.290.257.378
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	296.823.597.847	598.979.993.666	6.704.374.030	-	-	-	-	-	902.507.965.543
100	KOMISI YUDISIAL RI	29.230.307.707	83.458.856.862	3.311.919.845	-	-	-	-	-	116.001.084.414
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	54.326.145.809	739.541.657.327	205.529.335.827	-	-	-	1.645.013.516.282	-	2.644.410.655.245
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN	104.342.056.885	223.964.670.673	11.898.115.591	-	-	-	-	-	340.204.843.149
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	13.158.138.453	167.263.032.069	129.493.647.930	-	-	-	2.358.000	-	309.917.176.452
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	27.313.227.115	117.324.079.651	23.467.733.792	-	-	-	-	-	168.105.040.558
107	BADAN SAR NASIONAL	325.329.860.088	607.306.887.336	1.547.326.518.777	-	-	-	-	-	2.479.963.266.201

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2017 (Audited)
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bansos	Belanja Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	31.233.956.956	93.997.432.679	2.529.466.295	-	-	-	-	-	127.760.855.930
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	10.293.307.400	86.132.885.554	126.391.710.100	-	-	-	-	-	222.817.903.054
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	48.183.387.998	84.645.740.449	5.887.170.415	-	-	-	-	-	138.716.298.862
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	17.089.430.573	123.301.212.439	10.974.632.162	-	-	-	-	-	151.365.275.174
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	978.777.202.300	554.716.892.176	-	-	-	-	-	1.533.494.094.476
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	15.574.636.098	462.194.202.330	238.102.672.192	-	-	-	-	-	715.871.510.620
114	SEKRETARIAT KABINET	99.668.489.987	102.660.957.511	8.357.402.194	-	-	-	-	-	210.686.849.692
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	52.370.675.360	1.879.014.350.762	48.683.221.298	-	-	-	-	-	1.980.068.247.420
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	563.485.430.959	283.453.862.682	9.074.649.709	-	-	-	-	-	856.013.943.350
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	290.924.622.481	364.596.126.502	74.670.747.932	-	-	-	-	-	730.191.496.915
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	45.024.822.951	103.015.467.000	-	-	-	-	-	148.040.289.951
119	BADAN KEAMANAN LAUT	31.668.050.455	231.632.540.623	457.260.563.260	-	-	-	-	-	720.561.154.338
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	23.270.725.722	208.073.339.940	30.866.114.387	-	-	-	-	-	262.210.180.049
121	BADAN EKONOMI KREATIF	11.157.061.832	532.403.929.651	21.406.117.876	-	-	-	-	-	564.967.109.359
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	102.817.614.946.210	190.177.942.428	-	216.568.022.521.345	166.401.103.129.178	5.445.667.259.156	-	8.802.858.981.595	500.225.444.779.912
	PERBEDAAN PENCATATAN BUN DAN K/L	(104.106.732)	217.141.464	(124.510.026)				11.475.000		(294)
JUMLAH		312.728.756.432.452	291.459.133.344.592	208.656.670.235.846	216.568.022.521.345	166.401.103.129.178	5.445.667.259.156	55.297.216.841.355	8.802.858.981.595	1.265.359.428.745.519

3. LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Tahun Anggaran 2017 (Audited)

(Dalam Rupiah)

No.	Wilayah	Dana Bagi Hasil				DAU	DAK	DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSentif DAERAH	Total Dana Perimbangan
		Pajak	SDA	Cukai	Jumlah				
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 6 + 7 + 8 + 9
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	960.675.581.891	461.540.239.467	19.030.109.579	1.441.245.930.937	14.670.583.480.000	5.529.637.324.734	13.584.856.107.279	35.226.322.842.950
2	Provinsi Sumatera Utara	1.717.444.446.350	92.498.642.044	15.556.651.980	1.825.499.740.374	24.048.909.046.000	10.151.234.367.214	4.294.870.490.721	40.320.513.644.309
3	Provinsi Sumatera Barat	512.284.277.892	61.716.933.658	14.068.728.771	588.069.940.321	13.504.947.439.000	4.640.471.671.679	1.309.590.629.001	20.043.079.680.001
4	Provinsi Riau	4.297.560.273.577	3.958.988.718.181	-	8.256.548.991.758	8.094.865.698.000	3.818.721.842.576	1.290.599.332.344	21.460.735.864.678
5	Provinsi Kepulauan Riau	750.987.878.942	1.199.513.012.506	3.702.731.962	1.954.203.623.410	4.036.636.015.000	1.371.766.185.841	235.682.536.000	7.598.288.360.251
6	Provinsi Jambi	926.730.504.982	1.021.695.417.210	7.626.291.679	1.956.052.213.871	7.957.603.354.000	2.640.676.693.458	1.154.995.884.349	13.709.328.145.678
7	Provinsi Sumatera Selatan	3.261.567.882.738	4.450.258.716.473	1.842.361.330	7.713.668.960.541	12.219.355.900.000	5.435.643.273.520	2.343.748.166.401	27.712.416.300.462
8	Provinsi Bangka Belitung	204.593.421.899	349.982.415.083	-	554.575.836.982	4.191.243.627.000	1.235.016.946.278	398.941.819.000	6.379.778.229.260
9	Provinsi Bengkulu	210.788.067.122	102.706.809.842	-	313.494.876.964	6.412.869.276.000	2.112.961.787.220	1.131.876.197.900	9.971.202.138.084
10	Provinsi Lampung	541.882.240.999	385.031.815.854	12.118.537.143	939.032.593.996	12.842.089.675.000	5.885.943.098.801	2.165.656.889.870	21.832.722.257.667
11	Provinsi DKI Jakarta	16.613.945.754.340	254.235.232.979	-	16.868.180.987.319	-	2.121.801.939.666	-	18.989.982.926.985
12	Provinsi Jawa Barat	4.341.020.356.556	1.522.373.179.266	327.350.437.049	6.190.743.972.871	34.326.270.941.000	19.209.104.098.485	5.008.531.920.493	64.734.650.932.849
13	Provinsi Banten	1.746.247.634.309	26.588.920.747	-	1.772.836.555.056	8.221.805.119.000	4.213.967.022.055	1.089.204.181.175	15.297.812.877.286
14	Provinsi Jawa Tengah	2.253.880.423.968	100.934.898.366	680.460.192.267	3.035.275.514.601	37.107.206.765.000	16.751.616.276.423	7.484.057.544.061	64.378.156.100.085
15	Provinsi DI Yogyakarta	329.653.388.678	3.928.100.441	19.833.358.068	353.414.847.187	5.595.709.705.000	2.174.187.236.940	1.439.389.717.000	9.562.701.506.127
16	Provinsi Jawa Timur	3.290.176.246.018	2.222.532.509.917	1.532.174.606.298	7.044.883.362.233	39.827.729.656.000	18.123.085.132.373	7.016.508.525.846	72.012.206.676.452
17	Provinsi Kalimantan Barat	608.292.389.230	195.478.879.339	-	803.771.268.569	11.794.433.598.000	5.196.584.106.840	1.675.858.145.498	19.470.647.118.907
18	Provinsi Kalimantan Tengah	643.071.380.864	1.167.328.450.266	5.112.397.938	1.815.512.229.068	10.164.816.596.000	3.044.291.730.226	1.353.259.501.008	16.377.880.056.302
19	Provinsi Kalimantan Selatan	736.526.146.810	2.419.586.652.796	-	3.156.112.799.606	7.934.835.309.000	2.992.427.056.507	1.712.626.060.998	15.796.001.226.111
20	Provinsi Kalimantan Timur	3.387.259.608.006	5.573.358.498.308	-	8.960.618.106.314	4.902.965.607.000	2.635.241.102.130	837.651.139.681	17.336.475.955.125
21	Provinsi Kalimantan Utara	446.917.613.167	665.116.949.036	-	1.112.034.562.203	3.543.078.102.000	975.629.983.798	391.928.408.591	6.022.671.056.592
22	Provinsi Sulawesi Utara	331.377.181.764	187.560.423.863	-	518.937.605.627	8.437.705.933.000	3.713.825.340.411	1.421.646.796.864	14.092.115.675.902
23	Provinsi Gorontalo	101.472.048.590	18.185.199.002	-	119.657.247.592	4.011.521.935.000	1.369.964.870.196	564.639.270.000	6.065.783.322.788
24	Provinsi Sulawesi Tengah	316.015.657.536	496.410.213.397	7.289.507.309	819.715.378.242	9.389.387.412.000	3.697.551.660.581	1.525.290.005.224	15.431.944.456.047
25	Provinsi Sulawesi Selatan	887.850.046.863	208.959.923.062	17.865.649.326	1.114.675.619.251	18.213.737.198.000	8.655.958.253.698	2.025.476.658.849	30.009.847.729.798
26	Provinsi Sulawesi Barat	122.144.263.329	5.688.144.299	-	127.832.407.628	4.192.852.241.000	1.617.534.138.842	626.991.493.600	6.565.210.281.070
27	Provinsi Sulawesi Tenggara	264.168.636.257	134.490.732.427	-	398.659.368.684	9.747.375.498.000	3.521.130.590.647	1.624.721.336.800	15.291.886.794.131
28	Provinsi Bali	542.727.483.720	6.745.866.543	12.031.589.341	561.504.939.604	7.075.621.463.000	2.826.398.231.778	739.018.509.000	11.202.543.143.382
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	364.021.282.239	879.771.264.614	232.370.704.341	1.476.163.251.194	8.546.955.138.000	4.165.205.534.207	1.118.816.605.128	15.307.140.528.529
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	348.332.338.448	31.696.499.159	13.439.925.059	393.468.762.666	13.334.648.047.000	5.494.450.766.939	2.548.094.573.914	21.770.662.150.519
31	Provinsi Maluku	262.940.006.851	84.745.756.438	-	347.685.763.289	7.722.909.245.000	2.919.205.793.880	1.241.423.153.095	12.231.223.955.264
32	Provinsi Maluku Utara	211.596.938.806	175.131.083.819	-	386.728.022.625	6.180.280.995.000	2.056.422.835.032	942.648.380.400	9.566.080.233.057
33	Provinsi Papua	1.263.534.204.672	857.039.507.085	-	2.120.573.711.757	22.398.841.284.000	5.347.182.593.641	12.513.774.979.009	42.380.372.568.407
34	Provinsi Papua Barat	870.964.734.647	2.319.853.415.650	-	3.190.818.150.297	7.932.523.451.000	2.023.159.966.711	4.697.495.158.304	17.843.996.726.312
35	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kembali ke RKUN	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Nilai belum teridentifikasi daerah penerima	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		53.668.650.342.060	31.641.673.021.137	2.921.873.779.440	88.232.197.142.637	398.582.314.748.000	167.667.999.453.327	87.509.870.117.403	741.992.381.461.367

Catatan: Total Transfer ke Daerah dan Dana Desa diatas adalah Total dari Realisasi Pemerintah Provinsi ditambah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi tersebut

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	247.887.097.228	144.789.672.614	103.097.424.614	247.887.097.228
2	Kab. Aceh Barat	18.619.822.914	8.238.379.266	10.381.443.648	18.619.822.914
3	Kab. Aceh Besar	19.863.401.238	10.779.588.251	9.083.812.987	19.863.401.238
4	Kab. Aceh Selatan	16.363.916.120	7.376.562.892	8.987.353.228	16.363.916.120
5	Kab. Aceh Singkil	16.767.079.519	6.047.397.811	10.719.681.708	16.767.079.519
6	Kab. Aceh Tengah	15.243.054.568	7.309.867.427	7.933.187.141	15.243.054.568
7	Kab. Aceh Tenggara	13.673.223.898	5.740.537.194	7.932.686.704	13.673.223.898
8	Kab. Aceh Timur	62.812.456.128	6.585.565.227	56.226.890.901	62.812.456.128
9	Kab. Aceh Utara	167.627.494.908	19.971.833.478	147.655.661.430	167.627.494.908
10	Kab. Bireuen	23.000.703.308	9.208.005.869	13.792.697.439	23.000.703.308
11	Kab. Pidie	20.117.502.280	11.301.193.511	8.816.308.769	20.117.502.280
12	Kab. Simeulue	14.932.817.348	4.670.484.335	10.262.333.013	14.932.817.348
13	Kota Banda Aceh	37.564.626.782	30.962.635.478	6.601.991.304	37.564.626.782
14	Kota Sabang	14.134.227.076	7.061.028.252	7.073.198.824	14.134.227.076
15	Kota Langsa	18.659.585.810	10.242.021.776	8.417.564.034	18.659.585.810
16	Kota Lhokseumawe	52.276.336.691	30.792.729.846	21.483.606.845	52.276.336.691
17	Kab. Nagan Raya	17.321.621.897	5.692.389.762	11.629.232.135	17.321.621.897
18	Kab. Aceh Jaya	12.741.650.165	4.556.387.633	8.185.262.532	12.741.650.165
19	Kab. Pidie Jaya	12.467.844.188	5.501.524.635	6.966.319.553	12.467.844.188
20	Kab. Aceh Barat Daya	13.026.227.988	4.913.017.615	8.113.210.373	13.026.227.988
21	Kab. Gayo Lues	14.126.520.130	4.823.199.286	9.303.320.844	14.126.520.130
22	Kab. Aceh Tamiang	106.438.785.378	7.904.757.749	98.534.027.629	106.438.785.378
23	Kab. Bener Meriah	12.542.380.133	5.208.848.158	7.333.531.975	12.542.380.133
24	Kota Subulussalam	12.467.206.196	4.613.680.173	7.853.526.023	12.467.206.196
25	Provinsi Sumatera Utara	504.740.985.768	383.509.777.498	121.231.208.270	504.740.985.768
26	Kab. Asahan	57.975.874.017	18.999.924.409	38.975.949.608	57.975.874.017
27	Kab. Dairi	17.363.121.048	8.458.806.505	8.904.314.543	17.363.121.048
28	Kab. Deli Serdang	63.900.414.094	38.308.468.356	25.591.945.738	63.900.414.094
29	Kab. Karo	19.376.843.814	11.582.457.329	7.794.386.485	19.376.843.814
30	Kab. Labuhan Batu	49.521.779.591	15.134.831.096	34.386.948.495	49.521.779.591
31	Kab. Langkat	185.106.982.775	17.255.246.578	167.851.736.197	185.106.982.775
32	Kab. Mandailing Natal	26.310.884.120	9.215.458.885	17.095.425.235	26.310.884.120
33	Kab. Nias	12.221.699.612	6.767.712.620	5.453.986.992	12.221.699.612
34	Kab. Simalungun	44.896.113.314	14.627.897.619	30.268.215.695	44.896.113.314
35	Kab. Tapanuli Selatan	35.793.635.088	12.682.693.601	23.110.941.487	35.793.635.088
36	Kab. Tapanuli Tengah	21.443.521.407	8.982.081.920	12.461.439.487	21.443.521.407
37	Kab. Tapanuli Utara	24.711.261.560	12.210.825.773	12.500.435.787	24.711.261.560
38	Kab. Toba Samosir	17.904.933.801	10.767.976.443	7.136.957.358	17.904.933.801
39	Kota Binjai	26.304.981.684	10.820.532.836	15.484.448.848	26.304.981.684
40	Kota Medan	232.953.245.242	217.204.589.297	15.748.655.945	232.953.245.242
41	Kota Pematang Siantar	26.179.928.814	20.501.495.275	5.678.433.539	26.179.928.814
42	Kota Sibolga	15.524.073.963	9.163.665.634	6.360.408.329	15.524.073.963
43	Kota Tanjung Balai	14.324.086.346	8.202.177.458	6.121.908.888	14.324.086.346
44	Kab. Batu Bara	24.941.327.833	11.799.083.492	13.142.244.341	24.941.327.833
45	Kab. Labuhan Batu Utara	26.355.786.687	6.691.809.299	19.663.977.388	26.355.786.687
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	44.872.690.474	8.846.354.226	36.026.336.248	44.872.690.474
47	Kab. Padang Lawas Utara	24.318.128.603	7.170.532.712	17.147.595.891	24.318.128.603
48	Kab. Padang Lawas	27.555.585.312	7.298.009.912	20.257.575.400	27.555.585.312
49	Kab. Nias Utara	11.967.510.432	6.209.553.341	5.757.957.091	11.967.510.432
50	Kab. Nias Barat	11.210.133.816	6.158.042.352	5.052.091.464	11.210.133.816
51	Kota Tebing Tinggi	16.906.464.670	10.763.465.646	6.142.999.024	16.906.464.670
52	Kota Padang Sidempuan	20.711.095.830	13.033.204.543	7.677.891.287	20.711.095.830
53	Kab. Pakpak Bharat	14.158.268.974	6.248.287.840	7.909.981.134	14.158.268.974
54	Kab. Nias Selatan	15.757.858.764	6.597.655.325	9.160.203.439	15.757.858.764
55	Kab. Humbang Hasundutan	17.587.420.231	7.886.058.817	9.701.361.414	17.587.420.231
56	Kab. Serdang Bedagai	37.598.779.996	11.478.453.772	26.120.326.224	37.598.779.996
57	Kab. Samosir	14.251.464.463	7.283.643.396	6.967.821.067	14.251.464.463
58	Kota Gunungsitoli	12.697.564.207	7.680.700.240	5.016.863.967	12.697.564.207
59	Provinsi Sumatera Barat	151.023.404.973	126.438.457.747	24.584.947.226	151.023.404.973
60	Kab. Lima Puluh Kota	16.381.324.094	7.676.922.509	8.704.401.585	16.381.324.094
61	Kab. Agam	20.687.238.497	9.894.611.040	10.792.627.457	20.687.238.497
62	Kab. Kepulauan Mentawai	15.348.392.075	4.416.628.919	10.931.763.156	15.348.392.075
63	Kab. Padang Pariaman	12.494.628.528	5.395.585.233	7.099.043.295	12.494.628.528
64	Kab. Pasaman	13.994.679.167	6.239.568.158	7.755.111.009	13.994.679.167
65	Kab. Pesisir Selatan	23.868.396.439	7.466.633.180	16.401.763.259	23.868.396.439
66	Kab. Sijunjung	14.048.131.715	5.381.124.758	8.667.006.957	14.048.131.715
67	Kab. Solok	15.490.587.835	7.295.086.227	8.195.501.608	15.490.587.835
68	Kab. Tanah Datar	15.502.609.595	8.648.365.222	6.854.244.373	15.502.609.595
69	Kota Bukit Tinggi	15.668.970.962	10.710.515.057	4.958.455.905	15.668.970.962
70	Kota Padang Panjang	10.890.899.189	5.186.702.298	5.704.196.891	10.890.899.189
71	Kota Padang	73.928.268.488	64.215.774.505	9.712.493.983	73.928.268.488
72	Kota Payakumbuh	12.817.368.915	7.581.565.745	5.235.803.170	12.817.368.915
73	Kota Sawahlunto	11.258.315.139	5.425.872.631	5.832.442.508	11.258.315.139
74	Kota Solok	13.064.977.268	6.984.207.492	6.080.769.776	13.064.977.268
75	Kota Pariaman	14.259.755.626	7.815.470.127	6.444.285.499	14.259.755.626
76	Kab. Pasaman Barat	24.549.796.283	7.582.689.407	16.967.106.876	24.549.796.283

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
77	Kab. Dharmasraya	16.390.222.741	6.360.780.636	10.029.442.105	16.390.222.741
78	Kab. Solok Selatan	20.616.310.363	5.379.580.974	15.236.729.389	20.616.310.363
79	Provinsi Riau	981.003.223.346	265.672.131.074	715.331.092.272	981.003.223.346
80	Kab. Bengkalis	1.557.186.977.470	79.986.858.326	1.477.200.119.144	1.557.186.977.470
81	Kab. Indragiri Hilir	57.428.824.972	19.792.912.697	37.635.912.275	57.428.824.972
82	Kab. Indragiri Hulu	110.868.189.134	18.799.104.201	92.069.084.933	110.868.189.134
83	Kab. Kampar	270.745.785.676	21.553.081.215	249.192.704.461	270.745.785.676
84	Kab. Kuantan Singingi	38.208.474.577	16.405.314.180	21.803.160.397	38.208.474.577
85	Kab. Pelalawan	168.935.685.011	23.318.498.528	145.617.186.483	168.935.685.011
86	Kab. Rokan Hilir	294.726.192.858	21.370.073.572	273.356.119.286	294.726.192.858
87	Kab. Rokan Hulu	84.564.691.102	16.093.369.687	68.471.321.415	84.564.691.102
88	Kab. Siak	490.042.349.220	34.953.804.817	455.088.544.403	490.042.349.220
89	Kota Dumai	59.743.168.147	33.067.558.495	26.675.609.652	59.743.168.147
90	Kota Pekanbaru	120.049.175.746	96.984.577.678	23.064.598.068	120.049.175.746
91	Kab. Kepulauan Meranti	64.057.536.318	16.183.042.965	47.874.493.353	64.057.536.318
92	Provinsi Kepulauan Riau	226.149.055.393	162.549.800.821	63.599.254.572	226.149.055.393
93	Kab. Bintan	37.193.347.227	19.105.561.586	18.087.785.641	37.193.347.227
94	Kab. Natuna	142.343.623.000	15.375.191.731	126.968.431.269	142.343.623.000
95	Kab. Karimun	62.157.246.983	34.129.787.608	28.027.459.375	62.157.246.983
96	Kota Batam	133.152.297.409	113.388.204.808	19.764.092.601	133.152.297.409
97	Kab. Kepulauan Anambas	82.359.634.388	21.495.340.684	60.864.293.704	82.359.634.388
98	Kota Tanjung Pinang	38.106.506.817	25.627.167.506	12.479.339.311	38.106.506.817
99	Kab. Lingga	29.526.167.725	14.703.446.599	14.822.721.126	29.526.167.725
100	Provinsi Jambi	214.852.929.482	72.274.789.149	142.578.140.333	214.852.929.482
101	Kab. Batanghari	106.401.488.617	7.029.649.302	99.371.839.315	106.401.488.617
102	Kab. Bungo	38.548.645.644	9.237.518.917	29.311.126.727	38.548.645.644
103	Kab. Kerinci	12.512.386.183	3.774.319.564	8.738.066.619	12.512.386.183
104	Kab. Merangin	29.323.985.627	7.415.511.616	21.908.474.011	29.323.985.627
105	Kab. Muaro Jambi	106.513.211.937	8.507.291.164	98.005.920.773	106.513.211.937
106	Kab. Sarolangun	57.576.149.918	6.361.688.743	51.214.461.175	57.576.149.918
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	133.135.559.781	8.287.494.904	124.848.064.877	133.135.559.781
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	90.438.423.303	8.254.616.675	82.183.806.628	90.438.423.303
109	Kab. Tebo	46.994.093.335	6.424.637.290	40.569.456.045	46.994.093.335
110	Kota Jambi	76.954.611.316	34.940.080.869	42.014.530.447	76.954.611.316
111	Kota Sungai Penuh	13.479.019.839	8.179.371.102	5.299.648.737	13.479.019.839
112	Provinsi Sumatera Selatan	741.811.422.702	212.727.939.962	529.083.482.740	741.811.422.702
113	Kab. Lahat	90.449.423.287	14.730.160.826	75.719.262.461	90.449.423.287
114	Kab. Musi Banyuasin	720.809.138.047	22.812.777.328	697.996.360.719	720.809.138.047
115	Kab. Musi Rawas	169.824.152.900	9.076.513.235	160.747.639.665	169.824.152.900
116	Kab. Musi Rawas Utara	52.455.196.454	8.011.023.789	44.444.172.665	52.455.196.454
117	Kab. Muara Enim	524.739.980.110	28.888.821.672	495.851.158.438	524.739.980.110
118	Kab. Ogan Komering Ilir	54.314.881.611	16.286.766.955	38.028.114.656	54.314.881.611
119	Kab. Ogan Komering Ulu	93.334.123.526	12.186.005.543	81.148.117.983	93.334.123.526
120	Kota Palembang	124.561.189.317	113.044.113.052	11.517.076.265	124.561.189.317
121	Kota Pagar Alam	16.713.335.576	7.618.988.671	9.094.346.905	16.713.335.576
122	Kota Lubuk Linggau	20.779.953.508	12.784.119.010	7.995.834.498	20.779.953.508
123	Kota Prabumulih	96.147.555.785	15.472.484.485	80.675.071.300	96.147.555.785
124	Kab. Empat Lawang	17.576.021.047	7.767.107.787	9.808.913.260	17.576.021.047
125	Kab. Banyuasin	98.676.283.859	12.054.532.752	86.621.751.107	98.676.283.859
126	Kab. Ogan Ilir	74.710.003.155	11.566.568.474	63.143.434.681	74.710.003.155
127	Kab. OKU Timur	22.453.084.118	9.903.581.383	12.549.502.735	22.453.084.118
128	Kab. OKU Selatan	19.400.614.528	7.929.917.709	11.470.696.819	19.400.614.528
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	322.811.523.208	9.400.472.000	313.411.051.208	322.811.523.208
130	Provinsi Bangka Belitung	52.959.949.757	35.836.796.254	17.123.153.503	52.959.949.757
131	Kab. Bangka	28.544.266.706	8.280.154.844	20.264.111.862	28.544.266.706
132	Kab. Belitung	19.829.064.397	6.999.088.790	12.829.975.607	19.829.064.397
133	Kota Pangkal Pinang	23.856.365.388	15.998.733.759	7.857.631.629	23.856.365.388
134	Kab. Bangka Selatan	16.400.590.060	4.615.034.976	11.785.555.084	16.400.590.060
135	Kab. Bangka Tengah	18.155.552.334	6.191.321.905	11.964.230.429	18.155.552.334
136	Kab. Bangka Barat	24.804.063.129	6.844.906.002	17.959.157.127	24.804.063.129
137	Kab. Belitung Timur	20.043.570.128	4.986.557.335	15.057.012.793	20.043.570.128
138	Provinsi Bengkulu	55.005.969.540	40.505.730.270	14.500.239.270	55.005.969.540
139	Kab. Bengkulu Selatan	11.905.291.522	4.981.607.205	6.923.684.317	11.905.291.522
140	Kab. Bengkulu Utara	18.023.009.026	5.689.849.095	12.333.159.931	18.023.009.026
141	Kab. Rejang Lebong	13.460.217.527	6.079.775.949	7.380.441.578	13.460.217.527
142	Kota Bengkulu	28.156.967.332	21.304.286.553	6.852.680.779	28.156.967.332
143	Kab. Kaur	12.627.331.011	3.378.315.976	9.249.015.035	12.627.331.011
144	Kab. Seluma	15.224.483.567	4.199.750.156	11.024.733.411	15.224.483.567
145	Kab. Mukomuko	19.619.666.454	4.137.583.043	15.482.083.411	19.619.666.454
146	Kab. Lebong	12.951.627.777	3.415.486.088	9.536.141.689	12.951.627.777
147	Kab. Bengkulu Tengah	12.370.392.072	3.680.193.817	8.690.198.255	12.370.392.072
148	Kab. Kepahiang	11.443.111.294	3.891.747.472	7.551.363.822	11.443.111.294
149	Provinsi Lampung	154.364.082.759	116.144.912.405	38.219.170.354	154.364.082.759
150	Kab. Lampung Barat	13.732.736.835	6.607.879.902	7.124.856.933	13.732.736.835
151	Kab. Lampung Selatan	27.145.015.049	13.594.605.514	13.550.409.535	27.145.015.049
152	Kab. Lampung Tengah	43.078.202.888	17.132.927.567	25.945.275.321	43.078.202.888

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
153	Kab. Lampung Utara	24.709.872.258	11.402.124.827	13.307.747.431	24.709.872.258
154	Kab. Lampung Timur	45.008.537.635	11.272.014.967	33.736.522.668	45.008.537.635
155	Kab. Tanggamus	30.899.528.050	9.022.964.603	21.876.563.447	30.899.528.050
156	Kab. Tulang Bawang	27.244.269.757	9.167.572.968	18.076.696.789	27.244.269.757
157	Kab. Way Kanan	23.085.485.240	7.347.986.782	15.737.498.458	23.085.485.240
158	Kab. Pesawaran	16.557.337.282	7.664.653.657	8.892.683.625	16.557.337.282
159	Kab. Pesisir Barat	12.298.445.485	4.929.044.661	7.369.400.824	12.298.445.485
160	Kab. Pringsewu	14.432.460.393	7.736.048.784	6.696.411.609	14.432.460.393
161	Kab. Mesuji	21.385.029.126	5.044.398.473	16.340.630.653	21.385.029.126
162	Kab. Tulang Bawang Barat	13.320.090.268	5.313.945.769	8.006.144.499	13.320.090.268
163	Kota Bandar Lampung	56.449.861.704	47.501.165.373	8.948.696.331	56.449.861.704
164	Kota Metro	18.171.286.270	10.647.377.708	7.523.908.562	18.171.286.270
165	Provinsi DKI Jakarta	16.613.945.754.340	16.487.244.145.642	126.701.608.698	16.613.945.754.340
166	Provinsi Jawa Barat	1.518.377.214.531	1.348.916.792.674	169.460.421.857	1.518.377.214.531
167	Kab. Bandung	140.501.445.649	73.964.607.370	66.536.838.279	140.501.445.649
168	Kab. Bekasi	390.397.405.290	323.068.391.580	67.329.013.710	390.397.405.290
169	Kab. Bogor	189.836.075.646	123.084.198.014	66.751.877.632	189.836.075.646
170	Kab. Ciamis	47.686.369.077	36.283.700.981	11.402.668.096	47.686.369.077
171	Kab. Cianjur	59.831.138.430	39.623.919.761	20.207.218.669	59.831.138.430
172	Kab. Cirebon	69.336.422.699	46.765.859.431	22.570.563.268	69.336.422.699
173	Kab. Garut	93.521.440.995	39.362.270.242	54.159.170.753	93.521.440.995
174	Kab. Indramayu	177.487.290.363	52.436.208.974	125.051.081.389	177.487.290.363
175	Kab. Karawang	222.157.826.776	161.127.488.937	61.030.337.839	222.157.826.776
176	Kab. Kuningan	46.240.177.018	34.432.850.371	11.807.326.647	46.240.177.018
177	Kab. Majalengka	61.521.506.479	34.812.495.150	26.709.011.329	61.521.506.479
178	Kab. Pangandaran	35.552.738.517	27.718.196.142	7.834.542.375	35.552.738.517
179	Kab. Purwakarta	79.996.436.945	68.555.833.613	11.440.603.332	79.996.436.945
180	Kab. Subang	125.065.404.061	44.806.499.847	80.258.904.214	125.065.404.061
181	Kab. Sukabumi	87.422.292.472	44.210.265.711	43.212.026.761	87.422.292.472
182	Kab. Sumedang	58.553.799.251	47.174.900.297	11.378.898.954	58.553.799.251
183	Kab. Tasikmalaya	47.348.566.039	33.005.646.967	14.342.919.072	47.348.566.039
184	Kab. Bandung Barat	64.752.760.466	53.000.621.406	11.752.139.060	64.752.760.466
185	Kota Bandung	313.092.077.979	299.681.624.659	13.410.453.320	313.092.077.979
186	Kota Bekasi	124.373.039.030	110.254.428.901	14.118.610.129	124.373.039.030
187	Kota Bogor	71.373.092.438	63.030.506.538	8.342.585.900	71.373.092.438
188	Kota Cirebon	54.182.024.181	44.536.237.269	9.645.786.912	54.182.024.181
189	Kota Depok	87.001.528.000	75.781.289.981	11.220.238.019	87.001.528.000
190	Kota Sukabumi	39.994.546.602	34.200.376.505	5.794.170.097	39.994.546.602
191	Kota Cimahi	50.471.686.667	44.014.898.259	6.456.788.408	50.471.686.667
192	Kota Tasikmalaya	48.947.353.038	40.703.704.216	8.243.648.822	48.947.353.038
193	Kota Banjar	35.998.697.917	27.738.167.484	8.260.530.433	35.998.697.917
194	Provinsi Banten	670.713.912.286	654.734.919.154	15.978.993.132	670.713.912.286
195	Kab. Lebak	71.995.355.987	55.014.513.508	16.980.842.479	71.995.355.987
196	Kab. Pandeglang	70.022.566.223	55.742.912.792	14.279.653.431	70.022.566.223
197	Kab. Serang	91.339.370.668	77.804.236.818	13.535.133.850	91.339.370.668
198	Kab. Tangerang	200.448.829.662	184.745.617.252	15.703.212.410	200.448.829.662
199	Kota Cilegon	121.417.166.352	114.990.836.064	6.426.330.288	121.417.166.352
200	Kota Tangerang	266.156.515.001	254.753.157.882	11.403.357.119	266.156.515.001
201	Kota Serang	75.775.006.792	69.184.513.742	6.590.493.050	75.775.006.792
202	Kota Tangerang Selatan	178.378.911.338	169.866.589.625	8.512.321.713	178.378.911.338
203	Provinsi Jawa Tengah	762.236.396.745	676.623.127.813	85.613.268.932	762.236.396.745
204	Kab. Banjarnegara	31.320.338.906	17.687.243.802	13.633.095.104	31.320.338.906
205	Kab. Banyumas	48.252.382.823	32.842.865.490	15.409.517.333	48.252.382.823
206	Kab. Batang	29.606.564.529	16.996.971.298	12.609.593.231	29.606.564.529
207	Kab. Blora	96.810.605.962	19.184.481.816	77.626.124.146	96.810.605.962
208	Kab. Boyolali	30.217.544.985	20.183.835.156	10.033.709.829	30.217.544.985
209	Kab. Brebes	33.895.597.568	16.697.847.491	17.197.750.077	33.895.597.568
210	Kab. Cilacap	71.263.180.771	47.823.034.720	23.440.146.051	71.263.180.771
211	Kab. Demak	34.294.401.049	19.748.447.880	14.545.953.169	34.294.401.049
212	Kab. Grobogan	42.487.039.768	18.485.620.711	24.001.419.057	42.487.039.768
213	Kab. Jepara	37.947.331.618	24.123.854.762	13.823.476.856	37.947.331.618
214	Kab. Karanganyar	32.016.928.650	22.344.043.841	9.672.884.809	32.016.928.650
215	Kab. Kebumen	35.576.183.074	23.700.041.637	11.876.141.437	35.576.183.074
216	Kab. Kendal	34.805.833.387	19.442.781.832	15.363.051.555	34.805.833.387
217	Kab. Klaten	35.171.855.434	25.282.410.986	9.889.444.448	35.171.855.434
218	Kab. Kudus	102.732.158.717	90.735.492.733	11.996.665.984	102.732.158.717
219	Kab. Magelang	34.142.385.809	24.022.658.669	10.119.727.140	34.142.385.809
220	Kab. Pati	37.557.892.527	23.054.889.630	14.503.002.897	37.557.892.527
221	Kab. Pekalongan	26.645.447.597	14.802.931.416	11.842.516.181	26.645.447.597
222	Kab. Pemalang	30.752.160.610	16.978.934.166	13.773.226.444	30.752.160.610
223	Kab. Purbalingga	26.566.730.895	17.215.791.171	9.350.939.724	26.566.730.895
224	Kab. Purworejo	27.211.987.351	18.372.273.958	8.839.713.393	27.211.987.351
225	Kab. Rembang	29.635.280.971	17.249.977.715	12.385.303.256	29.635.280.971
226	Kab. Semarang	40.511.835.657	29.456.436.547	11.055.399.110	40.511.835.657
227	Kab. Sragen	29.004.358.149	19.259.759.239	9.744.598.910	29.004.358.149
228	Kab. Sukoharjo	37.537.443.536	28.957.456.518	8.579.987.018	37.537.443.536

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPh Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
229	Kab. Tegal	35.084.327.546	22.109.421.675	12.974.905.871	35.084.327.546
230	Kab. Temanggung	27.192.154.529	18.405.946.130	8.786.208.399	27.192.154.529
231	Kab. Wonogiri	28.275.827.079	18.019.734.772	10.256.092.307	28.275.827.079
232	Kab. Wonosobo	28.315.456.781	15.272.656.183	13.042.800.598	28.315.456.781
233	Kota Magelang	23.084.630.809	18.238.915.357	4.845.715.452	23.084.630.809
234	Kota Pekalongan	24.265.598.594	18.192.888.531	6.072.710.063	24.265.598.594
235	Kota Salatiga	22.677.661.450	17.546.230.294	5.131.431.156	22.677.661.450
236	Kota Semarang	198.870.674.943	186.323.203.679	12.547.471.264	198.870.674.943
237	Kota Surakarta	58.985.316.765	52.608.325.257	6.376.991.508	58.985.316.765
238	Kota Tegal	28.928.908.384	23.567.286.907	5.361.621.477	28.928.908.384
239	Provinsi DI Yogyakarta	119.495.565.863	114.377.521.796	5.118.044.067	119.495.565.863
240	Kab. Bantul	35.424.323.507	26.959.611.798	8.464.711.709	35.424.323.507
241	Kab. Gunung kidul	29.335.711.085	20.887.244.390	8.448.466.695	29.335.711.085
242	Kab. Kulon Progo	26.889.991.163	20.335.275.224	6.554.715.939	26.889.991.163
243	Kab. Sleman	64.995.802.370	55.764.789.405	9.231.012.965	64.995.802.370
244	Kota Yogyakarta	53.511.994.690	47.619.362.762	5.892.631.928	53.511.994.690
245	Provinsi Jawa Timur	1.094.513.076.639	930.866.769.725	163.646.306.914	1.094.513.076.639
246	Kab. Bangkalan	42.404.960.344	17.071.400.352	25.333.559.992	42.404.960.344
247	Kab. Banyuwangi	52.772.150.742	27.905.384.838	24.866.765.904	52.772.150.742
248	Kab. Blitar	34.082.271.408	21.032.640.630	13.049.630.778	34.082.271.408
249	Kab. Bojonegoro	233.245.826.410	33.893.590.418	199.352.235.992	233.245.826.410
250	Kab. Bondowoso	28.233.145.492	17.057.889.565	11.175.255.927	28.233.145.492
251	Kab. Gresik	126.218.472.420	85.070.395.199	41.148.077.221	126.218.472.420
252	Kab. Jember	64.805.410.481	35.012.413.020	29.792.997.461	64.805.410.481
253	Kab. Jombang	39.627.058.114	24.178.152.455	15.448.905.659	39.627.058.114
254	Kab. Kediri	42.772.066.584	24.456.133.524	18.315.933.060	42.772.066.584
255	Kab. Lamongan	39.848.480.074	21.931.812.344	17.916.667.730	39.848.480.074
256	Kab. Lumajang	31.648.368.910	18.327.326.286	13.321.042.624	31.648.368.910
257	Kab. Madiun	27.482.053.054	16.934.364.562	10.547.688.492	27.482.053.054
258	Kab. Magetan	28.159.441.430	20.113.620.008	8.045.821.422	28.159.441.430
259	Kab. Malang	59.242.818.475	34.784.097.180	24.458.721.295	59.242.818.475
260	Kab. Mojokerto	44.268.269.656	27.992.089.340	16.276.180.316	44.268.269.656
261	Kab. Nganjuk	34.770.653.996	21.224.221.088	13.546.432.908	34.770.653.996
262	Kab. Ngawi	31.562.646.553	19.271.986.232	12.290.660.321	31.562.646.553
263	Kab. Pacitan	25.627.020.938	17.169.355.910	8.457.665.028	25.627.020.938
264	Kab. Pamekasan	32.924.019.622	19.418.277.593	13.505.742.029	32.924.019.622
265	Kab. Pasuruan	68.208.070.793	50.349.867.600	17.858.203.193	68.208.070.793
266	Kab. Ponorogo	34.270.214.836	21.995.102.133	12.275.112.703	34.270.214.836
267	Kab. Probolinggo	37.130.234.631	22.388.345.096	14.741.889.535	37.130.234.631
268	Kab. Sampang	32.355.852.920	15.011.912.937	17.343.939.983	32.355.852.920
269	Kab. Sidoarjo	117.729.909.515	88.620.600.849	29.109.308.666	117.729.909.515
270	Kab. Situbondo	30.439.949.513	18.322.195.169	12.117.754.344	30.439.949.513
271	Kab. Sumenep	59.898.165.109	17.886.741.584	42.011.423.525	59.898.165.109
272	Kab. Trenggalek	29.297.923.277	18.038.095.906	11.259.827.371	29.297.923.277
273	Kab. Tuban	76.286.563.762	27.373.442.200	48.913.121.562	76.286.563.762
274	Kab. Tulungagung	35.358.061.939	24.313.455.783	11.044.606.156	35.358.061.939
275	Kota Blitar	23.881.106.117	18.645.053.389	5.236.052.728	23.881.106.117
276	Kota Kediri	39.445.533.679	33.939.677.682	5.505.855.997	39.445.533.679
277	Kota Madiun	30.473.034.865	25.150.616.916	5.322.417.949	30.473.034.865
278	Kota Malang	69.024.129.223	61.337.027.804	7.687.101.419	69.024.129.223
279	Kota Mojokerto	24.055.190.180	18.356.649.581	5.698.540.599	24.055.190.180
280	Kota Pasuruan	20.514.132.108	14.531.690.476	5.982.441.632	20.514.132.108
281	Kota Probolinggo	28.368.423.458	20.597.207.241	7.771.216.217	28.368.423.458
282	Kota Surabaya	398.041.023.527	382.026.284.429	16.014.739.098	398.041.023.527
283	Kota Batu	21.190.515.224	14.571.034.509	6.619.480.715	21.190.515.224
284	Provinsi Kalimantan Barat	160.431.064.752	99.699.878.204	60.731.186.548	160.431.064.752
285	Kab. Bengkayang	25.597.841.967	6.578.971.859	19.018.870.108	25.597.841.967
286	Kab. Landak	25.009.541.577	6.274.546.586	18.734.994.991	25.009.541.577
287	Kab. Kapuas Hulu	32.308.016.151	9.092.286.987	23.215.729.164	32.308.016.151
288	Kab. Ketapang	89.662.777.203	14.543.808.940	75.118.968.263	89.662.777.203
289	Kab. Mempawah	19.018.725.519	10.485.610.039	8.533.115.480	19.018.725.519
290	Kab. Sambas	26.008.162.692	9.015.420.024	16.992.742.668	26.008.162.692
291	Kab. Sanggau	38.325.217.734	10.884.564.856	27.440.652.878	38.325.217.734
292	Kab. Sintang	40.400.262.217	8.780.649.279	31.619.612.938	40.400.262.217
293	Kota Pontianak	46.453.732.725	38.220.575.110	8.233.157.615	46.453.732.725
294	Kota Singkawang	15.994.420.180	9.070.746.906	6.923.673.274	15.994.420.180
295	Kab. Kayong Utara	16.315.002.268	4.571.762.833	11.743.239.435	16.315.002.268
296	Kab. Kubu Raya	30.140.565.742	11.321.318.303	18.819.247.439	30.140.565.742
297	Kab. Sekadau	20.343.178.647	6.106.877.824	14.236.300.823	20.343.178.647
298	Kab. Melawi	22.283.879.856	4.863.320.981	17.420.558.875	22.283.879.856
299	Provinsi Kalimantan Tengah	148.779.095.759	73.474.979.899	75.304.115.860	148.779.095.759
300	Kab. Barito Selatan	24.328.051.008	5.444.232.921	18.883.818.087	24.328.051.008
301	Kab. Barito Utara	41.067.096.766	6.565.387.513	34.501.709.253	41.067.096.766
302	Kab. Kapuas	51.814.492.799	8.496.451.864	43.318.040.935	51.814.492.799
303	Kab. Kotawaringin Barat	61.531.895.313	13.992.048.690	47.539.846.623	61.531.895.313
304	Kab. Kotawaringin Timur	71.386.011.106	17.556.978.446	53.829.032.660	71.386.011.106

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
305	Kota Palangkaraya	27.654.410.915	20.822.932.882	6.831.478.033	27.654.410.915
306	Kab. Barito Timur	25.827.052.292	7.030.519.679	18.796.532.613	25.827.052.292
307	Kab. Murung Raya	48.212.483.155	6.138.916.067	42.073.567.088	48.212.483.155
308	Kab. Pulang Pisau	18.074.784.468	4.373.712.011	13.701.072.457	18.074.784.468
309	Kab. Gunung Mas	27.576.600.858	4.650.365.069	22.926.235.789	27.576.600.858
310	Kab. Lamandau	22.263.375.524	4.292.807.273	17.970.568.251	22.263.375.524
311	Kab. Sukamara	17.047.453.444	3.561.975.456	13.485.477.988	17.047.453.444
312	Kab. Katingan	20.067.387.915	4.513.713.228	15.553.674.687	20.067.387.915
313	Kab. Seruyan	37.441.189.542	4.997.151.868	32.444.037.674	37.441.189.542
314	Provinsi Kalimantan Selatan	193.146.285.372	119.199.305.604	73.946.979.768	193.146.285.372
315	Kab. Banjar	33.575.052.327	12.744.582.988	20.830.469.339	33.575.052.327
316	Kab. Barito Kuala	20.198.648.778	7.956.778.064	12.241.870.714	20.198.648.778
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	33.415.418.694	7.832.481.250	25.582.937.444	33.415.418.694
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	17.775.889.314	8.934.778.737	8.841.110.577	17.775.889.314
319	Kab. Hulu Sungai Utara	17.724.053.029	7.470.763.112	10.253.289.917	17.724.053.029
320	Kab. Kotabaru	73.302.149.694	14.941.045.294	58.361.104.400	73.302.149.694
321	Kab. Tabalong	76.861.736.551	13.828.954.360	63.032.782.191	76.861.736.551
322	Kab. Tanah Laut	46.428.581.386	11.370.529.326	35.058.052.060	46.428.581.386
323	Kab. Tapin	53.383.388.080	8.679.329.151	44.704.058.929	53.383.388.080
324	Kota Banjarbaru	21.304.907.334	14.574.922.642	6.729.984.692	21.304.907.334
325	Kota Banjarmasin	54.337.330.813	46.684.405.444	7.652.925.369	54.337.330.813
326	Kab. Balangan	31.721.707.095	9.107.082.386	22.614.624.709	31.721.707.095
327	Kab. Tanah Bumbu	63.350.998.343	14.673.306.952	48.677.691.391	63.350.998.343
328	Provinsi Kalimantan Timur	860.619.584.634	388.298.454.876	472.321.129.758	860.619.584.634
329	Kab. Berau	122.448.080.879	38.446.051.706	84.002.029.173	122.448.080.879
330	Kab. Kutai Kartanegara	1.286.872.751.803	76.709.552.867	1.210.163.198.936	1.286.872.751.803
331	Kab. Kutai Barat	91.695.174.082	27.493.543.173	64.201.630.909	91.695.174.082
332	Kab. Kutai Timur	253.183.981.798	60.016.939.428	193.167.042.370	253.183.981.798
333	Kab. Mahakam Ulu	36.682.083.063	22.003.822.215	14.678.260.848	36.682.083.063
334	Kab. Pasir	109.269.321.928	35.079.273.352	74.190.048.576	109.269.321.928
335	Kota Balikpapan	160.237.417.439	142.604.622.939	17.632.794.500	160.237.417.439
336	Kota Bontang	237.538.659.393	78.406.761.701	159.131.897.692	237.538.659.393
337	Kota Samarinda	125.030.480.187	76.461.763.698	48.568.716.489	125.030.480.187
338	Kab. Penajam Paser Utara	103.682.072.800	25.225.350.187	78.456.722.613	103.682.072.800
339	Provinsi Kalimantan Utara	99.832.480.200	30.081.552.035	69.750.928.165	99.832.480.200
340	Kab. Bulungan	96.312.422.781	11.843.115.672	84.469.307.109	96.312.422.781
341	Kab. Malinau	44.807.100.707	6.271.318.658	38.535.782.049	44.807.100.707
342	Kab. Nunukan	81.292.068.057	6.730.233.549	74.561.834.508	81.292.068.057
343	Kab. Tana Tidung	26.459.825.098	5.144.055.505	21.315.769.593	26.459.825.098
344	Kota Tarakan	98.213.716.324	15.133.603.919	83.080.112.405	98.213.716.324
345	Provinsi Sulawesi Utara	94.700.165.938	79.027.661.518	15.672.504.420	94.700.165.938
346	Kab. Bolaang Mongondow	12.763.594.047	4.149.006.576	8.614.587.471	12.763.594.047
347	Kab. Minahasa	18.544.796.940	8.067.580.866	10.477.216.074	18.544.796.940
348	Kab. Sangihe	11.550.887.519	5.895.065.539	5.655.821.980	11.550.887.519
349	Kota Bitung	15.168.747.641	8.168.283.525	7.000.464.116	15.168.747.641
350	Kota Manado	48.336.158.836	41.865.424.249	6.470.734.587	48.336.158.836
351	Kab. Kepulauan Talaud	11.058.459.939	3.807.474.477	7.250.985.462	11.058.459.939
352	Kab. Minahasa Selatan	12.766.440.956	5.483.594.742	7.282.846.214	12.766.440.956
353	Kab. Minahasa Tenggara	11.330.542.203	4.445.972.205	6.884.569.998	11.330.542.203
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	9.920.973.302	4.001.112.704	5.919.860.598	9.920.973.302
355	Kota Kotamubagu	12.292.869.442	6.198.427.675	6.094.441.767	12.292.869.442
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	11.765.354.715	4.110.675.274	7.654.679.441	11.765.354.715
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	11.200.206.096	3.416.735.178	7.783.470.918	11.200.206.096
358	Kota Tomohon	18.419.295.040	5.831.291.403	12.588.003.637	18.419.295.040
359	Kab. Minahasa Utara	20.722.334.997	9.381.419.727	11.340.915.270	20.722.334.997
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	10.836.354.153	3.719.429.814	7.116.924.339	10.836.354.153
361	Provinsi Gorontalo	26.290.111.386	20.792.358.883	5.497.752.503	26.290.111.386
362	Kab. Boalemo	10.722.140.297	3.551.066.475	7.171.073.822	10.722.140.297
363	Kab. Gorontalo	13.357.635.206	6.187.332.306	7.170.302.900	13.357.635.206
364	Kota Gorontalo	15.965.514.267	10.517.197.896	5.448.316.371	15.965.514.267
365	Kab. Pohuwato	12.197.881.540	3.420.860.702	8.777.020.838	12.197.881.540
366	Kab. Gorontalo Utara	10.995.701.171	3.481.685.337	7.514.015.834	10.995.701.171
367	Kab. Bone Bolango	11.943.064.723	4.030.396.782	7.912.667.941	11.943.064.723
368	Provinsi Sulawesi Tengah	74.489.440.342	48.131.642.927	26.357.797.415	74.489.440.342
369	Kab. Banggai	61.147.374.039	9.420.726.916	51.726.647.123	61.147.374.039
370	Kab. Banggai Laut	8.727.634.172	2.968.946.885	5.758.687.287	8.727.634.172
371	Kab. Banggai Kepulauan	10.164.283.959	2.638.982.160	7.525.301.799	10.164.283.959
372	Kab. Buol	13.848.932.910	3.280.283.910	10.568.649.000	13.848.932.910
373	Kab. Toli-Toli	12.757.289.506	4.496.872.781	8.260.416.725	12.757.289.506
374	Kab. Donggala	14.840.805.718	4.089.569.322	10.751.236.396	14.840.805.718
375	Kab. Morowali	18.640.736.379	3.743.280.681	14.897.455.698	18.640.736.379
376	Kab. Morowali Utara	19.263.695.277	3.494.495.757	15.769.199.520	19.263.695.277
377	Kab. Poso	15.572.798.369	4.780.648.895	10.792.149.474	15.572.798.369
378	Kota Palu	27.415.613.393	21.020.647.893	6.394.965.500	27.415.613.393
379	Kab. Parigi Moutong	14.490.269.418	4.736.050.946	9.754.218.472	14.490.269.418
380	Kab. Sigi	11.782.537.798	4.120.504.508	7.662.033.290	11.782.537.798

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
381	Kab. Tojo Una Una	12.874.246.256	3.495.064.061	9.379.182.195	12.874.246.256
382	Provinsi Sulawesi Selatan	275.203.036.052	231.842.564.587	43.360.471.465	275.203.036.052
383	Kab. Bantaeng	15.329.451.028	7.366.710.265	7.962.740.763	15.329.451.028
384	Kab. Barru	14.734.718.828	7.045.995.087	7.688.723.741	14.734.718.828
385	Kab. Bone	32.194.666.960	14.086.310.160	18.108.356.800	32.194.666.960
386	Kab. Bulukumba	19.857.870.301	10.482.819.261	9.375.051.040	19.857.870.301
387	Kab. Enrekang	16.656.491.076	7.457.800.306	9.198.690.770	16.656.491.076
388	Kab. Gowa	22.047.981.328	12.142.007.824	9.905.973.504	22.047.981.328
389	Kab. Jeneponto	17.527.164.524	8.824.246.723	8.702.917.801	17.527.164.524
390	Kab. Luwu	17.132.481.274	9.090.824.088	8.041.657.186	17.132.481.274
391	Kab. Luwu Utara	18.816.717.851	7.982.261.566	10.834.456.285	18.816.717.851
392	Kab. Maros	22.818.072.763	13.495.972.744	9.322.100.019	22.818.072.763
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	29.656.891.273	17.438.983.627	12.217.907.646	29.656.891.273
394	Kab. Pinrang	17.299.917.816	8.955.494.298	8.344.423.518	17.299.917.816
395	Kab. Selayar	14.528.534.479	6.477.057.133	8.051.477.346	14.528.534.479
396	Kab. Sidenreng Rappang	18.551.011.271	8.523.873.060	10.027.138.211	18.551.011.271
397	Kab. Sinjai	15.881.527.558	8.383.935.439	7.497.592.119	15.881.527.558
398	Kab. Soppeng	16.442.050.847	8.651.966.786	7.790.084.061	16.442.050.847
399	Kab. Takalar	17.837.820.818	8.600.748.922	9.237.071.896	17.837.820.818
400	Kab. Tana Toraja	15.424.272.795	8.679.821.349	6.744.451.446	15.424.272.795
401	Kab. Wajo	52.066.482.183	10.682.813.348	41.383.668.835	52.066.482.183
402	Kota Pare-pare	18.885.757.810	12.495.604.490	6.390.153.320	18.885.757.810
403	Kab. Toraja Utara	13.691.934.474	7.342.881.701	6.349.052.773	13.691.934.474
404	Kota Makassar	129.795.256.995	118.630.429.684	11.164.827.311	129.795.256.995
405	Kota Palopo	17.449.842.287	11.312.662.319	6.137.179.968	17.449.842.287
406	Kab. Luwu Timur	38.020.094.272	18.439.454.739	19.580.639.533	38.020.094.272
407	Provinsi Sulawesi Barat	28.355.985.375	17.058.896.575	11.297.088.800	28.355.985.375
408	Kab. Majene	13.106.534.344	3.902.328.206	9.204.206.138	13.106.534.344
409	Kab. Mamuju	19.674.058.145	6.828.861.943	12.845.196.202	19.674.058.145
410	Kab. Mamuju Tengah	13.549.447.890	2.606.624.714	10.942.823.176	13.549.447.890
411	Kab. Polewali Mandar	15.281.069.262	6.189.017.256	9.092.052.006	15.281.069.262
412	Kab. Mamasa	11.034.133.655	2.364.119.244	8.670.014.411	11.034.133.655
413	Kab. Mamuju Utara	21.143.034.658	3.821.801.836	17.321.232.822	21.143.034.658
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	61.508.595.181	45.285.026.018	16.223.569.163	61.508.595.181
415	Kab. Buton	9.452.907.863	3.162.191.688	6.290.716.175	9.452.907.863
416	Kab. Konawe	11.941.477.916	3.949.160.370	7.992.317.546	11.941.477.916
417	Kab. Konawe Kepulauan	6.442.253.382	1.242.759.562	5.199.493.820	6.442.253.382
418	Kab. Kolaka	17.317.840.858	7.118.988.128	10.198.852.730	17.317.840.858
419	Kab. Kolaka Timur	8.238.961.396	1.658.096.710	6.580.864.686	8.238.961.396
420	Kab. Muna	10.888.566.177	4.578.812.635	6.309.753.542	10.888.566.177
421	Kota Kendari	26.885.481.865	19.891.196.461	6.994.285.404	26.885.481.865
422	Kota Bau-bau	13.781.877.003	6.302.218.605	7.479.658.398	13.781.877.003
423	Kab. Konawe Selatan	17.317.264.597	3.764.652.596	13.552.612.001	17.317.264.597
424	Kab. Bombana	11.719.881.500	2.562.190.993	9.157.690.507	11.719.881.500
425	Kab. Konawe Utara	15.801.778.546	1.738.230.936	14.063.547.610	15.801.778.546
426	Kab. Buton Utara	8.573.564.112	2.300.782.080	6.272.782.032	8.573.564.112
427	Kab. Wakatobi	10.097.988.374	2.645.030.435	7.452.957.939	10.097.988.374
428	Kab. Kolaka Utara	11.490.377.406	2.016.272.196	9.474.105.210	11.490.377.406
429	Kab. Muna Barat	7.055.135.388	1.867.176.795	5.187.958.593	7.055.135.388
430	Kab. Buton Tengah	7.873.596.847	1.851.484.922	6.022.111.925	7.873.596.847
431	Kab. Buton Selatan	7.781.087.846	1.469.513.556	6.311.574.290	7.781.087.846
432	Provinsi Bali	197.127.682.110	190.411.853.237	6.715.828.873	197.127.682.110
433	Kab. Badung	79.449.051.563	73.317.479.546	6.131.572.017	79.449.051.563
434	Kab. Bangli	20.990.016.425	14.683.554.747	6.306.461.678	20.990.016.425
435	Kab. Buleleng	31.084.651.763	23.353.128.927	7.731.522.836	31.084.651.763
436	Kab. Gianyar	29.165.851.790	22.870.240.116	6.295.611.674	29.165.851.790
437	Kab. Jembrana	22.158.643.348	15.566.860.765	6.591.782.583	22.158.643.348
438	Kab. Karangasem	25.005.437.247	17.863.104.565	7.142.332.682	25.005.437.247
439	Kab. Klungkung	21.965.082.458	16.298.252.328	5.666.830.130	21.965.082.458
440	Kab. Tabanan	26.766.539.456	20.317.960.197	6.448.579.259	26.766.539.456
441	Kota Denpasar	89.014.527.560	81.347.198.839	7.667.328.721	89.014.527.560
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	114.636.556.087	99.728.620.200	14.907.935.887	114.636.556.087
443	Kab. Bima	17.896.602.021	9.180.368.260	8.716.233.761	17.896.602.021
444	Kab. Dompu	16.004.251.760	8.410.154.195	7.594.097.565	16.004.251.760
445	Kab. Lombok Barat	18.835.922.697	11.187.237.108	7.648.685.589	18.835.922.697
446	Kab. Lombok Tengah	22.788.475.916	13.070.587.277	9.717.888.639	22.788.475.916
447	Kab. Lombok Timur	22.303.108.515	11.710.243.735	10.592.864.780	22.303.108.515
448	Kab. Sumbawa	29.214.497.714	11.187.409.050	18.027.088.664	29.214.497.714
449	Kota Mataram	43.051.307.905	36.480.445.281	6.570.862.624	43.051.307.905
450	Kab. Lombok Utara	12.556.246.115	6.747.981.327	5.808.264.788	12.556.246.115
451	Kota Bima	19.066.638.235	11.898.899.422	7.167.738.813	19.066.638.235
452	Kab. Sumbawa Barat	47.667.675.274	30.778.483.442	16.889.191.832	47.667.675.274
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	88.921.969.344	70.646.473.042	18.275.496.302	88.921.969.344
454	Kab. Alor	11.065.568.842	3.786.269.058	7.279.299.784	11.065.568.842
455	Kab. Belu	11.130.201.593	5.355.193.570	5.775.008.023	11.130.201.593
456	Kab. Ende	13.540.838.383	5.998.782.508	7.542.055.875	13.540.838.383

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
457	Kab. Flores Timur	11.858.944.001	4.118.057.258	7.740.886.743	11.858.944.001
458	Kab. Kupang	11.838.158.726	4.081.182.043	7.756.976.683	11.838.158.726
459	Kab. Lembata	9.872.791.500	3.286.073.423	6.586.718.077	9.872.791.500
460	Kab. Malaka	8.266.162.776	2.603.844.078	5.662.318.698	8.266.162.776
461	Kab. Manggarai	13.703.345.861	6.287.274.295	7.416.071.566	13.703.345.861
462	Kab. Ngada	9.466.144.405	3.318.795.961	6.147.348.444	9.466.144.405
463	Kab. Sikka	13.489.353.072	6.326.432.061	7.162.921.011	13.489.353.072
464	Kab. Sumba Barat	9.337.307.120	3.334.624.972	6.002.682.148	9.337.307.120
465	Kab. Sumba Timur	14.284.664.200	4.799.858.050	9.484.806.150	14.284.664.200
466	Kab. Timor Tengah Selatan	13.481.264.796	4.691.879.635	8.789.385.161	13.481.264.796
467	Kab. Timor Tengah Utara	11.509.045.225	3.847.877.344	7.661.167.881	11.509.045.225
468	Kota Kupang	31.874.742.490	25.809.849.445	6.064.893.045	31.874.742.490
469	Kab. Rote Ndao	10.181.798.634	3.116.072.600	7.065.726.034	10.181.798.634
470	Kab. Nagekeo	9.230.740.214	2.628.644.990	6.602.095.224	9.230.740.214
471	Kab. Sumba Tengah	8.552.589.892	2.060.541.060	6.492.048.832	8.552.589.892
472	Kab. Sumba Barat Daya	10.178.694.724	2.976.264.013	7.202.430.711	10.178.694.724
473	Kab. Manggarai Timur	8.364.492.954	1.671.831.451	6.692.661.503	8.364.492.954
474	Kab. Sabu Raijua	7.203.473.314	2.162.002.098	5.041.471.216	7.203.473.314
475	Kab. Manggarai Barat	10.980.046.382	3.711.752.147	7.268.294.235	10.980.046.382
476	Provinsi Maluku	64.375.676.039	39.155.756.068	25.219.919.971	64.375.676.039
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	16.261.812.951	6.279.299.472	9.982.513.479	16.261.812.951
478	Kab. Maluku Tengah	20.566.754.211	5.392.544.892	15.174.209.319	20.566.754.211
479	Kab. Maluku Tenggara	13.230.885.146	4.376.833.917	8.854.051.229	13.230.885.146
480	Kab. Pulau Buru	12.641.168.779	3.046.764.164	9.594.404.615	12.641.168.779
481	Kota Ambon	32.125.821.191	24.487.998.937	7.637.822.254	32.125.821.191
482	Kab. Seram Bagian Barat	13.660.396.527	3.418.011.463	10.242.385.064	13.660.396.527
483	Kab. Seram Bagian Timur	43.718.537.567	2.528.577.233	41.189.960.334	43.718.537.567
484	Kab. Maluku Barat Daya	11.993.653.415	2.265.724.629	9.727.928.786	11.993.653.415
485	Kab. Buru Selatan	11.213.633.002	2.107.696.656	9.105.936.346	11.213.633.002
486	Kab. Kepulauan Aru	14.575.505.585	2.617.779.376	11.957.726.209	14.575.505.585
487	Kota Tual	8.576.162.438	2.212.403.583	6.363.758.855	8.576.162.438
488	Provinsi Maluku Utara	48.384.508.593	29.103.914.026	19.280.594.567	48.384.508.593
489	Kab. Halmahera Tengah	14.035.568.692	2.434.240.204	11.601.328.488	14.035.568.692
490	Kab. Halmahera Barat	12.351.332.182	2.455.510.826	9.895.821.356	12.351.332.182
491	Kota Ternate	23.400.398.837	12.420.785.485	10.979.613.352	23.400.398.837
492	Kab. Halmahera Timur	22.392.303.297	1.857.447.053	20.534.856.244	22.392.303.297
493	Kota Tidore Kepulauan	12.043.191.632	3.452.627.967	8.590.563.665	12.043.191.632
494	Kab. Kepulauan Sula	12.828.580.694	2.659.780.108	10.168.800.586	12.828.580.694
495	Kab. Pulau Morotai	9.124.046.013	1.974.356.158	7.149.689.855	9.124.046.013
496	Kab. Pulau Taliabu	8.643.236.699	1.691.637.113	6.951.599.586	8.643.236.699
497	Kab. Halmahera Selatan	20.381.410.240	3.335.523.945	17.045.886.295	20.381.410.240
498	Kab. Halmahera Utara	28.012.361.927	13.047.370.110	14.964.991.817	28.012.361.927
499	Provinsi Papua	340.019.401.186	218.093.774.880	121.925.626.306	340.019.401.186
500	Kab. Yalimo	10.110.507.434	3.740.167.389	6.370.340.045	10.110.507.434
501	Kab. Lanny Jaya	11.109.717.649	4.077.392.085	7.032.325.564	11.109.717.649
502	Kab. Biak Numfor	16.300.659.948	8.495.638.526	7.805.021.422	16.300.659.948
503	Kab. Jayapura	20.058.816.205	7.388.338.430	12.670.477.775	20.058.816.205
504	Kab. Jayawijaya	17.663.054.307	7.730.082.758	9.932.971.549	17.663.054.307
505	Kab. Merauke	42.202.803.933	14.341.498.932	27.861.305.001	42.202.803.933
506	Kab. Mimika	397.765.460.569	148.997.585.811	248.767.874.758	397.765.460.569
507	Kab. Nabire	19.363.684.740	6.897.364.239	12.466.320.501	19.363.684.740
508	Kab. Paniai	14.804.114.333	6.031.773.643	8.772.340.690	14.804.114.333
509	Kab. Puncak Jaya	14.870.685.043	4.821.176.049	10.049.508.994	14.870.685.043
510	Kab. Kepulauan Yapen	16.739.572.514	6.342.561.753	10.397.010.761	16.739.572.514
511	Kota Jayapura	47.808.649.274	36.367.638.879	11.441.010.395	47.808.649.274
512	Kab. Sarmi	20.359.165.378	4.435.668.292	15.923.497.086	20.359.165.378
513	Kab. Keerom	17.370.584.793	4.905.798.288	12.464.786.505	17.370.584.793
514	Kab. Yahukimo	17.505.771.712	3.717.646.210	13.788.125.502	17.505.771.712
515	Kab. Pegunungan Bintang	18.734.559.788	4.514.646.308	14.219.913.480	18.734.559.788
516	Kab. Tolikara	15.543.585.429	4.316.736.254	11.226.849.175	15.543.585.429
517	Kab. Boven Digoel	24.983.083.063	4.652.146.279	20.330.936.784	24.983.083.063
518	Kab. Mappi	21.183.869.798	4.644.048.888	16.539.820.910	21.183.869.798
519	Kab. Asmat	20.058.321.458	4.891.573.538	15.166.747.920	20.058.321.458
520	Kab. Waropen	20.896.678.885	4.284.714.439	16.611.964.446	20.896.678.885
521	Kab. Mamberamo Raya	29.254.664.623	4.106.460.272	25.148.204.351	29.254.664.623
522	Kab. Mamberamo Tengah	10.047.903.136	4.020.132.717	6.027.770.419	10.047.903.136
523	Kab. Nduga	10.863.485.271	3.733.767.707	7.129.717.564	10.863.485.271
524	Kab. Dogiyai	12.574.307.579	4.122.600.185	8.451.707.394	12.574.307.579
525	Kab. Intan Jaya	18.111.790.434	8.383.955.514	9.727.834.920	18.111.790.434
526	Kab. Puncak	14.404.834.214	4.362.129.645	10.042.704.569	14.404.834.214
527	Kab. Deiyai	10.959.592.336	3.676.164.099	7.283.428.237	10.959.592.336
528	Kab. Supiori	11.864.879.640	4.063.739.118	7.801.140.522	11.864.879.640
529	Provinsi Papua Barat	180.000.285.731	36.066.109.299	143.934.176.432	180.000.285.731
530	Kab. Sorong	169.978.042.528	4.618.560.527	165.359.482.001	169.978.042.528
531	Kab. Manokwari	39.265.838.629	10.286.922.163	28.978.916.466	39.265.838.629
532	Kab. Manokwari Selatan	13.973.199.860	1.888.535.759	12.084.664.101	13.973.199.860

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	PAGU	Realisasi		
			PPH Perorangan	PBB	Total
1	2		4	5	4+5
533	Kab. Fak Fak	25.088.182.966	3.197.469.825	21.890.713.141	25.088.182.966
534	Kota Sorong	26.714.800.658	9.160.704.252	17.554.096.406	26.714.800.658
535	Kab. Pegunungan Arfak	41.894.284.705	1.532.462.504	40.361.822.201	41.894.284.705
536	Kab. Sorong Selatan	22.918.695.752	2.644.374.643	20.274.321.109	22.918.695.752
537	Kab. Raja Ampat	25.354.757.665	2.311.555.499	23.043.202.166	25.354.757.665
538	Kab. Teluk Bintuni	260.610.721.717	11.678.328.117	248.932.393.600	260.610.721.717
539	Kab. Teluk Wondama	15.984.141.053	2.053.700.997	13.930.440.056	15.984.141.053
540	Kab. Tambrau	13.308.452.055	1.728.049.206	11.580.402.849	13.308.452.055
541	Kab. Maybrat	12.615.054.539	1.490.334.710	11.124.719.829	12.615.054.539
542	Kab. Kaimana	23.258.276.789	2.243.251.954	21.015.024.835	23.258.276.789
	Dana Cadangan	-	-	-	-
	Sisa pagu yang tidak dialokasikan				
	Nilai belum teridentifikasi daerah penerima				-
	JUMLAH	53.668.650.342.060	34.312.377.870.061	19.356.272.471.999	53.668.650.342.060

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	306.510.934.655	92.247.176.731	209.612.891.363	4.233.518.560	137.083.260	280.264.741	-	306.510.934.655
2	Kab. Aceh Barat	9.682.394.316	418.087.910	2.200.005.093	6.280.430.647	12.461.862	21.868.077	749.540.727	9.682.394.316
3	Kab. Aceh Besar	4.141.830.865	418.087.910	2.200.005.093	521.360.311	226.825.362	26.011.462	749.540.727	4.141.830.865
4	Kab. Aceh Selatan	3.716.244.953	418.087.910	2.200.005.093	294.828.982	12.461.862	41.320.379	749.540.727	3.716.244.953
5	Kab. Aceh Singkil	4.783.882.392	418.087.910	2.200.005.093	1.388.188.418	12.461.862	15.598.382	749.540.727	4.783.882.392
6	Kab. Aceh Tengah	4.184.958.724	418.087.910	2.200.005.093	690.271.246	12.461.862	114.591.886	749.540.727	4.184.958.724
7	Kab. Aceh Tenggara	3.647.767.014	418.087.910	2.200.005.093	258.262.145	12.461.862	9.409.277	749.540.727	3.647.767.014
8	Kab. Aceh Timur	4.363.477.094	418.087.910	2.834.889.700	253.762.145	12.461.862	94.734.750	749.540.727	4.363.477.094
9	Kab. Aceh Utara	59.548.616.864	10.747.865.165	47.765.216.774	253.173.434	12.461.862	20.358.902	749.540.727	59.548.616.864
10	Kab. Bireuen	3.752.852.757	418.087.910	2.200.005.093	363.301.852	12.461.862	9.455.313	749.540.727	3.752.852.757
11	Kab. Pidie	5.019.782.888	418.087.910	2.200.005.093	1.628.593.216	12.461.862	11.094.080	749.540.727	5.019.782.888
12	Kab. Simeulue	3.661.014.466	418.087.910	2.200.005.093	252.492.373	12.461.862	28.426.501	749.540.727	3.661.014.466
13	Kota Banda Aceh	3.695.993.519	418.087.910	2.200.005.093	252.492.373	12.461.862	63.405.554	749.540.727	3.695.993.519
14	Kota Sabang	3.697.418.385	418.087.910	2.200.005.093	252.492.373	67.883.005	9.409.277	749.540.727	3.697.418.385
15	Kota Langsa	3.642.517.130	418.087.910	2.200.005.093	252.492.373	12.461.862	9.929.165	749.540.727	3.642.517.130
16	Kota Lhokseumawe	3.641.997.242	418.087.910	2.200.005.093	252.492.373	12.461.862	9.409.277	749.540.727	3.641.997.242
17	Kab. Nagan Raya	5.252.562.687	418.087.910	2.200.005.093	1.837.593.229	12.461.862	34.873.866	749.540.727	5.252.562.687
18	Kab. Aceh Jaya	3.688.562.481	418.087.910	2.200.005.093	264.436.791	12.461.862	44.030.098	749.540.727	3.688.562.481
19	Kab. Pidie Jaya	3.642.456.770	418.087.910	2.200.005.093	252.951.901	12.461.862	9.409.277	749.540.727	3.642.456.770
20	Kab. Aceh Barat Daya	3.655.037.056	418.087.910	2.200.005.093	267.865.922	12.461.862	7.075.542	749.540.727	3.655.037.056
21	Kab. Gayo Lues	3.865.539.833	418.087.910	2.200.005.093	468.829.986	12.461.862	16.614.255	749.540.727	3.865.539.833
22	Kab. Aceh Tamiang	6.354.786.328	3.118.176.454	2.200.005.093	253.303.729	12.461.862	21.298.463	749.540.727	6.354.786.328
23	Kab. Bener Meriah	3.702.644.642	418.087.910	2.200.005.093	252.492.373	12.461.862	70.056.677	749.540.727	3.702.644.642
24	Kota Subulussalam	3.686.966.406	418.087.910	2.200.005.093	296.861.608	12.461.862	10.009.206	749.540.727	3.686.966.406
25	Provinsi Sumatera Utara	15.597.594.365	452.256.809	671.741.735	5.464.751.824	337.880.914	8.670.963.083	-	15.597.594.365
26	Kab. Asahan	1.220.065.313	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	244.392.823	749.540.727	1.220.065.313
27	Kab. Dairi	1.867.987.158	28.265.657	41.984.130	752.772.462	21.117.460	274.306.722	749.540.727	1.867.987.158
28	Kab. Deli Serdang	1.448.843.566	31.803.917	281.881.966	134.764.516	21.117.460	229.734.980	749.540.727	1.448.843.566
29	Kab. Karo	4.157.916.928	28.265.657	41.984.130	136.509.752	21.117.460	3.180.499.202	749.540.727	4.157.916.928
30	Kab. Labuhan Batu	1.211.063.119	28.265.657	41.984.130	139.050.616	21.117.460	231.104.529	749.540.727	1.211.063.119
31	Kab. Langkat	3.447.628.909	900.517.613	1.301.504.248	134.764.516	21.117.460	340.184.345	749.540.727	3.447.628.909
32	Kab. Mandailing Natal	3.838.687.963	28.265.657	41.984.130	2.033.327.066	675.761.827	309.808.556	749.540.727	3.838.687.963
33	Kab. Nias	1.205.317.020	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	229.644.530	749.540.727	1.205.317.020
34	Kab. Simalungun	1.392.393.594	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	416.721.104	749.540.727	1.392.393.594
35	Kab. Tapanuli Selatan	9.341.366.902	28.265.657	41.984.130	7.927.957.127	21.117.460	572.501.801	749.540.727	9.341.366.902
36	Kab. Tapanuli Tengah	2.568.257.247	28.265.657	41.984.130	1.496.878.789	21.117.460	230.470.484	749.540.727	2.568.257.247
37	Kab. Tapanuli Utara	7.234.128.237	28.265.657	41.984.130	5.504.998.616	21.117.460	888.221.647	749.540.727	7.234.128.237
38	Kab. Toba Samosir	2.035.623.744	28.265.657	41.984.130	409.822.338	21.117.460	784.893.432	749.540.727	2.035.623.744
39	Kota Binjai	1.200.858.436	28.725.503	37.065.700	134.764.516	21.117.460	229.644.530	749.540.727	1.200.858.436
40	Kota Medan	1.216.124.566	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	240.452.076	749.540.727	1.216.124.566
41	Kota Pematang Siantar	1.205.317.020	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	229.644.530	749.540.727	1.205.317.020
42	Kota Sibolga	1.205.317.020	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	229.644.530	749.540.727	1.205.317.020
43	Kota Tanjung Balai	1.205.317.020	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	229.644.530	749.540.727	1.205.317.020

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Kab. Batu Bara	1.205.317.020	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	229.644.530	749.540.727	1.205.317.020
45	Kab. LabuhanBatu Utara	1.588.225.258	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	612.552.768	749.540.727	1.588.225.258
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	3.428.315.798	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	2.452.643.308	749.540.727	3.428.315.798
47	Kab. Padang Lawas Utara	1.862.542.485	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	886.869.995	749.540.727	1.862.542.485
48	Kab. Padang Lawas	3.224.664.426	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	2.248.991.936	749.540.727	3.224.664.426
49	Kab. Nias Utara	1.205.317.020	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	229.644.530	749.540.727	1.205.317.020
50	Kab. Nias Barat	1.205.317.020	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	229.644.530	749.540.727	1.205.317.020
51	Kota Tebing Tinggi	1.205.317.020	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	229.644.530	749.540.727	1.205.317.020
52	Kota Padang Sidempuan	1.867.478.562	28.265.657	41.984.130	796.926.058	21.117.460	229.644.530	749.540.727	1.867.478.562
53	Kab. Pakpak Bharat	1.215.992.936	28.265.657	41.984.130	137.613.768	21.117.460	237.471.194	749.540.727	1.215.992.936
54	Kab. Nias Selatan	6.508.827.588	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	5.533.155.098	749.540.727	6.508.827.588
55	Kab. Humbang Hasundutan	1.490.173.587	28.265.657	41.984.130	134.829.918	21.117.460	514.435.695	749.540.727	1.490.173.587
56	Kab. Serdang Bedagai	1.205.317.020	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	229.644.530	749.540.727	1.205.317.020
57	Kab. Samosir	1.480.711.157	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	505.038.667	749.540.727	1.480.711.157
58	Kota Gunungsitoli	1.205.317.020	28.265.657	41.984.130	134.764.516	21.117.460	229.644.530	749.540.727	1.205.317.020
59	Provinsi Sumatera Barat	13.341.852.318	-	-	4.459.732.847	274.937.112	8.607.182.359	-	13.341.852.318
60	Kab. LimaPuluh Kota	1.411.094.399	-	-	435.735.999	30.548.725	195.268.948	749.540.727	1.411.094.399
61	Kab. Agam	1.347.037.393	-	-	393.964.432	30.548.725	172.983.509	749.540.727	1.347.037.393
62	Kab. Kepulauan Mentawai	9.942.317.833	-	-	367.143.217	30.548.725	8.795.085.164	749.540.727	9.942.317.833
63	Kab. Padang Pariaman	1.315.799.130	-	-	367.143.217	30.548.725	168.566.461	749.540.727	1.315.799.130
64	Kab. Pasaman	2.436.248.902	-	-	1.481.206.394	30.548.725	174.953.056	749.540.727	2.436.248.902
65	Kab. Pesisir Selatan	1.598.819.833	-	-	637.424.656	30.548.725	181.305.725	749.540.727	1.598.819.833
66	Kab. Sijunjung	2.772.046.202	-	-	795.515.088	30.548.725	1.196.441.662	749.540.727	2.772.046.202
67	Kab. Solok	2.285.760.356	-	-	1.317.529.781	30.548.725	188.141.123	749.540.727	2.285.760.356
68	Kab. Tanah Datar	1.596.966.595	-	-	639.061.665	30.548.725	177.815.478	749.540.727	1.596.966.595
69	Kota Bukit Tinggi	1.315.740.597	-	-	367.143.217	30.548.725	168.507.928	749.540.727	1.315.740.597
70	Kota Padang Panjang	1.315.740.597	-	-	367.143.217	30.548.725	168.507.928	749.540.727	1.315.740.597
71	Kota Padang	1.322.006.258	-	-	367.179.550	30.548.725	174.737.256	749.540.727	1.322.006.258
72	Kota Payakumbuh	1.315.988.592	-	-	367.143.217	30.548.725	168.755.923	749.540.727	1.315.988.592
73	Kota Sawahlunto	8.618.888.650	-	-	7.657.274.377	30.548.725	181.524.821	749.540.727	8.618.888.650
74	Kota Solok	1.315.780.215	-	-	367.143.217	30.548.725	168.547.546	749.540.727	1.315.780.215
75	Kota Pariaman	1.315.740.597	-	-	367.143.217	30.548.725	168.507.928	749.540.727	1.315.740.597
76	Kab. Pasaman Barat	1.413.519.705	-	-	466.671.686	30.548.725	166.758.567	749.540.727	1.413.519.705
77	Kab. Dharmasraya	2.673.690.908	-	-	1.447.310.948	30.548.725	446.290.508	749.540.727	2.673.690.908
78	Kab. Solok Selatan	3.061.894.578	-	-	1.067.566.317	549.873.778	694.913.756	749.540.727	3.061.894.578
79	Provinsi Riau	791.128.947.231	721.752.228.421	42.229.744.524	4.931.677.203	-	22.215.297.083	-	791.128.947.231
80	Kab. Bengkalis	816.404.908.307	798.542.486.207	7.678.135.282	434.403.326	-	9.000.342.765	749.540.727	816.404.908.307
81	Kab. Indragiri Hilir	152.606.038.178	131.227.678.170	7.678.135.282	5.224.758.872	-	7.725.925.127	749.540.727	152.606.038.178
82	Kab. Indragiri Hulu	153.936.392.888	132.907.856.680	7.678.135.282	8.067.550.594	-	4.533.309.605	749.540.727	153.936.392.888
83	Kab. Kampar	321.046.843.673	288.017.341.188	25.632.351.203	611.489.657	-	6.036.120.898	749.540.727	321.046.843.673
84	Kab. Kuantan Singingi	146.621.571.443	131.227.678.170	7.678.135.282	3.164.956.612	-	3.801.260.652	749.540.727	146.621.571.443
85	Kab. Pelalawan	216.745.935.602	133.523.754.724	66.602.613.456	435.542.062	-	15.434.484.633	749.540.727	216.745.935.602
86	Kab. Rokan Hilir	406.705.368.041	393.773.649.864	7.678.135.282	434.403.326	-	4.069.638.842	749.540.727	406.705.368.041

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	Kab. Rokan Hulu	147.795.235.215	134.645.246.146	7.678.135.282	828.509.535	-	3.893.803.525	749.540.727	147.795.235.215
88	Kab. Siak	371.722.194.752	351.441.671.590	8.587.843.539	439.082.912	-	10.504.055.984	749.540.727	371.722.194.752
89	Kota Dumai	145.518.428.453	131.227.678.170	7.678.135.282	434.403.326	-	5.428.670.948	749.540.727	145.518.428.453
90	Kota Pekanbaru	143.317.272.436	131.227.678.170	7.678.135.282	434.403.326	-	3.227.514.931	749.540.727	143.317.272.436
91	Kab. Kepulauan Meranti	145.439.581.962	129.246.194.284	9.153.282.571	804.651.262	-	5.485.913.118	749.540.727	145.439.581.962
92	Provinsi Kepulauan Riau	328.674.172.724	23.658.213.609	283.932.413.490	20.668.946.028	-	414.599.597	-	328.674.172.724
93	Kab. Bintan	96.905.868.587	7.759.158.216	84.892.410.514	3.441.348.814	-	63.410.316	749.540.727	96.905.868.587
94	Kab. Natuna	206.929.125.938	30.508.249.935	171.282.512.269	4.324.437.426	-	64.385.581	749.540.727	206.929.125.938
95	Kab. Karimun	115.434.340.484	7.759.158.216	84.892.410.514	21.711.992.062	-	321.238.965	749.540.727	115.434.340.484
96	Kota Batam	97.806.386.508	7.759.158.216	84.892.410.514	4.324.437.426	-	80.839.625	749.540.727	97.806.386.508
97	Kab. Kepulauan Anambas	156.579.772.467	20.024.109.009	131.410.155.756	4.324.437.426	-	71.529.549	749.540.727	156.579.772.467
98	Kota Tanjung Pinang	97.440.661.656	7.759.158.216	84.892.410.514	3.970.270.147	-	69.282.052	749.540.727	97.440.661.656
99	Kab. Lingga	99.742.684.142	7.759.158.216	84.892.410.514	5.604.818.941	-	736.755.744	749.540.727	99.742.684.142
100	Provinsi Jambi	201.602.791.614	65.698.753.873	107.153.403.428	22.798.714.443	-	5.951.919.870	-	201.602.791.614
101	Kab. Batanghari	47.552.306.577	13.721.546.039	21.430.680.196	7.901.387.735	-	3.749.151.880	749.540.727	47.552.306.577
102	Kab. Bungo	53.610.905.570	13.139.750.154	21.430.680.196	17.392.936.098	-	897.998.395	749.540.727	53.610.905.570
103	Kab. Kerinci	41.273.616.502	13.139.750.154	21.430.680.196	5.050.315.346	-	903.330.079	749.540.727	41.273.616.502
104	Kab. Merangin	40.271.804.325	13.139.750.154	21.430.680.196	4.059.329.692	-	892.503.556	749.540.727	40.271.804.325
105	Kab. Muaro Jambi	41.940.110.169	14.724.241.259	19.900.579.323	5.021.178.141	-	1.544.570.719	749.540.727	41.940.110.169
106	Kab. Sarolangun	65.642.081.381	13.791.239.675	21.515.603.496	28.205.981.951	-	1.379.715.532	749.540.727	65.642.081.381
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	294.727.223.532	108.035.148.588	177.038.466.186	5.077.793.971	-	3.826.274.060	749.540.727	294.727.223.532
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	109.779.184.657	42.563.348.130	60.144.198.598	4.236.161.907	-	2.085.935.295	749.540.727	109.779.184.657
109	Kab. Tebo	43.637.829.976	13.774.595.622	21.430.680.196	6.100.298.512	-	1.582.714.919	749.540.727	43.637.829.976
110	Kota Jambi	41.004.971.833	13.692.866.088	21.430.680.196	4.236.161.907	-	895.722.915	749.540.727	41.004.971.833
111	Kota Sungai Penuh	40.652.591.074	13.139.750.154	21.430.680.196	4.236.161.907	-	1.096.458.090	749.540.727	40.652.591.074
112	Provinsi Sumatera Selatan	879.676.769.054	78.537.119.411	579.670.611.755	215.132.121.495	189.911.213	6.147.005.180	-	879.676.769.054
113	Kab. Lahat	281.693.990.943	10.297.521.284	102.338.096.816	167.349.347.220	116.065.068	843.419.828	749.540.727	281.693.990.943
114	Kab. Musi Banyuasin	1.171.043.555.028	133.661.879.848	987.013.563.171	48.329.029.625	23.739.152	1.265.802.505	749.540.727	1.171.043.555.028
115	Kab. Musi Rawas	215.085.339.575	15.664.653.166	168.076.671.498	28.949.872.023	23.739.152	1.620.863.009	749.540.727	215.085.339.575
116	Kab Musi Rawas Utara	118.663.547.416	8.464.015.486	72.439.986.402	36.291.430.494	23.739.152	694.835.155	749.540.727	118.663.547.416
117	Kab. Muara Enim	416.698.201.497	23.512.822.063	113.440.160.360	277.097.481.489	220.359.660	1.677.837.198	749.540.727	416.698.201.497
118	Kab. Ogan Komering Ilir	118.526.999.892	9.817.139.751	72.458.826.457	25.094.632.707	23.739.152	10.383.121.098	749.540.727	118.526.999.892
119	Kab. Ogan Komering Ulu	124.182.187.368	13.872.131.324	79.596.215.779	28.108.705.910	23.739.152	1.831.854.476	749.540.727	124.182.187.368
120	Kota Palembang	108.730.914.731	9.817.139.751	72.458.826.457	24.973.707.240	23.739.152	707.961.404	749.540.727	108.730.914.731
121	Kota Pagar Alam	108.893.357.573	9.817.139.751	72.458.826.457	24.973.707.240	90.877.246	803.266.152	749.540.727	108.893.357.573
122	Kota Lubuk linggau	108.730.914.731	9.817.139.751	72.458.826.457	24.973.707.240	23.739.152	707.961.404	749.540.727	108.730.914.731
123	Kota Prabumulih	118.643.163.129	11.184.255.542	80.532.307.279	25.445.430.536	23.739.152	707.889.893	749.540.727	118.643.163.129
124	Kab. Empat Lawang	108.880.762.632	9.817.139.751	72.458.826.457	25.123.555.141	23.739.152	707.961.404	749.540.727	108.880.762.632
125	Kab. Banyuasin	123.498.547.954	12.635.540.053	72.458.826.457	35.349.030.156	23.739.152	2.281.871.409	749.540.727	123.498.547.954
126	Kab. Ogan Ilir	110.873.116.579	11.194.640.998	72.517.984.764	25.902.777.189	23.739.152	484.433.749	749.540.727	110.873.116.579
127	Kab. OKU Timur	111.572.792.881	9.817.139.751	72.458.826.457	27.452.741.881	23.739.152	1.070.804.913	749.540.727	111.572.792.881
128	Kab. OKU Selatan	110.021.795.396	9.817.139.751	72.458.826.457	26.262.658.908	23.739.152	709.890.401	749.540.727	110.021.795.396
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	114.842.760.094	14.493.578.444	72.734.890.357	26.110.755.294	23.739.152	730.256.120	749.540.727	114.842.760.094

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	Provinsi Bangka Belitung	103.215.856.540	5.178.802.468	-	97.570.324.179	-	466.729.893	-	103.215.856.540
131	Kab. Bangka	60.669.711.129	1.478.226.633	-	58.355.803.971	-	86.139.798	749.540.727	60.669.711.129
132	Kab. Belitung	25.198.768.332	1.478.226.633	-	22.665.695.065	-	305.305.907	749.540.727	25.198.768.332
133	Kota Pangkal Pinang	24.751.769.406	1.478.226.633	-	22.476.092.016	-	47.910.030	749.540.727	24.751.769.406
134	Kab. Bangka Selatan	40.146.420.864	1.478.226.633	-	37.726.791.974	-	191.861.530	749.540.727	40.146.420.864
135	Kab. Bangka Tengah	28.927.099.987	1.478.226.633	-	26.651.525.171	-	47.807.456	749.540.727	28.927.099.987
136	Kab. Bangka Barat	36.379.998.190	1.478.226.633	-	34.089.249.759	-	62.981.071	749.540.727	36.379.998.190
137	Kab. Belitung Timur	30.692.790.635	1.478.226.633	-	27.188.692.170	-	1.276.331.105	749.540.727	30.692.790.635
138	Provinsi Bengkulu	17.822.198.725	-	-	17.255.757.256	-	566.441.469	-	17.822.198.725
139	Kab. Bengkulu Selatan	4.511.316.695	-	-	3.755.601.989	-	6.173.979	749.540.727	4.511.316.695
140	Kab. Bengkulu Utara	24.093.713.633	-	-	21.776.682.951	-	1.567.489.955	749.540.727	24.093.713.633
141	Kab. Rejang Lebong	4.507.405.340	-	-	3.750.351.398	-	7.513.215	749.540.727	4.507.405.340
142	Kota Bengkulu	4.506.868.502	-	-	3.750.351.398	-	6.976.377	749.540.727	4.506.868.502
143	Kab. Kaur	4.866.127.167	-	-	4.092.379.526	-	24.206.914	749.540.727	4.866.127.167
144	Kab. Seluma	6.572.727.836	-	-	5.782.035.891	-	41.151.218	749.540.727	6.572.727.836
145	Kab. Mukomuko	4.766.140.426	-	-	3.760.043.910	-	256.555.789	749.540.727	4.766.140.426
146	Kab. Lebong	5.626.074.122	-	-	4.301.200.447	-	575.332.948	749.540.727	5.626.074.122
147	Kab. Bengkulu Tengah	20.925.368.334	-	-	20.168.910.121	-	6.917.486	749.540.727	20.925.368.334
148	Kab. Kepahiang	4.508.869.062	-	-	3.750.776.511	-	8.551.824	749.540.727	4.508.869.062
149	Provinsi Lampung	108.639.456.462	59.905.661.931	39.602.204.764	971.186.925	6.998.124.454	1.162.278.388	-	108.639.456.462
150	Kab. Lampung Barat	15.450.972.567	8.123.541.241	5.277.636.283	89.515.623	999.731.790	211.006.903	749.540.727	15.450.972.567
151	Kab. Lampung Selatan	15.612.911.604	8.123.541.241	5.277.636.283	102.394.746	1.187.731.524	172.067.083	749.540.727	15.612.911.604
152	Kab. Lampung Tengah	15.376.011.182	8.123.541.241	5.277.636.283	67.118.847	999.731.790	158.442.294	749.540.727	15.376.011.182
153	Kab. Lampung Utara	15.399.151.068	8.123.541.241	5.277.636.283	88.762.875	999.731.790	159.938.152	749.540.727	15.399.151.068
154	Kab. Lampung Timur	43.071.822.440	35.798.724.478	5.277.636.283	87.746.868	999.731.790	158.442.294	749.540.727	43.071.822.440
155	Kab. Tanggamus	29.997.008.032	8.123.541.241	5.277.636.283	1.845.893.540	13.837.969.018	162.427.223	749.540.727	29.997.008.032
156	Kab. Tulang Bawang	15.499.235.558	8.123.541.241	5.277.636.283	190.343.223	999.731.790	158.442.294	749.540.727	15.499.235.558
157	Kab. Way Kanan	16.073.756.487	8.123.541.241	5.277.636.283	216.741.307	999.731.790	706.565.139	749.540.727	16.073.756.487
158	Kab. Pesawaran	15.546.612.696	8.123.541.241	5.277.636.283	237.720.361	999.731.790	158.442.294	749.540.727	15.546.612.696
159	Kab. Pesisir Barat	15.410.433.277	8.123.541.241	5.277.636.283	86.272.681	999.731.790	173.710.555	749.540.727	15.410.433.277
160	Kab. Pringsewu	15.396.648.713	8.123.541.241	5.277.636.283	87.756.378	999.731.790	158.442.294	749.540.727	15.396.648.713
161	Kab. Mesuji	17.367.878.159	8.123.541.241	5.277.636.283	563.320.392	999.731.790	1.654.107.726	749.540.727	17.367.878.159
162	Kab. Tulang Bawang Barat	15.396.639.203	8.123.541.241	5.277.636.283	87.746.868	999.731.790	158.442.294	749.540.727	15.396.639.203
163	Kota Bandar Lampung	15.396.639.203	8.123.541.241	5.277.636.283	87.746.868	999.731.790	158.442.294	749.540.727	15.396.639.203
164	Kota Metro	15.396.639.203	8.123.541.241	5.277.636.283	87.746.868	999.731.790	158.442.294	749.540.727	15.396.639.203
165	Provinsi DKI Jakarta	254.235.232.979	132.753.115.554	120.603.182.895	-	-	129.560.440	749.374.090	254.235.232.979
166	Provinsi Jawa Barat	353.385.186.906	80.107.416.639	92.729.955.336	5.582.716.711	174.436.665.367	528.432.853	-	353.385.186.906
167	Kab. Bandung	166.138.076.640	5.923.894.044	6.833.983.974	339.392.745	152.239.542.702	51.722.448	749.540.727	166.138.076.640
168	Kab. Bekasi	33.047.940.737	6.463.626.186	12.036.589.062	339.172.817	13.418.206.810	40.805.135	749.540.727	33.047.940.737
169	Kab. Bogor	95.926.782.474	5.923.894.044	6.833.983.974	9.015.293.458	73.340.467.617	63.602.654	749.540.727	95.926.782.474
170	Kab. Ciamis	27.649.706.415	5.923.563.330	6.833.983.974	447.749.112	13.418.206.810	276.662.462	749.540.727	27.649.706.415
171	Kab. Cianjur	28.700.776.252	5.923.894.044	6.833.983.974	1.547.693.694	13.418.206.810	227.457.003	749.540.727	28.700.776.252
172	Kab. Cirebon	27.336.354.351	5.923.894.044	6.833.983.974	339.172.817	13.418.206.810	71.555.979	749.540.727	27.336.354.351

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
173	Kab. Garut	115.176.097.325	5.923.894.044	6.833.983.974	2.036.628.660	99.562.292.867	69.757.053	749.540.727	115.176.097.325
174	Kab. Indramayu	45.608.262.032	10.672.887.618	20.359.783.705	339.176.017	13.418.206.810	68.667.155	749.540.727	45.608.262.032
175	Kab. Karawang	48.351.557.211	7.196.293.455	26.604.957.046	339.172.817	13.418.206.810	43.386.356	749.540.727	48.351.557.211
176	Kab. Kuningan	27.384.096.104	5.923.894.044	6.833.983.974	339.172.817	13.418.206.810	119.297.732	749.540.727	27.384.096.104
177	Kab. Majalengka	27.526.300.076	6.073.579.139	6.872.558.998	339.172.817	13.418.206.810	73.241.585	749.540.727	27.526.300.076
178	Kab. Pangandaran	27.613.871.622	5.923.560.895	6.833.983.974	432.113.032	13.418.206.810	256.466.184	749.540.727	27.613.871.622
179	Kab. Purwakarta	27.483.543.818	5.923.894.044	6.833.983.974	375.186.637	13.551.786.703	49.151.733	749.540.727	27.483.543.818
180	Kab. Subang	60.345.110.636	5.824.347.595	39.756.871.377	339.172.817	13.627.096.726	48.081.394	749.540.727	60.345.110.636
181	Kab. Sukabumi	81.644.145.226	5.923.894.044	6.833.983.974	1.857.117.765	66.109.226.171	170.382.545	749.540.727	81.644.145.226
182	Kab. Sumedang	27.755.963.664	5.923.894.044	6.833.983.974	339.172.817	13.838.005.349	71.366.753	749.540.727	27.755.963.664
183	Kab. Tasikmalaya	28.081.229.700	5.923.894.044	6.833.983.974	1.028.654.520	13.418.206.810	126.949.625	749.540.727	28.081.229.700
184	Kab. Bandung Barat	27.486.866.185	5.923.894.044	6.833.983.974	346.350.870	13.561.834.541	71.262.029	749.540.727	27.486.866.185
185	Kota Bandung	27.305.603.507	5.923.894.044	6.833.983.974	339.172.817	13.418.206.810	40.805.135	749.540.727	27.305.603.507
186	Kota Bekasi	27.305.603.507	5.923.894.044	6.833.983.974	339.172.817	13.418.206.810	40.805.135	749.540.727	27.305.603.507
187	Kota Bogor	27.305.603.507	5.923.894.044	6.833.983.974	339.172.817	13.418.206.810	40.805.135	749.540.727	27.305.603.507
188	Kota Cirebon	27.305.603.507	5.923.894.044	6.833.983.974	339.172.817	13.418.206.810	40.805.135	749.540.727	27.305.603.507
189	Kota Depok	27.305.603.507	5.923.894.044	6.833.983.974	339.172.817	13.418.206.810	40.805.135	749.540.727	27.305.603.507
190	Kota Sukabumi	27.305.603.507	5.923.894.044	6.833.983.974	339.172.817	13.418.206.810	40.805.135	749.540.727	27.305.603.507
191	Kota Cimahi	27.305.603.507	5.923.894.044	6.833.983.974	339.172.817	13.418.206.810	40.805.135	749.540.727	27.305.603.507
192	Kota Tasikmalaya	27.294.338.968	5.923.894.044	6.833.983.974	339.172.817	13.418.206.810	29.540.596	749.540.727	27.294.338.968
193	Kota Banjar	27.297.748.375	5.923.894.044	6.833.983.974	339.172.817	13.418.206.810	32.950.003	749.540.727	27.297.748.375
194	Provinsi Banten	4.117.340.024	-	-	3.098.773.886	887.198.955	131.367.183	-	4.117.340.024
195	Kab. Lebak	4.035.297.894	-	-	2.956.479.720	253.485.860	75.791.587	749.540.727	4.035.297.894
196	Kab. Pandeglang	7.299.689.530	-	-	5.306.145.982	1.017.026.182	226.976.639	749.540.727	7.299.689.530
197	Kab. Serang	2.491.546.406	-	-	688.409.732	1.010.859.279	42.736.668	749.540.727	2.491.546.406
198	Kab. Tangerang	1.728.970.097	-	-	688.409.732	253.485.860	37.533.778	749.540.727	1.728.970.097
199	Kota Cilegon	1.728.970.097	-	-	688.409.732	253.485.860	37.533.778	749.540.727	1.728.970.097
200	Kota Tangerang	1.728.970.097	-	-	688.409.732	253.485.860	37.533.778	749.540.727	1.728.970.097
201	Kota Serang	1.728.970.097	-	-	688.409.732	253.485.860	37.533.778	749.540.727	1.728.970.097
202	Kota Tangerang Selatan	1.729.166.505	-	-	688.606.140	253.485.860	37.533.778	749.540.727	1.729.166.505
203	Provinsi Jawa Tengah	14.715.986.504	747.479.618	8.615.095.507	131.802.130	1.209.341.480	4.012.267.769	-	14.715.986.504
204	Kab. Banjarnegara	1.671.741.188	43.969.348	506.770.250	4.756.624	71.137.168	295.567.071	749.540.727	1.671.741.188
205	Kab. Banyumas	2.236.000.085	43.969.348	506.770.250	14.632.480	431.970.668	489.116.612	749.540.727	2.236.000.085
206	Kab. Batang	1.794.243.983	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	418.474.378	749.540.727	1.794.243.983
207	Kab. Blora	22.523.602.846	1.494.959.237	16.905.819.734	4.352.112	71.137.168	3.297.793.868	749.540.727	22.523.602.846
208	Kab. Boyolali	1.806.900.779	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	431.131.174	749.540.727	1.806.900.779
209	Kab. Brebes	2.339.624.678	43.969.348	506.770.250	4.352.112	232.542.757	802.449.484	749.540.727	2.339.624.678
210	Kab. Cilacap	3.180.494.716	43.969.348	506.770.250	213.911.384	71.137.168	1.595.165.839	749.540.727	3.180.494.716
211	Kab. Demak	1.608.122.514	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	232.352.909	749.540.727	1.608.122.514
212	Kab. Grobogan	2.159.873.266	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	784.103.661	749.540.727	2.159.873.266
213	Kab. Jepara	1.648.830.905	43.969.348	506.770.250	10.288.957	71.137.168	267.124.455	749.540.727	1.648.830.905
214	Kab. Karanganyar	1.834.589.323	43.969.348	506.770.250	4.352.112	295.481.568	234.475.318	749.540.727	1.834.589.323
215	Kab. Kebumen	1.716.273.213	43.969.348	506.770.250	7.434.819	71.137.168	337.420.901	749.540.727	1.716.273.213

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216	Kab. Kendal	2.116.003.600	43.969.348	506.770.250	4.352.112	79.724.892	731.646.271	749.540.727	2.116.003.600
217	Kab. Klaten	1.608.470.157	43.969.348	506.770.250	4.715.567	71.137.168	232.337.097	749.540.727	1.608.470.157
218	Kab. Kudus	1.591.808.934	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	216.039.329	749.540.727	1.591.808.934
219	Kab. Magelang	1.624.415.831	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	248.646.226	749.540.727	1.624.415.831
220	Kab. Pati	1.636.475.153	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	260.705.548	749.540.727	1.636.475.153
221	Kab. Pekalongan	1.724.781.766	43.969.348	506.770.250	4.811.398	71.137.168	348.552.875	749.540.727	1.724.781.766
222	Kab. Pemalang	2.088.847.505	43.969.348	506.770.250	4.352.112	146.113.385	638.101.683	749.540.727	2.088.847.505
223	Kab. Purbalingga	1.693.654.400	43.969.348	506.770.250	4.352.112	128.689.022	260.332.941	749.540.727	1.693.654.400
224	Kab. Purworejo	1.676.089.064	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	300.319.459	749.540.727	1.676.089.064
225	Kab. Rembang	2.131.094.426	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	755.324.821	749.540.727	2.131.094.426
226	Kab. Semarang	2.978.557.299	43.969.348	506.770.250	4.352.112	1.302.464.316	371.460.546	749.540.727	2.978.557.299
227	Kab. Sragen	1.663.604.482	43.969.348	506.770.250	4.352.112	108.912.668	250.059.377	749.540.727	1.663.604.482
228	Kab. Sukoharjo	1.608.459.052	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	232.689.447	749.540.727	1.608.459.052
229	Kab. Tegal	2.376.147.419	43.969.348	506.770.250	4.352.112	257.303.864	814.211.118	749.540.727	2.376.147.419
230	Kab. Temanggung	1.648.969.002	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	273.199.397	749.540.727	1.648.969.002
231	Kab. Wonogiri	1.789.666.257	43.969.348	506.770.250	161.117.660	75.719.368	252.548.904	749.540.727	1.789.666.257
232	Kab. Wonosobo	1.669.511.426	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	293.741.821	749.540.727	1.669.511.426
233	Kota Magelang	1.608.459.052	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	232.689.447	749.540.727	1.608.459.052
234	Kota Pekalongan	1.608.459.052	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	232.689.447	749.540.727	1.608.459.052
235	Kota Salatiga	1.608.459.052	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	232.689.447	749.540.727	1.608.459.052
236	Kota Semarang	2.029.763.333	43.969.348	831.139.734	4.352.112	71.137.168	329.624.244	749.540.727	2.029.763.333
237	Kota Surakarta	1.608.459.052	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	232.689.447	749.540.727	1.608.459.052
238	Kota Tegal	1.608.459.052	43.969.348	506.770.250	4.352.112	71.137.168	232.689.447	749.540.727	1.608.459.052
239	Provinsi DI Yogyakarta	36.078.889	-	-	16.717.265	-	19.361.624	-	36.078.889
240	Kab. Bantul	759.375.818	-	-	-	-	9.835.091	749.540.727	759.375.818
241	Kab. Gunung kidul	788.139.483	-	-	-	-	38.598.756	749.540.727	788.139.483
242	Kab. Kulon Progo	826.062.271	-	-	66.869.758	-	9.651.786	749.540.727	826.062.271
243	Kab. Sleman	759.221.990	-	-	-	-	9.681.263	749.540.727	759.221.990
244	Kota Yogyakarta	759.221.990	-	-	-	-	9.681.263	749.540.727	759.221.990
245	Provinsi Jawa Timur	474.672.872.313	367.619.837.875	100.237.511.842	1.387.305.839	649.801.158	4.778.415.599	-	474.672.872.313
246	Kab. Bangkalan	33.759.412.364	22.299.660.576	10.348.749.193	58.865.576	35.124.367	267.471.925	749.540.727	33.759.412.364
247	Kab. Banyuwangi	31.896.451.608	19.864.893.276	5.546.464.653	2.359.209.026	477.461.565	2.898.882.361	749.540.727	31.896.451.608
248	Kab. Blitar	26.846.676.503	19.864.893.276	5.546.464.653	60.022.225	35.124.367	590.631.255	749.540.727	26.846.676.503
249	Kab. Bojonegoro	729.246.843.961	722.783.299.625	4.823.237.032	58.865.576	35.124.367	796.776.634	749.540.727	729.246.843.961
250	Kab. Bondowoso	27.013.255.279	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	255.108.320	538.382.727	749.540.727	27.013.255.279
251	Kab. Gresik	37.584.861.323	19.866.430.476	16.592.141.412	58.865.576	35.124.367	282.758.765	749.540.727	37.584.861.323
252	Kab. Jember	27.572.096.694	19.864.893.276	5.546.464.653	123.238.816	35.124.367	1.252.834.855	749.540.727	27.572.096.694
253	Kab. Jombang	26.612.700.568	19.864.893.276	5.546.464.653	59.873.396	35.124.367	356.804.149	749.540.727	26.612.700.568
254	Kab. Kediri	26.787.432.471	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	532.543.872	749.540.727	26.787.432.471
255	Kab. Lamongan	26.898.466.594	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	643.577.995	749.540.727	26.898.466.594
256	Kab. Lumajang	26.629.531.223	19.864.893.276	5.546.464.653	118.400.209	35.124.367	315.107.991	749.540.727	26.629.531.223
257	Kab. Madiun	27.470.183.344	19.864.893.276	5.546.464.653	59.029.081	243.672.612	1.006.582.995	749.540.727	27.470.183.344
258	Kab. Magetan	26.548.672.536	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	58.652.067	270.256.237	749.540.727	26.548.672.536

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
259	Kab. Malang	26.657.361.339	19.864.893.276	5.546.464.653	62.000.180	35.124.367	399.338.136	749.540.727	26.657.361.339
260	Kab. Mojokerto	26.644.735.128	19.864.893.276	5.546.464.653	58.875.451	35.124.367	389.836.654	749.540.727	26.644.735.128
261	Kab. Nganjuk	26.981.318.675	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	726.430.076	749.540.727	26.981.318.675
262	Kab. Ngawi	27.088.524.572	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	94.872.167	773.888.173	749.540.727	27.088.524.572
263	Kab. Pacitan	26.597.727.288	19.864.893.276	5.546.464.653	141.718.512	35.124.367	259.985.753	749.540.727	26.597.727.288
264	Kab. Pamekasan	26.522.024.284	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	267.135.685	749.540.727	26.522.024.284
265	Kab. Pasuruan	26.636.424.672	19.864.893.276	5.546.464.653	59.222.776	35.124.367	381.178.873	749.540.727	26.636.424.672
266	Kab. Ponorogo	27.332.057.353	19.864.893.276	5.546.464.653	58.996.380	445.997.383	666.164.934	749.540.727	27.332.057.353
267	Kab. Probolinggo	26.689.304.156	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	434.415.557	749.540.727	26.689.304.156
268	Kab. Sampang	26.513.408.375	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	258.519.776	749.540.727	26.513.408.375
269	Kab. Sidoarjo	25.202.747.826	19.902.399.276	4.198.525.354	58.865.576	35.124.367	258.292.526	749.540.727	25.202.747.826
270	Kab. Situbondo	26.670.412.686	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	39.015.952	411.632.502	749.540.727	26.670.412.686
271	Kab. Sumenep	28.445.062.377	19.864.893.276	7.439.535.431	58.865.576	35.124.367	297.103.000	749.540.727	28.445.062.377
272	Kab. Trenggalek	28.059.989.408	19.864.893.276	5.546.464.653	1.460.037.835	35.124.367	403.928.550	749.540.727	28.059.989.408
273	Kab. Tuban	31.619.649.432	21.323.184.165	8.557.949.064	61.720.606	35.124.367	892.130.503	749.540.727	31.619.649.432
274	Kab. Tulungagung	26.591.028.165	19.864.893.276	5.546.464.653	58.936.457	35.124.367	336.068.685	749.540.727	26.591.028.165
275	Kota Blitar	26.513.181.125	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	258.292.526	749.540.727	26.513.181.125
276	Kota Kediri	26.513.181.125	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	258.292.526	749.540.727	26.513.181.125
277	Kota Madiun	26.513.181.125	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	258.292.526	749.540.727	26.513.181.125
278	Kota Malang	26.513.181.125	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	258.292.526	749.540.727	26.513.181.125
279	Kota Mojokerto	26.513.191.114	19.864.893.276	5.546.464.653	58.875.565	35.124.367	258.292.526	749.540.727	26.513.191.114
280	Kota Pasuruan	26.513.181.125	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	258.292.526	749.540.727	26.513.181.125
281	Kota Probolinggo	26.513.181.125	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	258.292.526	749.540.727	26.513.181.125
282	Kota Surabaya	26.631.930.267	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	377.041.668	749.540.727	26.631.930.267
283	Kota Batu	26.517.069.269	19.864.893.276	5.546.464.653	58.865.576	35.124.367	262.180.670	749.540.727	26.517.069.269
284	Provinsi Kalimantan Barat	45.831.834.250	-	-	25.165.628.112	-	20.666.206.138	-	45.831.834.250
285	Kab. Bengkayang	2.978.445.509	-	-	1.505.516.655	-	723.388.127	749.540.727	2.978.445.509
286	Kab. Landak	12.234.028.211	-	-	10.514.404.705	-	970.082.779	749.540.727	12.234.028.211
287	Kab. Kapuas Hulu	7.938.985.310	-	-	3.889.066.142	-	3.300.378.441	749.540.727	7.938.985.310
288	Kab. Ketapang	60.670.265.694	-	-	47.389.802.661	-	12.530.922.306	749.540.727	60.670.265.694
289	Kab. Mempawah	6.642.724.102	-	-	3.103.122.808	-	2.790.060.567	749.540.727	6.642.724.102
290	Kab. Sambas	2.407.539.303	-	-	891.014.661	-	766.983.915	749.540.727	2.407.539.303
291	Kab. Sanggau	19.041.544.752	-	-	16.947.970.564	-	1.344.033.461	749.540.727	19.041.544.752
292	Kab. Sintang	14.746.325.568	-	-	8.605.424.642	-	5.391.360.199	749.540.727	14.746.325.568
293	Kota Pontianak	3.046.370.036	-	-	1.413.358.126	-	883.471.183	749.540.727	3.046.370.036
294	Kota Singkawang	2.130.898.943	-	-	658.676.306	-	722.681.910	749.540.727	2.130.898.943
295	Kab. Kayong Utara	6.785.355.441	-	-	5.305.756.304	-	730.058.410	749.540.727	6.785.355.441
296	Kab. Kubu Raya	4.145.790.416	-	-	997.759.858	-	2.398.489.831	749.540.727	4.145.790.416
297	Kab. Sekadau	2.556.961.939	-	-	1.074.722.937	-	732.698.275	749.540.727	2.556.961.939
298	Kab. Melawi	4.321.809.865	-	-	2.395.809.128	-	1.176.460.010	749.540.727	4.321.809.865
299	Provinsi Kalimantan Tengah	265.449.052.173	213.703.610	1.463.546.000	128.315.481.621	-	135.456.320.942	-	265.449.052.173
300	Kab. Barito Selatan	31.148.108.169	32.877.640	225.160.600	24.228.764.308	-	5.911.764.894	749.540.727	31.148.108.169
301	Kab. Barito Utara	129.818.617.497	425.843.640	2.927.092.700	96.311.741.585	-	29.404.398.845	749.540.727	129.818.617.497

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	Kab. Kapuas	169.269.439.809	32.877.640	225.160.600	128.788.401.674	-	39.473.459.168	749.540.727	169.269.439.809
303	Kab. Kotawaringin Barat	28.585.987.844	32.877.640	225.160.600	15.854.961.535	-	11.723.447.342	749.540.727	28.585.987.844
304	Kab. Kotawaringin Timur	35.647.335.803	32.877.640	225.160.600	19.990.373.071	-	14.649.383.765	749.540.727	35.647.335.803
305	Kota Palangkaraya	22.816.061.815	32.877.640	225.160.600	16.337.482.610	-	5.471.000.238	749.540.727	22.816.061.815
306	Kab. Barito Timur	42.283.268.009	34.440.519	225.160.600	33.137.472.841	-	8.136.653.322	749.540.727	42.283.268.009
307	Kab. Murung Raya	120.229.179.053	32.877.640	225.160.600	94.003.785.715	-	25.217.814.371	749.540.727	120.229.179.053
308	Kab. Pulang Pisau	22.420.923.594	32.877.640	225.160.600	15.348.394.342	-	6.064.950.285	749.540.727	22.420.923.594
309	Kab. Gunung Mas	60.830.767.757	32.877.640	225.160.600	31.702.606.825	-	28.120.581.965	749.540.727	60.830.767.757
310	Kab. Lamandau	40.464.409.471	32.877.640	225.160.600	18.106.581.346	-	21.350.249.158	749.540.727	40.464.409.471
311	Kab. Sukamara	23.149.657.899	32.877.640	225.160.600	16.800.748.881	-	5.341.330.051	749.540.727	23.149.657.899
312	Kab. Katingan	76.524.639.314	32.877.640	225.160.600	25.599.930.396	-	49.917.129.951	749.540.727	76.524.639.314
313	Kab. Seruyan	98.691.002.059	32.877.640	225.160.600	17.254.045.090	-	80.429.378.002	749.540.727	98.691.002.059
314	Provinsi Kalimantan Selatan	481.535.513.061	2.390.926.252	-	477.456.219.380	-	1.688.367.429	-	481.535.513.061
315	Kab. Banjar	118.975.257.408	398.487.358	-	117.590.529.365	-	236.699.958	749.540.727	118.975.257.408
316	Kab. Barito Kuala	79.892.836.384	398.487.358	-	78.656.312.523	-	88.495.776	749.540.727	79.892.836.384
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	119.959.983.816	398.487.358	-	118.724.752.322	-	87.203.409	749.540.727	119.959.983.816
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	80.154.397.039	398.487.358	-	78.925.456.975	-	80.911.979	749.540.727	80.154.397.039
319	Kab. Hulu Sungai Utara	79.884.820.853	398.487.358	-	78.655.822.008	-	80.970.760	749.540.727	79.884.820.853
320	Kab. Kotabaru	156.994.588.212	398.487.358	-	155.353.949.353	-	492.610.774	749.540.727	156.994.588.212
321	Kab. Tabalong	202.615.827.203	4.688.670.287	-	196.240.422.296	-	937.193.893	749.540.727	202.615.827.203
322	Kab. Tanah Laut	191.770.286.704	398.487.358	-	190.473.780.668	-	148.477.951	749.540.727	191.770.286.704
323	Kab. Tapin	148.691.126.188	398.487.358	-	147.462.186.124	-	80.911.979	749.540.727	148.691.126.188
324	Kota Banjarbaru	79.894.060.814	398.487.358	-	78.665.120.750	-	80.911.979	749.540.727	79.894.060.814
325	Kota Banjarmasin	79.898.366.780	398.487.358	-	78.655.822.008	-	94.516.687	749.540.727	79.898.366.780
326	Kab. Balangan	324.857.710.945	491.670.976	-	323.535.571.360	-	80.927.882	749.540.727	324.857.710.945
327	Kab. Tanah Bumbu	274.461.877.389	398.487.358	-	272.520.351.582	-	793.497.722	749.540.727	274.461.877.389
328	Provinsi Kalimantan Timur	1.212.530.007.805	200.506.895.716	77.227.960.304	835.783.869.382	-	99.011.282.403	-	1.212.530.007.805
329	Kab. Berau	522.306.693.605	41.787.972.710	15.957.347.698	398.965.350.666	-	64.846.481.804	749.540.727	522.306.693.605
330	Kab. Kutai Kartanegara	914.432.969.669	175.622.393.939	69.470.193.800	642.306.158.208	-	26.284.682.995	749.540.727	914.432.969.669
331	Kab. Kutai Barat	467.897.482.182	41.787.187.884	15.957.347.698	381.099.724.700	-	28.303.681.173	749.540.727	467.897.482.182
332	Kab. Kutai Timur	756.687.396.837	39.602.499.884	15.957.347.698	660.000.255.916	-	40.377.752.612	749.540.727	756.687.396.837
333	Kab. Mahakam Ulu	265.386.328.977	41.787.184.658	15.957.347.698	175.515.586.811	-	31.376.669.083	749.540.727	265.386.328.977
334	Kab. Paser	407.444.265.456	41.787.972.710	15.957.347.698	336.653.765.524	-	12.295.638.797	749.540.727	407.444.265.456
335	Kota Balikpapan	242.152.125.164	41.787.972.710	15.957.347.698	177.996.045.048	-	5.661.218.981	749.540.727	242.152.125.164
336	Kota Bontang	243.391.182.863	39.610.374.423	16.324.796.133	181.052.952.350	-	5.653.519.230	749.540.727	243.391.182.863
337	Kota Samarinda	280.328.430.678	42.584.696.756	16.168.951.400	215.009.612.763	-	5.815.629.032	749.540.727	280.328.430.678
338	Kab. Penajam Paser Utara	260.801.615.072	48.365.663.108	18.209.177.623	185.454.053.964	-	8.023.179.650	749.540.727	260.801.615.072
339	Provinsi Kalimantan Utara	140.290.605.657	8.243.356.310	1.048.516.593	53.038.698.277	-	77.960.034.477	-	140.290.605.657
340	Kab. Bulungan	100.036.336.403	8.854.403.981	1.518.536.855	38.745.401.264	-	50.168.453.576	749.540.727	100.036.336.403
341	Kab. Malinau	141.666.208.151	4.121.903.778	524.258.259	84.633.089.852	-	51.637.415.535	749.540.727	141.666.208.151
342	Kab. Nunukan	111.568.343.801	5.387.582.611	686.368.900	69.226.284.039	-	35.518.567.524	749.540.727	111.568.343.801
343	Kab. Tana Tidung	124.108.585.865	4.121.956.370	524.258.259	100.064.235.105	-	18.648.595.404	749.540.727	124.108.585.865
344	Kota Tarakan	47.446.869.159	14.074.849.867	974.484.319	23.751.811.460	-	7.896.182.786	749.540.727	47.446.869.159

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
345	Provinsi Sulawesi Utara	33.816.087.740	-	-	26.859.142.119	6.627.953.072	328.992.549	-	33.816.087.740
346	Kab. Bolaang Mongondow	7.514.066.401	-	-	5.726.597.973	946.850.739	91.076.962	749.540.727	7.514.066.401
347	Kab. Minahasa	9.418.737.203	-	-	3.600.683.358	5.061.977.346	6.535.772	749.540.727	9.418.737.203
348	Kab. Sangihe	5.563.334.914	-	-	3.860.407.676	946.850.739	6.535.772	749.540.727	5.563.334.914
349	Kota Bitung	46.392.416.887	-	-	44.689.489.649	946.850.739	6.535.772	749.540.727	46.392.416.887
350	Kota Manado	5.371.936.378	-	-	3.601.309.558	1.014.550.321	6.535.772	749.540.727	5.371.936.378
351	Kab. Kepulauan Talaud	5.502.566.409	-	-	3.799.639.171	946.850.739	6.535.772	749.540.727	5.502.566.409
352	Kab. Minahasa Selatan	6.426.538.433	-	-	4.660.170.842	993.624.748	23.202.116	749.540.727	6.426.538.433
353	Kab. Minahasa Tenggara	5.441.831.505	-	-	3.698.659.921	959.159.488	34.471.369	749.540.727	5.441.831.505
354	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	5.303.610.596	-	-	3.600.683.358	946.850.739	6.535.772	749.540.727	5.303.610.596
355	Kota Kotamobagu	5.523.804.479	-	-	3.820.877.241	946.850.739	6.535.772	749.540.727	5.523.804.479
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	9.878.695.918	-	-	8.174.856.265	946.850.739	7.448.187	749.540.727	9.878.695.918
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	13.990.751.355	-	-	12.225.587.157	946.850.739	68.772.732	749.540.727	13.990.751.355
358	Kota Tomohon	12.975.635.654	-	-	3.600.683.358	8.618.875.797	6.535.772	749.540.727	12.975.635.654
359	Kab. Minahasa Utara	8.583.475.241	-	-	6.485.427.812	1.341.970.930	6.535.772	749.540.727	8.583.475.241
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	5.856.934.750	-	-	4.052.130.011	946.850.739	108.413.273	749.540.727	5.856.934.750
361	Provinsi Gorontalo	3.859.571.657	-	-	2.165.162.810	-	1.694.408.847	-	3.859.571.657
362	Kab. Boalemo	1.000.146.273	-	-	167.663.989	-	82.941.557	749.540.727	1.000.146.273
363	Kab. Gorontalo	2.840.063.861	-	-	1.919.671.615	-	170.851.519	749.540.727	2.840.063.861
364	Kota Gorontalo	828.701.078	-	-	11.018	-	79.149.333	749.540.727	828.701.078
365	Kab. Pohuwato	4.297.921.226	-	-	3.194.966.936	-	353.413.563	749.540.727	4.297.921.226
366	Kab. Gorontalo Utara	3.214.342.781	-	-	2.083.397.526	-	381.404.528	749.540.727	3.214.342.781
367	Kab. Bone Bolango	2.144.452.126	-	-	1.311.457.493	-	83.453.906	749.540.727	2.144.452.126
368	Provinsi Sulawesi Tengah	94.859.913.121	20.714.283.443	38.728.785.900	31.821.391.859	-	3.595.451.919	-	94.859.913.121
369	Kab. Banggai	140.998.391.372	42.629.878.034	77.457.573.200	17.741.801.154	-	2.419.598.257	749.540.727	140.998.391.372
370	Kab. Banggai Laut	14.143.848.398	3.452.380.973	6.454.797.300	3.365.229.731	-	121.899.667	749.540.727	14.143.848.398
371	Kab. Banggai Kepulauan	14.144.836.791	3.452.380.973	6.454.797.300	3.382.510.453	-	105.607.338	749.540.727	14.144.836.791
372	Kab. Buol	17.086.871.755	3.452.380.973	6.454.797.300	6.269.272.746	-	160.880.009	749.540.727	17.086.871.755
373	Kab. Toli-toli	16.763.332.394	3.452.380.973	6.454.797.300	5.931.128.883	-	175.484.511	749.540.727	16.763.332.394
374	Kab. Donggala	19.866.284.224	3.452.380.973	6.454.797.300	9.051.082.829	-	158.482.395	749.540.727	19.866.284.224
375	Kab. Morowali	57.104.892.566	3.452.380.973	6.454.797.300	44.920.581.052	-	1.527.592.514	749.540.727	57.104.892.566
376	Kab. Morowali Utara	35.708.143.019	2.864.931.826	6.454.797.300	24.479.554.171	-	1.159.318.995	749.540.727	35.708.143.019
377	Kab. Poso	15.612.664.954	3.452.380.973	6.454.797.300	3.737.016.656	-	1.218.929.298	749.540.727	15.612.664.954
378	Kota Palu	14.219.735.861	3.452.380.973	6.454.797.300	3.462.877.400	-	100.139.461	749.540.727	14.219.735.861
379	Kab. Parigi Moutong	16.177.268.942	3.452.380.973	6.454.797.300	5.329.626.865	-	190.923.077	749.540.727	16.177.268.942
380	Kab. Sigi	14.234.766.157	3.452.380.973	6.454.797.300	3.386.261.141	-	191.786.016	749.540.727	14.234.766.157
381	Kab. Tojo Una Una	25.489.263.843	3.452.380.973	6.454.797.300	9.632.268.936	-	5.200.275.907	749.540.727	25.489.263.843
382	Provinsi Sulawesi Selatan	38.394.403.207	-	13.073.395.380	24.760.277.071	-	560.730.756	-	38.394.403.207
383	Kab. Bantaeng	3.744.984.334	-	1.136.817.321	1.840.292.571	-	18.333.715	749.540.727	3.744.984.334
384	Kab. Barru	3.755.031.440	-	1.136.817.321	1.848.171.158	-	20.502.234	749.540.727	3.755.031.440
385	Kab. Bone	5.508.659.625	-	1.136.817.321	3.583.021.614	-	39.279.963	749.540.727	5.508.659.625
386	Kab. Bulukumba	17.461.039.281	-	1.136.817.321	15.556.635.871	-	18.045.362	749.540.727	17.461.039.281
387	Kab. Enrekang	3.787.395.976	-	1.136.817.321	1.881.061.704	-	19.976.224	749.540.727	3.787.395.976

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
388	Kab. Gowa	3.768.702.112	-	1.136.817.321	1.840.292.571	-	42.051.493	749.540.727	3.768.702.112
389	Kab. Jeneponto	3.745.814.662	-	1.136.817.321	1.840.468.564	-	18.988.050	749.540.727	3.745.814.662
390	Kab. Luwu	4.159.233.453	-	1.136.817.321	2.252.438.035	-	20.437.370	749.540.727	4.159.233.453
391	Kab. Luwu Utara	4.379.975.175	-	1.136.817.321	2.474.241.812	-	19.375.315	749.540.727	4.379.975.175
392	Kab. Maros	3.788.036.200	-	1.136.817.321	1.851.634.477	-	50.043.675	749.540.727	3.788.036.200
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	3.803.869.143	-	1.136.817.321	1.895.058.325	-	22.452.770	749.540.727	3.803.869.143
394	Kab. Pinrang	3.745.174.976	-	1.136.817.321	1.840.292.571	-	18.524.357	749.540.727	3.745.174.976
395	Kab. Kepulauan Selayar	3.759.788.392	-	1.136.817.321	1.855.384.982	-	18.045.362	749.540.727	3.759.788.392
396	Kab. Sidenreng Rappang	3.791.724.420	-	1.136.817.321	1.845.226.519	-	60.139.853	749.540.727	3.791.724.420
397	Kab. Sinjai	3.914.573.158	-	1.136.817.321	2.007.367.257	-	20.847.853	749.540.727	3.914.573.158
398	Kab. Soppeng	3.809.314.841	-	1.136.817.321	1.840.322.181	-	82.634.612	749.540.727	3.809.314.841
399	Kab. Takalar	3.746.367.147	-	1.136.817.321	1.841.963.737	-	18.045.362	749.540.727	3.746.367.147
400	Kab. Tana Toraja	3.847.849.847	-	1.136.817.321	1.937.788.081	-	23.703.718	749.540.727	3.847.849.847
401	Kab. Wajo	28.755.015.175	-	26.146.791.271	1.840.637.815	-	18.045.362	749.540.727	28.755.015.175
402	Kota Pare-pare	3.744.695.981	-	1.136.817.321	1.840.292.571	-	18.045.362	749.540.727	3.744.695.981
403	Kab. Toraja Utara	3.860.569.789	-	1.136.817.321	1.954.494.987	-	19.716.754	749.540.727	3.860.569.789
404	Kota Makassar	3.959.363.778	-	1.136.817.321	1.840.292.571	-	232.713.159	749.540.727	3.959.363.778
405	Kota Palopo	3.879.544.656	-	1.136.817.321	1.975.141.246	-	18.045.362	749.540.727	3.879.544.656
406	Kab. Luwu Timur	41.848.796.294	-	1.136.817.321	39.554.183.623	-	408.254.623	749.540.727	41.848.796.294
407	Provinsi Sulawesi Barat	235.891.621	-	-	197.002.946	-	38.888.675	-	235.891.621
408	Kab. Majene	757.336.713	-	-	1.423.532	-	6.372.454	749.540.727	757.336.713
409	Kab. Mamuju	1.469.090.897	-	-	678.916.518	-	40.633.652	749.540.727	1.469.090.897
410	Kab. Mamuju Tengah	840.966.722	-	-	166.563	-	91.259.432	749.540.727	840.966.722
411	Kab. Polewali Mandar	852.676.108	-	-	96.977.594	-	6.157.787	749.540.727	852.676.108
412	Kab. Mamasa	767.108.965	-	-	7.399.185	-	10.169.053	749.540.727	767.108.965
413	Kab. Mamuju Utara	765.073.273	-	-	3.454.709	-	12.077.837	749.540.727	765.073.273
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	22.880.573.883	-	-	21.857.320.968	-	1.023.252.915	-	22.880.573.883
415	Kab. Buton	4.770.418.420	-	-	4.000.605.231	-	20.272.462	749.540.727	4.770.418.420
416	Kab. Konawe	6.780.925.629	-	-	5.683.876.742	-	347.508.160	749.540.727	6.780.925.629
417	Kab. Konawe Kepulauan	3.143.700.703	-	-	2.343.266.447	-	50.893.529	749.540.727	3.143.700.703
418	Kab. Kolaka	31.339.189.360	-	-	30.432.832.616	-	156.816.017	749.540.727	31.339.189.360
419	Kab. Kolaka Timur	2.993.918.425	-	-	2.017.010.100	-	227.367.598	749.540.727	2.993.918.425
420	Kab. Muna	2.799.207.682	-	-	2.007.597.854	-	42.069.101	749.540.727	2.799.207.682
421	Kota Kendari	2.851.067.306	-	-	2.042.226.188	-	59.300.391	749.540.727	2.851.067.306
422	Kota Bau-bau	2.957.682.892	-	-	2.195.223.121	-	12.919.044	749.540.727	2.957.682.892
423	Kab. Konawe Selatan	9.712.632.189	-	-	8.920.786.281	-	42.305.181	749.540.727	9.712.632.189
424	Kab. Bombana	9.021.205.000	-	-	8.224.192.084	-	47.472.189	749.540.727	9.021.205.000
425	Kab. Konawe Utara	12.408.478.360	-	-	10.553.197.498	-	1.105.740.135	749.540.727	12.408.478.360
426	Kab. Buton Utara	3.706.992.639	-	-	2.804.528.130	-	152.923.782	749.540.727	3.706.992.639
427	Kab. Wakatobi	2.794.375.184	-	-	2.005.912.493	-	38.921.964	749.540.727	2.794.375.184
428	Kab. Kolaka Utara	7.305.576.714	-	-	6.516.040.079	-	39.995.908	749.540.727	7.305.576.714
429	Kab. Muna Barat	2.744.117.673	-	-	1.957.449.200	-	37.127.746	749.540.727	2.744.117.673
430	Kab. Buton Tengah	2.749.269.368	-	-	1.957.449.200	-	42.279.441	749.540.727	2.749.269.368

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
431	Kab. Buton Selatan	3.531.401.000	-	-	2.115.951.745	-	665.908.528	749.540.727	3.531.401.000
432	Provinsi Bali	-	-	-	-	-	-	-	-
433	Kab. Badung	749.540.727	-	-	-	-	-	749.540.727	749.540.727
434	Kab. Bangli	749.540.727	-	-	-	-	-	749.540.727	749.540.727
435	Kab. Buleleng	749.540.727	-	-	-	-	-	749.540.727	749.540.727
436	Kab. Gianyar	749.540.727	-	-	-	-	-	749.540.727	749.540.727
437	Kab. Jembrana	749.540.727	-	-	-	-	-	749.540.727	749.540.727
438	Kab. Karangasem	749.540.727	-	-	-	-	-	749.540.727	749.540.727
439	Kab. Klungkung	749.540.727	-	-	-	-	-	749.540.727	749.540.727
440	Kab. Tabanan	749.540.727	-	-	-	-	-	749.540.727	749.540.727
441	Kota Denpasar	749.540.727	-	-	-	-	-	749.540.727	749.540.727
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	174.366.614.890	-	-	173.915.035.291	-	451.579.599	-	174.366.614.890
443	Kab. Bima	40.043.944.115	-	-	39.210.762.913	-	83.640.475	749.540.727	40.043.944.115
444	Kab. Dompu	39.624.502.384	-	-	38.019.137.999	-	855.823.658	749.540.727	39.624.502.384
445	Kab. Lombok Barat	39.133.485.687	-	-	38.327.360.597	-	56.584.363	749.540.727	39.133.485.687
446	Kab. Lombok Tengah	38.761.823.149	-	-	37.957.336.020	-	54.946.402	749.540.727	38.761.823.149
447	Kab. Lombok Timur	39.083.730.667	-	-	38.146.150.284	-	188.039.656	749.540.727	39.083.730.667
448	Kab. Sumbawa	45.647.724.398	-	-	44.369.920.498	-	528.263.173	749.540.727	45.647.724.398
449	Kota Mataram	38.758.857.913	-	-	37.957.033.178	-	52.284.008	749.540.727	38.758.857.913
450	Kab. Lombok Utara	38.758.857.913	-	-	37.957.033.178	-	52.284.008	749.540.727	38.758.857.913
451	Kota Bima	38.758.857.913	-	-	37.957.033.178	-	52.284.008	749.540.727	38.758.857.913
452	Kab. Sumbawa Barat	346.832.865.585	-	-	345.947.373.913	-	135.950.945	749.540.727	346.832.865.585
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.911.113.363	-	-	1.337.469.756	1.543.200.952	30.442.655	-	2.911.113.363
454	Kab. Alor	1.182.162.432	-	-	278.718.343	146.971.696	6.931.666	749.540.727	1.182.162.432
455	Kab. Belu	2.184.117.797	-	-	1.284.354.394	146.971.696	3.250.980	749.540.727	2.184.117.797
456	Kab. Ende	3.176.413.456	-	-	26.091.271	2.366.275.290	34.506.168	749.540.727	3.176.413.456
457	Kab. Flores Timur	909.105.768	-	-	9.626.878	146.971.696	2.966.467	749.540.727	909.105.768
458	Kab. Kupang	1.390.940.673	-	-	491.557.347	146.971.696	2.870.903	749.540.727	1.390.940.673
459	Kab. Lembata	909.010.204	-	-	9.626.878	146.971.696	2.870.903	749.540.727	909.010.204
460	Kab. Malaka	914.673.264	-	-	15.069.951	146.971.696	3.090.890	749.540.727	914.673.264
461	Kab. Manggarai	1.836.938.621	-	-	241.392.524	843.134.467	2.870.903	749.540.727	1.836.938.621
462	Kab. Ngada	1.003.565.058	-	-	80.219.390	170.934.038	2.870.903	749.540.727	1.003.565.058
463	Kab. Sikka	935.261.246	-	-	9.626.878	146.971.696	29.121.945	749.540.727	935.261.246
464	Kab. Sumba Barat	913.118.778	-	-	13.735.452	146.971.696	2.870.903	749.540.727	913.118.778
465	Kab. Sumba Timur	1.937.943.340	-	-	1.038.560.014	146.971.696	2.870.903	749.540.727	1.937.943.340
466	Kab. Timor Tengah Selatan	1.519.638.293	-	-	620.254.967	146.971.696	2.870.903	749.540.727	1.519.638.293
467	Kab. Timor Tengah Utara	1.915.725.282	-	-	1.016.341.956	146.971.696	2.870.903	749.540.727	1.915.725.282
468	Kota Kupang	909.010.204	-	-	9.626.878	146.971.696	2.870.903	749.540.727	909.010.204
469	Kab. Rote Ndao	913.881.969	-	-	14.498.643	146.971.696	2.870.903	749.540.727	913.881.969
470	Kab. Nagekeo	944.907.754	-	-	45.524.428	146.971.696	2.870.903	749.540.727	944.907.754
471	Kab. Sumba Tengah	1.216.647.562	-	-	317.264.236	146.971.696	2.870.903	749.540.727	1.216.647.562
472	Kab. Sumba Barat Daya	915.871.153	-	-	16.487.827	146.971.696	2.870.903	749.540.727	915.871.153
473	Kab. Manggarai Timur	980.711.652	-	-	81.328.326	146.971.696	2.870.903	749.540.727	980.711.652

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
474	Kab. Sabu Raijua	909.602.429	-	-	10.219.103	146.971.696	2.870.903	749.540.727	909.602.429
475	Kab. Manggarai Barat	1.266.138.861	-	-	366.755.535	146.971.696	2.870.903	749.540.727	1.266.138.861
476	Provinsi Maluku	21.641.329.722	395.609.568	-	2.298.330.434	-	18.947.389.720	-	21.641.329.722
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	8.743.458.881	79.122.173	-	342.500.064	-	7.572.295.917	749.540.727	8.743.458.881
478	Kab. Maluku Tengah	5.379.668.803	79.122.173	-	314.961.858	-	4.236.044.045	749.540.727	5.379.668.803
479	Kab. Maluku Tenggara	2.016.489.043	79.122.173	-	310.941.802	-	876.884.341	749.540.727	2.016.489.043
480	Kab. Buru	10.913.204.101	79.122.173	-	310.941.802	-	9.773.599.399	749.540.727	10.913.204.101
481	Kota Ambon	2.009.542.055	79.122.173	-	310.941.802	-	869.937.353	749.540.727	2.009.542.055
482	Kab. Seram Bagian Barat	2.161.207.299	79.122.173	-	332.398.580	-	1.000.145.819	749.540.727	2.161.207.299
483	Kab. Seram Bagian Timur	2.842.094.033	79.122.173	-	311.637.344	-	989.697.152	749.540.727	2.842.094.033
484	Kab. Maluku Barat Daya	8.944.949.893	79.122.173	-	7.246.289.090	-	869.997.903	749.540.727	8.944.949.893
485	Kab. Buru Selatan	15.844.053.859	79.122.173	-	316.755.914	-	14.698.635.045	749.540.727	15.844.053.859
486	Kab. Kepulauan Aru	2.240.216.694	79.122.173	-	310.941.802	-	1.100.611.992	749.540.727	2.240.216.694
487	Kota Tual	2.009.542.055	79.122.173	-	310.941.802	-	869.937.353	749.540.727	2.009.542.055
488	Provinsi Maluku Utara	32.379.017.772	-	-	14.374.593.263	200.219.010	17.804.205.499	-	32.379.017.772
489	Kab. Halmahera Tengah	19.024.821.394	-	-	12.474.727.905	44.492.770	5.756.059.992	749.540.727	19.024.821.394
490	Kab. Halmahera Barat	4.207.417.758	-	-	2.544.862.936	173.436.865	739.577.230	749.540.727	4.207.417.758
491	Kota Ternate	3.270.455.768	-	-	1.746.880.170	44.492.770	729.542.101	749.540.727	3.270.455.768
492	Kab. Halmahera Timur	24.985.825.059	-	-	12.213.271.339	44.492.770	11.978.520.223	749.540.727	24.985.825.059
493	Kota Tidore Kepulauan	3.821.954.103	-	-	2.281.305.510	44.492.770	746.615.096	749.540.727	3.821.954.103
494	Kab. Kepulauan Sula	14.279.275.268	-	-	12.719.737.894	44.492.770	765.503.877	749.540.727	14.279.275.268
495	Kab. Pulau Morotai	3.490.249.409	-	-	1.911.148.850	44.492.770	785.067.062	749.540.727	3.490.249.409
496	Kab. Pulau Taliabu	14.842.633.149	-	-	8.852.647.833	44.492.770	5.195.951.819	749.540.727	14.842.633.149
497	Kab. Halmahera Selatan	44.239.669.909	-	-	15.161.328.463	271.493.670	28.057.307.049	749.540.727	44.239.669.909
498	Kab. Halmahera Utara	10.589.764.230	-	-	9.003.124.380	44.492.770	792.606.353	749.540.727	10.589.764.230
499	Provinsi Papua	166.014.022.011	-	-	133.250.878.910	-	32.763.143.101	-	166.014.022.011
500	Kab. Yalimo	11.122.748.020	-	-	9.259.452.718	-	1.113.754.575	749.540.727	11.122.748.020
501	Kab. Lanny Jaya	11.122.748.020	-	-	9.259.452.718	-	1.113.754.575	749.540.727	11.122.748.020
502	Kab. Biak Numfor	11.122.796.540	-	-	9.259.452.718	-	1.113.803.095	749.540.727	11.122.796.540
503	Kab. Jayapura	11.611.798.189	-	-	9.347.817.570	-	1.514.439.892	749.540.727	11.611.798.189
504	Kab. Jayawijaya	11.310.119.413	-	-	9.446.824.111	-	1.113.754.575	749.540.727	11.310.119.413
505	Kab. Merauke	27.489.787.800	-	-	9.259.452.718	-	17.480.794.355	749.540.727	27.489.787.800
506	Kab. Mimika	272.703.117.988	-	-	263.307.728.999	-	8.645.848.262	749.540.727	272.703.117.988
507	Kab. Nabire	54.523.017.388	-	-	9.744.774.515	-	44.028.702.146	749.540.727	54.523.017.388
508	Kab. Paniai	12.399.635.710	-	-	10.536.340.408	-	1.113.754.575	749.540.727	12.399.635.710
509	Kab. Puncak Jaya	11.466.423.463	-	-	9.603.128.161	-	1.113.754.575	749.540.727	11.466.423.463
510	Kab. Kepulauan Yapen	11.126.451.940	-	-	9.261.903.824	-	1.115.007.389	749.540.727	11.126.451.940
511	Kota Jayapura	11.122.748.020	-	-	9.259.452.718	-	1.113.754.575	749.540.727	11.122.748.020
512	Kab. Sarmi	29.657.592.876	-	-	9.412.446.321	-	19.495.605.828	749.540.727	29.657.592.876
513	Kab. Keerom	14.476.577.210	-	-	10.037.555.671	-	3.689.480.812	749.540.727	14.476.577.210
514	Kab. Yahukimo	11.216.859.835	-	-	9.353.339.834	-	1.113.979.274	749.540.727	11.216.859.835
515	Kab. Pegunungan Bintang	17.435.512.279	-	-	15.572.216.977	-	1.113.754.575	749.540.727	17.435.512.279
516	Kab. Tolikara	11.473.162.245	-	-	9.609.866.943	-	1.113.754.575	749.540.727	11.473.162.245

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	SUMBER DAYA ALAM						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
517	Kab. Boven Digoel	25.337.151.089	-	-	9.410.233.150	-	15.177.377.212	749.540.727	25.337.151.089
518	Kab. Mappi	12.050.201.268	-	-	9.259.452.718	-	2.041.207.823	749.540.727	12.050.201.268
519	Kab. Asmat	11.752.257.500	-	-	9.259.452.718	-	1.743.264.055	749.540.727	11.752.257.500
520	Kab. Waropen	11.491.277.365	-	-	9.626.464.045	-	1.115.272.593	749.540.727	11.491.277.365
521	Kab. Mamberamo Raya	11.153.801.919	-	-	9.384.090.295	-	1.020.170.897	749.540.727	11.153.801.919
522	Kab. Mamberamo Tengah	11.122.748.020	-	-	9.259.452.718	-	1.113.754.575	749.540.727	11.122.748.020
523	Kab. Nduga	11.122.748.020	-	-	9.259.452.718	-	1.113.754.575	749.540.727	11.122.748.020
524	Kab. Dogiyai	11.122.748.020	-	-	9.259.452.718	-	1.113.754.575	749.540.727	11.122.748.020
525	Kab. Intan Jaya	11.122.748.020	-	-	9.259.452.718	-	1.113.754.575	749.540.727	11.122.748.020
526	Kab. Puncak	11.122.748.020	-	-	9.259.452.718	-	1.113.754.575	749.540.727	11.122.748.020
527	Kab. Deiyai	11.122.748.020	-	-	9.259.452.718	-	1.113.754.575	749.540.727	11.122.748.020
528	Kab. Supiori	11.123.210.877	-	-	9.259.452.718	-	1.114.217.432	749.540.727	11.123.210.877
529	Provinsi Papua Barat	1.491.885.622.760	210.745.425.686	1.251.686.907.967	401.597.811	-	29.051.691.296	-	1.491.885.622.760
530	Kab. Sorong	53.942.265.620	17.706.027.958	30.585.647.750	31.085.961	-	4.869.963.224	749.540.727	53.942.265.620
531	Kab. Manokwari	33.744.029.014	1.816.677.925	28.608.222.644	83.999.507	-	2.485.588.211	749.540.727	33.744.029.014
532	Kab. Manokwari Selatan	36.234.683.566	1.816.677.600	28.608.222.644	10.320.500	-	5.049.922.095	749.540.727	36.234.683.566
533	Kab. Fak fak	37.128.910.711	1.816.802.602	28.608.222.644	55.477.456	-	5.898.867.282	749.540.727	37.128.910.711
534	Kota Sorong	33.354.289.584	1.816.802.602	28.608.222.644	15.025.819	-	2.164.697.792	749.540.727	33.354.289.584
535	Kab. Pegunungan Arfak	33.673.096.638	1.816.677.600	28.608.222.644	10.320.500	-	2.488.335.167	749.540.727	33.673.096.638
536	Kab. Sorong Selatan	34.459.999.817	1.816.802.602	28.608.222.644	27.091.912	-	3.258.341.932	749.540.727	34.459.999.817
537	Kab. Raja Ampat	35.903.380.661	3.880.853.591	28.608.222.644	798.798.923	-	1.865.964.776	749.540.727	35.903.380.661
538	Kab. Teluk Bintuni	372.290.092.929	4.250.526.088	341.321.248.775	342.301.371	-	25.626.475.968	749.540.727	372.290.092.929
539	Kab. Teluk Wondama	43.728.978.652	1.816.802.602	28.608.222.644	55.757.865	-	12.498.654.814	749.540.727	43.728.978.652
540	Kab. Tamberauw	33.469.354.334	1.816.802.602	28.608.222.644	27.365.786	-	2.267.422.575	749.540.727	33.469.354.334
541	Kab. Maybrat	37.173.115.060	1.816.802.602	28.608.222.644	323.081.797	-	5.675.467.290	749.540.727	37.173.115.060
542	Kab. Kaimana	42.865.596.304	1.816.802.602	28.608.222.644	43.547.008	-	11.647.483.323	749.540.727	42.865.596.304
JUMLAH		31.641.673.021.137	8.191.122.864.049	8.442.353.752.961	11.835.084.190.433	970.633.323.538	1.820.962.826.750	381.516.063.406	31.641.673.021.137

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	5.888.531.499	5.888.531.499
2	Kab. Aceh Barat	267.660.659	267.660.659
3	Kab. Aceh Besar	829.716.776	829.716.776
4	Kab. Aceh Selatan	267.660.659	267.660.659
5	Kab. Aceh Singkil	267.660.659	68.217.409
6	Kab. Aceh Tengah	609.253.352	609.253.352
7	Kab. Aceh Tenggara	267.660.658	136.143.158
8	Kab. Aceh Timur	341.207.659	341.207.659
9	Kab. Aceh Utara	267.660.659	267.660.659
10	Kab. Bireuen	267.660.659	267.660.659
11	Kab. Pidie	619.873.290	619.873.290
12	Kab. Simeulue	267.660.659	267.660.659
13	Kota Banda Aceh	267.660.659	267.660.659
14	Kota Sabang	267.660.659	267.660.659
15	Kota Langsa	267.660.659	267.660.659
16	Kota Lhokseumawe	267.660.659	267.660.659
17	Kab. Nagan Raya	267.660.659	291.659
18	Kab. Aceh Jaya	267.660.659	267.660.659
19	Kab. Pidie Jaya	514.311.816	514.311.816
20	Kab. Aceh Barat Daya	267.660.659	267.660.659
21	Kab. Gayo Lues	4.803.869.110	4.803.869.110
22	Kab. Aceh Tamiang	267.660.659	267.660.659
23	Kab. Bener Meriah	1.739.105.284	1.739.105.284
24	Kota Subulussalam	267.660.659	267.660.659
25	Provinsi Sumatera Utara	5.069.433.556	5.069.433.556
26	Kab. Asahan	211.122.173	211.122.173
27	Kab. Dairi	1.803.833.522	1.803.833.522
28	Kab. Deli Serdang	367.854.251	367.854.251
29	Kab. Karo	437.187.002	437.187.002
30	Kab. Labuhan Batu	210.810.000	158.107.500
31	Kab. Langkat	212.474.500	159.772.000
32	Kab. Mandailing Natal	364.278.405	364.278.405
33	Kab. Nias	211.122.173	211.122.173
34	Kab. Simalungun	211.620.672	158.918.172
35	Kab. Tapanuli Selatan	211.122.173	211.122.173
36	Kab. Tapanuli Tengah	211.122.173	211.122.173
37	Kab. Tapanuli Utara	297.145.839	297.145.839
38	Kab. Toba Samosir	211.122.173	211.122.173
39	Kota Binjai	210.810.000	210.810.000
40	Kota Medan	346.841.471	260.306.471
41	Kota Pematang Siantar	1.721.039.976	1.721.039.976
42	Kota Sibolga	211.122.173	158.419.673
43	Kota Tanjung Balai	211.122.173	158.419.673
44	Kab. Batu Bara	211.122.173	211.122.173
45	Kab. Labuhan Batu Utara	211.122.173	211.122.173
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	211.122.173	211.122.173
47	Kab. Padang Lawas Utara	211.225.668	211.225.668
48	Kab. Padang Lawas	211.122.173	211.122.173
49	Kab. Nias Utara	211.122.173	211.122.173
50	Kab. Nias Barat	211.122.173	53.868.923
51	Kota Tebing Tinggi	211.122.173	158.419.673
52	Kota Padang Sidempuan	210.903.652	53.650.402
53	Kab. Pakpak Bharat	355.443.814	104.095.314
54	Kab. Nias Selatan	211.122.173	158.419.673

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
55	Kab. Humbang Hasundutan	1.066.159.211	799.872.711
56	Kab. Serdang Bedagai	211.122.173	211.122.173
57	Kab. Samosir	210.810.000	210.810.000
58	Kota Gunungsitoli	211.122.173	158.419.673
59	Provinsi Sumatera Barat	4.290.887.332	4.290.887.332
60	Kab. Lima Puluh Kota	2.944.583.993	2.944.583.993
61	Kab. Agam	842.183.751	842.183.751
62	Kab. Kepulauan Mentawai	238.383.129	121.267.629
63	Kab. Padang Pariaman	238.383.129	238.383.129
64	Kab. Pasaman	577.551.266	577.551.266
65	Kab. Pesisir Selatan	238.383.130	238.383.130
66	Kab. Sijunjung	238.383.129	238.383.129
67	Kab. Solok	606.139.532	606.139.532
68	Kab. Tanah Datar	947.413.772	947.413.772
69	Kota Bukit Tinggi	238.382.130	121.267.630
70	Kota Padang Panjang	238.382.130	238.382.130
71	Kota Padang	238.383.129	238.383.129
72	Kota Payakumbuh	632.857.425	632.857.425
73	Kota Sawahlunto	600.748.146	600.748.146
74	Kota Solok	238.382.130	238.382.130
75	Kota Pariaman	238.382.130	238.382.130
76	Kab. Pasaman Barat	238.383.129	238.383.129
77	Kab. Dharmasraya	238.383.130	238.383.130
78	Kab. Solok Selatan	238.383.129	238.383.129
79	Provinsi Riau	-	-
80	Kab. Bengkalis	-	-
81	Kab. Indragiri Hilir	-	-
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-
83	Kab. Kampar	-	-
84	Kab. Kuantan Singingi	-	-
85	Kab. Pelalawan	-	-
86	Kab. Rokan Hilir	-	-
87	Kab. Rokan Hulu	-	-
88	Kab. Siak	-	-
89	Kota Dumai	-	-
90	Kota Pekanbaru	-	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	-
92	Provinsi Kepulauan Riau	1.811.983.313	1.359.618.813
93	Kab. Bintan	301.997.885	420.885
94	Kab. Natuna	301.997.885	226.603.635
95	Kab. Karimun	301.997.885	226.603.635
96	Kota Batam	2.415.981.089	1.209.674.089
97	Kab. Kepulauan Anambas	301.997.885	226.603.635
98	Kota Tanjung Pinang	301.997.885	226.603.635
99	Kab. Lingga	301.997.885	226.603.635
100	Provinsi Jambi	2.543.512.937	2.543.512.937
101	Kab. Batanghari	254.212.167	127.191.167
102	Kab. Bungo	254.351.394	64.849.394
103	Kab. Kerinci	2.879.273.618	2.879.273.618
104	Kab. Merangin	563.556.500	282.315.500
105	Kab. Muaro Jambi	254.351.394	254.351.394
106	Kab. Sarolangun	254.351.394	254.351.394
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	254.351.394	254.351.394
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	254.351.394	309.394

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
109	Kab. Tebo	254.212.167	254.212.167
110	Kota Jambi	254.351.394	254.351.394
111	Kota Sungai Penuh	457.221.926	457.221.926
112	Provinsi Sumatera Selatan	2.597.717.464	1.300.343.964
113	Kab. Lahat	162.171.000	-
114	Kab. Musi Banyuasin	162.273.110	102.110
115	Kab. Musi Rawas	162.171.000	-
116	Kab. Musi Rawas Utara	162.273.110	102.110
117	Kab. Muara Enim	162.273.110	102.110
118	Kab. Ogan Komering Ilir	162.356.655	41.385.655
119	Kab. Ogan Komering Ulu	162.273.110	102.110
120	Kota Palembang	162.273.110	102.110
121	Kota Pagar Alam	162.171.000	-
122	Kota Lubuk Linggau	162.338.368	167.368
123	Kota Prabumulih	162.356.655	185.655
124	Kab. Empat Lawang	162.171.000	162.171.000
125	Kab. Banyuasin	162.273.110	81.187.610
126	Kab. Ogan Ilir	162.171.000	-
127	Kab. OKU Timur	423.771.854	212.200.354
128	Kab. OKU Selatan	3.201.704.174	3.009.174
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	162.171.000	41.200.000
130	Provinsi Bangka Belitung	-	-
131	Kab. Bangka	-	-
132	Kab. Belitung	-	-
133	Kota Pangkal Pinang	-	-
134	Kab. Bangka Selatan	-	-
135	Kab. Bangka Tengah	-	-
136	Kab. Bangka Barat	-	-
137	Kab. Belitung Timur	-	-
138	Provinsi Bengkulu	-	-
139	Kab. Bengkulu Selatan	-	-
140	Kab. Bengkulu Utara	-	-
141	Kab. Rejang Lebong	-	-
142	Kota Bengkulu	-	-
143	Kab. Kaur	-	-
144	Kab. Seluma	-	-
145	Kab. Mukomuko	-	-
146	Kab. Lebong	-	-
147	Kab. Bengkulu Tengah	-	-
148	Kab. Kepahiang	-	-
149	Provinsi Lampung	3.635.621.981	3.635.621.981
150	Kab. Lampung Barat	3.304.885.896	3.304.885.896
151	Kab. Lampung Selatan	357.687.546	357.687.546
152	Kab. Lampung Tengah	450.740.733	450.740.733
153	Kab. Lampung Utara	332.060.971	332.060.971
154	Kab. Lampung Timur	831.417.893	831.417.893
155	Kab. Tanggamus	438.991.779	438.991.779
156	Kab. Tulang Bawang	242.405.710	242.405.710
157	Kab. Way Kanan	242.217.861	242.217.861
158	Kab. Pesawaran	491.302.320	491.302.320
159	Kab. Pesisir Barat	242.404.456	242.404.456
160	Kab. Pringsewu	556.954.977	556.954.977
161	Kab. Mesuji	242.405.649	242.405.649
162	Kab. Tulang Bawang Barat	242.404.093	242.404.093

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
163	Kota Bandar Lampung	242.415.215	242.415.215
164	Kota Metro	264.620.063	264.620.063
165	Provinsi DKI Jakarta	-	-
166	Provinsi Jawa Barat	102.295.692.848	102.295.692.848
167	Kab. Bandung	11.383.925.884	11.383.925.884
168	Kab. Bekasi	4.134.158.847	2.111.198.847
169	Kab. Bogor	4.139.638.629	4.139.638.629
170	Kab. Ciamis	4.417.935.405	4.417.935.405
171	Kab. Cianjur	4.410.653.959	4.410.653.959
172	Kab. Cirebon	4.867.587.575	4.867.587.575
173	Kab. Garut	25.075.197.160	25.075.197.160
174	Kab. Indramayu	4.158.956.370	4.158.956.370
175	Kab. Karawang	80.182.577.876	80.182.577.876
176	Kab. Kuningan	5.356.149.088	5.356.149.088
177	Kab. Majalengka	9.738.073.379	7.309.696.379
178	Kab. Pangandaran	4.153.047.647	4.153.047.647
179	Kab. Purwakarta	4.139.186.383	4.139.186.383
180	Kab. Subang	4.230.841.579	3.174.471.829
181	Kab. Sukabumi	4.161.148.550	4.161.148.550
182	Kab. Sumedang	18.206.779.966	18.206.779.966
183	Kab. Tasikmalaya	4.316.866.105	4.316.866.105
184	Kab. Bandung Barat	4.739.965.967	4.739.965.967
185	Kota Bandung	4.064.911.747	4.064.911.747
186	Kota Bekasi	4.064.191.959	4.064.191.959
187	Kota Bogor	4.102.223.498	4.102.223.498
188	Kota Cirebon	4.104.204.093	2.087.964.093
189	Kota Depok	4.067.474.148	5.246.148
190	Kota Sukabumi	4.113.879.286	4.113.879.286
191	Kota Cimahi	4.084.610.097	4.084.610.097
192	Kota Tasikmalaya	4.125.550.421	4.125.550.421
193	Kota Banjar	4.130.154.333	2.101.183.333
194	Provinsi Banten	-	-
195	Kab. Lebak	-	-
196	Kab. Pandeglang	-	-
197	Kab. Serang	-	-
198	Kab. Tangerang	-	-
199	Kota Cilegon	-	-
200	Kota Tangerang	-	-
201	Kota Serang	-	-
202	Kota Tangerang Selatan	-	-
203	Provinsi Jawa Tengah	204.138.059.180	204.138.059.180
204	Kab. Banjarnegara	6.566.480.310	6.566.480.310
205	Kab. Banyumas	6.004.251.337	6.004.251.337
206	Kab. Batang	6.192.528.904	6.192.528.904
207	Kab. Blora	8.957.096.150	8.957.096.150
208	Kab. Boyolali	17.395.059.686	17.395.059.686
209	Kab. Brebes	6.337.043.239	6.337.043.239
210	Kab. Cilacap	6.115.774.011	6.115.774.011
211	Kab. Demak	13.262.253.918	13.262.253.918
212	Kab. Grobogan	8.740.454.627	8.740.454.627
213	Kab. Jepara	6.350.078.673	6.350.078.673
214	Kab. Karanganyar	9.684.197.607	9.684.197.607
215	Kab. Kebumen	7.619.564.971	7.619.564.971
216	Kab. Kendal	21.033.802.260	21.033.802.260

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
217	Kab. Klaten	15.688.333.046	15.688.333.046
218	Kab. Kudus	151.181.818.787	151.181.818.787
219	Kab. Magelang	16.095.396.217	16.095.396.217
220	Kab. Pati	6.289.418.771	6.289.418.771
221	Kab. Pekalongan	6.050.229.249	6.050.229.249
222	Kab. Pemalang	6.900.953.425	6.900.953.425
223	Kab. Purbalingga	6.672.112.006	6.672.112.006
224	Kab. Purworejo	7.328.132.897	7.328.132.897
225	Kab. Rembang	15.504.169.619	15.504.169.619
226	Kab. Semarang	8.682.973.156	8.682.973.156
227	Kab. Sragen	7.079.556.856	7.079.556.856
228	Kab. Sukoharjo	7.117.831.761	7.117.831.761
229	Kab. Tegal	6.497.969.664	6.497.969.664
230	Kab. Temanggung	31.247.626.569	31.247.626.569
231	Kab. Wonogiri	6.945.361.139	6.945.361.139
232	Kab. Wonosobo	12.843.524.648	12.843.524.648
233	Kota Magelang	6.097.809.985	6.097.809.985
234	Kota Pekalongan	7.252.474.826	7.252.474.826
235	Kota Salatiga	6.008.310.667	6.008.310.667
236	Kota Semarang	7.978.492.096	7.978.492.096
237	Kota Surakarta	6.596.872.572	6.596.872.572
238	Kota Tegal	6.004.179.438	6.004.179.438
239	Provinsi DI Yogyakarta	5.950.007.720	5.950.007.720
240	Kab. Bantul	4.288.068.652	4.288.068.652
241	Kab. Gunung Kidul	1.779.834.589	1.779.834.589
242	Kab. Kulon Progo	2.199.159.398	2.199.159.398
243	Kab. Sleman	4.120.145.614	4.120.145.614
244	Kota Yogyakarta	1.496.142.095	1.496.142.095
245	Provinsi Jawa Timur	459.652.382.202	459.652.382.202
246	Kab. Bangkalan	13.528.512.853	13.528.512.853
247	Kab. Banyuwangi	15.432.820.397	15.432.820.397
248	Kab. Blitar	16.983.680.376	16.983.680.376
249	Kab. Bojonegoro	34.570.811.426	34.570.811.426
250	Kab. Bondowoso	26.543.479.644	26.543.479.644
251	Kab. Gresik	13.492.385.160	13.492.385.160
252	Kab. Jember	63.110.369.088	63.110.369.088
253	Kab. Jombang	29.636.680.976	29.636.680.976
254	Kab. Kediri	34.548.385.521	34.548.385.521
255	Kab. Lamongan	33.078.890.457	33.078.890.457
256	Kab. Lumajang	18.759.459.051	18.759.459.051
257	Kab. Madiun	13.961.931.890	13.961.931.890
258	Kab. Magetan	14.139.351.289	14.139.351.289
259	Kab. Malang	68.129.125.203	68.129.125.203
260	Kab. Mojokerto	14.086.130.468	14.086.130.468
261	Kab. Nganjuk	18.296.441.169	18.296.441.169
262	Kab. Ngawi	19.375.898.871	19.375.898.871
263	Kab. Pacitan	13.699.638.754	13.699.638.754
264	Kab. Pamekasan	42.384.875.626	42.384.875.626
265	Kab. Pasuruan	177.580.234.046	177.580.234.046
266	Kab. Ponorogo	15.137.409.826	15.137.409.826
267	Kab. Probolinggo	48.097.834.661	48.097.834.661
268	Kab. Sampang	17.991.405.449	17.991.405.449
269	Kab. Sidoarjo	13.510.220.372	13.510.220.372
270	Kab. Situbondo	26.196.465.709	26.196.465.709

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
271	Kab. Sumenep	32.398.193.648	32.398.193.648
272	Kab. Trenggalek	13.615.466.861	13.615.466.861
273	Kab. Tuban	17.862.437.420	17.862.437.420
274	Kab. Tulungagung	17.951.036.502	17.951.036.502
275	Kota Blitar	14.087.316.621	14.087.316.621
276	Kota Kediri	57.868.503.689	57.868.503.689
277	Kota Madiun	13.308.934.159	13.308.934.159
278	Kota Malang	27.026.228.382	27.026.228.382
279	Kota Mojokerto	13.928.923.952	13.928.923.952
280	Kota Pasuruan	13.332.209.282	13.332.209.282
281	Kota Probolinggo	13.399.239.758	13.399.239.758
282	Kota Surabaya	22.829.119.193	22.829.119.193
283	Kota Batu	12.642.176.347	12.642.176.347
284	Provinsi Kalimantan Barat	-	-
285	Kab. Bengkayang	-	-
286	Kab. Landak	-	-
287	Kab. Kapuas Hulu	-	-
288	Kab. Ketapang	-	-
289	Kab. Pontianak	-	-
290	Kab. Sambas	-	-
291	Kab. Sanggau	-	-
292	Kab. Sintang	-	-
293	Kota Pontianak	-	-
294	Kota Singkawang	-	-
295	Kab. Kayong Utara	-	-
296	Kab. Kubu Raya	-	-
297	Kab. Sekadau	-	-
298	Kab. Melawi	-	-
299	Provinsi Kalimantan Tengah	2.136.590.556	2.136.590.556
300	Kab. Barito Selatan	194.110.389	194.110.389
301	Kab. Barito Utara	194.110.389	49.395.889
302	Kab. Kapuas	194.110.389	49.395.889
303	Kab. Kotawaringin Barat	1.147.154.389	1.147.154.389
304	Kab. Kotawaringin Timur	194.110.389	194.110.389
305	Kota Palangkaraya	576.153.389	288.131.389
306	Kab. Barito Timur	194.110.389	49.395.889
307	Kab. Murung Raya	194.110.389	49.395.889
308	Kab. Pulang Pisau	1.124.152.075	563.024.075
309	Kab. Gunung Mas	194.110.389	194.110.389
310	Kab. Lamandau	194.110.389	49.395.639
311	Kab. Sukamara	194.110.389	49.395.639
312	Kab. Katingan	194.110.389	49.395.889
313	Kab. Seruyan	194.110.389	49.395.639
314	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-
315	Kab. Banjar	-	-
316	Kab. Barito Kuala	-	-
317	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-
318	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-
319	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-
320	Kab. Kotabaru	-	-
321	Kab. Tabalong	-	-
322	Kab. Tanah Laut	-	-
323	Kab. Tapin	-	-
324	Kota Banjarbaru	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
325	Kota Banjarmasin	-	-
326	Kab. Balangan	-	-
327	Kab. Tanah Bumbu	-	-
328	Provinsi Kalimantan Timur	-	-
329	Kab. Berau	-	-
330	Kab. Kutai Kartanegara	-	-
331	Kab. Kutai Barat	-	-
332	Kab. Kutai Timur	-	-
333	Kab. Mahakam Ulu	-	-
334	Kab. Pasir	-	-
335	Kota Balikpapan	-	-
336	Kota Bontang	-	-
337	Kota Samarinda	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	-	-
339	Provinsi Kalimantan Utara	-	-
340	Kab. Bulungan	-	-
341	Kab. Malinau	-	-
342	Kab. Nunukan	-	-
343	Kab. Tana Tidung	-	-
344	Kota Tarakan	-	-
345	Provinsi Sulawesi Utara	-	-
346	Kab. Bolaang Mongondow	-	-
347	Kab. Minahasa	-	-
348	Kab. Sangihe	-	-
349	Kota Bitung	-	-
350	Kota Manado	-	-
351	Kab. Kepulauan Talaud	-	-
352	Kab. Minahasa Selatan	-	-
353	Kab. Minahasa Tenggara	-	-
354	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	-
355	Kota Kotamubagu	-	-
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-
358	Kota Tomohon	-	-
359	Kab. Minahasa Utara	-	-
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-
361	Provinsi Gorontalo	-	-
362	Kab. Boalemo	-	-
363	Kab. Gorontalo	-	-
364	Kota Gorontalo	-	-
365	Kab. Pohuwato	-	-
366	Kab. Gorontalo Utara	-	-
367	Kab. Bone Bolango	-	-
368	Provinsi Sulawesi Tengah	2.310.627.718	2.310.627.718
369	Kab. Banggai	1.231.022.226	923.327.476
370	Kab. Banggai Laut	210.035.226	210.035.226
371	Kab. Banggai Kepulauan	210.035.226	210.035.226
372	Kab. Buol	210.035.226	210.035.226
373	Kab. Toli-Toli	210.035.226	157.587.226
374	Kab. Donggala	210.035.226	210.035.226
375	Kab. Morowali	210.035.226	210.035.226
376	Kab. Morowali Utara	210.035.226	210.035.226
377	Kab. Poso	210.035.226	210.035.226
378	Kota Palu	1.850.060.629	1.850.060.629

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
379	Kab. Parigi Moutong	210.035.226	210.035.226
380	Kab. Sigi	210.035.226	157.587.226
381	Kab. Tojo Una Una	210.035.226	210.035.226
382	Provinsi Sulawesi Selatan	5.396.716.301	5.396.716.301
383	Kab. Bantaeng	287.402.505	287.402.505
384	Kab. Barru	252.406.861	252.406.861
385	Kab. Bone	1.132.986.422	1.132.986.422
386	Kab. Bulukumba	398.474.760	398.474.760
387	Kab. Enrekang	234.390.062	234.390.062
388	Kab. Gowa	234.390.056	234.390.056
389	Kab. Jeneponto	252.476.955	252.476.955
390	Kab. Luwu	234.394.488	234.394.488
391	Kab. Luwu Utara	234.390.056	234.390.056
392	Kab. Maros	234.390.056	234.390.056
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	234.390.056	234.390.056
394	Kab. Pinrang	234.390.056	234.390.056
395	Kab. Selayar	234.390.056	234.390.056
396	Kab. Sidenreng Rappang	234.390.056	234.390.056
397	Kab. Sinjai	1.788.003.474	1.788.003.474
398	Kab. Soppeng	4.475.492.029	4.475.492.029
399	Kab. Takalar	234.390.056	234.390.056
400	Kab. Tana Toraja	234.390.056	234.390.056
401	Kab. Wajo	248.444.685	248.444.685
402	Kota Pare-pare	234.390.056	117.390.056
403	Kab. Toraja Utara	234.390.056	234.390.056
404	Kota Makassar	234.390.056	234.390.056
405	Kota Palopo	234.390.056	234.390.056
406	Kab. Luwu Timur	234.390.056	234.390.056
407	Provinsi Sulawesi Barat	-	-
408	Kab. Majene	-	-
409	Kab. Mamuju	-	-
410	Kab. Mamuju Tengah	-	-
411	Kab. Polewali Mandar	-	-
412	Kab. Mamasa	-	-
413	Kab. Mamuju Utara	-	-
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
415	Kab. Buton	-	-
416	Kab. Konawe	-	-
417	Kab. Konawe Kepulauan	-	-
418	Kab. Kolaka	-	-
419	Kab. Kolaka Timur	-	-
420	Kab. Muna	-	-
421	Kota Kendari	-	-
422	Kota Bau-bau	-	-
423	Kab. Konawe Selatan	-	-
424	Kab. Bombana	-	-
425	Kab. Konawe Utara	-	-
426	Kab. Buton Utara	-	-
427	Kab. Wakatobi	-	-
428	Kab. Kolaka Utara	-	-
429	Kab. Muna Barat	-	-
430	Kab. Buton Tengah	-	-
431	Kab. Buton Selatan	-	-
432	Provinsi Bali	3.609.475.904	3.609.475.904

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
433	Kab. Badung	451.184.987	451.184.987
434	Kab. Bangli	509.131.227	509.131.227
435	Kab. Buleleng	3.293.615.484	3.293.615.484
436	Kab. Gianyar	1.763.696.564	1.763.696.564
437	Kab. Jembrana	503.257.834	503.257.834
438	Kab. Karangasem	547.672.380	547.672.380
439	Kab. Klungkung	451.184.987	451.184.987
440	Kab. Tabanan	451.184.987	451.184.987
441	Kota Denpasar	451.184.987	451.184.987
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	69.711.210.901	69.711.210.901
443	Kab. Bima	7.836.544.217	7.836.544.217
444	Kab. Dompu	4.896.171.952	4.896.171.952
445	Kab. Lombok Barat	12.470.482.180	12.470.482.180
446	Kab. Lombok Tengah	38.274.238.638	38.274.238.638
447	Kab. Lombok Timur	52.801.263.693	52.801.263.693
448	Kab. Sumbawa	7.827.992.881	7.827.992.881
449	Kota Mataram	26.651.357.296	26.651.357.296
450	Kab. Lombok Utara	7.867.588.073	7.867.588.073
451	Kota Bima	1.652.380.157	1.652.380.157
452	Kab. Sumbawa Barat	2.381.474.353	2.381.474.353
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.076.304.443	5.076.304.443
454	Kab. Alor	241.445.000	241.445.000
455	Kab. Belu	241.445.000	61.339.750
456	Kab. Ende	241.445.000	-
457	Kab. Flores Timur	1.329.425.827	1.329.425.827
458	Kab. Kupang	303.584.393	303.584.393
459	Kab. Lembata	242.124.934	123.359.434
460	Kab. Malaka	241.445.000	-
461	Kab. Manggarai	2.080.456.930	2.080.456.930
462	Kab. Ngada	248.476.000	248.476.000
463	Kab. Sikka	849.462.000	-
464	Kab. Sumba Barat	364.793.000	-
465	Kab. Sumba Timur	403.601.000	403.601.000
466	Kab. Timor Tengah Selatan	269.625.000	-
467	Kab. Timor Tengah Utara	241.445.000	-
468	Kota Kupang	241.445.000	-
469	Kab. Rote Ndao	241.445.000	-
470	Kab. Nagekeo	726.660.183	726.660.183
471	Kab. Sumba Tengah	241.445.000	-
472	Kab. Sumba Barat Daya	1.749.662.727	1.749.662.727
473	Kab. Manggarai Timur	608.664.425	608.664.425
474	Kab. Sabu Raijua	241.445.000	-
475	Kab. Manggarai Barat	486.944.947	486.944.947
476	Provinsi Maluku	-	-
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-
478	Kab. Maluku Tengah	-	-
479	Kab. Maluku Tenggara	-	-
480	Kab. Pulau Buru	-	-
481	Kota Ambon	-	-
482	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
483	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
484	Kab. Maluku Barat Daya	-	-
485	Kab. Buru Selatan	-	-
486	Kab. Kepulauan Aru	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
487	Kota Tual	-	-
488	Provinsi Maluku Utara	-	-
489	Kab. Halmahera Tengah	-	-
490	Kab. Halmahera Barat	-	-
491	Kota Ternate	-	-
492	Kab. Halmahera Timur	-	-
493	Kota Tidore Kepulauan	-	-
494	Kab. Kepulauan Sula	-	-
495	Kab. Pulau Morotai	-	-
496	Kab. Pulau Taliabu	-	-
497	Kab. Halmahera Selatan	-	-
498	Kab. Halmahera Utara	-	-
499	Provinsi Papua	-	-
500	Kab. Yalimo	-	-
501	Kab. Lanny Jaya	-	-
502	Kab. Biak Numfor	-	-
503	Kab. Jayapura	-	-
504	Kab. Jayawijaya	-	-
505	Kab. Merauke	-	-
506	Kab. Mimika	-	-
507	Kab. Nabire	-	-
508	Kab. Paniai	-	-
509	Kab. Puncak Jaya	-	-
510	Kab. Kepulauan Yapen	-	-
511	Kota Jayapura	-	-
512	Kab. Sarmi	-	-
513	Kab. Keerom	-	-
514	Kab. Yahukimo	-	-
515	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
516	Kab. Tolikara	-	-
517	Kab. Boven Digoel	-	-
518	Kab. Mappi	-	-
519	Kab. Asmat	-	-
520	Kab. Waropen	-	-
521	Kab. Mamberamo Raya	-	-
522	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
523	Kab. Nduga	-	-
524	Kab. Dogiyai	-	-
525	Kab. Intan Jaya	-	-
526	Kab. Puncak	-	-
527	Kab. Deiyai	-	-
528	Kab. Supiori	-	-
529	Provinsi Papua Barat	-	-
530	Kab. Sorong	-	-
531	Kab. Manokwari	-	-
532	Kab. Manokwari Selatan	-	-
533	Kab. Fak Fak	-	-
534	Kota Sorong	-	-
535	Kab. Pegunungan Arfak	-	-
536	Kab. Sorong Selatan	-	-
537	Kab. Raja Ampat	-	-
538	Kab. Teluk Bintuni	-	-
539	Kab. Teluk Wondama	-	-
540	Kab. Tambrauw	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
Tahun Anggaran 2017 (*Audited*)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
541	Kab. Maybrat	-	-
542	Kab. Kaimana	-	-
JUMLAH		2.953.674.678.940	2.921.873.779.440

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	2.060.263.235.000	2.060.263.235.000	1.600.708.137.000	1.507.794.885.109
2	Kab. Aceh Barat	570.327.086.000	570.327.086.000	195.068.149.000	175.556.433.990
3	Kab. Aceh Besar	708.008.631.000	708.008.631.000	225.807.319.000	214.075.597.435
4	Kab. Aceh Selatan	638.159.915.000	638.159.915.000	313.062.162.000	296.838.067.850
5	Kab. Aceh Singkil	429.417.586.000	429.417.586.000	150.705.268.000	140.824.189.056
6	Kab. Aceh Tengah	602.539.574.000	602.539.574.000	271.374.050.000	257.914.164.145
7	Kab. Aceh Tenggara	584.228.842.000	584.228.842.000	203.247.455.000	191.164.138.893
8	Kab. Aceh Timur	777.993.391.000	777.993.391.000	212.051.219.000	199.824.393.548
9	Kab. Aceh Utara	837.370.118.000	837.370.118.000	312.899.804.000	273.832.219.503
10	Kab. Bireuen	802.506.877.000	802.506.877.000	360.154.883.000	328.426.615.723
11	Kab. Pidie	794.948.892.000	794.948.892.000	276.683.775.000	256.550.731.499
12	Kab. Simeulue	436.068.877.000	436.068.877.000	165.958.492.000	150.801.804.797
13	Kota Banda Aceh	591.711.772.000	591.711.772.000	131.429.166.000	113.717.859.461
14	Kota Sabang	348.745.228.000	348.745.228.000	84.501.769.000	71.005.376.515
15	Kota Langsa	444.012.586.000	444.012.586.000	212.700.559.000	211.722.423.308
16	Kota Lhokseumawe	459.628.037.000	459.628.037.000	141.073.122.000	135.319.889.183
17	Kab. Nagan Raya	506.544.842.000	506.544.842.000	109.799.657.000	95.842.922.801
18	Kab. Aceh Jaya	418.435.863.000	418.435.863.000	142.173.193.000	132.370.912.039
19	Kab. Pidie Jaya	420.521.361.000	420.521.361.000	163.221.669.000	157.595.580.213
20	Kab. Aceh Barat Daya	451.014.186.000	451.014.186.000	156.612.890.000	150.070.179.624
21	Kab. Gayo Lues	462.943.021.000	462.943.021.000	99.167.710.000	89.868.793.197
22	Kab. Aceh Tamiang	532.641.693.000	532.641.693.000	148.578.635.000	136.356.846.301
23	Kab. Bener Meriah	448.946.857.000	448.946.857.000	113.112.786.000	105.793.220.289
24	Kota Subulussalam	343.605.010.000	343.605.010.000	146.084.962.000	136.370.080.255
25	Provinsi Sumatera Utara	2.629.224.545.000	2.629.224.545.000	4.076.460.907.000	3.838.053.061.062
26	Kab. Asahan	875.860.020.000	875.860.020.000	230.324.161.000	206.876.209.655
27	Kab. Dairi	612.745.792.000	612.745.792.000	173.856.689.000	160.824.789.536
28	Kab. Deli Serdang	1.468.561.952.000	1.468.561.952.000	498.088.155.000	459.510.223.829
29	Kab. Karo	738.378.312.000	738.378.312.000	224.841.259.000	203.005.320.514
30	Kab. LabuhanBatu	684.408.474.000	684.408.474.000	204.786.847.000	176.514.566.080
31	Kab. Langkat	1.179.392.864.000	1.179.392.864.000	454.262.543.000	411.765.101.584
32	Kab. Mandailing Natal	777.487.741.000	777.487.741.000	260.822.913.000	246.755.351.010
33	Kab. Nias	425.974.369.000	425.974.369.000	171.513.908.000	162.194.939.928
34	Kab. Simalungun	1.209.194.704.000	1.209.194.704.000	432.093.684.000	404.798.656.219
35	Kab. Tapanuli Selatan	644.304.467.000	644.304.467.000	169.582.547.000	160.298.988.505
36	Kab. Tapanuli Tengah	622.385.030.000	622.385.030.000	220.362.762.000	209.061.014.977
37	Kab. Tapanuli Utara	639.394.068.000	639.394.068.000	171.355.283.000	160.718.192.805
38	Kab. Toba Samosir	528.490.802.000	528.490.802.000	246.199.330.000	207.841.806.851
39	Kota Binjai	564.377.582.000	564.377.582.000	119.620.152.000	101.647.175.803
40	Kota Medan	1.583.624.375.000	1.583.624.375.000	385.369.538.000	339.823.905.123
41	Kota Pematang Siantar	583.106.207.000	583.106.207.000	149.127.741.000	119.183.584.437
42	Kota Sibolga	405.554.215.000	405.554.215.000	112.724.798.000	101.201.823.480
43	Kota Tanjung Balai	415.172.063.000	415.172.063.000	98.247.380.000	81.276.702.626
44	Kab. Batu Bara	602.464.355.000	602.464.355.000	169.310.497.000	155.854.156.870
45	Kab. LabuhanBatu Utara	588.021.836.000	588.021.836.000	241.303.298.000	226.696.697.147
46	Kab. LabuhanBatu Selatan	504.525.796.000	504.525.796.000	167.316.425.000	142.379.981.750
47	Kab. Padang Lawas Utara	537.469.609.000	537.469.609.000	163.163.088.000	148.837.538.015
48	Kab. Padang Lawas	520.974.737.000	520.974.737.000	169.259.193.000	148.093.785.936
49	Kab. Nias Utara	411.036.299.000	411.036.299.000	155.351.013.000	136.986.154.291
50	Kab. Nias Barat	344.492.409.000	344.492.409.000	158.240.428.000	152.138.174.252
51	Kota Tebing Tinggi	408.720.596.000	408.720.596.000	151.116.294.000	143.607.096.232
52	Kota Padang Sidempuan	498.768.033.000	498.768.033.000	162.019.614.000	156.530.353.159
53	Kab. Pakpak Bharat	338.611.130.000	338.611.130.000	104.236.534.000	79.655.950.418
54	Kab. Nias Selatan	538.282.603.000	538.282.603.000	224.097.706.000	218.308.382.221
55	Kab. Humbang Hasundutan	523.818.445.000	523.818.445.000	215.372.649.000	182.472.667.696
56	Kab. Serdang Bedagai	763.717.409.000	763.717.409.000	246.639.267.000	232.073.736.130
57	Kab. Samosir	453.737.230.000	453.737.230.000	187.284.219.000	167.496.458.262

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
58	Kota Gunungsitoli	426.630.977.000	426.630.977.000	122.149.488.000	108.751.820.811
59	Provinsi Sumatera Barat	2.014.646.639.000	2.014.646.639.000	1.808.920.055.000	1.699.580.667.857
60	Kab. Lima Puluh Kota	747.073.168.000	747.073.168.000	251.571.072.000	226.202.145.090
61	Kab. Agam	813.474.914.000	813.474.914.000	272.077.571.000	243.274.001.905
62	Kab. Kepulauan Mentawai	591.339.690.000	591.339.690.000	134.212.102.000	119.344.931.323
63	Kab. Padang Pariaman	769.827.010.000	769.827.010.000	306.596.310.000	277.236.613.802
64	Kab. Pasaman	596.083.486.000	596.083.486.000	201.249.446.000	158.076.867.690
65	Kab. Pesisir Selatan	838.100.134.000	838.100.134.000	267.476.766.000	251.066.249.483
66	Kab. Sijunjung	548.573.107.000	548.573.107.000	182.364.717.000	150.674.760.578
67	Kab. Solok	710.962.915.000	710.962.915.000	205.472.951.000	187.337.194.664
68	Kab. Tanah Datar	695.555.745.000	695.555.745.000	260.386.591.000	216.911.822.339
69	Kota Bukit Tinggi	450.905.882.000	450.905.882.000	98.342.287.000	49.802.837.135
70	Kota Padang Panjang	375.436.356.000	375.436.356.000	70.659.257.000	53.108.347.050
71	Kota Padang	1.100.370.559.000	1.100.370.559.000	239.036.161.000	193.745.557.124
72	Kota Payakumbuh	437.696.934.000	437.696.934.000	104.187.541.000	94.216.604.774
73	Kota Sawahlunto	375.131.128.000	375.131.128.000	89.630.351.000	75.861.363.283
74	Kota Solok	398.106.262.000	398.106.262.000	107.891.208.000	61.707.811.840
75	Kota Pariaman	415.241.327.000	415.241.327.000	99.474.376.000	85.580.651.154
76	Kab. Pasaman Barat	644.333.727.000	644.333.727.000	195.984.861.000	167.927.854.308
77	Kab. Dharmasraya	501.682.277.000	501.682.277.000	190.859.552.000	181.968.819.389
78	Kab. Solok Selatan	480.406.179.000	480.406.179.000	163.543.902.000	146.846.570.891
79	Provinsi Riau	1.457.997.067.000	1.457.997.067.000	1.701.454.954.000	1.607.851.461.589
80	Kab. Bengkalis	345.070.716.000	345.070.716.000	195.842.084.000	146.351.387.173
81	Kab. Indragiri Hilir	895.989.730.000	895.989.730.000	287.121.006.000	219.798.091.594
82	Kab. Indragiri Hulu	630.242.304.000	630.242.304.000	215.557.007.000	198.761.793.921
83	Kab. Kampar	728.616.246.000	728.616.246.000	362.807.599.000	300.188.325.269
84	Kab. Kuantan Singingi	600.606.026.000	600.606.026.000	212.968.430.000	187.775.267.615
85	Kab. Pelalawan	598.159.971.000	598.159.971.000	189.397.041.000	149.857.598.813
86	Kab. Rokan Hilir	364.151.812.000	364.151.812.000	187.902.243.000	163.417.247.594
87	Kab. Rokan Hulu	640.900.326.000	640.900.326.000	198.410.731.000	167.659.573.644
88	Kab. Siak	264.714.000.000	264.714.000.000	180.360.805.000	153.901.346.495
89	Kota Dumai	408.643.780.000	408.643.780.000	178.228.410.000	162.541.133.653
90	Kota Pekanbaru	784.376.941.000	784.376.941.000	255.759.213.000	205.161.235.657
91	Kab. Kepulauan Meranti	375.396.779.000	375.396.779.000	180.015.894.000	155.457.379.559
92	Provinsi Kepulauan Riau	1.059.822.693.000	1.059.822.693.000	590.309.322.000	569.776.571.430
93	Kab. Bintan	449.747.633.000	449.747.633.000	149.740.882.000	140.894.175.488
94	Kab. Natuna	351.254.654.000	351.254.654.000	122.569.702.000	110.559.707.852
95	Kab. Karimun	385.334.087.000	385.334.087.000	115.458.228.000	106.725.379.524
96	Kota Batam	577.144.597.000	577.144.597.000	207.186.101.000	164.670.008.173
97	Kab. Kepulauan Anambas	352.853.435.000	352.853.435.000	94.187.426.000	75.944.768.389
98	Kota Tanjung Pinang	448.692.800.000	448.692.800.000	124.702.549.000	112.769.570.632
99	Kab. Lingga	411.786.116.000	411.786.116.000	103.738.543.000	90.426.004.353
100	Provinsi Jambi	1.397.912.161.000	1.397.912.161.000	977.281.715.000	934.827.673.236
101	Kab. Batanghari	605.739.426.000	605.739.426.000	153.802.694.000	147.817.187.937
102	Kab. Bungo	635.999.293.000	635.999.293.000	208.194.764.000	196.153.371.965
103	Kab. Kerinci	589.202.611.000	589.202.611.000	178.608.626.000	157.861.420.539
104	Kab. Merangin	718.849.295.000	718.849.295.000	207.368.943.000	195.622.565.639
105	Kab. Muaro Jambi	670.341.091.000	670.341.091.000	172.686.643.000	157.397.989.194
106	Kab. Sarolangun	583.152.387.000	583.152.387.000	158.548.042.000	149.919.998.267
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	506.589.288.000	506.589.288.000	134.805.997.000	120.988.962.968
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	533.204.953.000	533.204.953.000	181.584.879.000	171.036.485.164
109	Kab. Tebo	582.313.417.000	582.313.417.000	139.320.180.000	128.796.424.328
110	Kota Jambi	714.783.378.000	714.783.378.000	232.614.705.000	189.885.793.604
111	Kota Sungai Penuh	419.516.054.000	419.516.054.000	95.902.461.000	90.368.820.617
112	Provinsi Sumatera Selatan	1.697.897.817.000	1.697.897.817.000	2.038.645.711.000	1.950.848.588.566
113	Kab. Lahat	694.390.958.000	694.390.958.000	212.202.081.000	195.880.324.470
114	Kab. Musi Banyuasin	344.295.499.000	344.295.499.000	244.918.699.000	220.597.682.962

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
115	Kab. Musi Rawas	637.955.157.000	637.955.157.000	203.473.830.000	189.387.199.982
116	Kab Musi Rawas Utara	378.211.485.000	378.211.485.000	97.893.598.000	85.984.033.763
117	Kab. Muara Enim	661.337.068.000	661.337.068.000	283.396.827.000	254.377.980.293
118	Kab. Ogan Komering Ilir	1.042.870.844.000	1.042.870.844.000	335.015.922.000	306.000.931.872
119	Kab. Ogan Komering Ulu	631.233.579.000	631.233.579.000	228.306.187.000	216.762.829.719
120	Kota Palembang	1.269.426.417.000	1.269.426.417.000	467.397.508.000	431.291.808.953
121	Kota Pagar Alam	387.411.982.000	387.411.982.000	186.863.697.000	178.177.869.020
122	Kota Lubuk linggau	444.207.307.000	444.207.307.000	157.785.432.000	152.397.311.824
123	Kota Prabumulih	412.228.943.000	412.228.943.000	93.946.865.000	85.088.269.992
124	Kab. Empat Lawang	415.913.762.000	415.913.762.000	162.287.368.000	149.969.316.460
125	Kab. Banyuasin	923.771.804.000	923.771.804.000	327.340.825.000	292.160.064.996
126	Kab. Ogan Ilir	619.873.617.000	619.873.617.000	279.249.875.000	236.844.148.748
127	Kab. OKU Timur	755.658.062.000	755.658.062.000	243.406.556.000	231.121.954.891
128	Kab. OKU Selatan	585.269.591.000	585.269.591.000	177.050.866.000	168.539.850.461
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	317.402.008.000	317.402.008.000	95.184.321.000	90.213.106.548
130	Provinsi Bangka Belitung	980.297.314.000	980.297.314.000	459.727.191.000	436.107.913.611
131	Kab. Bangka	526.558.547.000	526.558.547.000	186.218.238.000	171.630.852.142
132	Kab. Belitung	474.909.929.000	474.909.929.000	139.001.688.000	125.395.292.179
133	Kota Pangkal Pinang	443.476.956.000	443.476.956.000	97.556.840.000	88.669.997.603
134	Kab. Bangka Selatan	461.411.931.000	461.411.931.000	109.586.956.000	93.404.981.780
135	Kab. Bangka Tengah	433.037.787.000	433.037.787.000	114.140.470.000	104.501.829.263
136	Kab. Bangka Barat	438.389.939.000	438.389.939.000	137.506.837.000	130.021.364.553
137	Kab. Belitung Timur	433.161.224.000	433.161.224.000	100.154.730.000	85.284.715.147
138	Provinsi Bengkulu	1.301.538.847.000	1.301.538.847.000	720.892.781.000	635.034.086.232
139	Kab. Bengkulu Selatan	554.227.555.000	554.227.555.000	189.282.444.000	179.085.511.560
140	Kab. Bengkulu Utara	623.611.468.000	623.611.468.000	221.323.130.000	201.304.447.923
141	Kab. Rejang Lebong	593.702.491.000	593.702.491.000	202.041.299.000	191.002.423.273
142	Kota Bengkulu	671.384.345.000	671.384.345.000	178.236.190.000	161.013.665.750
143	Kab. Kaur	433.937.043.000	433.937.043.000	130.821.095.000	116.434.940.700
144	Kab. Seluma	495.442.190.000	495.442.190.000	186.156.478.000	168.435.458.129
145	Kab. Mukomuko	491.955.926.000	491.955.926.000	145.021.056.000	118.563.532.544
146	Kab. Lebong	405.048.287.000	405.048.287.000	111.722.045.000	108.225.151.956
147	Kab. Bengkulu Tengah	428.296.521.000	428.296.521.000	127.682.082.000	113.899.790.489
148	Kab. Kepahiang	413.724.603.000	413.724.603.000	126.196.059.000	119.962.778.664
149	Provinsi Lampung	1.851.595.354.000	1.851.595.354.000	1.997.184.168.000	1.927.384.229.580
150	Kab. Lampung Barat	519.160.196.000	519.160.196.000	244.798.124.000	224.323.822.017
151	Kab. Lampung Selatan	1.013.326.727.000	1.013.326.727.000	429.741.267.000	411.272.197.559
152	Kab. Lampung Tengah	1.317.680.979.000	1.317.680.979.000	412.694.760.000	348.727.979.510
153	Kab. Lampung Utara	945.025.570.000	945.025.570.000	289.730.043.000	263.655.841.082
154	Kab. Lampung Timur	1.062.555.526.000	1.062.555.526.000	455.681.950.000	344.577.034.387
155	Kab. Tanggamus	775.574.559.000	775.574.559.000	309.109.883.000	295.744.411.885
156	Kab. Tulang Bawang	609.155.961.000	609.155.961.000	196.770.027.000	189.492.163.584
157	Kab. Way Kanan	650.838.237.000	650.838.237.000	350.866.221.000	346.865.482.689
158	Kab. Pesawaran	668.378.478.000	668.378.478.000	347.426.443.000	338.303.889.121
159	Kab. Pesisir Barat	410.991.252.000	410.991.252.000	206.947.832.000	191.580.410.199
160	Kab. Pringsewu	621.967.450.000	621.967.450.000	218.119.704.000	211.150.480.527
161	Kab. Mesuji	444.344.769.000	444.344.769.000	121.744.073.000	111.873.214.590
162	Kab. Tulang Bawang Barat	461.031.611.000	461.031.611.000	182.612.938.000	178.477.408.444
163	Kota Bandar Lampung	1.034.730.849.000	1.034.730.849.000	315.075.420.000	306.836.122.498
164	Kota Metro	455.732.157.000	455.732.157.000	208.326.875.000	195.678.411.129
165	Provinsi DKI Jakarta	-	-	3.159.283.549.000	2.121.801.939.666
166	Provinsi Jawa Barat	3.011.001.477.000	3.011.001.477.000	9.405.740.841.000	9.118.920.857.912
167	Kab. Bandung	2.059.845.225.000	2.059.845.225.000	735.953.349.000	653.233.887.941
168	Kab. Bekasi	1.152.893.281.000	1.152.893.281.000	385.363.593.000	312.168.307.392
169	Kab. Bogor	1.902.004.175.000	1.902.004.175.000	690.726.543.000	571.474.008.174
170	Kab. Ciamis	1.182.335.044.000	1.182.335.044.000	470.957.322.000	458.200.018.318
171	Kab. Cianjur	1.542.820.697.000	1.542.820.697.000	590.241.506.000	576.310.133.366

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
172	Kab. Cirebon	1.495.142.625.000	1.495.142.625.000	522.737.977.000	481.489.381.512
173	Kab. Garut	1.776.936.655.000	1.776.936.655.000	708.973.063.000	683.363.164.345
174	Kab. Indramayu	1.369.382.742.000	1.369.382.742.000	466.785.062.000	419.600.175.995
175	Kab. Karawang	1.239.740.020.000	1.239.740.020.000	485.194.343.000	461.001.483.506
176	Kab. Kuningan	1.197.194.996.000	1.197.194.996.000	453.311.871.000	450.231.021.475
177	Kab. Majalengka	1.204.397.174.000	1.204.397.174.000	421.815.631.000	394.255.098.380
178	Kab. Pangandaran	538.882.193.000	538.882.193.000	214.886.925.000	207.463.958.983
179	Kab. Purwakarta	850.227.151.000	850.227.151.000	330.418.777.000	299.777.237.797
180	Kab. Subang	1.282.683.362.000	1.282.683.362.000	438.593.569.000	391.370.244.426
181	Kab. Sukabumi	1.575.410.205.000	1.575.410.205.000	558.320.599.000	516.672.590.357
182	Kab. Sumedang	1.119.198.604.000	1.119.198.604.000	447.793.968.000	379.742.961.862
183	Kab. Tasikmalaya	1.442.184.968.000	1.442.184.968.000	582.740.348.000	567.743.243.148
184	Kab. Bandung Barat	1.088.131.605.000	1.088.131.605.000	424.739.340.000	411.358.131.976
185	Kota Bandung	1.643.076.905.000	1.643.076.905.000	409.063.165.000	345.608.315.944
186	Kota Bekasi	1.212.033.531.000	1.212.033.531.000	305.757.349.000	280.546.382.363
187	Kota Bogor	791.929.143.000	791.929.143.000	219.136.144.000	190.013.867.775
188	Kota Cirebon	577.778.746.000	577.778.746.000	187.191.363.000	161.933.473.759
189	Kota Depok	850.670.212.000	850.670.212.000	242.509.307.000	206.582.548.121
190	Kota Sukabumi	495.865.420.000	495.865.420.000	153.929.658.000	137.291.389.774
191	Kota Cimahi	576.278.051.000	576.278.051.000	190.717.442.000	168.142.438.310
192	Kota Tasikmalaya	780.073.445.000	780.073.445.000	290.576.973.000	271.541.347.674
193	Kota Banjar	368.153.289.000	368.153.289.000	98.280.713.000	93.068.427.900
194	Provinsi Banten	1.059.320.237.000	1.059.320.237.000	2.393.374.349.000	2.230.361.116.850
195	Kab. Lebak	1.081.007.407.000	1.081.007.407.000	330.810.277.000	289.569.030.349
196	Kab. Pandeglang	1.164.174.459.000	1.164.174.459.000	449.086.056.000	404.195.941.661
197	Kab. Serang	1.070.989.882.000	1.070.989.882.000	352.069.468.000	309.068.178.734
198	Kab. Tangerang	1.175.621.706.000	1.175.621.706.000	416.677.407.000	347.258.817.951
199	Kota Cilegon	595.338.097.000	595.338.097.000	150.366.590.000	134.958.286.620
200	Kota Tangerang	866.113.340.000	866.113.340.000	244.973.868.000	204.652.773.719
201	Kota Serang	636.602.678.000	636.602.678.000	183.726.180.000	166.134.840.355
202	Kota Tangerang Selatan	572.637.313.000	572.637.313.000	147.872.906.000	127.768.035.816
203	Provinsi Jawa Tengah	3.652.586.431.000	3.652.586.431.000	6.827.484.670.000	6.565.870.648.735
204	Kab. Banjarnegara	959.486.489.000	959.486.489.000	460.016.756.000	423.935.262.343
205	Kab. Banyumas	1.373.971.809.000	1.373.971.809.000	486.575.961.000	449.360.479.699
206	Kab. Batang	779.010.049.000	779.010.049.000	202.543.733.000	180.074.001.260
207	Kab. Blora	926.754.302.000	926.754.302.000	340.829.107.000	308.447.948.315
208	Kab. Boyolali	1.014.602.019.000	1.014.602.019.000	323.499.115.000	294.632.409.920
209	Kab. Brebes	1.317.061.804.000	1.317.061.804.000	431.299.673.000	400.887.743.562
210	Kab. Cilacap	1.360.370.867.000	1.360.370.867.000	483.958.012.000	441.023.247.033
211	Kab. Demak	892.681.795.000	892.681.795.000	314.448.801.000	293.662.106.756
212	Kab. Grobogan	1.091.590.533.000	1.091.590.533.000	424.073.568.000	383.277.149.862
213	Kab. Jepara	982.800.016.000	982.800.016.000	317.757.799.000	292.708.752.911
214	Kab. Karanganyar	978.664.650.000	978.664.650.000	367.159.267.000	253.371.946.521
215	Kab. Kebumen	1.234.003.169.000	1.234.003.169.000	469.997.686.000	438.407.835.223
216	Kab. Kendal	955.860.928.000	955.860.928.000	297.611.792.000	249.296.332.799
217	Kab. Klaten	1.237.967.327.000	1.237.967.327.000	372.605.935.000	302.273.202.240
218	Kab. Kudus	807.711.173.000	807.711.173.000	271.986.106.000	257.168.272.384
219	Kab. Magelang	1.060.027.733.000	1.060.027.733.000	323.075.736.000	257.777.868.687
220	Kab. Pati	1.186.296.947.000	1.186.296.947.000	480.215.591.000	462.940.746.479
221	Kab. Pekalongan	910.294.366.000	910.294.366.000	356.747.990.000	342.930.933.787
222	Kab. Pemalang	1.176.872.960.000	1.176.872.960.000	380.466.568.000	343.530.726.398
223	Kab. Purbalingga	881.574.483.000	881.574.483.000	339.938.432.000	329.597.927.647
224	Kab. Purworejo	924.251.795.000	924.251.795.000	265.319.974.000	250.875.295.253
225	Kab. Rembang	771.584.367.000	771.584.367.000	285.067.170.000	258.296.302.742
226	Kab. Semarang	951.828.487.000	951.828.487.000	315.493.703.000	286.719.230.509
227	Kab. Sragen	1.049.016.918.000	1.049.016.918.000	361.553.701.000	330.058.220.540
228	Kab. Sukoharjo	906.416.629.000	906.416.629.000	311.712.477.000	278.332.947.422

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
229	Kab. Tegal	1.141.687.714.000	1.141.687.714.000	368.617.112.000	325.623.713.089
230	Kab. Temanggung	793.801.136.000	793.801.136.000	240.257.191.000	227.597.740.094
231	Kab. Wonogiri	1.125.312.680.000	1.125.312.680.000	391.965.438.000	360.636.385.112
232	Kab. Wonosobo	826.626.357.000	826.626.357.000	291.928.137.000	267.466.630.022
233	Kota Magelang	440.041.244.000	440.041.244.000	102.119.190.000	86.464.016.323
234	Kota Pekalongan	449.055.738.000	449.055.738.000	112.896.796.000	108.994.059.659
235	Kota Salatiga	448.067.710.000	448.067.710.000	135.110.058.000	119.572.187.644
236	Kota Semarang	1.190.422.387.000	1.190.422.387.000	306.803.469.000	275.394.639.360
237	Kota Surakarta	826.753.038.000	826.753.038.000	186.207.517.000	170.806.131.950
238	Kota Tegal	482.150.715.000	482.150.715.000	168.339.888.000	133.603.234.143
239	Provinsi DI Yogyakarta	1.314.372.147.000	1.314.372.147.000	1.000.504.829.000	967.000.859.044
240	Kab. Bantul	982.250.842.000	982.250.842.000	313.289.462.000	270.134.241.588
241	Kab. Gunung Kidul	938.221.136.000	938.221.136.000	328.186.365.000	312.022.864.102
242	Kab. Kulon Progo	705.868.940.000	705.868.940.000	233.823.406.000	210.264.775.009
243	Kab. Sleman	996.492.454.000	996.492.454.000	310.573.906.000	278.580.346.224
244	Kota Yogyakarta	658.504.186.000	658.504.186.000	151.419.063.000	136.184.150.973
245	Provinsi Jawa Timur	3.803.428.371.000	3.803.428.371.000	7.405.756.438.000	7.091.057.737.317
246	Kab. Bangkalan	994.460.684.000	994.460.684.000	434.112.943.000	380.890.578.020
247	Kab. Banyuwangi	1.375.784.247.000	1.375.784.247.000	397.631.318.000	344.859.911.663
248	Kab. Blitar	1.108.687.006.000	1.108.687.006.000	410.095.952.000	373.933.107.094
249	Kab. Bojonegoro	932.445.113.000	932.445.113.000	416.581.548.000	363.294.214.270
250	Kab. Bondowoso	910.319.122.000	910.319.122.000	348.462.098.000	334.572.066.705
251	Kab. Gresik	907.246.643.000	907.246.643.000	325.530.487.000	261.439.212.210
252	Kab. Jember	1.688.226.251.000	1.688.226.251.000	584.254.124.000	497.213.637.256
253	Kab. Jombang	1.091.779.457.000	1.091.779.457.000	366.747.068.000	322.286.044.858
254	Kab. Kediri	1.220.408.783.000	1.220.408.783.000	417.167.328.000	388.216.534.204
255	Kab. Lamongan	1.146.161.266.000	1.146.161.266.000	475.911.844.000	402.207.813.067
256	Kab. Lumajang	972.852.929.000	972.852.929.000	321.825.948.000	284.611.017.882
257	Kab. Madiun	877.868.685.000	877.868.685.000	302.835.350.000	249.788.616.862
258	Kab. Magetan	899.960.340.000	899.960.340.000	318.874.083.000	287.738.495.074
259	Kab. Malang	1.665.110.987.000	1.665.110.987.000	552.184.069.000	511.019.294.785
260	Kab. Mojokerto	973.768.511.000	973.768.511.000	337.299.356.000	309.980.248.360
261	Kab. Nganjuk	1.059.746.429.000	1.059.746.429.000	427.259.099.000	380.659.065.998
262	Kab. Ngawi	1.039.619.057.000	1.039.619.057.000	332.346.227.000	302.818.431.695
263	Kab. Pacitan	793.715.346.000	793.715.346.000	290.625.824.000	262.316.225.308
264	Kab. Pamekasan	847.776.564.000	847.776.564.000	417.011.935.000	402.204.524.508
265	Kab. Pasuruan	1.179.520.941.000	1.179.520.941.000	422.464.092.000	373.333.035.400
266	Kab. Ponorogo	1.043.916.636.000	1.043.916.636.000	443.764.682.000	402.299.776.993
267	Kab. Probolinggo	961.711.263.000	961.711.263.000	312.213.183.000	296.917.285.580
268	Kab. Sampang	818.929.326.000	818.929.326.000	247.992.456.000	230.240.011.224
269	Kab. Sidoarjo	1.203.737.401.000	1.203.737.401.000	465.315.985.000	385.370.458.019
270	Kab. Situbondo	806.660.581.000	806.660.581.000	247.606.602.000	214.027.573.648
271	Kab. Sumenep	1.099.838.350.000	1.099.838.350.000	346.997.643.000	309.860.368.380
272	Kab. Trenggalek	885.545.437.000	885.545.437.000	287.370.268.000	263.572.965.988
273	Kab. Tuban	1.028.370.328.000	1.028.370.328.000	358.689.402.000	290.413.348.577
274	Kab. Tulungagung	1.151.959.732.000	1.151.959.732.000	391.347.387.000	376.106.134.735
275	Kota Blitar	421.212.306.000	421.212.306.000	100.061.710.000	91.001.449.167
276	Kota Kediri	606.928.225.000	606.928.225.000	135.676.701.000	123.667.741.806
277	Kota Madiun	502.392.070.000	502.392.070.000	99.154.318.000	77.267.422.860
278	Kota Malang	844.576.426.000	844.576.426.000	235.328.356.000	216.458.586.565
279	Kota Mojokerto	390.118.825.000	390.118.825.000	95.880.162.000	78.771.947.266
280	Kota Pasuruan	424.499.789.000	424.499.789.000	104.716.725.000	80.402.061.490
281	Kota Probolinggo	461.952.836.000	461.952.836.000	123.077.133.000	109.325.683.043
282	Kota Surabaya	1.211.713.876.000	1.211.713.876.000	457.143.351.000	381.547.206.664
283	Kota Batu	474.779.517.000	474.779.517.000	92.278.146.000	71.395.297.832
290	Provinsi Kalimantan Barat	1.720.698.207.000	1.720.698.207.000	1.600.549.190.000	1.529.205.325.150
291	Kab. Bengkayang	578.240.869.000	578.240.869.000	327.069.813.000	285.614.286.764

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
292	Kab. Landak	669.285.841.000	669.285.841.000	313.057.783.000	282.800.299.785
293	Kab. Kapuas Hulu	975.757.515.000	975.757.515.000	309.519.656.000	291.283.378.264
294	Kab. Ketapang	1.122.269.534.000	1.122.269.534.000	339.302.454.000	314.001.541.354
295	Kab. Mempawah	580.513.744.000	580.513.744.000	192.727.139.000	186.337.445.060
296	Kab. Sambas	871.250.908.000	871.250.908.000	359.462.598.000	333.650.660.240
297	Kab. Sanggau	824.217.941.000	824.217.941.000	336.207.677.000	315.140.741.426
298	Kab. Sintang	909.410.866.000	909.410.866.000	461.570.046.000	452.590.678.946
299	Kota Pontianak	699.448.985.000	699.448.985.000	169.264.870.000	164.313.516.904
300	Kota Singkawang	492.487.388.000	492.487.388.000	147.473.214.000	134.506.283.653
301	Kab. Kayong Utara	464.063.739.000	464.063.739.000	210.178.785.000	202.540.734.416
302	Kab. Kubu Raya	779.055.508.000	779.055.508.000	260.296.227.000	244.694.264.280
303	Kab. Sekadau	503.188.677.000	503.188.677.000	166.823.470.000	136.472.521.477
304	Kab. Melawi	604.543.876.000	604.543.876.000	357.184.425.000	323.432.429.121
305	Provinsi Kalimantan Tengah	1.574.382.856.000	1.574.382.856.000	836.615.543.000	773.947.001.748
306	Kab. Barito Selatan	576.041.341.000	576.041.341.000	171.247.233.000	149.454.265.960
307	Kab. Barito Utara	559.665.616.000	559.665.616.000	194.280.512.000	162.931.143.999
308	Kab. Kapuas	866.321.730.000	866.321.730.000	283.657.572.000	274.616.757.612
309	Kab. Kotawaringin Barat	652.906.913.000	652.906.913.000	242.505.250.000	229.039.333.005
310	Kab. Kotawaringin Timur	820.559.562.000	820.559.562.000	218.086.339.000	197.859.682.572
311	Kota Palangkaraya	646.270.544.000	646.270.544.000	153.298.816.000	130.524.013.709
312	Kab. Barito Timur	477.145.707.000	477.145.707.000	104.769.149.000	78.959.555.478
313	Kab. Murung Raya	667.654.598.000	667.654.598.000	174.204.212.000	154.229.820.938
314	Kab. Pulang Pisau	568.390.382.000	568.390.382.000	167.624.983.000	147.518.544.708
315	Kab. Gunung Mas	559.898.689.000	559.898.689.000	259.448.478.000	239.410.089.500
316	Kab. Lamandau	462.248.605.000	462.248.605.000	102.279.457.000	95.745.021.329
317	Kab. Sukamara	420.535.543.000	420.535.543.000	118.043.462.000	114.420.630.234
318	Kab. Katingan	696.300.554.000	696.300.554.000	175.063.230.000	158.259.011.683
319	Kab. Seruyan	616.493.956.000	616.493.956.000	157.436.053.000	137.376.857.751
320	Provinsi Kalimantan Selatan	1.106.532.187.000	1.106.532.187.000	1.016.371.491.000	970.490.213.144
321	Kab. Banjar	709.407.411.000	709.407.411.000	247.576.174.000	222.321.166.443
322	Kab. Barito Kuala	563.856.750.000	563.856.750.000	218.020.696.000	203.057.034.009
323	Kab. Hulu Sungai Selatan	522.814.008.000	522.814.008.000	168.300.560.000	148.661.806.294
324	Kab. Hulu Sungai Tengah	519.741.516.000	519.741.516.000	179.604.049.000	156.213.347.801
325	Kab. Hulu Sungai Utara	483.674.063.000	483.674.063.000	180.566.710.000	148.150.303.710
326	Kab. Kotabaru	597.207.951.000	597.207.951.000	175.432.676.000	139.811.925.930
327	Kab. Tabalong	494.109.854.000	494.109.854.000	187.610.122.000	166.097.286.278
328	Kab. Tanah Laut	528.690.162.000	528.690.162.000	187.464.236.000	173.963.703.488
329	Kab. Tapin	443.124.432.000	443.124.432.000	144.131.028.000	122.932.499.010
330	Kota Banjarbaru	428.542.067.000	428.542.067.000	129.038.173.000	120.102.822.449
331	Kota Banjarmasin	696.828.787.000	696.828.787.000	184.880.152.000	165.317.963.759
332	Kab. Balangan	382.593.322.000	382.593.322.000	129.116.692.000	109.731.354.373
333	Kab. Tanah Bumbu	457.712.799.000	457.712.799.000	165.862.080.000	145.575.629.819
334	Provinsi Kalimantan Timur	714.906.576.000	714.906.576.000	1.177.284.607.000	1.107.407.922.992
335	Kab. Berau	540.531.902.000	540.531.902.000	150.507.522.000	121.348.327.077
336	Kab. Kutai Kartanegara	141.994.115.000	141.994.115.000	408.198.745.000	366.584.581.321
337	Kab. Kutai Barat	600.687.747.000	600.687.747.000	108.249.949.000	101.612.255.453
338	Kab. Kutai Timur	545.653.514.000	545.653.514.000	138.098.215.000	126.825.965.024
339	Kab. Mahakam Ulu	470.722.849.000	470.722.849.000	137.313.257.000	87.697.989.291
340	Kab. Paser	384.005.124.000	384.005.124.000	178.312.779.000	149.456.784.744
341	Kota Balikpapan	392.621.094.000	392.621.094.000	171.983.232.000	141.649.861.837
342	Kota Bontang	203.310.751.000	203.310.751.000	111.075.316.000	102.513.244.252
343	Kota Samarinda	653.465.507.000	653.465.507.000	268.378.150.000	238.686.091.599
344	Kab. Penajam Paser Utara	255.066.428.000	255.066.428.000	102.751.310.000	91.458.078.540
284	Provinsi Kalimantan Utara	1.185.105.787.000	1.185.105.787.000	365.789.462.000	346.124.864.862
285	Kab. Bulungan	470.131.592.000	470.131.592.000	135.558.923.000	121.482.111.016
286	Kab. Malinau	778.661.083.000	778.661.083.000	188.914.691.000	136.322.742.248
287	Kab. Nunukan	411.464.046.000	411.464.046.000	278.641.260.000	226.260.932.719

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
288	Kab. Tana Tidung	350.962.437.000	350.962.437.000	56.523.646.000	44.776.136.200
289	Kota Tarakan	346.753.157.000	346.753.157.000	107.988.883.000	100.663.196.753
345	Provinsi Sulawesi Utara	1.390.272.639.000	1.390.272.639.000	1.065.814.229.000	1.009.189.162.359
346	Kab. Bolaang Mongondow	555.027.490.000	555.027.490.000	185.369.048.000	173.227.321.314
347	Kab. Minahasa	656.641.151.000	656.641.151.000	217.426.088.000	210.544.203.248
348	Kab. Sangihe	511.785.034.000	511.785.034.000	350.552.593.000	335.681.083.913
349	Kota Bitung	474.591.814.000	474.591.814.000	149.565.968.000	145.231.247.739
350	Kota Manado	727.970.839.000	727.970.839.000	281.468.936.000	258.838.544.606
351	Kab. Kepulauan Talaud	484.872.842.000	484.872.842.000	214.098.638.000	208.284.381.231
352	Kab. Minahasa Selatan	521.870.749.000	521.870.749.000	262.406.836.000	220.481.646.732
353	Kab. Minahasa Tenggara	405.784.923.000	405.784.923.000	142.824.832.000	133.323.270.280
354	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	375.688.340.000	375.688.340.000	149.236.136.000	139.100.100.117
355	Kota Kotamobagu	375.916.545.000	375.916.545.000	137.117.861.000	132.935.633.173
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur	337.348.432.000	337.348.432.000	141.266.385.000	135.236.291.794
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	348.334.434.000	348.334.434.000	134.126.328.000	127.911.678.441
358	Kota Tomohon	398.270.294.000	398.270.294.000	149.840.417.000	143.516.283.890
359	Kab. Minahasa Utara	490.707.078.000	490.707.078.000	189.952.875.000	177.627.975.670
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara	382.623.329.000	382.623.329.000	170.235.066.000	162.696.515.904
361	Provinsi Gorontalo	997.598.871.000	997.598.871.000	418.747.792.000	393.157.693.302
362	Kab. Boalemo	452.535.801.000	452.535.801.000	230.313.559.000	211.831.753.187
363	Kab. Gorontalo	653.986.983.000	653.986.983.000	217.063.113.000	199.360.117.243
364	Kota Gorontalo	508.677.825.000	508.677.825.000	175.931.983.000	168.054.554.474
365	Kab. Pohuwato	512.143.752.000	512.143.752.000	122.476.800.000	116.267.705.209
366	Kab. Gorontalo Utara	399.333.886.000	399.333.886.000	167.339.349.000	151.099.563.176
367	Kab. Bone Bolango	487.244.817.000	487.244.817.000	135.845.534.000	130.193.483.605
368	Provinsi Sulawesi Tengah	1.546.247.611.000	1.546.247.611.000	1.001.554.188.000	976.155.892.643
369	Kab. Banggai	866.617.294.000	866.617.294.000	390.335.059.000	369.791.521.480
370	Kab. Banggai Laut	362.972.147.000	362.972.147.000	164.981.542.000	144.363.034.422
371	Kab. Banggai Kepulauan	453.262.455.000	453.262.455.000	136.567.267.000	121.739.248.892
372	Kab. Buol	527.418.461.000	527.418.461.000	213.528.033.000	190.636.712.501
373	Kab. Toli-toli	612.841.706.000	612.841.706.000	259.768.258.000	247.585.291.232
374	Kab. Donggala	652.945.096.000	652.945.096.000	210.752.749.000	174.852.843.222
375	Kab. Morowali	506.862.674.000	506.862.674.000	213.244.362.000	207.500.492.082
376	Kab. Morowali Utara	547.360.397.000	547.360.397.000	133.616.760.000	123.612.757.360
377	Kab. Poso	719.435.512.000	719.435.512.000	283.963.142.000	280.259.619.662
378	Kota Palu	671.600.535.000	671.600.535.000	234.602.184.000	223.267.702.235
379	Kab. Parigi Moutong	740.305.507.000	740.305.507.000	269.186.750.000	268.736.423.708
380	Kab. Sigi	629.910.031.000	629.910.031.000	207.559.985.000	195.236.557.478
381	Kab. Tojo Una Una	551.607.986.000	551.607.986.000	179.613.078.000	173.813.563.664
382	Provinsi Sulawesi Selatan	2.509.480.255.000	2.509.480.255.000	2.720.105.630.000	2.565.500.202.648
383	Kab. Bantaeng	493.079.256.000	493.079.256.000	220.244.528.000	204.689.919.440
384	Kab. Barru	510.227.516.000	510.227.516.000	296.771.264.000	278.721.408.044
385	Kab. Bone	1.069.494.543.000	1.069.494.543.000	446.066.754.000	411.732.201.067
386	Kab. Bulukumba	704.064.918.000	704.064.918.000	380.260.866.000	322.083.584.085
387	Kab. Enrekang	534.335.959.000	534.335.959.000	229.224.350.000	213.747.024.586
388	Kab. Gowa	835.733.631.000	835.733.631.000	465.570.151.000	445.496.853.580
389	Kab. Jeneponto	618.149.593.000	618.149.593.000	247.351.452.000	232.931.985.037
390	Kab. Luwu	676.991.576.000	676.991.576.000	214.808.430.000	211.037.550.820
391	Kab. Luwu Utara	653.395.912.000	653.395.912.000	249.559.044.000	241.266.392.667
392	Kab. Maros	691.755.951.000	691.755.951.000	220.052.854.000	188.057.703.387
393	Kab. Pangkajene Kepulauan	689.947.090.000	689.947.090.000	316.868.449.000	282.690.422.589
394	Kab. Pinrang	690.060.262.000	690.060.262.000	222.824.373.000	210.649.988.873
395	Kab. Kepulauan Selayar	531.175.255.000	531.175.255.000	170.968.225.000	164.446.753.088
396	Kab. Sidenreng Rappang	608.140.939.000	608.140.939.000	394.974.865.000	369.769.690.740
397	Kab. Sinjai	585.821.629.000	585.821.629.000	276.679.593.000	261.575.639.886
398	Kab. Soppeng	624.804.701.000	624.804.701.000	291.861.697.000	280.944.715.849
399	Kab. Takalar	590.649.260.000	590.649.260.000	226.154.050.000	220.097.282.442

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
400	Kab. Tana Toraja	550.123.359.000	550.123.359.000	261.016.914.000	253.326.376.790
401	Kab. Wajo	710.492.759.000	710.492.759.000	335.489.562.000	322.878.801.652
402	Kota Pare-pare	454.752.410.000	454.752.410.000	218.010.050.000	201.051.860.222
403	Kab. Toraja Utara	518.518.563.000	518.518.563.000	182.595.330.000	179.858.234.766
404	Kota Makassar	1.300.764.306.000	1.300.764.306.000	272.514.773.000	253.486.011.263
405	Kota Palopo	516.167.587.000	516.167.587.000	187.656.819.000	172.690.793.767
406	Kab. Luwu Timur	545.609.968.000	545.609.968.000	182.157.967.000	167.226.856.410
407	Provinsi Sulawesi Barat	1.008.360.523.000	1.008.360.523.000	514.816.944.000	498.440.658.517
408	Kab. Majene	509.399.905.000	509.399.905.000	214.490.992.000	210.592.034.690
409	Kab. Mamuju	621.672.713.000	621.672.713.000	184.763.060.000	173.855.594.631
410	Kab. Mamuju Tengah	344.886.043.000	344.886.043.000	136.869.348.000	131.912.162.438
411	Kab. Polewali Mandar	712.638.905.000	712.638.905.000	243.861.311.000	231.871.820.995
412	Kab. Mamasa	514.116.588.000	514.116.588.000	197.602.779.000	191.584.549.571
413	Kab. Mamuju Utara	481.777.564.000	481.777.564.000	187.082.034.000	179.277.318.000
414	Provinsi Sulawesi Tenggara	1.563.334.271.000	1.563.334.271.000	1.065.005.502.000	1.040.897.145.401
415	Kab. Buton	423.599.039.000	423.599.039.000	155.830.977.000	147.761.653.414
416	Kab. Konawe	677.923.042.000	677.923.042.000	167.542.328.000	162.356.280.048
417	Kab Konawe Kepulauan	310.661.482.000	310.661.482.000	142.000.836.000	140.114.605.007
418	Kab. Kolaka	582.704.093.000	582.704.093.000	198.809.959.000	190.850.133.575
419	Kab. Kolaka Timur	401.256.422.000	401.256.422.000	115.677.260.000	114.333.151.514
420	Kab. Muna	658.128.350.000	658.128.350.000	240.086.521.000	235.631.889.233
421	Kota Kendari	662.782.152.000	662.782.152.000	164.535.577.000	156.901.631.368
422	Kota Bau-bau	509.013.667.000	509.013.667.000	181.103.598.000	168.722.976.293
423	Kab. Konawe Selatan	661.162.078.000	661.162.078.000	182.039.435.000	171.881.032.272
424	Kab. Bombana	477.202.595.000	477.202.595.000	196.753.165.000	186.612.448.087
425	Kab. Konawe Utara	454.226.840.000	454.226.840.000	113.597.551.000	110.317.745.943
426	Kab. Buton Utara	405.650.592.000	405.650.592.000	116.464.153.000	109.784.022.469
427	Kab. Wakatobi	444.717.687.000	444.717.687.000	153.929.876.000	150.606.858.948
428	Kab. Kolaka Utara	467.026.887.000	467.026.887.000	108.084.710.000	101.010.654.419
429	Kab. Muna Barat	353.873.097.000	353.873.097.000	108.368.105.000	106.923.927.350
430	Kab. Buton Tengah	356.733.032.000	356.733.032.000	139.292.497.000	133.197.558.156
431	Kab. Buton Selatan	337.380.172.000	337.380.172.000	97.789.920.000	93.226.877.150
432	Provinsi Bali	1.260.842.523.000	1.260.842.523.000	1.171.405.973.000	1.105.556.046.864
433	Kab. Badung	330.336.650.000	330.336.650.000	173.784.541.000	151.708.815.172
434	Kab. Bangli	558.296.101.000	558.296.101.000	180.357.632.000	158.311.520.697
435	Kab. Buleleng	965.435.235.000	965.435.235.000	353.088.945.000	320.552.964.468
436	Kab. Gianyar	693.573.732.000	693.573.732.000	216.972.708.000	196.885.681.361
437	Kab. Jembrana	552.643.376.000	552.643.376.000	208.806.927.000	195.069.834.753
438	Kab. Karangasem	722.184.384.000	722.184.384.000	221.455.211.000	203.716.526.855
439	Kab. Klungkung	530.371.681.000	530.371.681.000	111.213.673.000	102.853.576.107
440	Kab. Tabanan	811.768.631.000	811.768.631.000	280.328.364.000	260.576.490.482
441	Kota Denpasar	650.169.150.000	650.169.150.000	152.941.997.000	131.166.775.019
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.537.777.886.000	1.537.777.886.000	1.454.324.097.000	1.384.626.963.350
443	Kab. Bima	879.315.326.000	879.315.326.000	346.169.942.500	328.675.608.975
444	Kab. Dompu	572.061.726.000	572.061.726.000	166.379.501.000	159.303.094.133
445	Kab. Lombok Barat	770.958.922.000	770.958.922.000	325.335.737.000	300.261.539.702
446	Kab. Lombok Tengah	981.107.649.000	981.107.649.000	394.546.000.500	350.645.718.432
447	Kab. Lombok Timur	1.142.337.196.000	1.142.337.196.000	571.034.814.000	546.607.265.848
448	Kab. Sumbawa	815.888.480.000	815.888.480.000	355.315.140.000	342.973.434.280
449	Kota Mataram	598.318.257.000	598.318.257.000	253.269.156.000	239.780.678.837
450	Kab. Lombok Utara	392.932.943.000	392.932.943.000	170.282.576.000	158.431.700.473
451	Kota Bima	455.972.250.000	455.972.250.000	198.717.476.500	193.166.068.574
452	Kab. Sumbawa Barat	400.284.503.000	400.284.503.000	170.983.587.500	160.733.461.603
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.784.462.326.000	1.784.462.326.000	1.890.365.209.000	1.771.353.806.928
454	Kab. Alor	594.896.230.000	594.896.230.000	234.788.700.000	215.923.977.531
455	Kab. Belu	499.067.465.000	499.067.465.000	295.768.109.000	269.920.071.387
456	Kab. Ende	616.547.687.000	616.547.687.000	168.089.858.000	151.156.670.776

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
457	Kab. Flores Timur	601.305.722.000	601.305.722.000	157.176.557.000	128.736.713.500
458	Kab. Kupang	674.899.674.000	674.899.674.000	230.288.392.000	183.749.673.179
459	Kab. Lembata	462.207.950.000	462.207.950.000	99.355.549.000	92.341.728.724
460	Kab. Malaka	431.015.290.000	431.015.290.000	229.821.658.000	214.839.123.904
461	Kab. Manggarai	569.792.719.000	569.792.719.000	248.003.989.000	229.529.838.280
462	Kab. Ngada	468.961.498.000	468.961.498.000	174.180.174.000	163.229.587.083
463	Kab. Sikka	617.286.551.000	617.286.551.000	231.100.618.000	151.516.724.003
464	Kab. Sumba Barat	394.534.044.000	394.534.044.000	150.643.613.000	126.135.092.400
465	Kab. Sumba Timur	631.785.224.000	631.785.224.000	248.120.019.000	215.697.728.552
466	Kab. Timor Tengah Selatan	745.323.617.000	745.323.617.000	293.541.327.000	224.957.951.523
467	Kab. Timor Tengah Utara	579.318.905.000	579.318.905.000	217.654.413.000	199.326.426.870
468	Kota Kupang	649.542.427.000	649.542.427.000	164.095.719.000	142.638.660.241
469	Kab. Rote Ndao	438.816.702.000	438.816.702.000	166.957.444.000	161.084.244.489
470	Kab. Nagekeo	429.644.584.000	429.644.584.000	150.569.109.000	137.837.055.382
471	Kab. Sumba Tengah	345.763.373.000	345.763.373.000	100.939.967.000	91.710.709.198
472	Kab. Sumba Barat Daya	462.958.457.000	462.958.457.000	195.374.266.000	180.466.797.768
473	Kab. Manggarai Timur	499.269.564.000	499.269.564.000	204.235.269.000	176.623.272.941
474	Kab. Sabu Raijua	340.931.184.000	340.931.184.000	157.744.779.000	79.345.598.296
475	Kab. Manggarai Barat	496.316.854.000	496.316.854.000	210.512.592.000	186.329.313.984
476	Provinsi Maluku	1.555.603.048.000	1.555.603.048.000	781.037.653.000	733.329.638.058
477	Kab. Maluku Tenggara Barat	553.890.033.000	553.890.033.000	193.550.111.000	181.281.507.234
478	Kab. Maluku Tengah	960.434.854.000	960.434.854.000	394.554.444.000	337.191.013.329
479	Kab. Maluku Tenggara	479.520.065.000	479.520.065.000	206.243.856.000	205.321.612.659
480	Kab. Buru	488.892.595.000	488.892.595.000	153.597.130.000	150.472.889.625
481	Kota Ambon	674.130.364.000	674.130.364.000	190.765.992.000	145.635.109.594
482	Kab. Seram Bagian Barat	589.772.789.000	589.772.789.000	241.457.644.000	231.576.505.165
483	Kab. Seram Bagian Timur	506.923.288.000	506.923.288.000	267.477.065.000	226.114.143.217
484	Kab. Maluku Barat Daya	550.740.605.000	550.740.605.000	281.112.670.000	231.824.219.516
485	Kab. Buru Selatan	413.834.980.000	413.834.980.000	138.126.180.000	132.085.674.943
486	Kab. Kepulauan Aru	568.754.649.000	568.754.649.000	255.780.807.000	219.639.178.400
487	Kota Tual	380.411.975.000	380.411.975.000	138.417.655.000	124.734.302.140
488	Provinsi Maluku Utara	1.265.846.334.000	1.265.846.334.000	590.318.008.000	553.215.204.610
489	Kab. Halmahera Tengah	440.305.656.000	440.305.656.000	102.136.496.000	92.851.423.888
490	Kab. Halmahera Barat	486.916.702.000	486.916.702.000	137.840.122.000	126.131.839.684
491	Kota Ternate	610.438.912.000	610.438.912.000	175.519.004.000	166.632.969.350
492	Kab. Halmahera Timur	476.515.982.000	476.515.982.000	213.107.630.000	208.334.271.304
493	Kota Tidore Kepulauan	545.226.947.000	545.226.947.000	107.883.291.000	104.246.995.700
494	Kab. Kepulauan Sula	467.004.645.000	467.004.645.000	185.187.998.000	170.851.855.668
495	Kab. Pulau Morotai	387.538.283.000	387.538.283.000	103.199.814.000	101.652.142.205
496	Kab. Pulau Taliabu	336.751.708.000	336.751.708.000	147.360.147.000	137.039.145.980
497	Kab. Halmahera Selatan	682.940.145.000	682.940.145.000	241.165.755.000	231.633.500.381
498	Kab. Halmahera Utara	480.795.681.000	480.795.681.000	173.868.493.000	163.833.486.262
499	Provinsi Papua	2.338.200.799.000	2.338.200.799.000	1.372.762.126.000	1.029.337.888.416
500	Kab. Yalimo	621.593.846.000	621.593.846.000	164.909.141.000	151.637.898.979
501	Kab. Lanny Jaya	631.408.784.000	631.408.784.000	155.337.166.000	139.825.480.680
502	Kab. Biak Numfor	612.105.787.000	612.105.787.000	248.278.232.000	202.990.141.577
503	Kab. Jayapura	707.058.948.000	707.058.948.000	154.893.730.000	120.962.569.237
504	Kab. Jayawijaya	724.393.394.000	724.393.394.000	168.384.282.000	165.838.269.507
505	Kab. Merauke	1.257.423.751.000	1.257.423.751.000	308.696.125.000	185.895.001.655
506	Kab. Mimika	623.222.835.000	623.222.835.000	180.315.826.000	173.375.322.192
507	Kab. Nabire	723.706.992.000	723.706.992.000	243.245.690.000	219.378.339.936
508	Kab. Paniai	586.339.658.000	586.339.658.000	274.488.294.000	271.066.010.000
509	Kab. Puncak Jaya	751.413.693.000	751.413.693.000	112.954.409.000	63.984.342.600
510	Kab. Kepulauan Yapen	536.189.289.000	536.189.289.000	156.150.878.000	144.517.042.274
511	Kota Jayapura	680.315.199.000	680.315.199.000	151.729.761.000	93.790.487.761
512	Kab. Sarmi	715.028.866.000	715.028.866.000	137.861.273.000	134.137.714.358
513	Kab. Keerom	555.250.245.000	555.250.245.000	174.902.532.000	134.328.637.782

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
514	Kab. Yahukimo	746.447.201.000	746.447.201.000	168.222.554.000	163.971.292.094
515	Kab. Pegunungan Bintang	852.535.201.000	852.535.201.000	187.719.369.000	161.855.775.930
516	Kab. Tolikara	735.956.544.000	735.956.544.000	144.611.591.000	136.328.427.238
517	Kab. Boven Digoel	837.136.696.000	837.136.696.000	147.041.822.000	135.464.687.150
518	Kab. Mappi	785.283.849.000	785.283.849.000	180.750.054.000	103.629.948.400
519	Kab. Asmat	898.025.345.000	898.025.345.000	145.055.957.000	134.583.707.133
520	Kab. Waropen	563.832.759.000	563.832.759.000	198.244.544.000	171.986.103.980
521	Kab. Mamberamo Raya	721.555.352.000	721.555.352.000	126.199.967.000	83.115.610.400
522	Kab. Mamberamo Tengah	632.365.466.000	632.365.466.000	148.496.486.000	142.347.777.354
523	Kab. Nduga	633.530.814.000	633.530.814.000	143.657.058.000	133.445.016.060
524	Kab. Dogiyai	492.359.583.000	492.359.583.000	129.541.926.000	118.295.456.398
525	Kab. Intan Jaya	700.866.324.000	700.866.324.000	181.829.737.000	182.380.064.440
526	Kab. Puncak	805.691.418.000	805.691.418.000	269.262.275.000	257.650.507.745
527	Kab. Deiyai	472.114.576.000	472.114.576.000	83.444.144.000	82.768.105.960
528	Kab. Supiori	457.488.070.000	457.488.070.000	149.098.736.000	108.294.966.405
529	Provinsi Papua Barat	1.411.972.998.000	1.411.972.998.000	421.841.623.000	338.947.588.991
530	Kab. Sorong	505.221.727.000	505.221.727.000	158.360.136.000	152.480.728.188
531	Kab. Manokwari	522.441.560.000	522.441.560.000	219.115.016.000	180.981.747.390
532	Kab. Manokwari Selatan	346.789.205.000	346.789.205.000	85.167.872.000	80.762.000.647
533	Kab. Fak fak	666.020.055.000	666.020.055.000	260.067.856.000	246.053.952.200
534	Kota Sorong	467.220.708.000	467.220.708.000	97.023.102.000	87.482.663.509
535	Kab. Pegunungan Arfak	379.186.615.000	379.186.615.000	158.970.912.000	145.479.801.650
536	Kab. Sorong Selatan	440.310.450.000	440.310.450.000	124.656.990.000	105.398.522.000
537	Kab. Raja Ampat	642.520.914.000	642.520.914.000	140.803.478.000	136.105.225.620
538	Kab. Teluk Bintuni	549.667.337.000	549.667.337.000	191.373.791.000	156.894.935.900
539	Kab. Teluk Wondama	430.675.716.000	430.675.716.000	86.963.283.000	78.111.330.829
540	Kab. Tambrauw	519.425.053.000	519.425.053.000	116.985.274.000	110.188.352.389
541	Kab. Maybrat	444.866.529.000	444.866.529.000	145.846.272.000	144.741.190.250
542	Kab. Kaimana	606.204.584.000	606.204.584.000	74.465.431.000	59.531.927.148
543	Dana Cadangan	-	-	1.362.466.024.000	-
	JUMLAH	398.582.314.748.000	398.582.314.748.000	184.626.500.036.000	167.667.999.453.327

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 + 5 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	7.971.646.295.000	-	-	-	7.971.646.295.000	7.971.646.295.000	-	-	-	7.971.646.295.000
2	Kab. Aceh Barat		240.736.847.000		7.500.000.000	248.236.847.000		240.736.847.000		7.500.000.000	248.236.847.000
3	Kab. Aceh Besar		447.113.772.000		54.124.190.000	501.237.962.000		445.269.967.800		54.124.190.000	499.394.157.800
4	Kab. Aceh Selatan		197.045.391.000		51.632.533.000	248.677.924.000		197.045.391.000		51.632.533.000	248.677.924.000
5	Kab. Aceh Singkil		89.900.271.000		-	89.900.271.000		89.900.271.000		-	89.900.271.000
6	Kab. Aceh Tengah		221.075.321.000		54.577.219.000	275.652.540.000		221.075.321.000		54.577.219.000	275.652.540.000
7	Kab. Aceh Tenggara		286.814.473.000		50.210.527.000	337.025.000.000		286.814.473.000		50.210.527.000	337.025.000.000
8	Kab. Aceh Timur		384.626.960.000		50.374.120.000	435.001.080.000		384.626.960.000		50.374.120.000	435.001.080.000
9	Kab. Aceh Utara		635.314.441.000		7.500.000.000	642.814.441.000		635.314.441.000		7.500.000.000	642.814.441.000
10	Kab. Bireuen		453.877.914.000		52.903.530.000	506.781.444.000		453.410.114.584		52.903.530.000	506.313.644.584
11	Kab. Pidie		542.393.270.000		-	542.393.270.000		542.393.270.000		-	542.393.270.000
12	Kab. Simeulue		106.228.789.000		50.927.822.000	157.156.611.000		106.228.789.000		50.927.822.000	157.156.611.000
13	Kota Banda Aceh		70.923.443.000		-	70.923.443.000		70.163.071.906		-	70.163.071.906
14	Kota Sabang		17.288.363.000		50.386.794.000	67.675.067.000		14.958.863.149		50.386.794.000	65.345.567.149
15	Kota Lingsa		54.171.651.000		51.569.612.000	105.741.263.000		54.171.651.000		51.569.612.000	105.741.263.000
16	Kota Lhokseumawe		55.667.967.000		7.500.000.000	63.167.967.000		55.410.060.040		7.500.000.000	62.910.060.040
17	Kab. Nagan Raya		168.198.628.000		50.751.644.000	218.950.272.000		168.189.628.800		50.751.644.000	218.941.272.800
18	Kab. Aceh Jaya		130.515.335.000		50.575.466.000	181.090.801.000		130.515.335.000		50.575.466.000	181.090.801.000
19	Kab. Pidie Jaya		167.751.922.000		58.868.406.000	226.620.328.000		167.751.922.000		58.868.406.000	226.620.328.000
20	Kab. Aceh Barat Daya		116.099.074.000		7.500.000.000	123.599.074.000		116.099.074.000		7.500.000.000	123.599.074.000
21	Kab. Gayo Lues		105.403.222.000		7.500.000.000	112.903.222.000		105.403.222.000		7.500.000.000	112.903.222.000
22	Kab. Aceh Tamiang		162.348.283.000		7.500.000.000	169.848.283.000		162.348.283.000		7.500.000.000	169.848.283.000
23	Kab. Bener Meriah		174.350.968.000		54.413.625.000	228.764.613.000		174.341.988.000		54.413.625.000	228.755.613.000
24	Kota Subulussalam		64.724.470.000		-	64.724.470.000		64.724.470.000		-	64.724.470.000
25	Provinsi Sumatera Utara		-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kab. Asahan		141.972.561.000		-	141.972.561.000		141.972.561.000		-	141.972.561.000
27	Kab. Dairi		126.096.790.000		51.456.355.000	177.553.145.000		126.096.790.000		51.456.355.000	177.553.145.000
28	Kab. Deli Serdang		303.060.286.000		-	303.060.286.000		303.060.286.000		-	303.060.286.000
29	Kab. Karo		196.336.126.000		-	196.336.126.000		196.098.324.800		-	196.098.324.800
30	Kab. LabuhanBatu		62.369.282.000		-	62.369.282.000		62.369.282.000		-	62.369.282.000
31	Kab. Langkat		192.863.823.000		-	192.863.823.000		192.863.823.000		-	192.863.823.000
32	Kab. Mandailing Natal		284.048.518.000		-	284.048.518.000		283.814.608.947		-	283.814.608.947
33	Kab. Nias		132.926.248.000		-	132.926.248.000		127.776.737.630		-	127.776.737.630
34	Kab. Simalungun		294.047.540.000		-	294.047.540.000		293.893.039.999		-	293.893.039.999
35	Kab. Tapanuli Selatan		161.670.006.000		50.676.139.000	212.346.145.000		161.669.278.000		50.676.139.000	212.345.417.000
36	Kab. Tapanuli Tengah		123.393.234.000		-	123.393.234.000		123.154.815.800		-	123.154.815.800
37	Kab. Tapanuli Utara		180.698.826.000		7.500.000.000	188.198.826.000		180.698.826.000		7.500.000.000	188.198.826.000
38	Kab. Tobo Samosir		173.463.727.000		44.572.977.000	218.036.704.000		173.231.397.400		44.572.977.000	217.804.374.400
39	Kota Binjai		-		-	-		-		-	-
40	Kota Medan		-		-	-		-		-	-
41	Kota Pematang Siantar		-		-	-		-		-	-
42	Kota Sibolga		-		-	-		-		-	-
43	Kota Tanjung Balai		-		-	-		-		-	-
44	Kab. Batu Bara		113.377.356.000		-	113.377.356.000		113.377.356.000		-	113.377.356.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara		68.646.939.000		-	68.646.939.000		68.646.939.000		-	68.646.939.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan		46.022.462.000		-	46.022.462.000		46.022.462.000		-	46.022.462.000
47	Kab. Padang Lawas Utara		288.081.911.000		-	288.081.911.000		287.130.769.009		-	287.130.769.009
48	Kab. Padang Lawas		228.176.371.000		-	228.176.371.000		228.176.371.000		-	228.176.371.000
49	Kab. Nias Utara		91.824.194.000		-	91.824.194.000		91.318.986.400		-	91.318.986.400
50	Kab. Nias Barat		83.734.696.000		-	83.734.696.000		83.734.696.000		-	83.734.696.000
51	Kota Tebing Tinggi		-		-	-		-		-	-
52	Kota Padang Sidempuan		34.650.201.000		-	34.650.201.000		34.650.201.000		-	34.650.201.000
53	Kab. Pakpak Bharat		42.483.881.000		-	42.483.881.000		41.952.694.400		-	41.952.694.400
54	Kab. Nias Selatan		346.818.470.000		-	346.818.470.000		298.687.930.012		-	298.687.930.012
55	Kab. Humbang Hasundutan		117.513.286.000		-	117.513.286.000		117.513.286.000		-	117.513.286.000
56	Kab. Serdang Bedagai		183.848.815.000		-	183.848.815.000		183.848.815.000		-	183.848.815.000
57	Kab. Samosir		100.027.803.000		-	100.027.803.000		98.426.239.000		-	98.426.239.000
58	Kota Gunungsitoli		79.818.138.000		-	79.818.138.000		79.477.604.324		-	79.477.604.324
59	Provinsi Sumatera Barat		-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Kab. Lima Puluh Kota		67.871.118.000		50.374.120.000	118.245.238.000		67.871.118.000		50.374.120.000	118.245.238.000
61	Kab. Agam		70.772.851.000		7.500.000.000	78.272.851.000		70.772.851.000		7.500.000.000	78.272.851.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai		46.812.952.000		-	46.812.952.000		46.812.952.000		-	46.812.952.000
63	Kab. Padang Pariaman		84.644.728.000		51.028.495.000	135.673.223.000		53.665.722.000		51.028.495.000	104.694.217.000
64	Kab. Pasaman		35.950.811.000		7.500.000.000	43.450.811.000		35.950.811.000		7.500.000.000	43.450.811.000
65	Kab. Pesisir Selatan		143.905.954.000		7.500.000.000	151.405.954.000		143.905.954.000		7.500.000.000	151.405.954.000
66	Kab. Sijunjung		51.629.928.000		47.467.327.000	99.097.255.000		51.629.928.000		47.467.327.000	99.097.255.000
67	Kab. Solok		64.082.138.000		-	64.082.138.000		64.082.138.000		-	64.082.138.000
68	Kab. Tanah Datar		62.469.772.000		7.500.000.000	69.969.772.000		62.469.772.000		7.500.000.000	69.969.772.000
69	Kota Bukit Tinggi		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
70	Kota Padang Panjang		-		42.836.368.000	42.836.368.000		-		42.836.368.000	42.836.368.000
71	Kota Padang		-		52.752.520.000	52.752.520.000		-		52.752.520.000	52.752.520.000
72	Kota Payakumbuh		-		50.789.397.000	50.789.397.000		-		50.789.397.000	50.789.397.000
73	Kota Sawahlunto		23.665.861.000		7.500.000.000	31.165.861.000		23.665.861.000		7.500.000.000	31.165.861.000
74	Kota Solok		-		47.454.743.000	47.454.743.000		-		47.454.743.000	47.454.743.000
75	Kota Pariaman		44.148.673.000		7.500.000.000	51.648.673.000		44.148.673.000		7.500.000.000	51.648.673.000
76	Kab. Pasaman Barat		25.253.383.000		-	25.253.383.000		25.173.383.001		-	25.173.383.001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Jumlah Realisasi
77	Kab. Dharmasraya		45.098.231.000		51.745.790.000	96.844.021.000		45.098.231.000		96.844.021.000
78	Kab. Solok Selatan		35.426.124.000		-	35.426.124.000		35.426.124.000		35.426.124.000
79	Provinsi Riau		-		-	-		-		-
80	Kab. Bengkalis		108.169.870.000		7.500.000.000	115.669.870.000		108.169.870.000	7.500.000.000	115.669.870.000
81	Kab. Indragiri Hilir		156.525.314.000		-	156.525.314.000		155.804.872.000	-	155.804.872.000
82	Kab. Indragiri Hulu		138.490.141.000		-	138.490.141.000		138.249.817.001	-	138.249.817.001
83	Kab. Kampar		192.408.524.000		-	192.408.524.000		192.408.523.000	-	192.408.523.000
84	Kab. Kuantan Singingi		166.211.742.000		-	166.211.742.000		166.211.742.000	-	166.211.742.000
85	Kab. Pelalawan		84.403.526.000		7.500.000.000	91.903.526.000		84.403.525.000	7.500.000.000	91.903.525.000
86	Kab. Rokan Hilir		130.582.811.000		-	130.582.811.000		130.582.811.000	-	130.582.811.000
87	Kab. Rokan Hulu		112.016.303.000		-	112.016.303.000		112.016.302.800	-	112.016.302.800
88	Kab. Siak		97.934.922.000		7.500.000.000	105.434.922.000		97.689.097.543	7.500.000.000	105.189.097.543
89	Kota Dumai		-		-	-		-	-	-
90	Kota Pekanbaru		-		-	-		-	-	-
91	Kab. Kepulauan Meranti		82.562.772.000		-	82.562.772.000		82.562.772.000	-	82.562.772.000
92	Provinsi Kepulauan Riau		-		-	-		-		-
93	Kab. Bintan		31.516.891.000		7.500.000.000	39.016.891.000		31.516.891.000	7.500.000.000	39.016.891.000
94	Kab. Natuna		57.115.594.000		-	57.115.594.000		57.115.594.000	-	57.115.594.000
95	Kab. Karimun		35.818.950.000		-	35.818.950.000		35.818.950.000	-	35.818.950.000
96	Kota Batam		-		-	-		-	-	-
97	Kab. Kepulauan Anambas		43.954.705.000		-	43.954.705.000		43.954.705.000	-	43.954.705.000
98	Kota Tanjung Pinang		-		-	-		-	-	-
99	Kab. Lingga		59.776.396.000		-	59.776.396.000		59.776.396.000	-	59.776.396.000
100	Provinsi Jambi		-		-	-		-		-
101	Kab. Batanghari		87.861.899.000		7.500.000.000	95.361.899.000		87.861.899.000	7.500.000.000	95.361.899.000
102	Kab. Bungo		109.907.883.000		-	109.907.883.000		109.907.879.349	-	109.907.879.349
103	Kab. Kerinci		213.334.035.000		7.500.000.000	220.834.035.000		212.741.735.000	7.500.000.000	220.241.735.000
104	Kab. Merangin		157.655.587.000		-	157.655.587.000		157.655.587.000	-	157.655.587.000
105	Kab. Muaro Jambi		117.519.276.000		-	117.519.276.000		117.519.276.000	-	117.519.276.000
106	Kab. Sarolangun		117.168.948.000		42.458.844.000	159.627.792.000		116.919.333.800	42.458.844.000	159.378.177.800
107	Kab. Tanjung Jabung Barat		90.349.693.000		-	90.349.693.000		90.349.693.000	-	90.349.693.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur		60.169.683.000		-	60.169.683.000		60.169.683.000	-	60.169.683.000
109	Kab. Tebo		85.879.314.000		7.500.000.000	93.379.314.000		85.879.314.000	7.500.000.000	93.379.314.000
110	Kota Jambi		-		-	-		-	-	-
111	Kota Sungai Penuh		51.096.283.000		-	51.096.283.000		51.032.640.200	-	51.032.640.200
112	Provinsi Sumatera Selatan		-		-	-		-		-
113	Kab. Lahat		272.612.456.800		7.500.000.000	280.112.456.800		272.612.456.800	7.500.000.000	280.112.456.800
114	Kab. Musi Banyuasin		181.802.790.000		-	181.802.790.000		181.802.790.000	-	181.802.790.000
115	Kab. Musi Rawas		146.524.040.000		-	146.524.040.000		146.524.040.000	-	146.524.040.000
116	Kab. Musi Rawas Utara		68.434.210.000		-	68.434.210.000		68.157.259.601	-	68.157.259.601
117	Kab. Muara Enim		192.539.554.000		7.500.000.000	200.039.554.000		192.539.554.000	7.500.000.000	200.039.554.000
118	Kab. Ogan Komering Ilir		267.141.300.000		7.500.000.000	274.641.300.000		266.448.067.000	7.500.000.000	273.948.067.000
119	Kab. Ogan Komering Ulu		112.709.716.000		7.500.000.000	120.209.716.000		112.709.716.000	7.500.000.000	120.209.716.000
120	Kota Palembang		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-	7.500.000.000	7.500.000.000
121	Kota Pagar Alam		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-	7.500.000.000	7.500.000.000
122	Kota Lubuk Linggau		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-	7.500.000.000	7.500.000.000
123	Kota Prabumulih		12.839.079.000		7.500.000.000	20.339.079.000		12.839.079.000	7.500.000.000	20.339.079.000
124	Kab. Empat Lawang		118.628.148.000		-	118.628.148.000		113.585.054.000	-	113.585.054.000
125	Kab. Banyuasin		230.005.921.000		7.500.000.000	237.505.921.000		230.005.921.000	7.500.000.000	237.505.921.000
126	Kab. Ogan Ilir		177.844.067.000		-	177.844.067.000		177.844.067.000	-	177.844.067.000
127	Kab. OKU Timur		233.735.655.000		7.500.000.000	241.235.655.000		233.735.655.000	7.500.000.000	241.235.655.000
128	Kab. OKU Selatan		192.109.953.000		7.500.000.000	199.609.953.000		192.109.953.000	7.500.000.000	199.609.953.000
129	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir		60.334.554.000		-	60.334.554.000		60.334.554.000	-	60.334.554.000
130	Provinsi Bangka Belitung		-		-	-		-		-
131	Kab. Bangka		51.955.343.000		47.215.644.000	99.170.987.000		51.955.343.000	47.215.644.000	99.170.987.000
132	Kab. Belitung		36.381.965.000		44.711.403.000	81.093.368.000		36.381.965.000	44.711.403.000	81.093.368.000
133	Kota Pangkal Pinang		-		-	-		-	-	-
134	Kab. Bangka Selatan		42.454.691.000		-	42.454.691.000		42.454.691.000	-	42.454.691.000
135	Kab. Bangka Tengah		46.833.209.000		-	46.833.209.000		46.833.209.000	-	46.833.209.000
136	Kab. Bangka Barat		49.947.647.000		45.353.193.000	95.300.840.000		49.947.647.000	45.353.193.000	95.300.840.000
137	Kab. Belitung Timur		34.088.724.000		-	34.088.724.000		34.088.724.000	-	34.088.724.000
138	Provinsi Bengkulu		-		-	-		-		-
139	Kab. Bengkulu Selatan		110.746.649.000		-	110.746.649.000		110.740.785.400	-	110.740.785.400
140	Kab. Bengkulu Utara		166.310.259.000		-	166.310.259.000		166.310.259.000	-	166.310.259.000
141	Kab. Rejang Lebong		95.495.934.000		-	95.495.934.000		95.493.476.500	-	95.493.476.500
142	Kota Bengkulu		-		42.874.120.000	42.874.120.000		-	42.874.120.000	42.874.120.000
143	Kab. Kaur		145.777.851.000		-	145.777.851.000		145.298.483.000	-	145.298.483.000
144	Kab. Seluma		139.486.234.000		-	139.486.234.000		139.486.234.000	-	139.486.234.000
145	Kab. Mukomuko		115.058.353.000		46.649.358.000	161.707.711.000		115.058.353.000	46.649.358.000	161.707.711.000
146	Kab. Lebong		72.563.476.000		-	72.563.476.000		72.563.476.000	-	72.563.476.000
147	Kab. Bengkulu Tengah		108.405.061.000		7.500.000.000	115.905.061.000		108.405.061.000	7.500.000.000	115.905.061.000
148	Kab. Kepahiang		81.496.596.000		-	81.496.596.000		81.496.592.000	-	81.496.592.000
149	Provinsi Lampung		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-	7.500.000.000	7.500.000.000
150	Kab. Lampung Barat		103.628.821.000		52.777.689.000	156.406.510.000		103.628.820.000	52.777.689.000	156.406.509.000
151	Kab. Lampung Selatan		210.513.550.000		-	210.513.550.000		210.513.550.000	-	210.513.550.000
152	Kab. Lampung Tengah		241.434.963.000		-	241.434.963.000		241.434.963.000	-	241.434.963.000
153	Kab. Lampung Utara		187.528.192.000		7.500.000.000	195.028.192.000		187.528.192.000	7.500.000.000	195.028.192.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Jumlah Pagu	Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah		Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
154	Kab. Lampung Timur		217.642.348.000		-	217.642.348.000		217.642.348.000		-	217.642.348.000
155	Kab. Tanggamus		233.594.239.000		7.500.000.000	241.094.239.000		233.594.239.000		7.500.000.000	241.094.239.000
156	Kab. Tulang Bawang		118.521.740.000	49.984.012.000		168.505.752.000		118.281.413.974	49.984.012.000		168.245.425.974
157	Kab. Way Kanan		174.760.346.000	7.500.000.000		182.260.346.000		174.760.346.000	7.500.000.000		182.260.346.000
158	Kab. Pesawaran		118.745.403.000		-	118.745.403.000		118.745.403.000		-	118.745.403.000
159	Kab. Pesisir Barat		92.417.906.000		-	92.417.906.000		92.417.904.696		-	92.417.904.696
160	Kab. Pringsewu		99.750.756.000	53.167.797.000		152.918.553.000		99.750.756.000	53.167.797.000		152.918.553.000
161	Kab. Mesuji		83.570.467.000		-	83.570.467.000		83.570.466.200		-	83.570.466.200
162	Kab. Tulang Bawang Barat		75.378.990.000	7.500.000.000		82.878.990.000		75.378.990.000	7.500.000.000		82.878.990.000
163	Kota Bandar Lampung		-	7.500.000.000		7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
164	Kota Metro		-	7.500.000.000		7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
165	Provinsi DKI Jakarta				-	-				-	-
166	Provinsi Jawa Barat			7.500.000.000		7.500.000.000			7.500.000.000		7.500.000.000
167	Kab. Bandung		249.414.249.000		-	249.414.249.000		249.414.249.000		-	249.414.249.000
168	Kab. Bekasi		170.420.113.000	7.500.000.000		177.920.113.000		170.420.113.000	7.500.000.000		177.920.113.000
169	Kab. Bogor		371.999.170.000	7.500.000.000		379.499.170.000		371.999.169.989	7.500.000.000		379.499.169.989
170	Kab. Ciamis		213.818.690.000	54.300.368.000		268.119.058.000		213.818.690.000	54.300.368.000		268.119.058.000
171	Kab. Cianjur		307.296.048.000	7.500.000.000		314.796.048.000		307.296.048.000	7.500.000.000		314.796.048.000
172	Kab. Cirebon		360.496.820.000	7.500.000.000		367.996.820.000		360.496.820.000	7.500.000.000		367.996.820.000
173	Kab. Garut		358.003.872.000	7.500.000.000		365.503.872.000		357.737.862.800	7.500.000.000		365.237.862.800
174	Kab. Indramayu		287.773.197.000	7.500.000.000		295.273.197.000		287.773.197.000	7.500.000.000		295.273.197.000
175	Kab. Karawang		255.530.027.000	53.444.647.000		308.974.674.000		254.981.617.000	53.444.647.000		308.426.264.000
176	Kab. Kuningan		287.105.211.000	7.500.000.000		294.605.211.000		287.105.211.000	7.500.000.000		294.605.211.000
177	Kab. Majalengka		267.115.191.000	52.928.698.000		320.043.889.000		267.115.191.000	52.928.698.000		320.040.539.000
178	Kab. Pangandaran		78.242.441.000		-	78.242.441.000		78.242.441.000		-	78.242.441.000
179	Kab. Purwakarta		148.631.839.000	7.500.000.000		156.131.839.000		148.631.839.000	7.500.000.000		156.131.839.000
180	Kab. Subang		209.208.368.000		-	209.208.368.000		209.208.368.000		-	209.208.368.000
181	Kab. Sukabumi		326.310.396.000	7.500.000.000		333.810.396.000		326.248.508.031	7.500.000.000		333.748.508.031
182	Kab. Sumedang		217.268.983.000		-	217.268.983.000		217.268.983.000		-	217.268.983.000
183	Kab. Tasikmalaya		290.146.517.000	7.500.000.000		297.646.517.000		290.146.517.000	7.500.000.000		297.646.517.000
184	Kab. Bandung Barat		152.336.279.000	43.201.308.000		195.537.587.000		152.336.279.000	43.201.308.000		195.537.587.000
185	Kota Bandung		-		-	-		-		-	-
186	Kota Bekasi		-	52.941.282.000		52.941.282.000		-	52.941.282.000		52.941.282.000
187	Kota Bogor		-		-	-		-		-	-
188	Kota Cirebon		-		-	-		-		-	-
189	Kota Depok		-	7.500.000.000		7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
190	Kota Sukabumi		-	7.500.000.000		7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
191	Kota Cimahi		-	55.382.603.000		55.382.603.000		-	55.382.603.000		55.382.603.000
192	Kota Tasikmalaya		-	44.698.819.000		44.698.819.000		-	44.698.819.000		44.698.819.000
193	Kota Banjar		16.396.427.000	7.500.000.000		23.896.427.000		16.396.425.773	7.500.000.000		23.896.425.773
194	Provinsi Banten				-	-				-	-
195	Kab. Lebak		274.521.587.000	7.500.000.000		282.021.587.000		274.521.585.700	7.500.000.000		282.021.585.700
196	Kab. Pandeglang		262.147.548.000		-	262.147.548.000		262.147.548.000		-	262.147.548.000
197	Kab. Serang		257.168.094.000	7.500.000.000		264.668.094.000		256.262.680.475	7.500.000.000		263.762.680.475
198	Kab. Tangerang		215.671.732.000	7.500.000.000		223.171.732.000		215.671.732.000	7.500.000.000		223.171.732.000
199	Kota Cilegon		-	7.500.000.000		7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
200	Kota Tangerang		-	50.600.635.000		50.600.635.000		-	50.600.635.000		50.600.635.000
201	Kota Serang		-		-	-		-		-	-
202	Kota Tangerang Selatan		-		-	-		-		-	-
203	Provinsi Jawa Tengah			50.197.943.000		50.197.943.000				50.197.943.000	50.197.943.000
204	Kab. Banjarnegara		214.470.940.000	53.721.498.000		268.192.438.000		214.470.940.000	53.721.498.000		268.192.438.000
205	Kab. Banyumas		265.734.553.000	53.859.923.000		309.594.476.000		265.734.553.000	53.859.923.000		309.594.476.000
206	Kab. Batang		190.962.224.000	44.824.660.000		235.786.884.000		190.962.224.000	44.824.660.000		235.786.884.000
207	Kab. Blora		214.102.024.000	7.500.000.000		221.602.024.000		214.102.024.000	7.500.000.000		221.602.024.000
208	Kab. Boyolali		207.823.645.000	54.099.022.000		261.922.667.000		207.823.645.000	54.099.022.000		261.922.667.000
209	Kab. Brebes		270.922.338.000	42.559.517.000		313.481.855.000		270.922.338.000	42.559.517.000		313.481.855.000
210	Kab. Cilacap		232.084.054.000	44.535.225.000		276.619.279.000		232.084.054.000	44.535.225.000		276.619.279.000
211	Kab. Demak		211.595.493.000		-	211.595.493.000		211.595.493.000		-	211.595.493.000
212	Kab. Grobogan		229.625.434.000	7.500.000.000		237.125.434.000		229.625.434.000	7.500.000.000		237.125.434.000
213	Kab. Jepara		158.765.096.000	53.834.755.000		212.599.851.000		158.765.096.000	53.834.755.000		212.599.851.000
214	Kab. Karanganyar		133.065.748.000	54.841.485.000		187.907.233.000		133.065.748.000	54.841.485.000		187.907.233.000
215	Kab. Kebumen		359.998.061.000	51.141.752.000		411.139.813.000		359.739.251.800	51.141.752.000		410.881.003.800
216	Kab. Kendal		212.767.778.000		-	212.767.017.465		212.767.017.465		-	212.767.017.465
217	Kab. Klaten		311.087.447.000	55.646.870.000		366.734.317.000		311.087.446.200	55.646.870.000		366.734.316.200
218	Kab. Kudus		103.687.281.000	7.500.000.000		111.187.281.000		103.687.281.000	7.500.000.000		111.187.281.000
219	Kab. Magelang		289.613.899.000	44.220.622.000		333.834.521.000		289.613.899.000	44.220.622.000		333.834.521.000
220	Kab. Pati		317.453.410.000	53.948.012.000		371.401.422.000		317.453.410.000	53.948.012.000		371.401.422.000
221	Kab. Pekalongan		222.535.590.000	7.500.000.000		230.035.590.000		222.535.590.000	7.500.000.000		230.035.590.000
222	Kab. Pemalang		191.002.083.000		-	191.002.083.000		191.002.083.000		-	191.002.083.000
223	Kab. Purbalingga		191.224.910.000		-	191.224.910.000		191.224.910.000		-	191.224.910.000
224	Kab. Purworejo		355.968.664.000	52.286.908.000		408.255.572.000		355.968.663.000	52.286.908.000		408.255.571.000
225	Kab. Rembang		228.013.715.000		-	228.013.715.000		228.013.715.000		-	228.013.715.000
226	Kab. Semarang		165.688.573.000	7.500.000.000		173.188.573.000		165.688.573.000	7.500.000.000		173.188.573.000
227	Kab. Sragen		160.952.196.000		-	160.952.196.000		160.952.188.596		-	160.952.188.596
228	Kab. Sukoharjo		123.576.433.000	55.344.850.000		178.921.283.000		123.576.433.000	55.344.850.000		178.921.283.000
229	Kab. Tegal		234.026.299.000		-	234.026.299.000		234.026.299.000		-	234.026.299.000
230	Kab. Temanggung		207.451.723.000	50.197.943.000		257.649.666.000		207.451.723.000	50.197.943.000		257.649.666.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
231	Kab. Wonogiri	-	198.745.821.000	-	51.859.047.000	250.604.868.000	-	198.745.821.000	-	51.859.047.000	250.604.868.000
232	Kab. Wonosobo	-	191.496.626.000	-	45.730.717.000	237.227.343.000	-	191.496.626.000	-	45.730.717.000	237.227.343.000
233	Kota Magelang	-	-	-	47.039.466.000	47.039.466.000	-	-	-	47.039.466.000	47.039.466.000
234	Kota Pekalongan	-	-	-	50.613.219.000	50.613.219.000	-	-	-	50.613.219.000	50.613.219.000
235	Kota Salatiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	Kota Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Kota Surakarta	-	-	-	51.871.631.000	51.871.631.000	-	-	-	51.871.631.000	51.871.631.000
238	Kota Tegal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Provinsi DI Yogyakarta	-	-	800.000.000.000	53.998.349.000	853.998.349.000	-	-	800.000.000.000	53.998.349.000	853.998.349.000
240	Kab. Bantul	-	77.730.491.000	-	53.960.596.000	131.691.087.000	-	77.730.491.000	-	53.960.596.000	131.691.087.000
241	Kab. Gunung Kidul	-	132.353.781.000	-	51.884.216.000	184.237.997.000	-	132.353.781.000	-	51.884.216.000	184.237.997.000
242	Kab. Kulon Progo	-	77.627.477.000	-	50.890.070.000	128.517.547.000	-	77.627.477.000	-	50.890.070.000	128.517.547.000
243	Kab. Sleman	-	80.855.810.000	-	52.588.927.000	133.444.737.000	-	80.855.810.000	-	52.588.927.000	133.444.737.000
244	Kota Yogyakarta	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000
245	Provinsi Jawa Timur	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000
246	Kab. Bangkalan	-	226.569.736.000	-	44.296.127.000	270.865.863.000	-	226.569.736.000	-	44.296.127.000	270.865.863.000
247	Kab. Banyuwangi	-	172.183.366.000	-	7.500.000.000	179.683.366.000	-	172.183.366.000	-	7.500.000.000	179.683.366.000
248	Kab. Blitar	-	178.027.258.000	-	43.150.971.000	221.178.229.000	-	178.027.258.000	-	43.150.971.000	221.178.229.000
249	Kab. Bojonegoro	-	332.980.300.000	-	7.500.000.000	340.480.300.000	-	332.980.300.000	-	7.500.000.000	340.480.300.000
250	Kab. Bondowoso	-	173.908.433.000	-	173.908.433.000	173.908.433.000	-	173.908.433.000	-	173.908.433.000	173.908.433.000
251	Kab. Gresik	-	262.070.980.000	-	52.035.225.000	314.106.205.000	-	262.070.980.000	-	52.035.225.000	314.106.205.000
252	Kab. Jember	-	205.006.634.000	-	7.500.000.000	212.506.634.000	-	204.705.147.544	-	7.500.000.000	212.205.147.544
253	Kab. Jombang	-	244.245.613.000	-	51.330.514.000	295.576.127.000	-	244.245.612.855	-	51.330.514.000	295.576.126.855
254	Kab. Kediri	-	278.633.039.000	-	-	278.633.039.000	-	278.633.039.000	-	-	278.633.039.000
255	Kab. Lamongan	-	363.423.524.000	-	-	363.423.524.000	-	363.423.524.000	-	-	363.423.524.000
256	Kab. Lumajang	-	165.136.155.000	-	7.500.000.000	172.636.155.000	-	165.136.155.000	-	7.500.000.000	172.636.155.000
257	Kab. Madiun	-	158.196.624.000	-	51.217.257.000	209.413.881.000	-	158.196.526.000	-	51.217.257.000	209.413.783.000
258	Kab. Magetan	-	162.234.334.000	-	7.500.000.000	169.734.334.000	-	162.234.334.000	-	7.500.000.000	169.734.334.000
259	Kab. Malang	-	312.979.737.000	-	7.500.000.000	320.479.737.000	-	312.979.737.000	-	7.500.000.000	320.479.737.000
260	Kab. Mojokerto	-	236.465.127.000	-	7.500.000.000	243.965.127.000	-	234.108.329.400	-	7.500.000.000	241.608.329.400
261	Kab. Nganjuk	-	215.210.307.000	-	-	215.210.307.000	-	215.210.307.000	-	-	215.210.307.000
262	Kab. Ngawi	-	177.370.619.000	-	7.500.000.000	184.870.619.000	-	177.370.619.000	-	7.500.000.000	184.870.619.000
263	Kab. Pacitan	-	134.532.774.000	-	51.494.108.000	186.026.882.000	-	134.532.774.000	-	51.494.108.000	186.026.882.000
264	Kab. Pamekasan	-	154.653.592.000	-	7.500.000.000	162.153.592.000	-	153.983.324.376	-	7.500.000.000	161.483.324.376
265	Kab. Pasuruan	-	275.500.861.000	-	7.500.000.000	283.000.861.000	-	275.262.239.000	-	7.500.000.000	282.762.239.000
266	Kab. Ponorogo	-	225.521.779.000	-	7.500.000.000	233.021.779.000	-	225.521.779.000	-	7.500.000.000	233.021.779.000
267	Kab. Probolinggo	-	271.486.142.000	-	7.500.000.000	278.986.142.000	-	271.486.142.000	-	7.500.000.000	278.986.142.000
268	Kab. Sampang	-	167.492.597.000	-	-	167.492.597.000	-	167.492.597.000	-	-	167.492.597.000
269	Kab. Sidoarjo	-	269.430.612.000	-	7.500.000.000	269.430.612.000	-	260.720.391.016	-	7.500.000.000	268.220.391.016
270	Kab. Situbondo	-	111.434.587.000	-	-	111.434.587.000	-	111.434.587.000	-	-	111.434.587.000
271	Kab. Sumenep	-	271.773.005.000	-	-	271.773.005.000	-	271.522.438.855	-	-	271.522.438.855
272	Kab. Trenggalek	-	126.272.713.000	-	43.692.089.000	169.964.802.000	-	126.272.713.000	-	43.692.089.000	169.964.802.000
273	Kab. Tuban	-	252.388.557.000	-	49.933.676.000	302.322.233.000	-	252.388.557.000	-	49.933.676.000	302.322.233.000
274	Kab. Tulungagung	-	203.074.565.000	-	50.235.695.000	253.310.260.000	-	203.074.565.000	-	50.235.695.000	253.310.260.000
275	Kota Blitar	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000
276	Kota Kediri	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000
277	Kota Madiun	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000
278	Kota Malang	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000
279	Kota Mojokerto	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000
280	Kota Pasuruan	-	-	-	44.572.977.000	44.572.977.000	-	-	-	44.572.977.000	44.572.977.000
281	Kota Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Kota Surabaya	-	-	-	50.021.765.000	50.021.765.000	-	-	-	50.021.765.000	50.021.765.000
283	Kota Batu	-	18.852.611.000	-	7.500.000.000	26.352.611.000	-	18.852.611.000	-	7.500.000.000	26.352.611.000
284	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000
285	Kab. Bengkayang	-	96.738.761.000	-	-	96.738.761.000	-	96.738.761.000	-	-	96.738.761.000
286	Kab. Landak	-	128.080.279.000	-	7.500.000.000	135.580.279.000	-	128.080.279.000	-	7.500.000.000	135.580.279.000
287	Kab. Kapuas Hulu	-	218.405.978.000	-	-	218.405.978.000	-	218.405.978.000	-	-	218.405.978.000
288	Kab. Ketapang	-	203.513.692.000	-	7.500.000.000	211.013.692.000	-	202.880.549.397	-	7.500.000.000	210.380.549.397
289	Kab. Mempawah	-	51.323.606.000	-	-	51.323.606.000	-	51.323.606.000	-	-	51.323.606.000
290	Kab. Sambas	-	153.419.765.000	-	-	153.419.765.000	-	153.185.794.101	-	-	153.185.794.101
291	Kab. Sanggau	-	130.042.037.000	-	7.500.000.000	137.542.037.000	-	130.042.037.000	-	7.500.000.000	137.542.037.000
292	Kab. Sintang	-	294.276.823.000	-	7.500.000.000	301.776.823.000	-	294.276.823.000	-	7.500.000.000	301.776.823.000
293	Kota Pontianak	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000
294	Kota Singkawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Kab. Kayong Utara	-	38.665.294.000	-	-	38.665.294.000	-	38.665.294.000	-	-	38.665.294.000
296	Kab. Kubu Raya	-	98.330.389.000	-	7.500.000.000	105.830.389.000	-	98.330.389.000	-	7.500.000.000	105.830.389.000
297	Kab. Sekadau	-	71.020.784.000	-	7.500.000.000	78.520.784.000	-	71.020.784.000	-	7.500.000.000	78.520.784.000
298	Kab. Melawi	-	132.907.851.000	-	-	132.907.851.000	-	132.907.851.000	-	-	132.907.851.000
299	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000	-	-	-	7.500.000.000	7.500.000.000
300	Kab. Barito Selatan	-	69.302.851.000	-	-	69.302.851.000	-	69.302.851.000	-	-	69.302.851.000
301	Kab. Barito Utara	-	74.042.909.000	-	7.500.000.000	81.542.909.000	-	74.042.909.000	-	7.500.000.000	81.542.909.000
302	Kab. Kapuas	-	166.874.003.000	-	-	166.874.003.000	-	165.804.640.000	-	-	165.804.640.000
303	Kab. Kotawaringin Barat	-	66.735.731.000	-	54.627.555.000	121.363.286.000	-	66.116.517.600	-	54.627.555.000	120.744.072.600
304	Kab. Kotawaringin Timur	-	133.804.488.000	-	7.500.000.000	141.304.488.000	-	133.804.488.000	-	7.500.000.000	141.304.488.000
305	Kota Palangkaraya	-	-	-	44.145.117.000	44.145.117.000	-	-	-	44.145.117.000	44.145.117.000
306	Kab. Barito Timur	-	78.860.126.000	-	-	78.860.126.000	-	77.451.510.000	-	-	77.451.510.000
307	Kab. Murung Raya	-	95.929.093.000	-	7.500.000.000	103.429.093.000	-	95.929.093.000	-	7.500.000.000	103.429.093.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi					
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
308	Kab. Pulang Pisau		76.714.521.000		126.648.197.000		76.714.521.000		49.933.676.000		126.648.197.000
309	Kab. Gunung Mas		90.648.284.000		-	90.648.284.000		89.682.366.000		-	89.682.366.000
310	Kab. Lamandau		67.601.069.000		7.500.000.000	75.101.069.000		67.601.068.997		7.500.000.000	75.101.068.997
311	Kab. Sukamara		26.368.843.000		7.500.000.000	33.868.843.000		26.368.843.000		7.500.000.000	33.868.843.000
312	Kab. Katingan		121.733.212.000		7.500.000.000	129.233.212.000		121.732.941.200		7.500.000.000	129.232.941.200
313	Kab. Seruyan		80.289.799.000		7.500.000.000	87.789.799.000		80.001.404.211		7.500.000.000	87.501.404.211
314	Provinsi Kalimantan Selatan				7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
315	Kab. Banjar		209.154.295.000		7.500.000.000	216.654.295.000		209.154.295.000		7.500.000.000	216.654.295.000
316	Kab. Barito Kuala		148.716.254.000		7.500.000.000	156.216.254.000		148.716.254.000		7.500.000.000	156.216.254.000
317	Kab. Hulu Sungai Selatan		111.323.973.000		7.500.000.000	118.823.973.000		111.087.811.000		7.500.000.000	118.587.811.000
318	Kab. Hulu Sungai Tengah		123.375.091.000		53.985.765.000	177.360.856.000		123.375.091.000		53.985.765.000	177.360.856.000
319	Kab. Hulu Sungai Utara		161.620.614.000		7.500.000.000	169.120.614.000		161.380.659.400		7.500.000.000	168.880.659.400
320	Kab. Kotabaru		152.814.870.000		7.500.000.000	160.314.870.000		152.577.727.200		7.500.000.000	160.077.727.200
321	Kab. Tabalong		94.554.074.000		7.500.000.000	102.054.074.000		94.554.074.000		7.500.000.000	102.054.074.000
322	Kab. Tanah Laut		101.842.951.000		51.368.266.000	153.211.217.000		101.842.951.000		51.368.266.000	153.211.217.000
323	Kab. Tapin		96.938.641.000		7.500.000.000	104.438.641.000		96.938.641.000		7.500.000.000	104.438.641.000
324	Kota Banjarbaru		-		54.438.793.000	54.438.793.000		-		54.438.793.000	54.438.793.000
325	Kota Banjarmasin		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
326	Kab. Balangan		116.949.127.000		7.500.000.000	124.449.127.000		116.477.454.200		7.500.000.000	123.977.454.200
327	Kab. Tanah Bumbu		113.085.522.000		49.946.260.000	163.031.782.000		111.782.019.198		49.946.260.000	161.728.279.198
328	Provinsi Kalimantan Timur				7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
329	Kab. Berau		84.106.487.000		53.041.955.000	137.148.442.000		83.206.738.000		53.041.955.000	136.248.693.000
330	Kab. Kutai Kartanegara		154.651.907.000		7.500.000.000	162.151.907.000		154.151.629.800		7.500.000.000	161.651.629.800
331	Kab. Kutai Barat		149.709.702.000		7.500.000.000	157.209.702.000		149.709.702.000		7.500.000.000	157.209.702.000
332	Kab. Kutai Timur		119.762.483.000		7.500.000.000	127.262.483.000		117.335.537.581		7.500.000.000	124.835.537.581
333	Kab. Mahakam Ulu		46.407.899.000		-	46.407.899.000		46.407.897.200		-	46.407.897.200
334	Kab. Paser		110.045.744.000		7.500.000.000	117.545.744.000		110.045.744.000		7.500.000.000	117.545.744.000
335	Kota Balikpapan		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
336	Kota Bontang		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
337	Kota Samarinda		-		-	-		-		-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara		27.736.025.000		43.515.911.000	71.251.936.000		27.736.025.000		43.515.911.000	71.251.936.000
339	Provinsi Kalimantan Utara				7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
340	Kab. Bulungan		63.362.696.000		-	63.362.696.000		63.362.696.000		-	63.362.696.000
341	Kab. Malinau		97.801.627.000		7.500.000.000	105.301.627.000		97.801.627.000		7.500.000.000	105.301.627.000
342	Kab. Nunukan		177.937.816.000		7.500.000.000	185.437.816.000		177.937.815.000		7.500.000.000	185.437.815.000
343	Kab. Tana Tidung		30.836.210.000		-	30.836.210.000		30.326.270.591		-	30.326.270.591
344	Kota Tarakan		-		-	-		-		-	-
345	Provinsi Sulawesi Utara				50.839.733.000	50.839.733.000		-		50.839.733.000	50.839.733.000
346	Kab. Bolaang Mongondow		152.557.555.000		43.364.901.000	195.922.456.000		152.557.519.442		43.364.901.000	195.922.420.442
347	Kab. Minahasa		171.641.516.000		49.984.012.000	221.625.528.000		171.641.516.000		49.984.012.000	221.625.528.000
348	Kab. Sangihe		110.772.908.000		7.500.000.000	118.272.908.000		110.772.908.000		7.500.000.000	118.272.908.000
349	Kota Bitung		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
350	Kota Manado		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
351	Kab. Kepulauan Talaud		108.553.201.000		-	108.553.201.000		108.553.201.000		-	108.553.201.000
352	Kab. Minahasa Selatan		127.642.435.000		-	127.642.435.000		127.616.035.000		-	127.616.035.000
353	Kab. Minahasa Tenggara		103.278.154.000		7.500.000.000	110.778.154.000		103.278.154.000		7.500.000.000	110.778.154.000
354	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro		64.754.298.000		7.500.000.000	72.254.298.000		64.754.298.000		7.500.000.000	72.254.298.000
355	Kota Kotamobagu		15.171.482.000		50.726.476.000	65.897.958.000		15.171.482.000		50.726.476.000	65.897.958.000
356	Kab. Bolaang Mongondow Timur		63.422.501.000		7.500.000.000	70.922.501.000		62.042.183.422		7.500.000.000	69.542.183.422
357	Kab. Bolaang Mongondow Selatan		64.128.797.000		7.500.000.000	71.628.797.000		64.128.797.000		7.500.000.000	71.628.797.000
358	Kota Tomohon		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
359	Kab. Minahasa Utara		97.574.406.000		7.500.000.000	105.074.406.000		96.853.962.000		7.500.000.000	104.353.962.000
360	Kab. Bolaang Mongondow Utara		81.861.619.000		-	81.861.619.000		81.861.619.000		-	81.861.619.000
361	Provinsi Gorontalo				7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
362	Kab. Boalemo		66.188.198.000		7.500.000.000	73.688.198.000		65.560.780.000		7.500.000.000	73.060.780.000
363	Kab. Gorontalo		149.872.168.000		7.500.000.000	157.372.168.000		149.872.168.000		7.500.000.000	157.372.168.000
364	Kota Gorontalo		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
365	Kab. Pohuwato		80.266.521.000		7.500.000.000	87.766.521.000		80.266.521.000		7.500.000.000	87.766.521.000
366	Kab. Gorontalo Utara		95.296.733.000		7.500.000.000	102.796.733.000		95.296.733.000		7.500.000.000	102.796.733.000
367	Kab. Bone Bolango		122.334.503.000		7.500.000.000	129.834.503.000		121.143.068.000		7.500.000.000	128.643.068.000
368	Provinsi Sulawesi Tengah				7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
369	Kab. Banggai		220.357.540.000		-	220.357.540.000		220.357.540.000		-	220.357.540.000
370	Kab. Banggai Laut		50.423.497.000		-	50.423.497.000		48.287.506.400		-	48.287.506.400
371	Kab. Banggai Kepulauan		108.556.288.000		-	108.556.288.000		108.556.288.000		-	108.556.288.000
372	Kab. Buol		85.221.758.000		-	85.221.758.000		85.221.739.925		-	85.221.739.925
373	Kab. Toli-toli		82.915.661.000		-	82.915.661.000		81.668.363.337		-	81.668.363.337
374	Kab. Donggala		124.461.983.000		7.500.000.000	131.961.983.000		124.217.943.784		7.500.000.000	131.717.943.784
375	Kab. Morowali		97.226.987.000		65.336.647.000	162.563.634.000		97.226.987.000		65.336.647.000	162.563.634.000
376	Kab. Morowali Utara		96.702.534.000		-	96.702.534.000		96.457.219.191		-	96.457.219.191
377	Kab. Poso		111.476.286.000		-	111.476.286.000		111.476.286.000		-	111.476.286.000
378	Kota Palu		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
379	Kab. Parigi Moutong		215.439.871.000		-	215.439.871.000		215.439.870.587		-	215.439.870.587
380	Kab. Sigi		135.789.827.000		-	135.789.827.000		135.789.827.000		-	135.789.827.000
381	Kab. Tojo Una Una		105.253.787.000		7.500.000.000	112.753.787.000		105.253.787.000		7.500.000.000	112.753.787.000
382	Provinsi Sulawesi Selatan				7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
383	Kab. Bantaeng		38.832.355.000		7.500.000.000	46.332.355.000		38.832.355.000		7.500.000.000	46.332.355.000
384	Kab. Barru		34.627.514.000		-	34.627.514.000		34.627.513.000		-	34.627.513.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
385	Kab. Bone		255.911.673.000		51.028.495.000	306.940.168.000		255.671.695.800		51.028.495.000	306.700.190.600
386	Kab. Bulukumba		86.988.704.000		7.500.000.000	94.488.704.000		86.988.702.000		7.500.000.000	94.488.702.000
387	Kab. Enrekang		89.128.443.000		-	89.128.443.000		89.128.442.000		-	89.128.442.000
388	Kab. Gowa		100.250.326.000		-	100.250.326.000		99.632.871.692		-	99.632.871.692
389	Kab. Jeneponto		70.517.527.000		-	70.517.527.000		70.517.527.000		-	70.517.527.000
390	Kab. Luwu		162.238.175.000		7.500.000.000	169.738.175.000		162.238.175.000	7.500.000.000		169.738.175.000
391	Kab. Luwu Utara		132.520.096.000		7.500.000.000	140.020.096.000		132.520.096.000	7.500.000.000		140.020.096.000
392	Kab. Maros		67.073.813.000		7.500.000.000	74.573.813.000		67.073.813.000	7.500.000.000		74.573.813.000
393	Kab. Pangkajene Kepulauan		55.879.672.000		7.500.000.000	63.379.672.000		55.585.494.357	7.500.000.000		63.085.494.357
394	Kab. Pinrang		56.907.593.000		7.500.000.000	64.407.593.000		56.907.592.000	7.500.000.000		64.407.592.000
395	Kab. Kepulauan Selayar		64.708.384.000		-	64.708.384.000		64.709.384.000		-	64.709.384.000
396	Kab. Sidenreng Rappang		55.100.580.000		43.301.981.000	98.402.561.000		55.100.580.000	43.301.981.000		98.402.561.000
397	Kab. Sinjai		55.525.848.000		-	55.525.848.000		55.525.848.000		-	55.525.848.000
398	Kab. Soppeng		41.962.571.000		7.500.000.000	49.462.571.000		41.962.570.600	7.500.000.000		49.462.570.600
399	Kab. Takalar		62.964.264.000		-	62.964.264.000		62.964.264.000		-	62.964.264.000
400	Kab. Tana Toraja		90.547.246.000		-	90.547.246.000		89.826.804.000		-	89.826.804.000
401	Kab. Wajo		111.165.441.000		7.500.000.000	118.665.441.000		111.165.440.600	7.500.000.000		118.665.440.600
402	Kota Pare-pare		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
403	Kab. Toraja Utara		88.526.067.000		7.500.000.000	96.026.067.000		88.526.067.000	7.500.000.000		96.026.067.000
404	Kota Makassar		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
405	Kota Palopo		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
406	Kab. Luwu Timur		99.140.948.000		7.500.000.000	106.640.948.000		99.140.948.000	7.500.000.000		106.640.948.000
407	Provinsi Sulawesi Barat		-		-	-		-		-	-
408	Kab. Majene		50.431.060.000		7.500.000.000	57.931.060.000		50.431.060.000	7.500.000.000		57.931.060.000
409	Kab. Mamuju		50.286.031.000		7.500.000.000	57.786.031.000		50.286.031.000	7.500.000.000		57.786.031.000
410	Kab. Mamuju Tengah		45.125.660.000		7.500.000.000	52.625.660.000		45.125.660.000	7.500.000.000		52.625.660.000
411	Kab. Polewali Mandar		116.288.118.000		-	116.288.118.000		116.288.118.000		-	116.288.118.000
412	Kab. Mamasa		128.900.175.000		49.984.012.000	178.884.187.000		128.900.175.000	49.984.012.000		178.884.187.000
413	Kab. Mamuju Utara		50.902.654.000		48.496.075.000	99.398.729.000		50.902.654.000	48.496.075.000		99.398.729.000
414	Provinsi Sulawesi Tenggara		52.551.174.000		52.551.174.000	105.102.348.000		52.551.174.000	52.551.174.000		105.102.348.000
415	Kab. Buton		65.701.028.000		7.500.000.000	73.201.028.000		65.701.028.000	7.500.000.000		73.201.028.000
416	Kab. Konawe		221.988.755.000		52.010.057.000	273.998.812.000		221.411.805.000	52.010.057.000		273.421.862.000
417	Kab. Konawe Kepulauan		69.729.017.000		-	69.729.017.000		68.422.831.200		-	68.422.831.200
418	Kab. Kolaka		78.405.600.000		-	78.405.600.000		78.405.600.000		-	78.405.600.000
419	Kab. Kolaka Timur		91.021.036.000		-	91.021.036.000		91.021.036.000		-	91.021.036.000
420	Kab. Muna		97.780.706.000		-	97.780.706.000		97.060.264.600		-	97.060.264.600
421	Kota Kendari		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
422	Kota Bau-bau		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
423	Kab. Konawe Selatan		252.332.522.000		-	252.332.522.000		249.504.321.200		-	249.504.321.200
424	Kab. Bombana		94.275.863.000		7.500.000.000	101.775.863.000		94.275.861.800	7.500.000.000		101.775.861.800
425	Kab. Konawe Utara		120.821.635.000		-	120.821.635.000		120.821.635.000		-	120.821.635.000
426	Kab. Buton Utara		62.169.983.000		-	62.169.983.000		62.169.983.000		-	62.169.983.000
427	Kab. Wakatobi		60.664.843.000		7.500.000.000	68.164.843.000		59.223.956.000	7.500.000.000		66.723.956.000
428	Kab. Kolaka Utara		99.152.097.000		7.500.000.000	106.652.097.000		99.152.097.000	7.500.000.000		106.652.097.000
429	Kab. Muna Barat		64.443.513.000		-	64.443.513.000		64.443.513.000		-	64.443.513.000
430	Kab. Buton Tengah		54.026.082.000		-	54.026.082.000		54.026.082.000		-	54.026.082.000
431	Kab. Buton Selatan		49.520.092.000		-	49.520.092.000		49.520.092.000		-	49.520.092.000
432	Provinsi Bali		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
433	Kab. Badung		40.315.619.000		7.500.000.000	47.815.619.000		40.315.619.000	7.500.000.000		47.815.619.000
434	Kab. Bangli		55.783.753.000		-	55.783.753.000		55.783.708.000		-	55.783.708.000
435	Kab. Buleleng		105.860.971.000		55.332.266.000	161.193.237.000		105.860.971.000	55.332.266.000		161.193.237.000
436	Kab. Gianyar		55.753.828.000		7.500.000.000	63.253.828.000		55.753.828.000	7.500.000.000		63.253.828.000
437	Kab. Jembrana		36.475.585.000		7.500.000.000	43.975.585.000		36.475.585.000	7.500.000.000		43.975.585.000
438	Kab. Karangasem		63.862.742.000		7.500.000.000	71.362.742.000		63.862.742.000	7.500.000.000		71.362.742.000
439	Kab. Klungkung		44.540.097.000		51.343.098.000	95.883.195.000		44.540.097.000	51.343.098.000		95.883.195.000
440	Kab. Tabanan		106.417.874.000		7.500.000.000	113.917.874.000		106.417.874.000	7.500.000.000		113.917.874.000
441	Kota Denpasar		28.428.056.000		7.500.000.000	35.928.056.000		28.428.056.000	7.500.000.000		35.928.056.000
442	Provinsi Nusa Tenggara Barat		53.394.311.000		53.394.311.000	106.788.622.000		53.394.311.000	53.394.311.000		106.788.622.000
443	Kab. Bima		155.258.138.000		7.500.000.000	162.758.138.000		155.258.138.000	7.500.000.000		162.758.138.000
444	Kab. Dompu		61.166.021.000		7.500.000.000	68.666.021.000		61.166.021.000	7.500.000.000		68.666.021.000
445	Kab. Lombok Barat		108.749.278.000		53.822.171.000	162.571.449.000		108.749.278.000	53.822.171.000		162.571.449.000
446	Kab. Lombok Tengah		118.597.175.000		7.500.000.000	126.097.175.000		118.597.175.000	7.500.000.000		126.097.175.000
447	Kab. Lombok Timur		209.356.120.000		43.251.644.000	252.607.764.000		209.265.216.028	43.251.644.000		252.516.860.028
448	Kab. Sumbawa		128.333.647.000		7.500.000.000	135.833.647.000		128.068.879.600	7.500.000.000		135.568.879.600
449	Kota Mataram		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
450	Kab. Lombok Utara		34.848.033.000		51.192.089.000	86.040.122.000		34.848.028.500	51.192.089.000		86.040.117.500
451	Kota Bima		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
452	Kab. Sumbawa Barat		47.703.654.000		7.500.000.000	55.203.654.000		47.703.654.000	7.500.000.000		55.203.654.000
453	Provinsi Nusa Tenggara Timur		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-	7.500.000.000		7.500.000.000
454	Kab. Alor		122.521.750.000		-	122.521.750.000		122.521.750.000		-	122.521.750.000
455	Kab. Belu		56.138.712.000		-	56.138.712.000		56.138.672.200		-	56.138.672.200
456	Kab. Ende		182.723.464.000		-	182.723.464.000		188.626.031.399		-	188.626.031.399
457	Kab. Flores Timur		217.327.230.000		43.843.098.000	261.170.328.000		217.327.230.000	43.843.098.000		261.170.328.000
458	Kab. Kupang		128.306.880.000		-	128.306.880.000		128.306.880.000		-	128.306.880.000
459	Kab. Lembata		110.907.914.000		-	110.907.914.000		110.660.822.300		-	110.660.822.300
460	Kab. Malaka		99.246.629.000		-	99.246.629.000		99.033.369.408		-	99.033.369.408
461	Kab. Manggarai		116.291.529.000		-	116.291.529.000		116.291.529.000		-	116.291.529.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu					Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Dana Insentif Daerah	Jumlah Realisasi
462	Kab. Ngada		103.592.403.000		-	103.592.403.000		103.592.403.000		-	103.592.403.000
463	Kab. Sikka		116.353.321.000		-	116.353.321.000		116.353.321.000		-	116.353.321.000
464	Kab. Sumba Barat		53.562.395.000		-	53.562.395.000		53.562.395.000		-	53.562.395.000
465	Kab. Sumba Timur		112.115.303.000		7.500.000.000	119.635.438.000		112.115.303.000		7.500.000.000	119.615.303.000
466	Kab. Timor Tengah Selatan		210.759.238.000		-	210.759.238.000		210.759.238.000		-	210.759.238.000
467	Kab. Timor Tengah Utara		123.029.768.000		-	123.029.768.000		123.013.463.807		-	123.013.463.807
468	Kota Kupang		-		42.496.597.000	42.496.597.000		-		42.496.597.000	42.496.597.000
469	Kab. Rote Ndao		66.765.336.000		-	66.765.336.000		66.765.336.000		-	66.765.336.000
470	Kab. Nagekeo		76.055.147.000		45.504.203.000	121.559.350.000		76.055.147.000		45.504.203.000	121.559.350.000
471	Kab. Sumba Tengah		53.994.179.000		-	53.994.179.000		53.994.179.000		-	53.994.179.000
472	Kab. Sumba Barat Daya		140.630.968.000		-	140.630.968.000		140.630.968.000		-	140.630.968.000
473	Kab. Manggarai Timur		126.092.079.000		-	126.092.079.000		126.092.079.000		-	126.092.079.000
474	Kab. Sabu Raijua		49.314.143.000		-	49.314.143.000		49.314.143.000		-	49.314.143.000
475	Kab. Manggarai Barat		128.604.797.000		45.491.619.000	174.096.416.000		128.604.797.000		45.491.619.000	174.096.416.000
476	Provinsi Maluku		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
477	Kab. Maluku Tenggara Barat		66.312.281.000		43.025.130.000	109.337.411.000		66.312.281.000		43.025.130.000	109.337.411.000
478	Kab. Maluku Tengah		148.929.560.000		7.500.000.000	156.429.560.000		147.275.822.128		7.500.000.000	154.775.822.128
479	Kab. Maluku Tenggara		146.019.403.000		51.670.285.000	197.689.688.000		146.019.403.000		51.670.285.000	197.689.688.000
480	Kab. Buru		67.524.009.000		7.500.000.000	75.024.009.000		67.524.009.000		7.500.000.000	75.024.009.000
481	Kota Ambon		28.484.161.000		42.408.511.000	70.892.672.000		17.090.496.000		42.408.511.000	59.499.007.000
482	Kab. Seram Bagian Barat		76.287.947.000		-	76.287.947.000		76.287.947.000		-	76.287.947.000
483	Kab. Seram Bagian Timur		151.736.019.000		46.649.358.000	198.385.377.000		151.485.419.400		46.649.358.000	198.144.777.400
484	Kab. Maluku Barat Daya		93.305.107.000		44.472.304.000	137.777.411.000		93.305.107.000		44.472.304.000	137.777.411.000
485	Kab. Buru Selatan		64.072.681.000		-	64.072.681.000		62.159.535.867		-	62.159.535.867
486	Kab. Kepulauan Aru		93.057.704.000		-	93.057.704.000		93.057.701.700		-	93.057.701.700
487	Kota Tual		25.873.916.000		44.296.127.000	70.170.043.000		25.873.916.000		44.296.127.000	70.170.043.000
488	Provinsi Maluku Utara		-		-	-		-		-	-
489	Kab. Halmahera Tengah		50.831.218.000		-	50.831.218.000		50.831.207.000		-	50.831.207.000
490	Kab. Halmahera Barat		129.912.794.000		-	129.912.794.000		129.912.793.400		-	129.912.793.400
491	Kota Ternate		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
492	Kab. Halmahera Timur		81.953.320.000		-	81.953.320.000		81.953.145.000		-	81.953.145.000
493	Kota Tidore Kepulauan		40.994.505.000		7.500.000.000	48.494.505.000		40.994.505.000		7.500.000.000	48.494.505.000
494	Kab. Kepulauan Sula		63.209.108.000		-	63.209.108.000		63.209.108.000		-	63.209.108.000
495	Kab. Pulau Morotai		69.402.830.000		44.623.314.000	114.026.144.000		69.402.830.000		44.623.314.000	114.026.144.000
496	Kab. Pulau Taliabu		57.141.029.000		-	57.141.029.000		57.141.029.000		-	57.141.029.000
497	Kab. Halmahera Selatan		188.920.306.000		51.217.257.000	240.137.563.000		188.920.306.000		51.217.257.000	240.137.563.000
498	Kab. Halmahera Utara		150.041.306.000		-	150.041.306.000		149.442.886.000		-	149.442.886.000
499	Provinsi Papua	8.205.152.407.000	-		-	8.205.152.407.000	8.205.152.407.000	-		-	8.205.152.407.000
500	Kab. Yalimo		230.607.728.000		-	230.607.728.000		230.607.728.000		-	230.607.728.000
501	Kab. Lanny Jaya		270.406.247.000		-	270.406.247.000		270.406.247.000		-	270.406.247.000
502	Kab. Biak Numfor		190.896.995.000		-	190.896.995.000		190.896.995.000		-	190.896.995.000
503	Kab. Jayapura		109.375.379.000		7.500.000.000	116.875.379.000		109.375.378.400		7.500.000.000	116.875.378.400
504	Kab. Jayawijaya		251.285.727.000		7.500.000.000	258.785.727.000		251.285.727.000		7.500.000.000	258.785.727.000
505	Kab. Merauke		150.950.492.000		-	150.950.492.000		90.570.295.000		-	90.570.295.000
506	Kab. Mimika		108.176.431.000		-	108.176.431.000		107.323.262.400		-	107.323.262.400
507	Kab. Nabire		61.575.843.000		-	61.575.843.000		61.575.843.000		-	61.575.843.000
508	Kab. Paniai		168.912.706.000		-	168.912.706.000		168.912.706.000		-	168.912.706.000
509	Kab. Puncak Jaya		236.772.314.000		-	236.772.314.000		236.772.314.000		-	236.772.314.000
510	Kab. Kepulauan Yapen		122.185.866.000		50.562.882.000	172.748.748.000		122.185.866.000		50.562.882.000	172.748.748.000
511	Kota Jayapura		15.895.838.000		7.500.000.000	23.395.838.000		15.895.837.800		7.500.000.000	23.395.837.800
512	Kab. Sami		76.458.068.000		-	76.458.068.000		75.800.254.189		-	75.800.254.189
513	Kab. Keerom		75.538.180.000		-	75.538.180.000		75.286.056.420		-	75.286.056.420
514	Kab. Yahukimo		384.055.245.000		-	384.055.245.000		384.055.245.000		-	384.055.245.000
515	Kab. Pegunungan Bintang		219.396.085.000		-	219.396.085.000		219.396.085.000		-	219.396.085.000
516	Kab. Tolikara		406.528.297.000		-	406.528.297.000		406.528.297.000		-	406.528.297.000
517	Kab. Boven Digoel		96.871.584.000		-	96.871.584.000		96.871.584.000		-	96.871.584.000
518	Kab. Mappi		132.036.307.000		-	132.036.307.000		132.036.307.000		-	132.036.307.000
519	Kab. Asmat		178.814.588.000		7.500.000.000	186.314.588.000		178.814.588.000		7.500.000.000	186.314.588.000
520	Kab. Waropen		81.865.746.000		-	81.865.746.000		81.865.746.000		-	81.865.746.000
521	Kab. Mamberamo Raya		64.890.988.000		-	64.890.988.000		56.146.463.800		-	56.146.463.800
522	Kab. Mamberamo Tengah		58.176.133.000		-	58.176.133.000		58.176.133.000		-	58.176.133.000
523	Kab. Nduga		192.816.158.000		-	192.816.158.000		192.816.158.000		-	192.816.158.000
524	Kab. Dogiyai		67.066.387.000		-	67.066.387.000		67.066.387.000		-	67.066.387.000
525	Kab. Intan Jaya		86.944.796.000		-	86.944.796.000		86.944.796.000		-	86.944.796.000
526	Kab. Puncak		168.803.408.000		-	168.803.408.000		168.803.408.000		-	168.803.408.000
527	Kab. Deiyai		57.781.248.000		-	57.781.248.000		57.781.248.000		-	57.781.248.000
528	Kab. Supiori		33.862.734.000		-	33.862.734.000		33.862.734.000		-	33.862.734.000
529	Provinsi Papua Barat	3.266.493.888.000	-		7.500.000.000	3.273.993.888.000	3.266.493.888.000	-		7.500.000.000	3.273.993.888.000
530	Kab. Sorong		172.569.955.000		7.500.000.000	180.069.955.000		172.569.955.000		7.500.000.000	180.069.955.000
531	Kab. Manokwari		127.407.488.000		-	127.407.488.000		127.216.804.504		-	127.216.804.504
532	Kab. Manokwari Selatan		47.764.559.000		-	47.764.559.000		47.764.559.000		-	47.764.559.000
533	Kab. Fak fak		113.154.978.000		7.500.000.000	120.654.978.000		113.154.978.000		7.500.000.000	120.654.978.000
534	Kota Sorong		-		7.500.000.000	7.500.000.000		-		7.500.000.000	7.500.000.000
535	Kab. Pegunungan Arfak		128.526.923.000		-	128.526.923.000		128.526.923.000		-	128.526.923.000
536	Kab. Sorong Selatan		94.628.802.000		7.500.000.000	102.128.802.000		94.628.802.000		7.500.000.000	102.128.802.000
537	Kab. Raja Ampat		92.673.942.000		-	92.673.942.000		92.673.942.000		-	92.673.942.000
538	Kab. Teluk Bintuni		93.230.474.000		7.500.000.000	100.730.474.000		93.230.474.000		7.500.000.000	100.730.474.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA OTONOMI KHUSUS, DANA DESA, TRANSFER DANA KEISTIMEWAAN DIY DAN DANA INSENTIF DAERAH
Tahun Anggaran 2017 (Audited)
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu				Realisasi				
		Pagu Dana Otonomi Khusus	Pagu Dana Desa	Pagu Transfer Dana Keistimewaan DIY	Pagu Dana Insentif Daerah	Jumlah Pagu	Dana Otonomi Khusus	Dana Desa	Transfer Dana Keistimewaan DIY	Jumlah Realisasi
539	Kab. Teluk Wondama		61.650.303.000		-	61.650.303.000		60.929.861.800		60.929.861.800
540	Kab. Tambora		166.519.321.000		7.500.000.000	174.019.321.000		166.519.321.000		174.019.321.000
541	Kab. Maybrat		195.228.472.000		7.500.000.000	202.728.472.000		195.228.472.000		202.728.472.000
542	Kab. Kaimana		71.057.178.000		7.500.000.000	78.557.178.000		71.057.178.000		78.557.178.000
JUMLAH		19.443.292.590.000	60.000.000.000.000	800.000.000.000	7.500.000.000.000	87.743.292.590.000	19.443.292.590.000	59.766.577.527.403	800.000.000.000	87.509.870.117.403

4. PERSETUJUAN *MULTI YEARS CONTRACT*

**PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK (MULTI YEARS CONTRACT)
PER 31 DESEMBER 2017**

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Kebutuhan Alokasi Anggaran Per Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	11	Kementerian Luar Negeri	428.744.871.015	124.779.670.002	120.709.529.833	116.339.563.500	1.116.698.771.003
2		Pengadaan Gedung ASEC	300.000.000.000	-	-	-	-
3		Pengadaan Gedung KBRI London	128.744.871.015	124.779.670.002	120.709.529.833	116.339.563.500	1.116.698.771.003
4	12	Kementerian Pertahanan	1.382.114.016.000	-	-	-	-
5		UO Mabes TNI AL	1.333.502.000.000	-	-	-	-
6		UO Mabes TNI AD	48.612.016.000	-	-	-	-
7	15	Kementerian Keuangan	942.102.007.000	359.540.232.000	345.012.517.000	-	-
8		Setjen	602.233.492.000	-	-	-	-
9		Ditjen Bea Cukai	339.868.515.000	359.540.232.000	345.012.517.000	-	-
10	20	Kementerian ESDM	80.122.013.000	-	-	-	-
11		Ditjen EBTKE	80.122.013.000	-	-	-	-
12	22	Kementerian Perhubungan	12.262.117.279.000	7.184.334.655.000	2.497.281.000.000	-	-
13		Ditjen Perhubungan Darat	75.000.000.000	160.000.000.000	-	-	-
14		Ditjen perhubungan Laut	622.860.094.000	-	-	-	-
15		Ditjen Perkerataapian	11.564.257.185.000	7.024.334.655.000	2.497.281.000.000	-	-
16	32	Kementerian Kelautan dan Perikanan	429.377.108.000	-	-	-	-
17		Ditjen Perikanan Tangkap	134.023.108.000	-	-	-	-
18		Ditjen PDSPKP	135.027.000.000	-	-	-	-
19		Badan Riset dan SDM KP	160.327.000.000	-	-	-	-
20	33	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	33.414.891.280.000	22.381.427.194.000	7.302.994.915.000	2.037.724.943.000	486.191.868.000
21		Ditjen Bina Marga	8.048.743.159.000	2.482.251.527.000	278.801.485.000	49.591.909.000	49.591.909.000
22		Ditjen Cipta Karya	3.932.692.201.000	1.080.246.644.000	-	-	-
23		Ditjen Sumber Daya Air	20.729.271.247.000	18.818.929.024.000	7.024.193.430.000	1.988.133.034.000	436.599.959.000
24		Ditjen Penyediaan Perumahan	642.951.000.000	-	-	-	-
25		Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	61.233.673.000	-	-	-	-
26	107	Badan SAR Nasional	200.000.000.000	652.400.000.000	-	-	-
27	112	BP Batam	155.266.194.000	-	-	-	-
28	118	BP Sabang	90.100.000.000	81.721.000.000	-	-	-
JUMLAH			49.384.834.768.015	30.784.202.751.002	10.265.997.961.833	2.154.064.506.500	1.602.890.639.003

5. SALDO KAS DI KPPN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
	DJPB PUSAT		2.280.287.123.733	1.560.854.477.739
1	KHUSUS PENERIMAAN	901	2.280.287.123.733	1.560.854.477.739
2	RPKBUN - PUSAT	902		0
	I. NAD			4.621.160.519
3	BANDA ACEH	001		1.922.716.399
4	LANGSA	002		404.199.852
5	MEULABOH	003		104.005.779
6	TAPAK TUAN	074		0
7	LHOKSEUMAWE	089		1.181.569.740
8	KUTACANE	105		224.294.688
9	TAKENGON	122		784.374.061
	II. SUMATERA UTARA			18.477.617.965
10	MEDAN I	004		6.639.251.184
11	PEMATANG SIANTAR	005		380.432.204
12	PADANG SIDEMPUAN	006		794.524.234
13	GUNUNG SITOLI	007		460.711.895
14	RANTAU PRAPAT	075		7.349.629.056
15	TANJUNG BALAI	076		569.030.721
16	SIBOLGA	106		97.930.161
17	SIDIKALANG	119		1.377.665
18	MEDAN II	123		0
19	TEBING TINGGI	124		1.613.770.832
20	BALIGE	125		570.960.013
	III. SUMATERA BARAT			1.919.690.608
21	PADANG	010		435.856.516
22	BUKIT TINGGI	011		974.413.307
23	SIJUNJUNG	077		200.263.683
24	SOLOK	090		309.157.102
25	LUBUK SIKAPING	091		0
26	PAINAN	142		0
	IV. RIAU			361.355.670
27	PEKANBARU	008		331.355.670
28	RENGAT	092		0
29	DUMAI	120		30.000.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
	V. JAMBI			141.719.989
30	JAMBI	012		141.719.989
31	SUNGAI PENUH	013		.
32	MUARA BUNGO	078		0
33	KUALA TUNGKAL	143		0
34	BANGKO	159		0
	VI. SUMATERA SELATAN			143.033.189
35	PALEMBANG	014		53.827.327
36	LUBUK LINGGAU	070		0
37	BATURAJA	109		89.205.862
38	LAHAT	144		0
39	SEKAYU	160		0
	VII. LAMPUNG			535.892.836
40	BANDAR LAMPUNG	017		29.630.523
41	KOTABUMI	116		116.926.541
42	METRO	126		389.335.772
43	LIWA	145		0
	VIII. BENGKULU			0
44	BENGKULU	016		0
45	MANNA	121		0
46	CURUP	146		0
47	MUKO MUKO	181		0
	IX. BANGKA BELITUNG			214.024.234
48	PANGKAL PINANG	015		14.773.092
49	TANJUNG PANDAN	107		199.251.142
	X. BANTEN			832.603.074
50	SERANG	020		544.467.423
51	TANGERANG	127		163.908.970
52	RANGKASBITUNG	161		124.226.681
	XI. DKI JAKARTA		1.790.445.550	187.306.415.415
53	JAKARTA I	018		0
54	JAKARTA II	019		96.983.291
55	JAKARTA III	088	1.764.382.865	182.540.229.294
56	JAKARTA IV	133		64.051.007
57	JAKARTA V	139		3.424.493.596
58	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	140	26.062.685	1.180.658.228
59	JAKARTA VI	175		(1)
60	JAKARTA VII	182		

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
	XII. JAWA BARAT			3.522.024.123
61	PURWAKARTA	021		116.973.882
62	BANDUNG I	022		1.177.138.807
63	BOGOR	023		0
64	CIREBON	024		198.835.193
65	TASIKMALAYA	025		0
66	KARAWANG	086		0
67	SUMEDANG	087		0
68	BANDUNG II	095		1.970.022.341
69	GARUT	096		48.178.972
70	SUKABUMI	128		10.874.928
71	KUNINGAN	147		0
72	BEKASI	171		0
	XIII. JAWA TENGAH			6.851.032.511
73	SEMARANG I	026		1.491.173.748
74	PURWOREJO	027		466.252.198
75	SURAKARTA	028		1.899.748.568
76	PURWOKERTO	029		141.649.898
77	PEKALONGAN	072		685.469.040
78	PATI	097		472.946.724
79	MAGELANG	115		13.279.042
80	TEGAL	118		103.323.293
81	KUDUS	129		103.742.382
82	CILACAP	130		302.455.203
83	SEMARANG II	134		0
84	KLATEN	148		0
85	SRAGEN	162		0
86	PURWODADI	163		192.202.487
87	BANJARNEGARA	164		978.789.928
	XIV. DIY			1.642.879.414
88	YOGYAKARTA	030		1.546.312.964
89	WONOSARI	149		73.620.348
90	WATES	176		22.946.102
	XV. JAWA TIMUR			14.964.222.467
91	SURABAYA I	031		4.196.053.470
92	MALANG	032		881.695.470
93	MADIUN	033		2.293.480.791
94	KEDIRI	034		2.055.285.396
95	BONDOWOSO	035		0
96	PAMEKASAN	036		1.106.457.546
97	BOJONEGORO	073		257.090.508
98	MOJOKERTO	098		0
99	PACITAN	099		0
100	BANYUWANGI	100		362.696.607
101	JEMBER	131		1.984.055.606

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
102	SURABAYA II	135		0
103	BLITAR	150		931.479.740
104	SIDOARJO	165		659.555.002
105	TUBAN	166		236.372.331
	XVI. KALIMANTAN BARAT			623.131.814
106	PONTIANAK	042		56.271.757
107	SINTANG	079		0
108	SINGKAWANG	093		535.202.605
109	KETAPANG	094		0
110	PUTUSSIBAU	117		0
111	SANGGAU	167		31.657.452
	XVII. KALIMANTAN TENGAH			0
112	PALANGKARAYA	043		0
113	SAMPIT	044		0
114	BUNTOK	080		0
115	PANGKALAN BUN	102		0
	XVIII. KALIMANTAN SELATAN			0
116	BANJARMASIN	045		0
117	KOTABARU	081		0
118	BARABAI	110		0
119	TANJUNG	151		0
120	PELAIHARI	168		0
	XIX. KALIMANTAN TIMUR			328.431.055
121	SAMARINDA	046		0
122	BALIKPAPAN	047		7.456.117
123	TARAKAN	048		320.974.838
124	NUNUKAN	152		0
125	TANJUNG REDEP	153		100
	XX. BALI			344.730.738
126	DENPASAR	037		225.450.000
127	SINGARAJA	132		112.813.348
128	AMLAPURA	154		6.467.390
	XXI. NTB			286.571.954
129	MATARAM	038		36.426.485
130	BIMA	071		231.104.048
131	SUMBAWA BESAR	101		19.041.421
132	SELONG	169		0

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
	XXII. NTT			1.127.843.986
133	KUPANG	039		316.044.981
134	ENDE	040		0
135	WAINGAPU	041		579.523.125
136	RUTENG	111		49.233.519
137	ATAMBUA	172		183.042.361
138	LARANTUKA	174		0
	XXIII. SULAWESI SELATAN			3.077.416.132
139	MAKASSAR I	054		1.399.602.969
140	WATAMPONE	055		64.255.165
141	BANTAENG	056		288.632.575
142	PARE-PARE	057		1.324.925.423
143	PALOLO	058		0
144	MAKASAR II	136		0
145	BENTENG	155		0
146	MAKALE	170		0
147	SINJAI	177		0
	XXIV. SULAWESI TENGAH			215.914.879
148	PALU	051		202.813.586
149	POSO	052		0
150	LUWUK	053		0
151	TOLI-TOLI	082		13.101.293
	XXV. SULAWESI TENGGARA			2.220.210.718
152	KENDARI	060		2.050.894.465
153	BAU-BAU	103		169.316.253
154	KOLAKA	156		0
155	RAHA	157		0
	XXVI. GORONTALO			1.170.309.132
156	GORONTALO	050		1.170.309.132
157	MARISA	180		0
	XXVII. SULAWESI UTARA			2.480.909.027
158	MANADO	049		2.286.390.928
159	TAHUNA	083		0
160	KOTAMOBAGU	158		194.518.099
161	BITUNG	179		0
	XXVIII. MALUKU UTARA			115.858.653
162	TERNATE	062		115.858.653

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SALDO KAS DI REKENING KAS KPPN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No	NAMA KPPN	Kode KPPN	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
163	TOBELO	112		0
	XXIX. MALUKU			572.371.673
164	AMBON	061		487.707.419
165	TUAL	084		84.664.254
166	SAUMLAKI	104		0
167	MASOHI	173		0
	XXX. PAPUA			2.064.094.379
168	JAYAPURA	063		1.256.564.450
169	BIAK	064		773.858.382
170	MERAUKE	068		33.671.547
171	NABIRE	085		0
172	WAMENA	113		0
173	SERUI	138		0
174	T I M I K A	141		0
	XXXI. KEPRI			1.226.407.048
175	TANJUNG PINANG	009		768.141.494
176	B A T A M	137		458.265.554
	XXXII. SULAWESI BARAT			414.462.482
177	M A J E N E	059		414.462.482
178	MAMUJU	178		0
	XXXIII. PAPUA BARAT			299.242.147
179	MANOKWARI	065		299.242.147
180	S O R O N G	066		0
181	FAK-FAK	067		0
JUMLAH KAS DI KPPN			2.282.077.569.283	1.818.956.055.570

6.KAS PADA K/L DAN BUN

KAS PADA K/L DAN BUN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	4.394.113	4.636.093.012	-	-	267.468.248	7.638.247.801
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	1.229.306.400	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	-	9.134.522.524	-	-	4.198.123.779	5.135.328.301
4	005	MAHKAMAH AGUNG	41.343.500	506.639.004	61.309.801	593.049	247.141.999	526.596.537
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	830.414.895	1.120.645.502	1.648.312.460	531.134.790	76.537.993.226	38.447.601.206
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	6.281.732.577	13.008.515.960	-	9.323.084.058	44.553.108.684	25.849.813.756
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	143.514.400	3.099.373.850	2.318.750.000	423.900.000	9.338.053.629	3.075.503.781
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	119.867.022.901	134.402.318.094	20.772.633.298	12.587.215.646	37.031.523.542	27.772.225.251
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	13.502.999	1.055.200.475	-	-	38.241.570.044	118.798.767.554
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.294.724.415	3.367.711.321	-	3.760.180.498	36.289.582.072	7.881.592.718
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	2.533.211.245	870.155.274	6.330.715.641	570.402.954	471.927.362.187	345.995.662.732
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	6.915.057.587	11.389.209.985	651.711.457	1.259.474.506	31.942.760.365	1.583.785.708
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	70.859.339	421.842.917	25.520.000	16.510.600	141.006.450	15.502.806.484
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	37.944.493	8.802.000	26.462.561	-	3.337.319.164	2.823.439.954
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	7.929.652.381	859.388.280	1.241.057.661	10.523.336.581	27.484.286.145	49.022.442.474
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	17.803.152.339	11.955.107.983	75.537.000	7.054.613	54.112.301.810	325.196.257.450
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.320.666.799	1.399.069.596	218.677.700	616.914.118	574.442.183.969	484.358.461.194
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	2.694.462.913	2.675.693.411	44.176.550	15.182.173.448	60.147.935.567	35.835.312.489
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	714.208.315	1.824.432.037	5.000.000	-	89.419.780	6.313.136
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	85.430.900	188.230.210	-	-	335.962.866.982	704.814.202.124
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	1.040.061.029	2.241.910.508	1.636.578.500	1.275.980.193	43.939.120.401	41.908.788.143
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	546.762.090	2.863.863.209	41.669.445	68.746.534	8.905.907.153	7.838.125.801
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	162.261.960	77.391.862	-	10.550.000	36.257.424.764	54.340.643.213
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	2.413.819.878	2.373.779.829
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	4.861.000	3.668.316	-	-	951.029.083	606.105.149
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	138.770.095	1.878.329.894	-	-	231.503.520	18.245.948.683
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	10.000	1.388.807.794	249.085.262	82.637.015	369.334.760	4.756.649.489
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-	-	-	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	3.001.316.341	7.638.500.025	66.556.092.999	71.115.376.397	790.575.624.052	822.370.663.247
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	45.651.150	1.427.300	-	-	4.219.142.469	4.320.037.457
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.412.887.953	1.087.009.734	-	-	1.986.463.595	7.669.112.699
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.027.500	-	-	-	80.853.400	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	104.444.517
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	63.448	161.903.617	-	-	-	332.014.871
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.879.223.807	144.507.470	10.000.000	-	8.004.257.733	314.886.462
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	659.923.772	300.000	-	-	542.920.796.056	300.140.850.700
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	122.832.777	234.599.118	-	-	1.265.975.848	556.420.545
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	420.000	148.110.000	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	74.714.000	189.232.850	2.883.172	7.772.200	11.940.000	26.329.650
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	716.375.997	1.488.128.910	1.376.826.300	840.305.000	741.201.340.537	517.586.901.482
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	326.927.000	45.839.282	-	3.100.000	6.811.810	400
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	0	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	284.499.790	2.316.391.958	-	-	4.242.465.945	4.293.070.215

KAS PADA K/L DAN BUN PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	112.621.575	1.274.481.368	-	-	424.887.604	75.269.599
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	18.938.471	222.396.599	-	-	1.182.986	142.337
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	71.065.068	1.058.400.673	-	-	1.255.196.936	1.641.122.015
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	0	-	-	1.696.322.621	1.510.124.566
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	-	2.533	250.000	-	230.000	731.509
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.385.459.380	1.702.886.558	-	-	2.736.090.651.979	1.968.419.578.118
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	0	-	-	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	0	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	7.616.396	42.819.380	455.548.400	232.341.864	403.239.846	722.299.946
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	603.658.983	50.472.000	-	-	332.409.648	148.477.664
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	124.314.478	833.015.799	894.027.094	1.077.767.806	1.541.139.025	1.040.783.208
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	4.127.708	0	-	-	22.830.018	19.739.789
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	0	3.535.317	4.769.099	38.386.320	-
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	0	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	142.008.688	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	0	-	-	8.344.850	3.576.103.679
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	33.049.600	9.910.701	-	-	-	2.424.092.450
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	5.038.000	0	-	-	-	96.561
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	0	-	-	45.644.000	-
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	8.685.477.847	16.470.767.483	15.655.000	3.058.855.591	3.032.043.224	10.365.432.812
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	646.841.213	6.277.699.056	-	5.796.000	8.522.072.979	32.596.282.991
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	299.227.500	500.000.000	-	-	27.947.696.290	1.864.453.581
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	2.783.677.454	7.122.361.878	-	-	8.259.964.507	9.558.318.615
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	0	-	-	-	39.433.340
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	0	-	-	34.683.033.156	41.646.605.424
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	-	203.372.367	-	-	33.455.722	241.654.726
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	0	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	0	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	42.031	58.400.000	-	-	-	183.389.145
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	184.430.476	-	-	110.291.608	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	2.793
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	8.874.678	-	-	-	621.065.134
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	3.661.000	2.169.150	-	-	421.963.906	1.661.000
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	121.049.516.851	86.213.557.725
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	114.322.000	0	-	-	1.746.404.351	344.934.975
80	114	SEKRETARIAT KABINET	1.688.396.606	451.652.229	-	-	903.253.008	3.451.232.069
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	6.630.389.917	1.932.594.673	-	-	730.131.317.730	336.289.428.048
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	32.313.100	24.746.000	-	231.595.000	-	246.961.571
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	80.892.500	442.403.463	1.076.397.138	-	4.022.885.752	42.838.476.301
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	22.343.100	28.028.309
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	0	-	-	-	3.908.000
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	653.501	-	-	-	-

**KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

No.	BA BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED	31 DESEMBER 2017 AUDITED	31 DESEMBER 2016 AUDITED
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	0	-	-	-	8.664.257
		PENYESUAIAN					3.687.119.773	
		JUMLAH KAS PADA K/L	210.331.016.647	262.849.392.535	105.738.412.756	134.046.873.960	7.680.309.646.436	6.534.171.185.459
		JUMLAH KAS PADA SATKER BUN	497.147.493	96.976.950	-	-	22.643.658	150.456.206
		JUMLAH KAS PADA K/L DAN BUN	210.828.164.140	262.946.369.485	105.738.412.756	134.046.873.960	7.680.332.290.094	6.534.321.641.665

7. UANG MUKA BELANJA DAN BELANJA DIBAYAR DI MUKA

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		(Dalam Rupiah) PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2017 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2016 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2017 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2016 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2017 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2016 <i>AUDITED</i>
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	357.453.807	361.852.280	-	-	-	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.095.671.281	7.522.575.482	-	-	-	-
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	-	-	-	2.534.000	-	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	18.821.994.720	16.186.217.901	-	-	334.080.000	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	70.423.287.306	46.048.872.328	-	-	-	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	1.541.545.722.838	1.736.265.329	10.838.536.884.561	1.981.918.339.753	11.138.314.702	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	14.616.502.667	8.072.548.940	75.516.187.188	148.130.443.000	24.546.979	60.336.607
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	436.912.535.114	568.536.287.427	3.251.678.938	3.559.123.681	265.793.509.448	241.104.004.017
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.183.182.121	67.511.543	-	-	798.368.000	857.611.000
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	12.060.000	-	-	1.444.469.000	872.689.000
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	13.691.034.387	3.432.766.195	-	-	2.318.605	38.284.154
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	12.247.000	382.933.058	-	3.417.500.000	199.145.435.459	327.312.125
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.781.927.171.918	5.177.131.786.998	-	-	1.006.223.020	1.244.307.085
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	90.593.929.623	114.879.203.713	9.566.508.000	949.749.028	627.111.298	1.723.122.231
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	334.252.428	274.207.240	-	-	10.585.069.823	13.830.032.136
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	-	-	-	-	457.050.000	13.198.350
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	5.000.000	42.000.000	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.097.413.072	1.111.105.205	-	-	867.518.093	6.147.500
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.813.676.034	1.812.663.870	-	-	205.943.307	26.633.184
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	6.657.558.999	5.054.499.667	-	-	3.308.414.845	1.763.519.637
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	461.096.315	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	133.478.544	7.104.167	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	11.678.383.948	10.760.397.625	-	-	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	2.302.234.817	-	-	-	-	104.740.000
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	10.661.747.689	16.899.780.231	1.958.017.187	438.091.920	12.744.529.763	15.144.984.584
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	575.437.390	206.387.500	-	-	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-	-	-	-	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	107.641.492.716	19.952.500.835	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.390.969.539	757.822.740	-	-	16.827.080	740.000

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2017 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2016 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2017 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2016 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2017 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2016 <i>AUDITED</i>
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	38.698.322.327	87.967.957.565	-	-	110.173.600	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	366.399.131	252.100.000	-	-	-	13.734.000
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.904.139.050	6.907.450	-	-	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.044.986.376	2.856.624.067	-	-	2.000.000	-
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	18.446.256.104	9.384.618.464	232.068.191.536	250.923.137.347	55.568.712	3.889.545
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	816.965.199	1.107.635.364	-	-	-	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	79.530.000	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	869.160.353	505.140.250	-	-	-	-
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	-	-	-	-	1.863.514	-
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1.821.500	-	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3.000.000	7.563.932.398	-	-	23.727.143.345	-
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	2.966.488.111	1.106.967.511	-	-	-	-
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	7.095.059	169.696.650	-	-	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.792.897.141	789.495.046	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	115.500.000	118.950.000	-	-	359.821.880	523.248.645
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	136.205.666	215.993.334	-	-	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-	-	-	-	-	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	42.166.664	41.268.829	-	-	-	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	-	-	-	-	87.258.983	-
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-	-	-	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	19.950.000	-	-	-	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.296.695.876	1.189.019.683	-	-	21.762.859	11.799.031
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	11.565.716.696	15.400.539.285	56.875.000	-	791.880.736	550.230.884
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	177.468.835.532	-	29.731.456.507	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.299.149.210	1.380.246.728	-	-	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	1.704.255.477	1.584.780.585	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	442.033.463	559.583.369	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	486.181.132.504	548.969.141.640	-	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	644.147.062	790.244.840	-	-	-	-
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	314.677.984	423.189.755	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	717.308.000	968.052.055	-	-	-	-

**BELANJA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA BELANJA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA		UANG MUKA BELANJA		(Dalam Rupiah) PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	
			31 DESEMBER 2017 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2016 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2017 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2016 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2017 <i>AUDITED</i>	31 DESEMBER 2016 <i>AUDITED</i>
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	951.377.875	471.164.829	-	-	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	3.120.991.906	2.883.605.758	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	12.350.000	-	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	898.858.750	-	-	28.046.814.084	37.043.398.377
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	5.976.000	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	64.607.256.433	5.025.042.908	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	-	-	320.409.000	333.909.000	152.310.000	2.998.000
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	97.774.871	1.476.394.959	22.054.746.964	29.025.488.181	15.010.768.716	-
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.466.610	-	-	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	87.257.669.877	97.629.366.477	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	4.185.855.852	1.801.698.696	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			6.045.121.028.182	6.794.787.567.519	11.213.060.954.881	2.418.698.315.910	576.867.095.851	315.266.960.092
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-	-	-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	3.453.385.539	269.712.948.745	-	-	-	-
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	135.664.283	-	-	-	-	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-	-	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L BUN			3.589.049.822	269.712.948.745	-	-	-	-
TOTAL			6.048.710.078.004	7.064.500.516.264	11.213.060.954.881	2.418.698.315.910	576.867.095.851	315.266.960.092

8.PIUTANG PAJAK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK DAN PENYISIHAN PAJAK BERDASARKAN JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2017
(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Nilai
115121	Piutang PPh Pasal 21	989.815.356.183
115122	Piutang PPh Pasal 22	475.164.708.249
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	85.483.068.872
115124	Piutang PPh Pasal 23	1.082.058.604.109
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.376.615.838.778
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	13.774.975.667.801
115127	Piutang PPh Pasal 26	1.257.358.573.103
115128	Piutang PPh Final	1.143.290.999.747
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	23.797.562.832.870
115132	Piutang PPN Impor	444.105.778.536
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri	352.047.482.317
115142	Piutang PPnBM Impor	3.365.892.628
115153	Piutang PBB Perkebunan	1.021.515.758.737
115154	Piutang PBB Kehutanan	669.097.951.966
115155	Piutang PBB Pertambangan	5.094.428.435.136
115159	Piutang PBB Lainnya	34.791.239.897
115161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	38.998.498.911
115162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	200.000
115163	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.098.196.600
115164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	34.261.249.069
115169	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	13.724.768.196
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	1.241.815.000
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	2.330.021.852.638
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	728.031.077.896
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	34.192.668.553
115181	Piutang Bea Masuk	937.527.391.071
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	1.927.304.382.761
115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	350.273.642.361
115185	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	580.612.778.023
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	16.036.999.082
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	536.564.390
115191	Piutang Bea Masuk Antidumping	22.958.375.000
115193	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.460.248.000
Jumlah Piutang Pajak Bruto		58.621.958.896.480
116112	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Pajak PPh Non Migas	12.303.964.123.594
116113	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Pajak PPN	11.763.155.808.987
116114	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Pajak PPnBM	297.859.161.971
116115	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Pajak PBB dan BPHTB	2.126.318.364.904
116116	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Cukai dan Bea Materai	2.669.950.399.469
116117	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Pajak Lainnya	1.582.347.598.429
116118	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Pajak Perdagangan Internasional	282.963.906.821
116119	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bea Masuk Tindakan	22.965.676.240
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		31.049.525.040.416
Piutang Pajak Netto		27.572.433.856.064

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PAJAK BERDASARKAN JENIS DAN UMUR PAJAK
PER 31 DESEMBER 2017

(dalam ribuan Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	≤ 1 Thn	1 Thn < UT ≤ 2 Thn	2 Thn < UT ≤ 3 Thn	3 Thn < UT ≤ 4 Thn	4 Thn < UT ≤ 5 Thn	> 5 Thn	JUMLAH
115121	Piutang PPh Pasal 21	322.263.375.841	150.528.317.470	134.341.876.828	96.214.110.013	82.332.069.570	204.135.606.468	989.815.356.183
115122	Piutang PPh Pasal 22	26.755.918.654	4.580.589.495	3.647.919.053	4.079.381.268	13.537.320.464	422.563.579.316	475.164.708.249
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	61.727.593.822	915.676.213	191.627.762	22.648.171.075			
115124	Piutang PPh Pasal 23	195.821.103.338	161.951.101.657	104.013.112.904	115.187.873.381	92.391.617.237	412.693.795.591	1.082.058.604.109
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	324.001.016.106	198.138.705.309	299.278.010.926	93.989.918.897	184.665.307.310	276.542.880.228	1.376.615.838.778
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	3.147.810.161.726	3.162.411.112.236	1.393.797.438.534	805.351.973.189	1.280.204.968.566	3.985.400.013.548	13.774.975.667.801
115127	Piutang PPh Pasal 26	271.242.537.421	134.363.485.674	394.563.593.833	11.582.461.455	38.477.394.028	407.129.100.694	1.257.358.573.103
115128	Piutang PPh Final	448.853.969.784	186.515.717.265	210.826.429.674	171.303.151.692	58.208.060.118	67.583.671.214	1.143.290.999.747
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	10.393.375.511.123	2.343.765.253.059	2.176.185.723.059	1.801.187.007.771	2.095.896.550.125	4.987.152.787.730	23.797.562.832.870
115132	Piutang PPN Impor	344.014.024.811	6.032.914.975	587.281.049	93.471.557.701			
115141	Piutang PPnBM Dalam Negeri	2.109.975.461	10.571.428	17.126.554.232	94.663.594.619	199.256.462.464	38.880.324.113	352.047.482.317
115142	Piutang PPnBM Impor	1.308.660.000	-	-	2.057.232.628			
115153	Piutang PBB Perkebunan	378.891.672.642	220.450.136.139	151.017.044.137	149.219.645.952	66.864.104.341	55.073.155.526	1.021.515.758.737
115154	Piutang PBB Kehutanan	323.064.769.734	99.997.585.504	81.912.262.741	50.803.197.895	65.834.485.550	47.485.650.542	669.097.951.966
115155	Piutang PBB Pertambangan	938.829.616.078	490.958.598.058	1.133.214.580.643	448.850.976.351	1.754.112.233.985	328.462.430.022	5.094.428.435.136
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	25.327.251.280	6.987.852.558	2.476.136.059	-	-	-	34.791.239.897
115161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	1.770.114.000	-	-	37.228.384.911	-	-	-
115162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	200.000	-	-	-	-	-	-
115163	Piutang Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	-	-	-	3.098.196.600	-	-	-
115164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	5.991.629.000	-	70.000.000	28.199.620.069	-	-	-
115169	Piutang Pendapatan Cukai lainnya	1.372.576.000	86.126.250	186.478.500	12.079.587.446	-	-	-
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	1.234.603.000	7.212.000	-	-	-	-	1.241.815.000
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	588.601.612.700	1.088.632.238.666	93.239.379.997	13.006.687.551	45.578.187.775	500.963.745.948	2.330.021.852.638
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	186.132.457.803	485.108.876.443	15.109.379.653	3.434.708.993	23.177.649.727	15.068.005.278	725.910.453.592
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	11.007.877.558	21.152.547.342	1.581.155.916	-	-	451.087.737	34.192.668.553
115181	Piutang Bea Masuk	181.771.478.724	12.060.624.490	9.304.631.123	734.390.656.734	-	-	937.527.391.071
115191	Piutang Bea Masuk Anti Dumping	-	-	-	22.958.375.000	-	-	22.958.375.000
115193	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.460.248.000	-	-	-	-	-	1.460.248.000
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	93.570.243.529	5.212.052.000	4.044.163.000	1.824.477.924.232	-	-	1.927.304.382.761
115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	1.057.938.637	1.615.485.000	394.357.007	347.205.861.717	-	-	350.273.642.361
115185	Piutang Pungutan ekspor	426.679.866.000	523.640	2.154.726.224	151.777.662.159	-	-	580.612.778.023
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	-	-	-	16.036.999.082	-	-	16.036.999.082
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	3.703.000	84.000	44.147.700	488.629.690	-	-	536.564.390
	Jumlah	18.706.051.705.771	8.781.483.386.871	6.229.308.010.554	7.154.993.548.070	6.000.536.411.260	11.749.585.833.953	58.621.958.896.480

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENYISIHAN PIUTANG PAJAK PER KUALITAS
PER 31 DESEMBER 2017

(dalam Rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	JUMLAH
115121	Piutang PPh Pasal 21	728.300.854	21.190.393.452	91.813.605.231	444.251.985.951	557.984.285.488
115122	Piutang PPh Pasal 22	104.204.618	1.585.469.253	2.996.998.722	432.468.381.498	437.155.054.091
115124	Piutang PPh Pasal 23	636.052.684	8.875.567.512	90.691.675.590	678.016.817.130	778.220.112.915
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	635.022.028	17.751.315.534	181.996.609.885	700.949.351.511	901.332.298.958
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	6.222.567.822	321.352.502.863	1.438.074.841.115	6.413.366.249.169	8.179.016.160.969
115127	Piutang PPh Pasal 26	1.167.244.037	8.132.098.763	85.143.881.425	772.301.015.161	866.744.239.386
115128	Piutang PPh Final	1.168.309.272	22.319.544.381	122.164.031.437	437.860.086.698	583.511.971.787
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	37.558.136.367	328.314.586.126	1.524.246.222.167	9.873.036.864.327	11.763.155.808.987
115141	Piutang PPnBM Dalam Negeri	104.739	550.906.912	49.702.086.857	247.113.291.670	297.366.390.177
115153	Piutang PBB Perkebunan	1.894.458.363	37.146.718.028	108.041.875.147	55.073.155.526	202.156.207.063
115154	Piutang PBB Kehutanan	1.615.323.849	18.190.984.825	58.318.841.723	47.485.650.542	125.610.800.938
115155	Piutang PBB Pertambangan	4.694.148.080	156.053.268.262	958.335.230.998	678.395.674.446	1.797.478.321.786
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	126.636.256	946.398.862	-	-	1.073.035.118
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	2.286.095	137.400	391.475.053	-	393.898.548
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	344.421.393	112.706.092.247	262.640.819.577	607.791.493.688	983.482.826.906
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	55.519.855	42.566.791.280	86.361.285.895	114.425.296.252	243.408.893.281
115175	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	-	2.538.220.958	3.463.547.341	1.883.364.289	7.885.132.588
115181	Piutang Bea Masuk	908.857.394	1.012.613.049	4.224.254.037	737.181.273.783	743.326.998.262
115191	Piutang Bea Masuk Anti Dumping	-	-	-	22.958.375.000	22.958.375.000
115193	Piutang Bea Masuk Tindakan Pengamanan	7.301.240	-	-	-	7.301.240
115183	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	467.851.218	516.205.200	517.187.000	1.827.537.713.232	1.829.038.956.649
115184	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	5.289.693	158.239.000	127.223.516	347.378.866.691	347.669.618.901
115185	Piutang Pungutan ekspor	2.132.581.985	-	16.327.414	154.063.726.195	156.212.635.594
115186	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	-	-	-	16.036.999.081	16.036.999.081
115187	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	2.165	-	87.000	535.957.390	536.046.555
115161	Piutang Cukai Hasil Tembakau	8.850.570	-	-	37.228.384.911	37.237.235.481
115162	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	1.000	-	-	-	1.000
115163	Piutang Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	-	-	-	3.098.196.600	3.098.196.600
115164	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	29.858.145	-	10.000.000	28.269.620.069	28.309.478.214
115169	Piutang Pendapatan Cukai lainnya	6.825.531	-	-	12.359.662.096	12.366.487.627
115123	Piutang PPh Pasal 22 Impor	308.637.970	19.130.821	23.304.000	23.517.558.837	23.868.631.628
115142	Piutang PPnBM Impor	6.543.300	-	-	2.057.232.628	2.063.775.928
115132	Piutang PPN Impor	1.720.070.124	109.928.798	3.601.000	98.985.263.750	100.818.863.672
JUMLAH		62.555.406.646	1.102.037.113.523	5.069.305.012.128	24.815.627.508.119	31.049.525.040.416

**PIUTANG PAJAK MACET, PIUTANG PAJAK DALUARSA
PER 31 DESEMBER 2017
(dalam ribuan rupiah)**

Kode Akun	Nama Akun	PIUTANG MACET	DALUARSA	USUL HAPUS
115121	Piutang PPh Pasal 21	444.251.986	422.659.801	1.543
115122	Piutang PPh Pasal 22	432.468.381	20.456.873	-
115124	Piutang PPh Pasal 23	678.016.817	681.209.755	3.300
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	700.949.352	618.463.770	-
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	6.413.366.249	7.493.612.849	824.522
115127	Piutang PPh Pasal 26	772.301.015	1.437.867.240	-
115128	Piutang PPh Final	437.860.087	105.408.277	4.800
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	9.873.036.864	4.564.208.759	25.380.012
115141	Piutang PPnBM Dalam Negeri	247.113.292	55.162.734	-
115153	Piutang PBB Perkebunan	55.073.156	158.744.404	-
115154	Piutang PBB Kehutanan	47.485.651	167.716.744	-
115155	Piutang PBB Pertambangan	678.395.674	4.605.094.802	-
115159	Piutang PBB Sektor Lainnya	-	-	-
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	4.618	-
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	607.791.494	7.422.631.672	236.151
115174	Piutang Bunga Penagihan PPN	113.953.603	4.955.457.206	-
115175	Piutang Bungan Penagihan PPnBM	1.883.364	45.497.340	-
Jumlah		21.503.946.985	32.754.196.844	26.450.328

9.PIUTANG PNBP

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	9.090.909	(45.455)	9.045.454
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	493.439.437	(24.890.698)	468.548.739	416.058.291	(24.751.291)	391.307.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.626.968.686	(25.439.867)	3.601.528.819	1.394.900.083	(6.974.501)	1.387.925.582
4	005	MAHKAMAH AGUNG	902.540.921	(4.512.704)	898.028.217	1.105.900.273	(5.529.501)	1.100.370.772
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	17.207.138.324.097	(11.232.408.079.064)	5.974.730.245.033	16.469.136.490.076	(10.876.753.748.931)	5.592.382.741.145
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	9.834.118	(49.170)	9.784.948			-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	37.112.398.138	(1.081.373.246)	36.031.024.892	30.128.880.207	(1.061.669.593)	29.067.210.614
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	48.238.263.965	(241.191.323)	47.997.072.642	48.319.064.441	(246.956.513)	48.072.107.928
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	464.652.140.360	(35.088.135.064)	429.564.005.296	55.565.414.055	(29.001.824.489)	26.563.589.566
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	389.792.042.282	(359.843.265.606)	29.948.776.676	403.072.920.313	(370.942.642.503)	32.130.277.810
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	55.583.122.513	(45.673.329.718)	9.909.792.795	66.466.545.369	(45.761.030.878)	20.705.514.491
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	1.308.819.636	(312.781.522)	996.038.114	6.525.784.684	(33.474.698)	6.492.309.986
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	55.259.785.609	(27.567.081.593)	27.692.704.016	52.918.032.744	(28.017.760.178)	24.900.272.566
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11.795.354.469.701	(10.099.483.949.336)	1.695.870.520.365	10.298.154.923.302	(9.904.645.738.869)	393.509.184.433
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	274.210.888.813	(22.455.062.296)	251.755.826.517	326.073.373.974	(19.480.385.764)	306.592.988.210
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	323.373.693	(44.882.550)	278.491.143	89.765.100	(44.882.550)	44.882.550
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	41.694.452.251	(5.475.319.552)	36.219.132.699	28.597.016.130	(1.712.825.512)	26.884.190.618
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	10.598.392.702	(2.630.248.439)	7.968.144.263	7.173.062.113	(1.934.053.371)	5.239.008.742
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	70.357.193	(351.786)	70.005.407			-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	336.267.961	(157.491.481)	178.776.480	592.572.520		592.572.520
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.604.825.051.714	(3.208.649.715.591)	396.175.336.123	3.348.682.292.148	(2.768.584.028.015)	580.098.264.133
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.776.488.794	(19.647.685.249)	36.128.803.545	23.285.773.028	(18.971.641.955)	4.314.131.073
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	174.387.359.767	(33.768.081.146)	140.619.278.621	132.981.721.029	(33.428.683.631)	99.553.037.398
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-			-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	694.956.249	(3.474.780)	691.481.469	274.402.796	(1.372.014)	273.030.782
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	129.505.616	(647.529)	128.858.087	634.814.177	(3.176.394)	631.637.783
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	31.562.247.418	(157.811.237)	31.404.436.181	8.244.768.412	(41.223.751)	8.203.544.661
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.016.921.085	(440.616.754)	2.576.304.331	1.671.603.006	(433.890.163)	1.237.712.843
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	166.409.433.378	(101.845.812.986)	64.563.620.392	89.819.732.912	(20.254.200.128)	69.565.532.784
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	91.764.183.638	(89.845.174.398)	1.919.009.240	83.574.572.683	(82.539.335.971)	1.035.236.712
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-			-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	19.954.100	(99.771)	19.854.329	19.249.300	(96.247)	19.153.053
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.145.882.259	(5.729.410)	1.140.152.849	1.610.809.000	(8.054.045)	1.602.754.955
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	2.018.000	(10.090)	2.007.910	230.061.328	(1.150.307)	228.911.021
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.946.347.573	(81.560.901)	1.864.786.672	114.135.013	(82.339.838)	31.795.175
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	154.281.400	-	154.281.400	51.685.200	(258.427)	51.426.773
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	4.073.366.909	(2.550.287.482)	1.523.079.427	3.210.082.951	(2.509.760.924)	700.322.027
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	16.800.000	(84.000)	16.716.000
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.405.493.494.580	(2.175.923.549.755)	229.569.944.825	1.995.086.538.116	(1.842.980.350.838)	152.106.187.278
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	44.254.772.350	(247.089.986)	44.007.682.364	6.557.830.056	(58.605.274)	6.499.224.782
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	377.604.756	(1.888.024)	375.716.732	165.105.270	(825.527)	164.279.743
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	38.406.235	(192.031)	38.214.204	269.091.767	(1.345.459)	267.746.308
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	14.135.582.951	(175.617.083)	13.959.965.868	259.272.799	(15.907.963)	243.364.836
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	964.895.514	(4.824.477)	960.071.037	21.395.514	(106.978)	21.288.536
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	7.958.019.645	(39.646.723)	7.918.372.922	567.795.361	(2.838.977)	564.956.384
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.808.079.592	(14.040.399)	2.794.039.193	35.517.183.551	(177.585.918)	35.339.597.633
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	-	-	244.582.500	(1.127.750)	243.454.750
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-	-	61.561.636	(307.808)	61.253.828
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	5.864.453.726	(2.818.851.034)	3.045.602.692	5.727.068.862	(1.509.021.807)	4.218.047.055
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	3.385.333.470	(1.807.212.254)	1.578.121.216	4.961.232.668	(1.839.247.654)	3.121.985.014
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	53.303.623.314	(49.226.404.090)	4.077.219.224	36.077.619.188	(34.087.997.162)	1.989.622.026
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	8.767.698.427	(43.838.495)	8.723.859.932	12.517.202.399	(62.586.011)	12.454.616.388
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	2.512.459.030	(42.474.833)	2.469.984.197	2.330.391.732	(11.651.958)	2.318.739.774
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.809.585.944	(9.047.930)	1.800.538.014	7.500.000	(37.500)	7.462.500
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	58.468.470	(292.343)	58.176.127	2.217.558	(2.217.558)	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	158.216.952	(791.085)	157.425.867	214.777.332	(1.073.886)	213.703.446
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	312.000.038	(33.859)	311.966.179
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	706.503.121	(307.953.706)	398.549.415	306.625.945	(305.954.320)	671.625

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	-
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	22.535.809.851	(231.443.690)	22.304.366.161	1.471.682.930	(737.796.830)	733.886.100
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	303.002.210	(1.515.011)	301.487.199	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	523.774.435.781	(17.036.892.655)	506.737.543.126	530.435.855.479	(3.888.094.053)	526.547.761.426
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	105.479.044	(527.395)	104.951.649	170.464.012	(852.320)	169.611.692
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	-	-	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	2.573.110.780	(2.562.196.346)	10.914.434	3.006.827.244	(3.006.827.244)	-
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	306.213.128	(296.573.750)	9.639.378	306.213.128	(148.286.875)	157.926.253
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	81.797.154	(408.986)	81.388.168	276.995.840	(1.384.980)	275.610.860
73	107	BADAN SAR NASIONAL	28.928.600.000	(27.322.670.000)	1.605.930.000	28.928.600.000	(20.047.790.000)	8.880.810.000
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	159.528.084.343	(145.344.844.188)	14.183.240.155	188.373.759.460	(144.480.347.989)	43.893.411.471
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	549.388.956	(2.746.944)	546.642.012	1.358.195.740	(6.790.978)	1.351.404.762
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	119.447.063	(597.235)	118.849.828	97.647.995	(488.240)	97.159.755
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	2.031.729.289	-	2.031.729.289	5.468.098.090	-	5.468.098.090
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	6.990.000	(34.950)	6.955.050	-	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	1.019.999.998	-	1.019.999.998	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	3.369.035.985	(1.134.557.081)	2.234.478.904	3.556.610.069	(1.107.435.041)	2.449.175.028
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	123.983.091.557	(84.078.585.153)	39.904.506.404	48.450.189.284	(41.148.003.728)	7.302.185.556
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.213.035.410	(11.992.724)	1.201.042.686	1.214.284.421	(6.198.266)	1.208.086.155
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	1.281.793.530	(4.034.298)	1.277.759.232	1.027.431.096	(5.137.155)	1.022.293.941
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	73.474.787	(367.374)	73.107.413	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			37.946.995.596.919	(27.798.207.844.367)	10.148.787.752.552	34.405.512.144.647	(26.302.177.848.313)	8.103.334.296.334
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	130.507.641.516	(128.013.524.257)	2.494.117.259	140.287.825.516	(96.382.237.187)	43.905.588.329
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	(14.807.285.369.575)	(14.807.285.369.575)	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	12.587.181.424.549	-	12.587.181.424.549	16.865.867.945.164	-	16.865.867.945.164

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	2.418.199.044.056	(13.274.031.658)	2.404.925.012.398	295.630.919.267	(1.745.301.513)	293.885.617.754
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	298.954.011.484	(712.503.984)	298.241.507.500	6.438.382.772	(620.922.179)	5.817.460.593
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	105.238.735.290.025	(84.507.109.582.404)	20.731.625.707.621	105.603.907.467.107	(84.783.068.235.977)	20.820.839.231.130
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-	-	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA BUN			120.673.577.411.630	(99.456.395.011.878)	21.217.182.399.752	122.912.132.539.826	(84.881.816.696.856)	38.030.315.842.970
TOTAL			158.620.573.008.549	(127.254.602.856.245)	31.365.970.152.304	157.317.644.684.473	(111.183.994.545.169)	46.133.650.139.304

10. PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI
PER 31 DESEMBER 2017

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2017	Saldo Hak Tagih s.d. 31 Desember 2017
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2016	Pengembalian Periode Tahun 2017		
1	2	3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6	8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Talangan						
1	PT. Bank Anrico	210.080.728.375,73	9.532.957.340,07	62.424.152.681,78	8.150.345,00	71.965.260.366,85	138.115.468.008,88
2	PT. Bank Guna Internasional	251.055.008.000,00	183.555.008.000,00	53.519.917.650,21	173.803.487,00	237.248.729.137,21	13.806.278.862,79
3	PT. Bank Harapan Sentosa	3.866.182.312.852,07	585.728.056.499,00	105.063.756.666,52	382.021.799,00	691.173.834.964,52	3.175.008.477.887,55
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	201.802.166.935,30	25.098.188.837,19	8.412.101.678,00	527.736.991,00	34.038.027.506,19	167.764.139.429,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	201.812.614.291,48	46.872.202.071,00	51.746.031.699,83	523.820.349,00	99.142.054.119,83	102.670.560.171,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	336.763.209.866,98	31.186.000.000,00	9.507.058.537,00	0,00	40.693.058.537,00	296.070.151.329,98
7	PT. Bank Pasific	2.133.366.434.839,63	332.023.076.267,80	276.037.010.641,96	291.480.270,00	608.351.567.179,76	1.525.014.867.659,87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	1.687.349.515.372,53	857.387.217.393,65	364.181.990.642,15	2.068.322.313,00	1.223.637.530.348,80	463.711.985.023,73
9	PT. South East Asia Bank	899.399.023.305,99	99.302.719.380,89	97.482.364.439,79	0,00	196.785.083.820,68	702.613.939.485,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	110.105.997.130,87	6.970.134.600,00	27.654.560.911,00	370.997.961,00	34.995.693.472,00	75.110.303.658,87
11	PT. Astria Raya Bank	578.918.260.698,77	131.949.603.600,00	67.755.377.919,42	2.036.818.273,00	201.741.799.792,42	377.176.460.906,35
12	PT. Bank Pinaesaaan	681.084.490.919,58	18.456.680.100,11	46.356.083.528,52	498.784.053,00	65.311.547.681,63	615.772.943.237,95
13	PT. Bank Jakarta	210.994.000.000,00	120.959.930.061,67	90.034.069.938,00	0,00	210.993.999.999,67	0,33
14	PT. Bank Industri	511.470.229.326,68	279.124.000.000,00	83.286.646.127,00	39.484.546,00	362.450.130.673,00	149.020.098.653,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	8.554.789.642,67	2.500.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	6.054.789.642,67
	Total BDL Eks Dana Talangan	11.888.938.781.558,30	2.730.645.774.151,38	1.343.461.123.061,18	6.921.420.387,00	4.081.028.317.599,56	7.807.910.463.958,72

No.	ASAL BANK BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980			Total Pengembalian s.d. 31 Desember 2017	Saldo Hak Tagih s.d. 31 Desember 2017
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2016	Pengembalian Periode Tahun 2017		
1	2	3	4	5	6	7 = Jumlah 4 s.d. 6	8 = 3 - 7
	BDL eks Dana Penjaminan						
1	PT Bank Asiatic	886.579.224.443,83	5.000.000.000,00	81.021.777.845,00	2.678.511.707,00	88.700.289.552,00	797.878.934.891,83
2	PT Bank Dagang Bali	1.331.516.911.477,24	-	416.452.235.479,00	73.707.577.815,00	490.159.813.294,00	841.357.098.183,24
3	PT Bank Global Internasional	804.234.270.395,51	-	324.795.436.482,00	481.500.000,00	325.276.936.482,00	478.957.333.913,51
4	PT Bank Ratu	71.817.985.352,00	-	30.000.000.000,00	41.817.985.352,00	71.817.985.352,00	0,00
5	PT Bank Prasadha Utama	227.134.559.144,00	4.000.000.000,00	16.898.914.545,52	0,00	20.898.914.545,52	206.235.644.598,48
	Total BDL Eks Dana Penjaminan	3.321.282.950.812,58	9.000.000.000,00	869.168.364.351,52	118.685.574.874,00	996.853.939.225,52	2.324.429.011.587,06

TOTAL SALDO PIUTANG BDL	15.210.221.732.370,90	TOTAL PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI			5.077.882.256.825,08	10.132.339.475.545,80

11. ASET KREDIT EKS BPPN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2017 (Audited)

Uraian	Debitur ATK di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Grand Total
JUMLAH	17.243.322.303.288	23.586.482.694.981	27.740.393.092.991	68.570.198.091.260

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *

a Asset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2016 (audited)	Saldo 31 Desember 2016 nilai konversi
Dollar Amerika	541.235.832	7.332.663.056.678	647.218.048	8.696.021.698.047
Rupiah	7.410.962.766.853	7.410.962.766.853	7.548.387.319.181	7.548.387.319.181
Yen Jepang	5.615.941.859	675.139.544.764	5.615.941.859	648.107.208.626
Euro	13.093.102	211.762.863.647	13.451.790	190.498.192.001
		15.630.528.231.942		17.083.014.417.856

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2016 (audited)	Saldo 31 Desember 2016 nilai konversi
Dollar Amerika	28.356.585	384.175.011.819	28.356.585	380.999.074.313
Rupiah	1.228.619.059.527	1.228.619.059.527	1.231.255.252.589	1.231.255.252.589
		1.612.794.071.346		1.612.254.326.902

**Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN*

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2017 (A udited)

a+b Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2016 (audited)	Saldo 31 Desember 2016 nilai konversi
Dollar Amerika	569.592.417	7.716.838.068.497	675.574.633	9.077.020.772.361
Rupiah	8.639.581.826.380	8.639.581.826.380	8.779.642.571.770	8.779.642.571.770
Yen Jepang	5.615.941.859	675.139.544.764	5.615.941.859	648.107.208.626
Euro	13.093.102	211.762.863.647	13.451.790	190.498.192.001
Jumlah		17.243.322.303.288		18.695.268.744.758

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo 30 Juni 2017 nilai konversi	Mutasi TA 2017	Saldo 31 Desember 2016 (audited)
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.812.000.000	0	577.812.000.000
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000	0	155.727.000.000
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170.144.000.000	0	170.144.000.000
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa	Bank Servitia	4.308.730.000.000	0	4.308.730.000.000
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	0	0	0
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000	0	136.430.000.000
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.794.000.000	0	596.794.000.000
I.M. Sudiarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509.986.363.636	0	509.986.363.636
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7.831.110.763.791	9.707.472.954	7.840.818.236.745
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182	0	188.483.118.182
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000	0	790.557.000.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2017 (Audited)

Samadikun Hartono	Bank Modern	2.525.651.574.703	708.654.545	2.526.360.229.248
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70.460.000.000	0	70.460.000.000
Santoso Sumali	Bank Bahari	406.415.000.000	0	406.415.000.000
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4.893.525.874.669	0	4.893.525.874.669
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	424.656.000.000	0	424.656.000.000
Jumlah		23.586.482.694.981	10.416.127.499	23.596.898.822.480

Catatan:

*) Saldo PKPS Bank Deka per 31 Desember 2013 terdapat koreksi yang semula sebesar Rp63.834.063.875,36 menjadi sebesar Rp65.674.593.075 hal ini dikarenakan terdapat pembayaran tahun 2013 sebesar Rp1.840.529.887 efektif diterima kas umum negara pada tahun 2014

3. a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2016 (audited)	Saldo 31 Desember 2016 nilai konversi
Rupiah	11.484.758.087.138	11.484.758.087.138	11.374.924.718.393	11.374.924.718.393
Dollar Amerika	996.655.659	13.502.690.867.048	890.656.523	11.966.861.043.028
Yen Jepang	998.413.744	120.027.702.842	998.413.744	115.221.838.285
Deutschmark	0	0	0	0
Euro **	436.387	7.057.957.511	77.700	1.100.352.435
Dollar Australia	1.332.783	14.070.576.638	1.332.783	12.960.395.055
Poundsterling **	0	0	0	0
Jumlah		25.128.605.191.177		23.471.068.347.196

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN
Per 31 Desember 2017 (Audited)

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2016 (audited)	Saldo 31 Desember 2016 nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271.003.330.924	271.003.330.924	271.003.330.924	271.003.330.923,94
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1.980.529.395.026	1.980.529.395.026	1.980.529.395.026	1.980.529.395.026,31
	Dollar Amerika	26.403.989	357.721.238.230	26.403.989	354.763.991.501,40
Eraska Tristi	Rupiah	893.182.300	893.182.300	893.182.300	893.182.300,00
PT Teratai Mahkota	Rupiah	17.331.000	17.331.000	17.331.000	17.331.000,00
Penyerahan Aset Kredit 2016 yang belum tercatat pada KPKNL	Rupiah	1.623.424.334	1.623.424.334	17.970.937.955	17.970.937.954,67
Total			2.611.787.901.814		2.625.178.168.706,32

Catatan

Kurs Tengah BI		31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Dollar Amerika	13.548	13.436
2	Yen Jepang	120	115
3	Deutschmark	8.269	7.241
4	Euro	16.174	14.162
5	Dollar Australia	10.557	9.724
6	Poundsterling	18.218	16.508
7	Dollar Singapura	10.134	9.299

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2017

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total Per 31 Desember 2017 (audited)
TOTAL	3.919.833.561.326	4.269.024.208.453	8.188.857.769.778

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negeranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2016 (audited)	Saldo 31 Desember 2016 nilai konversi
Dollar Amerika	106.812.509	1.447.095.865.964	106.862.769	1.435.808.165.144
Dollar Singapore	79.397	804.576.441	79.397	738.310.536
Rupiah	2.448.683.794.112	2.448.683.794.112	2.450.929.499.760	2.450.929.499.760
Yen Jepang	141.216.723	16.976.848.432	141.216.723	16.297.101.738
Deutschmark	758.513	6.272.476.375	758.513	5.492.152.518
Jumlah		3.919.833.561.326		3.909.265.229.696

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKNSI

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2016 (audited)
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1.299.150.000	1.299.150.000
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108.990.024	108.990.024
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34.584.020.410	34.584.020.410
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	69.168.040.820	69.168.040.820
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	62.099.370.000	62.099.370.000
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30.938.810.689	30.938.810.689
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449.858	112.771.449.858
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	425.983.823.549	425.983.823.549
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800	8.693.911.800
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249.097	91.489.249.097
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1.212.685.353.878	1.212.685.353.878

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2017

Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.648	26.981.928.648
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	615.025.707.374	615.025.707.374
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45.000.000.000	45.000.000.000
Jumlah		2.736.829.806.146	2.736.829.806.146

Group Texmaco (dalam perkara)*

Group Teknis (dalam persen)							
No.	Debitur		Mata Uang	Saldo 31 Desember 2017 (audited)	Saldo 31 Desember 2017 nilai konversi	Saldo 31 Desember 2016 (audited)	Saldo 31 Desember 2016 nilai konversi
1	Jaya Perkasa Engineering, PT		Rupiah	151.367.074.750	151.367.074.750	151.367.074.750	151.367.074.750
			Dollar Amerika	38.822.432	525.966.308.736	38.822.432	521.618.196.352
2	Polysindo Eka Perkasa, PT		Rupiah	459.555.536	459.555.536	459.555.536	459.555.536
			Dollar Amerika	960.092	13.007.326.416	960.092	12.899.796.112
3	Texmaco Jaya, PT		Rupiah	365.572.613	365.572.613	365.572.613	365.572.613
			Dollar Amerika	2.435	32.989.380	2.435	32.716.660
4	Wastra Indah, PT		Rupiah	10.493.948	10.493.948	10.493.948	10.493.948
5	PT Bina Prima Perdana		Rupiah	470.399.713.486	470.399.713.486	470.399.713.486	470.399.713.486
			Dollar Amerika	25.540.008	346.016.028.384	25.540.008	343.155.547.488
Grand Total					1.507.625.063.249		1.500.308.666.945

* Berdasarkan Perjanjian dengan PT. PPA tahun 2013

5 Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo 31 Desember 2017 (unaudited)	Saldo 31 Desember 2016 (audited)
1	PT Citra Makmur Asia	Rupiah	24.561.586.875	24.561.586.875
2	Abdul Hadi	Rupiah	4.911.933	4.911.933
3	Faridah	Rupiah	2.528.941	2.528.941
4	Haryanto	Rupiah	59.267	59.267
5	Zainal Abidin	Rupiah	252.041	252.041
Total			24.569.339.058	24.569.339.058

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA
PER 31 DESEMBER 2017

Catatan

Kurs Tengah BI		31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Dollar Amerika	13.548	13.436
2	Yen Jepang	120	115
3	Deutschmark	8.269	7.241
4	Euro	16.174	14.162
5	Dollar Australia	10.557	9.724
6	Poundsterling	18.218	16.508
7	Dollar Singapura	10.134	9.299

12. BAGIAN LANCAR TP/TGR

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	340.360.952	(1.701.805)	338.659.147			-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	250.000.000	(1.250.000)	248.750.000	250.000.000	(1.250.000)	248.750.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	41.446.296	(13.595.148)	27.851.148	66.446.296	(2.901.630)	63.544.666
4	005	MAHKAMAH AGUNG	1.166.591.178	(923.482.693)	243.108.485	1.124.843.461	(867.553.955)	257.289.506
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	20.292.450	(101.462)	20.190.988	22.792.450	(113.962)	22.678.488
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-			-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	18.462.979.574	(92.314.898)	18.370.664.676	18.485.689.574	(92.428.448)	18.393.261.126
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	32.967.279.648	(31.997.124.048)	970.155.600	32.725.307.420	(31.909.143.865)	816.163.555
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	438.401.336	(429.806.303)	8.595.033	744.000	(3.720)	740.280
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	594.027.312	(2.970.136)	591.057.176	578.001.038	(2.948.477)	575.052.561
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	327.629.565	(1.638.147)	325.991.418	12.128.259.516	(9.441.748.164)	2.686.511.352
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	25.046.109.301	(20.110.981.249)	4.935.128.052	15.931.369.669	(10.064.474.100)	5.866.895.569
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	57.750.000	(288.750)	57.461.250
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	41.430.000	(9.639.750)	31.790.250	68.600.000	(343.000)	68.257.000
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	149.580.000	(747.900)	148.832.100	1.674.506.347	(20.141.251)	1.654.365.096
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	38.800.000	(194.000)	38.606.000	38.800.000	(194.000)	38.606.000
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.394.732.983	(18.834.387)	1.375.898.596	629.935.089	(50.412.175)	579.522.914
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	-	-	-	15.000.000	(75.000)	14.925.000
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	13.239.021.735	(5.475.901.960)	7.763.119.775	17.425.160.599	(7.735.727.304)	9.689.433.295
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.540.598.800	(9.428.507.114)	112.091.686	9.324.365.437	(9.233.079.811)	91.285.626
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	21.874.020	(109.370)	21.764.650	4.081.841	(20.409)	4.061.432
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	119.184.500	(595.923)	118.588.577	355.796.673	(10.045.484)	345.751.189
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-			-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-			-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-			-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	-	-	-	7.000.000	(35.000)	6.965.000
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.500.004	(17.500)	3.482.504	3.500.004	(17.500)	3.482.504
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.800.000	(9.000)	1.791.000	66.853.360	(409.399)	66.443.961
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	10.890.000	(54.451)	10.835.549	-	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-			-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	87.737.143	(438.686)	87.298.457	919.800.401	(4.599.002)	915.201.399
33	050	BADAN INTELLIJEN NEGARA	-	-	-			-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-			-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-			-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	19.771.175.874	(18.535.693.127)	1.235.482.747	21.312.896.856	(20.505.339.374)	4.687.241.169
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPENAS	1.410.788	(7.054)	1.403.734	25.400.012	(127.000)	25.273.012
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	170.472.504	(852.363)	169.620.141	42.000.000	(210.000)	41.790.000
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	4.396.980	(21.985)	4.374.995			-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.411.215.548	(291.953.978)	1.119.261.570	1.855.402.473	(458.665.430)	1.396.737.043
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.306.351.645	(6.531.759)	1.299.819.886	129.471.672	(647.358)	128.824.314
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	4.839.984	(24.200)	4.815.784	6.060.000	(30.300)	6.029.700
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-			-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2.315.762	(11.579)	2.304.183			-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	85.477.700	(427.388)	85.050.312	496.257.537	(7.413.819)	488.843.718
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	88.468.100	(442.338)	88.025.762	88.468.100	(442.338)	88.025.762
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	39.363.480	(196.818)	39.166.662	38.804.280	(194.021)	38.610.259
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-			-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	15.000.000	(75.000)	14.925.000	13.000.000	(65.000)	12.935.000
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.279.172.095	(17.972.106)	1.261.199.989	304.046.526	(15.667.098)	288.379.428
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	76.428.000	(7.642.800)	68.785.200	135.118.738	(55.849.078)	79.269.660
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-			-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	13.100.000	(1.310.000)	11.790.000	13.100.000	(1.310.000)	11.790.000
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	89.052.000	(445.260)	88.606.740	164.363.629	(91.728.629)	72.635.000
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-	-	-	31.628.800	(158.144)	31.470.656
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-	-	-			-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	4.104.000	(20.520)	4.083.480	4.104.000	(20.520)	4.083.480
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	1.045.273.444	(5.226.367)	1.040.047.077
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	17.676.256	(88.381)	17.587.875	18.000.000	(90.000)	17.910.000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	62.068.956	(310.344)	61.758.612			-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	78.419.900	(1.033.262)	77.386.638
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3.499.500	(17.498)	3.482.002			-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	114.411.250	(572.056)	113.839.194	53.040.000	(265.200)	52.774.800
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	94.823.324	(474.117)	94.349.207	414.678.310	(322.089.257)	92.589.053
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-			-
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	154.541.454	(772.707)	153.768.747	259.557.021	(1.297.785)	258.259.236
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-			-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	4.198.210.301	(4.198.210.301)	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	BRUTO	PENYISIHAN	NETTO
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	4.092.473.190	(404.806.069)	3.687.667.121	512.218.683	(25.610.934)	486.607.749
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	355.423.277	(179.991.300)	175.431.977	207.043.277	(155.190.527)	51.852.750
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	5.220.000	(26.100)	5.193.900	-	-	-
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	630.728.070	(504.575.823)	126.152.247	561.454.068	(462.996.245)	98.457.823
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	207.548.644	(147.181.447)	60.367.197	255.928.744	(140.763.551)	115.165.193
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	14.589.000	(72.945)	14.516.055	-	-	-
TOTAL			134.439.614.178	(88.612.532.992)	45.827.081.186	144.168.549.546	(95.888.595.944)	52.159.637.289

13. PERSEDIAAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	7.483.566.263	7.735.153.145
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	18.560.434.078	17.329.224.807
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	15.887.954.266	15.247.686.790
4	005	MAHKAMAH AGUNG	18.069.171.901	11.095.965.900
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	340.677.490.552	290.671.034.236
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	567.141.947.498	583.813.202.552
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	279.686.794.522	390.725.237.137
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	47.636.453.144	45.222.276.761
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	48.618.947.782.931	51.571.871.314.246
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	547.645.750.308	501.457.950.598
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	376.664.699.351	431.671.100.560
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	553.130.416.941	488.757.835.877
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	410.615.589.704	320.831.892.569
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	843.424.910.555	622.802.737.043
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	7.022.058.287.675	6.768.625.010.104
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.428.258.639.787	612.313.692.899
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	3.443.123.902.754	2.893.566.102.603
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	67.960.460.498	78.744.696.996
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	18.111.579.777	4.194.709.787
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	478.497.291.788	529.502.542.193
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	536.427.131.856	239.716.062.005
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	851.505.706.652	521.931.729.010
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	4.398.225.644.611	3.118.682.234.566
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	26.603.867	23.558.677
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	680.594.496	687.785.910
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	1.624.989.732	1.587.500.866
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	37.730.094.642	62.358.719.595
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	759.008.096	879.635.392
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.802.435.378.484	1.225.245.209.042
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	2.072.111.304	2.934.650.154
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19.220.776.479	17.618.473.921
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	757.741.009	1.016.459.939
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.473.967.943	2.154.246.545
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.290.554.583	1.139.250.472
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	3.647.425	4.194.150
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	28.528.286.333	20.882.157.848
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	482.466.729.156	15.120.095.070
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	75.566.143.863	58.477.577.571
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	26.187.007.204	3.940.896.699

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.728.626.689	25.318.206.049
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	4.980.541.918.826	3.750.257.281.039
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	121.624.164.634	156.553.721.599
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	329.336.508	163.875.768
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	2.338.336.351	3.230.084.312
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	39.811.236.832	30.569.972.152
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	399.770.817.759	1.369.671.545.946
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	639.967.637.712	1.063.457.992.221
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	280.124.178	204.324.151
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	97.229.087.022	60.983.027.107
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	355.853.933.684	369.691.092.833
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	1.619.210.613	2.240.852.520
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	980.510.696	1.058.130.848
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	92.518.037.456	15.112.546.537
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	60.036.135.675	63.049.194.612
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	13.534.849.078	13.458.199.711
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	54.955.291.470	61.183.235.287
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	130.224.546.891	130.535.556.196
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	182.863.000	119.685.005
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.789.540.385	2.030.615.563
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.930.769.434	2.829.362.513
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.385.672.418	1.301.908.909
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	9.655.127.921	9.438.992.287
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	6.963.618.456	8.312.046.607
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	36.526.527.839	7.776.494.836
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	180.369.796.059	222.895.561.635
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	842.295.854.659	449.084.142.333
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	956.735.193	1.406.838.610
68	100	KOMISI YUDISIAL	600.075.136	1.230.541.937
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	317.831.111.871	435.401.744.707
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	45.558.182.496	52.445.475.071
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	5.467.142.113	519.325.683
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	766.276.037	1.630.664.064
73	107	BADAN SAR NASIONAL	152.152.104.712	108.678.780.853
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	302.686.686	256.598.068
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	227.111.413.322	173.340.941.042
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	878.410.028	544.904.636
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	12.903.122.585	17.340.952.550
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	16.260.345.536	13.613.091.866
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	446.582.121	324.722.414

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
80	114	SEKRETARIAT KABINET	1.899.303.426	2.121.375.980
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	187.822.279	365.056.529
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	4.849.642.361	5.547.844.072
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	4.383.256.789	4.038.506.808
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	231.005.071	157.932.096
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	4.672.748.150	2.438.620
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	370.324.846	28.853.410
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	1.425.205.930	179.320.949
JUMLAH PADA K/L			82.262.262.310.961	80.120.283.362.776
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	2.039.495.859.264	185.776.241.765
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-
JUMLAH PADA BUN			2.039.495.859.264	185.776.241.765
TOTAL			84.301.758.170.225	80.306.059.604.541

14. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BUMN

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN) NERACA PER 31 DESEMBER 2017

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
Perum																		
1	Perum Perhutani	Audited 2017	1.944.292	2.133.028	4.077.320	713.891	1.810.496	2.524.387	2.586.303	(1.334.148)	-	(874.769)	1.188.059	1.565.445	(12.512)	1.552.933	1,00	1.565.445
2	Perum Perikanan Indonesia	Audited 2017	595.081	206.146	801.228	178.398	224.631	403.029	24.498	316.936	-	245	56.520	398.199	-	398.199	1,00	398.199
3	Perum Bulog	Audited 2017	23.624.494	5.732.556	29.357.050	16.628.948	1.086.836	17.715.784	12.522.387	-	-	(376.890)	(450.128)	11.695.368	(54.102)	11.641.266	1,00	11.695.368
4	Perum Jasa Tirta I	Audited 2017	479.754	280.174	759.928	117.859	18.985	136.844	31.701	4.186	-	730	586.467	623.084	-	623.084	1,00	623.084
5	Perum Jasa Tirta II	Audited 2017	665.600	468.263	1.133.863	141.555	140.380	281.935	164.548	-	-	(104.324)	791.704	851.928	-	851.928	1,00	851.928
6	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Audited 2017	376.045	93.214	469.259	266.766	25.705	292.471	43.749	-	-	(1.487)	134.029	176.291	-	176.291	1,00	176.291
7	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2017	2.170.617	2.494.784	4.665.401	947.188	1.361.131	2.308.319	363.573	(64.059)	-	(28.871)	2.075.502	2.346.146	10.936	2.357.082	1,00	2.346.146
8	Perum Produksi Film Negara	Audited 2017	6.187	30.209	36.396	20.803	230	21.033	40.000	14.904	-	-	(39.541)	15.363	-	15.363	1,00	15.363
9	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Audited 2017	114.845	65.291	180.136	42.203	105.697	147.900	9.116	32.033	-	(54.173)	45.323	32.300	(64)	32.236	1,00	32.300
10	Perum Perummas	Audited 2017	7.343.089	655.342	7.998.430	2.344.160	2.595.018	4.939.178	1.000	1.960.375	-	237.339	847.849	3.046.563	12.689	3.059.252	1,00	3.046.563
11	Perum Damri	Audited 2017	145.763	1.067.628	1.213.391	138.010	312.404	450.414	19.700	317.565	310.795	(36.101)	151.018	762.977	-	762.977	1,00	762.977
12	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Audited 2017	107.329	158.980	266.308	128.426	112.478	240.904	231.769	270.328	-	3.612	(480.305)	25.404	-	25.404	1,00	25.404
13	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	Audited 2017	3.104.795	2.103.730	5.208.526	909.440	30.808	940.248	473.465	551.584	975.506	29.778	2.237.943	4.268.277	-	4.268.277	1,00	4.268.277
14	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Audited 2017	-	-	14.678.143	-	-	3.554.268	7.638.733	-	-	211.345	3.273.783	11.123.861	14	11.123.875	1,00	11.123.861
SUB TOTAL (A)			40.677.892	15.489.345	70.845.379	22.577.649	7.824.799	33.956.715	24.150.543	2.069.703	1.286.301	(993.565)	10.418.224	36.931.207	(43.039)	36.888.168	14	36.931.207
Perusahaan Negara																		
15	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2017	3.352.229	8.655.720	12.007.949	3.148.900	2.994.299	6.143.200	1.027.425	25.221	-	3.346.592	993.162	5.392.401	472.349	5.864.750	1,00	5.392.401
16	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2017	514.062	322.874	836.936	278.971	101.726	380.697	350.537	-	-	5.648	100.054	456.239	-	456.239	1,00	456.239
17	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Unaudited 2017	14.861.505	99.453.767	114.315.272	22.015.416	39.676.726	61.692.142	34.059.877	-	-	20.997.553	(7.000.606)	48.056.824	4.566.306	52.623.130	1,00	48.056.824
18	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2017	48.455.634	80.032.392	128.488.026	36.863.153	29.021.158	65.884.311	12.899.908	-	-	29.212.273	20.316.337	62.428.518	175.197	62.603.715	1,00	62.428.518
19	PT BioFarma (Persero)	Audited 2017	1.964.087	4.485.362	6.449.449	579.556	219.937	799.493	2.000.000	-	-	1.874.048	1.775.908	5.649.956	-	5.649.956	1,00	5.649.956
20	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Audited 2017	3.662.090	2.434.059	6.096.149	2.369.507	1.154.121	3.523.628	555.400	77.521	-	(68.516)	1.945.868	2.510.273	62.248	2.572.521	0,90	2.259.999
21	PT Berdikari (Persero)	Audited 2017	532.582	138.648	671.230	555.840	38.907	594.747	75.000	-	-	4.230	(2.747)	76.483	-	76.483	1,00	76.483
22	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2017	422.942	292.674	715.617	725.700	1.203.158	1.928.859	534.000	1.008	-	-	(1.748.250)	(1.213.242)	-	(1.213.242)	1,00	-
23	PT Pertani (Persero)	Audited 2017	1.161.991	274.014	1.436.005	383.571	644.626	1.028.197	1.021.315	37.222	-	20.277	(671.059)	407.755	53	407.808	1,00	407.755
24	PT Garam (Persero)	Audited 2017	439.940	645.389	1.085.329	215.923	10.173	226.096	600.000	-	-	-	259.233	859.233	-	859.233	1,00	859.233
25	PT Indofarma (Persero) Tbk	Audited 2017	930.982	598.893	1.529.875	893.289	110.176	1.003.465	309.927	81.120	-	51	135.311	526.409	1	526.410	0,81	424.601
26	PT Pertamina (Persero)	Audited 2017	234.201.648	459.639.799	693.841.446	127.581.367	243.460.635	371.042.002	181.774.153	37.067	12.453	6.613.332	127.504.238	315.941.243	6.858.201	322.799.444	1,00	315.941.243
27	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2017	218.675	318.813	537.488	70.941	34.613	105.554	100.106	-	-	(28.732)	360.559	431.933	1	431.934	1,00	431.933
28	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited 2017	54.636	14.195	68.831	15.182	29.470	44.652	15.555	-	-	-	8.611	24.166	13	24.178	1,00	24.166
29	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2017	172.836	9.611.519	9.784.355	177.046	1.135.287	1.312.333	101.700	82	-	8.519.325	(149.084)	8.472.023	-	8.472.023	1,00	8.472.023
30	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Audited 2017	500.435	1.249.241	1.749.676	186.364	135.872	322.236	660.000	297.808	-	(4.149)	473.781	1.427.440	-	1.427.440	1,00	1.427.440
31	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Audited 2017	24.495.434	60.763.877	85.259.312	6.322.324	35.760.692	42.083.016	4.660.767	3.852.229	-	(422.804)	34.831.917	42.922.109	254.187	43.176.296	0,57	24.452.725
32	PT Sarinah (Persero)	Audited 2017	95.340	246.171	341.511	89.638	32.657	122.295	46.850	181	-	-	172.145	219.177	39	219.216	1,00	219.177
33	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2017	961.716	2.238.098	3.199.814	274.036	889.321	1.163.357	156.200	-	-	(21.501)	1.899.502	2.034.201	2.256	2.036.456	1,00	2.034.201
34	PT Bhanda Ghara Rekasa (Persero)	Audited 2017	536.404	429.353	965.758	358.207	135.110	493.316	250.000	-	-	(1.442)	223.883	472.441	-	472.441	1,00	472.441
35	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2017	3.878.650	3.990.518	7.869.168	3.813.550	745.416	4.558.966	455.023	-	-	1.413.186	1.473.355	3.341.564	(31.361)	3.310.203	1,00	3.341.564
36	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Audited 2017	93.797.251	1.241.160.406	1.334.957.657	139.074.658	326.466.395	465.541.053	109.826.526	141.364	20.729.901	618.462.276	119.758.355	868.918.422	498.182	869.416.604	1,00	868.918.422
37	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Audited 2017	625.011	1.391.623	2.016.634	476.471	141.065	617.536	363.945	111.968	-	(4.678)	927.863	1.399.098	-	1.399.098	0,73	1.023.440
38	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2017	62.427	187.606	250.033	29.074	19.780	48.854	25.863	-	-	656	174.659	201.179	-	201.179	0,51	102.782
39	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2017	286.849	129.825	416.675	41.243	104	41.347	150.000	-	-	-	225.328	375.328	-	375.328	0,60	225.197

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN) NERACA PER 31 DESEMBER 2017

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
40	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Audited 2017	105.829	78.771	184.600	30.336	26.124	56.460	40.000	-	-	(257)	88.396	128.140	-	128.140	0,60	76.884
41	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2017	13.801.819	35.161.684	48.963.503	8.803.577	9.720.874	18.524.451	593.152	1.458.258	-	130.224	26.733.361	28.914.995	1.524.057	30.439.052	0,51	14.749.539
42	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2017	1.123.602	3.936.735	5.060.337	668.828	978.649	1.647.477	992.480	1.247.473	-	(44.544)	1.217.417	3.412.826	34	3.412.860	0,76	2.579.073
43	PT Semen Kumpang (Persero)	Audited 2017	10.629	597.866	608.495	22.235	578.337	600.572	133.713	-	-	-	(125.790)	7.923	-	7.923	0,61	4.871
44	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2017	108.507	173.807	282.314	132.099	36.308	168.406	14.400	(5.319)	-	127.438	(22.611)	113.907	-	113.907	1,00	113.907
45	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2017	47.561.000	150.923.000	198.484.000	45.376.000	40.978.000	86.354.000	5.040.000	2.390.000	-	387.000	84.896.000	92.713.000	19.417.000	112.130.000	0,52	48.294.202
46	PT PAL Indonesia (Persero)	Unaudited 2017	3.298.474	2.787.351	6.085.825	1.801.371	3.674.400	5.475.771	3.885.661	-	-	213.665	(3.489.231)	610.095	(40)	610.054	1,00	610.095
47	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Audited 2017	236.839	519.218	756.057	66.009	276.170	342.178	56.694	400.000	-	1.864	(44.679)	413.879	-	413.879	1,00	413.879
48	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Audited 2017	1.354.187	684.904	2.039.091	3.248.383	269.591	3.517.974	976.600	635	-	(496)	(2.455.622)	(1.478.883)	-	(1.478.883)	1,00	-
49	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Audited 2017	183.029	370.506	553.535	372.687	513.843	886.530	240.936	51	-	130.137	(710.888)	(339.764)	6.769	(332.995)	1,00	-
50	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2017	37.463.082	55.781.647	93.244.729	15.125.792	12.111.663	27.237.455	54.177.941	(18.199.606)	-	12.767.071	4.532.291	53.277.697	12.729.577	66.007.274	1,00	53.277.697
51	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Audited 2017	13.841.951	41.899.751	55.741.702	18.451.089	12.188.756	30.639.845	13.379.639	1.654.712	-	18.325.513	(8.174.254)	25.185.610	(83.754)	25.101.856	0,80	20.148.488
52	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Audited 2017	316.800	419.155	735.955	413.238	96.336	509.574	340.916	9.564	-	296.127	(420.116)	226.491	(110)	226.382	1,00	226.491
53	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2017	17.941	24.512	42.452	13.166	27.513	40.679	27.200	-	-	-	(25.426)	1.774	-	1.774	1,00	1.774
54	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Audited 2017	1.158.603	868.381	2.026.984	1.704.425	108.276	1.812.701	350.000	-	-	709.050	(846.524)	212.525	1.757	214.283	1,00	212.525
55	PT Barata Indonesia (Persero)	Audited 2017	2.183.410	735.837	2.919.247	1.401.315	517.869	1.919.184	762.915	3.221	-	353.218	(119.292)	1.000.063	-	1.000.063	1,00	1.000.063
56	PT Dahana (Persero)	Audited 2017	997.178	494.900	1.492.079	685.143	5.824	690.967	250.000	6.398	-	37.382	485.611	779.390	21.721	801.112	1,00	779.390
57	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2017	4.015.558	1.423.362	5.438.920	3.838.572	817.045	4.655.618	175.001	-	-	281.581	216.359	672.941	110.362	783.302	1,00	672.941
58	PT Pindad (Persero)	Audited 2017	5.350.860	610.675	5.961.535	3.029.645	1.627.720	4.657.365	1.367.542	-	-	(306.968)	243.596	1.304.170	(0)	1.304.170	1,00	1.304.170
59	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2017	10.333.089	3.083.326	13.416.415	7.566.110	2.094.519	9.660.629	19.803.942	115.849	-	1.710.339	(17.874.345)	3.755.785	-	3.755.785	1,00	3.755.785
60	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2017	24.817.671	3.515.277	28.332.948	17.633.289	4.829.741	22.463.031	356.085	2.588.834	-	468.500	2.445.826	5.859.246	10.672	5.869.917	0,51	2.988.215
61	PT Amarta Karya (Persero)	Audited 2017	396.245	228.157	624.403	228.664	232.134	460.799	11.250	33.034	-	213.162	(93.842)	163.604	-	163.604	1,00	163.604
62	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2017	2.974.823	1.341.601	4.316.423	2.366.197	893.462	3.259.659	161.555	-	-	158.591	725.710	1.045.855	10.909	1.056.764	1,00	1.045.855
63	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2017	18.987.065	60.205.708	79.192.773	24.997.940	35.835.393	60.833.333	3.628.936	3.997.085	-	(653.197)	8.124.829	15.097.653	3.261.787	18.359.440	0,70	10.568.357
64	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2017	52.427.017	45.468.743	97.895.761	52.309.198	22.831.738	75.140.936	1.357.390	5.467.018	-	500.948	6.681.081	14.006.438	8.748.387	22.754.825	0,66	9.249.852
65	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2017	34.910.108	10.773.666	45.683.774	25.975.617	5.076.332	31.051.950	896.995	6.545.449	-	1.187.875	4.003.198	12.633.516	1.998.308	14.631.825	0,65	8.218.102
66	PT Utama Karya (Persero)	Audited 2017	15.578.134	33.137.500	48.715.634	14.395.250	25.775.296	40.170.546	6.100.000	-	-	467.494	1.974.835	8.542.329	2.759	8.545.088	1,00	8.542.329
67	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2017	28.907.849	11.874.932	41.782.781	20.699.815	6.839.856	27.539.670	619.990	4.709.945	-	2.060.811	4.062.975	11.453.720	2.789.390	14.243.110	0,51	5.841.397
68	PT Industri Karet Api (Persero)	Audited 2017	5.076.139	833.948	5.910.087	3.396.681	1.044.708	4.441.389	1.251.843	-	-	364.019	(158.545)	1.457.317	11.381	1.468.698	1,00	1.457.317
69	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Audited 2017	38.387	45.995	84.382	9.046	22.252	31.298	19.000	-	-	(6)	34.090	53.084	-	53.084	1,00	53.084
70	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2017	2.209.548	6.297.595	8.507.143	1.823.138	1.779.782	3.602.920	1.700.000	-	525.885	(127.153)	2.719.349	4.818.081	86.143	4.904.224	1,00	4.818.081
71	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2017	23.781.639	23.438.449	47.220.088	5.072.948	28.199.222	33.272.171	1.444.029	(290.771)	-	-72.366	12.295.268	13.376.160	571.758	13.947.918	1,00	13.376.160
72	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2017	4.429.657	20.979.246	25.408.904	3.347.965	11.077.071	14.425.036	1.016.953	66.881	-	1.076.483	7.492.085	9.654.402	1.329.465	10.983.868	1,00	9.654.402
73	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2017	2.421.142	5.921.000	8.342.143	956.560	1.549.275	2.505.835	3.112.085	1.466	-	103.664	2.595.088	5.812.303	24.005	5.836.308	1,00	5.812.303
74	PT Indah Karya (Persero)	Audited 2017	206.619	213.320	419.939	84.108	189.574	273.682	7.000	-	-	97.782	41.475	146.257	-	146.257	1,00	146.257
75	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2017	73.144	48.859	122.003	55.591	32.011	87.601	15.000	-	-	(8.263)	27.665	34.402	-	34.402	1,00	34.402
76	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2017	5.897.001	19.154.808	25.051.810	4.268.030	7.382.319	11.650.349	6.414.412	255.097	-	213.320	6.512.334	13.395.163	6.298	13.401.461	1,00	13.395.163
77	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2017	7.355.424	25.296.535	32.651.959	4.101.746	6.512.079	10.613.826	7.000.000	4.752.112	552.274	(239.087)	9.972.512	22.037.811	323	22.038.134	1,00	22.037.811
78	PT Virama Karya (Persero)	Audited 2017	228.202	111.048	339.251	180.690	15.369	196.059	25.000	1.051	-	109.827	7.314	143.192	-	143.192	1,00	143.192
79	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2017	365.427	116.962	482.389	137.468	241.177	378.646	50.000	-	-	(5.812)	59.555	103.743	-	103.743	1,00	103.743
80	PT Indra Karya (Persero)	Audited 2017	68.087	89.731	157.818	63.456	29.931	93.386	2.000	-	-	60.299	2.133	64.431	-	64.431	1,00	64.431

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN) NERACA PER 31 DESEMBER 2017

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	Saham Negara (%)	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13		16=12x15
81	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2017			709.330.084			608.426.780	9.054.807	14.568.468	-	14.655.509	60.313.505	98.592.289	2.311.015	100.903.304	0,60	59.155.373
82	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2017			1.124.700.847			954.694.715	11.666.667	17.316.192	-	26.378.462	111.357.522	166.718.843	3.287.289	170.006.132	0,60	100.031.306
83	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2017			1.126.248.442			958.900.948	6.167.291	354.910	-	16.398.919	143.827.697	166.748.817	598.677	167.347.494	0,57	95.497.047
84	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2017			261.365.267			239.701.833	5.295.000	2.054.454	-	2.802.091	11.511.889	21.663.434	-	21.663.434	0,60	12.998.060
85	PT ASABRI (Persero)	Unaudited 2017	32.443.823	12.582.822	45.026.645	3.357.478	39.158.353	42.515.831	200.000	-	-	(963.106)	3.273.921	2.510.815	-	2.510.815	1,00	2.510.815
86	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Audited 2017			11.752.707			8.723.222	425.000	-	-	80.812	2.513.885	3.019.697	9.789	3.029.485	1,00	3.019.697
87	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Unaudited 2017			45.105.929			38.476.218	235.000	-	-	3.988.490	2.400.829	6.624.319	5.392	6.629.711	1,00	6.624.319
88	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Audited 2017			16.180.877			6.958.737	400.000	6.211.000	-	(23.956)	2.634.703	9.221.747	393	9.222.139	1,00	9.221.747
89	PT Jasa Raharja (Persero)	Audited 2017			15.048.402			4.108.975	5.000.000	-	-	3.073	5.883.419	10.886.491	52.935	10.939.427	1,00	10.886.491
90	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Audited 2017			8.087.703			5.204.277	878.358	270	-	851.092	1.153.691	2.883.411	16	2.883.427	1,00	2.883.411
91	PT Taspen (Persero)	Audited 2017			230.378.551			216.419.901	100.000	-	-	(121.686)	13.972.831	13.951.145	7.506	13.958.651	1,00	13.951.145
92	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2017	13.368.376	37.616.706	50.985.081	26.037.172	12.247.077	38.284.249	17.752.310	318.737	-	58.672	(6.007.216)	12.122.503	578.330	12.700.833	0,61	7.338.963
93	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Unaudited 2017	2.985.523	3.731.291	6.716.814	787.420	147.322	934.742	7.069.092	564.951	-	-	(1.849.837)	5.780.206	1.866	5.782.072	1,00	5.780.206
94	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2017	12.248.380	21.290.026	33.538.406	6.539.213	13.899.379	20.438.592	6.668.743	2.000.968	-	(459.750)	4.677.415	12.887.376	212.438	13.099.814	1,00	12.887.376
95	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Audited 2017			4.356.781			3.210.140	272.500	-	-	(7.069)	21.112	286.543	860.098	1.146.641	1,00	286.543
96	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2017	428.366	315.004	743.370	118.730	45.990	164.720	255.000	-	-	(342)	323.992	578.651	-	578.651	1,00	578.651
97	PT Danareksa (Persero)	Audited 2017			3.644.235			2.407.527	701.480	85.927	-	441.888	7.262	1.236.557	151	1.236.708	1,00	1.236.557
98	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2017	1.536.860	24.791	1.561.652	1.256.275	13.167	1.269.442	102.000	-	-	(358)	189.204	290.847	1.363	292.210	1,00	290.847
99	PT Pemodaln Nasional Madani (Persero)	Audited 2017			11.393.258			9.578.307	1.300.000	-	-	(16.045)	521.756	1.805.711	9.240	1.814.951	1,00	1.805.711
100	PT PANN (Persero)	Unaudited 2017			897.686			4.497.314	45.997	192.066	-	-	(3.837.690)	(3.599.627)	(1)	(3.599.628)	0,93	-
101	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2017	39.661.960	9.025.132	48.687.092	24.118.917	6.357.915	30.476.832	6.250.000	-	-	5.721.935	6.236.502	18.208.437	1.823	18.210.260	1,00	18.208.437
102	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2017	1.375.474	1.697.296	3.072.770	412.679	430.408	843.087	300.000	1.182	-	787.285	1.142.782	2.231.249	(1.566)	2.229.683	0,95	2.119.686
103	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2017	824.488	522.608	1.347.096	257.959	63.725	321.684	25.000	105	-	206.451	794.641	1.026.197	(785)	1.025.412	0,85	873.499
104	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2017	2.053.445	4.372.593	6.426.037	411.214	136.848	548.062	2.989.250	875.980	794.289	(7.285)	1.167.447	5.819.681	58.293	5.877.975	1,00	5.819.681
105	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Audited 2017	523.388	349.281	872.669	244.931	216.561	461.492	1.635.663	380.745	-	-	(1.605.239)	411.169	9	411.177	0,73	301.099
106	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2017	6.038.931	3.441.437	9.480.368	3.715.530	1.055.147	4.770.677	2.996.688	(305.768)	-	462.236	1.545.688	4.698.844	10.847	4.709.691	1,00	4.698.844
107	PT Iglas (Persero)	Audited 2017	19.828	100.041	119.869	1.097.328	-	1.097.328	47.007	94.583	-	-	(1.119.049)	(977.459)	-	(977.459)	0,64	-
108	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Unaudited 2017	84.582	420.333	504.915	258.882	(4.370)	254.512	198.870	34.551	-	195.758	(178.776)	250.403	-	250.403	1,00	250.403
109	PT Istaka Karya (Persero)	Audited 2017	187.928	261.143	449.071	278.313	-	278.313	50.000	-	-	750.560	(629.803)	170.758	-	170.758	1,00	170.758
110	PT Primsima (Persero)	Audited 2017	49.606	69.336	118.943	93.955	13.550	107.505	13.000	2.276	-	52.580	(56.419)	11.437	-	11.437	0,53	6.038
111	PT Survai Udara Panas (Persero)	Audited 2017	3.774	45.745	49.519	141.990	23.940	165.930	13.000	-	-	(24.696)	(104.715)	(116.411)	-	(116.411)	1,00	-
112	PT Vanua Tirta Prakasya (Persero)	Audited 2017	64.558	20.062	84.620	51.778	27.201	78.979	11.000	-	-	206	(5.565)	5.641	-	5.641	1,00	5.641
113	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Unaudited 2017	105.213	676.440	781.653	1.559.947	141.612	1.701.459	796.994	-	-	-	(1.718.800)	(919.806)	-	(919.806)	0,97	-
114	PT Kertas Leces (Persero)	Audited 2015	42.188	937.928	980.116	614.837	737.665	1.352.502	415.073	1.976	-	618.400	(1.407.835)	(372.386)	-	(372.386)	1,00	-
115	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	Audited 2015	117.189	1.204.513	1.321.702	6.746.581	3.172.610	9.919.191	1.964.556	-	-	-	(10.562.045)	(8.597.489)	-	(8.597.489)	0,96	-
	SUB TOTAL (B)		925.960.953	2.647.077.835	7.141.529.557	719.494.372	1.009.082.066	4.789.885.331	581.113.676	66.624.801	22.614.802	803.842.986	804.066.215	2.278.202.480	73.441.746	2.351.644.226	91	1.998.472.945
	TOTAL (A + B)		966.638.845	2.662.567.180	7.212.374.937	742.072.021	1.016.906.865	4.823.842.046	605.264.219	68.694.505	23.901.103	802.849.421	814.424.439	2.315.133.687	73.398.707	2.388.532.394	105	2.035.404.152

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017**

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
Perum																
1	Perum Perhutani	Audited 2017	3.619.067	3.401.908	217.159	306.568	-	523.727	21.077	502.650	96.659	405.991	(270.613)	135.378	405.948	135.337
2	Perum Perikanan Indonesia	Audited 2017	603.022	599.070	3.953	15.962	7.848	12.066	4.374	7.693	(192)	7.885	99	7.984	7.885	7.984
3	Perum Bulog	Audited 2017	32.879.655	31.326.958	1.552.697	805.153	264.588	2.093.261	1.969.166	124.095	(706.885)	830.980	(171.346)	659.634	876.967	705.787
4	Perum Jasa Tirta I	Audited 2017	528.502	394.098	134.403	53.534	30.172	157.765	-	157.765	34.435	123.330	(396)	122.934	123.330	122.934
5	Perum Jasa Tirta II	Audited 2017	828.700	622.390	206.310	36.928	9.588	233.650	-	233.650	59.098	174.552	10.616	185.168	174.552	185.168
6	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Audited 2017	234.515	210.480	24.035	6.285	9.946	20.374	11.029	9.344	6.597	174.552	(747)	5.850	6.597	5.850
7	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Audited 2017	3.478.382	2.980.285	498.098	231.470	80.147	649.421	96.999	552.421	146.180	406.241	(43.457)	362.785	403.924	360.676
8	Perum Produksi Film Negara	Audited 2017	16.344	14.381	1.963	510	1.528	945	-	945	(3)	948	53	1.001	948	1.001
9	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	Audited 2017	286.572	287.701	(1.128)	11.517	6.171	4.218	-	4.218	1.385	2.832	(7.781)	(4.949)	2.831	(4.950)
10	Perum Perumnas	Audited 2017	2.337.390	1.827.537	509.853	65.054	75.381	499.526	222.020	277.506	44.127	233.379	(2.129)	231.250	233.398	231.269
11	Perum Damri	Audited 2017	1.155.152	1.151.172	3.980	18.092	6.145	15.927	-	15.927	8.783	7.144	(28.684)	(21.540)	7.144	(21.540)
12	Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Audited 2017	255.196	255.077	119	6.948	1.431	5.636	979	4.657	824	3.833	2.135	5.967	3.833	5.967
13	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Audited 2017	2.735.999	1.712.779	1.023.221	-	-	1.023.221	-	1.023.221	221.375	801.846	57.831	859.677	801.845	859.676
14	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerimaan Indonesia	Audited 2017	2.786.354	2.315.459	470.894	136.688	10.426	597.157	-	597.157	114.656	482.501	(25.141)	457.360	482.501	457.360
SUB TOTAL (A)			51.744.850	47.099.294	4.645.556	1.694.709	503.371	5.836.893	2.325.645	3.511.248	23.188	3.488.060	(479.561)	3.008.499	3.531.703	3.052.520
Perusahaan Negara																
15	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Audited 2017	5.157.173	4.865.396	291.777	386.203	54.412	623.569	249.352	374.217	20.883	353.334	624.994	978.327	299.132	889.835
16	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Audited 2017	377.520	367.510	10.011	14.170	6.285	17.896	-	17.896	3.435	14.461	5.648	20.109	14.461	20.109
17	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Unaudited 2017	35.285.827	31.122.633	4.163.195	1.271.768	815.708	4.819.255	2.431.362	2.187.893	948.748	1.239.145	285.805	1.524.950	1.216.600	1.477.538
18	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Audited 2017	58.942.682	51.234.471	7.708.211	204.313	245.797	7.666.727	3.107.848	4.558.879	1.483.483	3.075.396	(294.595)	2.780.801	3.021.139	2.726.544
19	PT BioFarma (Persero)	Audited 2017	3.011.571	2.328.913	682.657	115.158	76.110	21.705	8.071	713.634	188.278	525.356	(27.239)	498.117	525.356	498.117
20	PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Audited 2017	6.127.479	5.717.557	409.922	125.739	-	535.661	85.952	449.710	118.002	331.708	(7.841)	323.867	326.786	318.945
21	PT Berdikari (Persero)	Audited 2017	113.819	202.866	(89.048)	307.626	27.431	191.147	11.522	179.626	(11.764)	191.390	2.636	194.026	191.390	194.026
22	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Audited 2017	510.447	536.317	(25.871)	110.111	18.502	65.738	58.193	7.545	(7.481)	15.026	-	15.026	15.026	15.026
23	PT Pertani (Persero)	Audited 2017	1.742.011	1.732.542	9.469	50.203	2.728	56.944	36.618	20.326	(5.194)	25.520	(1.918)	23.601	25.518	23.600
24	PT Garam (Persero)	Audited 2017	458.622	246.160	212.462	33.571	8.426	237.608	257	237.351	54.900	182.451	(2.675)	179.776	182.451	179.776
25	PT IndoFarma (Persero) Tbk	Audited 2017	1.631.317	1.620.298	11.019	854	16.158	(4.285)	52.532	(56.817)	(10.532)	(46.285)	(3.062)	(49.347)	(46.283)	(49.345)
26	PT Pertamina (Persero)	Audited 2017	574.967.606	511.176.263	63.791.343	4.410.791	11.377.417	56.824.716	8.968.752	47.855.964	13.691.712	34.164.253	(1.948.804)	32.215.449	33.997.970	31.630.099
27	PT TWC BP dan RB (Persero)	Audited 2017	370.057	233.801	136.256	16.100	362	151.994	243	151.751	44.603	107.148	(12.146)	95.002	107.148	95.002
28	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited 2017	28.754	30.371	(1.616)	6.137	391	4.130	2.063	2.067	-	2.067	1.130	3.198	2.067	3.198
29	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	Audited 2017	597.808	575.514	22.295	29.559	15.546	36.308	39.304	(2.996)	(3.005)	9	(10.283)	(10.273)	9	(10.273)
30	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Audited 2017	246.385	176.841	69.544	42.727	47.100	65.171	-	65.171	1.980	63.192	(293)	62.898	63.192	62.898
31	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Audited 2017	39.745.017	34.958.233	4.785.784	1.334.096	462.126	5.657.754	1.969.792	3.687.961	1.710.020	1.977.941	(20.414)	1.957.528	1.915.871	1.896.461
32	PT Sarinah (Persero)	Audited 2017	323.505	310.411	13.094	2.113	4.850	10.357	264	10.093	4.508	5.585	(1.103)	4.483	5.581	4.478
33	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Audited 2017	1.299.764	1.300.686	(922)	17.755	18.104	(1.270)	-	(1.270)	(4.124)	2.854	(567)	2.287	2.293	1.607
34	PT Bhandia Ghara Rekso (Persero)	Audited 2017	1.127.300	1.008.958	118.341	5.741	3.080	121.003	25.544	95.459	34.508	60.951	(728)	60.224	60.951	60.224
35	PT Pos Indonesia (Persero)	Audited 2017	4.328.499	4.569.717	(241.218)	729.623	24.027	464.377	65.014	399.363	44.270	355.093	1.341.787	1.696.880	354.975	1.696.762
36	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Audited 2017	301.033.458	275.474.094	25.559.364	4.476.783	2.935.144	27.101.003	18.556.931	8.544.072	4.115.955	4.428.117	(10.697.667)	(6.269.550)	4.410.210	(6.287.457)
37	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Audited 2017	710.425	442.285	268.140	11.228	58.230	221.138	9.746	211.392	48.304	163.088	4.333	167.421	163.088	167.421
38	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	Audited 2017	94.934	44.931	50.004	3.045	8	53.040	-	53.040	4.549	48.490	90	48.580	48.490	48.580
39	PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Audited 2017	150.105	104.770	45.335	5.744	-	51.079	42	51.037	3.923	47.113	-	47.113	47.113	47.113
40	PT Kawasan Industri Makassar (Persero)	Audited 2017	47.062	28.744	18.318	4.976	-	23.293	-	23.293	6.286	17.008	257	17.264	17.008	17.264
41	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2017	27.813.664	24.687.772	3.125.892	386.740	9.637	3.502.994	756.448	2.746.546	703.520	2.043.026	(335.432)	1.707.594	2.014.015	1.688.438
42	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	Audited 2017	1.551.525	1.363.917	187.608	22.085	-	209.693	746	208.947	62.299	146.648	(11.931)	134.718	146.644	134.713
43	PT Semen Kumpang (Persero)	Audited 2017	13.033	5.424	7.609	370	-	7.979	2.783	5.196	-	5.196	-	5.196	5.196	5.196
44	PT Balai Pustaka (Persero)	Audited 2017	48.183	43.176	5.007	532	37	5.502	1.370	4.132	968	3.165	128.128	131.292	3.165	131.292
45	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2017	128.256.000	84.093.000	44.163.000	2.585.000	1.320.000	45.428.000	2.769.000	42.659.000	9.958.000	32.701.000	(2.332.000)	30.369.000	22.145.000	19.952.000

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017**

(dalam jutaan rupiah)																
NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10 + 11	13	14
46	PT PAL Indonesia (Persero)	Unaudited 2017	1.252.698	1.124.534	128.163	51.189	43.614	135.739	95.172	40.566	40.095	471	-	471	466	466
47	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Audited 2017	213.594	188.677	24.917	8.284	4.293	28.908	-	28.908	5.447	23.461	(2.310)	21.151	23.461	21.151
48	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Audited 2017	468.873	565.141	(96.268)	134.457	14.669	23.520	23.681	(161)	8.613	(8.774)	10.149	1.375	(8.774)	1.375
49	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Audited 2017	105.528	148.190	(42.662)	21.676	39.528	(60.513)	23.426	(83.939)	(8.560)	(75.378)	5.555	(69.823)	(76.487)	(70.931)
50	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Audited 2017	47.184.283	37.938.016	9.246.267	1.306.134	361.172	10.191.229	911.687	9.279.542	2.474.385	6.805.157	(538.502)	6.266.655	4.944.899	4.672.884
51	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Audited 2017	19.393.684	18.950.325	443.358	522.431	738.984	226.805	1.328.871	(1.102.065)	50.257	(1.152.322)	1.328.081	175.759	(1.094.075)	232.761
52	PT Boma Bisma Indra (Persero)	Audited 2017	263.485	256.835	6.650	11.229	3.583	14.296	11.719	2.577	751	1.826	(5.152)	(3.326)	1.872	(3.372)
53	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	Audited 2017	24.874	24.843	31	2.215	1.540	706	-	706	389	317	457	774	317	774
54	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Audited 2017	1.308.680	1.229.285	79.415	31.320	21.347	89.388	65.449	23.939	17.328	6.611	16.931	23.542	6.370	23.301
55	PT Barata Indonesia (Persero)	Audited 2017	1.193.277	1.113.756	79.522	32.312	15.341	96.493	27.015	69.478	17.863	51.615	(5.951)	45.664	51.615	45.664
56	PT Dahana (Persero)	Audited 2017	1.550.434	1.405.457	144.977	33.386	7.501	170.863	16.346	154.516	29.259	125.258	1.927	127.185	125.885	127.813
57	PT LEN Industri (Persero)	Audited 2017	4.253.179	3.946.489	306.690	118.034	176.466	248.258	93.353	154.905	33.142	121.763	14.752	136.515	61.233	75.311
58	PT Pindad (Persero)	Audited 2017	2.456.126	2.246.929	209.197	119.073	95.740	232.530	123.713	108.816	16.752	92.064	(46.949)	45.115	92.069	45.120
59	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Audited 2017	5.655.685	5.476.544	179.140	164.674	93.434	250.380	151.633	98.747	30.585	68.162	(23.097)	45.065	68.162	45.065
60	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Audited 2017	15.387.120	13.679.448	1.707.672	-	305.627	1.402.045	444.763	957.282	440.222	517.060	7.520	524.579	515.415	522.935
61	PT Amarta Karya (Persero)	Audited 2017	216.737	193.861	22.876	405	106	23.175	15.892	7.283	5.475	1.809	(4)	1.805	1.809	1.805
62	PT Brantas Abipraya (Persero)	Audited 2017	4.116.329	3.649.222	467.107	-	-	467.107	85.928	381.179	109.906	271.273	(10.972)	260.301	270.151	259.179
63	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Audited 2017	35.092.196	30.936.776	4.155.420	903.276	539.374	4.519.323	1.268.870	3.250.452	1.156.796	2.093.656	(212.471)	1.881.185	2.202.556	1.988.011
64	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Audited 2017	45.212.898	37.853.264	7.359.633	798.186	1.605.089	6.552.730	1.932.084	4.620.646	419.074	4.201.572	(24.790)	4.176.782	3.881.712	3.856.922
65	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Audited 2017	26.176.403	23.976.842	2.199.561	909.504	968.700	2.140.365	677.973	1.462.391	106.276	1.356.115	(47.649)	1.308.466	1.202.069	1.158.684
66	PT Hutama Karya (Persero)	Audited 2017	18.346.073	17.058.162	1.287.911	331.260	239.381	1.379.790	189.574	1.190.216	19.054	1.071.162	(11.973)	1.059.189	1.071.038	1.059.065
67	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Audited 2017	21.502.260	18.976.904	2.525.356	801.655	881.496	2.445.515	653.253	1.792.262	68.409	1.723.853	84.593	1.808.446	1.453.141	1.522.097
68	PT Industri Kereta Api (Persero)	Audited 2017	2.580.166	2.370.614	209.552	61.349	58.029	212.872	116.041	96.831	23.880	72.951	(1.999)	70.953	69.247	67.249
69	PT PDI Pulau Batam (Persero)	Audited 2017	60.199	60.625	(426)	2.377	690	1.261	-	1.261	954	307	6	312	307	312
70	PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	Audited 2017	2.751.107	1.705.546	1.045.560	125.333	2.693	1.168.201	100.799	1.067.401	262.256	805.145	(12.250)	792.895	803.621	791.371
71	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Audited 2017	11.245.122	7.976.051	3.269.071	613.871	345.223	3.537.719	1.064.137	2.473.582	267.855	2.205.727	(126.677)	2.079.050	2.178.894	2.053.853
72	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Audited 2017	8.976.083	5.802.953	3.173.130	201.743	70.181	3.304.692	600.182	2.704.510	670.403	2.034.107	(50.675)	1.983.432	1.470.490	1.419.066
73	PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	Audited 2017	2.347.966	1.749.226	598.740	151.030	88.372	661.399	73.503	587.895	159.347	428.549	(7.560)	420.989	427.849	420.285
74	PT Indah Karya (Persero)	Audited 2017	104.858	82.634	22.224	413	966	21.671	503	21.168	2.072	19.096	193	19.290	19.096	19.290
75	PT Bina Karya (Persero)	Audited 2017	89.356	85.183	4.173	12.529	1.935	14.768	-	14.768	3.039	11.729	(1.901)	9.828	11.729	9.828
76	PT Angkasa Pura I (Persero)	Audited 2017	7.194.348	5.306.848	1.887.500	336.622	101.617	2.122.505	333.008	1.789.497	369.144	1.420.353	126.939	1.547.292	1.418.577	1.545.517
77	PT Angkasa Pura II (Persero)	Audited 2017	8.110.402	5.149.792	2.960.610	451.616	185.554	3.226.672	287.782	2.938.890	929.034	2.009.856	(75.474)	1.934.382	2.009.734	1.934.261
78	PT Virama Karya (Persero)	Audited 2017	354.837	304.492	50.345	2.517	1.822	51.040	8.538	42.502	13.232	29.270	31.095	28.270	31.095	28.270
79	PT Yodya Karya (Persero)	Audited 2017	296.068	261.538	34.530	1.063	919	34.674	3.215	31.458	7.227	24.231	(3.488)	20.743	24.231	20.743
80	PT Indra Karya (Persero)	Audited 2017	119.756	111.055	8.700	1.012	925	8.788	13	8.775	4.547	4.227	67.393	71.621	4.227	71.621
81	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2017	61.452.441	44.229.778	17.222.663	-	57.276	17.165.387	-	17.165.387	3.394.795	13.770.592	1.847.047	15.617.639	13.616.476	15.403.290
82	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Audited 2017	105.309.708	78.139.957	27.169.751	-	12.888	27.156.863	-	27.156.863	5.713.821	21.443.042	1.877.993	23.321.035	20.639.683	22.491.109
83	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2017	122.375.773	85.569.939	36.805.834	216.323	-	37.022.157	-	37.022.157	7.977.823	29.044.334	1.832.681	30.877.015	28.996.535	30.805.784
84	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Audited 2017	20.877.513	16.985.610	3.891.903	-	30.348	3.861.555	-	3.861.555	834.089	3.027.466	29.213	3.056.679	3.027.466	3.056.679
85	PT ASABRI (Persero)	Unaudited 2017	4.825.386	3.955.419	869.967	-	-	869.967	-	869.967	28.711	841.256	68.444	909.701	841.256	909.701
86	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Audited 2017	2.812.132	2.436.860	375.273	82.039	-	457.311	-	457.311	96.587	360.724	(128)	360.597	360.071	359.749
87	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Unaudited 2017	25.755.498	23.236.686	2.518.810	-	70.102	2.448.708	-	2.448.708	47.879	2.400.829	-	2.400.829	2.400.630	2.400.630
88	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Audited 2017	6.451.690	5.438.807	1.012.882	-	16.189	996.694	-	996.694	93.314	903.380	(58.274)	845.106	903.444	845.166
89	PT Jasa Raharja (Persero)	Audited 2017	6.925.501	4.342.429	2.583.071	-	-	2.583.071	-	2.583.071	459.893	2.123.178	63.931	2.187.109	2.116.505	2.186.669
90	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Audited 2017	3.257.708	2.956.657	301.050	-	137.159	163.891	-	163.891	8.012	155.879	320.869	476.747	155.881	476.749
91	PT Taspen (Persero)	Audited 2017	16.835.340	15.870.684	964.656	-	-	964.656	-	964.656	242.930	721.726	1.934.220	2.655.946	720.501	2.654.721
92	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Audited 2017	55.909.328	56.718.358	(809.030)	548.251	673.322	(934.101)	1.182.988	(2.117.090)	738.918	(2.856.007)	776.552	(2.079.455)	(2.898.739)	(2.056.072)
93	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Unaudited 2017	4.880.774	4.516.586	364.188	106.977	70.914	400.251	14.143	386.108	69.532	316.576	376	316.952	316.576	316.952
94	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Audited 2017	17.938.975	15.329.396	2.609.580	218.559	6.912	2.821.227	710.217	2.111.010	390.693	1.720.317	(244.086)	1.476.231	1.718.218	1.474.108

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017**

(dalam jutaan rupiah)

NO	BUMN	STATUS LAPORAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
			1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10 + 11	13	14
95	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Audited 2017	755.085	616.710	138.375	10.014	-	148.389	-	148.389	32.354	116.036	(6.894)	109.342	43.830	37.314
96	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Audited 2017	675.832	600.355	75.477	4.826	20.310	59.994	11	59.982	18.210	41.772	(4.943)	36.828	41.772	36.828
97	PT Danareksa (Persero)	Audited 2017	446.414	585.320	(138.906)	12.077	9.649	(136.478)	-	(136.478)	11.096	(147.574)	13.514	(134.060)	(147.587)	(134.072)
98	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	Audited 2017	42.168	51.878	(9.709)	20.705	865	10.130	-	10.130	(265)	10.394	(489)	9.906	10.310	9.822
99	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Audited 2017	2.235.400	2.165.545	69.855	-	146	69.709	-	69.709	33.038	36.671	(10.005)	26.666	35.385	25.380
100	PT PANN (Persero)	Unaudited 2017	187.185	280.055	(92.870)	-	-	(92.870)	-	(92.870)	(23.243)	(69.627)	-	(69.627)	(69.625)	(69.625)
101	PT Pegadaian (Persero)	Audited 2017	10.522.797	7.184.828	3.337.969	86.955	7.471	3.417.453	-	3.417.453	903.915	2.513.538	(120.161)	2.393.378	2.513.418	2.393.257
102	PT Sucofindo (Persero)	Audited 2017	2.219.765	1.879.203	340.561	38.696	50.545	328.713	74	328.639	91.973	236.665	(106.054)	130.612	236.396	130.343
103	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Audited 2017	1.204.380	1.048.409	155.971	13.955	18.399	151.528	1.149	150.379	40.414	109.965	(10.853)	99.112	109.294	98.441
104	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	Audited 2017	2.610.016	2.430.647	179.368	118.914	-	298.282	-	298.282	29.018	269.264	(14.831)	254.432	269.770	254.939
105	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Audited 2017	269.795	253.813	15.982	70.614	37.543	49.053	8.059	40.994	4.108	36.886	(221)	36.665	36.883	36.661
106	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Audited 2017	6.355.757	5.782.914	572.843	155.800	330.379	398.264	65.334	332.930	6.445	326.485	250.968	577.453	324.045	572.411
107	PT Iglas (Persero)	Audited 2017	825	6.696	(5.871)	4.615	26.311	(27.567)	46.439	(74.007)	(18.550)	(55.456)	-	(55.456)	(55.456)	(55.456)
108	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	Unaudited 2017	48.295	91.062	(42.767)	156.390	4.506	109.117	6.309	102.808	-	102.808	160.637	263.445	102.808	263.445
109	PT Istaka Karya (Persero)	Audited 2017	267.151	248.967	18.185	18.405	5.062	31.528	5.385	26.143	4.625	21.518	-	21.518	21.518	21.518
110	PT Primmisima (Persero)	Audited 2017	110.107	111.914	(1.807)	6.738	1.319	3.612	2.585	1.027	(336)	1.363	6.688	8.051	1.363	8.051
111	PT Survei Udara Penas (Persero)	Audited 2017	22.954	24.910	(1.956)	274	400	(2.082)	1.383	(3.465)	(1.592)	(1.873)	-	(1.873)	(1.873)	(1.873)
112	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Audited 2017	167.112	171.134	(4.022)	1.447	2.391	(4.965)	-	(4.965)	1.615	(6.581)	-	(6.581)	(6.581)	(6.581)
113	PT Kertas Kraft Aceh (Persero)	Unaudited 2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	PT Kertas Lece (Persero)	-	146.484	162.322	(15.838)	4.898	871	(11.811)	54.617	(66.428)	-	(66.428)	-	(66.428)	(66.428)	(66.428)
115	PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB TOTAL (B)		1.975.611.526	1.675.934.459	299.677.066	26.870.507	26.154.801	300.392.772	52.036.568	248.356.205	62.295.364	186.060.841	(4.251.015)	181.809.826	170.856.182	166.489.367
	TOTAL (A + B)		2.027.356.376	1.723.033.754	304.322.622	28.565.216	26.658.173	306.229.666	54.362.213	251.867.453	62.318.552	189.548.901	(4.730.576)	184.818.325	174.387.885	169.541.886

PENJELASAN MUTASI LAIN LAIN BUMN PADA KEMENTERIAN BUMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

No	Perusahaan Negara	Saldo Awal (Audited 2016)	Labo Th berjalan atribusi entitas pengendali	Labo komprehensif atribusi entitas pengendali	pendapatan komprehensif atribusi entitas pengendali	OCI Reval	OCI Non Reval	Dividen	PMN	Mutasi Ekuitas	saldo awal - Mutasi Ekuitas	Saldo Akhir ILKPN	Selish	Mutasi BPYBDS	PKBL	Selish karena Treasury Stock (ESDP)	selish saldo awal	Selish Restatement	Selish Pencatatan Dividen	Selish Pencatatan tambahan modal disetor	Selish Kurs Penjabaran Lap Keuangan	Selish karena Komponen LPE Lain	Selish yang Belum Dapat Dijelaskan
		1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7	8	9 = 3 + 7 + 8	10 = 1 + 9	11	12 = 11 - 10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 = 12 - 13 + 14 - 15 + 16 + 17 + 18 - 19 + 20 + 21
A	Perum																						
1	Perum Bulog	11.244.130	876.967	705.787	(171.180)		(171.180)	-		705.787	11.949.917	11.695.368	(254.549)	-	-	-	-	(254.549)	-	-	-	-	(0)
2	Perum Damsi	791.964	7.144	(21.540)	(4.247)		(26.684)	-		(26.684)	766.176	762.877	(3.199)	-	(94)	-	-	-	-	-	-	(3.105)	(0)
3	Perum Jaminan Kredit Indonesia	10.295.556	801.845	859.675	57.821		57.821	-		811.676	11.111.232	11.123.861	12.629	-	-	-	-	-	-	-	-	12.629	(0)
4	Perum Jasa Tirta I	506.183	123.530	(8.034)	(986)		(8.034)	-		119.600	623.084	623.084	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
5	Perum Jasa Tirta II	675.292	174.552	185.168	10.616		(8.532)	-		176.638	851.928	851.928	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
6	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	37.247	2.831	(4.950)	(7.781)		(4.950)	-		32.297	32.300	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0	(0)
7	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	3.841.874	482.501	457.360	(25.141)		(25.141)	-		457.360	4.299.234	4.268.277	(30.957)	-	-	-	-	-	-	(56.098)	-	25.141	(0)
8	Perum Pelatung Pelayaran Pemungutan Djakarta	19.437	3.833	5.967	2.135		2.135	-		5.967	25.404	25.404	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
9	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	170.441	6.597	5.850	(747)		(747)	-		5.850	176.291	176.291	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
10	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	2.023.299	403.924	380.678	(43.248)		(43.248)	-		320.631	2.343.930	2.346.146	2.216	-	-	-	-	-	1	-	-	2.215	(0)
11	Perum Perhutani	1.530.596	405.948	135.337	(270.611)		(270.611)	-		135.337	1.665.933	1.565.445	(100.488)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
12	Perum Perikanan Indonesia	414.555	7.885	1.984	98		98	-		7.884	422.539	398.199	(24.340)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
13	Perum Perindustrian	2.534.111	233.389	231.269	(2.129)		(2.129)	-		202.152	3.027.263	3.046.953	9.300	-	-	-	-	-	-	-	-	9.300	(0)
14	Perum Produksi Film Negara	14.641	948	1.001	53		53	-		1.001	15.642	15.363	(279)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
Total		34.403.328	3.531.703	3.052.520	(479.183)		(479.183)	-		2.917.545	37.320.871	36.931.207	(389.664)	-	(94)	-	(0)	(378.653)	9.300	(56.098)	-	36.880	(0)
B	Perusahaan Non Bank																						
1	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2.770.961	262.862	266.697	3.835		3.835	(47.958)		218.739	2.989.699	2.988.215	(1.484)	-	-	-	-	-	-	0	-	(1.484)	(0)
2	PT Amarta Karya (Persero)	172.955	1.809	1.805	(4)		(4)	-		1.805	174.760	163.604	(11.156)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4)	(0)
3	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	11.965.704						-			11.965.704		(11.965.704)	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.965.704)	-
4	PT Angkasa Pura I (Persero)	11.995.102	1.418.577	1.545.517	126.939		126.939	(140.000)		1.405.517	13.400.619	13.395.163	(5.456)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.456)	-
5	PT Angkasa Pura II (Persero)	19.927.415	2.009.234	1.934.261	(75.154)		(75.154)	-		1.944.261	21.431.676	22.037.811	606.135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	PT ASABRI (Persero)	1.601.114	841.256	909.701	68.444		68.444	-		909.701	2.510.815	2.510.815	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
7	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	5.798.031	269.770	254.939	(14.831)		(14.831)	-		110.946	5.818.977	5.819.681	704	-	-	-	-	-	-	-	-	704	(0)
8	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	2.691.017	360.071	359.749	(322)	4.483	(4.483)	-		359.749	3.019.697	3.019.697	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
9	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	5.406.736	2.400.630	2.400.630				-		2.228.637	7.635.573	6.624.319	(1.011.254)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
10	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	8.628.091	903.444	845.168	(58.278)		(58.278)	-		782.166	9.411.257	9.221.747	(189.510)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
11	PT Bakuam Perikanan Usaha Indonesia (Persero)	246.229	43.630	37.314	(6.315)		(6.315)	-		37.314	286.543	286.543	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
12	PT Balai Pustaka (Persero)		3.105	131.292	128.128	127.151	(127.151)	-		131.172	131.172	113.907	(17.265)	-	-	-	-	-	-	10.770	120	-	(0)
13	PT Barata Indonesia (Persero)	951.178	51.615	45.664	(5.951)		(5.951)	-		45.664	996.842	1.000.063	3.221	-	-	-	-	-	-	-	-	3.221	(0)
14	PT Berdikari (Persero)	148.485	191.390	194.026	2.636		2.636	-		194.026	194.026	76.483	(117.543)	-	-	-	-	-	-	-	-	(4.524)	(0)
15	PT Bhanda Utama Reksa (Persero)	60.951	60.224	60.224	(726)		(726)	-		59.496	472.441	472.441	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
16	PT Bina Karya (Persero)	24.574	11.729	8.828	(1.901)		(1.901)	-		8.708	34.282	34.402	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120	(0)
17	PT BioFarma (Persero)	5.302.152	526.356	498.117	(27.239)		(27.239)	-		347.804	5.648.956	5.648.956	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
18	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	559.775	41.772	36.828	(4.943)		(4.943)	-		30.828	590.603	578.551	(11.952)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
19	PT Boma Bisma Indra (Persero)	231.446	1.872	(3.372)	(5.244)		(5.244)	-		(3.372)	228.074	228.491	(1.582)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.582)	(0)
20	PT Brantas Abipraya (Persero)	822.538	270.151	259.179	(10.972)		(10.972)	-		223.763	1.046.302	1.045.855	(447)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
21	PT Buhara Perikanan (Persero)	566.341	175.895	127.813	1.927		1.927	-		125.650	778.391	778.391	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	(0)
22	PT Dananeksa (Persero)	1.370.629	(147.587)	(134.072)	13.515		13.515	-		(134.072)	1.236.557	1.236.557	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
23	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	3.957.076	88.162	45.065	(23.097)		(23.097)	-		45.065	4.002.141	3.755.785	(246.355)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
24	PT Djakarta Lloyd (Persero)	373.080	27.009	26.847	(162)		(162)	-	378.318	406.165	779.245	301.099	(478.147)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
25	PT Energi Management Indonesia (Persero)	20.952	2.067	3.198	1.130	757	1.130	-		3.198	24.150	24.166	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	(0)
26	PT Garuda (Persero)	678.451	182.451	176.776	(2.675)		(2.675)	-		152.776	832.223	859.233	27.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
27	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	8.071.635	(1.754.897)	(1.244.746)	510.150	414.258	95.892	-		(1.244.746)	6.826.889	7.338.963	512.074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
28	PT Hotel Indonesia Natour (Persero)	8.486.719	9	(10.273)	(10.283)		(10.283)	-		(10.273)	8.476.446	8.472.023	(4.423)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
29	PT Hutama Karya (Persero)	7.543.504	1.071.038	1.059.065	(11.973)		(11.973)	-		998.825	8.542.329	8.542.329	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
30	PT Indah Karya (Persero)	126.968	19.096	19.290	193		193	-		16.290	146.258	146.257	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
31	PT Indefarma (Persero) Tbk	464.403	(37.332)	(39.802)	(2.470)		(2.470)	-		(39.802)	424.601	424.601	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
32	PT Indonesia Asean Aluminium (Persero)	20.594.701	4.944.699	4.672.884	(272.015)		(272.015)	-		3.928.282	24.522.983	53.277.697	28.754.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	7.405.844						-		7.405.844	-	(7.405.844)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
	PT Timah (Persero) Tbk	3.674.757						-		3.674.757	-	(3.674.757)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
33	PT Indira Karya (Persero)	4.227	71.621	67.393	70.731		3.338	-		71.621	71.621	64.431	(7.189)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
34	PT Industri Kapital Indonesia (Persero)	388.694	23.461	21.151	(2.310)		(2.310)	-		21.151	410.146	413.978	3.734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
35	PT Industri Kertas Api (Persero)	1.391.332	69.247	67.249	(1.998)		(1.998)	-		67.249	1.458.581	1.457.317	(1.264)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
36	PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)	989	317	774	467		467	-		774	1.763	1.774	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
37	PT Industri Sandang Nusantara (Persero)	147.595	102.808	263.445	160.637		160.637	-		253.445	401.040	250.403	(150.637)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
38	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	189.224	6.370	23.301	16.931		16.931	-		23.301	212.525	212.525	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
39	PT Intaka Karya (Persero)	147.177	21.518	21.518				-		21.518	168.694	170.758	2.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
40	PT Jasa Karya (Persero) Tbk	9.575.388	1.540.179	1.391.699	(148.572)		(148.572)	-		994.852	10.570.240	10.568.357	(1.883)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
41	PT Jasa Rahajaya (Persero)	9.418.048	2.116.505	2.186.689	70.164		70.164	-		1.474.679	10.892.725	10.886.491	(6.233)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)
42	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	921.204	119.299	122.468	3.169		3.169	-		102.236	1.023.440												

PENJELASAN MUTASI LAIN LAIN BUMN PADA KEMENTERIAN BUMN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017

No	Perusahaan Negara	Saldo Awal (Audited 2016)	Labo Th berjalan atribusi entitas pengendali	Labo komprehensif atribusi entitas pengendali	pendapatan komprehensif atribusi entitas pengendali	OCI Reval	OCI Non Reval	Dividen	PMN	Mutasi Ekuitas	saldo awal + Mutasi Ekuitas	Saldo Akhir ILKPN	Selish	Mutasi BPYBDS	PKBL	Selish karena Treasury Stock(ESDP)	selish saldo awal	Selish Restatement	Selish Pencatatan Dividen	Selish Pencatatan tambahan modal diotor	Selish Kurs Penjabaran Lap Keuangan	Selish karena Komponen LPE Lain	Selish yang Belum Dapat Dijelaskan		
		1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7	8	9 = 3 + 7 + 8	10 = 1 + 9	11	12 = 11 - 10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 = 12- (13+14+15+16- 17+18+19+20- 21)		
66	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	24.208.237	1.091.472	1.080.414	(11.067)	-	(11.067)	-	(1.038.164)	42.251	24.250.487	24.452.725	202.238	-	-	-	0	-	446.722	-	(248.733)	4.250	(0)		
67	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	878.282.467	4.410.210	(6.287.467)	(10.697.667)	-	(6.933.307)	-	(3.764.360)	(8.439.293)	869.844.174	868.918.422	(925.752)	(825.751)	-	-	-	-	-	(1)	-	-	(0)		
68	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.145.523	324.045	572.411	248.366	-	264.438	-	(16.070)	553.322	4.698.845	4.698.844	(1)	-	-	-	0	-	(1)	-	-	-	(0)		
69	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	2.141.620	2.293	1.607	(686)	-	-	-	(686)	1.607	2.143.228	2.034.201	(109.027)	-	-	-	0	(27.159)	-	-	-	(81.868)	(0)		
70	PT Pindad (Persero)	1.259.048	92.069	45.120	(46.949)	-	(46.949)	-	-	45.120	1.304.168	1.304.170	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	(0)		
71	PT Pos Indonesia (Persero)	1.085.719	354.975	1.696.762	1.341.787	-	1.389.670	-	(47.883)	(28.572)	1.668.190	2.753.909	3.341.564	587.654	-	-	-	-	595.023	(0)	-	(7.368)	(0)		
72	PT Prindo (Persero)	1.267	719	4.250	3.531	-	3.173	-	358	4.250	6.038	6.038	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	(0)		
73	PT Pupuk Indonesia (Persero)	60.772.848	3.021.139	2.726.544	(294.595)	-	90.725	-	(384.320)	(1.070.874)	1.655.670	62.428.518	62.428.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)		
74	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	4.719.577	292.132	889.835	590.703	-	658.218	-	(67.515)	(280)	889.545	5.609.122	5.392.401	(216.721)	-	-	-	-	(240.453)	-	24.141	(380)	(0)		
75	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	2.350.676	155.881	476.749	320.868	-	178.932	-	141.937	-	476.749	2.827.425	2.883.411	55.986	-	-	-	-	-	-	-	55.986	(0)		
76	PT Samah (Persero)	214.698	5.581	4.478	(1.103)	-	-	-	(1.103)	-	4.478	219.176	219.177	0	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)		
77	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	2.579.244	110.819	101.803	(9.016)	-	-	-	(9.016)	(49.381)	52.422	2.431.666	2.579.073	147.407	-	-	-	-	-	435	-	(20.909)	(0)		
78	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	14.810.853	1.027.349	881.272	(166.077)	-	-	-	(166.077)	(92.588)	(61.314)	14.749.539	14.749.539	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	(1)		
79	PT Semen Kupa (Persero)	1.677	3.194	-	-	-	-	-	-	3.194	4.871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)		
80	PT Socfindo (Persero)	2.009.895	224.576	123.825	(100.751)	-	-	-	(100.751)	(14.000)	109.825	2.119.720	2.119.686	(34)	-	-	-	-	-	35	-	(69)	(0)		
81	PT Surveyor Indonesia (Persero)	797.838	93.031	83.793	(9.238)	-	(4.776)	-	(4.462)	(8.000)	75.793	873.631	873.499	(132)	-	-	-	-	-	(0)	-	(132)	(0)		
82	PT Tapan (Persero)	11.296.424	720.501	2.654.721	1.934.220	-	-	-	1.934.220	-	2.654.721	13.951.145	13.951.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)		
83	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	43.955.626	11.535.331	10.392.997	(1.142.334)	-	-	-	(1.142.334)	(8.096.439)	4.336.598	48.292.183	48.294.202	2.019	-	-	-	-	-	(65)	-	2.084	(0)		
84	PT TWC BP dan RB (Persero)	338.676	107.148	95.002	(12.148)	-	-	-	(12.148)	(7.477)	87.525	426.201	431.933	5.732	-	-	-	-	5.734	-	-	(3)	(0)		
85	PT Varuna Tirta Prakarya (Persero)	12.015	(6.581)	(6.581)	-	-	-	-	-	(6.581)	5.435	5.641	206	-	-	-	-	-	-	-	-	207	(0)		
86	PT Wana Karya (Persero)	112.097	29.270	31.095	1.825	-	-	-	1.825	-	31.095	143.192	143.192	(0)	-	-	-	(0)	-	-	-	-	(0)		
87	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	7.310.333	2.563.483	2.547.111	(16.371)	-	1.530	-	(17.902)	(339.455)	2.207.656	9.249.852	(268.137)	-	-	-	(0)	-	-	24	-	(268.161)	(0)		
88	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	7.384.399	781.546	753.724	(28.222)	-	-	-	(28.222)	(197.587)	556.137	7.940.536	8.218.102	277.567	-	-	-	(0)	60.486	-	129	-	216.952	(0)	
89	PT Yodya Karya (Persero)	83.478	24.231	20.743	(3.488)	-	-	-	(3.488)	(2.424)	18.318	101.796	103.743	1.947	-	-	-	-	-	-	272	-	1.675	(0)	
	Total Persero Non Bank	1.669.703.916	90.225.330	81.043.323	(8.182.007)	-	(2.845.195)	-	(8.538.812)	(28.935.281)	2.379.318	54.487.351	1.724.191.267	1.730.791.158	6.599.892	(319.616)	(1.303)	163.486	(672.606)	16.465.436	192.537	12.194.856	2.662.664	(24.085.563)	(0)
C	Persero Bank																								
1	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	52.294.400	8.169.886	9.241.974	1.072.088	(12.276)	-	-	1.074.383	(2.381.137)	6.860.837	59.155.237	59.155.373	136	-	-	-	-	0	-	-	136	(0)		
2	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	90.272.363	12.383.810	13.494.665	1.110.666	315.665	-	-	795.191	(3.727.773)	9.766.893	100.039.256	100.031.306	(7.950)	-	-	-	-	-	(0)	-	(7.950)	-		
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	83.855.503	16.606.316	17.642.472	1.036.157	-	-	-	1.036.157	(6.000.477)	11.641.996	95.487.488	95.487.047	(441)	-	-	-	-	-	-	(451)	-	(0)		
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	11.478.322	1.816.480	1.834.007	17.528	-	-	-	17.528	(3.144.269)	1.519.739	12.998.060	12.998.060	0	-	-	-	-	-	-	-	-	(0)		
	Total Persero Bank	237.906.587	38.976.491	42.213.119	3.236.629	313.390	-	-	2.923.239	(12.423.655)	29.789.464	267.690.051	267.681.787	(8.264)	-	-	-	-	-	(451)	-	(7.814)	(0)		
	Total Persero (B+C)	1.907.604.503	129.201.821	123.256.443	(5.945.378)	(2.331.804)	-	-	(3.813.574)	(41.358.946)	2.379.318	84.276.815	1.991.881.318	1.998.472.948	6.591.628	(319.616)	(1.303)	163.486	(672.606)	16.465.436	192.086	12.194.856	2.662.664	(24.093.376)	(0)
	TOTAL PERUM DAN PERSERO	1.942.007.829	132.733.524	126.308.962	(6.424.562)	(2.331.804)	-	-	(4.092.757)	(41.493.921)	2.379.318	87.194.369	2.029.202.189	2.035.404.152	6.201.963	(319.616)	(1.397)	163.486	(672.606)	16.085.783	201.366	12.139.759	2.662.664	(24.096.496)	(0)
E	Minoritas																								
I	Equity Method	463.403	112.795	110.829	(1.968)	-	-	-	(1.968)	(28.419)	82.409	545.811	545.813	1	-	-	-	-	(13.357)	0	(28.619)	13.221	(1)	0,05	
1	PT Saragaya Industrial Estate Rungkut	282.326	69.848	68.084	(1.764)	-	-	-	(1.764)	(17.409)	50.675	333.002	333.003	1	-	-	-	2	-	-	-	-	(1)	0	
2	PT Jakarta Industrial Estate Palodagadung	181.078	42.947	42.744	(204)	-	-	-	-	(11.011)	31.733	212.810	212.810	-	-	-	-	-	-	0	-	-	(0)		
II	Cost Method	2.017.868	-	-	-	-	-	-	-	-	2.017.868	1.988.932	(28.756)	-	-	-	-	-	-	-	(28.619)	13.221	0		
3	PT Nindya Karya	59.500	-	-	-	-	-	-	-	-	59.500	59.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	PT Perkebunan Nusantara I	38.640	-	-	-	-	-	-	-	-	38.640	38.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	PT Perkebunan Nusantara II	32.761	-	-	-	-	-	-	-	-	32.761	32.761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	PT Perkebunan Nusantara IV	294.212	-	-	-	-	-	-	-	-	294.212	294.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	PT Perkebunan Nusantara V	131.332	-	-	-	-	-	-	-	-	131.332	131.332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	PT Perkebunan Nusantara VI	65.329	-	-	-	-	-	-	-	-	65.329	65.329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	PT Perkebunan Nusantara VII	140.122	-	-	-	-	-	-	-	-	140.122	140.122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	122.528	-	-	-	-	-	-	-	-	122.528	122.528	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	PT Perkebunan Nusantara IX	156.981	-	-	-	-	-	-	-	-	156.981	156.981	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	PT Perkebunan Nusantara X	184.580	-	-	-	-	-	-	-	-	184.580	184.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	PT Perkebunan Nusantara XI	116.848	-	-	-	-	-	-	-	-	116.848	116.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	PT Perkebunan Nusantara XII	127.298	-	-	-	-	-	-	-	-	127.298	127.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	102.974	-	-	-	-	-	-	-	-	102.974	102.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	23.500	-	-	-	-	-	-	-	-	23.500	23.500													

15. PMN PADA PERUSAHAAN DI BAWAH KEMENKEU

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)

NO	PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA 1	HPP + BEBAN USAHA 2	LABA USAHA 3 = (1-2)	PENDAPATAN LAIN - LAIN 4	BEBAN LAIN - LAIN 5	EBIT 6 = (3+4-5)	BEBAN BUNGA 7	LABA SEBELUM PAJAK 8=(6-7)	PAJAK 9	LABA RUGI TAHUN BERJALAN 10=(8-9)	PENDAPATAN KOMPREHENSIF 11	LABA RUGI KOMPREHENSIF 12=(10-11)
	BADAN USAHA LAINNYA														
1	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2017		2.766.412.000.000	1.541.222.000.000	1.225.190.000.000	16.086.000.000	-	1.241.276.000.000	-	1.241.276.000.000	224.668.000.000	1.016.608.000.000	(6.797.000.000)	1.009.811.000.000
	PERUSAHAAN NEGARA														
1	PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Audited 2017		1.178.921.919.717	725.708.004.655	453.213.915.062			453.213.915.062	-	453.213.915.062	55.794.761.594	397.419.153.468	15.210.733.432	412.629.886.900
2	PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2017		3.154.863.449.477	1.605.473.796.984	1.549.389.652.493	19.356.934.940	34.052.260.626	1.534.694.326.807	-	1.534.694.326.807	272.686.346.355	1.262.007.980.452	465.995.909.037	1.728.003.889.489
3	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA	Audited 2017		765.958.989.000	313.824.018.000	452.134.971.000	-	-	452.134.971.000	-	452.134.971.000	(18.333.536.000)	470.468.507.000	57.761.885.000	528.230.392.000
4	PT GEO DIPA ENERGI	Audited 2017		742.188.197.611	485.631.657.302	256.556.540.309		84.030.371.423	172.526.168.886	-	172.526.168.886	35.292.952.475	137.233.216.411	(4.751.640.918)	132.481.575.493

**PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)**

NO	PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA	SUMBER	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
			1	2	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15=13+14	16	17=13*16
	BADAN USAHA LAINNYA																	
1	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2017	109.147.908.000.000	1.327.669.000.000	110.475.577.000.000	1.559.825.000.000	87.647.941.000.000	89.207.566.000.000	18.844.186.000.000			(20.048.000.000)	2.443.873.000.000	21.268.011.000.000		21.268.011.000.000	100,00	21.268.011.000.000
	SUB TOTAL (A)																	21.268.011.000.000
	PERUSAHAAN NEGARA																	
1	PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Audited 2017	15.616.898.351.930	45.684.968.102	15.662.583.320.032	52.368.112.733	7.736.859.812.587	7.789.227.925.320	5.000.000.000.000	1.000.000.000.000		9.218.592.798	1.864.136.801.914	7.873.355.394.712		7.873.355.394.712	100,00	7.873.355.394.712
2	PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2017	54.870.918.535.122	514.977.180.771	55.385.895.715.893	4.026.354.387.851	17.038.388.374.294	21.064.742.762.145	28.516.600.000.000	2.000.000.000.000		524.503.331.056	3.280.049.622.692	34.321.152.953.748		34.321.152.953.748	100,00	34.321.152.953.748
3	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA	Audited 2017	10.200.112.297.000	160.534.327.000	10.380.646.624.000	109.202.750.000	-	109.202.750.000	8.000.000.000.000			30.169.605.000	2.221.274.269.000	10.251.443.874.000		10.251.443.874.000	100,00	10.251.443.874.000
4	PT GEO DIPAA ENERGI	Audited 2017	425.307.418.406	3.116.365.316.429	3.541.672.734.835	223.661.597.359	676.043.909.314	899.705.506.673	3.275.443.770.000				(633.476.541.838)	2.641.967.228.162		2.641.967.228.162	93,33	2.465.748.014.044
	SUB TOTAL (B)																	54.911.708.236.504
	TOTAL (A + B)				195.426.375.394.760			119.070.444.944.138						76.355.930.450.622				76.178.711.236.504

16. PMN PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

**LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL
PER 31 DESEMBER 2017**

No	Institusi	Penyertaan Modal Pemerintah				Surat hutang
				USD	IDR	IDR
	A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional					
1	Asian Development Bank (ADB)	SDR	289.100.000,00		5.577.928.137.684,00	
	World Bank Group					
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	USD		167.203.427,47	2.265.272.035.374,40	
3	International Development Association (IDA)	USD		24.051.705,00	325.852.499.340,00	5.237.901.544,95
4	International Finance Corporation (IFC)	USD		31.602.000,00	428.143.896.000,00	
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD		3.797.820,00	51.452.865.360,00	15.377.223.864,00
6	Bank Pembangunan Islam (IDB)	ID	132.238.731,51		2.551.429.060.467,90	
7	International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	USD		2.060.000,00	27.908.880.000,00	
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit	ID	125.140,32		2.414.471.504,97	
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD		67.959.000,00	920.708.532.000,00	
10	Common Fund for Commodities (CFC) USD 1.028.901 + EUR 223.450	USD dan EUR			3.613.994.271,75	3.614.000.417,72
	Common Fund for Commodities (CFC) USD 1.028.901 (Sept 2017)	USD			13.939.550.748,00	
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD		10.759.264,26	148.521.057.955,44	
12	Credit Guarantee and Investment Facility	USD		12.600.000,00	170.704.800.000,00	
13	AIIB	USD		403.260.000,00	5.463.366.480.000,00	
	Jumlah I		421.463.871,83	723.293.216,73	17.951.256.260.706,50	24.229.125.826,67
	PMN Lainnya					
15	ASEAN Infrastructure Fund	USD		120.000.000,00	1.625.760.000.000,00	
16	International Rubber Consortium Limited	USD		4.000.000,00	54.192.000.000,00	
	Jumlah II		-	124.000.000,00	1.679.952.000.000,00	
	Total (I + II)		421.463.871,83	723.293.216,73	19.631.208.260.706,50	24.229.125.826,67

Catatan:

1. Kurs Special Drawing Right (SDR) ; SDR1 = USD 1.42413
2. Kurs Euro to USD 1,20020
3. Kurs USD to IDR Rp 13.548
4. Kurs Euro to IDR Rp 16,173,615

17. PMN PADA PERUSAHAAN MINORITAS

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF	LABA RUGI TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI	LABA RUGI KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA ENTITAS PENGENDALI
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2017	Sehat AA (91,25)	434.079	274.668	159.411	22.848	17.120	165.139	-	165.139	25.442	139.697	(3.530)	136.167	139.696	136.168
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2017	Sehat AA (90,50)	209.432	104.000	105.432	12.954	8.979	109.407	-	109.407	23.512	85.895	(407)	85.488	85.895	85.488
3	PT Nindya Karya	Audited 2017	Sehat AA (86,25)	5.875.138	5.381.789	493.348	133.932	319.763	307.518	63.186	244.331	58	244.273	260.272	504.546	264.749	525.021
4	PT Perkebunan Nusantara I	Unaudited 2017		895.929	808.334	87.595	38.825	59.753	66.667	75.120	(8.453)	(3.203)	(5.250)	(86.743)	(91.993)	(5.259)	(92.002)
5	PT Perkebunan Nusantara II	Unaudited 2017		1.125.596	1.037.566	88.030	161.765	81.719	168.077	150.437	17.640	-	17.640	548	18.188	17.795	18.343
6	PT Perkebunan Nusantara IV	Unaudited 2017		5.620.317	4.326.673	1.293.644	136.467	101.382	1.328.729	271.915	1.056.813	346.208	710.605	(95.077)	615.528	724.810	629.732
7	PT Perkebunan Nusantara V	Unaudited 2017		5.010.281	4.467.721	542.560	48.261	79.417	511.404	223.649	287.755	78.422	209.333	-	209.333	209.333	209.333
8	PT Perkebunan Nusantara VI	Unaudited 2017		1.535.520	1.253.604	281.916	16.099	18.769	279.246	93.687	185.559	46.342	139.217	-	139.217	143.915	143.915
9	PT Perkebunan Nusantara VII	Unaudited 2017		2.684.444	2.350.230	334.214	50.782	76.589	308.407	493.025	(184.618)	32.986	(217.604)	-	(217.604)	(217.381)	(217.381)
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	Unaudited 2017		1.656.597	1.789.835	(133.238)	63.994	18.599	(87.843)	108.734	(196.577)	19.120	(215.697)	610.825	395.128	(215.607)	395.037
11	PT Perkebunan Nusantara IX	Unaudited 2017		942.663	1.102.933	(160.270)	145.398	104.239	(119.111)	135.102	(254.213)	-	(254.213)	(68.114)	(322.327)	(254.213)	(322.327)
12	PT Perkebunan Nusantara X	Unaudited 2017		2.596.327	2.442.930	153.397	289.115	215.906	226.606	159.210	67.396	19.068	48.328	-	48.328	39.718	39.718
13	PT Perkebunan Nusantara XI	Unaudited 2017		2.498.442	2.372.035	126.407	73.444	34.563	165.289	106.825	58.463	13.176	45.288	20.615	65.902	45.261	20.615
14	PT Perkebunan Nusantara XII	Unaudited 2017		987.675	894.833	92.842	57.392	51.119	99.116	88.330	10.785	8.034	2.752	(30.413)	(27.661)	3.031	(27.382)
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	Unaudited 2017		2.477.508	2.467.467	10.041	24.974	36.608	(1.593)	217.408	(219.001)	4.426	(223.427)	(65.013)	(288.439)	(224.928)	(289.941)
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	Unaudited 2017		637.062	643.718	(6.656)	30.749	16.608	7.486	111.195	(103.709)	-	(103.709)	(24.695)	(128.404)	(103.709)	(128.404)
17	PT Rekayasa Industri	Audited 2017		3.594.431	3.321.014	273.417	84.068	-	357.485	179.304	178.181	41.175	137.006	(19.914)	117.092	115.994	96.080
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	SMT I / 2017		93.799	95.990	(2.191)	179	12.292	(14.304)	-	(14.304)	-	(14.304)	-	(14.304)	(14.304)	(14.304)
19	PT Indosat, Tbk	Audited 2017		29.926.098	25.893.599	4.032.499	67.828	38.655	4.061.672	2.121.246	1.940.426	638.497	1.301.929	(103.497)	1.198.432	1.135.783	1.033.561
20	PT Bank Bukopin, Tbk	Unaudited 2017		9.532.695	6.472.546	3.060.149	755.617	3.471.799	343.967	-	343.967	30.397	313.570	49.224	362.794	312.343	361.567
21	PT Socfindo	Audited 2016		2.104.450	1.342.951	761.499	57.368	14.278	804.589	-	804.589	204.372	600.217	(5.385)	594.833	600.217	594.833
22	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2016		1.051.622	962.405	89.217	60.199	-	149.416	-	149.416	91.237	58.179	-	58.179	58.179	58.179
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2016		903.414	700.855	202.559	12.548	10.768	204.339	9.835	194.504	61.441	133.063	(5.217)	127.846	133.063	127.846
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2015		-	752	(752)	1.614	(0)	863	-	863	232	631	-	631	631	631
25	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2017	Sehat AAA	19.471.030	13.209.777	6.261.253	306.703	396.584	6.171.372	103.589	6.067.783	1.520.551	4.547.232	(687.830)	3.859.402	4.476.444	3.788.614
26	PT Timah Tbk	Audited 2017		9.217.160	8.486.204	730.956	185.667	-	916.623	200.412	716.211	213.794	502.417	(19.059)	483.358	502.430	483.371
27	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2017		12.653.619	12.053.013	600.606	949.745	488.269	1.062.082	607.686	454.397	317.893	136.503	(54.895)	81.608	136.507	81.611
	TOTAL			123.735.328	104.267.442	19.477.886	3.788.538	5.673.778	17.592.646	5.519.897	12.072.749	3.733.178	8.339.572	(328.304)	8.011.268	8.110.392	7.737.922

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA PER 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)

(dalam jutaan rupiah)

NO	PERUSAHAAN MINORITAS	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	15	16=12x15
1	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Audited 2017	Sehat AA (91,25)	542.536	262.319	804.855	92.265	46.558	138.823	200.000	443	-	(457)	466.020	666.006	26	666.032	50,00%	333.003.000.000
2	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2017	Sehat AA (90,50)	331.353	196.754	528.107	97.651	4.836	102.488	200.000	-	-	(24)	225.643	425.620	-	425.620	50,00%	212.809.824.097
3	PT Nindya Karya	Audited 2017	Sehat AA (86,25)	3.778.872	951.007	4.729.879	2.926.055	546.636	3.472.691	559.497	-	-	420.776	260.437	1.240.711	16.477	1.257.187	1,00%	59.500.000.000
4	PT Perkebunan Nusantara I	Unaudited 2017		201.147	2.181.622	2.382.769	713.701	1.342.313	2.056.014	160.997	-	-	297.432	(131.947)	326.482	273	326.755	24,00%	38.640.323.000
5	PT Perkebunan Nusantara II	Unaudited 2017		430.347	6.078.682	6.509.029	2.912.055	1.652.708	4.564.763	327.607	-	-	3.333.780	(1.718.445)	1.942.942	1.324	1.944.266	10,00%	32.761.000.000
6	PT Perkebunan Nusantara IV	Unaudited 2017		1.868.264	12.685.431	14.553.695	2.259.753	4.894.879	7.154.632	2.942.116	-	-	2.609.170	1.641.547	7.192.833	206.230	7.399.063	10,00%	294.212.000.000
7	PT Perkebunan Nusantara V	Unaudited 2017		841.119	7.251.017	8.092.136	1.011.641	4.567.372	5.579.013	1.313.323	-	-	1.042.116	157.684	2.513.123	0	2.513.124	10,00%	131.332.000.000
8	PT Perkebunan Nusantara VI	Unaudited 2017		250.613	3.639.335	3.889.948	448.292	1.901.993	2.350.285	653.293	-	-	703.899	173.577	1.530.769	8.894	1.539.663	10,00%	65.329.000.000
9	PT Perkebunan Nusantara VII	Unaudited 2017		963.151	11.097.604	12.060.755	3.680.223	6.068.529	9.748.752	1.401.223	8.889	-	3.373.544	(2.474.283)	2.309.372	2.631	2.312.003	10,00%	140.122.000.000
10	PT Perkebunan Nusantara VIII	Unaudited 2017		864.262	8.544.699	9.408.961	1.470.589	2.410.819	3.881.408	930.302	-	-	5.450.018	(854.465)	5.525.855	1.698	5.527.553	13,00%	122.527.927.000
11	PT Perkebunan Nusantara IX	Unaudited 2017		1.671.472	3.150.668	4.822.140	2.340.784	578.207	2.918.991	599.815	1.000.000	-	1.424.086	(1.120.751)	1.903.150	-	1.903.150	10,00%	159.981.000.000
12	PT Perkebunan Nusantara X	Unaudited 2017		2.490.943	10.595.633	13.086.576	2.144.768	1.736.312	3.881.080	1.845.596	10.061	-	6.918.687	384.191	9.158.535	46.961	9.205.496	10,00%	184.560.000.000
13	PT Perkebunan Nusantara XI	Unaudited 2017		1.161.365	5.256.465	6.417.830	1.461.634	1.101.436	2.563.070	1.168.481	-	-	2.740.498	(54.415)	3.854.564	196	3.854.760	10,00%	116.848.000.000
14	PT Perkebunan Nusantara XII	Unaudited 2017		789.371	10.056.534	10.845.905	1.523.724	2.517.747	4.041.471	1.272.976	-	-	5.322.781	203.682	6.799.439	4.996	6.804.435	10,00%	127.298.000.000
15	PT Perkebunan Nusantara XIII	Unaudited 2017		643.937	5.969.583	6.613.520	1.418.366	4.107.771	5.526.137	1.029.738	-	-	875.002	(950.608)	954.133	133.250	1.087.383	10,00%	102.974.000.000
16	PT Perkebunan Nusantara XIV	Unaudited 2017		510.376	1.635.447	2.145.823	706.340	1.767.529	2.473.869	235.000	-	-	1.185.613	(1.748.659)	(328.046)	-	(328.046)	10,00%	23.500.000.000
17	PT ReKayasa Industri	Audited 2017		4.691.791	1.966.457	6.658.248	3.896.146	2.241.455	6.137.601	450.000	-	-	190.037	(125.349)	514.688	5.959	520.647	4,97%	22.366.000.000
18	PT PANN Pembiayaan Maritim	SMT I / 2017		484.672	395.346	880.019	422.537	27.552	450.088	678.413	724.338	-	-	(972.820)	429.930	-	429.930	0,00%	1.000.000
19	PT Indosat, Tbk	Audited 2017		9.479.271	41.181.769	50.661.040	16.200.457	19.645.049	35.845.506	543.393	1.546.587	-	404.104	11.502.892	13.996.976	818.558	14.815.534	14,29%	77.662.499.900
20	PT Bank Bukopin, Tbk	Unaudited 2017		46.748.632	63.177.395	109.926.027	93.727.952	6.623.332	100.351.284	1.119.908	1.724.069	-	1.211.372	5.486.290	9.541.639	33.104	9.574.743	11,44%	150.785.787.600
21	PT Socfindo	Audited 2016		330.730	1.449.016	1.779.746	369.828	536.434	906.262	42.250	3.671	-	-	827.564	873.484	-	873.484	10,00%	4.225.000.000
22	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2016		1.386.965	2.511.532	3.898.497	323.975	427.841	751.816	898.800	-	-	-	2.247.881	3.146.681	-	3.146.681	13,00%	130.065.000.000
23	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	Audited 2016		906.308	546.097	1.452.405	219.887	126.576	346.463	50.888	(22.638)	-	408.714	668.977	1.105.941	-	1.105.941	5,00%	2.478.911.250
24	PT Kawasan Industri Lampung	Audited 2015		21.461	304	21.764	78	-	78	8.656	-	-	-	13.030	21.686	-	21.686	20,36%	1.762.087.000
25	PT Bukit Asam Tbk	Audited 2017	Sehat AAA	11.117.745	10.869.737	21.987.482	4.513.226	3.674.271	8.187.497	1.152.066	(2.271.151)	-	162.670	14.564.510	13.608.095	191.890	13.799.985	0,00%	500
26	PT Timah Tbk	Audited 2017		6.996.966	4.879.343	11.876.309	3.402.526	2.412.290	5.814.816	372.388	55	-	(130.002)	5.818.852	6.061.293	200	6.061.493	0,00%	50
27	PT Aneka Tambang Tbk	Audited 2017		9.001.939	21.012.335	30.014.273	5.552.462	5.971.408	11.523.870	2.403.076	3.934.833	-	2.386.755	9.765.721	18.490.386	17	18.490.404	0,00%	100
TOTAL						346.047.738			230.768.769						113.806.286		115.278.970		2.534.744.360.497
Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Ekuitas																			545.812.824.097
Jumlah Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas dengan Metode Biaya																			1.988.931.536.400
Total Kepemilikan Negara pada Perusahaan Kepemilikan Minoritas																			2.534.744.360.497

18. IKHTISAR LK LPS

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
PENDAPATAN		
Pendapatan Premi	10.428.831.533	9.445.848.632
Pendapatan Investasi	5.916.851.340	4.982.370.134
Pendapatan Denda	698.295	227.435
Pendapatan Kontribusi Kepesertaan	39.500	91.060
Pendapatan Pengembalian Klaim	11.504.361	25.327.853
Pendapatan Lain-Lain	62.085.251	62.759.316
Total Pendapatan	16.420.010.280	14.516.624.430
BEBAN		
Beban Klaim Penjaminan	62.577.982	164.149.101
Beban Resolusi Bank	15.089.284	7.846.691
Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim Penjaminan	0	0
Beban Investasi	951.412.090	808.642.754
Beban Umum dan Administrasi	509.320.042	423.901.095
Beban Lain-lain	12.788.607	12.590.177
Total Beban	1.551.188.005	1.417.129.818
Surplus/(Defisit) Sebelum Pajak	14.868.822.275	13.099.494.612
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN		
Pajak Kini	1.064.607.931	395.305.835
Pajak Tangguhan	(8.394.324)	(6.032.068)
Total Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan	1.056.213.607	389.273.767
Surplus/(Defisit)	13.812.608.668	12.710.220.845
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Komponen yang tidak akan direklas ke surplus defisit		
Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	2.436.813	(2.499.044)
Dampak Pajak Penghasilan	(609.203)	624.761
Total Penghasilan Komprehensif Lain	1.827.610	(1.874.283)
Total Penghasilan Komprehensif	13.814.436.278	12.708.346.562

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET		
Kas dan Setara Kas	532.969.667	248.338.732
Piutang Premi	225.517.194	10.777
Piutang Investasi	1.607.364.100	1.444.892.526
Talangan & Piutang Pengembalian Talangan	0	0
Piutang Lain-lain - Setelah Akumulasi Penyisihan	993.474	1.288.206
Investasi pada Surat Berharga	84.598.934.779	71.126.447.306
Beban Dibayar Di Muka	16.145.441	37.160.899
PPH Pasal 28a Lebih Bayar	862.982.476	0
Aset Tetap - Setelah Akumulasi Penyusutan	84.746.822	95.460.597
Aset Tidak Berwujud - Setelah Akumulasi Amortisasi	17.535.218	17.568.039
Aset Pajak Tangguhan	31.627.506	23.842.385
Aset Lain-lain	23.897.445	1.812.961
Total Aset	88.002.714.122	72.996.822.428
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Utang Klaim Penjaminan	25.356.887	11.230.985
Provisi Klaim Penjaminan	0	0
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja	126.510.022	95.369.539
Utang Pajak	341.604.824	301.033.575
Liabilitas Lain-lain	44.722.616	37.544.569
Total Liabilitas	538.194.349	445.178.668
EKUITAS		
Modal Pemerintah:		
Modal Awal	4.000.000.000	4.000.000.000
Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	(7.706.087)	(9.533.697)
Cadangan:		
Cadangan Tujuan		
- Belum Digunakan	16.480.390.571	13.712.235.491
- Telah Digunakan	214.054.600	0
Cadangan Penjaminan	66.777.780.689	54.848.941.966
Total Ekuitas	87.464.519.773	72.551.643.760
Total Liabilitas dan Ekuitas	88.002.714.122	72.996.822.428

19. ASET TETAP

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	343.728.232.605	343.728.232.605
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	188.409.157.000	188.409.157.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.857.964.547.083	1.771.760.496.768
4	005	MAHKAMAH AGUNG	4.793.673.683.460	4.728.614.788.966
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.830.796.872.345	3.567.790.938.625
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	87.074.543.797.603	87.074.543.797.603
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.276.589.447.779	2.276.466.726.655
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	11.066.986.986.557	11.081.916.881.009
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	296.536.866.272.608	294.678.659.678.949
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12.672.489.520.638	12.573.351.222.603
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	19.349.423.511.784	19.188.602.296.979
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	11.628.839.367.360	11.390.569.838.098
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.575.568.019.159	2.510.243.155.159
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3.737.148.692.766	3.737.528.498.156
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	75.742.121.286.401	65.476.603.335.689
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.207.264.327.026	3.631.848.046.838
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	15.781.343.836.355	15.669.304.013.950
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	17.432.422.531.102	15.955.539.942.828
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1.625.315.206.554	1.664.305.859.749
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.556.821.561.447	3.549.416.082.377
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.662.177.738.345	2.327.324.149.104
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.703.873.839.795	2.202.381.381.993
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	292.480.373.394.093	291.031.827.178.404
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	5.300.180.600
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	1.420.889.583.062	1.464.657.328.536
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	273.198.404.650	273.198.404.650
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	58.651.792.675.836	56.805.453.300.724
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.183.259.332.609	876.321.187.609
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	294.120.000	294.120.000
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.545.973.041.479	1.509.094.731.479
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	446.514.387.105	428.922.418.375
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	773.225.293.257	760.725.071.909
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	179.478.885.500	179.478.885.500
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.027.972.861.507	1.989.453.972.414
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	326.366.052.000	326.366.052.000
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	998.033.700.475	997.781.667.877
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	45.787.314.955.912	43.828.233.423.145
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	555.367.081.351	553.741.835.335
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	100.600.000.000	101.438.100.000
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	333.830.014.000	333.830.014.000
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	125.751.844.930	86.414.645.115
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	120.992.735.697	136.523.334.174
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	377.635.858.956	371.193.673.956
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	846.738.707.121	845.355.508.661
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	606.358.583.625	145.692.881.370
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	89.075.216.326	89.075.216.326
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	80.978.000.000	80.978.000.000
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.846.181.762.046	6.184.176.891.646
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.782.773.318.225	1.788.972.615.313

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TANAH PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	840.070.594.665	840.070.594.665
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	320.651.455.392	286.151.558.102
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	27.226.540.000	27.226.540.000
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	11.250.883.554	11.250.883.554
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	515.131.306.413	511.094.866.313
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	216.312.132.396	216.312.132.396
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	444.447.889.239	413.067.619.119
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.040.119.546.830	1.041.532.486.075
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	888.598.843.330	873.269.311.330
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	336.575.243.520	323.999.844.320
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	453.822.133.060	453.819.842.500
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	57.502.052.742	51.003.435.973
68	100	KOMISI YUDISIAL	47.188.389.400	47.188.389.400
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	113.143.589.776	113.143.589.776
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	44.748.936.081	21.637.503.486
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	3.520.341.767.980	3.523.476.794.748
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	116.490.960.000	116.490.960.000
73	107	BADAN SAR NASIONAL	303.615.044.275	295.988.170.730
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	429.505.041.845	354.844.797.425
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	7.315.400.000	7.315.400.000
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	21.830.341.424.135	21.691.054.309.935
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	1.977.000.000	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	221.628.762	33.770.762
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	2.639.261.998.650	2.970.413.852.286
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3.348.951.908.778	3.218.840.195.505
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	588.009.096.314	574.176.904.314
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	5.544.500.600	94.820.000
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
JUMLAH PADA K/L			1.037.753.703.553.270	1.014.766.907.733.530
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	4.016.775.779	4.016.775.779
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-
JUMLAH PADA BUN			4.016.775.779	4.016.775.779
TOTAL			1.037.757.720.329.050	1.014.770.924.509.310

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	148.831.544.599	(120.071.320.509)	28.760.224.090	139.263.126.534	(108.669.976.001)	30.593.150.533
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.188.424.521.149	(804.093.379.649)	384.331.141.500	1.072.262.010.157	(713.339.188.584)	358.922.821.573
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.961.947.628.280	(1.502.512.437.022)	459.435.191.258	1.870.744.454.733	(1.307.600.130.357)	563.144.324.376
4	005	MAHKAMAH AGUNG	2.703.706.525.961	(2.098.944.069.588)	604.762.456.373	2.471.640.971.435	(1.903.667.857.616)	567.973.113.819
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	2.829.780.003.481	(1.792.932.045.372)	1.036.847.958.109	2.005.193.398.825	(1.693.207.557.779)	311.985.841.046
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.078.891.846.102	(1.851.721.409.808)	1.227.170.436.294	3.047.096.617.788	(1.729.852.021.216)	1.317.244.596.572
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.916.134.984.443	(2.580.034.879.096)	336.100.105.347	2.853.292.450.943	(2.448.625.740.608)	404.666.710.335
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	1.856.678.982.918	(1.298.774.583.385)	557.904.399.533	1.669.144.961.513	(1.152.729.383.352)	516.415.578.161
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	191.232.696.715.953	(91.801.816.953.578)	99.430.879.762.375	152.858.981.935.300	(80.741.571.640.409)	72.117.410.294.891
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	5.714.938.492.900	(3.602.514.871.035)	2.112.423.621.865	4.851.425.471.800	(2.945.007.677.653)	1.906.417.794.147
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	13.627.399.300.896	(10.269.980.408.649)	3.357.418.892.247	13.090.302.406.914	(9.376.864.943.215)	3.713.442.070.298
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	6.007.283.535.144	(4.270.325.461.087)	1.736.958.074.057	5.808.400.888.642	(3.872.096.088.540)	1.936.304.800.102
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.646.562.621.961	(1.741.695.049.720)	904.867.572.241	2.518.793.606.445	(1.511.715.120.345)	1.007.078.486.100
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.052.666.303.415	(3.663.751.438.234)	1.388.914.865.181	4.838.642.005.898	(3.239.626.894.106)	1.599.015.111.792
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	43.493.459.809.414	(21.599.967.169.435)	21.893.492.639.979	37.550.915.849.954	(17.834.920.400.615)	19.715.995.449.339
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.192.976.280.873	(2.269.707.578.060)	923.268.702.813	2.902.692.065.774	(2.032.540.887.946)	870.151.177.828
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	30.298.593.008.907	(22.794.222.198.080)	7.504.370.810.827	29.185.836.978.437	(20.023.655.437.189)	49.209.492.415.626
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	7.863.111.088.549	(5.783.375.986.927)	2.079.735.101.622	6.983.094.309.136	(5.128.699.341.162)	12.111.793.650.298
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	2.333.052.146.841	(1.328.154.058.006)	1.004.898.088.835	2.305.347.516.527	(1.519.550.767.883)	785.796.748.644
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.751.270.679.842	(1.237.589.909.574)	513.680.770.268	1.687.805.617.553	(1.066.503.698.757)	621.301.918.796
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	3.196.243.543.792	(2.330.361.494.746)	865.882.049.046	3.024.602.102.823	(2.160.329.316.665)	864.272.786.158
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.620.044.740.193	(3.480.878.317.492)	2.139.166.422.701	5.370.477.955.934	(3.022.364.190.389)	2.348.113.765.545
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	10.907.002.968.381	(6.801.456.896.357)	4.105.546.072.024	10.108.482.449.748	(5.958.671.222.406)	4.149.811.227.342
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	122.823.118.743	(82.707.456.693)	40.115.662.050	1.077.019.212.477	(527.109.125.692)	549.910.086.785
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	59.427.718.065	(43.394.951.212)	16.032.766.853	49.184.004.206	(41.259.911.609)	7.924.092.597
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	79.588.439.223	(56.808.098.805)	22.780.340.418	76.738.153.248	(51.803.572.564)	24.934.580.684
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	409.256.751.706	(293.230.345.226)	116.026.406.480	369.304.196.328	(264.900.701.226)	104.403.495.102
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	114.169.368.148	(82.094.961.098)	32.074.407.050	115.878.015.375	(83.974.634.150)	31.903.381.225
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	22.043.852.287.476	(15.382.916.956.126)	6.660.935.331.350	23.145.121.151.927	(15.288.870.893.283)	7.856.250.258.644
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	400.639.177.271	(324.419.005.264)	76.220.172.007	385.972.624.945	(291.763.230.440)	94.209.394.505
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	94.259.793.486	(55.027.890.538)	39.231.902.948	100.651.964.875	(47.021.683.642)	53.630.281.233
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	90.317.431.592	(62.471.363.229)	27.846.068.363	82.605.141.243	(55.752.299.849)	26.852.841.394
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	8.951.547.860.450	(3.777.863.767.557)	5.173.684.092.893	4.048.330.776.021	(2.768.467.022.895)	1.279.863.753.126

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	6.532.100.035.646	(4.686.677.387.395)	1.845.422.648.251	5.859.143.001.481	(3.776.486.081.363)	2.082.656.920.118
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	159.188.547.377	(67.804.455.621)	91.384.091.756	121.441.606.420	(41.765.822.872)	79.675.783.548
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.737.061.101.350	(1.349.822.429.256)	387.238.672.094	1.649.703.348.215	(1.192.261.741.544)	457.441.606.671
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	273.023.533.027	(166.253.412.340)	106.770.120.687	232.836.664.152	(153.790.145.298)	79.046.518.854
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.386.990.201.224	(1.609.216.863.801)	777.773.337.423	2.086.836.484.909	(1.373.332.132.739)	713.504.352.170
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	496.477.053.115	(223.558.444.571)	272.918.608.544	255.180.177.383	(179.976.280.313)	75.203.897.070
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.782.208.505.075	(1.325.048.895.769)	1.457.159.609.306	1.831.437.734.309	(1.148.805.524.122)	682.632.210.187
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	86.798.752.155.212	(40.142.958.672.907)	46.655.793.482.305	58.580.657.822.909	(30.622.169.350.353)	27.958.488.472.556
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.086.540.043.491	(1.246.620.404.822)	839.919.638.669	1.744.871.267.408	(1.081.135.547.521)	663.735.719.887
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	298.742.412.095	(217.580.784.725)	81.161.627.370	274.497.566.457	(178.664.868.638)	95.832.697.819
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	232.559.785.523	(203.116.450.159)	29.443.335.364	219.156.566.571	(187.622.398.335)	31.534.168.236
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.706.969.603.844	(852.616.803.434)	854.352.800.410	1.361.682.718.177	(632.266.410.718)	729.416.307.459
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	331.245.725.328	(194.282.897.487)	136.962.827.841	313.652.551.221	(170.416.029.173)	143.236.522.048
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	422.748.982.559	(332.435.367.149)	90.313.615.410	378.686.213.215	(306.535.032.923)	72.151.180.292
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	25.016.080.524	(21.490.245.373)	3.525.835.151	24.874.730.524	(19.361.159.982)	5.513.570.542
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	3.633.316.469.312	(2.644.166.297.028)	989.150.172.284	3.388.716.792.066	(2.261.998.293.775)	1.126.718.498.291
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	832.980.215.769	(614.917.078.109)	218.063.137.660	667.541.305.832	(547.680.660.897)	119.860.644.935
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	243.000.749.346	(209.000.026.524)	34.000.722.822	236.662.673.470	(191.884.149.132)	44.778.524.338
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	110.597.292.348	(75.996.128.595)	34.601.163.753	101.998.721.053	(63.183.217.272)	38.815.503.781
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.436.999.731.660	(1.003.749.463.150)	433.250.268.510	1.298.436.824.910	(899.903.430.191)	398.533.394.719
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	876.178.559.164	(536.294.889.043)	339.883.670.121	747.032.196.145	(461.707.899.182)	285.324.296.963
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	2.754.354.375.370	(1.650.798.131.303)	1.103.556.244.067	2.147.932.883.052	(1.469.381.295.148)	678.551.587.904
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.202.377.314.869	(630.917.040.610)	571.460.274.259	1.028.887.360.088	(526.564.029.301)	502.323.330.787
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	923.707.281.421	(691.850.436.854)	231.856.844.567	846.644.563.446	(590.173.216.455)	256.471.346.991
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	42.750.590.319	(26.795.023.959)	15.955.566.360	35.587.899.485	(22.495.686.828)	13.092.212.657
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	115.518.436.047	(71.502.476.146)	44.015.959.901	105.070.520.624	(61.978.348.631)	43.092.171.993
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	171.006.618.574	(143.363.945.116)	27.642.673.458	163.186.572.711	(134.929.881.413)	28.256.691.298
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	195.093.264.253	(162.069.997.505)	33.023.266.748	178.021.779.315	(149.852.514.002)	28.169.265.313
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	496.480.147.511	(379.113.220.088)	117.366.927.423	443.500.469.448	(340.701.903.159)	102.798.566.289
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	328.936.657.011	(273.420.280.814)	55.516.376.197	315.487.604.150	(259.356.024.842)	56.131.579.308
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	738.830.977.606	(619.430.173.926)	119.400.803.680	737.943.705.884	(606.195.382.968)	131.748.322.916
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	501.711.614.402	(387.062.309.743)	114.649.304.659	452.555.073.824	(377.148.124.823)	75.406.949.001
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	555.634.140.026	(290.926.262.647)	264.707.877.379	335.218.989.697	(237.506.103.286)	97.712.886.411
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	140.141.212.363	(116.113.429.045)	24.027.783.318	134.518.818.777	(104.966.197.106)	29.552.621.671
68	100	KOMISI YUDISIAL	48.589.855.918	(40.013.473.449)	8.576.382.469	46.258.991.222	(36.999.368.321)	9.259.622.901

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERALATAN DAN MESIN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.295.301.771.927	(829.678.734.347)	465.623.037.580	1.204.381.197.481	(629.464.560.117)	574.916.637.364
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	170.630.985.540	(137.463.308.040)	33.167.677.500	150.726.263.135	(109.611.835.115)	41.114.428.020
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	151.490.237.335	(91.413.879.691)	60.076.357.644	147.540.054.704	(84.769.294.467)	62.770.760.237
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	186.982.734.923	(90.048.170.378)	96.934.564.545	186.821.815.187	(62.473.421.190)	124.348.393.997
73	107	BADAN SAR NASIONAL	7.910.772.864.082	(3.772.425.810.436)	4.138.347.053.646	6.739.147.011.994	(2.972.804.707.839)	3.766.342.304.155
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	25.745.668.889	(18.816.404.704)	6.929.264.185	27.079.597.877	(19.099.683.083)	7.979.914.794
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	22.233.577.944	(19.008.186.746)	3.225.391.198	21.743.659.944	(16.391.959.469)	5.351.700.475
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	40.151.199.049	(26.838.741.033)	13.312.458.016	35.608.495.801	(21.882.931.062)	13.725.564.739
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	76.974.049.537	(50.492.711.876)	26.481.337.661	68.137.282.449	(44.659.133.445)	23.478.149.004
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.063.527.969.569	(743.101.607.819)	320.426.361.750	904.983.356.437	(640.058.739.989)	264.924.616.448
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	313.135.625.991	(103.652.918.477)	209.482.707.514	233.780.144.302	(47.706.933.317)	186.073.210.985
80	114	SEKRETARIAT KABINET	54.506.077.745	(42.324.283.490)	12.181.794.255	49.956.801.156	(41.064.020.835)	8.892.780.321
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	174.727.792.977	(100.113.085.724)	74.614.707.253	133.007.964.602	(74.768.331.576)	58.239.633.026
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.285.833.879.179	(1.100.042.928.399)	185.790.950.780	1.253.094.264.920	(1.039.693.517.050)	213.400.747.870
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	1.764.777.955.416	(1.263.802.256.292)	500.975.699.124	1.663.664.759.186	(1.234.845.918.561)	428.818.840.625
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	55.795.062.810	(35.431.505.857)	20.363.556.953	50.195.461.810	(29.759.023.364)	20.436.438.446
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	1.192.231.455.635	(549.410.961.343)	642.820.494.292			-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	59.069.896.632	(20.990.790.421)	38.079.106.211	48.914.439.496	(10.139.700.341)	38.774.739.155
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	24.406.262.576	(6.361.962.883)	18.044.299.693	13.215.154.017	(1.838.447.683)	11.376.706.334
JUMLAH PADA K/L			519.473.703.556.589	(287.394.218.557.576)	232.079.484.999.013	428.943.104.316.506	(248.402.958.969.272)	180.540.145.347.234
88	999.01	PENGLOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGLOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-	-	-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	422.386.780.615	(288.090.838.707)	134.295.941.908	393.075.277.755	(216.341.377.280)	176.733.900.475
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-	-	-	-	-	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-	-	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA BUN			422.386.780.615	(288.090.838.707)	134.295.941.908	393.075.277.755	(216.341.377.280)	176.733.900.475
TOTAL			519.896.090.337.204	(287.682.309.396.283)	232.213.780.940.921	429.336.179.594.261	(248.619.300.346.552)	180.716.879.247.709

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	207.005.054.808	(47.218.863.812)	159.786.190.996	203.328.496.465	(41.064.822.659)	162.263.673.806
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	885.368.481.115	(162.370.878.565)	722.997.602.550	873.425.270.646	(135.554.504.605)	737.870.766.041
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.325.635.127.982	(264.185.397.241)	2.061.449.730.741	2.268.269.681.712	(215.738.104.473)	2.052.531.577.239
4	005	MAHKAMAH AGUNG	7.555.156.372.496	(1.401.650.266.883)	6.153.506.105.613	7.092.742.866.146	(1.205.604.926.569)	5.887.137.939.577
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	5.839.341.744.774	(1.139.224.734.772)	4.700.117.010.002	3.637.861.471.137	(708.285.622.814)	2.929.575.848.323
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	3.697.178.100.803	(1.589.364.908.568)	2.107.813.192.235	3.651.261.624.879	(1.497.104.205.525)	2.154.157.419.354
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.799.100.959.818	(676.650.608.209)	2.122.450.351.609	3.028.397.002.993	(628.086.019.494)	2.400.310.983.499
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	6.702.165.653.533	(3.826.118.328.110)	2.876.047.325.423	6.665.594.453.736	(3.668.820.882.564)	2.996.773.571.172
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	42.887.557.331.350	(12.832.159.956.366)	30.055.397.374.984	38.229.825.689.979	(12.016.695.908.017)	26.213.129.781.962
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	11.135.467.855.672	(2.214.457.972.033)	8.921.009.883.639	9.529.676.487.148	(1.949.360.207.557)	7.580.316.279.591
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	14.271.267.493.102	(3.377.393.779.502)	10.893.873.713.600	13.819.158.266.811	(3.016.572.148.440)	10.802.586.118.371
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	4.758.157.681.267	(1.029.783.779.916)	3.728.373.901.351	4.470.343.417.325	(922.113.449.443)	3.548.229.967.882
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.515.316.610.965	(352.566.425.628)	1.162.750.185.337	1.325.830.987.277	(315.003.378.091)	1.010.827.609.186
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.163.560.176.324	(528.463.001.881)	1.635.097.174.443	2.089.461.090.712	(478.541.128.662)	1.610.919.962.050
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	23.274.257.931.008	(2.821.639.832.399)	20.452.618.098.609	19.856.002.921.478	(2.263.526.536.225)	17.592.476.385.253
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.719.650.447.399	(847.350.612.257)	3.872.299.835.142	4.309.359.874.125	(1.261.615.993.330)	3.047.743.880.795
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	14.264.231.925.068	(2.744.288.397.671)	11.519.943.527.397	13.055.538.687.281	(2.190.714.413.918)	10.864.824.273.363
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	25.604.968.974.564	(4.289.518.753.369)	21.315.450.221.195	22.338.064.880.732	(3.553.692.026.253)	18.784.372.854.479
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1.435.418.016.658	(260.052.162.477)	1.175.365.854.181	1.344.185.272.805	(218.667.747.251)	1.125.517.525.554
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	1.510.007.242.771	(318.029.253.097)	1.191.977.989.674	1.406.363.437.253	(274.464.769.419)	1.131.898.667.834
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.232.634.338.395	(403.775.047.886)	1.828.859.290.509	2.036.724.645.288	(349.661.004.882)	1.687.063.640.406
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.894.176.044.395	(546.105.521.470)	3.348.070.522.925	3.862.507.648.426	(493.331.922.303)	3.369.175.726.123
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	20.178.006.715.792	(1.690.020.962.088)	18.487.985.753.704	14.702.274.162.446	(1.477.035.246.730)	13.225.238.915.716
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	5.598.310.526	(860.824.459)	4.737.486.067	52.225.609.385	(5.109.300.949)	47.116.308.436
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	22.785.169.780	(3.632.952.978)	19.152.216.802	21.631.671.705	(3.179.723.306)	18.451.948.399
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	162.486.121.051	(14.491.499.398)	147.994.621.653	162.388.870.051	(11.239.672.775)	151.149.197.276
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	865.451.960.378	(206.793.790.658)	658.658.169.720	756.533.213.157	(192.800.305.688)	563.732.907.469
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	196.573.019.634	(37.347.676.623)	159.225.343.011	191.055.674.419	(33.385.622.096)	157.670.052.323
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	27.303.772.194.881	(4.450.828.235.815)	22.852.943.959.066	28.206.953.550.045	(4.074.344.039.603)	24.132.609.510.442
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	854.798.416.600	(154.235.218.889)	700.563.197.711	834.518.116.600	(136.111.329.434)	698.406.787.166
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	104.426.273.203	(7.195.138.738)	97.231.134.465	104.369.150.203	(5.102.168.371)	99.266.981.832
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	33.626.425.495	(4.414.400.195)	29.212.025.300	31.660.491.288	(3.657.929.652)	28.002.561.636
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	578.418.037.421	(91.993.672.774)	486.424.364.647	488.776.957.421	(75.958.817.337)	412.818.140.084
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	983.445.174.536	(51.506.945.658)	931.938.228.878	753.779.079.542	(33.271.773.820)	720.507.305.722
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.873.467.611.438	(340.215.836.170)	1.533.251.775.268	1.786.016.339.128	(271.554.175.753)	1.514.462.163.375
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	137.642.745.900	(29.057.419.254)	108.585.326.646	132.915.917.796	(23.970.295.260)	108.945.622.536
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.882.135.331.888	(290.114.803.343)	1.592.020.528.545	1.673.093.774.507	(246.357.086.322)	1.426.736.688.185
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	553.771.098.393	(47.451.196.201)	506.319.902.192	184.903.482.202	(38.680.260.460)	146.223.221.742
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	750.241.479.014	(193.354.839.431)	556.886.639.583	710.981.928.241	(166.685.935.641)	544.295.992.600
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	17.720.687.344.074	(4.120.803.236.600)	13.599.884.107.474	15.124.024.648.683	(3.710.105.995.983)	11.413.918.652.700
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	641.816.205.428	(164.277.431.690)	477.538.773.738	594.896.177.576	(129.588.105.625)	465.308.071.951
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	252.579.816.384	(19.700.164.644)	232.879.651.740	245.164.987.254	(14.716.048.966)	230.448.938.288

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	245.317.298.605	(51.939.275.882)	193.378.022.723	245.451.127.331	(45.005.842.041)	200.445.285.290
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	951.563.570.792	(136.879.894.907)	814.683.675.885	831.028.226.781	(120.614.427.794)	710.413.798.987
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	330.387.908.090	(35.697.915.518)	294.689.992.572	576.038.877.297	(54.006.780.761)	522.032.096.536
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	340.567.625.332	(101.876.209.897)	238.691.415.435	304.683.725.802	(101.513.501.721)	203.170.224.081
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	13.058.303.193	(1.043.056.439)	12.015.246.754	13.058.303.193	(781.855.425)	12.276.447.768
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	1.108.913.087.133	(213.478.253.169)	895.434.833.964	1.050.111.744.064	(184.237.094.602)	865.874.649.462
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	496.220.140.998	(64.883.023.448)	431.337.117.550	471.438.582.599	(54.063.860.703)	417.374.721.896
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	246.873.832.513	(38.873.012.749)	208.000.819.764	243.739.682.763	(35.413.671.262)	208.326.011.501
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	146.085.491.154	(16.926.979.381)	129.158.511.773	146.577.045.335	(14.013.371.799)	132.563.673.536
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.105.408.347.634	(161.569.479.529)	943.838.868.105	1.027.391.622.387	(143.738.629.178)	883.652.993.209
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	805.804.854.900	(207.954.029.736)	597.850.825.164	549.371.775.465	(192.647.298.972)	356.724.476.493
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	742.838.607.831	(123.160.064.873)	619.678.542.958	733.642.096.713	(105.672.177.054)	627.969.919.659
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	296.511.486.642	(70.316.901.473)	226.194.585.169	256.988.247.342	(59.198.311.405)	197.789.935.937
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	105.679.034.732	(24.359.563.679)	81.319.471.053	100.612.287.458	(21.197.121.641)	79.415.165.817
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	20.103.550.480	(4.504.627.508)	15.598.922.972	19.659.970.020	(4.103.701.092)	15.556.268.928
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	462.280.170.172	(93.030.230.776)	369.249.939.396	458.833.652.138	(80.569.253.663)	378.264.398.475
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	233.874.874.154	(75.927.296.465)	157.947.577.689	198.630.111.304	(43.292.669.908)	155.337.441.396
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	664.526.079.484	(110.320.190.359)	554.205.889.125	643.638.692.580	(94.101.833.462)	549.536.859.118
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	905.663.787.449	(176.299.447.474)	729.364.339.975	899.674.199.559	(152.738.765.942)	746.935.433.617
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	794.505.857.974	(127.457.607.821)	667.048.250.153	1.833.179.405.256	(127.441.485.444)	1.705.737.919.812
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	245.333.338.859	(44.000.422.451)	201.332.916.408	342.491.860.229	(52.223.884.034)	290.267.976.195
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	404.563.747.058	(34.569.983.227)	369.993.763.831	394.022.525.206	(24.776.191.861)	369.246.333.345
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	67.600.455.175	(3.714.111.742)	63.886.343.433	65.863.779.175	(2.378.262.328)	63.485.516.847
68	100	KOMISI YUDISIAL	71.676.580.588	(12.046.203.734)	59.630.376.854	71.382.249.738	(10.612.831.122)	60.769.418.616
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	539.690.594.752	(36.152.213.811)	503.538.380.941	537.043.438.285	(25.994.593.262)	511.048.845.023
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	73.374.094.030	(10.509.071.360)	62.865.022.670	56.909.452.098	(6.782.653.685)	50.126.798.413
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	9.646.391.985	(237.480.480)	9.408.911.505	1.984.897.485	(121.455.394)	1.863.442.091
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	160.430.583.711	(7.822.127.627)	152.608.456.084	155.130.680.838	(4.652.396.138)	150.478.284.700
73	107	BADAN SAR NASIONAL	871.645.179.876	(87.502.161.506)	784.143.018.370	693.285.656.382	(71.363.744.315)	621.921.912.067
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	18.470.776.884	(2.542.362.987)	15.928.413.897	17.255.989.884	(1.968.309.943)	15.287.679.941
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	31.977.517.063	(2.478.612.721)	29.498.904.342	31.977.517.063	(1.839.062.379)	30.138.454.684
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	1.062.442.964.853	(171.837.704.041)	890.605.260.812	897.784.488.377	(155.586.685.668)	742.197.802.709
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	163.590.307.114	(11.133.631.431)	152.456.675.683	157.412.898.211	(7.896.591.818)	149.516.306.393
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	1.940.294.000	(38.805.880)	1.901.488.120	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	445.111.125.952	(148.107.172.858)	297.003.953.094	453.960.436.953	(141.824.868.799)	312.135.568.154
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	592.501.519.758	(181.647.766.883)	410.853.752.875	451.768.910.903	(163.604.908.924)	288.164.001.979
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	1.550.241.578.543	(89.340.104.053)	1.460.901.474.490	1.505.198.045.543	(57.999.561.306)	1.447.198.484.237
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	47.007.069.885	(5.297.312.232)	41.709.757.653	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GEDUNG DAN BANGUNAN K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016**

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			275.152.781.045.431	(56.276.139.037.825)	218.876.642.007.606	248.289.310.177.760	(50.421.051.211.110)	197.868.258.966.650
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-	-	-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-	-	-	-	-	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-	-	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA BUN			-	-	-	-	-	-
TOTAL			275.152.781.045.431	(56.276.139.037.825)	218.876.642.007.606	248.289.310.177.760	(50.421.051.211.110)	197.868.258.966.650

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	13.646.277.700	(3.200.892.824)	10.445.384.876	13.646.277.700	(2.848.477.068)	10.797.800.632
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	85.649.875.877	(35.643.662.046)	50.006.213.831	80.700.987.120	(32.078.360.710)	48.622.626.410
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	352.210.045.652	(203.330.032.143)	148.880.013.509	341.620.494.978	(187.410.056.319)	154.210.438.659
4	005	MAHKAMAH AGUNG	242.845.274.991	(89.453.541.866)	153.391.733.125	251.777.331.128	(85.071.433.436)	166.705.897.692
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	72.065.373.960	(40.501.407.913)	31.563.966.047	66.113.801.523	(36.707.111.306)	29.406.690.217
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	706.030.462.751	(467.514.250.394)	238.516.212.357	680.560.323.481	(401.899.262.314)	278.661.061.167
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	283.321.001.463	(109.991.065.265)	173.329.936.198	253.311.111.034	(91.142.645.772)	162.168.465.262
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	47.665.251.029	(41.846.666.413)	5.818.584.616	47.758.387.029	(41.551.190.886)	6.207.196.143
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	10.867.833.184.048	(6.773.185.627.655)	4.094.647.556.393	9.353.661.724.019	(5.809.576.765.328)	3.544.084.958.691
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	75.128.078.754	(46.378.170.689)	28.749.908.065	94.381.556.994	(52.144.621.418)	42.236.935.576
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	496.240.136.223	(177.977.779.276)	318.262.356.947	485.149.504.608	(169.030.136.012)	316.119.368.596
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	606.318.041.651	(250.159.940.102)	356.158.101.549	565.463.247.884	(227.282.651.101)	338.180.596.783
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	51.998.623.466	(16.011.633.283)	35.986.990.183	49.586.646.807	(28.390.463.491)	21.196.183.316
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.819.181.998.686	(732.456.322.764)	5.086.725.675.922	4.525.428.418.220	(560.605.465.472)	3.964.822.952.748
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	107.378.546.316.060	(45.175.573.540.813)	62.202.972.775.247	102.478.586.122.090	(38.189.612.965.143)	64.288.973.156.947
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	241.083.683.411	(99.058.055.228)	142.025.628.183	209.454.407.771	(85.951.320.627)	123.503.087.144
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	675.062.859.576	(308.745.534.426)	366.317.325.150	615.604.276.627	(269.376.044.129)	346.228.232.498
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	597.171.065.155	(240.808.398.494)	356.362.666.661	559.435.282.524	(214.740.465.816)	344.694.816.708
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	70.384.152.585	(53.427.066.754)	16.957.085.831	74.108.657.411	(55.727.932.273)	18.380.725.138
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	115.380.301.270	(48.260.685.072)	67.119.616.198	111.548.894.580	(39.722.039.290)	71.826.855.290
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	278.439.235.093	(125.520.345.514)	152.918.889.579	226.212.430.767	(108.623.967.789)	117.588.462.978
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.971.164.972.970	(1.295.206.973.758)	1.675.957.999.212	2.912.702.558.633	(1.162.562.436.415)	1.750.140.122.218
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	535.321.612.427.100	(240.614.899.608.726)	294.706.712.818.374	468.320.883.989.477	(197.725.815.058.729)	270.595.068.930.748
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	2.475.255.400	(478.544.521)	1.996.710.879	38.371.235.860	(5.567.642.404)	32.803.593.456
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	144.386.000	(29.561.675)	114.824.325	144.386.000	(25.952.025)	118.433.975
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	60.913.210.545	(28.941.968.759)	31.971.241.786	57.647.228.789	(26.470.480.670)	31.176.748.119
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	3.201.056.420	(899.703.235)	2.301.353.185	3.201.056.420	(811.486.607)	2.389.569.813
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	1.266.045.901.613	(612.037.645.046)	654.008.256.567	1.307.959.125.187	(662.681.262.269)	645.277.862.918
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	49.425.853.297	(20.841.120.705)	28.584.732.592	49.425.853.297	(18.226.372.650)	31.199.480.647
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.152.456.725	(3.605.557.207)	1.546.899.518	5.392.064.725	(2.722.172.610)	2.669.892.115
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	1.395.216.550	(559.128.606)	836.087.944	1.395.216.550	(514.398.318)	880.818.232
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	150.949.571.850	(61.163.364.890)	89.786.206.960	150.949.571.850	(55.105.494.452)	95.844.077.398
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	37.449.601.826	(11.686.681.487)	25.762.920.339	37.449.601.826	(10.462.043.896)	26.987.557.930
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	-	-	-	-	-	-
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	6.507.585.170	(2.942.850.366)	3.564.734.804	6.320.303.570	(2.580.053.507)	3.740.250.063
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	22.416.744.583	(8.131.569.681)	14.285.174.902	17.726.556.070	(6.247.805.758)	11.478.750.312
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	54.724.368.942	(923.932.208)	53.800.436.734	630.646.000	(60.239.025)	570.406.975
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30.161.281.609	(11.237.338.868)	18.923.942.741	29.504.376.427	(10.274.520.830)	19.229.855.597
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	824.913.528.281	(423.204.897.391)	401.708.630.890	801.536.320.330	(405.308.906.721)	396.227.413.609
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	26.004.587.222	(6.542.559.991)	19.462.027.231	25.963.040.176	(5.720.455.973)	20.242.584.203
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	3.999.150.587	(1.527.179.401)	2.471.971.186	3.099.164.467	(1.227.493.263)	1.871.671.204

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	4.863.164.183	(1.483.491.423)	3.379.672.760	4.863.164.183	(1.355.145.639)	3.508.018.544
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	39.273.107.803	(13.880.200.515)	25.392.907.288	39.139.437.803	(12.693.865.439)	26.445.572.364
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	965.108.724.575	(238.312.806.499)	726.795.918.076	1.963.043.790.949	(399.683.378.116)	1.563.360.412.833
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	25.919.449.694	(13.003.248.677)	12.916.201.017	25.105.750.410	(11.419.589.895)	13.686.160.515
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	253.577.868.489	(109.838.853.630)	143.739.014.859	264.366.960.338	(104.831.376.685)	159.535.583.653
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.427.412.095	(489.216.236)	938.195.859	1.709.928.655	(702.795.040)	1.007.133.615
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	45.408.062.043	(22.339.764.668)	23.068.297.375	45.016.803.043	(21.304.723.754)	23.712.079.289
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	628.286.198	(299.882.741)	328.403.457	542.646.198	(244.190.788)	298.455.410
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	245.205.663.209	(101.188.942.446)	144.016.720.763	219.876.321.950	(88.274.493.245)	131.601.828.705
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	51.315.651.636	(38.393.630.345)	12.922.021.291	50.388.236.229	(37.361.950.154)	13.026.286.075
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	121.834.021.131	(28.691.696.172)	93.142.324.959	93.768.768.783	(21.816.478.328)	71.952.290.455
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	45.407.620.981	(26.414.878.053)	18.992.742.928	42.889.600.131	(23.938.892.446)	18.950.707.685
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	8.863.738.475	(2.654.457.977)	6.209.280.498	5.140.744.475	(2.373.167.835)	2.767.576.640
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.272.411.872	(1.439.292.232)	833.119.640	2.272.411.872	(1.396.144.650)	876.267.222
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	8.471.679.216	(2.828.017.204)	5.643.662.012	6.272.611.127	(1.793.815.806)	4.478.795.321
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11.543.273.797	(5.820.756.893)	5.722.516.904	11.261.563.797	(5.385.774.693)	5.875.789.104
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	23.258.684.256	(13.120.348.736)	10.138.335.520	23.480.445.781	(11.873.847.941)	11.606.597.840
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	17.382.563.038	(8.392.713.148)	8.989.849.890	15.317.578.738	(7.681.620.340)	7.635.958.398
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	25.507.442.449	(21.815.136.017)	3.692.306.432	25.283.113.925	(21.174.375.768)	4.108.738.157
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	12.049.455.936	(8.468.621.459)	3.580.834.477	10.911.814.936	(8.067.570.581)	2.844.244.355
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	117.956.045.292	(30.211.403.577)	87.744.641.715	111.998.080.217	(25.501.555.267)	86.496.524.950
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	27.677.000	(294.436)	27.382.564	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	3.588.869.628	(3.449.181.876)	139.687.752	3.530.800.628	(3.442.488.183)	88.312.445
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.190.429.000	(71.425.740)	1.119.003.260	1.190.429.000	(23.808.580)	1.166.620.420
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	12.120.395.452	(9.338.483.788)	2.781.911.664	6.486.963.570	(3.969.949.397)	2.517.014.173
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	597.961.790.333	(115.474.586.535)	482.487.203.798	346.024.564.379	(69.700.162.022)	276.324.402.357
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	(14.326.273.749)	(14.326.273.749)	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	46.592.688.404	-	46.592.688.404	37.384.048.773	(12.111.770.115)	25.272.278.658
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	-	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	48.908.454.347	(15.492.578.981)	33.415.875.366	48.908.454.347	(11.987.809.219)	36.920.645.128
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	(20.567.863.530)	(20.567.863.530)	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	39.235.842.818	(3.751.983.407.915)	(3.712.747.565.097)	42.538.044.983	(18.424.059.159)	24.113.985.824
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	7.405.404.216.665	(15.167.736.562)	7.390.236.480.103	7.566.635.441.272	(3.587.751.256.964)	3.978.884.184.308
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	52.401.186.939	-	52.401.186.939	52.401.186.939	(11.195.062.325)	41.206.124.614
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	1.113.759.200	(452.987.967)	660.771.233	1.121.759.200	(348.356.806)	773.402.394
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	23.581.471.790	(11.500.132.399)	12.081.339.391	23.305.327.752	(10.606.617.738)	12.698.710.014
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	20.917.102.526	(12.922.798.209)	7.994.304.317	19.978.056.873	(12.132.179.750)	7.845.877.123
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	695.650.598.420	(241.033.704.575)	454.616.893.845	556.430.664.420	(187.814.239.743)	368.616.424.677
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	35.895.980.460	(5.993.291.059)	29.902.689.401	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
JALAN, IRRIGASI, DAN JARINGAN PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			680.926.723.185.441	(303.050.766.911.424)	377.875.956.274.017	606.522.997.695.625	(251.530.260.164.233)	354.992.737.531.392
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-	-	-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	154.452.073.132	(40.889.131.179)	113.562.941.953	154.452.073.132	(29.057.358.532)	125.394.714.600
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-	-	-	-	-	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-	-	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA BUN			154.452.073.132	(40.889.131.179)	113.562.941.953	154.452.073.132	(29.057.358.532)	125.394.714.600
TOTAL			681.081.175.258.573	(303.091.656.042.603)	377.989.519.215.970	606.677.449.768.757	(251.559.317.522.765)	355.118.132.245.992

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	66.451.125.475	0	66.451.125.475	60.618.883.915		60.618.883.915
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	19.238.192.079	0	19.238.192.079	19.024.016.706		19.024.016.706
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	23.870.580.607	(402.519.155)	23.468.061.452	82.079.788.844	(366.349.967)	81.713.438.877
4	005	MAHKAMAH AGUNG	65.999.639.840	(546.287.205)	65.453.352.635	65.786.614.602	(545.492.205)	65.241.122.397
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	11.619.447.041	(416.868.300)	11.202.578.741	11.620.006.390	(391.229.800)	11.228.776.590
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1.224.227.578.028	(4.457.307.775)	1.219.770.270.253	1.174.516.777.424	(4.390.428.276)	1.170.126.349.148
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	190.887.797.956	(79.580.030.559)	111.307.767.397	189.987.955.455	(78.722.622.865)	111.265.332.590
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	94.709.830.232	(5.748.953.851)	88.960.876.381	89.891.061.876	(5.404.773.166)	84.486.288.710
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	4.147.202.957.721	(987.436.356.496)	3.159.766.601.225	2.921.254.576.372	(216.650.794.392)	2.704.603.781.980
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	70.832.527.797	(5.787.294.902)	65.045.232.895	73.266.156.399	(6.833.315.302)	66.432.841.097
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	55.953.215.349	(549.119.806)	55.404.095.543	46.815.453.232	(1.993.648.765)	44.821.804.467
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	79.520.885.958	(1.263.655.777)	78.257.230.181	273.656.252.399	(5.430.936.991)	268.225.315.408
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	29.911.166.531	(1.021.649.100)	28.889.517.431	30.025.175.452	(1.009.758.475)	29.015.416.977
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	439.695.860.786	(1.380.257.420)	438.315.603.366	437.133.383.506	(1.231.267.960)	435.902.115.546
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	3.207.799.393.553	(125.112.862.944)	3.082.686.530.609	2.854.051.480.804	(128.365.696.381)	2.725.685.784.423
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	338.127.542.172	(4.344.229.407)	333.783.312.765	360.300.713.411	(4.674.506.075)	355.626.207.336
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	253.351.060.234	(7.157.937.466)	246.193.122.768	245.301.966.779	(6.376.687.671)	238.925.279.108
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.234.806.086.792	(66.758.185.989)	1.168.047.900.803	1.202.925.712.827	(60.985.159.765)	1.141.940.553.062
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	8.817.233.763	(83.195.375)	8.734.038.388	5.506.393.557	(70.768.125)	5.435.625.432
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	14.788.440.270	(3.115.510.718)	11.672.929.552	31.658.206.316	(2.790.427.781)	28.867.778.535
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	103.905.414.761	(5.168.946.240)	98.736.468.521	105.982.114.291	(5.875.878.698)	100.106.235.593
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	146.902.957.776	(6.126.218.671)	140.776.739.105	131.753.595.299	(5.830.636.531)	125.922.958.768
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	35.350.410.359.224	(3.816.556.095.304)	31.533.854.263.920	44.517.562.557.740	(3.959.570.944.496)	40.557.991.613.244
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	23.244.640.159	(3.000.000)	23.241.640.159	23.516.856.399	(3.000.000)	23.513.856.399
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	63.071.925	0	63.071.925	63.071.925		63.071.925
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	944.775.132	(85.903.125)	858.872.007	2.519.806.303	(51.541.875)	2.468.264.428
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	22.423.958.462	(856.756.608)	21.567.201.854	21.721.998.392	(813.308.558)	20.908.689.834
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.260.287.262	0	1.260.287.262	1.234.502.011		1.234.502.011
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	952.144.078.123	(46.515.557.958)	905.628.520.165	984.122.515.984	(41.604.722.138)	942.517.793.846
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	2.599.575.930	(4.137.388)	2.595.438.542	2.599.575.930	(4.137.388)	2.595.438.542
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	310.310.194	(10.125.000)	300.185.194	302.446.694	(6.375.000)	296.071.694

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	3.111.007.523	0	3.111.007.523	2.797.959.330		2.797.959.330
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.942.398.145	(39.750.000)	2.902.648.145	2.750.138.145	(39.750.000)	2.710.388.145
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	7.677.372.866	(281.244.276)	7.396.128.590	7.084.332.866	(249.332.399)	6.835.000.467
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	811.201.704	0	811.201.704	568.097.704		568.097.704
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	47.815.514.459	(9.460.000)	47.806.054.459	44.603.571.705	(9.460.000)	44.594.111.705
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	5.146.207.030	0	5.146.207.030	4.165.686.490		4.165.686.490
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.330.272.790.778	(2.312.106.304)	1.327.960.684.474	1.255.657.526.508	(2.274.828.679)	1.253.382.697.829
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	162.468.924.990	(15.900.000)	162.453.024.990	149.093.034.593	(15.900.000)	149.077.134.593
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	42.290.193.159	(437.950.434)	41.852.242.725	26.878.767.114	(431.868.809)	26.446.898.305
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	138.370.540.740	(16.974.085.381)	121.396.455.359	113.843.593.600	(16.181.867.115)	97.661.726.485
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	18.367.157.511	(19.994.563)	18.347.162.948	15.722.153.616	(164.655.895)	15.557.497.721
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	9.781.286.403	(788.526.090)	8.992.760.313	9.701.838.903	(592.343.934)	9.109.494.969
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	1.034.420.929	(450.687.650)	583.733.279	1.034.420.929	(450.687.650)	583.733.279
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	9.297.243.795	(2.020.752.373)	7.276.491.422	9.039.077.135	(1.866.683.902)	7.172.393.233
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	212.537.171.053	(18.116.842.339)	194.420.328.714	311.138.739.396	(45.770.936.575)	265.367.802.821
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.895.657.920	(50.996.125)	2.844.661.795	2.893.797.140	(40.459.375)	2.853.337.765
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1.452.974.731	(33.534.981)	1.419.439.750	1.418.181.231	(33.534.981)	1.384.646.250
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	8.683.016.521	(753.816.700)	7.929.199.821	8.819.756.193	(754.965.700)	8.064.790.493
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	2.877.583.766	(555.459.390)	2.322.124.376	1.169.498.601	(122.096.184)	1.047.402.417
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	23.018.919.620	0	23.018.919.620	22.442.708.005		22.442.708.005
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	286.237.147	(22.552.500)	263.684.647	266.478.727	(22.552.500)	243.926.227
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	373.114.069.121	(13.406.000)	373.100.663.121	366.177.311.768	(13.406.000)	366.163.905.768
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	26.896.865.153	(31.200.000)	26.865.665.153	10.755.152.300	(31.200.000)	10.723.952.300
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	36.316.206.117	(65.147.500)	36.251.058.617	42.871.211.217	(59.922.500)	42.811.288.717
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	13.075.435.280	(13.635.000)	13.061.800.280	8.554.730.066	(9.317.500)	8.545.412.566
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	12.274.176.402	(36.400.000)	12.237.776.402	12.132.634.876	(36.400.000)	12.096.234.876
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	7.187.550.434	0	7.187.550.434	6.774.028.436	-	6.774.028.436
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.139.936.140	(3.000.000)	2.136.936.140	1.162.621.902	(3.000.000)	1.159.621.902
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	5.783.313.827	(64.027.200)	5.719.286.627	4.469.312.727	(56.299.700)	4.413.013.027
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	15.346.484.496	(60.483.100)	15.286.001.396	13.532.312.989	(60.483.100)	13.471.829.889
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	7.240.522.049	(29.800.000)	7.210.722.049	4.249.857.197	(29.800.000)	4.220.057.197

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.492.311.492	(352.306.255)	2.140.005.237	2.454.615.492	(341.310.505)	2.113.304.987
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	7.757.976.025	(582.003.214)	7.175.972.811	23.924.077.177	(1.061.585.955)	22.862.491.222
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	50.964.957.299	(10.270.649.714)	40.694.307.585	5.760.096.605	(28.120.000)	5.731.976.605
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	7.354.852.418	0	7.354.852.418	8.006.185.982		8.006.185.982
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	42.473.617.501	0	42.473.617.501	42.450.517.501	-	42.450.517.501
68	100	KOMISI YUDISIAL	1.256.182.536	0	1.256.182.536	1.206.231.036		1.206.231.036
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	10.970.170.780	0	10.970.170.780	9.721.697.780		9.721.697.780
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	10.192.040.942	(276.955.250)	9.915.085.692	16.175.128.113	(455.955.250)	15.719.172.863
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	3.305.748.483	0	3.305.748.483	46.178.165.626		46.178.165.626
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	546.809.785	(34.150.000)	512.659.785	484.934.785	(29.881.250)	455.053.535
73	107	BADAN SAR NASIONAL	19.284.334.945	0	19.284.334.945	9.356.315.345		9.356.315.345
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	1.859.938.530	(5.637.500)	1.854.301.030	2.145.021.102	(5.637.500)	2.139.383.602
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	5.542.088.050	0	5.542.088.050	5.361.706.050		5.361.706.050
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	3.069.208.880	(100.682.392)	2.968.526.488	2.052.544.413		2.052.544.413
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	17.727.381.614	-	17.727.381.614	13.129.640.963	-	13.129.640.963
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	14.901.552.509	(473.027.250)	14.428.525.259	14.848.929.309	(347.197.750)	14.501.731.559
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	4.497.207.735	0	4.497.207.735	1.098.447.681		1.098.447.681
80	114	SEKRETARIAT KABINET	1.025.306.923	0	1.025.306.923	719.406.923		719.406.923
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	18.235.785.529	(74.100.003)	18.161.685.526	14.217.514.079	(24.700.002)	14.192.814.077
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	15.391.594.544	(6.049.865.752)	9.341.728.792	14.467.173.044	(6.072.358.611)	8.394.814.433
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3.159.583.066	(1.393.306.602)	1.766.276.464	4.953.477.566	(1.331.926.127)	3.621.551.439
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	39.134.440.949	(136.874.651)	38.997.566.298	33.739.811.949	(136.874.651)	33.602.937.298
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	1.755.192.300	0	1.755.192.300			-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	76.437.138.451	0	76.437.138.451	64.042.768.561	-	64.042.768.561
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	8.426.720.817	0	8.426.720.817	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			51.080.294.513.044	(5.233.439.279.028)	45.846.855.234.016	58.765.062.555.725	(4.619.151.708.745)	54.145.910.846.980
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TETAP LAINNYA PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN	NETO	BRUTO	PENYUSUTAN	NETO
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	84.997.116.700	(5.013.140.737)	79.983.975.963	65.836.108.051	-	65.836.108.051
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-	-	-	-	-	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-	-	-	-
97	999.99	BADAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA BUN			84.997.116.700	(5.013.140.737)	79.983.975.963	65.836.108.051	-	65.836.108.051
TOTAL			51.165.291.629.744	(5.238.452.419.765)	45.926.839.209.979	58.830.898.663.776	(4.619.151.708.745)	54.211.746.955.031

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada K/L dan BUN
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	329.911.400
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	17.328.422.600	19.506.469.353
4	005	MAHKAMAH AGUNG	239.137.575.785	326.943.625.797
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	17.864.222.300	3.558.430.310
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	12.376.892.818	8.521.200.525
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	152.309.976.430	150.876.367.949
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	89.431.455.069	13.323.030.772
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	18.532.210.503.625	28.282.304.818.807
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	288.538.742.791	423.520.044.331
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	206.417.421.601	275.254.244.594
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	22.236.085.173	17.322.427.589
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	63.090.939.723	155.029.459.736
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	532.270.673.797	1.735.236.086.168
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	32.109.534.219.729	20.602.612.144.065
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	701.356.750.775	542.015.240.972
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	3.379.500.085.896	3.487.998.621.611
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.235.865.769.638	1.356.906.741.380
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	22.775.291.346	56.048.805.311
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	623.272.587	1.211.880.350
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	41.570.765.718	27.082.864.734
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	329.571.709.867	452.531.779.388
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	52.596.156.693.721	48.684.918.306.149
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	1.861.761.752	722.709.700
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	221.138.438.031	81.638.545.892
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.288.255.220	294.470.000
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	5.442.112.727.159	6.698.975.733.947
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	2.505.285.000	2.505.285.000
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	-	
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	4.241.599.437	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.265.812.700	3.066.763.790
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	-	4.089.076.204
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	28.726.057.332	2.870.388.000
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	576.461.569.334
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.013.851.417	755.948.960.950
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	3.488.138.787.834	1.980.121.946.478
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	5.855.812.906	13.803.985.221
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	5.553.739.362	5.553.739.362
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada K/L dan BUN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	80.224.344.455	-
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	24.495.714.219	35.864.803.190
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASI	3.190.102.000	4.406.373.000
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	12.939.713.578	17.070.000
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.225.776.283	1.994.726.283
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	8.701.286.854	138.889.183.974
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	684.298.900	49.643.658.750
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	845.053.000	709.146.400
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	391.004.559.635	312.876.970.716
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	4.384.589.900	-
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	3.837.380.508	3.837.380.508
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	2.596.788.000	2.596.788.000
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	12.468.732.200	980.455.800
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	8.695.658.037
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	7.265.552.500	1.440.077.500
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	202.790.179.132	206.848.093.348
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.770.819.290	541.133.005.008
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.065.989.528	163.548.472.705
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.304.624.372	5.304.624.372
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	19.009.056.300	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	2.352.784.000	2.352.784.000
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	648.273.500	136.360.505.942
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERIN	1.401.456.713	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	680.670.000	1.142.780.000
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	51.250.225.230	1.960.915.550
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	11.754.922.708	11.754.922.708
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	426.717.114.669	179.767.524.217
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	37.125.000
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	1.439.032.500	1.439.032.500
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	17.418.636.877	262.512.050
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	93.881.368.045	86.163.493.045
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	704.879.141.912	458.376.665.237
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	12.131.378.142	303.572.000
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-
JUMLAH PADA K/L			121.909.229.164.089	119.107.813.995.009
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan pada K/L dan BUN
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	50.099.177.219	581.649.750
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-	
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	
97	999.99	BADAN LAINNYA	-	
JUMLAH PADA BUN			50.099.177.219	581.649.750
TOTAL			121.959.328.341.308	119.108.395.644.759

20. TP/TGR

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	108.400.474	(542.003)	107.858.471	-	-	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.908.215.990	(2.523.276.509)	384.939.481	2.901.929.813	(2.502.662.332)	399.267.481
4	005	MAHKAMAH AGUNG	49.115.563	(245.578)	48.869.985	95.233.241	(476.185)	94.757.076
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	99.858.627	(499.293)	99.359.334	102.258.627	(511.293)	101.747.334
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	1.022.251.411	(744.651.976)	277.599.435	289.497.224	(26.640.451)	262.856.773
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	992.767.597	(947.375.148)	45.392.449	4.185.889.557	(4.164.853.482)	21.036.075
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	901.155.492	(16.168.275)	884.987.217	838.633.567	(15.762.511)	822.871.056
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	11.935.822.280	(11.532.348.151)	403.273.129	383.014.991	(1.915.074)	381.099.917
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	927.024.746	(77.866.372)	849.158.374	1.334.298.224	(71.893.375)	1.262.404.849
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-	-	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	750.000	(3.750)	746.250	59.445.000	(47.306.000)	12.139.000
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.289.750.741	(306.686.998)	8.983.063.743	8.745.916.711	(1.133.438.584)	7.612.478.127
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	9.300.000	(46.500)	9.253.500	3.700.000	(21.000)	3.679.000
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	8.906.350.598	(1.616.556.125)	7.289.794.473	2.061.192.803	(67.215.654)	1.993.977.149
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	792.492.741	(119.163)	792.373.578	771.071.926	(92.333)	770.979.593
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	29.000.000	(145.000)	28.855.000	-	-	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	2.730.858.857	(1.272.060.609)	1.458.598.248	1.339.590.903	(6.697.955)	1.332.892.948
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	258.335.449	(1.201.934)	257.133.515	129.379.380	(465.447)	128.913.933
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	395.413.327	(287.925.030)	107.488.297	395.094.881	(264.783.047)	130.311.834
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	-	-	-	-	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-	-	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	168.064.805	(168.064.805)	-	173.542.605	(168.092.194)	5.450.411
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	33.964.410	(169.822)	33.794.588	33.964.410	(169.822)	33.794.588
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	5.939.574.151	(5.380.169.465)	559.404.686	5.383.789.111	(5.377.660.674)	6.128.437
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-	-	-
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-	-	-
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	817.073.466	(817.073.466)	-	80.543.571	(402.718)	80.140.853
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	77.732.912	(5.475.316)	72.257.596	520.218.124	(78.192.535)	442.025.589
37	055	KEMENTERIAN PPW/BAPPENAS	-	-	-	37.180.778	(185.804)	36.974.972
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.893.259.407	(2.008.394.105)	884.865.302	2.719.685.953	(2.025.304.029)	694.381.924
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	91.984.349	(459.921)	91.524.428	88.780.141	-	88.780.141
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	1.996.000	(9.980)	1.986.020
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	8.101.385.125	(1.325.510.920)	6.775.874.205	1.497.480.693	(1.292.491.396)	204.989.297
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	14.953.364	(74.767)	14.878.597	18.140.000	(90.700)	18.049.300
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	747.851.422	(740.827.049)	7.024.373	470.579.319	(7.285.429)	463.293.890
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	-	-	-	-	-	-
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	118.837.638	(791.005)	118.046.633	159.060.318	(795.302)	158.265.016
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	212.680.410	(1.063.402)	211.617.008	407.456.963	(2.037.285)	405.419.678
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	108.356.464	(541.782)	107.814.682	20.356.464	(101.782)	20.254.682
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	3.015.240.306	(147.605.981)	2.867.634.325	2.370.303.482	(88.426.229)	2.281.877.253
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	25.476.000	(2.547.600)	22.928.400	22.236.000	(111.180)	22.124.820
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	62.463.254.102	(62.463.254.102)	-	-	-	-
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	23.542.910.041	(20.650.812.959)	2.892.097.082	23.698.813.133	(20.711.789.071)	2.987.024.062
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	65.957.508.409	(65.957.508.409)	-	72.223.291.789	(72.223.291.789)	-
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	2.026.247.201	(2.026.247.201)	-	64.786.900	(64.786.900)	-
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	10.600.324.210	(10.585.391.250)	14.932.980	10.496.497.480	(10.477.481.040)	19.016.440
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	1.274.812.500	(6.374.063)	1.268.438.437
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	71.360.000	(356.800)	71.003.200	100.036.256	(500.181)	99.536.075
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	222.413.805	(1.112.069)	221.301.736	-	-	-
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3.499.500	(17.498)	3.482.002	-	-	-
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	30.241.842.834	(29.922.736.384)	319.106.450	28.870.458.234	(28.672.552.734)	197.905.500
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.249.977.644	(331.265.754)	1.918.711.890	1.953.588.982	(9.767.945)	1.943.821.037
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-
66	093	KOMISI PEMBERANTARAN KORUPSI	254.654.453	(1.273.272)	253.381.181	402.621.204	(2.013.106)	400.608.098
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	-	-	-	-	-	-
68	100	KOMISI YUDISIAL	-	-	-	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2.750.000	(13.750)	2.736.250	35.750.000	(1.787.500)	33.962.500
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	283.020.000	(1.465.100)	291.554.900	62.800.000	(314.000)	62.486.000
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	-	-	-	-	-	-
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	2.081.830	(2.081.830)	-	3.172.738	(3.172.738)	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
76	110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-	-	-
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-	-	-	-
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-	-	-	-
80	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-	-	-	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	-	-	-	-	-	-
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	116.847.608	(584.238)	116.263.370	128.515.108	(66.450.073)	62.065.035
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	123.125.000	(49.375)	123.075.625	352.058.844	-	352.058.844
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	-	-	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	-	-	-	-	-	-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	-	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L			261.894.714.759	(221.870.658.811)	40.024.055.948	177.308.644.926	(149.586.372.902)	27.722.272.024
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-	-	-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (<i>AUDITED</i>)			31 DESEMBER 2016 (<i>AUDITED</i>)		
			BRUTO	PENYISIHAN	NETO	BRUTO	PENYISIHAN	NETO
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	-					
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-					
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-					
97	999.99	BADAN LAINNYA	-					
JUMLAH PADA BUN			0	0	0	0	0	0
TOTAL			261.894.714.759	(221.870.658.811)	40.024.055.948	177.308.644.926	(149.586.372.902)	27.722.272.024

21. ATB

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)				31 DESEMBER 2016 (AUDITED)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	NETTO	AMORTISASI *)	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	NETTO	AMORTISASI
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	2.048.944.540	-	2.048.944.540	(1.260.756.045)	1.246.944.540	-	1.246.944.540	(1.127.822.295)
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	41.851.828.145	-	41.851.828.145	(20.248.695.119)	37.876.312.745	-	37.876.312.745	(18.414.853.441)
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	186.848.003.424	-	186.848.003.424	(92.995.689.043)	180.714.189.782	-	180.714.189.782	(83.068.384.338)
4	005	MAHKAMAH AGUNG	31.509.885.319	-	31.509.885.319	(27.460.451.378)	29.795.119.702	-	29.795.119.702	(25.346.824.454)
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	279.643.543.244	-	279.643.543.244	(86.512.450.302)	83.546.464.745	-	83.546.464.745	(55.457.840.995)
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	35.096.856.423	-	35.096.856.423	(21.646.238.431)	29.779.673.648	-	29.779.673.648	(16.556.334.311)
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	787.967.553.266	-	787.967.553.266	(710.627.656.569)	768.679.588.136	-	768.679.588.136	(688.887.296.746)
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	85.980.730.994	-	85.980.730.994	(42.920.934.432)	56.652.721.889	-	56.652.721.889	(27.805.639.587)
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	3.276.440.860.850	160.554.154.191	3.436.995.015.041	(933.005.739.662)	2.779.456.641.381	210.009.528.003	2.989.466.169.384	(727.157.579.864)
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	486.690.695.488	-	486.690.695.488	(328.424.502.247)	461.681.674.908	-	461.681.674.908	(304.219.924.435)
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.202.236.914.878	-	1.202.236.914.878	(952.878.516.287)	1.146.917.263.396	392.397.500	1.147.309.660.896	(751.554.634.435)
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	91.781.280.244	-	91.781.280.244	(29.988.481.728)	97.302.752.042	-	97.302.752.042	(28.352.590.580)
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	24.275.992.406	-	24.275.992.406	(19.322.236.131)	23.255.281.409	-	23.255.281.409	(12.449.169.268)
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	234.486.989.726	213.324.400	234.700.314.126	(150.362.467.998)	202.177.515.282	-	202.177.515.282	(132.334.283.067)
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.226.511.102.716	27.384.526.240	2.253.895.628.956	(350.226.863.727)	1.940.883.522.315	25.959.472.540	1.966.842.994.855	(274.610.502.702)
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	280.089.370.653	-	280.089.370.653	(130.993.724.869)	297.514.921.388	-	297.514.921.388	(107.821.724.707)
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	230.678.798.039	-	230.678.798.039	(155.600.611.475)	213.167.258.009	776.543.200	213.943.801.209	(112.617.414.670)
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	140.303.459.538	-	140.303.459.538	(92.128.112.341)	129.780.496.061	-	129.780.496.061	(80.598.712.614)
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	46.692.881.104	-	46.692.881.104	(25.381.243.244)	47.358.592.319	-	47.358.592.319	(33.945.119.386)
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	84.518.479.682	-	84.518.479.682	(62.378.285.243)	93.656.619.444	-	93.656.619.444	(58.807.591.893)
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	128.691.760.797	-	128.691.760.797	(55.131.953.667)	125.021.849.049	80.000.000	125.101.849.049	(46.330.164.715)
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	227.867.709.404	-	227.867.709.404	(83.211.149.032)	94.755.706.241	-	94.755.706.241	(49.212.626.369)
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	7.109.439.406.318	18.272.265.508	7.127.711.671.826	(79.343.230.442)	6.420.489.780.432	29.508.313.321	6.449.998.093.753	(59.701.618.067)
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	12.973.832.925	-	12.973.832.925	(10.509.786.354)	72.246.277.039	-	72.246.277.039	(51.641.515.081)
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	11.050.106.455	-	11.050.106.455	(3.726.105.444)	4.473.600.090	-	4.473.600.090	(1.064.995.218)
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	824.826.500	-	824.826.500	(573.706.813)	2.097.105.090	-	2.097.105.090	(1.235.097.588)
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	40.509.270.005	-	40.509.270.005	(12.667.554.455)	18.941.163.138	-	18.941.163.138	(7.702.953.038)
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	20.665.430.090	-	20.665.430.090	(18.187.193.269)	21.765.271.930	-	21.765.271.930	(14.983.007.662)
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	659.214.561.968	-	659.214.561.968	(272.364.973.760)	675.185.161.223	336.160.000	675.521.321.223	(243.538.915.244)
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	33.602.470.392	-	33.602.470.392	(32.610.613.123)	29.947.341.792	-	29.947.341.792	(25.839.949.235)
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	17.450.041.700	-	17.450.041.700	(8.120.515.137)	16.822.378.700	-	16.822.378.700	(4.369.631.462)
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	2.764.262.420	-	2.764.262.420	(1.801.383.655)	4.851.151.170	-	4.851.151.170	(3.954.753.294)
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.395.915.619.396	-	2.395.915.619.396	(666.254.090.724)	447.182.820.388	-	447.182.820.388	(431.325.404.266)
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	519.579.003.827	-	519.579.003.827	(290.434.062.700)	442.140.969.019	-	442.140.969.019	(254.862.162.618)
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	125.931.109.678	-	125.931.109.678	(34.387.154.066)	76.184.895.702	-	76.184.895.702	(14.192.315.494)
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	610.562.099.050	-	610.562.099.050	(398.430.633.714)	626.472.672.150	-	626.472.672.150	(368.375.947.603)
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	44.716.060.923	-	44.716.060.923	(28.275.579.590)	36.650.679.297	-	36.650.679.297	(23.921.165.375)
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN	188.349.708.641	-	188.349.708.641	(136.594.388.921)	159.882.016.488	1.528.261.000	161.410.277.488	(117.744.477.458)
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	120.320.467.050	-	120.320.467.050	(31.789.615.621)	98.981.340.117	-	98.981.340.117	(26.697.475.026)
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	348.431.857.608	-	348.431.857.608	(253.534.169.345)	329.282.263.691	-	329.282.263.691	(286.013.938.147)
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2.566.058.520.086	-	2.566.058.520.086	(616.095.070.229)	982.338.991.264	-	982.338.991.264	(365.419.451.799)
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	87.632.831.258	8.236.000	87.641.067.258	(30.274.586.793)	82.465.434.495	21.784.084	82.487.218.579	(20.300.242.051)
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	202.982.948.732	-	202.982.948.732	(176.043.862.461)	188.901.832.201	-	188.901.832.201	(164.659.164.580)
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	72.133.349.427	-	72.133.349.427	(55.244.939.910)	68.120.295.015	-	68.120.295.015	(53.290.468.765)
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	134.423.480.480	620.181.072	135.043.661.552	(73.698.815.701)	115.191.865.578	620.181.072	115.812.046.650	(62.266.963.126)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)				31 DESEMBER 2016 (AUDITED)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	NETTO	AMORTISASI *)	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	NETTO	AMORTISASI
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	7.775.495.654	-	7.775.495.654	(3.350.454.065)	6.860.302.507		6.860.302.507	(2.757.698.313)
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	35.664.443.701	-	35.664.443.701	(26.404.030.957)	32.297.196.201		32.297.196.201	(18.388.234.379)
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.807.924.589	-	2.807.924.589	(2.517.750.527)	2.718.824.589		2.718.824.589	(2.350.453.027)
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	435.079.324.618	-	435.079.324.618	(322.305.865.181)	441.140.868.374		441.140.868.374	(249.299.774.344)
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	5.281.486.456	-	5.281.486.456	(3.941.423.652)	4.797.406.456		4.797.406.456	(3.148.162.235)
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	15.188.586.616	-	15.188.586.616	(10.314.413.285)	14.742.839.616		14.742.839.616	(8.831.244.432)
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	23.693.936.634	-	23.693.936.634	(15.605.032.978)	19.879.717.649		19.879.717.649	(10.590.441.875)
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	68.725.714.782	-	68.725.714.782	(23.582.931.031)	52.387.635.791		52.387.635.791	(21.717.374.912)
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	29.703.690.264	-	29.703.690.264	(21.215.361.924)	250.406.410.524		250.406.410.524	(18.038.302.480)
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	101.173.070.117	-	101.173.070.117	(90.335.040.760)	98.616.987.287		98.616.987.287	(85.588.327.112)
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	288.449.451.263	109.347.500	288.558.798.763	(62.258.641.367)	96.568.191.586	119.453.628.520	216.021.820.106	(50.834.374.519)
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	2.324.586.515.746	12.447.669.044	2.337.034.184.790	(1.236.507.054.414)	1.897.053.036.817		1.897.053.036.817	(113.738.777.600)
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	9.964.060.400	-	9.964.060.400	(6.120.315.114)	7.851.599.520		7.851.599.520	(4.327.125.677)
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	5.914.301.501	-	5.914.301.501	(2.686.023.015)	4.288.868.611		4.288.868.611	(1.775.678.094)
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.907.022.400	-	2.907.022.400	(2.603.776.400)	3.780.223.900		3.780.223.900	(2.116.952.833)
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	11.164.778.155	-	11.164.778.155	(8.360.850.258)	9.383.754.005		9.383.754.005	(8.303.488.475)
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	171.319.688.743	-	171.319.688.743	(164.208.110.769)	166.113.129.174		166.113.129.174	(152.332.321.540)
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	28.890.230.947	91.848.750	28.982.079.697	(17.877.018.118)	24.111.675.470	3.127.824.000	27.239.499.470	(13.616.428.167)
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	115.035.820.201	-	115.035.820.201	(93.057.662.629)	108.750.648.391		108.750.648.391	(72.465.982.069)
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	18.380.270.511	662.762.984.362	681.143.254.873	(9.321.727.022)	9.735.828.900		9.735.828.900	(5.286.052.875)
66	093	KOMISI PEMERANTASAN KORUPSI	59.262.265.326	-	59.262.265.326	(34.917.771.045)	48.938.310.428	1.527.146.500	50.465.456.928	(27.070.628.263)
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	4.601.574.152	-	4.601.574.152	(5.834.556.008)	5.834.646.652		5.834.646.652	(5.530.721.089)
68	100	KOMISI YUDISIAL	2.304.693.472	-	2.304.693.472	(1.792.254.982)	2.260.693.472		2.260.693.472	(1.512.294.504)
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	168.552.971.840	-	168.552.971.840	(38.539.342.467)	81.838.224.579		81.838.224.579	(17.663.917.388)
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA	13.433.259.188	-	13.433.259.188	(11.081.823.262)	11.517.849.770		11.517.849.770	(9.288.381.335)
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	549.989.747	-	549.989.747	(475.697.897)	549.989.747		549.989.747	(475.697.897)
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	26.292.596.173	1.524.809.315	27.817.405.488	(18.131.785.630)	27.144.662.601	582.840.000	27.727.502.601	(14.507.246.812)
73	107	BADAN SAR NASIONAL	157.063.868.355	-	157.063.868.355	(69.605.396.465)	130.224.468.950		130.224.468.950	(52.104.281.341)
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	853.777.863	-	853.777.863	(617.551.548)	658.349.163		658.349.163	(520.938.571)
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	83.622.017.421	157.293.440	83.779.310.861	(2.035.890.228)	82.456.531.421	158.133.440	82.614.664.861	(1.672.875.662)
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	669.729.234	-	669.729.234	(537.294.420)	467.059.234		467.059.234	(187.013.896)
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	185.113.852.194	-	185.113.852.194	(7.805.174.514)	162.007.782.083		162.007.782.083	(6.593.259.868)
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	66.148.324.196	3.302.885.193	69.451.209.389	(17.457.399.673)	57.097.001.849	3.302.885.193	60.399.887.042	(13.855.498.199)
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	232.294.756.728	-	232.294.756.728	(7.208.755.326)	86.212.586.929		86.212.586.929	(236.744.993)
80	114	SEKRETARIAT KABINET	7.838.307.274	-	7.838.307.274	(8.076.432.584)	7.785.432.274		7.785.432.274	(6.777.497.237)
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	10.053.076.337	-	10.053.076.337	(10.901.105.496)	7.999.715.643		7.999.715.643	(4.546.871.753)
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	4.836.516.518	-	4.836.516.518	(2.978.097.616)	3.936.383.818	852.685.000	4.789.068.818	(1.905.163.819)
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	2.721.976.916	-	2.721.976.916	(887.216.468)	4.696.260.127		4.696.260.127	(2.896.120.431)
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	260.850.000	-	260.850.000	0	260.850.000		260.850.000	
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	65.021.318.908	-	65.021.318.908	(48.928.451.337)				
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	1.232.575.000	-	1.232.575.000	(422.776.500)	1.069.830.000		1.069.830.000	(133.728.750)
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	6.688.347.500	-	6.688.347.500	(186.466.250)	5.933.152.500		5.933.152.500	
JUMLAH PADA K/L			30.258.867.363.449	887.449.525.015	31.146.316.888.464	(10.015.012.414.379)	23.742.211.341.048	398.237.783.373	24.140.449.124.421	(7.252.764.723.835)
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-	-	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET TAK BERWUJUD
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)				31 DESEMBER 2016 (AUDITED)			
			ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	NETTO	AMORTISASI *)	ASET TAK BERWUJUD	ASET TAK BERWUJUD DALAM Pengerjaan	NETTO	AMORTISASI
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-	-	-	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	146.774.243.367	-	146.774.243.367	(57.616.621.604)	128.789.718.217	-	128.789.718.217	(42.953.242.203)
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	-	-	-	-	-	-	-	-
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-	-	-	-	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PADA K/L BUN			146.774.243.367	-	146.774.243.367	(57.616.621.604)	128.789.718.217	-	128.789.718.217	(42.953.242.203)
TOTAL			30.405.641.606.816	887.449.525.015	31.293.091.131.831	(10.072.629.035.983)	23.871.001.059.265	398.237.783.373	24.269.238.842.638	(7.295.717.966.038)

*) Amortisasi pada KL merupakan penjumlahan dari Akumulasi Amortisasi ATB dan Akumulasi ATB yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah

22. ASET EKS BPPN

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET INVENTARIS EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2017**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2017 <i>(Audited)</i>		Mutasi TA 2017		Saldo 31 Desember 2016 <i>(Audited)</i>		Keterangan
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	
1	Aset Inventaris	32.408	11.009.466.267,35	(4.403)	(893.631.109)	36.811	11.903.097.376,35	
	a. Digunakan Instansi	11.274	6.400.600.338,35	0	0	11.274	6.400.600.338,35	
	b. Tidak Digunakan (idle)	21.134	4.608.865.929,00	(4.403)	(893.631.109)	25.537	5.502.497.038,00	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN ASET PROPERTI EKS BPPN
31 DESEMBER 2017

No.	KOREKSI	Saldo Per 31 Desember 2016		Mutasi Semster I 2017				Mutasi Semester II 2017				Saldo Per 31 Desember 2017	
				Tambah		Kurang		Tambah		Kurang			
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	337	334.725.650.660	583	37.000.000.000	(1)	(1.600.409.549)			(4)	(6.336.790.764,00)	915	363.788.450.347,00
2	Temuan BPK	370	769.901.849.869	1	-					(1)	(2.626.300.000,00)	370	767.275.549.869,15
3	BJDA (verifikasi 2009)	63	281.187.736.000									63	281.187.736.000,00
4	Settlement	-	-	4	56.991.143.000					(4)	(56.991.143.000,00)	-	-
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-									-	-
	Sinar Bonana	42	139.208.400.000									42	139.208.400.000,00
6	Griya Potensa	2	295.000.000									2	295.000.000,00
7	Covernote	98	157.799.804.037							(2)		96	157.799.804.037,00
		912	1.683.118.440.566	588	93.991.143.000	(1)	(1.600.409.549)			(11)	(65.954.233.764,00)	1.488	1.709.554.940.253,15

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET REKENING NOSTRO EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2017**

No	Status Bank	Nama Bank Penyimpan	Jumlah Account	Per 31 Desember 2016		Mutasi SEMESTER I (Rp)	Mutasi SEMESTER II (Rp)	Per 31 Desember 2017	
				Nilai (Rp)	Total (Rp)			Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	Bank Dalam Negeri	Bank CICI, Jakarta (telah disetorkan ke RKUN)	1	-	15.706.019.783,62	-	-	-	15.706.019.783,62
		Bank CICI, Jakarta (dalam penelusuran)		2.044.748,60		-	-	2.044.748,60	
		BCA Solo	1	1.776.080,31		-	-	1.776.080,31	
		BRI Cut Mutiah	1	83.311.328,35		-	-	83.311.328,35	
		Citibank	1	8.776.916.074,45		-	-	8.776.916.074,45	
		BPR Tri Sejahtera Makmur, Jkt	1	97.686.237,95		-	-	97.686.237,95	
		Bank Ganesha, Jkt (Eks BDN)	1	706.429.119,47		-	-	706.429.119,47	
		Bank Ganesha, Jkt (Eks BDR dalam penelusuran)	1	196.059.779,49		-	-	196.059.779,49	
		Bank Ganesha, Jkt (Eks BDR terkonfirmasi)	1	5.841.796.415,00		-	-	5.841.796.415,00	
2	Tidak Diketahui	-	1	2.359.921.197,78	2.359.921.197,78	-	-	2.359.921.197,78	2.359.921.197,78
3	Telah Likuidasi	Bank Aspac	1	287.761,43	1.181.507.599,77	-	-	287.761,43	1.181.507.599,77
		Bank Astria (dalam likuidasi)	1	6.601.373,85		-	-	6.601.373,85	
		Bank Central Dagang	1	625.069,88		-	-	625.069,88	
		Bank Central Dagang	1	2.994.990,16		-	-	2.994.990,16	
		Bank Modern	1	6.207.877,95		-	-	6.207.877,95	
		Bank Umum Majapahit	1	122.086.331,08		-	-	122.086.331,08	
		Bank Umum Servitia	1	4.887.591,05		-	-	4.887.591,05	
		BDNI Finance, Hongkong	1	1.020.060.447,69		-	-	1.020.060.447,69	
		Bank Pelita	1	6.017.122,84		-	-	6.017.122,84	
		Bank Bahari	1	11.739.033,84		-	-	11.739.033,84	
4	Bank Indonesia (BI)	Bank Indonesia (Bank Ficorinvest dan telah disetorkan ke RKUN)	1	-	406.733.525.331,33	-	-	-	406.733.525.331,33
		TRR - Bank Indonesia	1	406.733.525.331,33		-	-	406.733.525.331,33	
5	Bank Indover (Anak Perusahaan BI)	Bank Indover	26	5.149.857.846,60	5.149.857.846,60	-	-	5.149.857.846,60	5.149.857.846,60
6	Bank Luar Negeri		44	28.649.547.877,84	28.649.547.877,84	-	-	28.649.547.877,84	28.649.547.877,84
TOTAL NOSTRO (DATA BPK RI)				90	459.780.379.636,94	-	-	-	459.780.379.636,94
Rekening Eks. Bank BIRA di ClearStream Banking SA		USD 258.438,50		3.472.379.686,00	3.472.379.686,00	(30.237.304,50)	59.182.416,50	3.501.324.798,00	3.501.324.798,00
Rekening Eks. Bank TATA di Bank Indonesia (telah disetorkan ke RKUN)				-	-	-	-	-	-
Rekening Eks. Bank Bahari di Courtts Bank Hongkong Branch		USD 350.526,24						4.748.929.499,52	4.748.929.499,52
Masih dalam Penelusuran				5.286.428.760,72	5.286.428.760,72	30.237.304,50	(4.808.111.916,02)	508.554.149,20	508.554.149,20
TOTAL NOSTRO (CaLK Laporan Aktiva Bersih BPPN yang dilaksanakan oleh BPK RI per 30 April 2004)					468.539.188.083,66			-	468.539.188.083,66
					-				
					-				
Nilai Aset Nostro di Necara LKTK				9.314.176.101,00				14.092.050.712,52	-
* Pengkonversian nilai rekening Bank BIRA di ClearStream Banking SA dan rekening Bank Bahari di Courtss Bank menggunakan kurs tengah BI per tanggal 30 Desember 2017 sebesar Rp13.436									
** Nilai yang tercatat di Neraca adalah Rekening yang telah terkonfirmasi sedangkan sisanya tercatat di CaLK									
*** Naiknaikan nilai aset nostro yang tersimpan di ClearStream Banking SA dikarenakan selisih kurs									

Penjelasan**Penelusuran dan Konfirmasi Dana Nostro**

- 1 Telah dilaksanakan rapat dengan PPATK pada tanggal 18 Juni 2015
- 2 DJKN melalui surat Nomor S-1376/KN.5/2014 s.d. S-1381/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta informasi kepada Bank Indonesia dan 5 Bank Dalam Negeri dimaksud, terkait keberadaan rekening nostro eks. BBO/BBKU di bank-bank tersebut. PT Bank Mutiara mengkonfirmasi rekening tersebut serta telah menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tanggal 18 September 2014 dan PT Bank BCA, Tbk Cabang Solo meminta tambahan data mengenai rekening tersebut. Sedangkan tiga bank lainnya (Citibank, BRI, dan BPR Tri Sejahtera Makmur) tidak memberikan tanggapan.

Progress Pengelolaan Dana Nostro di Bank Indonesia

- 1 Menanggapi surat Direktorat PKNSI, DJKN nomor S-2369/KN.5/2014 tanggal 30 September 2014, Bank Indonesia melalui surat nomor 16/156/DPTP tanggal 26 November 2014, menyatakan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan koreksi fasilitas diskonto dan koreksi overdraft (bukan aset nostro eks. BBO/BBKU) namun demikian BI masih melakukan penelitian dan penelusuran. Untuk rekening senilai Rp406.733.525.331,33 BI belum menemukan informasi mengenai data dimaksud. Sedangkan untuk rekening Bank Indover, tidak terdapat nama bank eks. BBO/BBKU yang mengklaim dana ke Bank Indover, namun demikian sebagai informasi terdapat tagihan Pemerintah kepada Trustee Indover Bank senilai EUR 338.538,20 yang berstatus dispute.
- 2 Selanjutnya, melalui surat undangan nomor UND-57/KN.5/2017 tanggal 25 Februari, DJKN mengundang Bank Indonesia untuk melakukan rapat pembahasan dana nostro di Bank Indonesia pada tanggal 5 Maret 2014. Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam sistem penatausahaan rekening Bank Indonesia, saat ini tidak tercatat rekening atas nama eks. Bank BDNi. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia meminta informasi yang lebih rinci atas rekening dimaksud berupa nomor rekening, nama rekening, nominal dan periode penyimpanan, untuk melakukan pengecekan apakah pernah ada rekening atas nama Bank BDNi di Bank Indonesia dan apabila ada bagaimana proses penutupan rekening tersebut. Sesuai penjelasan Bank Indonesia, penutupan rekening dilakukan setelah rekening tersebut bersaldo nol.
 - b. Berdasarkan Dokumen Daftar Klaim dari Trustee Indover Bank per tanggal 20 Oktober 2009 yang disampaikan Bank Indonesia, diketahui bahwa terdapat tagihan Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan kepada Trustee Indover Bank yang berasal dari dana eks. BBO/BBKU dengan nilai sebesar EUR 338.538,20 yang berstatus dispute, dengan Person in Charge (PIC) Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu, namun berdasarkan Dokumen Daftar Klaim per tanggal 10 September 2010, tagihan Kementerian Keuangan tersebut telah bersaldo nol.
 - c. Bank Indonesia saat ini menatausahakan rekening eks. Bank Ficorinvest dan Bank Tata dengan nilai sebesar Rp10.028.227.629,98, namun dikarenakan kedua rekening tersebut dibuka oleh internal Bank Indonesia terkait fasilitas diskonto dan koreksi overdraft maka Bank Indonesia masih memerlukan waktu untuk melakukan penelitian dan penelusuran atas dana di kedua rekening tersebut.
- 3 Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Laporan Nomor LAP- DI/KN.5.2/2014 tentang Pelaksanaan Penelitian/Penelusuran Dokumen Aset Nostro Eks BPPN dan surat tugas Direktur PKNSI nomor ST-1131/KN.5/2016 tanggal 15 Desember 2016, telah dilakukan penelusuran dokumen terkait rekening eks. BDNi di gudang eks. Danahutama namun belum ditemukan dokumen dimaksud.
- 4 Melalui surat nomor 18/35/DPTP/Sr/B tanggal 31 Maret 2016, Bank Indonesia menyampaikan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan hak Kementerian Keuangan. Selanjutnya melalui surat nomor 18/104/DPTP-GPTP-DPT/Sr/B tanggal 29 April 2016, Bank Indonesia menyatakan dana eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata tersebut telah disetorkan ke RKUN tanggal 26 April 2016.

Progress Pengelolaan Dana Nostro Eks. BDR di PT Bank Ganesha Tbk

- 1 Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks BDR di Bank Ganesha sebesar Rp5.841.796.415,00, namun PT Bank Ganesha juga menyatakan memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083,00.
- 2 Melalui surat Nomor S-2586/KN.5/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Direktorat PKNSI telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan dana eks BPPN yang tersimpan di PT Bank Ganesha ke rekening KUN. Melalui surat Nomor 277/Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Bank Ganesha menyampaikan bahwa :
 - a. Tidak terdapat outstanding dana eks BDNi pada PT Bank Ganesha.
 - b. Terdapat kewajiban PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415,00, namun PT Bank Ganesha juga memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083,00 sehingga secara set off eks BDR masih mempunyai kewajiban membayar kepada PT Bank Ganesha sebesar Rp45.605.763.668,00.
- 3 Menanggapi surat PT Bank Ganesha tersebut, melalui surat Nomor S-35/KN.5/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan dan S-1157/KN.5/2015 tanggal 15 April 2015, Direktorat PKNSI telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan kewajibannya kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415,00 ke RKUN karena dana tersebut tidak dapat dilakukan set off sedangkan tagihan PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp51.447.560.083,00 penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme APBN dan harus didukung dengan dokumen yang lengkap. Namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan dari PT Bank Ganesha.
- 4 Melalui surat nomor S-2734/KN.5/2015 tanggal 30 Oktober 2015, Dit PKNSI telah meminta bantuan saran/pendapat dari OJK terkait dana eks. BDR yang tersimpan di PT Bank Ganesha. Melalui surat nomor SR-08/PB.332/2016 tanggal 12 Januari 2016, OJK menyarankan DJKN membicarakan langsung hal tersebut dengan manajemen PT Bank Ganesha, sehingga permasalahan dana eks. BDR di PT Bank Ganesha dapat diselesaikan dengan baik.
- 5 Selanjutnya, melalui surat nomor S-200/KN.5/2015 tanggal 16 Februari 2016, DJKN telah mengundang PT Bank Ganesha untuk melakukan pembahasan, namun PT Bank Ganesha tidak hadir. Atas ketidakhadiran tersebut, melalui surat No.088/DIR/II/16 tanggal 23 Februari 2016, PT Bank Ganesha menyampaikan permintaan waktu untuk memastikan dan melengkapi data.
- 6 Berdasarkan PMK nomor 17/PMK.05/2005, program penjaminan yang dilaksanakan oleh BPPN dengan memberikan jaminan terhadap pembayaran Bank Umum telah berakhir sejak tanggal 22 September 2005, dengan demikian maka tagihan Bank Ganesha kepada Bank BDR sudah tidak dijamin pemerintah sehingga sehingga set off dengan dana Bank BDR tidak dapat dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui surat nomor S-2369/KN.5/2016 tanggal 23 Desember 2016, Direktorat PKNSI telah meminta kembali Bank Ganesha untuk menyetorkan dana Bank BDR ke RKUN.
- 7 Menanggapi surat Direktorat PKNSI tersebut, melalui surat nomor 037/DIR/II/17 tanggal 2 Februari 2017, PT Bank Ganesha menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1425 dan 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, demi hukum akan terjadi set off antara tagihan eks. BDR kepada PT Bank Ganesha dengan tagihan Bank Ganesha kepada eks. BDR. Dengan demikian, PT Bank Ganesha tidak lagi memiliki tagihan kepada eks. BDR, bahkan sebaliknya eks. BDR masih memiliki kewajiban sebesar Rp45.605.763.668,00 kepada PT Bank Ganesha.
- 8 Berkenaan dengan tanggapan PT Bank Ganesha tersebut, Direktorat PKNSI akan melakukan koordinasi dengan internal Kementerian Keuangan terkait guna pengembalian dana eks. BDR ke rekening kas Negara.

Progress Pengelolaan Dana Nostro Eks. Bank BIRA di ClearStream Banking SA

- 1 Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks Bank BIRA di Clearstream Banking S.A dengan nilai 258.438,50 USD
- 2 Melalui surat nomor S-10044/KN.5/2015 tanggal 18 November 2015, DJKN telah meminta rekening dalam valuta asing kepada Ditjen Perbendaharaan dan telah mendapat tanggapan melalui surat nomor S-9935/PB.3/2015 tanggal 25 November 2015.
- 3 Selanjutnya melalui surat nomor S-S-1147/KN.5/2017 Tanggal 31 Juli 2017, dalam rangka pengalihan dana tersebut ke RKUN, Direktorat PKNSI telah menyampaikan kepada Konsultan Hukum Widyawan & Partners selaku kuasa hukum Clearstream Banking S.A nomor RKUN dalam dollar USD serta draf surat Direktur PKNSI kepada Clearstream Banking S.A untuk permintaan pengalihan dana eks. Bank BIRA tersebut ke RKUN dan spesimen tanda tangan Direktur PKNSI.
- 4 Saat ini, Direktorat PKNSI sedang menunggu tanggapan dari Konsultan Hukum Widyawan & Partners untuk pengembalian dana eks. Bank Bira tersebut ke RKUN.

Progress Pengelolaan Dana Nostro Eks. Bank Bahari di Coutts Bank

- 1 Berdasarkan surat surat Konsultan Hukum Ali Budiarto, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) nomor 001/COB-1601/4/XII/2017/AAD-PW tanggal 4 Desember 2017 dan nomor 004/COB-1601/14/XI/2017/AAD-PW tanggal 14 November 2014 hal Penyampaian Informasi Sehubungan dengan Rencana Pengembalian Aset Bank Bahari, surat Alternate Chief Executive, Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch tanggal 21 Juli 2017 hal Pemberian Konfirmasi dan Permintaan Dokumen serta Prosedur oleh DJKN, dan surat Head and Front Office, Coutts and Co Ltd, Singapore Branch tanggal 17 April 2017 hal Permohonan Klarifikasi Proses Pengembalian Asett maka elah terkonfirmasi dana eks. Bank Bahari tersimpan di Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch sebesar USD350.526,24.
- 2 Mengingat Coutts and Co Ltd akan segera menutup cabang nya di Hongkong dan Singapura, Direktorat PKNSI melalui surat nomor S-1823/KN.5/2017 tanggal 11 Desember 2017, telah meminta Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch untuk segera memindahbukukan dana tersebut ke. RKUN di Bank Indonesia dengan rincian Nomor rekening : 600.502411980, Nama rekening : RKUN dalam valuta USD di Bank Indonesia, SWIFT Code: IND0IDJA.
- 3 melalui email tanggal 2 Januari 2017, Coutts and Co Ltd, Hongkong Branch menyampaikan bahwa telah mencoba melakukan pemindahbukuan dana dimaksud ke RKUN di Bank Indonesia namun tidak berhasil dikarenakan terkendala SWIFT details RKUN di Bank Indonesia.
- 4 Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat PKNSI DJKN melalui surat nomor S-22/KN.5/2018 tanggal 8 Januari 2018 telah bantuan informasi kepada Bank Indonesia mengenai SWIFT details RKUN di Bank Indonesia dan mekanisme pemindahbukuan dana dimaksud ke RKUN.

Dana Nostro yang telah disetorkan ke RKUN

Rekening Eks Bank Central Dagang di Bank CIC (disetorkan tanggal 18 September 2014)

Rekening Eks Bank TATA di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)

Rekening Eks Bank Ficorinvest di Bank Indonesia (disetorkan tanggal 26 April 2016)

Total**Dana Nostro dalam tahap pengembalian ke RKUN**

Rekening Eks BDR di Bank Ganesha

Rekening Eks Bank BIRA di ClearStream Banking SA

Rekening Eks Bank Bahari di Coutts Bank Hongkong Branch

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS BPPN
PER 31 DESEMBER 2017

No.	Nama Aset	Bentuk Surat Berharga	Nominal	Mata Uang	Jumlah Lembar	Nilai Pasar Per Lembar	Nilai Pasar	Tanggal Nilai Pasar	Nilai Konversi Rupiah	Keterangan	Kustodian
a. Corporate Bonds											
1	Dgs International Finance Co.	Scripless	0,01	USD	1.000.000	-	-		Rp -	Telah Dihapuskan oleh Citibank Hongkong	HONGKONG
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	Scripless	101,88	USD	4.500.000	1,02	4.584.685,50	30 November 2017	Rp 62.113.319.154,00	BBO (Telah Likuidasi)	BRUSSEL
3	TPE International Finance Co. Bv	Scripless	1,00	USD	25.000.000	0,01	250.000,00	30 November 2017	Rp 3.387.000.000,00	Emiten Tidak Diketahui	BRUSSEL
4	Ciputra Surya	Coupon	38.750.000,00	IDR	-	1,00	38.750.000,00	27 Juni 2008	Rp 38.750.000,00	Emiten Aktif	JAKARTA
5	Jakarta International Hotel	Coupon	800.000.000,00	IDR	-	1,00	800.000.000,00	27 Juni 2008	Rp 800.000.000,00	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
6	Mulia Glass	Coupon	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000,00	27 Juni 2008	Rp 38.125.000,00	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
7	Mulia Keramik	Coupon	38.125.000,00	IDR	-	1,00	38.125.000,00	27 Juni 2008	Rp 38.125.000,00	Emiten Tidak Diketahui	JAKARTA
8	Polysindo Eka Perkasa	Scripless	2,10	USD	3.000.000	0,02	63.000,00	30 November 2017	Rp 853.524.000,00	Emiten Aktif	BRUSSEL
9	Tpe International Finance Co. Bv	Scripless	1,00	USD	2.000.000	0,01	20.000,00	30 November 2017	Rp 270.960.000,00	Emiten Tidak Diketahui	BRUSSEL
10	Bank Papan	Principal dan Coupon	100,00	IDR	500.000.000	1,00	500.000.000,00	10 Juni 2015	Rp 500.000.000,00	BBO (Telah Likuidasi)	JAKARTA
11	Polysindo Eka Perkasa	Scripless	2,10	USD	4.000.000	0,02	84.000,00	30 November 2017	Rp 1.138.032.000,00	Emiten Aktif	EUROCLEAR
12	Polysindo Eka Perkasa	Scripless	88,21	USD	182.000	0,88	160.547,48	30 November 2017	Rp 2.175.097.259,04	Emiten Aktif	EUROCLEAR
Total									Rp 71.352.932.413,04		
b. Medium Term Notes											
1	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	Scripless	93,92	USD	182.000	0,94	170.937,49	30 November 2017	Rp 2.315.861.114,52	Emiten Aktif	EUROCLEAR
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	Scripless	90,00	USD	20.000.000	0,90	18.000.000,00	30 November 2017	Rp 243.864.000.000,00	Emiten Aktif	HONGKONG
3	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	Scripless	90,00	USD	960.560	0,90	864.504,00	30 November 2017	Rp 11.712.300.192,00	Emiten Aktif	HONGKONG
4	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	Scripless	90,00	USD	965.840	0,90	869.256,00	30 November 2017	Rp 11.776.680.288,00	Emiten Aktif	HONGKONG
5	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	Rp 13.548.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
6	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	Rp 13.548.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
7	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	1.000.000	1,00	1.000.000,00	01 Oktober 2004	Rp 13.548.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
8	Hutama Karya	Principal	100,00	USD	5.000.000	1,00	5.000.000,00	01 Oktober 2004	Rp 67.740.000.000,00	MTN Telah dinyatakan batal dan tidak berlaku	JAKARTA
Total									Rp 378.052.841.594,52		
c. Non-Convertible Debentures											
1	Polysindo Eka Perkasa	Principal	100,00	IDR	5.000.000.000	1,00	5.000.000.000,00	30 November 2017	Rp 5.000.000.000,00	Emiten Aktif	JAKARTA
Total									Rp 5.000.000.000,00		
Total (a+b+c)									Rp 454.405.774.007,56		

Total Nilai

*Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2017

Catatan		
Kurs Tengah BI		Per 30 Desember 2017
1	Dollar Amerika	13.548,00

Keterangan :

- * Emiten surat berharga yang telah dihapus berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saham dan Surat Berharga di Kustodi Citibank antara Dit PKNSI dan BPK RI
- ** Emiten surat berharga berstatus aktif karena masih tercatat di Bursa
- *** MTN dinyatakan batal dan tidak berlaku karena adanya putusan pengadilan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2017

Aset Saham Pada Kustodi Citibank

No.	Nama Emiten	Core Business Emiten	Bentuk Saham	Jumlah Lembar	Nilai per Lembar Saham	Nilai Per 31 Desember 2016	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Konfirmasi kepada Emiten/Ditjen AHU	Tanggapan Emiten	Nomor Surat Emiten
1	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pa	Manufaktur Textile	Sertifikat	32137300	153,00	Rp 4.917.006.900,00	Aktif	Berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2017	Surat Nomor S-1353/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
2	PT Apac Citra Centertex, Tbk	Manufaktur Textile	Sertifikat	37459700	153,00	Rp 5.731.334.100,00	Aktif		Surat Nomor S-1352/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
3	PT Aster Dharma Ind.	-	<i>Scripless</i>	40000	850,00	Rp 34.000.000,00	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-422/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat
4	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	46250	75,00	Rp 3.468.750,00	BBO		-	-	-
5	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	363	75,00	Rp 27.225,00	BBO		-	-	-
6	PT Bank Fidorinvest	-	Sertifikat	400	50,00	Rp 20.000,00	BBKU		-	-	-
7	PT Bank PDICI	-	Sertifikat	250	350,00	Rp 87.500,00	BT0		-	-	-
8	PT Bank Surya	-	Sertifikat	800	300,00	Rp 240.000,00	BBO		-	-	-
9	PT Citatah Tbk	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	<i>Scripless</i>	11304425	112,00	Rp 1.266.095.600,00	Aktif		Surat Nomor S-1350/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
10	PT Citatah Tbk	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	<i>Scripless</i>	41421439	112,00	Rp 4.639.201.168,00	Aktif		Surat Nomor S-1351/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	-
11	PT Gajah Tunggal, Tbk	Manufaktur Ban	Sertifikat	200	715,00	Rp 143.000,00	Aktif		Surat Nomor S-1349/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
12	PT Holcim Indonesia, Tbk	Manufaktur Semen	Sertifikat	13898500	805,00	Rp 11.188.292.500,00	Aktif		Surat Nomor S-1348/KN.5/2014 tanggal 13 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memiliki informasi tentang kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
13	PT Langgeng Makmur Industri, Tbk	Manufaktur Plastik	<i>Scripless</i>	57901002	169,00	Rp 9.785.269.338,00	Aktif		Surat Nomor S-1367/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
14	PT Star Pacific, Tbk (dlh. PT Lippo E-Net)	Investasi dan bisnis media	Sertifikat	100	140,00	Rp 14.000,00	Aktif		Surat Nomor S-1368/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
15	PT Merck, Tbk.	Farmasi dan Kimia	Sertifikat	100	40.000,00	Rp 4.000.000,00	Aktif		Surat Nomor S-1369/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham dikarenakan tidak diberikan nama Pemegang Saham	-
16	PT Mulia Industrindo, Tbk	Manufaktur Keramik dan Kaca	Sertifikat		0,00	Rp -			Berdasarkan hasil penelitian dokumen, 50.000.000 lembar saham PT Mulia Industrindo, Tbk yang tersimpan di Kustodi Citibank bukan merupakan aset eks. BPPN		
17	PT Multi Sarana R. Agung	-	Sertifikat	94600	675,00	Rp 63.855.000,00	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-423/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat
18	PT Perdana Inti Investama	-	Sertifikat	49251500	50,00	Rp 2.462.575.000,00	Status Emiten Tidak Diketahui		Surat Nomor S-424/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 kepada Ditjen AHU	-	Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM EKS BPPN
31 DESEMBER 2017

19	PT Prima Alloy Steel Universal, Tbk	Manufaktur velg Kendaraan (Industri Otomotif)	Sertifikat	2500	75,00	Rp 187.500,00	Aktif	Surat Nomor S-1371/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
20	PT Sierad Produce, Tbk	Peternakan	<i>Scriptless</i>	1918865	740,00	Rp 1.419.960.100,00	Aktif	Surat Nomor S-1372/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	-	-
21	PT Sucaco, Tbk	Manufaktur Kabel	Sertifikat	700	8.900,00	Rp 6.230.000,00	Aktif	Surat Nomor S-1373/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	BPPN tidak tercatat atas kepemilikan saham dan meminta informasi tambahan atas asal kepemilikan 700 lembar saham perseroan atas nama BPPN	-
22	PT Sucaco, Tbk	Manufaktur Kabel	<i>Scriptless</i>	348000	8.900,00	Rp 3.097.200.000,00	Aktif	Surat Nomor S-1374/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Confirm atas kepemilikan saham Kementerian Keuangan	-
23	PT Trias Sentosa, Tbk	Manufaktur polypropylene dan polyester film	Sertifikat	100	388,00	Rp 38.800,00	Aktif	Surat Nomor S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014 kepada Emiten	Tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham	-
24	Unit Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksadana Prima d.h. saham PT BDN Reksadana	-	<i>Scriptless</i>	80000000		Rp 42.726.015.195,72	Aktif	Berdasarkan surat PT Dadyndy Entricom selaku Biro Administrasi Efek emiten no DE/X/2014-7152 tanggal 9 Oktober 2014, diketahui saham PT Reksadana Perdana, Tbk dh PT BDN Reksadana telah berubah bentuk menjadi unit KIK Reksadana Prima dengan jumlah konversi atas saham 80.000.000 lembar saham milik Kementerian Keuangan adalah menjadi 29.625.788 unit KIK. Saai ini pengkonversian saham milik Kementerian Keuangan menjadi unit KIK Reksadana Prima belum dilakukan.		
Total						Rp 87.345.261.676,72				

Senua saham yang berstatus aktif, saat ini masih diperdagangkan di BEI. Melalui surat Nomor S-1348/KN.5/2014 s.d. S-1353/KN.5/2014 dan Nomor S-1367/KN.5/2014 s.d. S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham tersebut, atas kepemilikan saham eks. BPPN tersebut. Namun hingga akhir periode penyusunan LKTK tahun 2014, hanya 9 emiten dari 15 emiten yang disurati, yang menjawab surat Direktorat PKNSI tersebut. Dari 9 emiten yang memberikan tanggapan hanya 2 emiten yang mengkonfirmasi kepemilikan saham eks. BPPN sedangkan emiten lainnya tidak memberikan Nilai aset saham eks BPPN yang di Kustodi Citibank berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 November 2017 kecuali untuk KIK Reksadana Perdana berdasarkan nilai pasar per tanggal 29 Desember 2017 (sumber <http://www.bareksa.com/id/data/reksadana/296/reksa-dana-prima>)

Saham Pengelolaan Langsung Oleh DJKN

No.	Nama Emiten	Core Business	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 30 Juni 2017	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten
1	PT Karabha Digdaya	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga golf	100,00%	10.000	Rp 251.240.740.586	Aktif	Nilai buku berdasarkan surat Direksi PT Karabha Digdaya Nomor 002.1/DIR/PTKD/II/17 tanggal 9 Januari 2017	Desa Tapos, Kecamatan Cimanggis, PO.BOX 38, Depok 16953
2	PT Aqua Golden Mississippi	Consumer Goods	0,0024%	312	Rp 312.000	Aktif	Nilai nominal saham berdasarkan Laporan Keuangan perseroan per 31 Desember 2012 (audited)	Cyber 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
3	PT Kabelindo Murni, Tbk	Manufaktur Kabel	6,24%	69.882.400	Rp 47.100.737.600	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Kabelindo Murni, Tbk Nomor 035/DIR-S/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016	Cyber Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Rawagirang No.2 Jakarta 2 building, 12th floor, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950
Total					Rp 298.341.790.186			
Total Aset Saham Eks BPPN					Rp 385.687.051.862,52			

Dalam rangka penyusunan LKTK Semester I tahun 2017, melalui surat nomor S-1042/KN.5/2016 tanggal 5 Juli 2017, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal 30 Juni 2017 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK Semester I tahun 2017 belum ada emiten yang memberikan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 30 Juni 2017 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI

23. ASET LAIN-LAIN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	12.093.595.400	(1.283.710.421)	10.809.884.979	12.093.595.400	(1.283.627.101)	10.809.968.299
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	16.513.703.434	(5.846.076.518)	10.667.626.916	14.637.981.852	(3.546.257.475)	11.091.724.377
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	21.421.653.287	(20.447.536.349)	974.116.938	16.081.207.880	(14.206.515.485)	1.874.692.395
4	005	MAHKAMAH AGUNG	121.947.499.753	(104.123.178.191)	17.824.321.562	109.940.809.621	(90.591.172.521)	19.349.637.100
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	55.088.376.025	(50.099.183.630)	4.989.192.395	45.151.608.491	(38.852.827.747)	6.298.780.744
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	276.502.028.994	(107.525.285.055)	168.976.743.939	294.653.705.611	(111.249.679.505)	183.404.026.106
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	243.017.275.805	(116.957.094.440)	126.060.181.365	425.089.503.853	(172.494.008.618)	252.595.495.235
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	117.733.922.822	(64.846.101.544)	52.887.821.278	122.657.614.740	(75.009.619.644)	47.647.995.096
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	5.099.567.905.903	(3.475.590.062.866)	1.623.977.843.037	4.342.223.039.725	(2.860.447.630.424)	1.481.775.409.301
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	271.241.635.576	(234.938.144.439)	36.303.491.137	232.274.117.943	(210.432.350.150)	21.841.767.793
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	865.287.703.248	(700.350.560.167)	164.937.143.081	839.172.158.195	(741.767.372.284)	97.404.785.911
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	366.970.350.022	(176.107.287.347)	190.863.062.675	187.770.359.319	(136.122.252.124)	51.648.107.195
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.203.012.177.177	(560.070.438.889)	642.941.738.288	1.414.069.209.780	(691.711.011.306)	722.358.198.474
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.110.690.803.891	(370.775.357.075)	739.915.446.816	1.596.186.130.391	(756.384.398.158)	839.801.732.233
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	4.689.311.508.841	(869.299.894.710)	3.820.011.614.131	4.547.082.598.704	(645.076.496.655)	3.902.006.102.049
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	564.843.100.649	(487.310.308.816)	77.532.791.833	556.298.751.485	(516.291.273.149)	40.007.478.336
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.861.374.860.857	(1.572.540.013.150)	288.834.847.707	1.716.758.600.562	(1.381.957.511.870)	334.801.088.692
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	182.792.595.700	(140.465.330.209)	42.327.265.491	199.236.424.838	(144.568.585.152)	54.667.839.686
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	617.430.188.157	(460.742.008.640)	156.688.179.517	332.836.914.242	(143.167.067.444)	189.669.846.798
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	29.632.501.014	(28.327.019.000)	1.305.482.014	28.508.792.750	(25.558.399.685)	2.950.393.065
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	374.479.476.319	(286.310.901.032)	88.168.575.287	315.462.778.698	(217.217.024.399)	98.245.754.299
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	214.641.530.229	(173.983.874.404)	40.657.655.825	183.123.480.134	(157.197.505.546)	25.925.974.588
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	34.514.284.618.434	(7.026.126.413.099)	27.488.158.205.335	17.511.527.471.239	(2.606.835.166.602)	14.904.692.304.637
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	1.710.707.023	(1.706.444.523)	4.262.500	5.167.982.740	(5.136.257.429)	31.725.311
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	3.183.506.702	(2.695.909.439)	487.597.263	3.383.047.381	(3.340.267.878)	42.779.503
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	481.804.150	(432.744.150)	49.060.000	2.937.365.139	(2.682.605.139)	254.760.000
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	60.435.929.219	(7.114.809.417)	53.321.119.802	27.725.569.423	(11.150.248.789)	16.575.320.634
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	4.429.388.813	(367.056.514)	4.062.332.299	2.533.699.859	(1.653.955.713)	879.744.146
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	441.472.902.832	(243.729.312.557)	197.743.590.275	624.125.930.912	(184.906.583.610)	439.219.347.302
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	299.762.228.161	(24.175.450.199)	275.586.777.962	290.990.564.968	(24.020.199.690)	266.970.365.278
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	261.326.200	(149.329.256)	111.996.944	917.258.750	(917.258.750)	-

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	16.008.239	(10.672.159)	5.336.080	571.931.150	(446.641.150)	125.290.000
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	143.280.000	(143.280.000)	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	4.192.983.187	(3.912.978.187)	280.005.000	3.287.976.501.414	(3.287.929.138.096)	47.363.318
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	1.782.860.067	(1.782.860.067)	-	1.763.675.738	(1.707.512.438)	56.163.300
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	82.265.888.737	(66.028.892.181)	16.236.996.556	61.409.259.374	(53.229.967.733)	8.179.291.641
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	63.873.985.294	(2.598.368.149)	61.275.617.145	63.683.441.219	(2.365.392.399)	61.318.048.820
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	103.004.149.752	(100.572.588.356)	2.431.561.396	95.556.069.060	(90.118.520.297)	5.437.548.763
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	79.122.343.101	(9.058.743.306)	70.063.599.795	79.122.343.101	(9.058.743.306)	70.063.599.795
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25.020.789.361	(22.005.191.820)	3.015.597.541	48.439.960.598	(44.545.888.804)	3.894.071.794
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	753.747.925.477	(697.789.953.531)	55.957.971.946	574.454.218.954	(527.755.151.531)	46.699.067.423
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	14.942.717.477	(12.375.262.569)	2.567.454.908	8.923.326.556	(7.907.949.631)	1.015.376.925
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	528.172.499	(80.922.000)	447.250.499	2.068.625.357	(1.761.060.657)	307.564.700
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	(45.648.308.323)	(45.648.308.323)	-	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	46.461.721.651	(963.858.970.889)	(917.397.249.238)	45.996.370.286	(45.283.713.453)	712.656.833
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	2.501.523.762.400	0	2.501.523.762.400	4.304.338.746.103	(1.104.995.267.890)	3.199.343.478.213
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	14.862.441.763	(8.835.820.857)	6.026.620.906	17.975.214.997	(14.264.852.890)	3.710.362.107
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	104.785.675	(104.785.675)	-	104.785.675	(104.785.675)	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	28.109.240.771	(20.588.880.932)	7.520.359.839	22.818.944.237	(21.869.348.596)	949.595.641
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	57.677.783.200	(55.457.487.505)	2.220.295.695	47.746.892.595	(45.538.724.926)	2.208.167.669
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	6.984.249.898	(6.984.249.898)	-	17.512.895.693	(17.488.701.450)	24.194.243
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	3.575.551.002	(1.847.088.579)	1.728.462.423	6.214.533.722	(6.213.653.722)	880.000
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	22.535.167.957	(19.013.407.476)	3.521.760.481	5.220.037.189	(4.995.158.540)	224.878.649
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	10.958.952.504	(10.459.088.421)	499.864.083	7.092.835.107	(6.573.295.419)	519.539.688
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	122.883.418.331	(101.962.014.813)	20.921.403.518	121.782.817.780	(99.110.769.139)	22.672.048.641
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	4.876.735.931	(4.022.518.154)	854.217.777	9.694.699.461	(9.203.999.580)	490.699.881
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	6.416.386.500	(182.054.000)	6.234.332.500	10.606.949.500	(10.606.949.500)	-
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	98.178.705	(34.259.705)	63.919.000	1.868.786.007	(1.868.786.007)	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	1.573.000	(1.573.000)	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	737.034.955	(464.606.455)	272.428.500	1.676.851.325	(1.673.404.825)	3.446.500
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	4.764.944.283	(4.665.040.908)	99.903.375	5.117.817.683	(4.951.312.058)	166.505.625
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	13.056.081.276	(7.888.934.771)	5.167.146.505	8.747.901.277	(8.357.299.008)	390.602.269

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	3.834.449.277	(2.703.079.525)	1.131.369.752	2.940.600.855	(2.708.286.391)	232.314.464
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.724.474.604.741	(200.053.878.185)	2.524.420.726.556	2.820.613.708.534	(309.428.249.016)	2.511.185.459.518
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	246.870.284.728	(82.367.454.297)	164.502.830.431	293.646.482.858	(75.889.391.907)	217.757.090.951
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	4.266.426.001	(4.134.838.476)	131.587.525	4.937.267.823	(4.821.527.515)	115.740.308
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	7.497.924.955	(5.595.290.375)	1.902.634.580	5.888.007.455	(5.729.350.311)	158.657.144
68	100	KOMISI YUDISIAL	522.029.174	(514.385.636)	7.643.538	-	-	-
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	171.500.999.962	(140.130.883.580)	31.370.116.382	486.977.653.814	(354.200.691.467)	132.776.962.347
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	16.759.004.183	(16.316.546.264)	442.457.919	6.679.601.160	(6.621.189.347)	58.411.813
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	10.567.651.901	(7.623.831.428)	2.943.820.473	356.736.750	(101.511.362)	255.225.388
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	11.708.907.835	(2.816.123.141)	8.892.784.694	795.494.091	(765.759.944)	29.734.147
73	107	BADAN SAR NASIONAL	219.142.248.577	(58.911.411.450)	160.230.837.127	69.646.712.858	(12.232.446.462)	57.414.266.396
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-	80.543.134	(59.114.384)	21.428.750
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	0	-	-	-	-
76	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.256.377.439	(921.304.271)	335.073.168	1.256.377.439	(1.089.068.354)	167.309.085
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	61.443.336.957	(31.201.482.699)	30.241.854.258	104.730.069.998	(35.104.701.420)	69.625.368.578
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	200.659.098.517	(203.972.156.865)	(3.313.058.348)	39.345.970.649	(127.234.151.485)	(87.888.180.836)
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	322.362.443	(107.640.766)	214.721.677	135.378.943	(130.089.105)	5.289.838
80	114	SEKRETARIAT KABINET	1.324.821.904	(556.352.889)	768.469.015	749.611.872	(639.593.257)	110.018.615
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	6.719.477.637	(693.438.332)	6.026.039.305	8.888.482.780	(5.496.401.033)	3.392.081.747
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	40.326.424.921	(39.422.247.992)	904.176.929	41.635.251.075	(40.706.775.517)	928.475.558
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	106.391.060.184	(104.934.932.312)	1.456.127.872	103.323.202.269	(101.148.941.726)	2.174.260.543
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	3.547.589.396	(1.782.976.591)	1.764.612.805	3.547.589.396	(1.278.801.503)	2.268.787.893
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	482.232.826	(473.243.826)	8.989.000			-
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	-	0	-			-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	20.089.000	(10.044.500)	10.044.500			-
JUMLAH PADA K/L			61.455.378.467.188	(20.387.914.329.132)	41.067.464.138.056	48.855.424.302.536	(18.491.232.013.268)	30.364.192.289.268
REKLASIFIKASI			(492.083.407.780.787)					
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-	-	-	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-	-	-	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	54.182.632.231.984	(11.268.427.083.520)	42.914.205.148.464	13.234.602.981		13.234.602.981

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)			31 DESEMBER 2016 (AUDITED)		
			BRUTO	PENYUSUTAN *)	JUMLAH	BRUTO	PENYUSUTAN	JUMLAH
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-			-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-			-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-			-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	-	-	-			-
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	543.877.041.536.423	(189.766.205.602.506)	354.110.835.933.917	499.559.477.443.021	(158.683.164.018.784)	340.876.313.424.237
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	-	-	-			-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-	-	-			-
JUMLAH PADA BUN			598.059.673.768.407	(201.034.632.686.026)	397.025.041.082.381	499.572.712.046.002	(158.683.164.018.784)	340.889.548.027.218
TOTAL			167.431.644.454.808	(221.422.547.015.158)	438.092.505.220.437	548.428.136.348.538	(177.174.396.032.052)	371.253.740.316.486

*) Penyusutan pada KL merupakan penjumlahan dari Ak. Penyusutan Kemitraan Pihak Ketiga, Ak. Penyusutan Aset Lain-lain dan Ak. Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

24. ASET PT PPA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2017

Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA yang disajikan dalam Neraca	Saldo Per 31 Des 2016		Mutasi Semester I 2017				Mutasi Semester II 2017				Saldo Per 31 Desember 2017	
			Tambah		Kurang		Tambah		Kurang			
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	435	2.037.407.069.851,00			(2)	(1.335.960.000,00)			(148)	(204.663.120.000,00)	285	1.831.407.989.851,00
BS	1.082	1.642.655.858.019,00			(2)	(1.378.410.000,00)			(4)	(60.448.100.000,00)	1.076	1.580.829.348.019,00
BT	323	865.910.243.344,00									323	865.910.243.344,00
BD (Dokumen berupa Covernote)	37	123.953.401.452,00									37	123.953.401.452,00
										(26.978.750.000,00)		(26.978.750.000,00)
JUMLAH	1.877	4.669.926.572.666,00			(4)	(2.714.370.000,00)			(152)	(265.111.220.000,00)	1.721	4.375.122.232.666,00
Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT.PPA yang diungkap dalam CaLK												
BD (Dokumen berupa AJB,APHT, Copi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	645	2.124.564.891.833,00							(5)	(32.101.800.000,00)	640	2.092.463.091.833,00
JUMLAH	645	2.124.564.891.833,00							(5)	(32.101.800.000,00)	640	2.092.463.091.833,00
JUMLAH TOTAL	2.522	6.794.491.464.499,00									2.361	6.467.585.324.499,00

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SURAT BERHARGA EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2017

No.	Emiten	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset Per 31 Desember 2017 (audited)*	Asal Bank	CUR	ATK Value (Nominal Value)	Total Nominal Value	Keterangan
1.	Dharmala Intiutama (0016060906)	Obligasi	2.793.450.000,00	Various	USD	22.000.000,00	Rp 186.230.000.000,00	Default asset
2.	Ometraco Multi Artha (0016060794)	Obligasi	6.499.457.694,00	BII	USD	15.356.072,52	Rp 129.989.153.881,80	Default asset
3.	Ongko Intl Fin (290304)	Obligasi	4.317.150.000,00	BALI	USD	30.000.000,00	Rp 253.950.000.000,00	Default asset
4.	Ongko Intl Fin CO BV (0016037876)	Obligasi	215.857.500,00	ASPAC	USD	1.500.000,00	Rp 12.697.500.000,00	Default asset
5.	Pacific Intl CP (0016062464)	Obligasi	507.900.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 16.930.000.000,00	Default asset
6.	Pacific Intl CP (0016062504)	Obligasi	507.900.000,00	TAMARA	USD	2.000.000,00	Rp 16.930.000.000,00	Default asset
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1.805.657.589,00	Danamon	USD	1.000.000,00	Rp 8.465.000.000,00	
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007408)	Warrants	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007507)	Warrants	4.934.713,00	Various	IDR	4.934.713,00	Rp 4.934.713,00	
Total			16.657.242.209,00				Rp 625.201.523.307,80	

*Nilai disajikan sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Lampiran B Pengembalian Aset tanggal 27 Februari 2009
 Kurs 8465

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2017

No.	Nama Emiten	Core Business	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2017 (dalam Rupiah)	Keterangan Penyajian Nilai
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	-	n/a		223.500	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004
2	PT Bunas Multifinance	-	15,00%	750.000	75.000.000	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004
3	PT Danaloka Pratama	-	14,29%	380	141.550.000	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004
4	PT Pama Indonesia Ltd	-	15,00%	1.500	28.310.000	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004
5	PT Pama Ventura Indonesia	-	20,00%	200	234.871	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004
6	PT Servitia Finance	-	99,00%	24.750	1.500.000.000	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004
7	PT Aplikanusa Lintasarta	-	n/a	400	125.015.692	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-99/MK.6/2008 tanggal 28 April 2008
8	PT Bhakti Sarana Ventura	Jasa Modal Ventura	5,43%	450	385.154.000	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007
9	PT Dbs Securities Indonesia	-	15,00%	330	-	-
10	PT Sarana Jambi Ventura	Jasa Modal Ventura	2,30%	200.933	323.903.996	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Jambi Ventura Nomor 06/DIR/SJV/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016
11	PT Sarana Kalbar Ventura	Jasa Modal Ventura	3,67%	498.260	355.094.954	Nilai Nominal saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalbar Ventura Nomor 015/SKV/01/2017 tanggal 25 Januari 2017

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2017

No.	Nama Emiten	Core Business	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2017 (dalam Rupiah)	Keterangan Penyajian Nilai
12	PT Sarana Kalsel Ventura	Jasa Modal Ventura	1,04%	193.066	382.656.812	Nilai Buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Kalsel Ventura Nomor 015/SKV/07/II/2017 tanggal 30 Januari 2017
13	PT Sarana Maluku Ventura	Jasa Modal Ventura	1,41%	63.106	31.286.000	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	-	21,07%	1.412	34.239.460.920	Nilai Buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT SPBI Nomor 074/Dir/SPBI/07/2015 tanggal 6 Juli 2015
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	Jasa Asuransi	1,04%	4.500	4.500.000.000	Nilai nominal per 30 Juni 2016 berdasarkan surat Direktur Utama PT AJTM Nomor S-3025/AJTM/DIR/0816 tanggal 22 Agustus 2016
16	PT Asuransi Putra Mandiri	Jasa Asuransi	25,71%	1.800.000	335.020.000	Sesuai Ralat KMK No. 155/KMK.06/2007
17	BDNI Reksadana (PT Reksadana Perdana)	-	0,00%	0	-	Rp -
18	PT Sarana Sulut Ventura	Jasa Modal Ventura	1,44%	61.553	61.553.000	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sulut Ventura Nomor 056/SSV/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016
19	PT Sarana Sumbar Ventura	Jasa Modal Ventura	3,75%	861.465	861.465.000	Nilai nominal saham berdasarkan surat PT Sarana Sumbar Ventura nomor 09/SSBV-DIR/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA
31 DESEMBER 2017

No.	Nama Emiten	Core Business	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2017 (dalam Rupiah)	Keterangan Penyajian Nilai
20	PT Sarana Papua Ventura (d.h PT Sarana Irian Ventura)	Jasa Modal Ventura	1,41%	82.471	82.471.000	Nilai Modal Disetor Kementerian Keuangan per tanggal 30 Juni 2016 berdasarkan surat Direktur PT Sarana Papua Ventura Nomor 16/ADM/SPV.V/2016 tanggal 22 Agustus 2016
21	PT SMBC Indonesia Finance	-	15,00%	3.750.000	3.750.000.000	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK.6/2007 tanggal 29 Juni 2007
22	PT Asia Natural Resources Tbk	Perdagangan hasil tambang	0,97%	22.006.500	1.100.325.000	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 Juni 2017
23	PT Jemblo Cable Company Tbk	Manufaktur kabel	0,43%	654.500	3.403.400.000	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 Juni 2017
24	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Jasa Pembangunan Sarana Olahraga terutama Golf	13,87%	57	1.425.000.000	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur PT Sukapraja Estetika Padang Golf Nomor 005/SEPG/DIR/OSW/20167 tanggal 24 Januari 2017
25	PT Bima Prima Perdana (Grup Texmaco)		100,00%			
Total					53.107.124.745	

Dalam rangka penyusunan LKTK tahun 2017, melalui surat nomor S-4/KN.5/2018 tanggal 2 Januari 2018, Direktorat PKNSI telah meminta nilai saham per tanggal per 31 Desember 2017 kepada para emiten. Sampai dengan akhir periode penyusunan LKTK Itahun 2017 belum ada emiten yang memberikan tanggapan, sehingga penyajian nilai saham per 31 Desember 2017 menggunakan nilai terakhir saham yang telah disampaikan kepada Direktorat PKNSI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
ASET SAHAM YANG DISERAHKELOLAKAN KEPADA PT PPA
31 DESEMBER 2017

No.	Nama Emiten	Core Business	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per 31 Desember 2017	Keterangan Penyajian Nilai
1	PT Sejahtera Eka Graha	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana hiburan	96,53%	278.000	22.470.000.000,00	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2016
2	PT Turban Petrochemical Industries	industri petrokimia	70,00%	-	8.750.000,00	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2016
Total					Rp 22.478.750.000,00	

25. ASET BMN *IDLE*

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN IDLE YANG DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
PERIODE TAHUN 2017**

No	Jenis BMN		Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang	Kab./Kota	Jalan		Tanggal	Nilai (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(15)
		NIHIL						
		TOTAL TANAH						
1	4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Kab. Majene	Jl. KH M. Saleh Kel. Baurung, Kec. Banggae Timur	150	31/12/1985	109.485.000	Hibah ke Pemkab Majene
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kota Kendari	Jl. Made Sabara No.3 Desa Mandoga Kec. Mandoga	709	31/12/1980	732.016.200	Hibah ke Pemkot Kendari
3	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kota Kendari	Jl. Made Sabara No.3 Desa Mandoga Kec. Mandoga	120	31/12/1993	387.868.800	Hibah ke Pemkot Kendari
4	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kota Kendari	Jl. Made Sabara No.3 Desa Mandoga Kec. Mandoga	150	31/12/2001	433.927.000	Hibah ke Pemkot Kendari
		TOTAL BANGUNAN					1.663.297.000	

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN
PERIODE TAHUN 2017
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2016		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2017	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166128	Aset Idle yang sudah diserahkan ke DJKN									
	TANAH		43.221	32.397.241.916	30.256	11.640.911.602	0	0	73.477	44.038.153.518
2.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	4.906	1.687.210.000	1.725	910.712.602			6.631	2.597.922.602
2.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	13.289	11.596.150.416					13.289	11.596.150.416
2.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	M2	200	1.001.000.000					200	1.001.000.000
2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	14.667	13.324.568.500	662	3.145.440.000			15.329	16.470.008.500
2.01.01.04.004	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	M2	1.015	1.380.400.000					1.015	1.380.400.000
2.01.01.99.999	Tanah Persil Lainnya	M2	-	-	27.201	7.477.138.000			27.201	7.477.138.000
2.01.02.01.001	Tanah Rawa	M2	9.144	3.407.913.000					9.144	3.407.913.000
2.01.02.02.002	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	M2	-	-	668	107.621.000			668	107.621.000
	GEDUNG DAN BANGUNAN		81	8.226.593.363	16	4.062.258.521	4	1.663.297.000	93	10.625.554.884
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	18	5.279.136.957	1	3.060.546.084	3	1.553.812.000	16	6.785.871.041
4.01.01.01.002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	1	26.555.288					1	26.555.288
4.01.01.02.001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1	6.200.000					1	6.200.000
4.01.01.04.002	Gedung Instalasi Pemancar	Unit	-	-	2	8.694.000			2	8.694.000
4.01.01.13.002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Unit	-	-	1	15.271.000			1	15.271.000
4.01.01.14.001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	62.500.000					1	62.500.000
4.01.01.24.001	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	Unit	1	109.116.485					1	109.116.485
4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	3	228.412.000			1	109.485.000	2	118.927.000
4.01.02.01.010	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	1	75.000.000	1	45.804.437			2	120.804.437
4.01.02.02.004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	Unit	1	338.711.692					1	338.711.692
4.01.02.02.007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Unit	3	289.995.000					3	289.995.000
4.01.02.02.010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	44	1.540.543.029	8	228.632.000			52	1.769.175.029
4.01.02.02.013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Unit	1	77.520.134					1	77.520.134
4.01.02.02.014	Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	Unit	2	80.943.778					2	80.943.778
4.01.02.02.015	Rumah Negara Golongan II Tipe E Darurat	Unit	2	28.100.000					2	28.100.000
4.01.02.99.999	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	Unit	-	-	3	703.311.000			3	703.311.000
4.04.01.01.009	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	Unit	1	43.928.000					1	43.928.000
4.04.01.04.001	Pagar Permanen	Unit	1	39.931.000					1	39.931.000
	TOTAL			40.623.835.279		15.703.170.123		1.663.297.000		54.663.708.402

26. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	406.765.290	2.578.806.837	135.416.000	-	129.414.237	2.383.873.794
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.359.840.672	588.596.166	4.439.877.981	3.391.669.235	-	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	60.986.545.027	115.460.146.102	1.075.292.762	1.467.375.123	43.936.941	168.267.400
4	005	MAHKAMAH AGUNG	30.084.076.014	11.109.773.590	844.110.148	644.037.747	10.718.466	2.502.092
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	88.528.814.594	47.901.580.824	-	103.188.000	863.250	12.496.860
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	67.213.565.692	83.649.792.745	71.843.462.056	42.962.139.394	7.218.551.826	469.630.752
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	12.055.539.377	9.967.892.065	1.348.220.166	1.417.095.693	617.569.067	130.655.827
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	51.796.815.809	30.617.339.962	638.750.000	894.250.000	16.179.293	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.454.161.190.355	9.002.507.823.539	6.007.668.352	1.419.578.488	8.660.097.620	16.633.603.940
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	222.697.385.108	175.408.091.116	293.567.777.306	223.094.509.992	41.628.677	9.157.661
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.486.741.001.607	1.184.868.808.837	267.311.529.885	228.045.432.740	1.634.231.652	593.979.949
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	29.986.921.676	1.418.743.619.863	4.111.131.341	1.058.640.257	2.178.462.038	240.417.272
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.518.832.120	21.014.495.790	19.104.459.056	14.694.084.192	11.297.816	904.000.894
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	75.690.991.106	76.557.294.598	16.362.159.263	9.323.487.900	194.956.199	272.818.587
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	219.484.907.017	361.687.416.508	52.281.877.089	83.920.425.105	271.351.355	250.692.034
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.046.462.808.793	1.753.019.356.854	1.344.508.821	723.710.137	409.552.089	8.804.552.864
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.492.156.224.516	1.189.124.596.465	116.097.544.526	107.974.260.223	174.220.925	13.317.686
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.098.066.469.844	4.637.682.250.697	27.837.498.982	23.515.800.440	2.732.064.166	1.339.952.128
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	7.246.549.166	641.663.328	497.671.397.490	436.698.587.427	-	3.578.905
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	155.625.426	1.059.442.364	316.883.583	651.447.917	-	-
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	39.644.238.717	41.831.226.089	1.739.210.196	3.072.016.166	5.827.150	13.030.128
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	175.323.176.542	32.885.957.207	2.599.217.498	858.385.998	775.481	111.375
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	79.442.197.871	125.434.616.051	21.548.857.458	9.863.456.896	109.819.154	466.727.220
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	2.467.902.405	2.784.588.151	-	10.833.333	-	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	4.668.404.629	3.702.180.638	-	-	65.968.790	2.913.965
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	281.336.587	371.630.341	-	-	231.503.520	859.251.598
27	040	KEMENTERIAN PARISIWATA	35.640.614.494	33.201.290.459	4.556.975.543	2.438.362.015	-	-
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	37.109.483	112.234.829	3.126.930.400	2.821.427.150	-	-
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	819.900.650.121	894.386.322.330	581.809.786.686	470.100.535.487	12.459.754.131	36.370.265.979
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	7.399.751.015	4.402.772.202	24.236.796.334	12.866.592.610	-	2.362.000
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	1.519.591.516	20.568.000	-	-	168.883.620
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	258.443.937	158.448.261	-	-	-	-
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	10.783.800.003	10.552.386.255	853.409.262	1.114.585.893	-	-
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	826.821.026	482.471.765	-	-	-	-
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-	-	332.014.871
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	67.116.062.498	71.280.198.203	76.987.320	32.852.863	247.823.811	62.373.294
37	055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	13.270.000.291	4.123.381.057	110.938.166	-	-	-
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN	59.165.382.652	18.375.104.591	448.354.593.856	307.072.776.308	23.040.532	937.203
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	2.298.377.533	100.499.760.833	-	29.333.333	-	-
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.424.956.990	52.771.891.179	11.660.741.708.117	10.305.050.841.370	-	-
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	703.448.690.296	345.870.054.817	40.741.580.208	28.414.096.605	24.104.024.451	2.664.163.053
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	3.206.263.638	2.911.356.680	31.863.416.571	38.769.448.004	-	-
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	405.609.250	-	998.761.290	1.508.615.000	-	-
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	4.665.237.219	4.740.755.240	1.630.840.096	601.703.213	-	-
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	3.572.577.082	3.452.013.622	34.897.500	50.407.500	19.403.181	-
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN	6.811.032.907	11.068.690.443	-	-	1.182.408	116.636
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.315.735.102	2.793.367.866	896.127.517	236.692.117	-	-
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	537.844.410	117.108.647	-	-	175.000	-
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEODISIKA	4.245.598.516	1.597.912.429	-	-	-	681.509
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	8.997.844.787	8.489.301.029	-	-	1.258.616.446	383.200
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI	650.287.175	438.725.611	2.306.117.323	390.183.327	-	-
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	990.452.993	196.730.212	13.016.327	22.204.331	-	-
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	3.429.695.646	2.883.844.311	361.643.820	518.199.542	103.253.321	105.251.415
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	2.784.516.563	2.719.493.782	109.542.858	260.178.587	-	-
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	29.906.879.523	8.038.244.860	-	-	1.109.078.849	751.002.835
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	752.183.933	789.834.424	5.541.508	3.967.792	22.778.384	897.727
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	664.082.523	660.546.638	40.367.507	-	-	-
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	31.584.478	240.281.129	745.500.000	710.050.000	-	-
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	252.273.498	51.026.925	-	-	-	-
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	234.971.695	3.602.330.221	1.802.497.421	715.332.750	-	194.367.129
61	087	ARSP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	549.493.059	3.396.879.396	-	-	-	1.065.000
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	2.041.990.119	1.187.840.664	458.488.712	304.122.954	-	96.561
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	3.214.411.201	2.362.317.068	642.930.618	542.090.572	-	-
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	4.370.754.385	9.624.197.141	2.539.337.866	1.764.066.598	22.600.150	313.167.255
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	18.460.027.268	32.989.270.134	58.586.996	168.893.992	8.727.272	161.275.344
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	12.043.630.323	7.304.542.664	27.187.680	-	-	-
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	5.589.408.903	8.589.291.045	-	-	241.979.367	134.757.904
68	100	KOMISI YUDISIAL	131.992.624	143.270.757	72.900.667	10.512.667	-	39.433.340
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	12.311.613.581	18.735.913.595	318.266.250	407.557.500	-	-
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA	3.674.805.147	6.541.289.821	72.878.901	62.392.000	33.455.722	240.404.726
71	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	5.042.433.878	40.216.163	-	-	-	-
72	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	598.750.160	263.558.604	295.935.518	-	-	-
73	107	BADAN SAR NASIONAL	1.241.445.972	1.917.561.577	481.495.900	225.919.033	-	183.389.145
74	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	47.694.160	88.195.701	11.002.242.566	4.562.869.000	92.672.608	-
75	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURABAYA MADURA	-	-	-	-	-	-
76	110	OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	329.574.269	1.374.333.858	-	-	-	621.065.134
77	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	674.790.136	75.000.000	-	-	-	-
78	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	127.672.110.075	264.122.791.968	1.169.990.012.803	1.096.852.680.598	5.384.500	5.824.500
79	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	95.048.260	139.861.111	-	-	28.341.373	244.584.782
80	114	SEKRETARIAT KABINET	4.070.837.821	3.492.623.419	-	-	422.053.397	-
81	115	BADAN PENGAWAS PEMILU	28.295.180.195	2.222.670.203	-	-	2.988.089.793	1.924.892.611
82	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	8.692.631.294	968.141.755	13.023.514.604	8.430.284.630	-	-
83	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	132.751.962.826	146.041.216.369	9.472.287.295	13.906.781.299	3.094.746.998	4.199.044.654
84	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	22.343.100	269.309.700	-	-	-	-
85	119	BADAN KEAMANAN LAUT	3.622.700.001	265.387.095	-	-	-	3.908.000

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 31 DESEMBER 2016

(dalam Rupiah)

NO.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA		UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	
			31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)	31 DESEMBER 2017 (AUDITED)	31 DESEMBER 2016 (AUDITED)
86	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	3.219.400.853	1.408.943.894	-	-	-	-
87	121	BADAN EKONOMI KREATIF	2.466.357.607	1.217.456.057	-	-	-	-
JUMLAH PADA KIL			14.934.504.654.454	22.438.518.540.842	15.422.121.457.965	13.496.790.769.043	71.046.171.406	82.302.142.358
REKLASIFIKASI KE PENDAPATAN PAJAK							(54.572.479.892)	(20.726.107.444)
ELIMINASI			(414.390)					
88	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	20.751.000.000	-	-	-	-
89	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-		-	-	-	-
90	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	13.789.274.661.776		-	-	-	-
91	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-		-	-	-	-
92	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-		-	-	-	-
93	999.07	BELANJA SUBSIDI	-		-	-	-	-
94	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	4.514.126.912	2.687.200.000	-	-	20.847.698	-
95	999.99	TRANSAKSI KHUSUS	15.470.004.948.054	13.063.632.417.049	126.927.059.727	186.728.203.505	-	15.117.905.044
96	999.00	SISTEM AKUNTANSI PUSAT	239.936.781.997	608.578.579.546	-	-	-	-
97	999.09	BADAN LAINNYA	-		-	-	-	-
JUMLAH PADA BUN			29.503.730.104.349	13.695.649.196.595	126.927.059.727	186.728.203.505	20.847.698	15.117.905.044
TOTAL			44.438.234.758.803	36.134.167.737.437	15.549.048.517.692	13.683.518.972.548	16.494.539.212	76.693.939.958

27. OUTSTANDING UTANG LUAR NEGERI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROGRAM PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2017

NAMA KREDITOR	MATA UANG	JUMLAH PINJAMAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR (Rp)	UTANG JANGKA PANJANG PINJAMAN (Rp)	TOTAL POSISI UTANG (Rp)
ADB	USD	28	6.291.124.082,66	6.375.011.395.664,64	78.857.137.676.213,00	85.232.149.071.877,70
AFD	EUR	5	564.700.000,00	86.297.815.193,29	9.046.945.398.806,71	9.133.243.214.000,00
	USD	3	530.000.000,00	1.083.840.000.000,00	6.096.600.000.000,00	7.180.440.000.000,00
IBRD	USD	31	13.022.626.390,05	5.250.893.196.948,36	171.179.649.135.449,00	176.430.542.332.397,00
IDA	SDR	1	30.700.337,32	85.281.152.141,81	505.627.888.414,37	590.909.040.556,18
JICA	JPY	38	437.943.045.000,00	7.385.382.617.464,80	45.263.429.543.563,20	52.648.812.161.028,00
KfW	EUR	1	200.000.000,00	-	3.234.724.000.000,00	3.234.724.000.000,00
	USD	5	873.236.000,00	549.860.721.786,72	11.280.740.606.212,30	11.830.601.327.999,00
TOTAL		112	459.455.431.810	20.816.566.899.200	325.464.854.248.659	346.281.421.147.858

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2017

NAMA KREDITOR	MATA UANG	JUMLAH PINJAMAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR (Rp)	UTANG JANGKA PANJANG PINJAMAN (Rp)	NILAI NERACA PINJAMAN (Rp)
ABN AMRO ROTTERDAM	EUR	2	12.758.946,83	95.482.501.516,96	110.875.856.111,67	206.358.357.628,63
ADB	ADB	6	44.103.919,49	125.482.930.800,00	472.036.970.450,52	597.519.901.250,52
	JPY	5	615.798.255,00	74.030.280.938,89	-	74.030.280.938,89
	SDR	45	441.335.438,49	1.685.494.962.081,75	6.809.170.677.196,66	8.494.665.639.278,42
	USD	90	2.098.214.985,76	3.345.145.541.895,83	25.081.471.085.207,70	28.426.616.627.103,60
AFD	EUR	1	36.312.282,54	29.365.053.005,25	557.936.006.129,34	587.301.059.134,60
	USD	4	84.864.228,31	104.098.445.238,89	1.045.642.119.837,25	1.149.740.565.076,14
AIIB	USD	2	23.826.747,39	-	322.804.773.639,72	322.804.773.639,72
AKA	USD	1	35.407.774,31	84.338.241.157,44	395.366.285.194,44	479.704.526.351,88
ANZ SINGAPORE BRANCH	USD	1	2.550.000,00	34.547.400.000,00	-	34.547.400.000,00
ATRADIUS DSB	EUR	5	32.703.407,66	133.594.299.068,07	395.338.189.129,86	528.932.488.197,93
	USD	3	8.963.670,30	30.672.469.647,07	90.767.335.577,33	121.439.805.224,40
AUSTRALIA	AUD	2	478.705.227,17	102.939.949.036,66	4.950.885.171.681,75	5.053.825.120.718,41
B A W A G	EUR	2	19.347.700,26	77.001.172.160,74	235.921.179.702,23	312.922.351.862,97
BANCO DE SABADELL	USD	1	24.827.914,12	-	336.368.580.497,76	336.368.580.497,76
BANK MANDIRI SIN	USD	6	188.021.935,03	1.242.839.836.050,00	1.304.481.339.736,44	2.547.321.175.786,44
BANKIA, S.A SPAIN	EUR	1	984.118,82	15.916.763.182,58	646,94	15.916.763.829,53
BANQUE DE FRANCE	EUR	3	95.445.497,81	349.560.086.770,91	1.194.139.125.518,86	1.543.699.212.289,77
BBVA	EUR	2	9.773.115,71	42.898.907.908,90	115.167.751.800,67	158.066.659.709,57
	USD	2	20.000.000,00	-	270.960.000.000,00	270.960.000.000,00
BELGIUM	EUR	11	24.766.003,30	93.868.049.151,19	306.687.877.141,75	400.555.926.292,95
BNP PARIBAS, PARIS	EUR	8	163.419.939,40	842.035.118.847,19	1.801.056.881.431,44	2.643.092.000.278,63
	GBP	1	5.265.302,14	19.184.665.262,16	76.738.661.777,38	95.923.327.039,54
	USD	3	63.978.940,57	325.614.247.734,48	541.172.439.107,88	866.786.686.842,36
BNP PARIBAS, SPAIN	EUR	1	1.055.727,40	8.537.467.219,07	8.537.466.572,12	17.074.933.791,19
BOC CAYMAN ISLAND	USD	1	9.454.093,12	42.694.684.620,24	85.389.368.969,52	128.084.053.589,76
BOTM SINGAPORE	USD	4	76.799.984,56	234.956.328.867,00	805.529.861.951,88	1.040.486.190.818,88
BRI SINGAPORE	USD	1	2.747.534,05	5.518.056.233,52	31.705.535.075,88	37.223.591.309,40
BRI-CAYMAN ISLAND	EUR	1	2.476.731,15	-	40.057.708.462,26	40.057.708.462,26
	USD	4	218.691.532,76	905.886.207.120,00	2.056.946.678.712,48	2.962.832.885.832,48
BRUNEI INVEST. BANK	USD	2	9.475.247,42	57.053.623.327,32	71.317.028.718,84	128.370.652.046,16
CA CIB LONDON BRANCH	USD	1	60.602.293,64	-	821.039.874.234,72	821.039.874.234,72
CASA OF FRANCE	EUR	1	70.054.578,16	-	1.133.036.126.420,14	1.133.036.126.420,14
CASSA DEPOSITI	USD	2	3.342.741,91	15.416.099.850,00	29.871.367.546,68	45.287.467.396,68
CDC	GBP	2	2.126.273,16	9.783.802.167,25	28.952.663.524,36	38.736.465.691,61
CESCE, SPAIN	USD	2	15.311.493,09	52.393.859.854,32	155.046.248.542,55	207.440.108.396,87
CEXIM	USD	1	13.970.600,00	54.078.196.800,00	135.195.492.000,00	189.273.688.800,00
CIC PARIS	USD	3	1.019.142,99	13.807.349.228,52	-	13.807.349.228,52
CIDA	CAD	24	87.734.519,77	111.133.981.816,99	834.548.510.677,06	945.682.492.494,05
CITIBANK LONDON	EUR	3	31.046.192,32	77.250.664.482,03	424.878.652.548,57	502.129.317.030,60
COFACE	EUR	2	57.388.774,28	234.434.670.035,19	693.749.557.435,30	928.184.227.470,49
	USD	2	34.460.526,95	117.919.261.084,57	348.951.958.034,03	466.871.219.118,60
CREDIT AGRICOLE CIB	EUR	6	179.538.476,77	1.157.898.895.993,54	1.745.888.202.663,27	2.903.787.098.656,81
	USD	1	39.904.242,13	270.311.336.391,84	270.311.335.985,40	540.622.672.377,24
CREDIT SUISSE	CHF	3	6.592.932,71	26.355.869.971,87	64.904.493.539,85	91.260.363.511,73
DENMARK	DKK	3	17.646.153,40	9.727.626.427,26	28.605.818.449,70	38.333.444.876,96
DEUTSCHE BANK AG, HK	USD	1	2.029.755,38	18.332.750.411,52	9.166.375.476,72	27.499.125.888,24
DEUTSCHE BANK LONDON	USD	2	26.384.830,23	73.698.140.523,84	283.763.539.432,20	357.461.679.956,04
DEUTSCHE BANK MADRID	EUR	3	6.144.973,24	27.823.050.208,54	71.563.411.885,39	99.386.462.093,93
DEUTSCHE BANK TOKYO	USD	2	3.948.795,22	26.749.139.768,64	26.749.137.871,92	53.498.277.640,56
DFAS	USD	3	2.066.990,20	7.072.963.783,74	20.930.619.445,86	28.003.583.229,60
DRESDNER SINGAPORE	EUR	3	510.875,01	3.869.213.268,81	4.393.485.058,95	8.262.698.327,76
	USD	1	199.736,92	1.082.414.452,34	1.623.621.339,82	2.706.035.792,16
DZ Bank AG Singapore	USD	2	13.784.726,18	57.244.066.885,92	129.511.403.400,72	186.755.470.286,64
ECGD	GBP	2	85.499.769,75	393.417.392.490,23	1.164.218.267.812,97	1.557.635.660.303,20
	USD	2	16.313.901,75	55.823.968.276,16	165.196.772.632,84	221.020.740.909,00
EDC	USD	3	123.002.347,11	284.998.754.826,42	1.381.437.043.819,86	1.666.435.798.646,28
EFIC	EUR	4	29.085.251,29	143.766.535.744,08	326.647.266.144,02	470.413.801.888,10
	USD	24	98.678.799,51	455.974.696.992,83	880.925.678.782,20	1.336.900.375.775,03
EIB	USD	1	16.106.996,29	84.058.633.469,04	134.158.952.267,88	218.217.585.736,92
EKF	EUR	2	2.153.325,02	8.796.390.475,22	26.030.670.134,76	34.827.060.609,97
	USD	2	8.439.250,98	28.877.977.097,17	85.456.995.125,68	114.334.972.222,85
EKN	USD	2	4.893.436,06	16.748.882.128,13	49.547.389.612,75	66.296.271.740,88
EKSPORTFINANS ASA	USD	6	22.456.555,99	99.221.819.796,96	205.019.600.755,56	304.241.420.552,52
EKSPORTKREDITT AS	USD	1	42.300.470,00	-	573.086.767.560,00	573.086.767.560,00
ERSTE BANK, VIENNA	EUR	2	20.181.277,20	20.003.480.166,53	306.400.828.380,94	326.404.308.547,46
EXIM BANK KOREA	KRW	16	222.436.024.680,00	155.812.614.028,20	2.666.900.539.161,00	2.822.713.153.189,20
	USD	34	1.237.558.063,12	1.715.867.678.688,43	15.050.568.960.515,50	16.766.436.639.204,00

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
OUTSTANDING UTANG PROJECT PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR
PER 31 DESEMBER 2017

NAMA KREDITOR	MATA UANG	JUMLAH PINJAMAN	OUTSTANDING BASE	BAGIAN LANCAR (Rp)	UTANG JANGKA PANJANG PINJAMAN (Rp)	NILAI NERACA PINJAMAN (Rp)
EXIM BANK OF CHINA	CNY	1	1.162.562.609,83	321.394.308.660,26	2.089.063.006.561,26	2.410.457.315.221,52
	USD	17	1.106.535.891,12	1.362.134.680.647,19	13.629.213.572.300,80	14.991.348.252.948,00
EXIM BANK TAIPEI	USD	3	1.222.738,52	4.184.045.991,77	12.381.615.477,19	16.565.661.468,96
EXIMBANK HUNGARY	USD	1	10.175.512,87	-	137.857.848.362,76	137.857.848.362,76
FINNVERA	EUR	5	690.374,37	3.077.829.324,63	8.088.023.344,97	11.165.852.669,60
	USD	2	805.573,29	2.756.562.976,87	8.157.343.956,05	10.913.906.932,92
GIEK	USD	1	4.787.361,25	16.381.705.437,90	48.477.464.777,10	64.859.170.215,00
GOSPODRSTWA	USD	5	10.872.490,42	58.555.227.829,56	88.745.272.380,60	147.300.500.210,16
HAPOLIM, ZURICH	USD	1	6.800.000,00	36.850.560.000,00	55.275.840.000,00	92.126.400.000,00
HSBC LONDON	GBP	6	10.046.503,25	76.451.186.680,62	106.576.109.992,91	183.027.296.673,53
IBRD	USD	56	3.542.719.239,43	1.788.267.571.951,27	46.208.492.683.832,80	47.996.760.255.784,10
ICO	EUR	9	75.394.193,81	7.156.321.262,64	1.212.240.719.626,65	1.219.397.040.889,29
	USD	21	140.821.010,98	284.170.005.498,55	1.623.673.051.258,49	1.907.843.056.757,04
IDA	SDR	31	838.822.088,72	1.806.120.397.705,67	14.339.225.190.082,70	16.145.345.587.788,40
	USD	48	155.017.190,71	407.178.988.855,75	1.692.993.910.883,33	2.100.172.899.739,08
IDB	ACU	59	399.183.969,76	893.007.455.367,81	6.790.341.888.420,54	7.683.349.343.788,36
	USD	17	341.719.251,19	221.424.211.187,40	4.408.188.203.894,08	4.629.612.415.081,48
IFAD	EUR	2	8.774.721,93	7.823.082.952,28	134.095.935.149,21	141.919.018.101,49
	SDR	8	125.019.518,13	105.061.395.166,56	2.301.269.282.773,15	2.406.330.677.939,71
ING BANK AMSTERDAM	EUR	8	333.463.586,82	897.789.637.832,06	4.495.523.699.231,63	5.393.313.337.063,69
JAICAF	JPY	2	8.290.360.000,00	127.672.541.892,00	868.981.272.732,00	996.653.814.624,00
JBIC	JPY	13	46.636.831.375,00	1.732.841.295.361,62	3.873.763.953.610,68	5.606.605.248.972,30
	USD	8	66.574.365,70	284.275.067.881,20	617.674.438.622,40	901.949.506.503,60
JICA	JPY	247	1.060.194.020.100,00	12.941.699.295.511,30	114.513.129.490.479,00	127.454.828.785.990,00
KFAED	KWD	2	1.803.800,00	47.526.697.993,95	33.353.655.532,70	80.880.353.526,64
KIWI	EUR	68	752.525.800,51	1.713.916.116.264,79	10.457.150.221.412,10	12.171.066.337.676,90
	USD	4	50.576.101,79	183.550.749.955,92	501.654.277.095,00	685.205.027.050,92
KOMERCNI BANKA	USD	1	6.045.534,90	27.301.635.608,40	54.603.271.216,80	81.904.906.825,20
LMN FINANCE DAC	USD	1	68,96	-	934.270,08	934.270,08
M K B	USD	1	286.300,07	3.878.793.348,36	-	3.878.793.348,36
MAFF, JAPAN	JPY	2	5.446.177.849,00	143.429.468.279,60	511.301.318.842,62	654.730.787.122,22
METI, GOV. OF JAPAN	JPY	2	7.170.380.300,00	217.721.220.201,56	644.290.426.855,96	862.011.647.057,52
MIZUHO SINGAPORE	USD	1	12.460.686,01	-	168.817.374.063,48	168.817.374.063,48
N I O	EUR	18	96.407.735,49	431.467.460.246,81	1.127.794.618.628,96	1.559.262.078.875,77
NATIXIS BANQUE	EUR	79	501.617.538,32	1.057.365.849.101,96	7.055.605.601.021,16	8.112.971.450.123,12
NIB	EUR	3	9.569.015,32	10.479.942.918,02	144.285.674.641,83	154.765.617.559,86
NORDEA BANK DANMARK	USD	1	7.931.716,85	21.491.780.383,20	85.967.119.473,50	107.458.899.856,70
OEKB	EUR	1	63.461.712,40	259.242.795.529,28	767.162.825.377,61	1.026.405.620.906,89
ONDD	EUR	2	17.647.166,93	72.089.150.946,34	213.329.421.056,05	285.418.572.002,39
PT BNI TOKYO BRANCH	USD	8	3.424.179,49	46.390.783.730,52	-	46.390.783.730,52
PT MANDIRI CAYMAN IS	EUR	1	157.445.742,86	848.822.538.437,29	1.697.645.077.198,06	2.546.467.615.635,35
	USD	1	258.170.995,12	1.165.900.214.052,24	2.331.800.427.833,52	3.497.700.641.885,76
PT MANDIRI HONGKONG	USD	1	31.875.000,00	143.947.500.000,00	287.895.000.000,00	431.842.500.000,00
PT. BNI-HONG KONG	USD	3	19.364.549,00	33.802.260.000,00	228.548.649.852,00	262.350.909.852,00
PT. BNI-SINGAPORE	GBP	1	1.702.679,59	12.407.773.591,84	18.611.660.205,58	31.019.433.797,42
	USD	26	215.244.922,36	658.471.258.843,08	2.257.666.949.290,20	2.916.138.208.133,28
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	3	17.127.376,76	39.573.097.477,52	237.438.585.835,55	277.011.683.313,07
RUSIA FED.	USD	7	238.138.214,25	389.339.179.254,00	2.836.957.347.405,00	3.226.296.526.659,00
SACE	EUR	3	488.555,98	1.995.766.224,19	5.905.952.545,06	7.901.718.769,25
	USD	2	2.288.003,08	7.829.237.313,37	23.168.628.414,47	30.997.865.727,84
SERV	CHF	9	57.694.039,74	198.655.080.338,32	599.954.471.848,72	798.609.552.187,04
SFD	SAR	5	149.293.798,47	70.227.411.049,83	469.105.393.550,95	539.332.804.600,78
SOCIETE GENERALE	EUR	2	3.876.318,73	17.183.156.819,90	45.510.949.318,00	62.694.106.137,90
SUMITOMO CORPORATION	JPY	1	301.130.165,00	36.201.386.628,04	-	36.201.386.628,04
SWISS	CHF	1	5.666.666,60	39.219.424.538,60	39.219.424.538,60	78.438.849.077,19
UBS AG, SINGAPORE	USD	2	83.933.099,11	568.562.813.438,88	568.562.813.303,40	1.137.125.626.742,28
UNICREDIT BANK AUSTR	EUR	51	217.470.277,09	711.312.819.847,18	2.805.968.803.101,19	3.517.281.622.948,37
UNICREDIT MUNICH	EUR	1	4.199.790,00	9.807.865.121,23	58.117.942.418,58	67.925.807.539,80
US DEP TREASURY	USD	6	8.641.712,11	47.585.874.622,80	69.492.041.043,48	117.077.915.666,28
US EXIM	USD	22	163.306.270,64	503.036.605.601,35	1.709.436.749.029,37	2.212.473.354.630,72
USAID	USD	118	244.113.296,71	576.823.717.995,12	2.730.423.226.161,57	3.307.246.944.156,70
USDA	USD	12	140.037.370,85	410.844.169.885,56	1.486.382.130.390,24	1.897.226.300.275,80
VNESHECONOMBANK	USD	2	201.237.496,44	1.373.259.101.769,12	1.353.106.500.000,00	2.726.365.601.769,12
TOTAL		1.440	1.369.796.561.462,23	51.425.443.539.761,30	342.682.414.864.721,00	394.107.858.404.482,00

Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Rupiah
31 Desember 2017

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	FR0031	15/11/2020	(257.933.522.000,00)	135.482.166.000,00
2	FR0034	15/06/2021	(1.324.953.000,00)	72.790.529.000,00
3	FR0035	15/06/2022	(9.487.350.000,00)	-
4	FR0036	15/09/2019	(23.705.000.000,00)	26.761.674.000,00
5	FR0037	15/09/2026	(68.625.601.000,00)	-
6	FR0039	15/08/2023	(20.012.848.000,00)	-
7	FR0040	15/09/2025	(13.449.047.000,00)	700.111.300.000,00
8	FR0042	15/07/2027	(120.968.377.000,00)	54.645.603.000,00
9	FR0043	15/07/2022	(91.371.214.000,00)	47.415.172.000,00
10	FR0044	15/09/2024	(726.003.248.000,00)	13.961.368.000,00
11	FR0045	15/05/2037	(41.424.861.000,00)	691.682.282.000,00
12	FR0046	15/07/2023	(973.535.894.000,00)	327.899.754.000,00
13	FR0047	15/02/2028	(946.499.169.000,00)	35.985.825.000,00
14	FR0050	15/07/2038	(494.124.920.000,00)	149.773.227.000,00
15	FR0052	15/08/2030	(323.290.449.000,00)	121.553.019.000,00
16	FR0053	15/07/2021	(275.841.945.000,00)	1.381.947.811.000,00
17	FR0054	15/07/2031	(414.126.383.000,00)	425.968.846.000,00
18	FR0056	15/09/2026	(900.998.619.000,00)	2.395.929.711.000,00
19	FR0057	15/05/2041	(29.858.939.000,00)	1.221.965.564.000,00
20	FR0058	15/06/2032	(46.872.577.000,00)	4.251.574.221.000,00
21	FR0059	15/05/2027	(1.107.770.672.000,00)	1.353.439.102.000,00
22	FR0061	15/05/2022	(162.707.895.000,00)	1.732.740.035.000,00
23	FR0062	15/04/2042	(325.902.916.000,00)	114.897.790.000,00
24	FR0063	15/05/2023	(859.226.642.000,00)	172.845.154.000,00
25	FR0064	15/05/2028	(424.901.954.000,00)	108.846.869.000,00
26	FR0065	15/05/2033	(564.275.448.000,00)	663.365.626.000,00
27	FR0067	15/02/2044	(408.013.115.000,00)	1.068.564.222.000,00
28	FR0068	15/03/2034	(2.269.892.504.000,00)	929.653.479.000,00
29	FR0069	15/04/2019	(33.390.507.000,00)	210.168.500.000,00
30	FR0070	15/03/2024	(545.478.568.000,00)	1.967.245.509.000,00
31	FR0071	15/03/2029	(212.922.968.000,00)	3.304.962.709.000,00
32	FR0072	15/05/2036	(639.358.733.000,00)	2.958.316.625.000,00
33	FR0073	15/05/2031	(212.517.320.000,00)	3.992.906.511.000,00
34	FR0074	15/08/2032	(224.065.186.000,00)	550.641.445.000,00
35	FR0075	15/05/2038	(98.226.964.000,00)	479.658.744.000,00
36	FR0076	15/05/2048	(40.826.857.000,00)	11.670.310.000,00
Grand Total			(13.908.933.165.000,00)	31.675.370.702.000,00

Unamortized Discount / Premium Obligasi Negara Valas
31 Desember 2017

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	<i>Unamortized Discount</i>	<i>Unamortized Premium</i>
1	RI00190304	04/03/2019	(26.002.729.000,00)	-
2	RI0035	12/10/2035	-	676.250.191.000,00
3	RI0037	17/02/2037	(138.478.799.000,00)	-
4	RI0038	17/01/2038	(282.292.772.000,00)	-
5	RI0122	08/01/2022	(18.641.379.000,00)	-
6	RI0124	15/01/2024	(81.559.698.000,00)	-
7	RI0125	15/01/2025	(107.844.023.000,00)	-
8	RI0126	08/01/2026	(99.730.316.000,00)	-
9	RI0127	08/01/2027	(61.528.287.000,00)	-
10	RI0142	17/01/2042	(237.974.867.000,00)	172.298.697.000,00
11	RI0144	15/01/2044	(265.434.450.000,00)	-
12	RI0145	15/01/2045	(257.697.239.000,00)	-
13	RI0146	08/01/2046	(113.425.320.000,00)	-
14	RI0147	08/01/2047	(147.129.843.000,00)	-
15	RI0320	13/03/2020	(38.424.828.000,00)	-
16	RI0422	25/04/2022	(65.357.911.000,00)	-
17	RI0423	15/04/2023	(80.632.231.000,00)	-
18	RI0443	15/04/2043	(244.072.659.000,00)	-
19	RI0521	05/05/2021	(124.976.486.000,00)	-
20	RI0727	18/07/2027	(52.233.243.000,00)	-
21	RI0747	18/07/2047	(103.718.223.000,00)	-
22	RI1023	17/10/2023	(34.621.982.000,00)	-
23	RIEUR0623	14/06/2023	(161.856.240.000,00)	-
24	RIEUR0628	14/06/2028	(288.349.585.000,00)	-
25	RIEUR0721	08/07/2021	(50.374.621.000,00)	-
26	RIEUR0724	18/07/2024	(25.840.288.000,00)	-
27	RIEUR0725	30/07/2025	(208.984.861.000,00)	-
Grand Total			(3.317.182.880.000,00)	848.548.888.000,00

Unamortized Discount / Premium SBSN Rupiah
31 Desember 2017

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	IFR0006	15/03/2030	(5.894.136.000,00)	15.929.423.000,00
2	IFR0007	15/01/2025	(10.410.304.000,00)	12.777.786.000,00
3	IFR0008	15/03/2020	(938.923.000,00)	866.769.000,00
4	IFR0010	15/02/2036	(16.862.262.000,00)	283.146.302.000,00
5	PBS002	15/01/2022	(16.981.670.000,00)	-
6	PBS003	15/01/2027	(194.184.799.000,00)	2.523.138.000,00
7	PBS004	15/02/2037	(487.642.900.000,00)	-
8	PBS005	15/04/2043	(1.694.775.724.000,00)	-
9	PBS006	15/09/2020	(84.532.174.000,00)	573.109.930.000,00
10	PBS007	15/09/2040	(15.050.291.000,00)	368.138.410.000,00
11	PBS010	25/01/2019	(759.629.000,00)	25.170.186.000,00
12	PBS011	15/08/2023	(5.529.687.000,00)	1.221.222.129.000,00
13	PBS012	15/11/2031	(2.641.172.000,00)	2.271.019.861.000,00
14	PBS013	15/05/2019	(297.387.106.000,00)	66.459.130.000,00
15	PBS014	15/05/2021	(232.326.713.000,00)	63.159.634.000,00
16	PBS015	15/07/2047	(4.935.675.000,00)	-
17	PBS016	15/03/2020	(1.014.772.000,00)	-
Grand Total			(3.071.867.937.000,00)	4.903.522.698.000,00

28. IKHTISAR LK BADAN LAINNYA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2017
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	9.000.000	0	8.799.630	0	0	8.799.630	200.370	Bagian satker	007
2	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	6.000.000			0	6.000.261	6.000.261	(261)	Bukan satker	025
3	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	296.850	0	285.717	0	0	285.717	11.133	Bagian satker	018
4	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	2.768.334	0	2.768.334	0	0	2.768.334	-	Bagian satker	050
5	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	36.954.429	6.148.911	19.161.761	-	0	25.310.671	11.643.758	Satker	026
6	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	3.000.000	-	5.071.739	0	-	5.071.739	(2.071.739)	Bagian satker	025
7	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda		0	0	0	0	-	-	tidak aktif	033
8	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM)	49.396.393	1.080.000	47.851.193	465.200	0	49.396.393	-	Satker	033
9	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	206.900.236	35.385.656	109.654.828	8.388.854	0	153.429.338	53.470.898	Satker	020
10	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	585.388	-	145.007	0	0	145.007	440.381	Bukan satker	025
11	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)								inaktif	025
12	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	10.550.441	4.571.294	2.836.388	199.132	0	7.606.814	2.943.627	Satker	090
13	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	1.185.969	-	1.178.801	-	-	1.178.801	7.168	Bagian satker	088
14	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	-	0	0	0	0	-	-	Bukan satker	091
15	Badan Promosi Pariwisata Indonesia		0	-	0	0	-	-	Bagian satker	040
16	Badan Restorasi Gambut	428.153.350	5.942.155	280.412.014	3.186.658	-	289.540.827	138.612.523	Satker	
17	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	6.000.000	-	6.000.000	0	0	6.000.000	-	Bukan satker	025
18	Dewan Energi Nasional (DEN)	63.911.144	15.056.094	43.122.703	599.417	0	58.778.214	5.132.930	Satker	020
19	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	17.934.400	0	16.148.569	437.067	0	16.585.636	1.348.764	Satker	036
20	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun	85.857.461	0	0	0	77.220.005	77.220.005	8.637.456	Satker	999
21	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	4.796.610	0	4.712.008	0	0	4.712.008	84.602	Bagian satker	018
22	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	17.127.440	0	16.352.492	0	0	16.352.492	774.948	Bagian satker	044
23	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	17.750.000	1.232.543	16.426.028	-	0	17.658.571	91.429	Satker	035
24	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	881.500	-	677.320	0	0	677.320	204.180	Bagian satker	026
25	Dewan Pers	34.160.935	3.284.214	27.963.449	324.997	0	31.572.660	2.588.275	Satker	059
26	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPDD)	2.344.640	1.649.804	1.708.762		0	3.358.566	(1.013.926)	Bagian satker	010
27	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	34.800.000	3.003.935	29.942.968	63.954	0	33.010.857	1.789.143	Satker	007
28	Dewan Riset Nasional (DRN)	6.211.911	0	4.288.941	0	0	4.288.941	1.922.970	Bagian satker	042
29	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	9.302.695	233.924	6.267.959	199.669	0	6.701.552	2.601.143	Satker	033
30	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)	2.900.000	-	2.406.043	0	-	2.406.043	493.957	Bagian satker	055
31	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	37.297.080	6.903.329	19.086.098	3.940.874	-	29.930.301	7.366.779	Bagian satker	048
32	Komisi Banding Merek	521.133	0	413.744	0	0	413.744	107.389	Bagian satker	013
33	Komisi Banding Paten	521.867	0	513.340	0	0	513.340	8.527	Bagian satker	013
34	Komisi Informasi Pusat (KIP)	18.023.154	3.192.133	11.834.573	294.726	0	15.321.432	2.701.722	Satker	059
35	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)		0	-	0	0	-	-	Bagian satker	043
36	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	9.940.100	3.264.981	6.304.120	17.955	0	9.587.056	353.044	Bagian satker	034

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
PER 31 DESEMBER 2017
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN-LAIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)	16.038.495	2.896.012	12.295.035	468.770	0	15.659.816	378.679	Bagian satker	034
38	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	12.516.880	6.798.998	3.606.975	-	0	10.405.973	2.110.907	Bagian satker	074
39	Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA)	1.140.635	199.900	862.019	0	0	1.061.919	78.716	Bagian satker	027
40	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)		0	4.180.549	-	-	4.180.549	(4.180.549)	Bagian satker	036
41	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	3.092.604	-	2.954.943	69.399	0	3.024.342	68.262	Bagian satker	025
42	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	51.060.282	6.601.529	30.977.778	12.006.394	0	49.585.701	1.474.581	Satker	059
43	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	15.000.000	1.413.375	12.636.639	876.663	0	14.926.677	73.323	Satker	047
44	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	11.948.225	-	11.762.161	0	0	11.762.161	186.064	Bagian satker	084
45	Komite Ekonomi dan Industri Nasional	63.667.284		567.917.128	703.635					
46	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	28.881.939	15.787.869	1.516.699	3.948.000	7.380.032	28.632.599	249.340	Bagian satker	012
47	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.530.850		1.511.158			1.511.158	19.692		
48	Komite Keuangan Nasional Syariah	2.248.402		700.719	772.236		1.472.955	775.447		
49	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KKPPI)	72.222.847	0	71.470.231		0	71.470.231	752.616	Bagian satker	035
50	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	189.595	156.147	104.665	-	0	260.812	(71.217)	Bagian satker	078
51	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	33.321.670	-	29.562.690	523.926	0	30.086.616	3.235.054	Satker	022
52	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	146.345.000	1.101.300	277.271	0	143.994.471	145.373.042	971.958	Bagian satker	092
53	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	2.443.875		2.415.264	0	0	2.415.264	28.611	Bagian satker	048
54	Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)		0	3.701.789	0	0	3.701.789	(3.701.789)	Bagian satker	035
55	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)		0	-	0	0	-	-	Bagian satker	041
56	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	3.239.620	-	3.173.547	0	0	3.173.547	66.073	Satker	015
57	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)		0	321.036	0	0	321.036	(321.036)	Bagian satker	084
58	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	26.947.033	-	24.475.502	1.123.381	0	25.598.882	1.348.151	Satker	024
59	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	978.072	0	971.762	0	0	971.762	6.310	Bagian satker	088
60	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	2.155.720	-	1.786.698	0	0	1.786.698	369.023	Bagian satker	026
61	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	74.589.002	4.229.579	60.768.176	8.254.474	0	73.252.229	1.336.773	Satker	007
62	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	402.881.000	0	400.329.047	0	0	400.329.047	2.551.953	Bagian satker	026
63	Lembaga Sensor Film (LSF)	40.975.430	12.091.660	25.776.128	-	0	37.867.787	3.107.643	Satker	023
64	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)		0	0	0	0	-	-	Tidak aktif	024
65	Otorita Asahan	6.664.281	3.698.844	2.330.081	0	-	6.028.925	635.356	Bukan satker	019
66	Sekretariat Pengadilan Pajak	91.429.513	58.315.857	19.550.128	7.309.931	0	85.175.916	6.253.597	Satker	015
67	SKK MIGAS (Satker)	2.054.900.000	0	0	0	1.763.366.233	1.763.366.233	291.533.767	satker	020
68	SKK MIGAS (Bukan Satker)	-	0	0	0	0	-	-	Bukan satker	020
69	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden	35.210.616	0	23.693.907	0	0	23.693.907	11.516.709	Bagian satker	114
70	Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP)	11.732.662		4.902.966			4.902.966	6.829.696		
71	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	-	-	-	-	-	-	-	Bukan Satker	999
72	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	-	-	-	-	-	-	-	Satker	999
73	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	-	-	-	-	-	-	-	Bukan Satker	007
74	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	-	-	-	-	-	-	-	Bukan Satker	007
	J U M L A H	4.338.424.992	204.240.043	2.018.867.215	54.175.311	1.997.961.001	3.706.622.807	568.134.901		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
UNTUK PERIODE PELAPORAN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	PENDAPATAN OPERASIONAL	PENDAPATAN NON OPERASIONAL	TOTAL PENDAPATAN	BEBAH OPERASIONAL	BEBAH NON OPERASIONAL	TOTAL BEBAH	SURPLUS (DEFISIT)	BA	KETERANGAN
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7	9 = 5 - 8	10	11
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	191.884	-	191.884	142.743	-	142.743	49.141	025	Bukan satker
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	684	2.925	3.609	35.753.316	296	35.753.612	(35.750.003)	026	Satker
3	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda			-			-	-	033	Belum aktif
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)		-	-	48.088.970	-	48.088.970	(48.088.970)	033	Satker
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	1.209.883.114	1.947.489	1.211.830.603	155.658.524	104.282	155.762.806	1.056.067.797	020	Satker
6	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	167.044.755	108.568.396	275.613.152	20.112.656	-	20.112.656	255.500.496	025	Bukan satker
7	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)		-	-	7.760.668	52.851	7.813.519	(7.813.519)	090	Satker
8	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	771.270.951	-	771.270.951	42.930.100	-	42.930.100	728.340.851	091	Bukan satker
9	Badan Restorasi Gambut	85.933	103.097	189.030	173.201.426	2.412	173.203.839	(173.014.809)		
10	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	6.000.000	79.299	6.079.299	5.999.997	9.155	6.009.152	70.147	025	Bukan satker
11	Dewan Energi Nasional (DEN)	-	185.673	185.673	60.509.329	12.487	60.521.817	(60.336.144)	020	Satker
12	Dewan Jaminan Sosial Nasional		7.800	7.800	16.475.565	1.185	16.476.750	(16.468.950)	036	Satker
13	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun	-	289.344	289.344	12.182.890	2.576	12.185.466	(11.896.122)	999	Satker
14	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)		25.987	25.987	9.131.831	595	9.132.426	(9.106.439)	032	Satker
15	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)		43.089	43.089	17.880.850	7.870	17.888.719	(17.845.631)	035	Satker
16	Dewan Pers		2.460	2.460	31.838.824	-	31.838.824	(31.836.364)	059	Satker
17	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	-	717.632	717.632	34.030.171	6.789.385	40.819.556	(40.101.924)	007	Satker
18	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	1.376	1.376	6.734.792	8.403	6.743.195	(6.741.819)	033	Satker
19	Komisi Informasi Pusat (KIP)		-	-	15.459.413	4.400	15.463.813	(15.463.813)	059	Satker
20	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	-	-	-	39.248.906	719.632	39.968.538	(39.968.538)	059	Satker
21	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	-	-	-	14.773.891	1.978	14.775.869	(14.775.869)	047	Satker
22	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	-	1.881	1.881	33.589.742	-	33.589.742	(33.587.861)	022	Satker
23	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)		971	971	3.185.090	-	3.185.090	(3.184.118)	015	Satker
24	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	13.393.113	3.475.199	16.868.312	31.108.655	40	31.108.695	(14.240.384)	024	Satker
25	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	799	51.913	52.713	70.782.883	3.521	70.786.404	(70.733.691)	007	Satker
26	Lembaga Sensor Film (LSF)	3.185.603	-	3.185.603	45.171.263	-	45.171.263	(41.985.660)	023	Satker
27	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)			-			-	-	024	Tidak aktif
28	Otorita Asahan	-	4.319.570	4.319.570	-	406.844	406.844	3.912.726	019	Bukan satker
29	Sekretariat Pengadilan Pajak	46.281	190.415	236.696	82.956.523	14.857	82.971.381	(82.734.685)	015	Satker
30	SKK MIGAS (Satker)	105.864	2.591.991	2.697.856	1.724.292.979	372.805	1.724.665.784	(1.721.967.928)	999	satker
31	SKK MIGAS (Bukan Satker)	2.054.900.000		2.054.900.000	713.494.715		713.494.715	1.341.405.285	020	Bukan satker
32	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	5.043.950.401		5.043.950.401	4.702.741.504		4.702.741.504	341.208.897	999	Bukan Satker
33	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	1.603.435	164.438	1.767.873	40.712.933	-	40.712.933	(38.945.061)	999	Satker
34	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	106.285.309	-	106.285.309	105.986.687	-	105.986.687	298.622		Bukan satker
35	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	4.560.334	-	4.560.334	2.068.354	4.530.998	6.599.352	(2.039.018)		Bukan satker
	J U M L A H	9.382.508.461	122.770.943	9.505.279.404	8.304.006.189	13.046.573	8.317.052.762	1.188.226.643		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2017
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA UNIT BADAN LAINNYA	ASET LANCAR	INVESTASI	ASET TETAP	ASET LAINNYA	TOTAL ASET	KEWAJIBAN JK PENDEK	KEWAJIBAN JK PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	TOTAL EKUITAS	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)	13
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	135.285.759	-	5.969.951	-	141.255.710	1.250.669	-	1.250.669	140.005.041	141.255.710	Bukan satker
2	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	2.235.821	-	857.446	-	3.093.267	-	-	-	3.093.267	3.093.267	Satker
3	Badan Pelaksana Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum aktif
4	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	18.159	-	1.696.643	13.092.516	14.807.319	200.000	-	200.000	14.607.319	14.807.319	Satker
5	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	75.012.434	-	254.167.766	1.071.844	330.252.044	59.652.132	-	59.652.132	270.599.912	330.252.044	Satker
6	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	1.871.870.373	1.471.308.703	-	-	3.343.179.076	15.331.795	-	15.331.795	3.327.847.281	3.343.179.076	Bukan satker
7	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	180.712	-	575.731	251.105	1.007.548	-	-	-	1.007.548	1.007.548	Satker
8	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	4.106.159.927	-	-	8.257.905.257	12.364.065.185	75.349.233	4.269.176.359	4.344.525.592	8.019.539.593	12.362.512.631	Bukan satker
9	Badan Restorasi Gambut	113.885.872	-	3.522.211	-	117.408.083	58.917	-	58.917	117.349.166	117.408.083	
10	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	2.036.769	-	4.067.936	-	6.104.705	702.442	4.098.370	4.800.812	1.303.893	6.104.705	Bukan satker
11	Dewan Energi Nasional (DEN)	413.636	-	5.064.200	208.364	5.686.201	-	-	-	5.686.201	5.686.201	Satker
12	Dewan Jaminan Sosial Nasional	288.071	-	1.198.823	-	1.486.894	142.123	-	142.123	1.344.771	1.486.894	Satker
13	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun	961.883	-	138.664.137	-	139.626.020	961.883	-	961.883	138.664.137	139.626.020	Satker
14	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	-	-	742.804	-	742.804	-	-	-	742.804	742.804	Satker
15	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	84.680	-	95.220	-	179.900	101.083	-	101.083	78.817	179.900	Satker
16	Dewan Pers	188.376	-	1.356.162	275.700	1.820.238	68.910	-	68.910	1.751.328	1.820.238	Satker
17	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	716.508	-	1.453.172	245.887	2.415.567	5.762	-	5.762	2.409.805	2.415.567	Satker
18	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	18.159	-	593.241	-	611.400	-	-	-	611.400	611.400	Satker
19	Komisi Informasi Pusat (KIP)	144.551	-	953.091	66.931	1.164.573	-	-	-	1.164.573	1.164.573	Satker
20	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	453.032	-	11.788.820	70.389	12.312.241	-	-	-	12.312.241	12.312.241	Satker
21	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	98.686	-	1.098.295	440.402	1.637.383	-	-	-	1.637.383	1.637.383	Satker
22	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	41.259	-	8.970.995	11.271.798	20.284.051	-	-	-	20.284.051	20.284.051	Satker
23	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	7.038	-	-	-	195.284	-	-	-	195.284	195.284	Satker
24	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	2.332.499	-	156.375.886	783.594	159.491.980	2.024	-	2.024	159.489.956	159.491.980	Satker
25	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	296.058	-	144.960.921	310.047	145.567.026	277.637	-	277.637	145.289.389	145.567.026	Satker
26	Lembaga Sensor Film (LSF)	844.004	-	17.545.578	406.696	18.796.278	360.236	-	360.236	18.436.041	18.796.278	Satker
27	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak aktif
28	Otorita Asahan	2.746.841	-	10.869.391	1.231.585.883	1.245.202.115	-	-	-	1.245.202.115	1.245.202.115	Bukan satker
29	Sekretariat Pengadilan Pajak	710.282	-	13.994.634	-	14.704.916	-	-	-	14.704.916	14.704.916	Satker
30	SKK MIGAS (Satker)	2.949.003	-	69.894.879	52.809.698	125.653.579	1.293.119	-	1.293.119	124.360.460	125.653.579	satker
31	SKK MIGAS (Bukan Satker)	2.259.625	-	107.442.381	-	109.702.005	1.293.119	1.008.710.882	1.010.004.001	(900.301.996)	109.702.005	Bukan satker
32	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (bukan satker)	6.031.879.906	-	703.680.696	913.482.456	7.649.043.058	1.794.400.947	1.316.320.230	3.110.721.177	4.538.321.881	7.649.043.058	Bukan Satker
33	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (satker)	4.965.801	-	140.807.744	33.045.996	178.819.542	-	-	-	178.819.542	178.819.542	Satker
34	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	41.801.080	-	88.231.022	-	130.032.102	21.830.379	18.246.213	40.076.592	89.955.510	130.032.102	Bukan Satker
35	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	7.675.169	-	426.062	-	8.101.231	-	-	-	8.101.231	8.101.231	Bukan Satker
TOTAL		12.408.561.971	1.471.308.703	1.897.065.837	10.517.324.564	26.294.449.322	1.973.282.408	6.616.552.055	8.589.834.462	17.704.614.860	26.292.896.768	

29. DANA KELOLAAN BLU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN

DANA KELOLAAN BLU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No.	Nama Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
1	BTN	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	01-01-30-000881-3	167.071.723,34	30.301.898,01
2	BTN Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	7011001717	125.001.995.074,00	1.258.179,00
3	Bank Mandiri	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	126-00-0703519-8	329.971.153,61	1.736.558,39
4	Bank Bukopin	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1023938011	1.613.716,56	1.151.575,56
5	Bank Riau Kepri	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	10-10-00010-6	14.157.171,95	2.027.647,15
6	Bank Riau Kepri Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	82-00-30000-0	0	1.000.000,00
7	Bank Sumut	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	350.01.06.0000054	242.986.480,04	33.932.639,44
8	Bank Sumut Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	610.01.06.000008-0	169.221.290,00	9.478.884,00
9	Bank Kaltim	Rekening Dana Kelolaan BLU PPP	0011100244	146.628.444,76	278.793.292,93
10	Bank Sumsel Babel	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1703000001	2.087.532,49	218.085.366,49
11	Bank NTT	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	016.01.01.000014-6	127.258.530,99	33.515.245,70
12	Bank DIY	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	001111001471	1.655.386,75	7.490.158,50
13	BRI	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	0193-01-002945-30-6	3.170.607,62	2.389.002,27
14	BRI Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1030811328	42.080.668,47	167.499.593,53
15	BNI	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	2226662828	122.862.885.491,00	3.206.997,00
16	BPD Jatim	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	0011268862	144.356.531,37	67.228.849,17
17	BPD Jatim Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	6101003780	4.978.330,71	4.885.191,45
18	BPD Jateng	BLU PPP Dana Kelolaan	1-034-01721-9	22.491.361,00	60.913.369,00
19	BPD Papua	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1500105000063	7.123.696,55	8.690.654,53
20	Bank Syariah Mandiri	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	7122212216	135.028.345,66	230.592.774,72
21	BPD Kalteng	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	100-002-000003591-0	156.656.838,00	21.079.855,00
22	BPD Kalsel	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	003.00.04.00848.5	2.180.606,00	60.639.953,00
23	BPD Nagari	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	2100.0101.01446-1	100.923.123,66	1.475.705,82
24	BPD Sulawesi Tenggara	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	001.01.05.500.213-0	48.175.954,00	20.636.626,00
25	Bank Artha Graha	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1075015719	102.933.902,01	1.393.429,00
26	Bank NTB	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	001.21.07109.00-6	1770518,4	2.043.323,90

DANA KELOLAAN BLU PADA PUSAT PEMBIAYAAN PERUMAHAN
per 31 Desember 2017

(dalam rupiah)

No.	Nama Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening	31 Desember 2017 (Audited)	31 Desember 2016 (Audited)
27	Bank Jabar Banten	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	8000000000003	2.699.227,00	63.799.781,00
28	Bank Jabar Banten Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	70102000901	433.782.055,36	1.425.000,00
29	Bank Mayora	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	6000486815	1.501.806,02	1.576.589,94
30	Bank Sumsel Babel Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	801-32-00002	299.347.609,00	1.398.152,00
31	Bank Jambi	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	3000947217	1.877.529,07	184.135,51
34	Bank Sulselbar	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	130-002-000031853-0	3.532.501,00	0
32	Bank Sulselbar Syariah	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	130-002-000031853-0	2.730.772	0
33	Bank Sulut Go	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1-034-02557-2	2.020.743	0
35	Bank Kalbar	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	1000001909	8.298.860	0
36	Bank Sulteng	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	0010101000353	1.750.000	0
37	Bank Bali	RPL 019 PPP UTK Dana Kelolaan	0100121000548	1.721.000	0
38	BTN	Pengelolaan Kas		625.850.000.000	
39	BNI	Pengelolaan Kas		311.700.000.000	
40	BRI	Pengelolaan Kas		226.700.000.000	
41	Mandiri	Pengelolaan Kas		183.700.000.000	
42	Bank Jabar Banten	Pengelolaan Kas		247.300.000.000	
43	BPD Jatim	Pengelolaan Kas		119.300.000.000	
44	Bank Sumut	Pengelolaan Kas		85.000.000.000	
45	Deposito 1	00001-01-40-018062-0		0	26.270.000.000,00
Jumlah Saldo Menurut Rekening Koran				2.050.148.664.581	27.609.830.428
Pendapatan dari pengelolaan kas rekening Dana Kelolaan*				(625.587.064)	(406.013.105)
Total Piutang pada Bank Pelaksana**				149.500	2.825.652
Jumlah Aset Lainnya				2.049.523.227.017	27.206.642.975

*Pendapatan dari pengelolaan kas rekening dana kelolaan merupakan pendapatan dari jasa giro rekening dana kelolaan dan pendapatan deposito pengelolaan kas (999.03) yang belum disetorkan ke rekening operasional (033) pada 31 Desember 2017.

** Piutang pada bank pelaksana merupakan piutang atas biaya-biaya akibat pemindahbukuan dana serta biaya-biaya administrasi yang dibebankan ke rekening dana kelolaan PPDPP.

**30. RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER
MASUK PER 31 DESEMBER 2017**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2017

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Transfer Masuk	Transfer Keluar	Selisih	Keterangan
1	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	479.706.514.473	479.706.514.473	-	
2	005	MAHKAMAH AGUNG	28.806.540.479	27.275.181.090	1.533.359.389	
3	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	15.496.051.066	15.496.051.066	-	
4	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	44.818.435.390	30.382.537.110	14.435.898.280	Selisih karena transfer masuk ATR dari beberapa KL
5	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	5.197.851.846	5.858.906.979	(661.255.133)	Selisih Transfer Masuk dan Transfer keluar terjadi karena Kemendagri menerima Alih Status Penggunaan BMN dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
6	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	934.055.790.937	914.795.265.060	19.260.525.877	Selisih merupakan transfer keluar dokumen keimigrasian dari Dit. Protikons ke perwakilan RI.
7	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	84.809.226.209.292	84.373.142.314.871	436.083.894.421	
8	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.600.207.389.555	1.614.554.053.422	(14.346.683.867)	Selisih antara lain karena transfer barang persediaan ke sarker UN/Kemlu
9	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	1.354.352.394.901	1.311.216.842.901	43.135.552.000	Selisih disebabkan penerimaan TM dari KL lain, dan penyerahan ATR
10	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	268.430.279.550	267.218.240.083	2.212.039.467	selisih tersebut diantaranya disebabkan oleh transfer masuk dari sarker inaktif dan dari KL lain
11	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	79.229.576.825	89.017.689.796	(9.788.112.971)	Selisih karena Transfer Keluar ke UMS, Untirta, Politeknik Batam, BPPT dan BP Batam
12	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	38.744.768.574	41.266.733.750	(2.521.965.176)	Selisih karena transfer keluar ATR ke KemenSetneg
13	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	5.266.373.428.980	5.264.028.149.480	2.345.279.500	selisih transfer masuk pada sarker Otban Juanda Surabaya dari BP2TKI
14	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	63.075.749.394	134.498.754.765	(71.421.005.371)	Selisih antara lain: 1. transfer keluar ATR oleh sarker penerima dicatat sebagai kapitalisasi terhadap aset definitif. 2. Transfer keluar yang belum diterima KemenRistekDikti
15	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	1.035.429.902.087	1.028.785.742.093	6.644.159.994	1. Transfer ATR antar sarker Biro Kepegawaian ke Biro Umum (tidak ditambah ke bangunan induk krn sudah revall) : Rp2.086.416.000 2. Pengiriman persediaan obat & vaksin ke vertikal belum tercatat karena dokumen sumber belum lengkap Rp2.833.514.208
16	025	KEMENTERIAN AGAMA	1.909.104.621.545	1.525.324.008.688	383.780.612.877	Selisih antara lain berasal dari alih status dari dari LPP BRI sebesar Rp329.401.747.335, dari KemenPUPR sebesar Rp64.643.694.561, dari KemenESDM dan Kemenkes sebesar Rp23.268.100
17	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	625.355.852.540	686.064.606.558	(40.708.754.019)	Selisih antara lain karena alih status penggunaan kepada BNP2TKI
18	027	KEMENTERIAN SOSIAL	176.924.535.554	164.819.581.388	12.104.954.166	selisih tersebut disebabkan oleh transfer masuk dari KL lain yaitu Kemenkes dan KemenPUPR
19	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	876.612.396.075	875.515.850.178	1.096.545.897	selisih tersebut diantaranya terjadi karena perbedaan akumulasi penyusutan antara BMN yg ditransfer masuk dengan BMN yang ditransfer
20	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.892.030.766.391	2.857.296.138.789	34.734.627.602	Selisih antara lain karena alih status penggunaan dari BPLS sebesar Rp33.701.922.420
21	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	23.519.217.838.004	23.758.255.840.616	(239.038.002.612)	Selisih antara lain karena alih status penggunaan kepada: - Kementerian Agama sebesar Rp64.643.694.561. - Kementerian Setneg sebesar Rp58.057.685.017 - Kementerian Sosial sebesar Rp48.765.727.500 - Kementerian Ristekdikti sebesar Rp21.328.469.894. - Kementerian Perhubungan sebesar Rp13.515.970.365 - POLRI sebesar Rp1.675.806.256
22	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	0	565.889.094.223	(565.889.094.223)	Selisih merupakan alih status ke Bakamla. Selisih sebesar Rp6.187.500 merupakan kurang transfer berupa aset yang dihentikan penggunaannya
23	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	0	2.658.379.841	(2.658.379.841)	selisih tersebut disebabkan oleh transfer keluar ATR ke Kemenkeu
24	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	0	19.167.873.756	(19.167.873.756)	selisih tersebut merupakan: 1. Kas lainnya di KL dari hibah yang belum disahkan sebesar Rp19.169.966.154 2. Kas lainnya di bendahara pengeluaran sebesar Rp69.6373.554
25	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	14.368.560.810	22.602.890.569	(8.233.329.759)	selisih tersebut disebabkan oleh adanya transfer keluar tanah dan rumah negara Gol III ke KemenPUPR
26	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	12.983.102.193.716	13.041.542.272.579	(58.440.078.863)	Selisih disebabkan selisih transfer masuk internal Kemenristekdikti sebesar Rp19.295.226.319, dan alih status penggunaan dari Kemperind, KemenKaminfo, BIG, Kemendikbud, dan Kementerian PUPR sebesar Rp126.928.284.790
27	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	27.958.200	27.959.200	-	
28	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	8.287.012.621	8.287.012.621	-	
29	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	58.681.450	9.981.450	48.700.000	Selisih karena Transfer masuk peralatan mesin dari Kemenkes
30	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	0	7.801.249.138	(7.801.249.138)	Selisih karena Transfer keluar ke KemenSetneg (Renov gedung KemenSetneg yang dipakai Wantanas)
31	054	BADAN PUSAT STATISTIK	30.056.649.457	26.709.262.457	3.348.387.000	selisih tersebut disebabkan oleh transfer masuk dari KPK dan BNPPT
32	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	88.643.361.682	72.512.984.685	16.130.376.977	selisih tersebut diantaranya disebabkan oleh: 1. perbedaan harga perolehan terakhir persediaan 2. kegagalan proses kirim dari sarker DK ke es.I
33	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	284.907.000	0	284.907.000	Hibah dari Yayasan Idayu senilai 284.907.000 yang diinput dengan transaksi transfer masuk
34	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	110.420.822.771	280.780.987.465	(170.360.164.694)	Selisih merupakan: - Transfer keluar ke LPP RRI berupa alat pancar radio FM sebesar Rp27.881.837.500. - Transfer keluar dari BPPPTI ke LPP TVRI sebesar Rp106.783.096.970. - Transfer keluar dari PPI ke LPP TVRI sebesar Rp55.149.955.000. - Transfer keluar dari Ditjen SDPPI ke KemenRistekDikti dan LPI sebesar Rp4.210.451.437. - Transfer keluar ATR (diterima dengan transaksi penerimaan ATR) sebesar Rp11.940.191.692
35	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	38.096.575.130.197	38.073.676.665.582	22.898.464.615	
36	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	38.013.022.454	27.481.751.010	10.531.271.444	
37	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	56.800.000	0	56.800.000	selisih tersebut merupakan transfer masuk dari Kemenkes
38	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	299.338.752.901	299.347.085.999	(8.333.098)	selisih tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan harga perolehan terakhir persediaan
39	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	12.323.760.472	12.305.643.913	18.116.559	selisih tersebut disebabkan oleh adanya transfer masuk dari sarker inaktif di Kemendagri
40	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	209.643.067.464	209.653.817.144	(10.749.680)	
41	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	162.941.357	162.941.357	-	
42	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	178.589.404.291	178.727.052.649	(137.648.358)	
43	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	34.756.447.963	33.663.530.993	1.092.916.970	Transfer masuk berupa Gedung dan Bangunan pada KPU Kabupaten Sleman yang berasal dari Kementerian Agama
44	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1.320.600.571	1.320.600.571	-	

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN TRANSFER KELUAR DAN TRANSFER MASUK
PER 31 DESEMBER 2017

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	Transfer Masuk	Transfer Keluar	Selisih	Keterangan
45	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	152.620.412.527	80.095.019.351	72.525.393.176	1. Transfer Antar Entitas Seilai Rp74.623.833.746 dengan rincian: a. Transfer Masuk senilai Rp75.511.265.826 BP Sabang, Kementerian Kominfo, KemenPUPR dan KemenRistekdikti b. Transfer Keluar senilai Rp887.432.080 ke KemenRistekdikti 2. Transfer keluar ATR yang diterima sebagai penerimaan ATAR senilai 14.919.670.815. 3. Transfer keluar dari Sestama LPI Berupa Aset Tetap yang diterima oleh PPI sebagai Persediaan senilai Rp77.583.000
46	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	6.890.351.069	417.624.623	6.472.726.446	
47	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	21.131.577.605	20.281.368.815	850.210.790	Selish karena Transfer keluar ATR ke Kemenristekdikti
48	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	76.497.851.578	76.441.051.578	56.800.000	Terdapat transfer masuk alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan pada Biro KSHU dan transaksi transfer keluar berupa ATR yang dicatat menggunakan menu pengembangan nilai aset pada saat penerimaan
49	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	307.252.000	2.152.715.503	(1.845.463.503)	Selish karena alih status penggunaan BMN ke beberapa universitas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejumlah Rp9.370.625.343
50	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	0	929.474.381	(929.474.381)	Selish antara lain karena alih status ke Setneg dan POLRI
51	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	5.375.000	5.375.000	-	
52	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	154.648.505.044	154.648.505.044	-	
53	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	468.786.808	468.786.808	-	
54	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	51.065.609.367	49.810.233.614	1.255.375.753	Selish karena Terjadi perbedaan nilai transfer keluar pada daftar transaksi persediaan dan jurnal kirim ke simak BMN, Penyusutan ATR, Terdapat kesalahan penggunaan menu
55	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.692.862.757.476	1.682.973.211.935	9.889.545.541	Selish karena munculnya NUP baru pada saat penghentian ATB
56	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	3.646.976.041	6.968.823.392	(3.321.847.351)	selish tersebut diantaranya disebabkan oleh transfer keluar ke BPS
57	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	3.279.100	3.279.100	-	
58	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	46.412.774.721	7.455.413.241	38.957.361.480	Selish merupakan alih status penggunaan dari Kementerian Ketenagakerjaan senilai Rp40.708.754.019,00 dan alih status penggunaan ke Kementerian Perhubungan senilai Rp1.028.407.000,00
59	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	33.468.587.200	67.170.509.620	(33.701.922.420)	Selish karena alih status penggunaan kepada KKP
60	107	BADAN SAR NASIONAL	823.136.431.320	823.510.598.720	(372.167.400)	Selish merupakan pemakaian persediaan dengan menggunakan transaksi transfer keluar
61	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	0	505.894.354	(505.894.354)	Selish karena Transfer keluar ATR ke Setneg dan Kemenkeu.
62	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	0	404.902.364	(404.902.364)	Selish karena Transfer keluar ke Kemensetneg
63	112	BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	3.297.662.500	0	3.297.662.500	Selish karena Trasfer masuk alat-alat laboratorium dari Kemperind
64	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	56.800.000	209.000.000	(152.200.000)	Selish karena Alih status ke BPS
65	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	51.623.848.735	356.598.609.695	(304.974.760.960)	Selish karena: - Transfer masuk berupa berupa Peralatan Pemancar FM Radio 5 KW dari KemenKominfo sebesar Rp27.881.837.500 dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.454.851.125. Berdasarkan BAST Nomor: 01/KOMINFO/BPPPT.131/BAST/PL.04.01/03/2017 Tanggal 14 Maret 2017 - Transfer keluar berupa Tanah ke Kemenag sebesar Rp329.401.747.335. Berdasarkan BAST Nomor: 774/OU/05/2017 dan Nomor: 01/MA/05/2017 Tanggal 9 Mei 2017
66	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	211.039.176.163	64.485.138.606	146.554.037.557	Selish antara lain karena alih status penggunaan dari Kementerian Kominfo sebesar Rp161.933.051.970
67	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	0	6.511.785.000	(6.511.785.000)	Selish karena Transfer keluar ke LPI
68	119	BADAN KEAMANAN LAUT	565.895.281.723	0	565.895.281.723	Selish merupakan alih status penggunaan dari Kementerian Polhukam
JUMLAH PADA K/L			182.024.514.035.801	181.730.893.359.083	293.620.676.718	-
69	999.01	PENGELOLAAN UTANG	-	-	-	-
70	999.02	PENGELOLAAN HIBAH	-	-	-	-
71	999.03	INVESTASI PEMERINTAH	22.527.614.137.936	2.200.000.000.000	20.327.614.137.936	Transfer Masuk sebesar Rp22.527.614.137.936 terdiri dari pengalihan antar UAKPA, (UAKPA Direktorat KND sebesar Rp2,2 triliun pengalihan dari DJPPR dan LMAN sebesar Rp20,327 triliun pengalihan dari BA 999.99)
72	999.04	PENERUSAN PINJAMAN	-	-	-	-
73	999.05	TRANSFER KE DAERAH	-	-	-	-
74	999.07	BELANJA SUBSIDI	-	-	-	-
75	999.08	BELANJA LAIN-LAIN	-	-	-	-
76	999.99	TRANSKASI KHUSUS	6.927.652.633	20.480.981.164.441	(20.474.053.511.808)	Transfer Masuk sebesar Rp6.927.652.633 berasal dari penyerahan BMN tipe dari Pengguna Barang kepada Pengelola Barang dengan nilai buku sebesar
						Transfer Ke Luar sebesar minus Rp20.480.562.464.441 seluruhnya terdapat pada UAPBUN TK DJKN terdiri dari: Aset BLBI sebesar minus Rp105.227.349.549 berasal dari penetapan status penggunaan atas aset properti BPPN dan Aset Properti Eks Kelolaan PT. PPA
						Aset Eks Pertamina minus Rp20.374.054.426.892 berupa Transfer Keluar Aset ke Satker LMAN
						Aset lain-lain sebesar minus Rp1.270.688.000 merupakan penetapan status penggunaan aset eks USAID, aset eks GIZ, dan aset eks LPT Indak kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian
JUMLAH PADA BUN			22.534.541.790.569	22.680.981.164.441	(146.439.373.872)	-
TOTAL			204.559.055.826.370	204.411.874.523.524	147.181.302.846	-

31. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SBN

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN	4
II. STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2017	7
III. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN.....	8
A. Bunga Utang Surat Berharga Negara	9
B. Surat Berharga Negara Neto	9
IV. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2017	11
A. Penerbitan/ Penjualan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah	12
B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)	13
C. Penerbitan dan Pelunasan SUN dalam Valuta Asing	15
D. Pelaksanaan Debt Switching/Buyback	15
V. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2017.....	17
VI. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2017	19
I. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah	19
II. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas)	39
III. Mutasi Surat Berharga Negara Selama Tahun 2017	42
VII. PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

TABEL 1. SBN Neto Tahun 2017	10
TABEL 2. Seri SPN Yang Diterbitkan Tahun 2017	13
TABEL 3. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2017	14
TABEL 4. Realisasi Penerbitan SUN Valas 1 Januari S.D. 31 Desember 2017	15
TABEL 5. Realisasi Pelaksanaan Debtswitching Tahun 2017	16
TABEL 6. Rincian Realisasi Pelaksanaan Debtswitching Tahun 2017 (Dalam Juta Rupiah)	16
TABEL 7. Transaksi Buyback Tahun 2017	16
TABEL 8. Daftar Penerbitan SBSN Tahun 2017 (Dalam Juta Rupiah)	18
TABEL 9. Outstanding SBN Seri Fixed Rate (Fr) Per 31 Desember 2017	21
TABEL 10. Data Outstanding ORI Per 31 Desember 2017	23
TABEL 11. Nilai Dan Jatuh Tempo SBN Seri Variable Rate (VR) Per 31 Desember 2017	25
TABEL 12. Struktur Outstanding SPN Per 31 Desember 2017	27
TABEL 13. Struktur Outstanding Surat Utang Pemerintah Per 31 Desember 2017	29
TABEL 14. Struktur Outstanding SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2017	31
TABEL 15. Struktur Outstanding SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2017	32
TABEL 16. Struktur Outstanding SBSN Seri SR Per 31 Desember 2017	34
TABEL 17. Struktur Outstanding SBSN Seri SPN-S Per 31 Desember 2017	36
TABEL 18. Struktur Outstanding SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2017	38
TABEL 19. Outstanding Dan Jatuh Tempo SBN Valas Per 31 Desember 2017	40
TABEL 20. Mutasi Principle Outstanding SBN Tahun 2017	42

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Outstanding ON Rupiah Seri FR Tgl 31 Desember 2017	22
Grafik 2. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR	22
Grafik 3. Struktur Outstanding ORI Per 31 Desember 2017	24
Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo ORI Per 31 Desember 2017	24
Grafik 5. Struktur Outstanding VR Per 31 Desember 2017	26
Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo VR Per 31 Desember 2017	26
Grafik 7. Struktur Outstanding SPN Per 31 Desember 2017	27
Grafik 8. Struktur Jatuh Tempo SPN Per 31 Desember 2017	28
Grafik 9. Struktur Outstanding Surat Utang Pemerintah Per 31 Desember 2017	29
Grafik 10. Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah Per 31 Desember 2017 ..	30
Grafik 11. Struktur Outstanding SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2017	31
Grafik 12. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri IFR Per 31 Desember 2017	31
Grafik 13. Struktur Outstanding SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2017	32
Grafik 14. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri PBS Per 31 Desember 2017	33
Grafik 15. Struktur Outstanding SBSN Seri SR Per 31 Desember 2017	35
Grafik 16. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SR Per 31 Desember 2017	35
Grafik 17. Struktur Outstanding SBSN Seri SPN-S Per 31 Desember 2017	36
Grafik 18. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SPN-S Per 31 Desember 2017	37
Grafik 19. Struktur Outstanding SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2017	38
Grafik 20. Struktur Jatuh Tempo SBSN Seri SDHI Per 31 Desember 2017	39

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Di samping itu laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara tahun 2017. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2017 dan berakhir 31 Desember 2017, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Dalam peta kebijakan fiskal, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Pemerintah pusat berwenang menerbitkan Surat Berharga Negara setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka APBN.

Tujuan penerbitan Surat Berharga Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah untuk:

- a. Membiayai defisit APBN;
- b. Menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (*cash-mismatch*);
- c. Mengelola portofolio utang Negara.

Adapun manfaat penerbitan SBN adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Instrumen Fiskal

Penerbitan SBN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal.

b. Sebagai Instrumen Investasi

SBN menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi.

c. Sebagai Instrumen Pasar Keuangan

Surat Berharga Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrumen pasar keuangan lainnya.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengertian Surat Utang Negara (SUN) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Sedangkan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Secara umum, SUN dapat dibagi dalam dua jenis yaitu Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*) dan Obligasi Negara (*Treasury Bonds*). Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Sedangkan Obligasi Negara (ON) adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga secara diskonto.

Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan ON dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate*).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, SUN diterbitkan dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat (*scriptless*). SUN dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum di lembar sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya portofolionya guna memperkecil risiko investasi adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat (*scriptless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronik (*book entry system*). Dalam hal SUN tanpa warkat maka bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronik. Cara pencatatan secara elektronik dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) menyatakan bahwa SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan (*tradable*) atau bentuk yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan pertama kali diperdagangkan oleh Pemerintah di pasar primer/ pasar perdana. Perdagangan SUN selanjutnya ada di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa (*over the counter/ OTC*). SUN yang tidak diperdagangkan adalah SUN yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SUN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

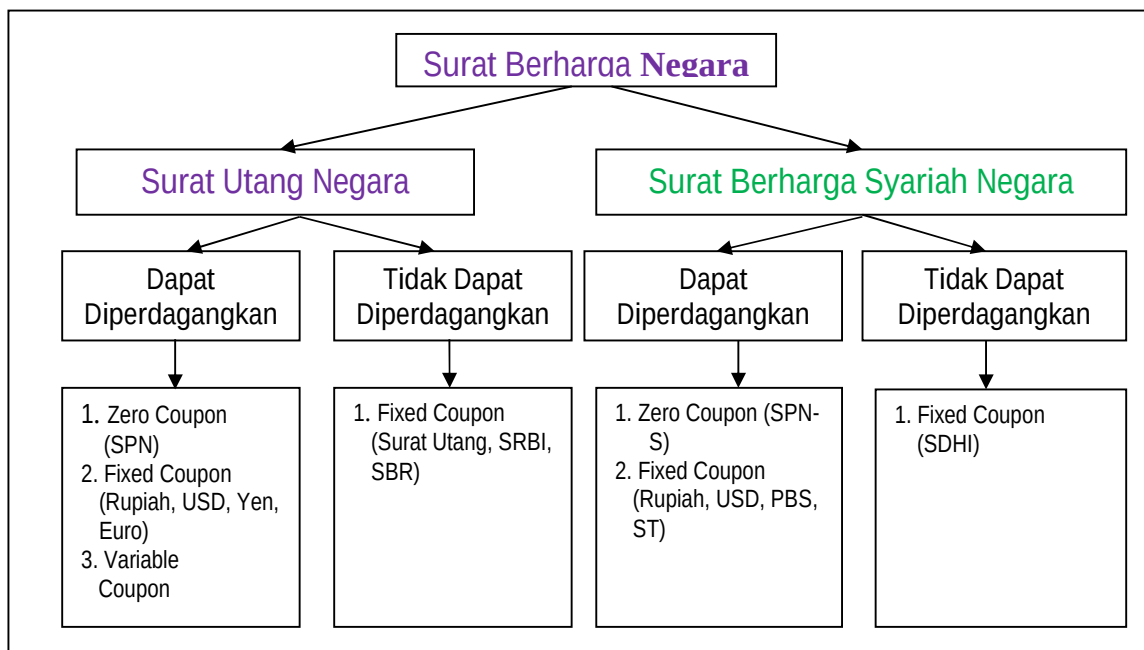
SBSN adalah SBN yang berbasis syariah. Pemerintah mulai menerbitkannya pada tahun 2008 dengan denominasi rupiah yakni setelah disahkannya UU No 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Berdasarkan metode penerbitan, SBSN tidak berbeda dengan SBN konvensional yaitu SUN. Yang membedakannya dengan SUN adalah SBSN bukan surat pernyataan utang sehingga dalam penerbitannya dibutuhkan *underlying transaction* dan *underlying asset* sebagai obyek transaksi. Adapun tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti proyek infrastruktur dalam sektor

energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Penerbitan SBSN dilakukan melalui SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit. Yang bertindak sebagai SPV adalah Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN), yang berbadan hukum. PP SBSN didirikan berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan PP SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Adapun struktur Surat Berharga Negara secara umum pada tahun 2017 dapat digambarkan pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Surat Berharga Negara



II. STRATEGI PEMBIAYAAN TAHUN 2017

Kebijakan umum yang digunakan dalam penyusunan strategi pembiayaan tahunan sebagai berikut¹:

1. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada level yang aman dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali;

¹ Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Nomor 54/PR/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Nomor 44/PR/2016 Tentang Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2017

2. Meningkatkan optimalisasi biaya utang untuk mendukung kesinambungan fiskal melalui optimalisasi pinjaman tunai dan *shortening duration* portofolio utang;
3. Mengoptimalkan bauran mata uang (*currency mix*) dalam penerbitan SBN dengan mengutamakan penerbitan dalam mata uang Rupiah, sedangkan penerbitan SBN dalam valuta asing dilakukan sebagai komplementer;
4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik;
5. Melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif antara lain melalui *buyback* dan *debt switch* untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar serta implementasi *Asset Liability Management* (ALM) dalam upaya untuk menjaga keseimbangan makro;
6. Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui pengadaan pinjaman kegiatan dan penerbitan sukuk yang berbasis proyek dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah;
7. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri untuk mendukung pembiayaan belanja modal APBN dan pemanfaatan fasilitas pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan;
8. Memperkuat fungsi *Investor Relation Unit*, antara lain melalui diseminasi informasi secara proaktif, respon yang cepat dan efektif, dan komunikasi yang efektif dengan investor dan *stakeholder* lainnya.

III. KEBUTUHAN PEMBIAYAAN

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN-P tahun 2017 sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2017, kebutuhan penerbitan/pengadaan utang neto sebesar Rp61.343365.729,0 miliar dan setelah memperhitungkan jatuh tempo utang, SPN *cash management* dan rencana *cash buy back* tahun 2017 sebesar Rp112.581,08 miliar7.716,097 maka kebutuhan penerbitan/pengadaan utang bruto tahun 2017 direncanakan sebesar Rp671.148,5694.942,8 miliar. Kebutuhan tersebut akan dipenuhi melalui (a) penerbitan/penarikan utang tunai sebesar Rp665.042,5622.410,8 miliar634.942,520.100,0 dan (b) pembiayaan kegiatan/proyek sebesar Rp39.900,348.737,7 triliun37.400,32.500,0dengan rincian sebagaimana pada Tabel 1. Pembiayaan tunai bersumber dari penerbitan SBN yang

mengutamakan penerbitan melalui lelang dan pengadaan pinjaman program/tunai yang bersumber dari mitra pembangunan (*development partners*) multilateral dan bilateral. Kebutuhan APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN dan Kewajiban Biaya Lain (SUN dan SBSN) serta Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01).

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN-P TA 2017, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN ditetapkan sebesar Rp202.461.040.287.000,- sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN adalah sebesar Rp199.552.003.073.837,-, atau sebesar 98.56%.

B. Surat Berharga Negara Neto

Pengertian Surat Berharga Neto berdasarkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2015 adalah selisih antara jumlah penerbitan dan pembayaran pokok jatuh tempo dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional, baik SBN konvensional maupun SBSN (sukuk).

Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali. Untuk tahun 2017, sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, target SBN neto adalah sebesar Rp467.314.304.000.000,- disebabkan adanya kebijakan pelebaran defisit. Realisasi SBN neto tahun 2017 adalah sebesar Rp441.826.322.911.086,-. Adapun rincian SBN neto disajikan pada tabel 1.

Realisasi SBN neto tahun 2017 memperhitungkan penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka sebesar Rp6.215.004.040,- dengan rincian penerimaan sebesar Rp5.971.286.844.698,- dan pembayaran sebesar Rp5.965.071.840.658,-. Perhitungan ini sebagai konsekuensi dari kode akun penerimaan dan pembayaran bunga utang diterima di muka yang dikelompokkan dalam kelompok akun pembiayaan (kelompok akun 71 dan 72).

Penerbitan SBN tahun 2017 terdiri atas penerbitan SBN domestik maupun valas, baik SUN maupun SBSN. Penerbitan SBN tahun 2017 adalah sebesar Rp726.270.982.344.698,- dengan rincian penerbitan SBN domestik sebesar Rp584.280.503.844.698,- dan penerbitan SBN valas adalah sebesar USD5.000.000.000,- dan EUR1.050.000.000,- serta JPY100.000.000.000 atau setara dengan Rp103.518.141.000.000,-

Atas penerbitan SBN tahun 2017, terdapat penerbitan valas yang diperuntukkan untuk pembiayaan di tahun 2018 (*prefunding*) sebesar USD4.000.000.000,-, sehingga atas penerbitan tersebut tidak dicatat sebagai penerimaan pembiayaan di tahun 2017. Adapun selama tahun 2017 Transaksi *Debt switching* SBN tercatat sebesar Rp1.255.000.000.000,-.

Pelunasan SBN tahun 2017 adalah sebesar Rp284.444.659.433.612,- dengan rincian pelunasan SBN domestik Rp257.198.059.433.612,- dan pelunasan SBN valas Rp27.246.600.000.000,-.

Tabel 1. SBN Neto tahun 2017

PERHITUNGAN SBN NETO (DENGAN <i>ACCRUED INTEREST</i>)			
TAHUN 2017			
NO	AKUN	URAIAN	TOTAL
Penerimaan Pembiayaan			
1	711411	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	192,207,290,000,000
2	711421	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara Dalam Negeri	233,576,660,000,000
3	711422	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	4,307,352,996,000
4	711441	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SBSN - Jangka Panjang	90,917,094,052,727
5	711442	Penerimaan Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	1,663,933,848,698
6	711451	Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN Syariah	44,690,000,000,000
7	711461	Penerimaan SBSN - pembiayaan proyek melalui SBSN PBS	16,918,172,947,273
8	711611	Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara - Valas	102,021,478,500,000
9	711612	Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara - Valas	-
10	711641	Penerimaan Penerbitan SBSN-Valas	39,969,000,000,000
11	711642	Penerimaan Imbalan Dibayar di muka SBSN-Valas	-
Total Penerimaan			726,270,982,344,698
Pengeluaran Pembiayaan			
1	721311	Pengeluaran Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	128,390,000,000,000
2	721321	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri	66,282,433,592,954
3	721322	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Dalam Negeri - Pembelian Kembali	1,255,000,000,000
4	721324	Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri	4,324,143,651,960
5	721341	Pengeluaran pelunasan SBSN-jk Panjang	22,555,554,000,000
6	721343	Pembayaran Imbalan dibayar di muka SBSN - Jangka Panjang	1,640,928,188,698
7	721351	Pengeluaran Pelunasan SPN-S	32,750,000,000,000
8	721511	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Negara Valas	27,246,600,000,000
9	721512	Pengeluaran Pelunasan Obligasi Valas melalui Pembelian Kembali	-
10	721513	Pembayaran utang bunga Obligasi Valas	-
11	721541	Pengeluaran pelunasan SBSN valas Jangka panjang	-
Total Pengeluaran			284,444,659,433,612
SBN Netto			441,826,322,911,086

IV. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2017

Target SBN Netto 2017 adalah sebesar Rp461.343.622.875.000,- disebabkan adanya kebijakan pelebaran defisit. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto yaitu jumlah penerbitan SUN setelah dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo (*buyback*).

A. Penerbitan/Penjualan dan Pelunasan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2017 dilelang sebanyak 23 kali, yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Desember 2017.

Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) *cost of borrowing*.

Penerbitan ON secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan di tahun 2017, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk. Total nilai nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp233.576.660.000.000,- dengan rincian:

- a. ON dengan tingkat bunga tetap (*Fixed Rate*) adalah sebesar Rp224.628.000.000.000,-;
- b. ON ritel yang terdiri dari penerbitan Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI) dengan tingkat bunga tetap (*Fixed Rate*) adalah sebesar Rp8.948.660.000.000,-.

Penjualan ON Ritel yang dilakukan sebanyak 1 kali penerbitan, yaitu seri ORI 014, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan diterbitkan dengan metode *bookbuilding* melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. *Bookbuilding* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*.

Pelunasan Obligasi Negara Rupiah yang jatuh tempo pada tahun 2017 adalah sebesar Rp66.282.433.592.954,- yang terdiri dari:

- a. ON bunga tetap (*Fixed Rate*) sebesar Rp22.490.744.000.000,-;
- b. ON Ritel yang terdiri dari pelunasan ORI sebesar Rp21.215.910.000.000,-; dan
- c. ON bunga variable (*Variable Rate*) sebesar Rp13.118.600.000.000,-.
- d. ON Non Tradable dengan bunga tetap (*Fixed Rate*) sebesar Rp9.337.299.592.954,00
- e. ON Non Tradable dengan bunga variabel (*Variable Rate*) sebesar Rp119.880.000.000,00

B. Penerbitan dan Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada tahun 2017, Pemerintah menerbitkan 33 seri SPN, dengan total penerbitan SPN mencapai Rp192.207.290.000.000,- dengan rincian sebagaimana dalam tabel 2.

Tabel 2. Seri SPN yang diterbitkan tahun 2017

NO	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri SPN	Mata Uang	Nominal
1	1/5/2017	4/4/2017	SPN03170404	IDR	6,100,000,000,000.00
2	1/5/2017	1/4/2018	SPN12180104	IDR	5,300,000,000,000.00
3	1/19/2017	4/18/2017	SPN03170418	IDR	5,000,000,000,000.00
4	1/19/2017	1/4/2018	SPN12180104	IDR	5,000,000,000,000.00
5	2/2/2017	5/1/2017	SPN03170501	IDR	5,550,000,000,000.00
6	2/2/2017	2/1/2018	SPN12180201	IDR	9,450,000,000,000.00
7	2/17/2017	5/15/2017	SPN03170515	IDR	5,000,000,000,000.00
8	2/17/2017	2/1/2018	SPN12180201	IDR	5,000,000,000,000.00
9	3/2/2017	6/1/2017	SPN03170601	IDR	5,000,000,000,000.00
10	3/2/2017	3/1/2018	SPN12180301	IDR	4,050,000,000,000.00
11	3/16/2017	6/15/2017	SPN03170615	IDR	2,700,000,000,000.00
12	3/16/2017	3/1/2018	SPN12180301	IDR	3,000,000,000,000.00
13	3/30/2017	6/29/2017	SPN03170629	IDR	5,450,000,000,000.00
14	3/30/2017	3/1/2018	SPN12180301	IDR	1,800,000,000,000.00
15	4/13/2017	7/12/2017	SPN03170712	IDR	5,000,000,000,000.00
16	4/13/2017	4/12/2018	SPN12180412	IDR	5,000,000,000,000.00
17	4/27/2017	7/26/2017	SPN03170726	IDR	5,000,000,000,000.00
18	4/27/2017	1/4/2018	SPN12180104	IDR	500,000,000,000.00
19	5/12/2017	8/11/2017	SPN03170811	IDR	5,000,000,000,000.00
20	5/12/2017	5/11/2018	SPN12180511	IDR	2,300,000,000,000.00
21	5/26/2017	8/25/2017	SPN03170825	IDR	3,250,000,000,000.00
22	5/26/2017	2/1/2018	SPN12180201	IDR	1,600,000,000,000.00
23	6/8/2017	9/7/2017	SPN03170907	IDR	5,000,000,000,000.00
24	6/8/2017	6/7/2018	SPN12180607	IDR	2,550,000,000,000.00
25	6/22/2017	9/21/2017	SPN03170921	IDR	1,150,000,000,000.00
26	6/22/2017	3/1/2018	SPN12180301	IDR	900,000,000,000.00
27	7/13/2017	10/12/2017	SPN12171012	IDR	3,150,000,000,000.00
28	7/13/2017	7/12/2018	SPN12180712	IDR	3,100,000,000,000.00
29	7/27/2017	10/26/2017	SPN03171026	IDR	5,000,000,000,000.00
30	7/27/2017	4/12/2018	SPN12180412	IDR	3,050,000,000,000.00
31	8/10/2017	11/9/2017	SPN12171109	IDR	5,000,000,000,000.00
32	8/10/2017	8/9/2018	SPN12180809	IDR	5,000,000,000,000.00
33	8/24/2017	11/23/2017	SPN03171123	IDR	5,000,000,000,000.00
34	8/24/2017	5/11/2018	SPN12180511	IDR	3,000,000,000,000.00
35	9/7/2017	12/7/2017	SPN12171207	IDR	5,000,000,000,000.00
36	9/7/2017	9/6/2018	SPN12180906	IDR	3,000,000,000,000.00
37	9/22/2017	12/21/2017	SPN03171221	IDR	5,000,000,000,000.00
38	9/22/2017	6/7/2018	SPN12180607	IDR	3,000,000,000,000.00
39	10/5/2017	1/4/2018	SPN12180104	IDR	5,000,000,000,000.00
40	10/5/2017	10/4/2018	SPN12181004	IDR	3,000,000,000,000.00
41	10/19/2017	1/18/2018	SPN03180118	IDR	3,650,000,000,000.00
42	10/19/2017	10/4/2018	SPN12181004	IDR	3,000,000,000,000.00
43	11/2/2017	2/1/2018	SPN12180201	IDR	4,900,000,000,000.00
44	11/2/2017	8/9/2018	SPN12180809	IDR	3,000,000,000,000.00
45	11/16/2017	2/15/2018	SPN03180215	IDR	2,600,000,000,000.00
46	11/16/2017	11/15/2018	SPN12181115	IDR	3,000,000,000,000.00
47	12/29/2017	3/28/2018	SPNNT20180328	IDR	10,107,290,000,000.00
Total (IDR)					192,207,290,000,000.00

SPN yang merupakan utang jangka pendek diterbitkan tanpa kupon. Pada saat penerbitan akan terdapat diskonto, yaitu selisih nilai penjualan dengan nilai nominal, yang akan diamortisasi sampai dengan jatuh tempo seri SPN tersebut.

Pelunasan SPN selama tahun 2017 adalah sebesar Rp128.390.000.000.000,- dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel 3.

Tabel 3. Daftar Pelunasan SPN Tahun 2017

No.	Seri	Tanggal Valuta	Jumlah (IDR)
1	SPN03170112	1/11/2017	1,000,000,000,000.00
2	SPN03170209	2/8/2017	2,000,000,000,000.00
3	SPN03170307	3/6/2017	2,000,000,000,000.00
4	SPN03170404	4/3/2017	6,100,000,000,000.00
5	SPN03170418	4/17/2017	5,000,000,000,000.00
6	SPN03170501	4/28/2017	5,550,000,000,000.00
7	SPN03170515	5/12/2017	5,000,000,000,000.00
8	SPN03170601	5/31/2017	5,000,000,000,000.00
9	SPN03170615	6/14/2017	2,700,000,000,000.00
10	SPN03170629	6/22/2017	5,450,000,000,000.00
11	SPN03170712	7/11/2017	5,000,000,000,000.00
12	SPN03170726	7/25/2017	5,000,000,000,000.00
13	SPN03170811	8/10/2017	5,000,000,000,000.00
14	SPN03170825	8/24/2017	3,250,000,000,000.00
15	SPN03170907	9/6/2017	5,000,000,000,000.00
16	SPN03170921	9/20/2017	1,150,000,000,000.00
17	SPN03171026	10/25/2017	5,000,000,000,000.00
18	SPN03171123	11/22/2017	5,000,000,000,000.00
19	SPN03171221	12/20/2017	5,000,000,000,000.00
20	SPN12170106	1/5/2017	7,000,000,000,000.00
21	SPN12170203	2/2/2017	4,890,000,000,000.00
22	SPN12170302	3/1/2017	6,350,000,000,000.00
23	SPN12170413	4/12/2017	2,000,000,000,000.00
24	SPN12170511	5/10/2017	3,600,000,000,000.00
25	SPN12170608	6/7/2017	2,600,000,000,000.00
26	SPN12170720	7/19/2017	2,000,000,000,000.00
27	SPN12170804	8/3/2017	3,150,000,000,000.00
28	SPN12170914	9/13/2017	1,500,000,000,000.00
29	SPN12171012	10/11/2017	4,050,000,000,000.00
30	SPN12171109	11/8/2017	6,250,000,000,000.00
31	SPN12171207	12/6/2017	5,800,000,000,000.00
Total			128,390,000,000,000.00

C. Penerbitan dan Pelunasan SUN dalam Valuta Asing

Total penerbitan SUN Valas adalah sebesar USD5.500.000.000,- dan EUR1.050.000.000,- serta JPY100.000.000.000,- atau setara dengan Rp103.518.141.000.000,- yang terdiri atas *International Bonds* sebesar USD5.500.000.000,- dan EUR1.050.000.000,- serta JPY100.000.000.000,-.

Data penerbitan SUN dalam valuta asing pada tahun 2017, disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Realisasi Penerbitan SUN Valas 1 Januari s.d. 31 Desember 2017

No	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Seri	Mata Uang	Nominal
1	12/8/2016	1/8/2022	RI0122	USD	750,000,000.00
2	12/8/2016	1/8/2027	RI0127	USD	1,250,000,000.00
3	12/8/2016	1/8/2047	RI0147	USD	1,500,000,000.00
4	4/26/2017	4/26/2020	EURFRNT0001	EUR	50,000,000.00
5	6/8/2017	6/8/2020	RIJPY0620	JPY	40,000,000,000.00
6	6/8/2017	6/8/2022	RIJPY0622	JPY	50,000,000,000.00
7	6/8/2017	6/7/2024	RIJPY0624	JPY	10,000,000,000.00
8	7/18/2017	7/18/2027	RI0727	USD	1,000,000,000.00
9	7/18/2017	7/18/2047	RI0747	USD	1,000,000,000.00
10	7/18/2017	7/18/2024	RIEUR0724	EUR	1,000,000,000.00

Catatan: Seri RI0122, RI0127 dan RI0147 diterbitkan dalam rangka *prefunding* pembiayaan TA.2017

D. Pelaksanaan *Debt Switching/Buyback*

Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui *debt switching*, yaitu dengan membeli seri-seri ON jangka pendek dan menengah serta menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara.

Total pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2017 adalah sebanyak 2 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp1.255.000.000.000,- sebagaimana disajikan dalam tabel 5.

Tabel 5. Realisasi pelaksanaan *Debtswitching* tahun 2017

No.	Tanggal <i>Debtswitch</i>	Penawaran	Dimenangkan
1	23-Mar-17	1.973.000.000.000	1.253.000.000.000
2	28-Sep-17	2.000.000.000	2.000.000.000
TOTAL 2017		1.975.000.000.000	1.255.000.000.000

Rincian pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2017 disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 6. Rincian realisasi pelaksanaan *Debtswitching* tahun 2017 (dalam juta rupiah)

Date		Source					Destination			
Debt Switch	Settlement	Series	Maturity	Coupon	Offer	Alloted	Series	Maturity	Coupon	Alloted
23-Mar-17	29-Mar-17	FR0066	15-05-2018	5.25000%	780,000	665,000	FR0061	15-05-2022	7.00000%	1,253,000
		FR0032	15-07-2018	15.00000%	50,000	30,000				
		FR0038	15-08-2018	11.60000%	20,000	20,000				
		FR0048	15-09-2018	9.00000%	43,000	13,000				
		FR0036	15-09-2019	11.50000%	358,000	238,000				
		FR0031	15-11-2020	11.00000%	423,000	98,000				
		FR0034	15-06-2021	12.80000%	299,000	189,000				
					1,973,000	1,253,000				1,253,000
28-Sep-17	3-Oct-17	FR0045	15-05-2037	9.75000%	2,000	2,000	FR0074	15-08-2032	7.50000%	1,140
							FR0075	15-05-2038	7.50000%	860
					2,000	2,000				2,000
Total Debt Switch 2017					1,975,000	1,255,000				1,255,000

Di samping *debtswitching*, Pemerintah juga melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian ON yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. ON yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN.

Pada tahun 2017 telah dilakukan transaksi langsung (*direct payment*) *cash buyback* SUN melalui *dealing room* DJPPR sebanyak 1 kali dengan jumlah yang telah dibeli pemerintah sebanyak Rp181.089.000.000,-. Rincian pelaksanaan *buyback* disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Transaksi *Buyback* tahun 2017

No.	Date	Series	Jatuh Tempo	Volume	Nominal
1	20-Jun-17	SBR002	20-May-18	405	119,880,000,000.00
2	7-Sep-17	ST001	7-Sep-18	358	61,209,000,000.00
Total				763	181,089,000,000.00

V. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2017

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri. Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya *aqad* atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menjadi landasan legal pengelolaan SBSN. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
- Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit.
- Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).

- d. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
- e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
- f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri.

SBSN berbasis proyek selain sebagai instrumen pembiayaan APBN juga sekaligus berfungsi mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Manfaat dari penerbitan SBSN berbasis proyek antara lain adalah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, mendukung pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri serta meningkatkan transparansi pelaksanaan kegiatan oleh K/L karena perkembangan pelaksanaan proyek akan dipantau oleh investor dan publik. Penerbitan SBSN seri PBS tersebut dilakukan dengan mekanisme sistem lelang yang ada di Bank Indonesia.

Total jumlah penerbitan SBSN yang telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp.192.494.267.000.000,- yang terdiri dari 5 jenis instrumen yakni SR, PBS, SPN-S, SDHI dan SNI, dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel 8.

Tabel 8. Daftar Penerbitan SBSN tahun 2017 (dalam juta Rupiah)

	Target APBN	Target APBN-P	Realisasi s.d.	% Realisasi

	2017	2017	29 Desember 2017	Terhadap APBN-P 2017
SBSN	197,250,000	192,478,470	192,494,267	100.01
SBSN Domestik	157,281,000	152,509,470	152,525,267	100.01
- PBS	93,243,690	91,782,160	91,797,957	100.02
- SPN-S	48,000,000	44,690,000	44,690,000	100.00
- SR	14,037,310	14,037,310	14,037,310	100.00
- SDHI	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00
SBSN Valas	39,969,000	39,969,000	39,969,000	100.00

VI. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2017

I. Surat Berharga Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Berharga Negara berdenominasi Rupiah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds* - FR)

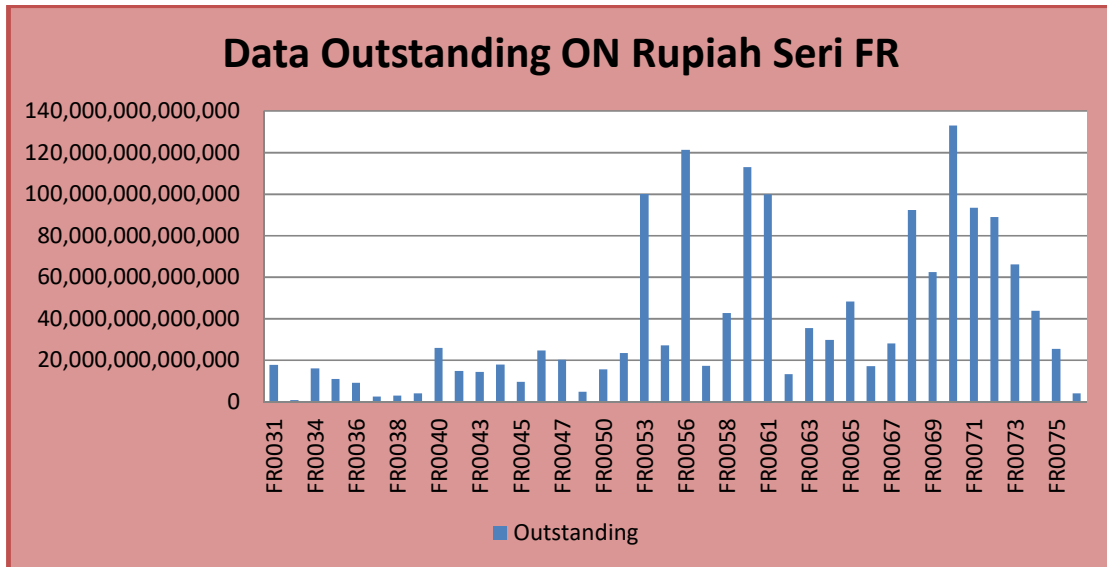
Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Berdasarkan posisi akhir tahun 2017, terdapat 40 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 5,25% sampai dengan 15% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2048. Adapun data *outstanding* ON seri *Fixed Rate* pada 31 Desember 2017 disajikan dalam tabel 9 berikut.

Tabel 9. Outstanding SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2017

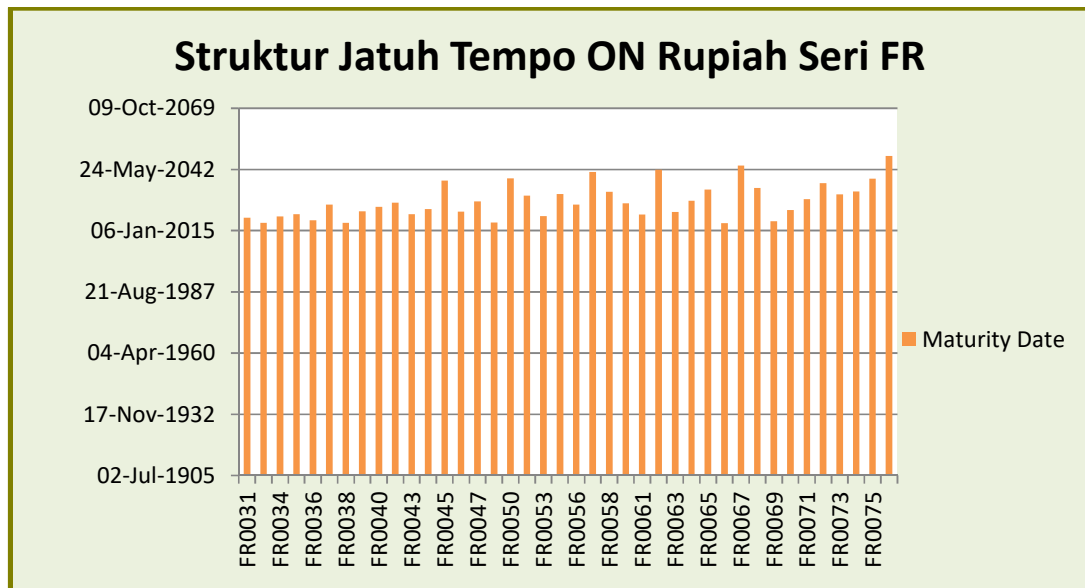
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	FR0031	16-Jun-2005	15-Nov-2020	11.00000%	IDR	17,792,000,000,000
2	FR0032	01-Sep-2005	15-Jul-2018	15.00000%	IDR	888,492,000,000
3	FR0034	26-Jan-2006	15-Jun-2021	12.80000%	IDR	16,097,400,000,000
4	FR0035	16-Feb-2006	15-Jun-2022	12.90000%	IDR	11,023,750,000,000
5	FR0036	20-Apr-2006	15-Sep-2019	11.50000%	IDR	9,184,500,000,000
6	FR0037	18-May-2006	15-Sep-2026	12.00000%	IDR	2,450,000,000,000
7	FR0038	24-Aug-2006	15-Aug-2018	11.60000%	IDR	3,066,162,000,000
8	FR0039	24-Aug-2006	15-Aug-2023	11.75000%	IDR	4,175,000,000,000
9	FR0040	21-Sep-2006	15-Sep-2025	11.00000%	IDR	26,002,090,000,000
10	FR0042	25-Jan-2007	15-Jul-2027	10.25000%	IDR	14,774,100,000,000
11	FR0043	22-Feb-2007	15-Jul-2022	10.25000%	IDR	14,417,000,000,000
12	FR0044	19-Apr-2007	15-Sep-2024	10.00000%	IDR	18,014,000,000,000
13	FR0045	24-May-2007	15-May-2037	9.75000%	IDR	9,624,304,000,000
14	FR0046	19-Jul-2007	15-Jul-2023	9.50000%	IDR	24,680,000,000,000
15	FR0047	30-Aug-2007	15-Feb-2028	10.00000%	IDR	20,385,000,000,000
16	FR0048	27-Sep-2007	15-Sep-2018	9.00000%	IDR	4,761,270,000,000
17	FR0050	24-Jan-2008	15-Jul-2038	10.50000%	IDR	15,661,000,000,000
18	FR0052	20-Aug-2009	15-Aug-2030	10.50000%	IDR	23,500,000,000,000
19	FR0053	08-Jul-2010	15-Jul-2021	8.25000%	IDR	100,027,793,000,000
20	FR0054	22-Jul-2010	15-Jul-2031	9.50000%	IDR	27,096,000,000,000
21	FR0056	23-Sep-2010	15-Sep-2026	8.37500%	IDR	121,414,000,000,000
22	FR0057	21-Apr-2011	15-May-2041	9.50000%	IDR	17,236,573,000,000
23	FR0058	21-Jul-2011	15-Jun-2032	8.25000%	IDR	42,798,000,000,000
24	FR0059	15-Sep-2011	15-May-2027	7.00000%	IDR	112,980,000,000,000
25	FR0061	06-Oct-2011	15-May-2022	7.00000%	IDR	99,878,000,000,000
26	FR0062	09-Feb-2012	15-Apr-2042	6.37500%	IDR	13,392,000,000,000
27	FR0063	13-Aug-2012	15-May-2023	5.62500%	IDR	35,516,000,000,000
28	FR0064	13-Aug-2012	15-May-2028	6.12500%	IDR	29,895,000,000,000
29	FR0065	30-Aug-2012	15-May-2033	6.62500%	IDR	48,243,000,000,000
30	FR0066	25-Oct-2012	15-May-2018	5.25000%	IDR	17,146,000,000,000
31	FR0067	18-Jul-2013	15-Feb-2044	8.75000%	IDR	28,188,284,000,000
32	FR0068	01-Aug-2013	15-Mar-2034	8.37500%	IDR	92,400,000,000,000
33	FR0069	29-Aug-2013	15-Apr-2019	7.87500%	IDR	62,396,000,000,000
34	FR0070	29-Aug-2013	15-Mar-2024	8.37500%	IDR	132,939,421,000,000
35	FR0071	12-Sep-2013	15-Mar-2029	9.00000%	IDR	93,390,682,000,000
36	FR0072	09-Jul-2015	15-May-2036	8.25000%	IDR	88,910,000,000,000
37	FR0073	06-Aug-2015	15-May-2031	8.75000%	IDR	66,217,000,000,000
38	FR0074	10-Nov-2016	15-Aug-2032	7.50000%	IDR	43,781,140,000,000
39	FR0075	10-Aug-2017	15-May-2038	7.50000%	IDR	25,600,860,000,000
40	FR0076	22-Sep-2017	15-May-2048	7.37500%	IDR	4,050,000,000,000
Jumlah					IDR	1,539,991,821,000,000

Grafik 1. Data *Outstanding* ON Rupiah seri FR tgl 31 Desember 2017



Adapun struktur jatuh tempo ON Rupiah seri FR disajikan dalam grafik 2.

Grafik 2. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah seri FR



b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan

pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2010 - 2017 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 113/KMK.08/2014. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor.

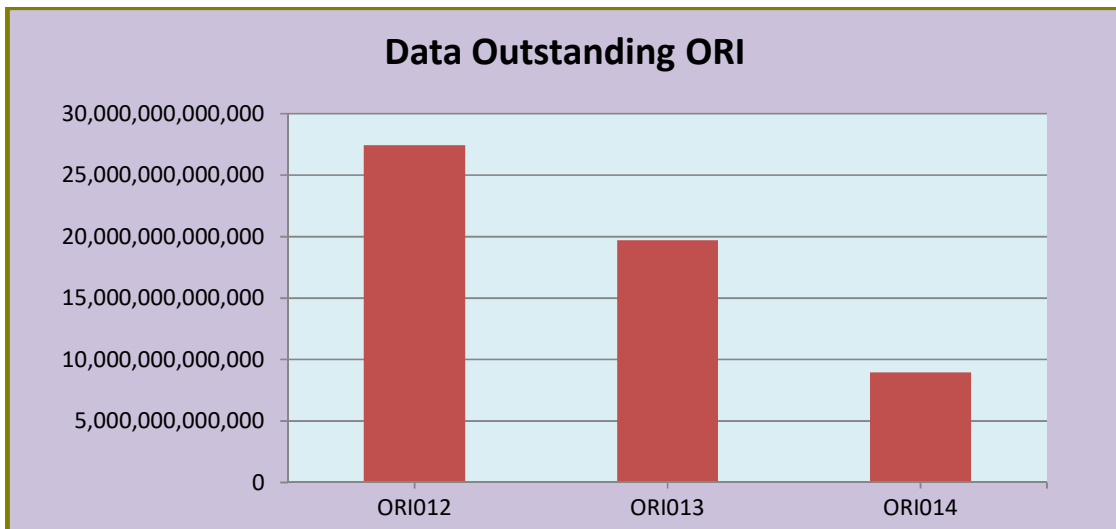
Selain itu, penerbitan ORI juga dimaksudkan dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang merupakan instrumen pasar uang. Kehadiran ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

Tahun 2017 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORI014 dengan tingkat kupon 5.58% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp8.948.660.000.000.- sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2017 menunjukkan ada 3 (tiga) seri ORI dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Rincian *outstanding* ORI disajikan dalam tabel 10 berikut.

Tabel 10. Data *Outstanding* ORI per 31 Desember 2017

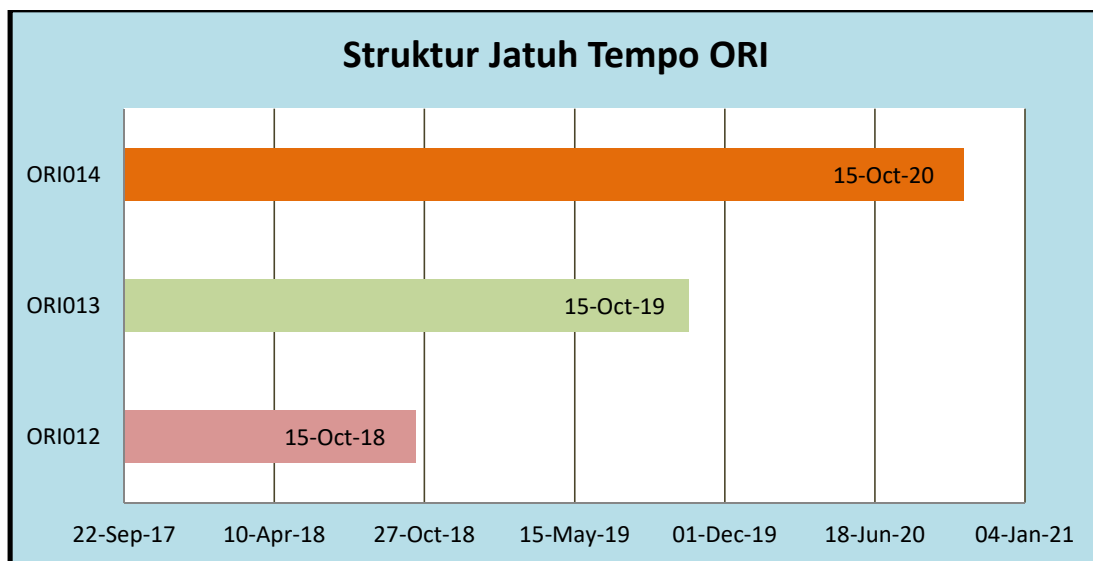
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	ORI012	21-Oct-2015	15-Oct-2018	9.00000%	IDR	27,438,755,000,000
2	ORI013	26-Oct-2016	15-Oct-2019	6.60000%	IDR	19,691,455,000,000
3	ORI014	25-Oct-2017	15-Oct-2020	5.85000%	IDR	8,948,660,000,000
Jumlah					IDR	56,078,870,000,000

Grafik 3. Struktur *Outstanding ORI* per 31 Desember 2017



Adapun struktur jatuh tempo ORI disajikan dalam grafik 4 berikut.

Grafik 4. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2017



c. Obligasi tanpa bunga (*zero coupon* - ZC)

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Pada tahun 2013 telah dilakukan pelunasan ZC seri ZC0005 sehingga pada akhir tahun 2013, sudah tidak terdapat lagi *outstanding* obligasi ZC.

d. Obligasi berbunga mengambang (*Variable Rate Bonds* - VR)

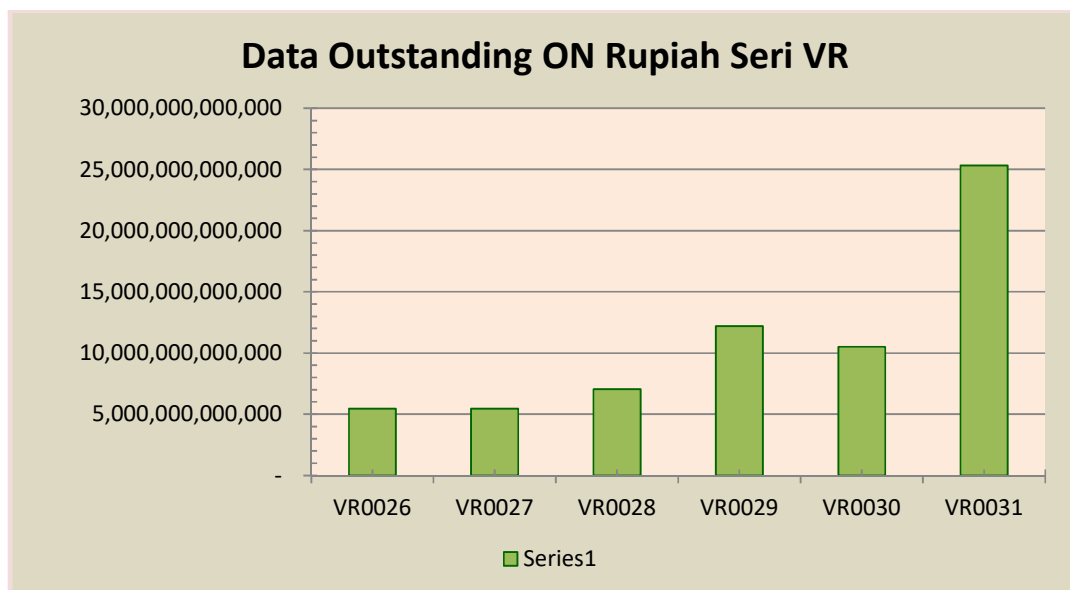
Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Sampai akhir tahun 2017, terdapat 6 seri VR dengan *outstanding* berkisar dari 5,4 triliun sampai dengan 25,3 triliun dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2018 sampai dengan 2020

Tabel 11. Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2017

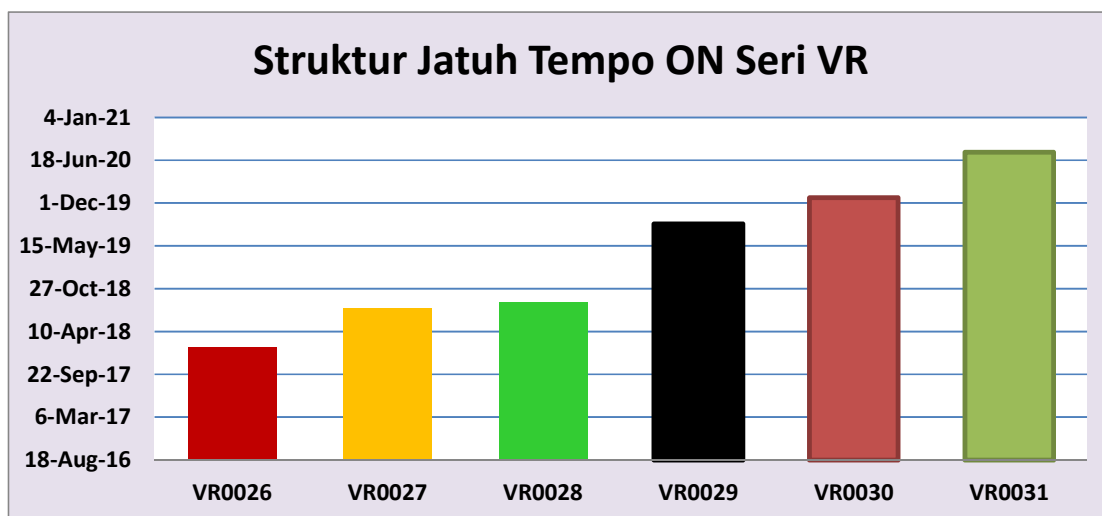
No	Series	First Issue Date	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	VR0026	20-Nov-2002	25-Jan-2018	4.74000%	IDR	5,442,142,000,000
2	VR0027	20-Nov-2002	25-Jul-2018	4.74000%	IDR	5,442,142,000,000
3	VR0028	20-Nov-2002	25-Aug-2018	4.82700%	IDR	7,033,994,000,000
4	VR0029	20-Nov-2002	25-Aug-2019	4.82700%	IDR	12,212,320,000,000
5	VR0030	20-Nov-2002	25-Dec-2019	4.90700%	IDR	10,503,015,000,000
6	VR0031	20-Nov-2002	25-Jul-2020	4.74000%	IDR	25,322,354,000,000
Jumlah					IDR	65,955,967,000,000

Grafik 5. Struktur *Outstanding VR* per 31 Desember 2017



Adapun struktur jatuh tempo ON seri VR disajikan dalam Grafik 6 berikut.

Grafik 6. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2017



e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

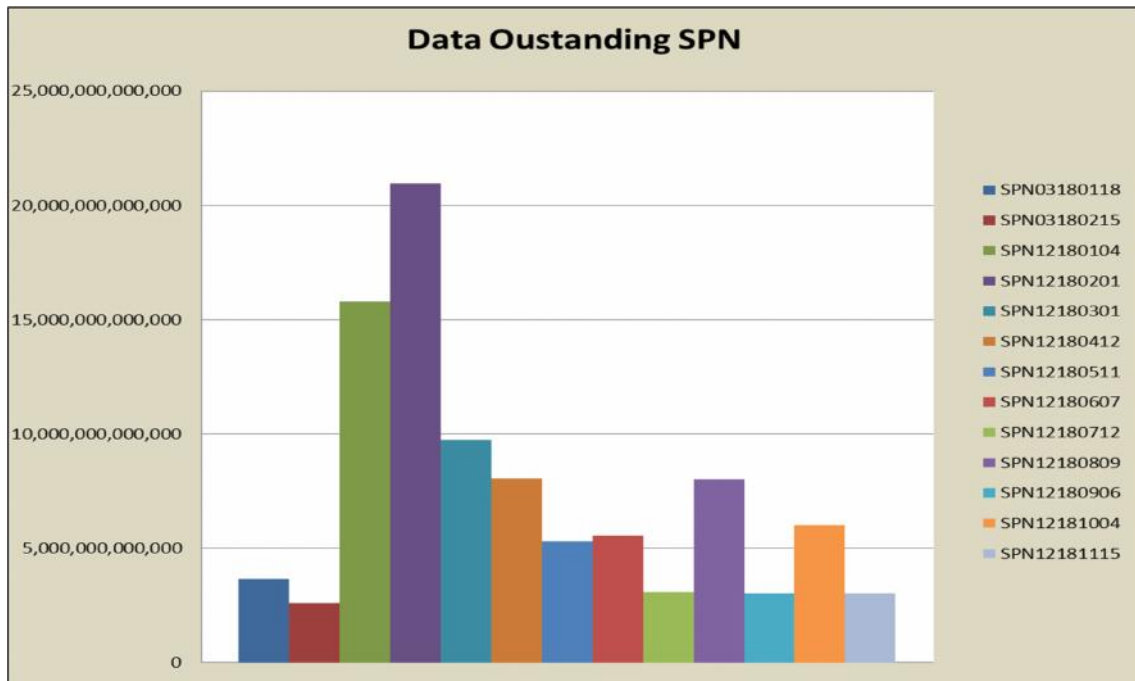
SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya

di pasar sekunder. Sampai akhir tahun 2017, terdapat 14 seri SPN yang beredar dengan *outstanding* berkisar 650 miliar dan 8,75 triliun yang akan jatuh tempo pada tahun 2017.

Tabel 12. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2017

No	Series	Maturity Date	Outstanding	
1	SPN03180118	18-Jan-2018	IDR	3,650,000,000,000
2	SPN03180215	15-Feb-2018	IDR	2,600,000,000,000
3	SPN12180104	04-Jan-2018	IDR	15,800,000,000,000
4	SPN12180201	01-Feb-2018	IDR	20,950,000,000,000
5	SPN12180301	01-Mar-2018	IDR	9,750,000,000,000
6	SPN12180412	12-Apr-2018	IDR	8,050,000,000,000
7	SPN12180511	11-May-2018	IDR	5,300,000,000,000
8	SPN12180607	07-Jun-2018	IDR	5,550,000,000,000
9	SPN12180712	12-Jul-2018	IDR	3,100,000,000,000
10	SPN12180809	09-Aug-2018	IDR	8,000,000,000,000
11	SPN12180906	06-Sep-2018	IDR	3,000,000,000,000
12	SPN12181004	04-Oct-2018	IDR	6,000,000,000,000
13	SPN12181115	15-Nov-2018	IDR	3,000,000,000,000
Jumlah			IDR	94,750,000,000,000

Grafik 7. Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2017



Adapun struktur jatuh tempo ON seri SPN disajikan dalam Grafik 8 berikut.

Grafik 8. Struktur Jatuh Tempo SPN per 31 Desember 2017



f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

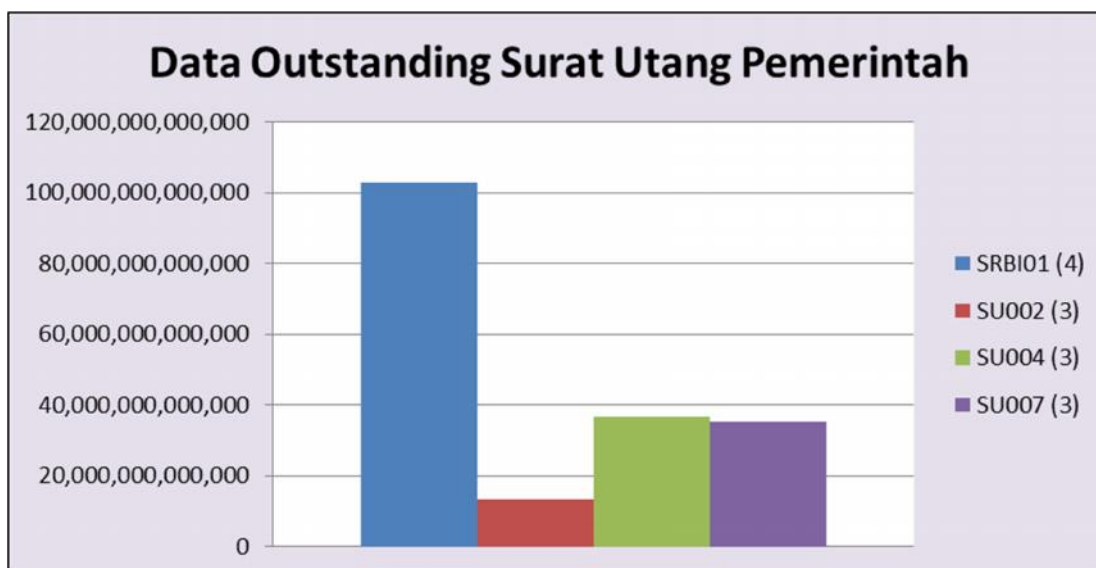
Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari empat seri yaitu SU002, SU004, SU007 dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan

pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga. Data *outstanding* SUP disajikan pada tabel 13 berikut.

Tabel 13. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2017

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SRBI01 (4)	01-Aug-2043	0.10000%	IDR	102,763,824,519,929
2	SU002 (3)	01-Apr-2025	0.10000%	IDR	13,313,389,573,979
3	SU004 (3)	01-Dec-2025	0.10000%	IDR	36,882,981,300,739
4	SU007 (3)	01-Aug-2025	0.10000%	IDR	35,249,414,553,846
Jumlah				IDR	188,209,609,948,493

Grafik 9. Struktur *Outstanding* Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2017



Adapun struktur jatuh tempo Surat Utang Pemerintah disajikan dalam Grafik 10 berikut.

Grafik 10. Struktur Jatuh Tempo Surat Utang Pemerintah
per 31 Desember 2017



g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kupon Tetap (IFR)

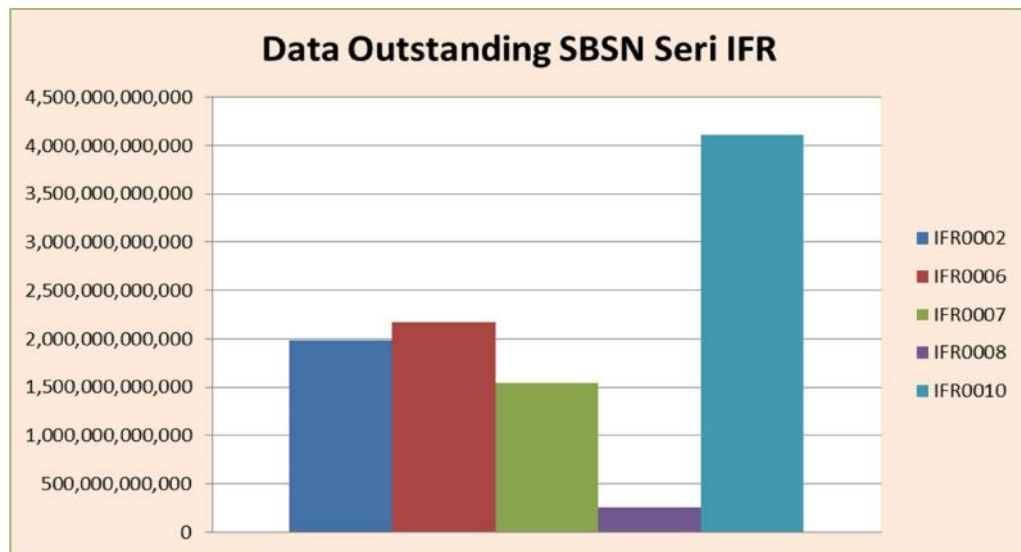
Obligasi jenis ini adalah obligasi berbasis Syariah yang memiliki tingkat imbalan yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbalan/rate seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). SBSN jenis IFR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Pada akhir tahun 2017 terdapat 5 seri SBSN jenis IFR yang masih beredar dengan masa jatuh tempo antara tahun 2018 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8.80% sampai dengan 11.95% yang disajikan dalam tabel 14 berikut.

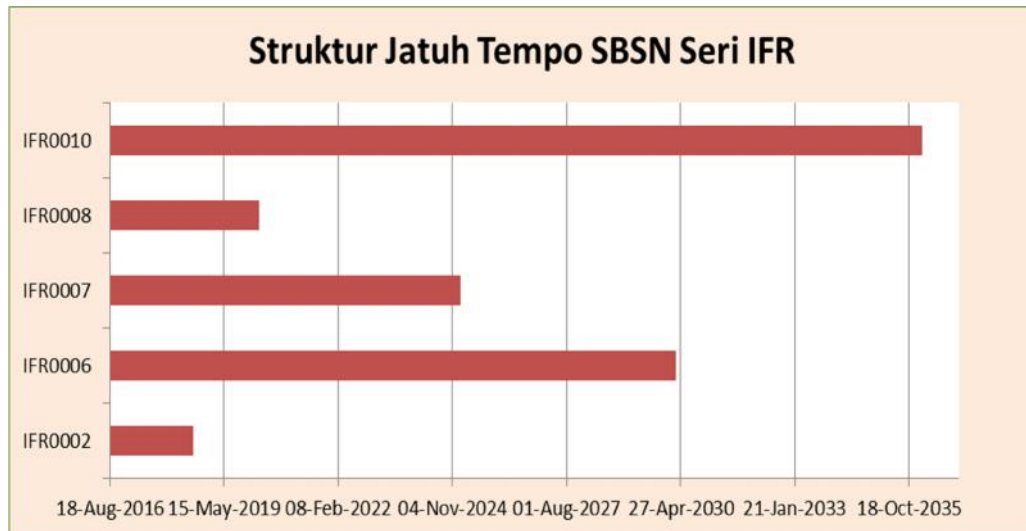
Tabel 14. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2017

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	IFR0002	15-Aug-2018	11.95000%	IDR	1,985,000,000,000
2	IFR0006	15-Mar-2030	10.25000%	IDR	2,175,000,000,000
3	IFR0007	15-Jan-2025	10.25000%	IDR	1,547,000,000,000
4	IFR0008	15-Mar-2020	8.80000%	IDR	252,000,000,000
5	IFR0010	15-Feb-2036	10.00000%	IDR	4,110,000,000,000
Jumlah				IDR	10,069,000,000,000

Grafik 11. Struktur *Outstanding* SBSN seri IFR per 31 Desember 2017



Grafik 12. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri IFR per 31 Desember 2017



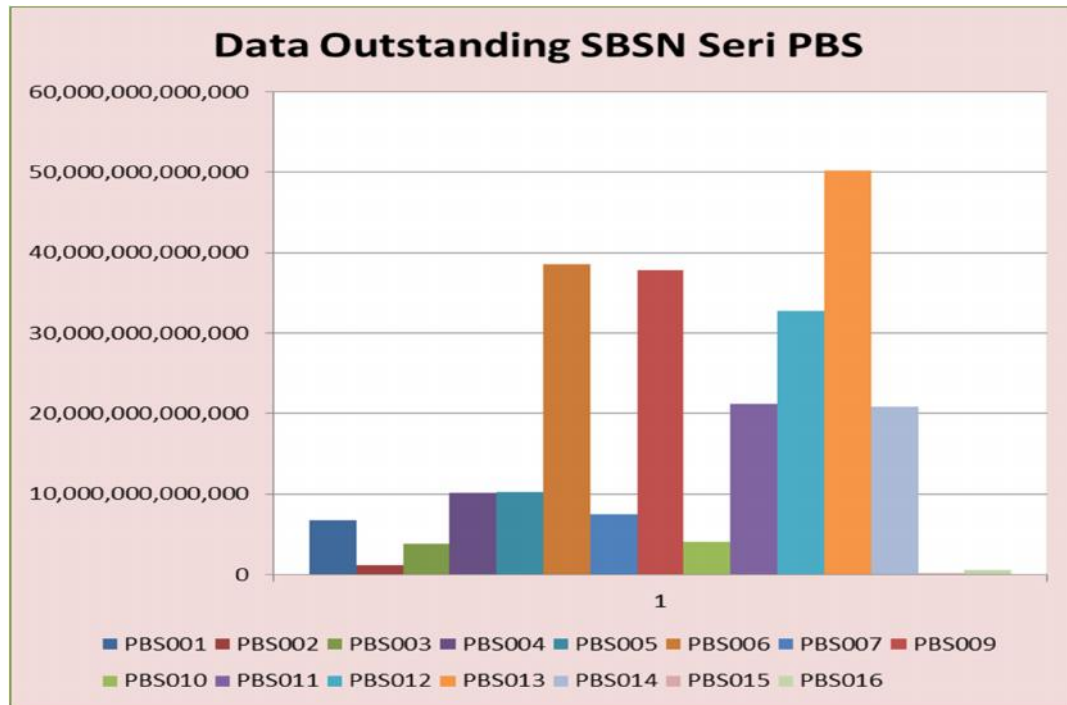
h. *Project Based Sukuk (PBS)*

Project Based Sukuk merupakan SBSN yang menggunakan proyek-proyek yang dibiayai APBN sebagai *underlying asset*. Pada akhir tahun 2017 terdapat 15 seri PBS yang beredar sebagaimana disajikan dalam tabel 15 berikut.

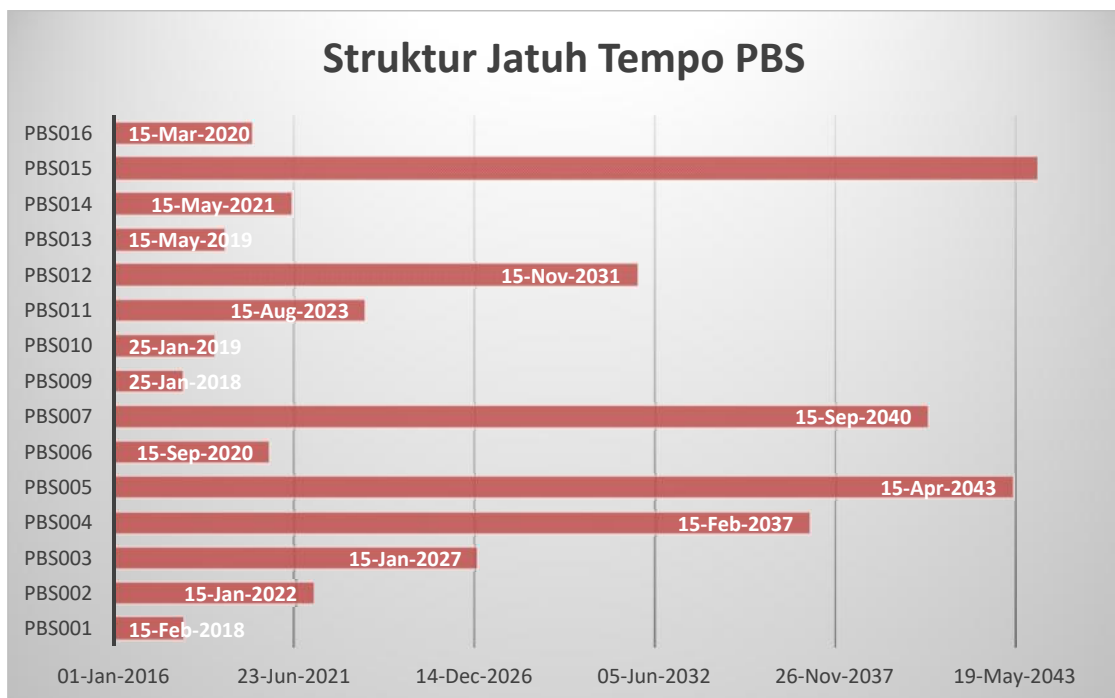
Tabel 15. Struktur *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2017

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	PBS001	15-Feb-2018	4.45000%	IDR	6,725,000,000,000
2	PBS002	15-Jan-2022	5.45000%	IDR	1,218,000,000,000
3	PBS003	15-Jan-2027	6.00000%	IDR	3,786,000,000,000
4	PBS004	15-Feb-2037	6.10000%	IDR	10,149,000,000,000
5	PBS005	15-Apr-2043	6.75000%	IDR	10,234,000,000,000
6	PBS006	15-Sep-2020	8.25000%	IDR	38,508,000,000,000
7	PBS007	15-Sep-2040	9.00000%	IDR	7,525,000,000,000
8	PBS009	25-Jan-2018	7.75000%	IDR	37,890,000,000,000
9	PBS010	25-Jan-2019	8.62500%	IDR	4,050,000,000,000
10	PBS011	15-Aug-2023	8.75000%	IDR	21,250,000,000,000
11	PBS012	15-Nov-2031	8.87500%	IDR	32,700,100,000,000
12	PBS013	15-May-2019	6.25000%	IDR	50,175,000,000,000
13	PBS014	15-May-2021	6.50000%	IDR	20,817,857,000,000
14	PBS015	15-Jul-2047	8.00000%	IDR	250,000,000,000
15	PBS016	15-Mar-2020	6.25000%	IDR	500,000,000,000
				IDR	245,777,957,000,000

Grafik 13. Struktur *Outstanding* SBSN seri PBS per 31 Desember 2017



Grafik 14. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri PBS per 31 Desember 2017



i. Sukuk Ritel (SR)

Sukuk Ritel (SR) adalah Sukuk Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SR memiliki tingkat imbal hasil yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbal hasil SR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). SR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

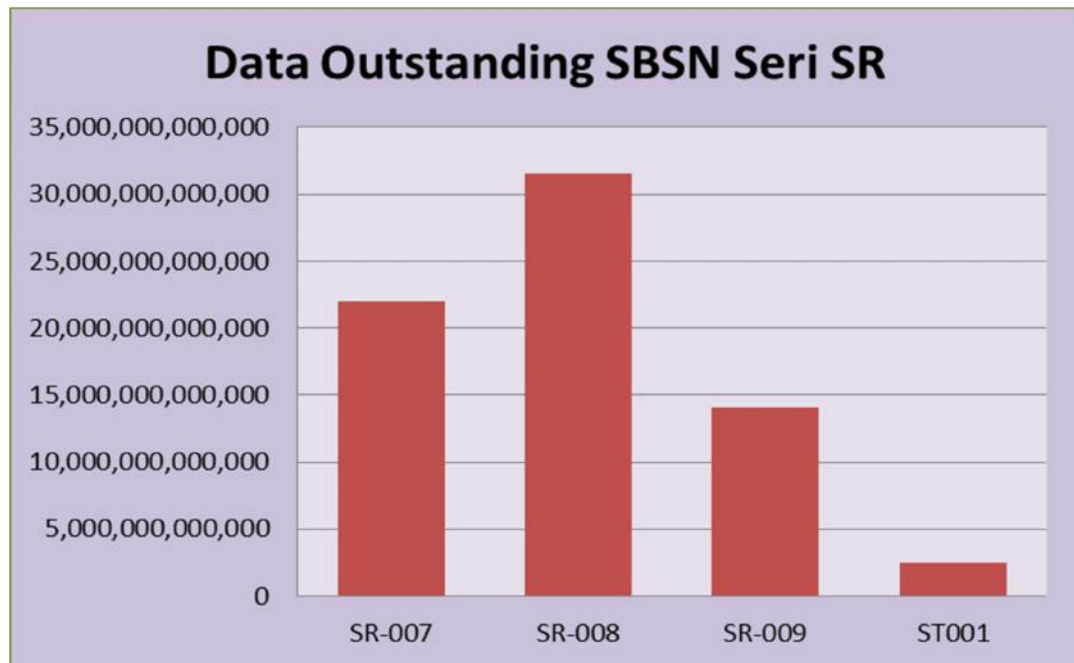
Penerbitan SR dimaksudkan untuk memperluas pembiayaan sumber APBN, diversifikasi investor dan instrumen, memberikan alternatif instrumen ritel berbasis syariah, dan memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang aman dan menguntungkan. Selain itu, keberadaan SR dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

Tahun 2017, pemerintah menerbitkan 1 (satu) seri SR yaitu SR009 dengan tingkat imbal hasil 6.90%. Instrumen tersebut mampu menghimpun dana investor sebesar Rp14.037.310.000.000,- sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2017 menunjukkan ada 4 seri SR dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 yang disajikan pada tabel 16.

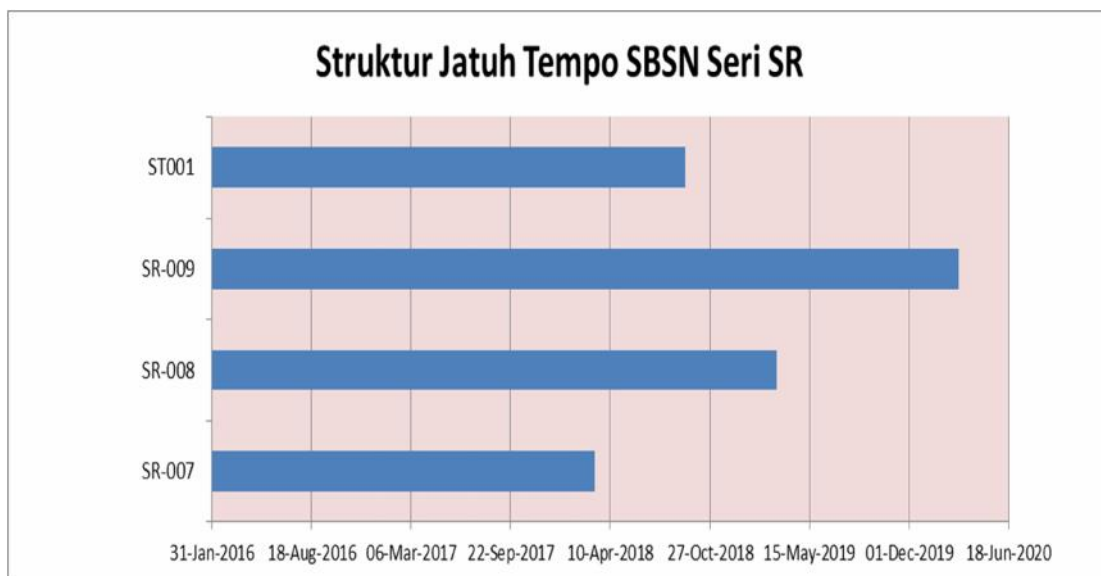
Tabel 16. Struktur Outstanding SBSN seri SR per 31 Desember 2017

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SR-007	11-Mar-2018	8.25000%	IDR	21,965,035,000,000
2	SR-008	10-Mar-2019	8.30000%	IDR	31,500,000,000,000
3	SR-009	10-Mar-2020	6.90000%	IDR	14,037,310,000,000
4	ST001	07-Sep-2018	6.90000%	IDR	2,523,913,000,000
Jumlah				IDR	70,026,258,000,000

Grafik 15. Struktur *Outstanding* SBSN seri SR per 31 Desember 2017



Grafik 16. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SR per 31 Desember 2017



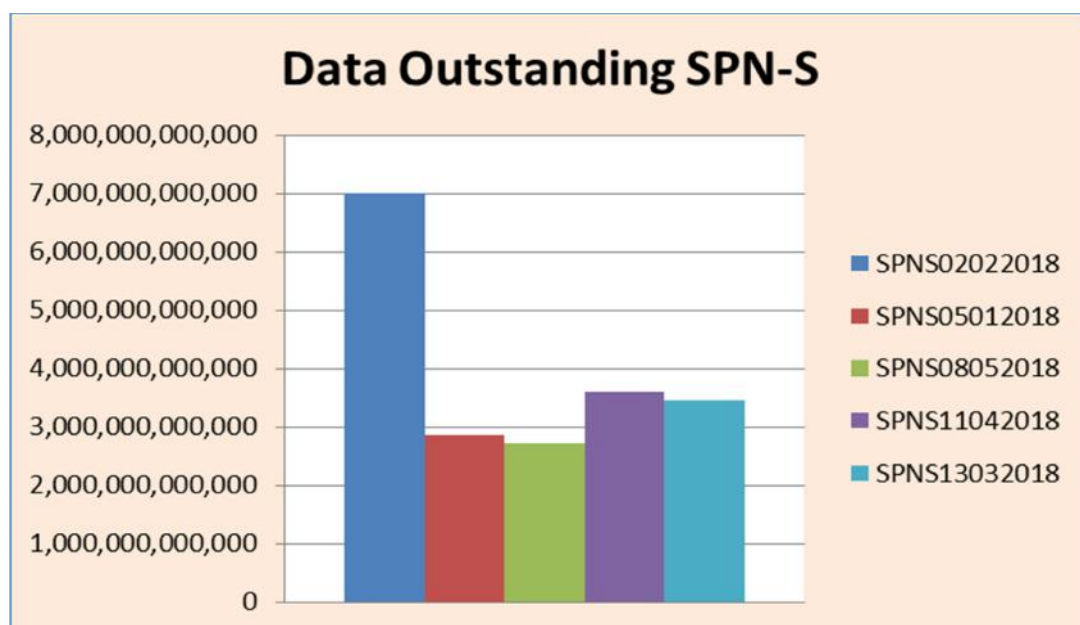
j. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)

SPN-S merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto. SPN-S dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Sampai akhir tahun 2017, terdapat 5 seri SPN-S yang beredar dengan total *outstanding* sebesar Rp19.640.000.000.000,- yang akan jatuh tempo pada tahun 2017.

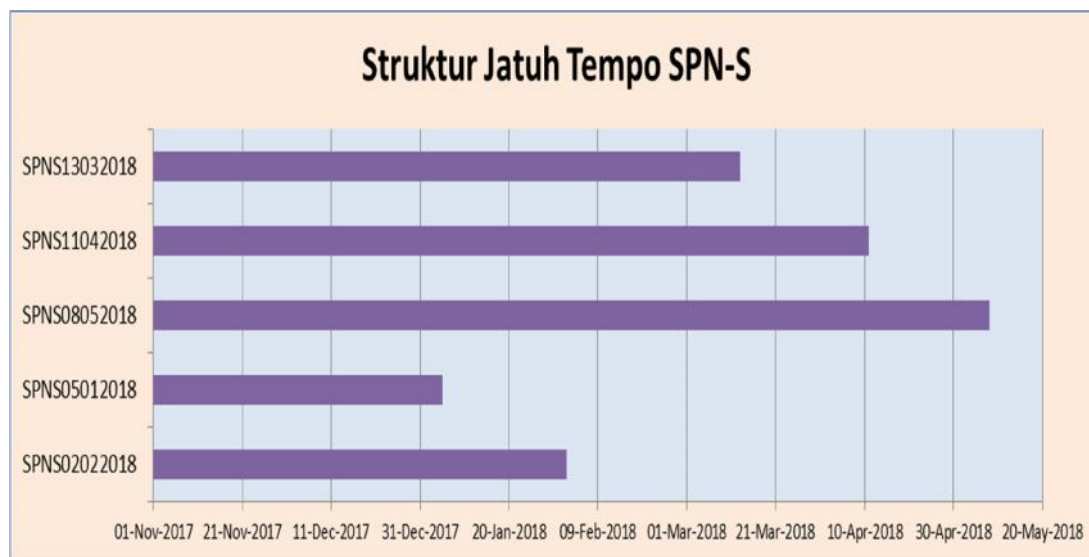
Tabel 17. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2017

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding
1	SPNS02022018	02-Feb-2018	-	IDR 7,000,000,000,000
2	SPNS05012018	05-Jan-2018	-	IDR 2,870,000,000,000
3	SPNS08052018	08-May-2018	-	IDR 2,720,000,000,000
4	SPNS11042018	11-Apr-2018	-	IDR 3,600,000,000,000
5	SPNS13032018	13-Mar-2018	-	IDR 3,450,000,000,000
Jumlah				IDR 19,640,000,000,000

Grafik 17. Struktur *Outstanding* SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2017



Grafik 18. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SPN-S per 31 Desember 2017



k. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)

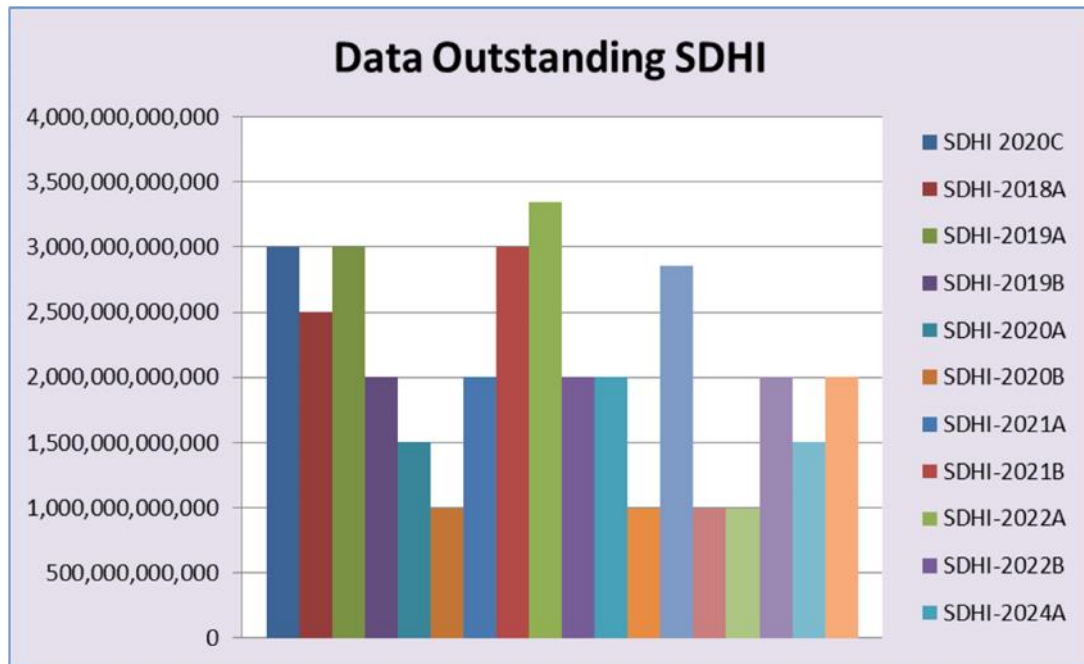
SDHI merupakan instrumen pembiayaan syariah melalui penempatan dana haji pada SBSN itu dengan metode *private placement*, yang merupakan penerbitan surat berharga tanpa melalui penawaran perdana dan tidak dapat diperjualbelikan.

Pada akhir tahun 2017, terdapat 18 seri SDHI dengan nilai *outstanding* Rp36.697.000.000.000,-.

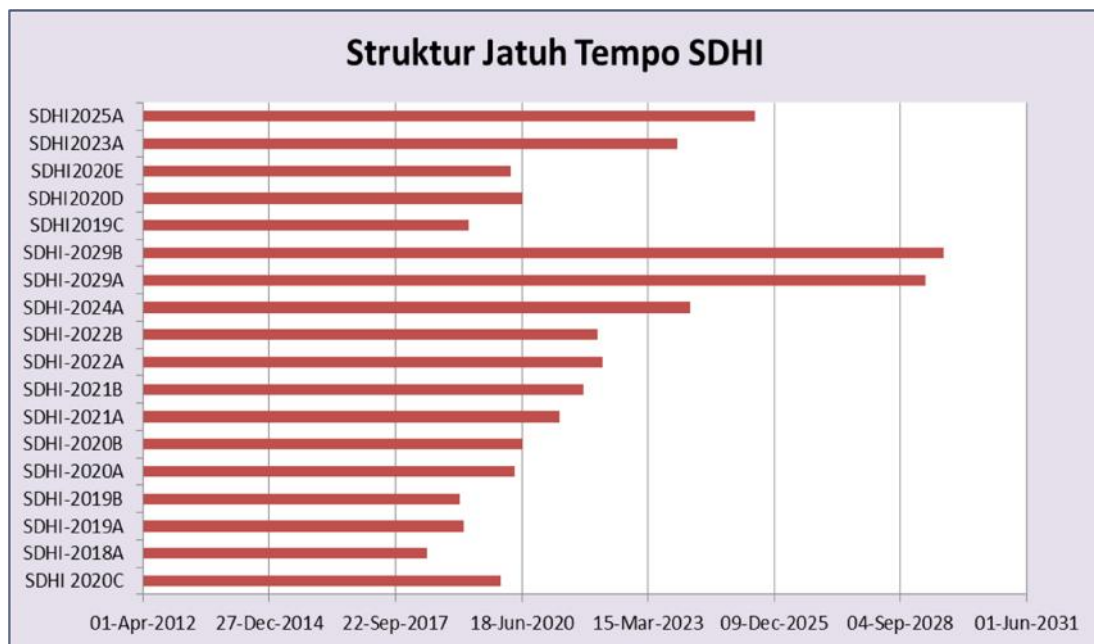
Tabel 18. Struktur *Outstanding* SBSN seri SDHI per 31 Desember 2017

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
1	SDHI 2020C	03-Jan-2020	8.30000%	IDR	3,000,000,000,000
2	SDHI-2018A	30-May-2018	6.06000%	IDR	2,500,000,000,000
3	SDHI-2019A	21-Mar-2019	5.46000%	IDR	3,000,000,000,000
4	SDHI-2019B	11-Feb-2019	8.05000%	IDR	2,000,000,000,000
5	SDHI-2020A	27-Apr-2020	5.79000%	IDR	1,500,000,000,000
6	SDHI-2020B	28-Jun-2020	6.20000%	IDR	1,000,000,000,000
7	SDHI-2021A	11-Apr-2021	8.00000%	IDR	2,000,000,000,000
8	SDHI-2021B	17-Oct-2021	7.16000%	IDR	3,000,000,000,000
9	SDHI-2022A	21-Mar-2022	5.91000%	IDR	3,342,000,000,000
10	SDHI-2022B	11-Feb-2022	8.75000%	IDR	2,000,000,000,000
11	SDHI-2024A	11-Feb-2024	9.04000%	IDR	2,000,000,000,000
12	SDHI-2029A	25-Mar-2029	8.43000%	IDR	1,000,000,000,000
13	SDHI-2029B	13-Aug-2029	8.62000%	IDR	2,855,000,000,000
14	SDHI2019C	27-Apr-2019	7.20000%	IDR	1,000,000,000,000
15	SDHI2020D	29-Jun-2020	8.20000%	IDR	1,000,000,000,000
16	SDHI2020E	21-Mar-2020	7.14000%	IDR	2,000,000,000,000
17	SDHI2023A	04-Nov-2023	8.82000%	IDR	1,500,000,000,000
18	SDHI2025A	08-Jul-2025	8.30000%	IDR	2,000,000,000,000
Jumlah				IDR	36,697,000,000,000

Grafik 19. Struktur *Outstanding* SBSN seri SDHI per 31 Desember 2017



Grafik 20. Struktur Jatuh Tempo SBSN seri SDHI per 31 Desember 2017



II. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valuta Asing (Valas)

Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal

mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan berbagai pertimbangan seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional dengan mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

Sampai dengan akhir tahun 2017, terdapat 53 seri SBN valas dengan 36 seri memiliki denominasi USD (termasuk SUN domestik yang berdenominasi valas) ,11 seri dengan denominasi JPY dan 6 Seri berdenominasi EURO. Data outstanding SBN valas disajikan dalam tabel 19 berikut.

Tabel 19. *Outstanding* dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2017

No	Series	Maturity Date	Coupon	Outstanding	
A. GOVERNMENT DEBT SECURITIES					
US Dollar Denominated					
Fixed Coupon					
1	RI0018	17-Jan-2018	6.87500%	USD	1,900,000,000
2	RI00190304	04-Mar-2019	11.62500%	USD	2,000,000,000
3	RI0035	12-Oct-2035	8.50000%	USD	1,600,000,000
4	RI0037	17-Feb-2037	6.62500%	USD	1,500,000,000
5	RI0038	17-Jan-2038	7.75000%	USD	2,000,000,000
6	RI0122	08-Jan-2022	3.70000%	USD	750,000,000
7	RI0123	11-Jan-2023	2.95000%	USD	1,000,000,000
8	RI0124	15-Jan-2024	5.87500%	USD	2,000,000,000
9	RI0125	15-Jan-2025	4.12500%	USD	2,000,000,000
10	RI0126	08-Jan-2026	4.75000%	USD	2,250,000,000
11	RI0127	08-Jan-2027	4.35000%	USD	1,250,000,000
12	RI0128	11-Jan-2028	3.50000%	USD	1,250,000,000
13	RI0142	17-Jan-2042	5.25000%	USD	2,250,000,000
14	RI0144	15-Jan-2044	6.75000%	USD	2,000,000,000
15	RI0145	15-Jan-2045	5.12500%	USD	2,000,000,000
16	RI0146	08-Jan-2046	5.95000%	USD	1,250,000,000
17	RI0147	08-Jan-2047	5.25000%	USD	1,500,000,000
18	RI0148	11-Jan-2048	4.35000%	USD	1,750,000,000
19	RI0320	13-Mar-2020	5.87500%	USD	2,000,000,000
20	RI0422	25-Apr-2022	3.75000%	USD	2,000,000,000
21	RI0423	15-Apr-2023	3.37500%	USD	1,500,000,000
22	RI0443	15-Apr-2043	4.62500%	USD	1,500,000,000
23	RI0521	05-May-2021	4.87500%	USD	2,500,000,000
24	RI0727	18-Jul-2027	3.85000%	USD	1,000,000,000
25	RI0747	18-Jul-2047	4.75000%	USD	1,000,000,000
26	RI1023	17-Oct-2023	5.37500%	USD	1,000,000,000
27	USDFR0002	24-Jun-2026	4.05000%	USD	200,000,000
Total Fixed Coupon				USD	42,950,000,000
Total US Dollar Denominated *)				IDR	581,886,600,000,000
Japan Yen Denominated					
Fixed Coupon					
28	RIJPY0619	21-Jun-2019	0.83000%	JPY	62,000,000,000
29	RIJPY0620	08-Jun-2020	0.65000%	JPY	40,000,000,000
30	RIJPY0621	21-Jun-2021	1.16000%	JPY	38,000,000,000
31	RIJPY0622	08-Jun-2022	0.89000%	JPY	50,000,000,000
32	RIJPY0624	07-Jun-2024	1.04000%	JPY	10,000,000,000
33	RIJPY0719	29-Jul-2019	2.73000%	JPY	35,000,000,000
34	RIJPY0818	13-Aug-2018	1.08000%	JPY	22,500,000,000
35	RIJPY0820	13-Aug-2020	1.38000%	JPY	22,500,000,000
36	RIJPY0825	13-Aug-2025	0.91000%	JPY	55,000,000,000
37	RIJPY1120	12-Nov-2020	1.60000%	JPY	60,000,000,000
38	RIJPY1122	22-Nov-2022	1.13000%	JPY	60,000,000,000
Total Fixed Coupon				JPY	455,000,000,000
Total Japan Yen Denominated *)				IDR	54,699,372,000,000
Euro Denominated					
Fixed Coupon					
39	EURFRNT0001	26-Apr-2020	0.90000%	EUR	50,000,000
40	RIEUR0623	14-Jun-2023	2.62500%	EUR	1,500,000,000
41	RIEUR0628	14-Jun-2028	3.75000%	EUR	1,500,000,000
42	RIEUR0721	08-Jul-2021	2.87500%	EUR	1,000,000,000
43	RIEUR0724	18-Jul-2024	2.15000%	EUR	1,000,000,000
44	RIEUR0725	30-Jul-2025	3.37500%	EUR	1,250,000,000
Total Fixed Coupon				EUR	6,300,000,000
Total Euro Denominated *)				IDR	101,893,806,000,000
TOTAL GOVERNMENT DEBT SECURITIES (A)				IDR	738,479,778,000,000
B. GOVERNMENT ISLAMIC DEBT SECURITIES					
US Dollar Denominated					
Fixed Coupon					
45	SNI0322	29-Mar-2022	3.40000%	USD	1,000,000,000
46	SNI0327	29-Mar-2027	4.15000%	USD	2,000,000,000
47	SNI118	21-Nov-2018	4.00000%	USD	1,000,000,000
48	SNI119	15-Mar-2019	6.12500%	USD	1,500,000,000
49	SNI121	29-Mar-2021	3.40000%	USD	750,000,000
50	SNI122	21-Nov-2022	3.30000%	USD	1,000,000,000
51	SNI124	10-Sep-2024	4.35000%	USD	1,500,000,000
52	SNI125	28-May-2025	4.32500%	USD	2,000,000,000
53	SNI126	29-Mar-2026	4.55000%	USD	1,750,000,000
Total Fixed Coupon				USD	12,500,000,000
Total US Dollar Denominated *)				IDR	169,350,000,000,000
TOTAL GOVERNMENT ISLAMIC DEBT SECURITIES (B)				IDR	169,350,000,000,000
GRAND TOTAL (A + B)				IDR	907,829,778,000,000
Notes:					
1) Assumed exchange rate for conversion (IDR/USD) is 13,548.00					
Assumed exchange rate for conversion (IDR/JPY) is 120.2184					
Assumed exchange rate for conversion (IDR/EUR) is 16,173.62					

III. MUTASI SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2017

Surat Berharga Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN tahun 2017 adalah sebagaimana disajikan pada tabel 20.

Tabel 20. Mutasi Principle *Outstanding* SBN Tahun 2017

Saldo awal Th 2016 (<i>Original Currency</i>)	Mutasi 2017		Saldo Akhir tahun 2017 (<i>Original Currency</i>)	Saldo Akhir 2017 (Rupiah)
	Penerimaan	Pembayaran		
a	b	c	d	e
IDR 2,014,026,668,541,450.00	IDR 578,309,217,000,000.00	IDR 251,232,987,592,954.00	IDR 2,341,102,897,948,500.00	2,341,102,897,948,500.00
USD 44,990,000,000.00	USD 8,500,000,000.00	USD 2,040,000,000.00	USD 51,450,000,000.00	697,044,600,000,000.00
JPY 355,000,000,000.00	JPY 100,000,000,000.00	0.00	JPY 455,000,000,000.00	54,699,372,000,000.00
EUR 5,250,000,000.00	EUR 1,050,000,000.00	0.00	EUR 6,300,000,000.00	101,893,806,000,000.00
Jumlah				3,194,740,675,948,500.00

Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2016 USD = 13.436,00 JPY = 115,40 EUR = 14.161,55

Kurs Tengah BI tgl 31 Desember 2017 USD = 13.548,00 JPY = 120,22 EUR = 16.173,62

VII. Penutup

Demikianlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan SBN ini dibuat dalam rangka pemenuhan amanat sebagaimana dituangkan pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan dilampirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Besar harapan Pemerintah agar masyarakat juga dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara, sesuai komitmen Pemerintah untuk mengelola sektor keuangan yang transparan, profesional dan bertanggung jawab.



**Pemerintah Republik Indonesia
Kementerian Keuangan
Jalan Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat**

